

PERNYATAAN

Dokumen informasi hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya, terdiri dari :

1. Laporan Keuangan Konsolidasian oleh auditor eksternal.
2. Hasil asesmen Penerapan Faktor Environment, Social, and Governance (ESG).
3. Hasil penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG).
4. Hasil perhitungan Tingkat Kesehatan BUMN .

Bandung, 28 Agustus 2023
Atasan PPID PT Kereta Api Indonesia (Persero)
VP Public Relations,



JONI MARTINUS
NIPP. 40790



**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

**Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
Beserta Laporan Auditor Independen/**

*Consolidated Financial Statements For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
With Independent Auditor's Report*

Daftar Isi	<u>Halaman/ Pages</u>	<i>Table of Contents</i>
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020		<i>Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2022, 2021 and 2020</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	7	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022, 2021, AND 2020
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We the undersigned:

1. Nama	:	Didiek Hartantyo	:	Name
Alamat kantor	:	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Bandung	:	Office address
Alamat rumah	:	Taman Lebak Bulus III No.5 Cilandak, Jakarta Selatan	:	Residential address
Telepon	:	+62 22 4230031	:	Telephone
Jabatan	:	Direktur Utama / <i>President Director</i>	:	Title
2. Nama	:	Salusra Wijaya	:	Name
Alamat kantor	:	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Bandung	:	Office address
Alamat rumah	:	Jl. Turi III No 11 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	:	Residential address
Telepon	:	+62 22 4230039	:	Telephone
Jabatan	:	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / <i>Director of Finance and Risk Management</i>	:	Title

menyatakan bahwa:

declare that:

- | | |
|--|--|
| 1 Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("Perusahaan") dan Entitas Anaknya; | 1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("Company") and Its Subsidiaries;</i> |
| 2 Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. <i>The consolidated financial statements of Company and Its Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i> |
| 3 a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. <i>All information in consolidated financial statements of Company and Its Subsidiaries have been disclosed in a complete and truthful manner;</i> |
| b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. <i>The consolidated financial statements of Company and Its Subsidiaries do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;</i> |
| 4 Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan dan Entitas Anaknya. | 4. <i>We are responsible for the Company and Its Subsidiaries's internal control system.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi / *For and on behalf of the Board of Directors*

Bandung, 29 Mei 2023 / *May 29, 2023*



Didiek Hartantyo
Direktur Utama / President Director

Salusra Wijaya
*Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko /
Director of Finance and Risk Management*

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

Nomor/Number : 00635/2.1030/AU.1/06/0645-1/1/V/2023

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners, and Directors

www.rsm.id

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tbk and its Subsidiaries ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2022, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2022, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Track Access Charge ("TAC") dan Infrastructure Maintenance Operation ("IMO")

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang transportasi khususnya perkeretaapian. Dalam menjalankan aktivitas tersebut, Perusahaan menggunakan prasarana perkeretaapian milik Pemerintah. Sesuai peraturan yang berlaku, Grup memiliki liabilitas atas penggunaan prasarana tersebut kepada Pemerintah berupa biaya TAC.

Sebelum tahun 2022, biaya TAC tersebut dihitung mengikuti formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan ("PP 15/2016"). Pada akhir tahun 2021, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.138 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan ("PMK 138/2021") dan berlaku sejak 1 Januari 2022. Penerapan PMK 138/2021 tersebut menggunakan formula yang menyebabkan hasil perhitungan biaya TAC menjadi berbeda dibandingkan menggunakan PP 15/2016. Sebagai akibatnya, terdapat perbedaan nilai TAC yang signifikan antara hasil asesmen internal Grup dengan nilai yang ditagihkan oleh Kementerian Perhubungan (dalam hal ini Direktorat Jenderal Kereta Api – DJKA). Namun atas perbedaan ini, manajemen Grup telah dapat menyelesaikannya di periode setelah tanggal pelaporan keuangan.

Grup telah melakukan sejumlah analisis untuk pemenuhan persyaratan utama mengenai kriteria pengakuan dan pengukuran kewajiban, provisi atau liabilitas kontinjensi mengenai besaran TAC yang harus dibukukan pada periode berjalan. Selain itu, Grup, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan akan terus berkoordinasi untuk memperbaiki tata kelola TAC dan IMO, sehingga tidak terjadi lagi perbedaan interpretasi dan perhitungan biaya TAC di periode mendatang.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Track Access Charge ("TAC") and Infrastructure Maintenance Operation ("IMO")

In accordance with the Company's Articles of Association, the purpose and objective of the Company are to conduct business in the transportation sector, especially railways. In conducting its activities, the Company uses government-owned railway infrastructure. In accordance with applicable regulations, the Group has an obligation for the use of the infrastructure to the Government in the form of TAC fees.

Before 2022, the TAC fee is calculated based on the formula set out in Government Regulation No. 15 year 2016 concerning Types and Tariffs for Eligible Types of Non-Tax State Revenue at the Ministry of Transportation ("PP 15/2016"). At the end of 2021, the Minister of Finance issued Minister of Finance Regulation No. 138 year 2021 concerning Types and Tariffs for Non-Tax State Revenues that are Volatile in Nature and for Urgent Needs that Applicable at the Ministry of Transportation ("PMK 138/2021") and effective from January 1, 2022. The implementation of PMK 138/2021 uses a formula which causes the results of calculating the TAC fee to be different compared to using PP 15/2016. As a result, there is a significant difference in the TAC value between the Group's internal assessment results and the value billed by the Ministry of Transportation (in this case the Directorate General of Railways – DJKA). However, for this difference, the Group's management has resolved it in the period after the financial reporting date.

The Group has conducted a number of analyzes to fulfill the main requirements regarding the criteria for recognition and measurement of liabilities, provisions or contingent liabilities regarding the amount of TAC fee that should be recorded in the current period. In addition, the Group, the Ministry of Transportation and the Ministry of Finance will continue to coordinate to improve the governance of TAC and IMO, therefore, there will be no more differences in interpretation and calculation of TAC fee in the coming period.

Prosedur audit kami mencakup, antara lain, melakukan:

- Pemahaman dan pengevaluasian desain dan implementasi pengendalian internal grup terkait proses pengestimasian biaya TAC;
- Pengujian substantif bagaimana manajemen menghitung biaya TAC berdasarkan peraturan yang berlaku, meliputi pengujian terhadap relevansi dan kehandalan data yang digunakan, ketepatan penggunaan metode dan konsistensi asumsi yang mendasari estimasi tersebut;
- Pengujian akurasi perhitungan biaya TAC;
- Diskusi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan terkait mengenai perhitungan biaya TAC dan penerapan PMK 138/2021;
- Evaluasi perubahan keadaan dan kejadian setelah tanggal pengukuran biaya TAC hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan;
- Pengevaluasian kecukupan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Pengungkapan Grup mengenai TAC ini dijelaskan dalam Catatan 3.x, 23, 39, 41, dan 51.a atas laporan keuangan konsolidasian.

Pengukuran Investasi di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia ("PSBI")

Pada 31 Desember 2022 Perusahaan memiliki investasi pada PSBI dengan net investasi sebesar Rp6,2 triliun, atau sekitar 8,6% dari total aset Grup. PSBI merupakan perusahaan patungan konsorsium 4 Badan Usaha Milik Negara Indonesia ("BUMN"), yang merupakan penugasan Pemerintah berdasarkan Perpres No. 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta Dan Bandung. Lebih lanjut, PSBI bersama Beijing Yawan HSR Co.Ltd ("Beijing Yawan") telah mendirikan PT Kereta Cepat Indonesia China ("KCIC") dengan bisnis utama di sektor transportasi publik yaitu Kereta Cepat Jakarta – Bandung ("KCJB").

Nilai investasi awal proyek KCJB ditetapkan sebesar USD6,05 miliar atau sebesar Rp90,75 triliun. Pada tahun berjalan terdapat kondisi *rescheduling commercial operation date* ("COD") KCJB sehingga terjadi *cost overrun* sebesar USD1,21 milyar dan total investasi proyek KCJB meningkat menjadi USD7,26 miliar (ekuivalen Rp108,9 triliun, asumsi Rp15.000/USD). Selanjutnya, secara prinsip telah tercapai kesepakatan bersama atas skema pendanaan *cost overrun* tersebut diantaranya dengan Penyertaan Modal Negara ("PMN") melalui Perusahaan. Kondisi tersebut secara tidak langsung akan memengaruhi nilai tercatat investasi Perusahaan di PSBI.

Our audit procedures include, among others, conducting:

- *Understanding and evaluating the design and implementation of group internal controls regarding the process for estimating the TAC fee;*
- *Substantive testing of how the management calculates TAC fee based on applicable regulations, including testing of the relevance and reliability of the data used, the accuracy of the method used and the consistency of the assumptions on which the estimate are based;*
- *Testing the accuracy of TAC fee calculations;*
- *Discussions and consultations with relevant stakeholders regarding TAC fee calculations and implementation of PMK 138/2021;*
- *Evaluation of changes in circumstances and events after the TAC fee measurement date to the issuance date of these consolidated financial statements;*
- *Evaluation of the adequacy of disclosures in the notes to the consolidated financial statements.*

The Group's disclosures regarding the TAC are explained in Notes 3.x, 23, 39, 41 and 51.a to the consolidated financial statements.

Measurement of Investment in PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia ("PSBI")

As of December 31, 2022 the Company has an investment in PSBI with a net investment of Rp6.2 trillion, or around 8.6% of the Group's total assets. PSBI is a joint venture company with a consortium of 4 Indonesian State-Owned Enterprises ("BUMN"), which is an assignment from the Government based on Presidential Decree No. 93 year 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 107 Year 2015 concerning the Acceleration of Implementation of High-Speed Train Infrastructure and Facilities Between Jakarta and Bandung. Furthermore, PSBI with Beijing Yawan HSR Co. Ltd ("Beijing Yawan") has established PT Kereta Api Indonesia China ("KCIC") with the main business in the public transportation sector, namely the Jakarta – Bandung High-Speed Train ("KCJB").

The initial investment value for the KCJB project is set at USD6.05 billion or Rp90.75 trillion. In the current year there is a condition of rescheduling the commercial operation date ("COD") resulting in a cost overrun of USD1.21 billion and the total KCJB project investment increased to USD7.26 billion (equivalent to Rp108.9 trillion, assuming IDR 15,000/USD). Furthermore, in principle a mutual agreement has been reached on the cost overrun funding scheme, including State Equity Participation ("PMN") through the Company. These conditions will indirectly affect the carrying value of the Company's investment in PSBI.

Prosedur audit kami mencakup, antara lain, melakukan:

- Pemahaman dan pengevaluasian desain dan implementasi pengendalian internal Perusahaan terkait pengukuran investasi PSBI;
- Pengujian substantif, dengan dibantu pakar auditor, terkait dengan bagaimana manajemen menghitung nilai wajar investasi PSBI yang meliputi pengujian terhadap relevansi dan kehandalan data yang digunakan, ketepatan penggunaan metode dan konsistensi asumsi yang mendasari estimasi tersebut;
- Pengujian akurasi pengukuran nilai wajar investasi PSBI;
- Evaluasi perubahan keadaan dan kejadian setelah tanggal pengukuran nilai wajar investasi PSBI hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan;
- Pengevaluasian kecukupan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Pengungkapan Grup mengenai investasi PSBI ini dijelaskan dalam Catatan 9, 12, 41, 44, 49, 52 dan 53 atas laporan keuangan konsolidasian.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan tepat yang akan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Our audit procedures include, among others, conducting:

- *Understanding and evaluating the design and implementation of the Company's internal controls related to PSBI investment measurement;*
- *Substantive testing, assisted by an auditor expert, related to how management calculates the fair value of the PSBI investment which includes testing the relevance and reliability of the data used, the accuracy of the method used and the consistency of the assumptions underlying the estimate;*
- *Testing the accuracy of measuring the fair value of PSBI investments;*
- *Evaluation of changes in circumstances and events after the date of measurement of the fair value of the PSBI investment to the issuance date of these consolidated financial statements;*
- *Evaluation of the adequacy of disclosure in the notes to the consolidated financial statements.*

The Group's disclosures regarding PSBI investments are explained in Notes 9, 12, 41, 44, 49, 52 and 53 to the consolidated financial statements.

Other information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information contained in the annual report, but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dan suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
 - Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
 - Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
 - Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
 - Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We Also:*
- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
 - *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
 - *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
 - *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
 - *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

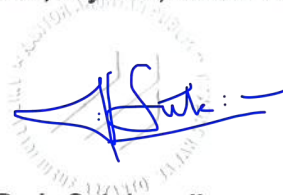
Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tahun kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current year and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Dedy Sukrisnadi

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0645/
Public Accountant License Number: AP.0645

Jakarta, 29 Mei 2023/May 29, 2023



**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF FINANCIAL POSITION**
As of December 31, 2022, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021*)	2020*)	
ASET					ASSET
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	3.f, 3.g, 3.h, 3.y, 6, 41	5.695.720.193	3.808.203.932	6.609.296.498	Cash and Cash Equivalents
Dana Dibatasi Penggunaannya	3.f, 3.g, 3.i, 3.y, 7, 41	5.610.385.976	2.748.463.918	178.268.297	Restricted Funds
Piutang Usaha					Trade Receivables
Pihak Berelasi	3.f, 3.g, 3.j, 3.y, 8, 41	934.629.745	678.094.695	115.251.183	Related Parties
Pihak Ketiga	3.j, 3.y, 8	471.708.322	397.003.778	334.569.549	Third Parties
Piutang Lain-lain	3.g, 3.y, 9, 41	90.003.063	74.670.546	55.799.186	Other Receivables
Persediaan	3.k, 10	1.145.313.941	893.780.639	912.156.310	Inventories
Pendapatan Masih Akan Diterima	3.g, 3.y, 11, 41	939.616.971	239.054.610	242.183.243	Accrued Income
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	3.l, 12.a	120.303.174	278.955.141	229.092.824	Advances and Prepaid Expenses
Pajak Dibayar di Muka	3.s, 13.a	303.896.017	572.701.539	469.473.998	Prepaid Taxes
Aset Lancar Lainnya	14	26.370.549	15.752.718	18.409.323	Other Current Assets
JUMLAH ASET LANCAR		15.337.947.951	9.706.681.516	9.164.500.411	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Piutang Lain-lain	3.f, 3.g, 3.j, 3.y, 8, 41	--	--	2.155.464.293	Other Receivable
Uang Muka Jangka Panjang	12.b	20.640.157	6.772.694.898	--	Long-Term Advances
Investasi Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	3.d, 3.e, 15.a	6.315.362.037	108.436.459	123.614.046	Investment in Associates and Joint Ventures
Investasi Jangka Panjang	3.y, 15.b	24.176.000	54.853.000	53.080.000	Long Term Investment
Aset Pajak Tangguhan	3.s, 13.e	1.432.778.568	1.993.302.912	1.688.016.538	Deferred Tax Assets
Aset Tetap	3.n, 16	23.924.692.897	22.860.962.080	21.334.625.651	Fixed Assets
Properti Investasi	3.m, 17	126.085.555	96.379.618	94.421.989	Investment Properties
Hak Pengoperasian Aset Prasarana	3.p, 3.o, 18	23.736.944.016	20.503.150.402	17.816.065.535	Infrastructure Assets Operating Rights
Aset Takberwujud	3.aa, 19	422.760.902	366.773.277	347.477.934	Intangible Assets
Aset Hak Guna	3.u, 20	53.116.074	67.419.354	97.223.505	Right of Use Asset
Aset Tidak Lancar Lainnya	21	186.725.566	185.736.405	280.142.249	Other Non-Current Assets
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		56.243.281.772	53.009.708.405	43.990.131.740	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
JUMLAH ASET		71.581.229.723	62.716.389.921	53.154.632.151	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha					Trade Payables
Pihak Berelasi	3.g, 3.y, 22, 41	880.714.681	473.426.130	254.842.738	Related Parties
Pihak Ketiga	3.f, 3.y, 22	1.578.171.487	1.192.602.860	1.002.751.153	Third Parties
Beban Akrual	3.cc, 3.y, 23	1.572.961.926	1.431.722.644	1.993.429.314	Accruals
Utang Pajak	3.s, 13.b	309.332.730	339.548.542	302.470.230	Taxes Payable
Liabilitas Sewa	3.u, 20	16.563.637	29.372.889	28.043.424	Lease Liabilities
Pendapatan Diterima di Muka	3.r, 24	1.144.639.451	832.780.956	713.582.398	Unearned Revenue
Liabilitas Imbalan Kerja	3.v, 27.a	962.743.057	586.133.884	254.538.317	Employee Benefits Liabilities
Pinjaman Bank Jangka Pendek	3.g, 3.y, 25, 41	1.760.000.000	2.659.962.173	3.415.206.865	Short-Term Bank Loans
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun					Current Maturities of Long-Term Liabilities
Pinjaman Jangka Panjang	3.f, 3.g, 3.y, 29, 41	1.196.958.601	934.991.570	1.219.934.024	Long Term Loans
Pinjaman Program PEN	3.y, 28	437.500.000	--	--	PEN Program Loan
Utang Obligasi	3.y, 30	--	999.447.166	--	Bonds Payable
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	26	98.538.290	94.310.944	96.817.882	Other Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		9.958.123.860	9.574.299.758	9.281.616.345	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Sewa	3.u, 20	44.599.263	52.772.546	77.113.909	Lease Liabilities
Pendapatan Diterima di Muka	3.r, 24	837.174.293	776.100.393	820.475.982	Unearned Revenue
Liabilitas Imbalan Kerja	3.v, 27.b	5.197.151.974	5.581.424.489	4.811.693.936	Employee Benefits Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun					Long-Term Liabilities - Net of Current Maturities
Pinjaman Jangka Panjang	3.f, 3.g, 3.y, 29, 41	18.282.631.817	16.501.746.512	13.212.721.025	Long-Term Loans
Pinjaman Program PEN	3.y, 28	3.062.500.000	3.500.000.000	3.500.000.000	PEN Program Loan
Utang Obligasi	3.y, 30	4.490.760.381	2.993.800.573	3.990.924.392	Bonds Payable
Sukuk	3.y, 31	498.307.111	--	--	Sukuk
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	32	129.796.719	138.592.858	234.194.593	Other Long-Term Liabilities
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		32.542.921.558	29.544.437.371	26.647.123.837	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
JUMLAH LIABILITAS		42.501.045.418	39.118.737.129	35.928.740.182	TOTAL LIABILITIES

*) Disajikan Kembali, Catatan 54

*) As Restated, Note 54

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF FINANCIAL POSITION (Continued)**
As of December 31, 2022, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021*)	2020*)	
EKUITAS					EQUITY
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Entitas Induk					Equity Attributable to the Owner of the Parent Entity
Modal Saham					Share Capital
Nilai Nominal Rp1.000 per Saham					Rp1,000 Par Value per Shares
Modal Dasar Sebesar 40.000.000 Saham					Authorized Capital of 40,000,000 Shares
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar 19.168.743, serta per 1 Januari 2021/31 Desember 2020 sebesar 12.268.743 saham					Issued and Fully Paid as of December 2022 and 2021 amounted to 19,168,743, and as of January 1, 2021/ December 31, 2020 amounted to 12,268,743 shares, respectively
Tambahan Penyertaan Modal Negara	33	19.168.743.000	19.168.743.000	12.268.743.000	Additional of Government Capital Investment
Tambahan Modal Disetor	34.a	3.200.000.000	--	--	Additional Paid-in Capital
Saldo Laba	35	486.081	486.081	486.081	Retained Earnings
Komponen Ekuitas Lainnya					Other Components of Equity
Akumulasi Rugi Aktuarial atas Imbalan Kerja		(1.037.483.391)	(1.618.357.448)	(1.495.780.597)	Accumulated Losses on Employee Benefit
Selisih Likuidasi	36	968.135	968.135	968.135	Difference of Liquidation
Selisih Perubahan Ekuitas Entitas Anak	34.b	(24.069.720)	--	--	Difference in Transactions of Changes in Equity of Subsidiaries
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	3.c	28.987.730.399	23.448.885.585	17.033.922.509	Equity Attributable to Owner of the Parent Entity
Kepentingan Nonpengendali	3.c, 37	92.453.906	148.767.207	191.969.460	Non-Controlling Interests
JUMLAH EKUITAS		29.080.184.305	23.597.652.792	17.225.891.969	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		71.581.229.723	62.716.389.921	53.154.632.151	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
PENDAPATAN				REVENUES
Pendapatan Angkutan dan Usaha Lainnya	3.g, 3.w, 3.x, 38, 41	22.967.071.664	15.529.530.120	Transportation and Other Operating Revenues
Pendapatan Konstruksi	3.w, 18	2.610.567.346	2.387.245.804	Construction Revenue
Jumlah Pendapatan		25.577.639.010	17.916.775.924	Total Revenues
BEBAN POKOK PENDAPATAN				COST OF REVENUES
Beban Angkutan dan Usaha Lainnya	3.w, 3.x, 3.g, 39, 41	(15.930.293.675)	(12.762.060.746)	Transportation and Other Operating Costs
Beban Konstruksi	3.w, 18	(2.610.567.346)	(2.387.245.804)	Construction Cost
Jumlah Beban Pokok Pendapatan		(18.540.861.021)	(15.149.306.550)	Total Cost of Revenues
LABA BRUTO		7.036.777.989	2.767.469.374	GROSS PROFIT
Beban Usaha	3.w, 40	(3.664.532.070)	(2.543.050.490)	Operating Expenses
LABA USAHA		3.372.245.919	224.418.884	OPERATING PROFIT
Penghasilan Keuangan	3.w, 42	139.514.944	108.444.334	Finance Income
Bagian Rugi Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	3.d, 15	(267.504.227)	(9.495.748)	Share in Net Loss of Associates and Joint Ventures
Beban Keuangan	3.w, 43	(980.572.153)	(900.712.325)	Finance Cost
Selisih Kurs	3.f	42.673.710	(567.340)	Foreign Exchanges
Keuntungan (Kerugian) Lain-lain - Bersih	3.w, 44	(95.769.893)	30.931.669	Other Gains (Losses) - Net
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		2.210.588.300	(546.980.526)	INCOME (LOSS) BEFORE TAX
(Beban) Manfaat Pajak Penghasilan - Bersih	3.s, 13.d	(524.599.080)	121.784.883	(Expenses) Income Tax Benefit - Net
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		1.685.989.220	(425.195.643)	INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain yang Tidak Direklasifikasi ke Laba Rugi pada Periode Berikutnya:				Other Comprehensive Income (Loss) Not to be Reclassified to Profit or Loss Subsequently:
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti		746.347.332	(156.953.700)	Remeasurement of Defined Benefit Obligation
Efek Pajak Penghasilan Terkait	3.s, 13.e	(165.506.775)	34.348.460	Income Tax Effect
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - Setelah Pajak		580.840.557	(122.605.240)	Total Other Comprehensive Income (Loss) - Net of Tax
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		2.266.829.777	(547.800.883)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				INCOME (LOSS) FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk	3.c	1.782.040.477	(362.460.073)	Owner of the Parent Entity
Kepentingan Nonpengendali	3.c, 37	(96.051.257)	(62.735.570)	Non-Controlling Interest
JUMLAH		1.685.989.220	(425.195.643)	TOTAL
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk	3.c	2.362.914.534	(485.036.924)	Owner of the Parent Entity
Kepentingan Nonpengendali	3.c, 37	(96.084.757)	(62.763.959)	Non-Controlling Interest
JUMLAH		2.266.829.777	(547.800.883)	TOTAL
Laba (Rugi) per Saham Dasar	3.z, 45	93	(29)	Basic Earning (Loss) per Share

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to the Owner of the Parent Entity											
Catatan/ Note	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Paid-up Capital Stock	Penyertaan Modal Negara dalam Proses Penerbitan Saham/ State Equity Participation in Issuance Process	Tambahannya Modal Disetor/ Additional Paid-in capital	Saldo Labanya/ Retained Earnings	Komponen Ekuitas Lain/ Other Components of Equity			Jumlah/ Total	Kepentingan Nonpengendali/ Non-Controlling interest	Jumlah ekuitas/ Total Equity	
					Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti/ Remeasurement of Defined Benefit Obligation	Selisih Likuidasi/ Liquidating Differences	Selisih Perubahan Ekuitas Entitas Anak/ Difference in Transactions of Changes in Equity of Subsidiaries				
	12.268.743.000	--	486.081	6.085.704.817	(1.507.891.991)	968.135	--	16.848.010.042	191.969.460	17.039.979.502	Balance at December 31, 2020
Penyesuaian atas Atribusi Imbalan pada Periode Jasa	54	--	--	173.801.073	12.111.394	--	--	185.912.467	--	185.912.467	<i>Adjustment of Attribution of Benefits on Service Period</i>
	12.268.743.000	--	486.081	6.259.505.890	(1.495.780.597)	968.135	--	17.033.922.509	191.969.460	17.225.891.969	Balance at January 1, 2021*)
Penambahan Penyertaan Modal Negara dalam Proses Penerbitan Saham	33	6.900.000.000	--	--	--	--	--	6.900.000.000	--	6.900.000.000	<i>Additional on State Equity Equity Participation in Issuance Process</i>
Penambahan Modal pada Entitas Anak		--	--	--	--	--	--	--	19.760.000	19.760.000	<i>Additional Capital in Subsidiaries</i>
Dividen Entitas Anak		--	--	--	--	--	--	--	(198.294)	(198.294)	<i>Dividend of Subsidiaries</i>
Rugi Tahun Berjalan	35	--	--	(362.460.073)	--	--	--	(362.460.073)	(62.735.570)	(425.195.643)	<i>Loss For the Year</i>
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti		--	--	--	(122.576.851)	--	--	(122.576.851)	(28.389)	(122.605.240)	<i>Remeasurement of Defined Benefit Obligation</i>
	19.168.743.000	--	486.081	5.897.045.817	(1.618.357.448)	968.135	--	23.448.885.585	148.767.207	23.597.652.792	Balance at December 31, 2021*)
Penambahan Penyertaan Modal Negara dalam Proses Penerbitan Saham	34.a	--	3.200.000.000	--	--	--	--	3.200.000.000	--	3.200.000.000	<i>Additional on State Equity Equity Participation in Issuance Process</i>
Konversi Pinjaman Pemegang Saham		--	--	--	--	--	--	--	16.000.000	16.000.000	<i>Conversion of Shareholders Loan</i>
Penyesuaian atas Kepentingan Nonpengendali	34.b	--	--	--	--	--	--	(24.069.720)	24.069.720	--	<i>Adjustment of Non-Controlling Interest</i>
Dividen Entitas Anak		--	--	--	--	--	--	--	(298.264)	(298.264)	<i>Dividend of Subsidiaries</i>
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		--	--	1.782.040.477	--	--	--	1.782.040.477	(96.051.257)	1.685.989.220	<i>Income (Loss) For the Year</i>
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti		--	--	--	580.874.057	--	--	580.874.057	(33.500)	580.840.557	<i>Remeasurement of Defined Benefit Obligation</i>
	19.168.743.000	3.200.000.000	486.081	7.679.086.294	(1.037.483.391)	968.135	(24.069.720)	28.987.730.399	92.453.906	29.080.184.305	Balance at December 31, 2022

*) Disajikan Kembali, Catatan 54

*) As Restated, Note 54

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements as a whole

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
Arus Kas dari				Cash Flows from
Aktivitas Operasi				Operating Activities
Penerimaan Kas dari Pelanggan		18.291.269.386	10.843.449.947	Cash Receipts from Customers
Pembayaran kepada Pemasok		(9.701.299.798)	(7.995.549.108)	Payments to Suppliers
Pembayaran kepada Karyawan		(6.469.435.899)	(4.810.626.189)	Payments to Employees
Penerimaan dari Pemerintah		4.043.803.506	4.034.214.207	Receipts from Government
Pembayaran kepada Pemerintah		(221.003.573)	(414.889.721)	Payments to Government
Penerimaan Bunga		139.527.011	102.331.945	Receipts from Interest Income
Penerimaan Kas dari Restitusi Pajak	13.g	240.700.252	11.693.921	Cash Receipt from Tax Restitution
Pembayaran Pajak Penghasilan		(261.362.844)	(177.840.535)	Payment of Income Tax
Pembayaran Beban Keuangan		(900.937.342)	(869.512.150)	Payment of Finance Cost
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi		5.161.260.699	723.272.317	Net Cash Flow Provided by Operating Activities
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				Cash Flows from Investing Activities
Perolehan Aset Tetap	16, 52	(2.666.090.431)	(2.510.730.937)	Acquisitions of Fixed Assets
Perolehan Hak Pengoperasian Aset Prasarana	18, 52	(2.708.416.050)	(2.490.943.964)	Acquisitions of Infrastructure Assets
Penambahan Aset Takberwujud	19	(79.721.528)	(57.402.694)	Addition of Intangible Asset
Penempatan Uang Muka Setoran Modal	12	(791.878.657)	(4.453.650.790)	Placement of Paid-up Capital Advance
Penempatan Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	15a	(4.900.000)	(4.276.046)	Placement Investment in Associate and Joint Venture
Penerimaan Bunga Pinjaman dari Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	9, 41, 52	791.878.657	--	Receipts Loan Interest from Associate and Joint Venture
Penerimaan Dividen dari Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	15a	688.262	1.642.492	Dividend Receipts from Associate and Joint Venture
Penempatan Dana Dibatasi Penggunaannya	7	(2.860.752.138)	(2.625.063.819)	Placement of Restricted Fund
Penarikan Dana Dibatasi Penggunaannya	7	--	53.723.486	Drawdown of Restricted Fund
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(8.319.191.885)	(12.086.702.272)	Net Cash Flows Used in Investing Activities
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				Cash Flows from Financing Activities
Penerimaan Pinjaman Bank Jangka Pendek	25, 52	13.706.510.355	6.902.258.308	Receipts from Short-Term Bank Loans
Penerimaan Pinjaman Bank Jangka Panjang	29, 52	2.654.659.751	2.806.736.985	Receipts from Long-Term Bank Loans
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Pendek	25, 52	(14.606.472.528)	(7.657.502.999)	Payment from Short-Term Bank Loans
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Panjang	29, 52	(941.505.589)	(381.327.501)	Payment from Long-Term Bank Loans
Pembayaran Liabilitas Sewa		(37.190.355)	(26.886.581)	Payment of Lease Liabilities
Penerimaan Obligasi	30	1.500.000.000	--	Receipts from Bonds
Penerimaan Sukuk	31	500.000.000	--	Receipts from Sukuk
Pembayaran Obligasi	30	(1.000.000.000)	--	Repayment of Bonds
Pembayaran Biaya Emisi Obligasi	52	(5.041.083)	--	Payment of Issuance Costs Bonds
Pembayaran Biaya Emisi Sukuk	52	(1.785.917)	--	Payment of Issuance Costs Sukuk
Penerimaan Penyertaan Modal Negara	33, 34	3.200.000.000	6.900.000.000	Addition of Government Capital
Penerimaan Pinjaman Kepentingan Nonpengendali		33.897.363	--	Loans addition of Non-Controlling Interest
Tambahan Setoran Modal Kepentingan Nonpengendali		--	19.760.000	Capital Addition of Non-Controlling Interest
Pembayaran Dividen Entitas Anak		(298.264)	(198.294)	Payments of Dividends of Subsidiaries
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		5.002.773.733	8.562.839.918	Net Cash Flows Provided by Financing Activities

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS**
For the Years Ended Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas		1.844.842.547	(2.800.590.037)	Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas				Cash and Cash Equivalents at the
Awal Tahun		3.808.203.932	6.609.296.498	Beginning Year
Selisih Kurs				Foreign Exchange Rate
Kas dan Setara Kas		42.673.714	(567.340)	Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun		5.695.720.193	3.808.139.121	Cash and Cash Equivalents at the End Year
Rekonsiliasi Jumlah Kas dan Setara Kas				Reconciliation of Total Cash and Cash Equivalent
Jumlah yang Dilaporkan pada Laporan Arus Kas		5.695.720.193	3.808.139.121	Amount as Reported in Statement of Cash Flow
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai				Allowance for Impairment Losses of Cash and Cash Equivalent
Kas dan Setara Kas	6	--	64.811	
Jumlah yang Dilaporkan pada Laporan Posisi Keuangan	6	5.695.720.193	3.808.203.932	Amount as Reported in Statement of Financial Position

Informasi tambahan terkait arus kas disajikan pada Catatan 52.

Additional information related to cash flows is presented in Note 52.

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("Perusahaan") mulanya merupakan bagian dari gabungan Perusahaan Asing Milik Belanda yang bergerak disektor perkeretaapian, didirikan dan beroperasi secara komersial pada tahun 1864 di wilayah Jawa dan Sumatera. Pada tahun 1963 secara resmi didirikan/dibentuk Perusahaan Negara yang bergerak disektor perkeretaapian berdasarkan Peraturan Pemerintah No 22 tahun 1963, dari 12 Perusahaan Asing Kereta Api Milik Belanda yang dinasionalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. (Peraturan Pemerintah No 40 dan No 41 tahun 1959).

PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 1 Juni 1999 dengan Akta Notaris No. 2 dari Notaris Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang disempurnakan dengan Akta Notaris No. 14 tanggal 13 September 1999 dari notaris yang sama, akta-akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-17171 HT.01.01.TH.99 tanggal 1 Oktober 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 Tambahan No. 240/2000 tanggal 14 Januari 2000.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang dicatat dalam Akta No. 278 tanggal 31 Desember 2021 dari Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Bandung tentang peningkatan modal dasar perusahaan. Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-01.03-0494898 tanggal 31 Desember 2021.

Perusahaan berkantor pusat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Bandung.

Seluruh saham Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia

1. General

a. Establishment and General Information

PT Kereta Api Indonesia (Persero) (the "Company") was originally part of combination Dutch-owned foreign company engaged in the railway sector, was established and operated commercially in 1864 in Java and Sumatra. In 1963 officially established/formed a State Company engaged in the railway sector based on Government Regulation No. 22 of 1963, from 12 Dutch-owned foreign railway companies nationalized by the Government of the Republic of Indonesia. (Government Regulation No. 40 and No. 41/1959).

PT Kereta Api Indonesia (Persero) (the Company), was established based on Notarial Deed No. 2 dated June 1, 1999 of Imas Fatimah, S.H., Notary in Jakarta, and amended with Notarial Deed No. 14 dated September 13, 1999 of Imas Fatimah, S.H., in Jakarta. These deeds were approved by the Minister of Law of Republic of Indonesia as stated on his Decision Letter No. C-17171 HT.01.01.TH.99 dated October 01, 1999 and was published in State Gazette of Republic of Indonesia No. 4 Supplement No. 240/2000 dated January 14, 2000.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Statement of Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) in lieu of the Company General Meeting of Shareholders of PT Kereta Api Indonesia (Persero) according to Deed No. 278 dated December 31, 2021 of Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notary in Bandung regarding increase of authorized capital. The Deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decision Letter No. AHU-01.03-0494898 dated December 31, 2021.

The Company's head office is located at Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Bandung.

The Company's shares of stock are wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia.

1. Umum (Lanjutan)

b. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan perusahaan adalah melakukan usaha di bidang transportasi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang meliputi pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan prasarana perkeretaapian yang mencakup pada kegiatan usaha:
 - a) Konstruksi Gedung lainnya;
 - b) Konstruksi jalan rel;
 - c) Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over dan Underpass;
 - d) Konstruksi Terowongan;
 - e) Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi;
 - f) Instalasi Listrik;
 - g) Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api; dan
 - h) Aktivitas Stasiun Kereta Api.
- 2) Melakukan penyelenggaraan sarana perkeretaapian meliputi pengadaan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan sarana perkeretaapian yang mencakup pada kegiatan usaha:
 - a) Reparasi lokomotif dan gerbong kereta;
 - b) Angkutan jalan rel untuk penumpang;
 - c) Angkutan jalan rel untuk barang;
 - d) Angkutan jalan rel untuk perkotaan; dan
 - e) Angkutan jalan rel untuk wisata;

1. General (Continued)

b. Purposes and Objectives

According to Article 3 of the Company's Articles of Association, the purposes and objectives of the company are to operate a business in transportation sector, as well as to optimize the resources which owned by the company in order to produce highly competitive and high quality goods and/or services to obtain profit/enhance company value through applications of Limited Liability Company principles.

To achieve the above purposes and objectives, the company may perform these following activities:

- 1) Carrying out railway infrastructure that includes the construction, operation, maintenance, and business of railway infrastructure that includes business activities:
 - a) Construction of other buildings;
 - b) Construction of the rail road;
 - c) Construction of Civil Building Bridges, Overpasses, Fly Over and Underpasses;
 - d) Tunnel Construction;
 - e) Construction of Telecommunication Civil Buildings for Transportation Infrastructure;
 - f) Electrical Installation;
 - g) Railway Signal installation and telecommunications; and
 - h) Train Station activity;
- 2) Conduct the implementation of railway advice which includes the procurement, operation, maintenance, and business of railway facilities that include business activities:
 - a) Repairment locomotives and wagon;
 - b) Rail road transportation for passengers;
 - c) Rail road transportation for goods;
 - d) Rail road transportation for urban areas; and
 - e) Rail road transportation for tours;

1. Umum (Lanjutan)

- 3) Perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya;
- 4) Perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (*scrap*);
- 5) Aktivitas konsultasi transportasi;
- 6) Aktivitas konsultasi manajemen lainnya;
- 7) Kegiatan penunjang pendidikan;
- 8) Penanganan kargo (bongkar muat barang);
- 9) Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA dan EAD);
- 10) Angkutan multimoda;
- 11) Aktivitas agen perjalanan lainnya;
- 12) Pendidikan lainnya swasta;
- 13) Pendidikan kesehatan swasta;
- 14) Pendidikan dan pelatihan di bidang perkeretaapian;
- 15) Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
- 16) Usaha jasa pertambangan;
- 17) *Real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa; dan
- 18) Kerjasama peningkatan akses stasiun kereta api yang bersinggungan dengan lahan milik pihak lain untuk dikembangkan dengan konsep terhubung dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dan mendukung peningkatan pelayanan penumpang.

Selain kegiatan usaha utama, perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:

- 1) Pergudangan dan penyimpanan;
- 2) Aktivitas *cold storage*;
- 3) Aktivitas *bounded warehousing* atau wilayah kawasan berikat;
- 4) Pergudangan dan penyimpanan lainnya;
- 5) Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut;
- 6) Aktivitas pelayanan kepelabuhan sungai dan danau;
- 7) Angkutan melalui saluran pipa;
- 8) Konstruksi sentral telekomunikasi;
- 9) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah lainnya;
- 10) Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri;

1. General (Continued)

- 3) *Large trade in land transportation (exclude cars, motorcycles, and others), spare parts and equipment ;*
- 4) *Large trade in used and unused goods (scrap);*
- 5) *Transportation consulting activities;*
- 6) *Other management consulting activities;*
- 7) *Educational support activities;*
- 8) *Cargo handling (goods's loading and unloading);*
- 9) *Railway Cargo Expedition activities and Land Transport Expeditions (EMKA and EAD);*
- 10) *Multimode transportation;*
- 11) *Other travel agents's activities;*
- 12) *Other private education;*
- 13) *Private health education;*
- 14) *Education and training in the railways areas;*
- 15) *Supporting activities of mining and other excavations;*
- 16) *Mining services;*
- 17) *Self-owned or leased real estate; and*
- 18) *Improvement at access to railway stations that intersect by other parties with the concept of connecting in order to increase value added for the company and improvement of passenger services.*

Other than its core business, the company may perform its activities to optimize the resource which are owned by the Company to:

- 1) *Warehousing and storage;*
- 2) *Cold storage activities;*
- 3) *Bounded warehousing activities or bonded area areas;*
- 4) *Warehousing and other storage;*
- 5) *Marine service activities;*
- 6) *Service activities of river and lake facilities;*
- 7) *Transportation pipelines;*
- 8) *Central construction of telecommunications;*
- 9) *Construction of irrigation networks, communication and other waste;*
- 10) *Special telecommunication activities for internal purposes;*

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

- 11) Aktivitas pengolahan data;
- 12) *Portal web* dan/atau *platform* digital dengan tujuan komersial;
- 13) Konstruksi Gedung Hunian;
- 14) Konstruksi Gedung Perkantoran;
- 15) Konstruksi Gedung Perbelanjaan;
- 16) Konstruksi Gedung Penginapan;
- 17) Instalasi Mekanikal;
- 18) Instalasi konstruksi lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain;
- 19) Periklanan;
- 20) Aktivitas klinik swasta;
- 21) Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi;
- 22) Perdagangan eceran barang obat farmasi untuk manusia di apotik;
- 23) Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan;
- 24) Konstruksi gedung kesehatan;
- 25) Penyiapan lahan;
- 26) Museum yang dikelola swasta;
- 27) Aktivitas biro perjalanan wisata; dan
- 28) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada perusahaan lain dalam rangka mengembangkan proses bisnis Perseroan.

- 11) *Data processing activities;*
- 12) *Web portals and/or digital platforms for commercial purposes;*
- 13) *Residential Building's construction;*
- 14) *Office building's construction;*
- 15) *Shopping building's construction;*
- 16) *Inn Building's construction;*
- 17) *Mechanical installation;*
- 18) *Unclassified Other construction installations;*
- 19) *Advertising;*
- 20) *Private clinic activities;*
- 21) *Health care activities carried out by health workers beside of doctors and dentists;*
- 22) *Pharmaceutical drug's retail trade in human's pharmacies;*
- 23) *Health support service activities;*
- 24) *Health building's construction;*
- 25) *Land preparation;*
- 26) *Private museums;*
- 27) *Travel agencies's activities; and*
- 28) *Capital investment other companies to develop the Company's business processes.*

Kegiatan utama Perusahaan saat ini adalah bergerak dalam bidang usaha pengangkutan penumpang dan/atau barang dengan kereta api, usaha pendidikan dan pelatihan di bidang perkeretaapian, serta usaha penyewaan sarana/prasarana/fasilitas yang meliputi sewa kios/gudang/ruang stasiun dan terminal peti kemas.

The Company's current main business activities are in railway transportation for passenger and/or freight, railway-based education and training services, and rolling stock/infrastructure/facility rental business including shops/warehouse/station space and container terminal.

c. Wilayah Kerja

Dalam menjalankan kegiatan operasinya, perusahaan memiliki Daerah Operasi, Divisi Regional, Balai Yasa, dan Divisi Bertujuan Khusus sebagai berikut:

Daerah Operasi (Daop), terdiri dari:

- 1) Daop 1, berkedudukan di Jakarta
- 2) Daop 2, berkedudukan di Bandung
- 3) Daop 3, berkedudukan di Cirebon
- 4) Daop 4, berkedudukan di Semarang
- 5) Daop 5, berkedudukan di Purwokerto
- 6) Daop 6, berkedudukan di Yogyakarta
- 7) Daop 7, berkedudukan di Madiun
- 8) Daop 8, berkedudukan di Surabaya
- 9) Daop 9, berkedudukan di Jember

c. Operation Regions

In conducting its business, the company has Operating Region, Regional Division, Balai Yasa (Workshop), and Special Purpose Division as follow:

Operating Regions (Daop), consists of:

- 1) *Daop 1, located in Jakarta*
- 2) *Daop 2, located in Bandung*
- 3) *Daop 3, located in Cirebon*
- 4) *Daop 4, located in Semarang*
- 5) *Daop 5, located in Purwokerto*
- 6) *Daop 6, located in Yogyakarta*
- 7) *Daop 7, located in Madiun*
- 8) *Daop 8, located in Surabaya*
- 9) *Daop 9, located in Jember*

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

Divisi Regional (Divre), terdiri dari:

- 1) Divre I, berkedudukan di Medan
- 2) Divre II, berkedudukan di Padang
- 3) Divre III, berkedudukan di Palembang
- 4) Divre IV, berkedudukan di Tanjung Karang

Regional Division (Divre), consists of:

- 1) *Divre I, located in Medan*
- 2) *Divre II, located in Padang*
- 3) *Divre III, located in Palembang*
- 4) *Divre IV, located in Tanjung Karang*

Balai Yasa, terdiri dari:

- 1) Balai Yasa Manggarai, berkedudukan di Jakarta
- 2) Balai Yasa Tegal, berkedudukan di Tegal
- 3) Balai Yasa Yogyakarta, berkedudukan di Yogyakarta
- 4) Balai Yasa Gubeng, berkedudukan di Surabaya
- 5) Balai Yasa Lahat, berkedudukan di Lahat
- 6) Balai Yasa Pulubrayan, berkedudukan di Medan

Balai Yasa, consists of:

- 1) *Balai Yasa Manggarai, located in Jakarta*
- 2) *Balai Yasa Tegal, located in Tegal*
- 3) *Balai Yasa Yogyakarta, located in Yogyakarta*
- 4) *Balai Yasa Gubeng, located in Surabaya*
- 5) *Balai Yasa Lahat, located in Lahat*
- 6) *Balai Yasa Pulubrayan, located in Medan*

Divisi Bertujuan Khusus yaitu *Light Rail Transit* Jabodebek, berkedudukan di Jakarta.

Special Purpose Division is Light Rail Transit Jabodebek, located in Jakarta.

d. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Beserta Karyawan

Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, berdasarkan Akta No. 383 tanggal 30 September 2022 dan No. 277 tanggal 31 Desember 2021 dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Bandung yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0063053 tanggal 7 Oktober 2022 dan No. AHU-AH.01.03-0494849 tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

d. Board of Commisioners and Directors and Employees

The composition of the Company's Board of Commissioners changes as of December 31, 2022 and 2021, based on the Deed No. 383 dated September 30, 2022 and No. 277 dated December 31, 2021 made in presence of Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notary in Bandung that have approved by the Ministry of Law and Human Rights with Decision Letter No. AHU-AH.01.09-0063053 dated October 7, 2022 and No. AHU-AH.01.03-0494849 dated 31 Desember 2021 are as follows:

	2022	2021	
Dewan Komisaris			Board of Commisioners
Komisaris Utama dan Komisaris Independen	Said Aqil Siroj	Said Aqil Siroj	<i>President Commissioner and Independent Commissioner</i>
Komisaris Independen	Riza Primadi	Riza Primadi	<i>Independent Commissioner</i>
Komisaris Independen	Rochadi	Rochadi	<i>Independent Commissioner</i>
Komisaris Independen	Endang Tirtana	Endang Tirtana	<i>Independent Commissioner</i>
Komisaris Independen	Johan Sirait	--	<i>Independent Commissioner</i>
Komisaris	Diah Natalisa	Diah Natalisa	<i>Commissioner</i>
Komisaris	Chairul Anwar	Chairul Anwar	<i>Commissioner</i>
Komisaris	Sri Paduka Mangkoenagoro X	Freddy Harris	<i>Commissioner</i>
Komisaris	Mohamad Risal Wasal	Cris Kuntadi	<i>Commissioner</i>

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

Susunan Dewan Direksi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, berdasarkan Akta No. 09 tanggal 02 November 2022 dan No. 205 tanggal 31 Mei 2021 dibuat di hadapan Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Bandung yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-00072126 tanggal 2 November 2022 dan No. AHU-AH.01.03-0362913 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Board of Directors changes as of December 31, 2022 and 2021, based on the Deed No. 09 dated November 2, 2022 and No. 205 dated May 31, 2021 made in presence of Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., in Notary Bandung that have approved by the Ministry of Law and Human Rights with Decision Letter No. AHU-AH.01.09-0072126 dated November 2, 2022 and No. AHU-AH.01.03-0362913 are as follows:

	2022	2021	
Direksi			Directors
Direktur Utama	Didiek Hartantyo	Didiek Hartantyo	<i>President Director</i>
Direktur Niaga	Hadis Surya Palapa	Dadan Rudiandiyah	<i>Director of Commercials</i>
Direktur Operasi	Awan Hermawan Purwadinata	Heru Kuswanto	<i>Director of Operations</i>
Direktur Pengelolaan Prasarana	Heru Kuswanto	Awan Hermawan Purwadinata	<i>Director of Infrastructure Management</i>
Direktur Pengelolaan Sarana	Eko Purwanto	Eko Purwanto	<i>Director of Facilities Management</i>
Direktur Keselamatan dan Keamanan	Sandry Pasambuna	John Robertho	<i>Director of Safety and Security</i>
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	Suparno	Agung Yunanto	<i>Director of Human Capital and General Affairs</i>
Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan	John Robertho	Jeffrie N Korompis	<i>Director of Strategic Planning and Development</i>
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Salusra Wijaya	Salusra Wijaya	<i>Director of Finance and Risk Management</i>

Perubahan susunan anggota Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 08/CH/DEKOM/XI/2022 tanggal 23 November 2022 dan No. 02/CH/DEKOM/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

The composition changes of members of the Audit Committee as of December 31, 2022 and 2021, based on Decree of the Board of Commissioner No. 08/CH/DEKOM/XI/2022, dated November 23, 2022 and No. 02/CH/DEKOM/III/2021 March 10, 2021 are as follows:

	2022	2021	
Komite Audit			Audit Committee
Ketua	Riza Primadi	Riza Primadi	<i>Chairman</i>
Anggota	Rochadi	Rochadi	<i>Member</i>
Anggota	Johan Sirait	--	<i>Member</i>
Anggota	Ernesto	Ernesto	<i>Member</i>
Anggota	Amalia Setyanti Lestari	Amalia Setyanti Lestari	<i>Member</i>

Perubahan susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 09/CH/DEKOM/XI/2022 tanggal 23 November 2022 dan No. 07/CH/DEKOM/V/2021 bulan Mei 2021 adalah sebagai berikut:

The composition changes of the Risk Management Monitoring Committee as of December 31, 2022 and 2021, based on No. 09/CH/DEKOM/XI/2022 dated November 23, 2022 and No. 07/CH/DEKOM/V/2021 at May, 2021 are as follows:

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

	2022	2021	
Komite Pemantau Manajemen Risiko			Monitoring Risk Management Committee
Ketua (merangkap Anggota)	Chairul Anwar	Freddy Harris	Chairman (concurrently Member)
Anggota	Endang Tirtana	Cris Kuntadi	Member
Anggota	Mohamad Risal Wasal	Chairul Anwar	Member
Anggota	Miranti Gani	Miranti Gani	Member
Sekretaris/Anggota	Handy Purnama	Mokhammad Mahdum	Secretary/Member

Perubahan susunan Komite Pemantau Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 03/CH/DEKOM/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 dan No. 04/CH/DEKOM/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

The composition changes of the Risk Management Nomination and Remuneration as of December 31, 2022 and 2021, based on No. 03/CH/DEKOM/VIII/2022 dated August 30, 2022 and No. 04/CH/DEKOM/III/2021 on March 10, 2021 are as follows:

	2022	2021	
Komite Nominasi dan Remunerasi			Nomination and Remuneration Committee
Ketua (merangkap Anggota)	Said Aqil Siroj	Said Aqil Siroj	Chairman (concurrently Member)
Anggota	Diah Natalisa	Diah Natalisa	Member
Anggota	Sri Paduka Mangkoenagoro X	--	Member
Anggota	Corina D. Riantoputra	Corina D. Riantoputra	Member
Satuan Pengendali Internal (SPI) dan Sekretaris Perusahaan			Internal Audit Unit (SPI) and Corporate Secretary
Ketua Satuan			Head of Internal Audit (SPI)
Pengendali Internal	Dwi Erni Ratnawati	Dwi Erni Ratnawati	Corporate Secretary
Sekretaris Perusahaan	Asdo Artriviyanto	Asdo Artriviyanto	

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 jumlah karyawan (tidak termasuk Direksi) Perusahaan dan entitas anak masing-masing sejumlah 48.564 pegawai (30.735 pegawai tetap, 17.829 pegawai tidak tetap dan alih daya) dan 40.570 orang (30.298 pegawai tetap, 10.272 pegawai tidak tetap dan alih daya) (tidak diaudit).

As of December 31, 2022 and 2021 the number of employees (excluding Directors) the Company and subsidiaries are 48,564 employees (30,735 permanent, 17,829 contracted and outsourcing) and 40,570 (30,298 permanent, 10,272 contracted and outsourcing) employees (unaudited), respectively.

e. Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Perusahaan

Pada tanggal 13 November 2017, Perusahaan telah mendapatkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-438/D.04/2017 atas Penawaran perdana penerbitan Obligasi I Kereta Api Indonesia tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000 dan telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 November 2017. Pada tanggal 18 November 2022, Perusahaan telah melunasi Obligasi I seri A Kereta Api Indonesia Tahun 2017 sebesar Rp1.000.000.000.

e. The Company's Bonds and Sukuk Public Offering

As of November 13, 2017, the Company obtained an effective statement from Financial Services Authority (OJK) No. S-438/D.04/2017 for Initial Public Offering on the issuance of bonds I Kereta Api Indonesia year 2017 with a principal amount of Rp2,000,000,000 and were listed on the Indonesia Stock Exchange on November 21, 2017. On November 18, 2022, The Company has paid off Kereta Api Indonesia 2017 Bond I series A year 2017 of Rp1,000,000,000.

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

Pada tanggal 6 Desember 2019, Perusahaan telah mendapatkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No: S-189/D.04/2019 atas Penawaran umum penerbitan Obligasi II Kereta Api Indonesia tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000 dan telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Desember 2019.

As of December 6, 2019, the Company obtained an effective statement from Financial Services Authority (OJK) No: S-189/D.04/2019 for General Public Offering on the issuance of bonds II Kereta Api Indonesia year 2019 with a principal amount of Rp2,000,000,000 and were listed on the Indonesia Stock Exchange on December 16, 2019.

Pada tanggal 29 Juli 2022, Perusahaan telah mendapatkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-148/D.04/2022 atas Penawaran perdana penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap 1 Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000 dan Sukuk Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap 1 Tahun 2022 dengan sisa imbalan Ijarah sebesar Rp500.000.000 dan telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2022.

As of July 29, 2022, the Company obtained an effective statement from Financial Services Authority (OJK) No. S-148/D.04/2022 for Initial Public Offering on the issuance of Continuing Bonds I Kereta Api Indonesia Phase I Year 2022 with a principal amount of Rp1,500,000,000 and Continuing Sukuk I Kereta Api Indonesia Phase I Year 2022 with a remaining Ijarah benefit amount of Rp500,000,000 were listed on the Indonesia Stock Exchange on August 3, 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah utang obligasi dan sukuk yang belum jatuh tempo adalah sebesar Rp5.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

As of December 31, 2022, The amount of outstanding bonds payables and sukuk amounted to Rp5,000,000,000 with detail as follows:

No./ No.	Obligasi/ Bonds	Jumlah/ Amount	Bunga per Tahun/ Interest per Annum	Tahun/ Years	Tanggal Penerbitan/ Issued Date	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date
1	Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017/ Kereta Api Indonesia Bond I Year 2017 Seri/ Serie B	1.000.000.000	8,25%	7	13 November 2017/ November 13, 2017	1 November 2024/ November 1, 2024
2	Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019/ Kereta Api Indonesia Bond II Year 2019 Seri/ Serie A	900.000.000	7,75%	5	6 Desember 2019/ December 6, 2019	16 Desember 2024/ December 16, 2024
	Seri/ Serie B	1.100.000.000	8,20%	7	6 Desember 2019/ December 6, 2019	16 Desember 2026/ December 16, 2026
3	Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahun 2022/ Kereta Api Indonesia Continuing Bond I Year 2022 Seri/ SerieA	634.000.000	7,10%	5	5 Agustus 2022/ August 5, 2022	5 Agustus 2027/ August 5, 2027
	Seri/ SerieB	866.000.000	8,00%	7	5 Agustus 2022/ August 5, 2022	5 Agustus 2029/ August 5, 2029

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

No./ No.	Sukuk/ Sukuk	Jumlah/ Amount	Cicilan Imbalan per Tahun/ Installment Benefit per Annum	Tahun/ Years	Tanggal Penerbitan/ Issued Date	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date
1	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahun 2022/ Kereta Api Indonesia Continuing Sukuk Ijarah I Year 2022 Seri/ Serie A	117.350.000	8.331.850	5	5 Agustus 2022/ August 5, 2022	5 Agustus 2027/ August 5, 2027
	Seri/ Serie B	382.650.000	30.612.000	7	5 Agustus 2022/ August 5, 2022	5 Agustus 2029/ August 5, 2029

2. Entitas Anak

2. The Subsidiaries

Perusahaan memiliki entitas anak pada 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

The Company has subsidiaries as of December 31, 2022 and 2021 as follows:

No.	Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Kegiatan Pokok/ Main Activity	Tahun Pendirian/ Establishment Date	Tahun Operasi/ Year of Operation	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership		Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/ Total Assets Before Elimination	
						2022 (%)	2021 (%)	2022 Rp	2021 Rp
1	PT Reska Multi Usaha (RMU)	Jakarta	Restoran Kereta Api/ The Railways Restaurant	2003	2003	99,74	99,74	482.887.390	380.692.101
2	PT Railink (Railink)	Jakarta	Transportasi Kereta Api Bandara/ Airport Railways	2005	2014	60,00	60,00	564.519.459	1.000.068.687
3	PT Kereta Commuter Indonesia (KCI)	Jakarta	Transportasi Kereta Commuter/ Commuter Railways	2008	2008	99,78	0,9978	3.278.464.511	2.304.822.460
4	PT KA Logistik (KALOG)	Jakarta	Distribusi Logistik berbasis Kereta Api/ Railway-Based Logistic Service	2009	2009	99,30	99,30	847.167.021	807.879.730
5	PT KA Properti Manajemen (KAPM)	Jakarta	Pengelolaan Aset Properti Perkeretaapian/ Railway Property Asset Management	2009	2009	99,63	99,63	905.134.224	908.690.000
6	PT KA Pariwisata (KAWIS)	Jakarta	Pariwisata Kereta Api/ Railways Tourism	2009	2010	99,90	99,90	152.859.992	96.339.586

PT Reska Multi Usaha (RMU)

RMU didirikan berdasarkan Akta No. 18 tanggal 2 Juli 2003 oleh Notaris Darwin Ginting, S.H., M.H., yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C - 21011 HT 01.01. Tahun 2003 tanggal 4 September 2003.

PT Reska Multi Usaha (RMU)

RMU was established based on Notarial Deed No. 18 dated on July 2, 2003 of Notary Darwin Ginting, S.H., M.H., which approved by the Minister of Law of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. C - 21011 HT 01.01 Tahun 2003 dated September 4, 2003.

Anggaran Dasar RMU telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Nomor 6 tanggal 21 September 2019 oleh Notaris Silvia Anugrahwy, S.H., M.Kn. mengenai Perubahan Modal Dasar. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU-0079549.AH.01.02 tanggal 7 Oktober 2019.

RMU's Articles of association has been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 6 dated September 21, 2019 of Notary Silvia Anugrahwy, S.H., M.Kn. concerning the Changes in the Authorized Capital. The amendments were approved by the Minister of Law and Human Rights in his Decision Letter No. AHU-0079549.AH.01.02 dated October 7, 2019.

Modal dasar RMU sebesar Rp100.749.000 terbagi atas 100.749 saham dengan bernilai nominal Rp1.000 per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 100.749 saham atau sebesar Rp100.749.000 dengan komposisi sebagai berikut:

The authorized capital of RMU amounted to Rp100,749,000 composed of 100,749 shares with par value of Rp1,000 per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp100,749,000 composed of 100,749 shares with share ownership as follows:

- Perusahaan memiliki 99,74% atau sebanyak 100.487 saham dengan nilai sebesar Rp100.487.000.

- The Company owns 99.74% or 100,487 shares amounting to Rp100,487,000.

2. Entitas Anak (Lanjutan)

- Yayasan Pusaka memiliki 0,26% atau sebanyak 262 saham dengan nilai sebesar Rp262.000.

PT Railink (Railink)

Railink didirikan berdasarkan Surat Persetujuan dari Menteri Negara BUMN No. S-108/MBU/2005 tanggal 8 Maret 2005 dan Akta Pendirian No. 34 tanggal 28 September 2006, dari Notaris Ny. Silvia Abbas Sudrajat, S.H., Notaris di Banten yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W29-00480HT.01.01. TH.2006, pada tanggal 7 Desember 2006.

Anggaran Dasar Railink telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah menurut Keputusan Para Pemegang Saham yang telah disahkan dengan Akta Notaris Ariani Lakhsmitjati Rachim, S.H., No. 6 tanggal 19 April 2021 mengenai Perubahan Modal Dasar dan Modal Disetor kepada Railink. Akta perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0248954 tanggal 21 April 2021.

Modal dasar Railink sebesar Rp839.400.000, ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 839.400 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000 per saham atau sebesar Rp839.400.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 60,00% atau sebanyak 503.640 saham dengan nilai sebesar Rp503.640.000.
- PT Angkasa Pura II (Persero) memiliki 40,00% atau sebanyak 335.760 saham dengan nilai sebesar Rp335.760.000.

Berdasarkan surat No.KP.303/XII/2/KA-2022 dan No.KEP.08.03.01/00/12/2022/0635 tanggal 30 Desember 2022, para Pemegang Saham telah sepakat untuk mengonversi Pinjaman Pemegang Saham sebesar Rp40.000.000 menjadi Modal Disetor Lainnya melalui Rapat Umum Pemegang Saham dengan komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 60,00% dengan nilai sebesar Rp24.000.000.
- PT Angkasa Pura II (Persero) memiliki 40,00% dengan nilai sebesar Rp16.000.000.

2. The Subsidiaries (Continued)

- Yayasan Pusaka owns 0.26% or 262 shares amounting to Rp262,000.

PT Railink (Railink)

Railink was established based on Letter of Approval from Minister of SOEs No. S-108/MBU/2005 dated March 8, 2005, and Notarial Deed No. 34 dated September 28, 2006 of Notary Ny. Silvia Abbas Sudrajat, S.H., Notary in Banten, which has been approved by the Minister of Law and Human Right of Republic of Indonesia in his Decision Letter No. W29-00480HT.01.01.TH.2006 dated December 7, 2006.

Railink's Article of Association has been amended several times, most recently by Agreement of Stockholders legalized by the Notarial Deed of Ariani Lakhsmitjati Rachim, S.H., No. 6 dated April 19, 2021 concerning the Changes in the authorized and paid in capital. These amendments have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. Decision Letter of Amended's articles No. AHU-AH.01.03-0248954 dated April 21, 2021.

The authorized capital of Railink amounted to Rp839,400,000, issued and fully paid capital amounted to Rp839,400,000 composed of 839,400 shares with par value of Rp1,000 per share with share ownership as follows:

- *The Company owns 60.00% or 503,640 shares amounting to Rp503,640,000.*
- *PT Angkasa Pura II (Persero) owns 40.00% or 335,760 shares amounting to Rp335,760,000.*

Based on letters No.KP.303/XII/2/KA-2022 and No.KEP.08.03.01/00/12/2022/0635 dated December 30, 2022, the Shareholders agreed to convert the Shareholder Loan of IDR 40,000,000 into Other Paid-in Capital through the General Meeting of Shareholders with the following composition:

- *The Company owns 60.00% amounting to Rp24,000,000.*
- *PT Angkasa Pura II (Persero) owns 40.00% amounting to Rp16,000,000.*

2. Entitas Anak (Lanjutan)

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI)

KCI didirikan berdasarkan Akta Notaris Ilmiawan Dekrit S., S.H., pada tanggal 15 September 2008 No.457 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-74707.AH.01.01, tanggal 16 Oktober 2008.

Anggaran Dasar KCI telah mengalami beberapa perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 1 tanggal 7 Januari 2019 dari Notaris Tri Mulyahati, S.H., yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU-0002753.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019.

Modal dasar KCI sebesar Rp542.000.000 terbagi atas 542.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 230.500 saham atau sebesar Rp230.500.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,78% atau sebanyak 230.000 saham dengan nilai sebesar Rp230.000.000.
- Yayasan Pusaka memiliki 0,22% atau sebanyak 500 saham dengan nilai sebesar Rp500.000.

PT KA Logistik (KALOG)

KALOG didirikan berdasarkan Surat Persetujuan dari Menteri Negara BUMN No. S-536/MBU/2009, tanggal 29 Juli 2009 dan berdasarkan Akta Pendirian No. 10, tanggal 8 September 2009 yang dibuat dihadapan Ny. Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-51175.AH.01.01, pada tanggal 22 Oktober 2009.

Anggaran Dasar KALOG telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Yoshsi, S.H., M.Kn. No. 30 tanggal 16 September 2022 mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang maksud dan tujuan serta kegiatan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 19 September 2022 No. AHU 0067267.AH.01.02.Tahun 2022.

2. The Subsidiaries (Continued)

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI)

KCI was established based on Notarial Deed of Ilmiawan Dekrit S., S.H., No. 457 dated September 15, 2008 which is approved by the Minister of Law and Human Right of Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-74707.AH.01.01, dated October 16, 2008.

KCI's Article of Association has been amended several time, most recently by Notarial Deeds No. 1 on January 7, 2019 of Notary Mulyahati, S.H., which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0002753.AH.01.02 Year 2019 dated January 18, 2019.

The authorized capital of KCI amounted to Rp542,000,000 composed of 542,000 shares with par value of Rp1,000 per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp230,500,000 composed of 230,500 shares with share ownership as follows:

- *The Company owns 99.78% or 230,000 shares amounting to Rp230,000,000.*
- *Yayasan Pusaka owns 0.22% or 500 shares amounting to Rp500,000.*

PT KA Logistik (KALOG)

KALOG was established based on the Letter of Approval from the Minister of SOEs No. S-536/MBU/2009, dated July 29, 2009 and based on the Deed of Establishment No. 10, dated September 8, 2009 of Ny. Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta was approved by the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia in his Decision Letter. No. AHU-51175.AH.01.01, dated October 22, 2009.

KALOG's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed of Yoshsi, S.H., M.Kn. No. 30 dated September 16, 2022 concerning amendments to Article 3 of the Articles of Association regarding the aims and objectives as well as business. This amendment has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with a Decree dated September 19, 2022 No. AHU- 0067267.AH.01.02. Year 2022.

2. Entitas Anak (Lanjutan)

Modal dasar KALOG sebesar Rp99.100.000 terbagi atas 99.100 saham dengan bernilai nominal Rp1.000 per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 75.275 saham atau sebesar Rp75.275.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,30% atau sebanyak 74.750 saham dengan nilai sebesar Rp74.750.000.
- Yayasan Pusaka memiliki 0,70% atau sebanyak 525 saham dengan nilai sebesar Rp525.000.

PT KA Properti Manajemen (KAPM)

KAPM didirikan berdasarkan Surat Persetujuan dari Menteri Negara BUMN No. S-535/MBU/2009, tanggal 29 Juli 2009 dan berdasarkan Akta Pendirian No. 9, tanggal 8 September 2009 yang dibuat dihadapan Ny. Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-5150.AH.01.01, pada tanggal 26 Oktober 2009.

Anggaran Dasar KAPM telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir Akta No. 2 tertanggal 2 Oktober 2019 mengenai perubahan modal dasar yang dibuat oleh Notaris Agung Sri Wijayanti, S.H., M.Kn., telah dicatat dalam database Sistem Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai suratnya No. AHU-0079321.AH.01.02 Tanggal 7 Oktober 2019.

Modal dasar KAPM sebesar Rp273.575.000 terbagi atas 273.575 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 273.575 saham atau sebesar Rp273.575.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,63%, atau sebanyak 272.550 saham dengan nilai sebesar Rp272.550.000.
- Yayasan Pusaka memiliki 0,37% atau sebanyak 1.025 saham dengan nilai sebesar Rp1.025.000.

2. The Subsidiaries (Continued)

The authorized capital of KALOG amounted to Rp99,100,000 composed of 99,100 shares with par value of Rp1,000 per share. Total issued and fully paid capital amounted Rp75,275,000 composed of 75,275 shares with share ownership as follows:

- *The Company owns 99.30% or 74,750 shares amounting to Rp74,750,000.*
- *Yayasan Pusaka owns 0.70% or 525 shares amounting to Rp525,000.*

PT KA Properti Manajemen (KAPM)

KAPM was established under the Letter of Approval from the Minister of SOEs No. S-535/MBU/2009, dated July 29, 2009 and based on the Deed of Establishment No. 9 dated September 8, 2009 of Ny. Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta. Deed of Establishment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-5150.AH.01.01, on October 26, 2009.

KAPM's Articles of Association have been amended several times, most recently by Deed No. 2 dated October 2, 2019 concerning the Changes in the authorized capital of Notary Agung Sri Wijayanti, S.H., M.Kn., have been recorded in the Legal Entity Database System of the Minister of Justice and Human Rights according to Decision Letter No. AHU-0079321.AH.01.02 dated October 7, 2019.

The authorized capital of KAPM amounted to Rp273,575,000 composed of 273,575 shares with par value of Rp1,000 per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp273,575,000 composed of 273,575 shares with share ownership as follows:

- *The Company owns 99.63% or 272,550 shares amounting to Rp272,550,000.*
- *Yayasan Pusaka owns 0.37% or 1,025 shares amounting to Rp1,025,000.*

2. Entitas Anak (Lanjutan)

PT KA Pariwisata (KAWIS)

KAWIS didirikan berdasarkan Surat Persetujuan dari Menteri Negara BUMN No. S-537/MBU/2009 tanggal 29 Juli 2009 dan berdasarkan Akta Pendirian No. 11, tanggal 8 September 2009, Notaris Ny. Fathiah Helmi, S.H., dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-04724.AH.01.01, tanggal 28 Januari 2010.

Anggaran Dasar KAWIS telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kereta Api Pariwisata No. 5, tanggal 14 Desember 2017 mengenai perubahan modal dasar yang dibuat dihadapan Notaris Agung Sri Wijayanti S.H., M.Kn., telah dicatat dalam database Sistem Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai suratnya AHU-0027019.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017.

Modal dasar KAWIS sebesar Rp99.100.000 terbagi atas 24.775 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 24.775 saham atau sebesar Rp24.775.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,90%, atau sebanyak 24.750 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000.
- Yayasan Pusaka memiliki 0,10% atau sebanyak 25 saham dengan nilai sebesar Rp25.000.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan–Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK–IAI) serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan

2. The Subsidiaries (Continued)

PT KA Pariwisata (KAWIS)

KAWIS was established within Letters of approval from the Minister of SOEs No. S-537/MBU/2009, dated July 29, 2009 and based on Notarial Deed No. 11 of Notary Ny. Fathiah Helmi, S.H., dated September 8, 2009 and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-04724.AH.01.01, dated on January 28, 2010.

The Articles KAWIS of Association have been amended by Deed of Statement of Shareholders Resolution of PT Kereta Api Pariwisata No. 5, dated December 14, 2017 concerning the Changes in the authorized capital of Notary Agung Sri Wijayanti S.H., M.Kn., have been recorded in the Legal Entity Database System of the Minister of Justice and Human Rights according to Decision Letter No. AHU-0027019.AH.01.02 Year 2017 dated December 20, 2017.

The authorized capital of KAWIS amounted to Rp99,100,000 composed of 24,775 shares with par value of Rp1,000 per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp24,775,000 composed of 24,775 shares with share ownership as follows:

- The Company owns 99.90% or 24,750 shares amounting to Rp24,750,000.
- Yayasan Pusaka owns 0.10% or 25 shares amounting to Rp25,000.

3. Significant Accounting Policies

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board–Indonesian Institute of Accountant (DSAK–IAI) and regulations in the Capital Market including Regulations of Financial Services Authority/Capital Market and Supervisory Board and Financial Institution (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 regarding guidelines for the presentation of

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

financial statements, decree of Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 regarding presentation and disclosure of financial statements of the issuer or public company.

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

b. Basis of Measurement and Preparation of the Consolidated Financial Statements

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan perusahaan dan entitas anak (selanjutnya secara kolektif disebut sebagai "Grup").

The consolidated financial statements included the accounts of the Company and its subsidiaries (hereinafter collectively referred to as "the Group").

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for specific account certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian

c. Principles of Consolidation

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan perusahaan dan entitas-entitas anak seperti disebutkan pada Catatan 2.

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the company and subsidiaries as described in Note 2.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari perusahaan dan seluruh entitas anak yang secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi pemilik kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

The existence and effect of substantive potential voting rights that the Group has the practical ability to exercise (ie substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls another entity.

The Group's financial statements incorporate the results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its directly and indirectly controlled subsidiaries. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which the Group effectively obtains control of the acquired business, until that control ceases.

A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows relating to transactions between entities of the group are eliminated in full.

The Group attributed the profit and loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (i.e. transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognised directly in equity and attributed to the owners of the parent.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

If the Group loses control, the Group:

- a. Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- b. Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);
- c. Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- d. Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- e. Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak; dan
- f. Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

- a. Derecognizes the assets (including *goodwill*) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;
- b. Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);
- c. Recognizes the fair value of the consideration received, from the transaction, event or circumstances that resulted the loss of control;
- d. Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;
- e. Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAK's, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary; and
- f. Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.

d. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).

d. Investments in Associates

Associates are entities which the Group has the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies (significant influence).

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian atas laba rugi dan penghasilan atau kerugian komprehensif lain *investee* setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi *investee* diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari *investee* mengurangi nilai tercatat investasi.

Investment in associates accounted using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognised at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognise the investor's share of the profit or loss and other comprehensive income or loss of the investee after the date of acquisition. The investor's share of the profit or loss of the investee is recognised in profit or loss. Distributions received from an investee reduce the carrying amount of the investment.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas *investee* yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the investor's proportionate in the investee arising from changes in the investee's other comprehensive income, including those arising from the revaluation of fixed assets and from foreign exchange translation differences. The investor's share of those changes is recognized in other comprehensive income.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

The Group discontinue the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

- (a) jika investasi menjadi entitas anak.
- (b) jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar.
- (c) ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

- (a) if the investment becomes a subsidiary.*
- (b) if the retained interest in the former associate is a financial asset, the Group measure the retained interest at fair value.*
- (c) when the Group discontinue the use of the equity method, the Group accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.*

e. Pengaturan Bersama

Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu Pengaturan Bersama yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

e. Join Arrangement

Joint arrangement is an arrangement of which two or more parties have joint control, i.e. the contractually agreed sharing of control of Joint Arrangement, which exist only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai:

The Group classified joint arrangement as:

- 1) Operasi Bersama
Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.

- 1) Joint Operation
Represents joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement. Those parties are called joint operator.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:

A joint operator recognize in relation to its interest in a joint operation:

- (a) Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
- (b) Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;
- (c) Pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama;
- (d) Bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama; dan
- (e) Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama.

- (a) *Its assets, including its share of any assets held jointly;*
- (b) *Its liabilities, including its share of any liabilities incurred jointly;*
- (c) *Its revenue from the sale of its share of the output arising from the joint operation;*
- (d) *Its share of the revenue from the sale of the output by the joint operation; and*
- (e) *Its expenses, including its share of any expenses incurred jointly.*

- 2) **Ventura Bersama**
Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai venturer bersama.

- 2) **Joint Venture**
Represents joint arrangement whereby the parties that have joint control upon the agreement, have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venturers.

Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas.

Joint venturers recognize its interest in a joint venture as an investment and accounts for that investment using the equity method.

f. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Perusahaan dan seluruh entitas anak adalah Rupiah.

f. Foreign Currency Transaction and Balances

In preparing the financial statements, each of the entities within the Group record by using the currency of the primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The functional currency of the Company and all subsidiaries is Indonesian Rupiah.

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Transactions during the year in foreign currencies are recorded in Rupiah by applying to the foreign currency amount the spot exchange rate between Rupiah and the foreign currency at the date of transactions. At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate of Bank of Indonesia at December 31, 2022 and 2021 as follows:

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Mata Uang Asing (Nilai Penuh)	2022	2021	Foreign Currency (Full Amount)
Dolar Amerika Serikat	15.731	14.269	United States Dollar
Yen Jepang	118	124	Japanese Yen
Euro	16.713	16.127	Euro

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.

g. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;

g. Transactions with Related Parties

A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

- a) *A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
 - i. *has control or joint control over the reporting entity;*
 - ii. *has significant influence over the reporting entity; or*
 - iii. *is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- b) *An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:*
 - i. *The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);*
 - ii. *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);*
 - iii. *Both entities are joint ventures of the same third party;*
 - iv. *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;*

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Negara BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 41.

- v. *The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity itself is the programme organizer, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;*
- vi. *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);*
- vii. *A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or*
- viii. *The entity, or any member of a group which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.*

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influence by a government. Government refers to government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Entity related to the Government can be an entity which controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance that representing as the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the Ministry of SOEs as a shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 41.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

h. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Dalam komponen setara kas tidak termasuk deposito berjangka yang dijadikan jaminan pada bank walaupun jatuh temponya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan. Deposito yang bersangkutan disajikan dalam kelompok aset lancar sepanjang penjaminan tersebut meliputi periode tidak lebih dari satu tahun dari tanggal laporan posisi keuangan.

i. Dana Dibatasi Penggunaannya

Rekening yang dibatasi penggunaannya dan atau digunakan sebagai jaminan diklasifikasi sebagai bagian aset lancar jika jatuh temponya kurang dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

j. Piutang Usaha

Piutang usaha merupakan jumlah yang akan diterima dari pelanggan atas layanan yang diberikan dari kegiatan usaha.

Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

k. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

h. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks (current account) and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of investment that are not used as collateral or are not restricted.

The components of cash equivalents does not include time deposit which was pledged as collateral for a bank, although the maturities are shorter than 3 (three) months. The mentioned deposit is presented in the current assets of the guarantee covers a period not exceeding one year from the balance sheet date.

i. Restricted Fund

Current accounts which are restricted and or used as security are classified as current assets when the maturities are less than 12 months after the end of reporting period.

j. Trade Receivables

Trade receivables are amounts due to customers for services rendered in the ordinary course of business.

Account and other receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment.

k. Inventories

Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprise all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined using the weighted average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make sales.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

l. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

m. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model biaya dan mengukur properti investasi sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Hak atas tanah tidak disusutkan dan disajikan sebesar biaya perolehan. Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis (12-40 tahun).

3. Significant Accounting Policies (Continued)

The amount of any write-down of inventories to net realizable value and all losses of inventories shall be recognised as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net realizable value, is recognised as a reduction in the amount of inventories recognised as an expense in the period in which the reversal occurs.

l. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized to operations using straight-line method over their beneficial periods.

m. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Investment property is recognized as an asset when, and only when there is a probability that the future economic benefits which are associated with the investment property, will flow into the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

An investment property shall be measured initially at its cost, comprises its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

After initial recognition, the Group may choose to use cost model and measure its investment property at acquisition cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Landrights are not depreciated and are carried at costs. Buildings are depreciated using the straight-line method over their estimated useful lives (12-40 years).

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan dimulainya sewa operasi kepada pihak lain.

Transfer to investment property made when, and only when, there is a change in usage, evidenced by end of owner-occupation and commencement of an operating lease to another party.

Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik dan dimulainya pengembangan untuk dijual.

Transfer from investment property made when, and only when, there is a change in usage, evidenced by commencement of owner-occupation and commencement of development with a view of sale.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

An investment property is derecognized on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

n. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

n. Fixed Assets

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

After initial recognition, fixed assets, except land, are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.

Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

Lands are recognized at its cost and are not depreciated.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

Depreciation of fixed assets starts when available for use and was computed by using straight-line method based on the estimated useful lives of assets as follows:

Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)/ Useful Lives (Years)	Tarif Penyusutan Per Tahun/ Depreciation Rate Per Year	Type of Fixed Assets
Sarana			Rolling Stock
Lokomotif	30	3,33%	Locomotive
Kereta	15-30	3,33% - 6,67%	Train
Gerbong	30	3,33%	Wagons
Prasarana			Infrastructure
Bangunan	10-40	2,50% - 10%	Building
Prasarana dan Instalasi	5-20	5,00% - 20,00%	Infrastructure and Installation
Fasilitas			Facilities
Mesin dan Peralatan	3-40	2,50% - 33,33%	Machinery and Equipment
Kendaraan	4-8	12,50% - 25,00%	Vehicles
Inventaris	4-5	20,00% - 25,00%	Supplies

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "aset dalam pembangunan" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya.

Self-constructed of fixed assets are presented as part of the fixed assets under "assets under construction" and are stated at its cost.

Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

All costs, including borrowing costs, incurred in relation with the construction of these assets are capitalized as part of the cost of assets in construction. Cost of assets in construction shall exclude any internal profits, cost of abnormal amounts of wasted material, labour, or other resources incurred.

Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

The accumulated costs will be transferred to the respective fixed assets items at the time the asset is completed or ready for use and are depreciated since the operation.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan bersih, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition (that determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when item is derecognized.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Pada akhir periode pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

At the end of each reporting period, the Group made regular review of the useful lives, residual values, depreciation method and residual life based on the technical conditions.

o. Perjanjian Konsesi Jasa

Grup telah menerapkan ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" (ISAK 16) dan ISAK 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" (ISAK 22) sehubungan dengan hak pengoperasian aset.

o. Service Concession Arrangement

The Group has adopted ISAK 16, "Service Concession Arrangement" (ISAK 16) and ISAK 22, "Service Concession Arrangement: Disclosure" (ISAK 22) related to operating rights of assets.

ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik.

ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession arrangement. ISAK 16 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator.

Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

Grup membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai aset takberwujud, aset konsesi dalam bentuk aset takberwujud yaitu hak pengoperasian akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian aset. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi aset diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

The Group accounts for its service concession arrangement under the intangible asset, concession assets which are under intangible asset which is operation rights of assets will be amortized over the remaining concession period from the date of operation of the assets. During the construction period, the accumulated cost of assets are recognized as concession assets in progress. The amortization of the cost starts when the concession assets are ready to be operated.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Hak pengoperasian aset dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) tanpa syarat.

The operation rights of assets are derecognized at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the concession assets which are expected to be fully amortized by then, will be handed over to the Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) for no consideration.

Hak pengoperasian aset yang diberikan kepada Grup dapat dialihkan dengan persetujuan Pemerintah/DJKA.

The operation rights of asset granted to the Group are transferrable with approval from the Government/DJKA.

Aset konsesi ini akan diserahkan ke Pemerintah/DJKA pada saat akhir masa konsesi dan, pada saat itu, seluruh akun yang berhubungan dengan aset konsesi akan dihentikan pengakuannya.

These concession right assets will be transferred to the Government/DJKA at the end of the concession period and, at such time, all accounts related to the concession rights assets will be derecognized.

Selama periode konstruksi, Grup mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan penambahan aset konsesi.

During the construction period, the Group recognizes revenues and costs of construction in accordance with the addition of concession assets.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti diskonto baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset kualifikasian, dikapitalisasi sampai saat proses pembangunannya selesai.

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when the construction is completed.

Untuk pinjaman yang dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi dalam tahun berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi sementara dari pinjaman tersebut.

For borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount allowed to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any investment income earned from the temporary investment of such borrowings.

p. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan atau selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

p. Borrowing Costs

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset, are capitalized as part of the cost of that asset. Other borrowing costs are recognized as an expense when incurred. Borrowing costs may include interest expense, finance charges in respect of finance leases, or exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat Grup telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya serta pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi.

Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti biaya diskonto pinjaman baik yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk pendanaan konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai dikonstruksi. Untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dari biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut.

Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

q. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Grup menentukan jumlah terpulihkan dari Unit Penghasil Kas dari aset tersebut.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Capitalization of borrowing costs commences when the Group undertakes activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale and expenditures for the asset and its borrowing costs has been incurred.

Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use or sale are complete.

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalised up to the date when construction is complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing cost incurred during the period, less any income earned on the temporary investment of such borrowings.

For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying assets. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset.

q. Impairment of Assets Non-Financial

At the end of each reporting period, the Group assess whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group shall estimate the recoverable amount of the asset. Recoverable amount is determined for an individual asset, if its is not possible, the Group determines the recoverable amount of the asset's Cash-Generating Unit.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau Unit Penghasil Kas.

Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur. Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

r. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka atas pemakaian lahan dan bangunan diamortisasi selama masa kontrak pemakaian dengan menggunakan metode garis lurus. Bagian tidak lancar atas pendapatan diterima dimuka disajikan sebagai bagian dari "liabilitas jangka panjang" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pendapatan diterima di muka atas angkutan penumpang merupakan pendapatan atas jasa angkutan penumpang pengguna kereta api yang realisasi keberangkatannya pada periode berikutnya.

Pendapatan diterima di muka angkutan barang merupakan pendapatan atas jasa angkutan barang yang terdiri dari angkutan peti kemas, batu bara, parcel, barang curah dan barang jenis lain yang realisasi keberangkatannya pada periode berikutnya.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

The recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and its value in use. Value in use is the present value of the estimated future cash flows of the asset or Cash Generating Unit.

Present values are computed using pre-tax discount rates that reflect the time value of money and the risks specific to the asset or unit whose impairment is being measured. If, and only if, the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset shall be reduced to its recoverable amount. The reduction is an impairment loss and is recognized immediately in profit or loss.

An impairment loss recognized in prior period for an asset other than goodwill is reversed if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If this is the case, the carrying amount of the asset shall be increased to its recoverable amount. That increase is a reversal of an impairment loss.

r. Unearned Revenues

Unearned revenues from usage of land and buildings are amortized over the usage term using the straight-line method. The non-current portion of unearned revenues is shown as part of "long-term liabilities" in the consolidated statement of financial position.

Unearned revenues from passenger transportation represent revenue as on passenger transport services by train which the travel realization departure is in next period.

Unearned revenue of freight transportation represents revenue generated from freight transport railway services consist of freight of containers, coal, parcel, bulk cargo and other types of goods of which the departure is realized in the following period.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

s. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak berlaku atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a) pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

s. Income Tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax.

Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognised as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognised as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognised for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

- a) *the initial recognition of goodwill; or*
- b) *the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

A deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Assets and liabilities deferred tax are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

The Group offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:

- a) *the Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and*

- b) *the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:*

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

- i. entitas kena pajak yang sama; atau
- ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:

- a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

- t. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak**
Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui pada saat Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan tidak diakui secara neto (saling hapus). Selisih antara Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui sebagai Tambahan Modal Disetor.

Aset Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai yang disetujui dalam SKPP.

Liabilitas Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai kas dan setara kas yang masih harus dibayarkan oleh Grup sesuai kewajiban kontraktual atas perolehan Aset Pengampunan Pajak.

Uang tebusan yang dibayarkan oleh Grup untuk memperoleh pengampunan pajak diakui sebagai beban pada periode dimana SKPP diterima oleh Grup.

Setelah pengakuan awal, Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak diukur sesuai dengan SAK yang relevan sesuai dengan klasifikasi masing-masing Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

- i. the same taxable entity; or
- ii. different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

The Group offsets current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

- a) has legally enforceable right to set off the recognized amounts, and
- b) intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.

- t. Tax Amnesty Assets and Liabilities**
Tax Amnesty Assets and Liabilities are recognized upon the issuance of Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) by the Ministry of Finance of Republic of Indonesia, and they are not recognized as net amount (offset). The difference between Tax Amnesty Assets and Tax Amnesty Liabilities are recognized as Additional Paid in Capital.

Tax Amnesty Assets are initially recognized at the value stated in SKPP.

Tax Amnesty Liabilities are initially measured at the amount of cash or cash equivalents to be settled by the Group according to the contractual obligation with respect to the acquisition of respective Tax Amnesty Assets.

The redemption money paid by the Group to obtain the tax amnesty is recognized as expense in the period in which the Group receives SKPP.

After initial recognition, Tax Amnesty Assets and Liabilities are measured in accordance with respective relevant SAKs according to the classification of each Tax Amnesty Assets and Liabilities.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Sehubungan dengan Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak yang diakui, Grup telah mengungkapkan dalam laporan keuangannya:

- a. Tanggal SKPP;
- b. Jumlah yang diakui sebagai Aset Pengampunan Pajak sesuai SKPP; dan
- c. Jumlah yang diakui sebagai Liabilitas Pengampunan Pajak.

u. Sewa

Grup sebagai Penyewa (Lessee)

Pada tanggal inepsi suatu kontrak, Grup menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, Grup menilai apakah:

- a. Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian – ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substansial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
- b. Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- c. Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:

With respect to Tax Amnesty Assets and Liabilities recognized, the Group has disclosed the following in its financial statements:

- a. The date of SKPP;*
- b. Amount recognized as Tax Amnesty Assets in accordance with SKPP; and*
- c. Amount recognized as Tax Amnesty Liabilities.*

u. Leases

Group as Lessee

At inception of a contract, the Group assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group assesses whether:

- a. The contract involves the use of an identified asset – this may be specified explicitly or implicitly and should be physically distinct or represent substantially all of the capacity of a physically distinct asset. If the supplier has the substantive substitution right, then the asset is not identified;*
- b. The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits of the use of assets during the period of use; and*
- c. The Group has the right to direct the use of the identified asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used. In certain circumstances where all the decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined, the Group has the right to direct the use of the asset if either:*

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

- Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
- Grup mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan.

Pada tanggal insepasi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam indeks utang sewa meliputi: pembayaran sewa tetap, sewa variabel yang bergantung pada indeks, jumlah yang akan dibayarkan dalam jaminan nilai residu dan harga eksekusi opsi beli, opsi perpanjangan atau penalti penghentian jika Grup cukup pasti akan mengeksekusi opsi tersebut.

Grup mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur aset hak guna dengan model biaya, yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Aset hak guna disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

- *The Group has the right to operate the asset; or*
- *The Group designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used.*

At inception date or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following: fixed payments, variable lease payments that depend on an index, amounts expected to be payable under a residual value guarantee and the exercise price under a purchase option, optional renewal period or penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.

The Group recognizes a right of use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right of use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

After the commencement date, the Group measures the right of use assets under the cost model, which is cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, and adjusted for remeasurement of lease liabilities. Right of use asset depreciated using straight line method.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa menyusutkan aset hak guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar, yang mengacu pada ketentuan masa manfaat aset tetap. Jika tidak, maka aset hak guna disusutkan dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the lessee by the end of the lease term or if the cost of the right of use asset reflects that the lessee will exercise a purchase option, the lessee shall depreciate the right of use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset, which refers to the terms of the useful life of the fixed asset. Otherwise, the lessee shall depreciate the right of use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right of use asset or the end of the lease term.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup. Umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskonto.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not yet paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, The Group incremental borrowing rate. Generally, The Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur liabilitas sewa dengan:

After the commencement date, the Group shall measure the lease liability by:

- a. Meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;
- b. Mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar;
- c. Mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi revision.

- a. *Increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability;*
- b. *Reducing the carrying amount to reflect the lease payments made; and*
- c. *Remeasuring the carrying amount to reflect any reassessment or lease modifications, or to reflect revised in-substance fixed lease payments.*

Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Grup atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Grup mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Group estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Group changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak guna telah berkurang menjadi nol.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right of use assets, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right of use asset has been reduced to zero.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Selanjutnya, pembayaran atas kontrak yang termasuk ke dalam pengecualian, yakni pembayaran atas sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

Furthermore, payments associated with contracts included in the exception, which are payments associated with all short-term leases and certain leases of all low-value assets are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Grup sebagai Pemberi Sewa (Lessor)

Sewa dimana grup tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

Group as Lessor

Leases where the group does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership are classified as operating leases. Initial direct costs incurred in negotiating an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized as expense over the lease term on the same basis as rental income. Operating lease income is recognized as income on a straight-line basis over the lease term.

v. Liabilitas Imbalan Kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut. Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

v. Employee Benefit

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service. Short term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("UU 13/2003").

Post-employment Benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 ("Law 13/2003").

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the *Projected Unit Credit* method. Present value of benefit obligation is determined by discounting the benefit.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

The Group accounts not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit or loss.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

Termination Benefits

The Group recognizes a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:

- (a) Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut;
- (b) Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

- (a) *When the Group can no longer withdraw the offer of those benefits;*
- (b) *When the Group recognizes costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 57 and involves payment of termination benefits.*

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

The Group measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang, imbalan cacat permanen dan penghargaan *jubilee* dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui dalam laba rugi.

Other Long-Term Employee Benefits

Other long-term employee benefits such as long service leave, permanent disability benefit and jubilee awards are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value. Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and change in actuarial assumption are charged and credited to profit or loss.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Terkait adanya siaran pers DSAK IAI "Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa" pada bulan April 2022, Perusahaan mengubah kebijakan terkait atribusi imbalan pensiun pada periode jasa sesuai ketentuan dalam PSAK 24 untuk pola fakta umum dari program pensiun. Grup telah mengukur dampak atas perubahan tersebut seperti yang diungkapkan pada Catatan 54.

Regarding the press release of DSAK IAI "Attribution of Benefits on Service Period" in April 2022, the Company changed its policy regarding the attribution of pension benefits to the service period in accordance with the provisions in PSAK 24 for general fact patterns of pension plans. The Group has quantified the impact as disclosed in Note 54.

w. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Grup melakukan analisa transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

1. Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak
 - Grup bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan;
 - Kontrak memiliki substansi komersial; dan
 - Besar kemungkinan entitas akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan.
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan.
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai dan pungutan ekspor, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.
4. Mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu).

w. Revenue and Expenses Recognition

In determining revenue recognition, the Group perform analysis transaction through the following five steps of assessment:

1. *The contract has been agreed by the parties involved in the contract*
 - *The Group can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods or services to be transferred;*
 - *The contract has commercial substance; and*
 - *It is probable that the Group will receive benefits for the goods or services transferred.*
2. *Identify the performance obligations in the contract, to transfer distinctive goods or services to the customer.*
3. *Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives, luxury sales tax, value added tax and export duty, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer.*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the selling prices of each goods or services promised in the contract.*
5. *Recognize revenue when performance obligation is satisfied (over time or at a point in time).*

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- Suatu waktu tertentu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Sepanjang waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam sepanjang waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang dapat diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Suatu kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada suatu waktu tertentu kecuali jika memenuhi salah satu kriteria berikut, dalam hal ini dipenuhi sepanjang waktu:

- Pelanggan secara bersamaan menerima dan menggunakan manfaat yang diberikan oleh pelaksanaan Grup sebagaimana yang dilakukan Grup;
- Pelaksanaan Grup menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan saat aset itu dibuat atau ditingkatkan; dan
- Pelaksanaan Grup tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif untuk Grup dan Grup memiliki hak yang dapat diberlakukan atas pembayaran untuk kinerja yang diselesaikan hingga saat ini.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (metode akrual), kecuali merupakan aset yang terkait dengan aktivitas kontrak masa depan.

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak, menghasilkan sumber daya untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") atau penambahan untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") dan diharapkan dapat dipulihkan. Beban tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan dicatat sebagai aset lancar lainnya. Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut.

A performance obligation may be satisfied at the following:

- *A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
- *Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that can be recognized as the performance obligation is satisfied.*

A performance obligation is satisfied at a point in time unless it meets one of the following criteria, in which case it is satisfied over time:

- *The customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the Group's performance as the Group performs;*
- *The Group's performance creates or enhances an asset that the customer controls as the asset is created or enhanced; and*
- *The Group's performance does not create an asset with an alternative use to the Group and the Group has an enforceable right to payment for performance completed to date.*

Expense Recognition

Expenses are recognized as incurred (accrual basis), unless they create an asset related to future contract activity.

The costs that directly relate to the contract generate resources to satisfy the contract ("cost to fulfill") or is incremental on obtaining a contract ("cost to obtain") and are expected to be recovered. These costs are therefore eligible for capitalization under PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers and recognized as other current assets. Such cost will be amortized on a systematic basis that is consistent with the transfer of the goods or services to which such asset relates.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

x. Pengakuan Pendapatan Kompensasi dan Beban Penggunaan Prasarana Pemerintah

- 1) Pendapatan kompensasi *Public Service Obligation (PSO)* yang diperoleh dari Pemerintah disajikan dalam laba rugi sebagai pendapatan jasa angkutan penumpang.
- 2) Pendapatan dari kompensasi PSO diakui secara akrual yang dibatasi oleh penyediaan anggaran yang tertuang di anggaran Pemerintah (berdasarkan DIPA).
- 3) Segala ketentuan mengenai PSO diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.
- 4) Beban pemeliharaan prasarana yang dibiayai oleh Pemerintah (IMO) yang pengerjaannya dilakukan oleh Perusahaan diperlakukan sebagai Pendapatan Usaha dan diakui saat terjadinya sesuai dengan nilai kontrak antara Pemerintah dan Perusahaan sebagai penyelenggara.
- 5) Beban penggunaan prasarana milik Pemerintah (TAC - *Track Access Charge*) yang dibiayakan menjadi penambah beban operasi tidak langsung dan diakui saat terjadinya.
- 6) Pendapatan kompensasi angkutan perintis yang diperoleh dari pemerintah disajikan sebagai pendapatan jasa angkutan dan diakui secara akrual.

x. The Recognition of Compensation Income and Expenses of Government's Infrastructure

- 1) *Compensation income of Public Service Obligation (PSO) received from the Government presented in the profit or loss as revenue passenger transportation service.*
- 2) *The PSO compensation income obtained from the Government is recognized in accrual method that limited by budget stipulated in the Government budget (based on DIPA).*
- 3) *All of the PSO arranged in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 84/PMK.02/2016 about Procedures for Procurement, Disbursement, and Accountability of the Public Service Obligation Fund or the Railway Transport Sector Economy Class.*
- 4) *The infrastructure maintenance expenses are funded by Government (IMO), which is performed by the Company and treated as Revenue and recognize when incurred in accordance with the contract between the Government and the Company as organizer.*
- 5) *The expenses of railroad infrastructure owned by government (TAC - Track Access Charge) which are financed become an indirect addition to operating expenses and are recognized when incurred.*
- 6) *Pioneer transportation compensation income received from the Government presented as revenue freight service and recognized on accrual basis.*

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

y. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dengan menggunakan dua dasar yaitu: model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

(i) Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan
- (2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

y. Financial Instrument

Initial Recognition and Measurement

The Group recognizes a financial asset or a financial liability in the statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures all financial assets and financial liabilities at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

The Group financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at amortized costs, financial assets at fair value through other comprehensive income, and financial assets at fair value through profit or loss. on the basis of both: the Group's business model for managing the financial assets and the contractual cash flow characteristics of the financial asset.

(i) Financial Assets Measured at Amortized Costs

Financial assets are measured at amortized costs if these conditions are met:

- (1) *The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and*
- (2) *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount, and any loss allowance.

Pendapatan bunga dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit and loss when the asset is derecognized or reclassified.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

Financial assets classified to amortized cost may be sold where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

(ii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCI")

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- (2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

(ii) Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVTOCI")

A financial asset shall be measured at fair value through other comprehensive income if both of the following conditions are met:

- (1) *The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets; and*
- (2) *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

The financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income (OCI), except for impairment gains and losses, and a portion of foreign exchange gains and losses, are recognized in profit or loss. When the asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit and loss as a reclassification adjustment.

(iii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")

(iii) Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet both criteria for neither amortized costs nor FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

After initial recognition, FVTPL financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized in profit or loss.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Grup dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI. Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

Financial assets in form of derivatives and investment in equity instrument are not eligible to meet both criteria for amortized costs or fair value through other comprehensive income FVTOCI. Hence, these are measured at fair value through profit or loss FVTPL. Nonetheless, the Group may irrevocably designate an investment in an equity instrument which is not held for trading in any time soon as FVTOCI. This designation result in gains and losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to retained earnings, not to profit or loss.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

**Pengukuran Selanjutnya Liabilitas
Keuangan**

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

- (a) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
- (b) Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
- (c) Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitmen selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
 - (i) Jumlah penyisihan kerugian dan
 - (ii) Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 72.
- (d) Imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 22 diterapkan. Imbalan kontijensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba rugi.

Saat pengakuan awal Grup dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- (a) Mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda beda; atau

**Subsequent Measurement of Financial
Liabilities**

The Group shall classify all financial liabilities as subsequently measured at amortised cost, except for:

- (a) Financial liabilities at fair value through profit or loss. Such liabilities, including derivatives that are liabilities, shall be subsequently measured at fair value.
- (b) Financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies.
- (c) Financial guarantee contracts and commitments to provide a loan at a below-market interest rate. After initial recognition, an issuer of such a contract and an issuer of such a commitment shall subsequently measure it at the higher of:
 - (i) the amount of the loss allowance
 - (ii) the amount initially recognised less, when appropriate, the cumulative amount of income recognised in accordance with the principles of PSAK 72.
- (d) Contingent consideration recognised by an acquirer in a business combination to which PSAK 22 applies. Such contingent consideration shall subsequently be measured at fair value with changes recognised in profit or loss.

The Group may, at initial recognition, irrevocably designate a financial liability as measured at fair value through profit or loss when permitted by the standard or when doing so results in more relevant information, because either:

- (a) It eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as "an accounting mismatch") that would otherwise arise from measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on them on different bases; or

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

(b) Sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Grup.

(b) A group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the group is provided internally on that basis to the Group's key management personnel.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

The Group derecognizes a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Group transfers the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement.

Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

If the Group transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group derecognizes the financial asset and recognizes separately as asset or liabilities any rights and obligations created or retained in the transfer. If the Group neither transfers not retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset and has retained control, the Group continues to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group continues to recognize the financial asset.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

The Group removes a financial liability from its statement of financial position when, and only when, it is extinguished, ie when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada FVTOCI.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain, sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

- i. Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
- ii. Nilai waktu uang; dan

Impairment of Financial Assets

The Group recognizes expected credit loss for its financial assets measured at amortized costs and financial assets measured at FVTOCI.

At the end of each reporting date, the Group calculates any impairment provision in financial instruments based on its lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since its initial recognition. However, if credit risk has not increased significantly since initial recognition, then a 12 months expected credit loss is recognized.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

The Group considers a financial asset to be in default when the counterparty is unlikely to pay its credit obligations to the Group in full. The maximum period considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual period over which the Group is exposed to credit risk.

Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets' carrying amount, except for financial assets measured at FVTOCI where its impairment is recognized in other comprehensive income, the expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

The expected credit loss of financial instruments are conducted by a means which reflect:

- i. An unbiased and probability-weighted amount that reflects a range of possible outcomes;*
- ii. Time value of money; and*

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

- iii. Informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomik dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat "investment grade" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Grup menggunakan metode *roll rate* untuk mengukur penurunan nilai piutang usaha.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

- iii. Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions.

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. To determine whether a financial asset has a low credit risk, the Group may use internal credit risk rating or external assessment. For example, a financial asset with "investment grade" according to external assessment has a low credit risk rating, thus it does not experience an increase in significant credit risk since initial recognition.

The Group is using the roll rate method to measure the provision for impairment of account receivable.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Reklasifikasi

Grup mereklasifikasi aset keuangan ketika Grup mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan.

Jika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka diperlukan untuk menerapkan reklasifikasi secara prospektif sejak tanggal reklasifikasi. Keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai) atau bunga yang sebelumnya diakui tidak disajikan kembali.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan dari biaya perolehan diamortisasi menjadi FVTPL, maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perbedaan antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi. Sebaliknya, jika Grup mereklasifikasi aset keuangannya dari FVTPL menjadi biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi menjadi nilai tercatat bruto baru.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan dari biaya perolehan diamortisasi menjadi FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar diakui pada penghasilan komprehensif lain. Tingkat suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit yang diharapkan tidak disesuaikan sebagai hasil dari reklasifikasi.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Reclassification

The Group reclassifies a financial asset if and only if the Group's business model objective for its financial assets changes so its previous model assessment would no longer apply.

If the Group reclassifies a financial asset, it is required to apply the reclassification prospectively from the reclassification date. Previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest are not restated.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTPL, then its fair value is measured at reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and its fair value is recognized in profit or loss. Otherwise, if the Group reclassifies its financial asset from FVTPL into amortized cost, then its fair value at the date of reclassification becomes new gross carrying amount.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTOCI, its fair value is measured at the reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and fair value is recognized in other comprehensive income. Effective interest rate and expected credit loss measurement are not adjusted as a result of the reclassification.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Sebaliknya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangannya dari FVTOCI menjadi biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan tersebut direklasifikasi ke nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Namun, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihilangkan dari ekuitas dan disesuaikan dengan nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi, aset keuangan diukur dengan cara yang sama seperti biaya perolehan diamortisasi.

Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensinya untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Otherwise, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into amortized cost, the financial asset is reclassified by its fair value at the reclassification date. However, any cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are omitted from equity and adjusted to the financial asset's fair value at the date of reclassification. Consequently, at the reclassification date, the financial asset is measured the same way as if it were amortized cost.

This adjustment affects other comprehensive income but not profit or loss, and hence it is not a reclassification adjustment. Effective interest rate and expected credit loss are no longer adjusted as a result of the reclassification.

When the Group reclassifies its financial asset out of the FVTPL into FVTOCI, the financial asset is measured at its fair value. Similarly, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into FVTPL the financial asset is measured at its fair value. Any gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified out of the equity to profit or loss as a reclassification adjustment at the date of reclassification.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hierarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
- (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2); dan
- (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hierarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

z. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- (i) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);*
- (ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2); and*
- (iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).*

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

z. Earning per Share

Basic earnings per share is computed by dividing the profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Grup menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

For the purpose of calculation of diluted earnings per share, the Group shall adjust profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity, and the weighted average number of shares outstanding, for the effect of all dilutive potential ordinary shares.

aa. Aset Takberwujud

Lisensi dan perangkat lunak yang diperoleh dikapitalisasi berdasarkan biaya-biaya yang terjadi untuk memperoleh dan mempersiapkannya hingga siap digunakan. Biaya-biaya ini diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang masa pemanfaatan.

aa. Intangible Assets

Licenses and software are capitalized on the basis of the cost incurred to acquire and to prepare the assets for intended use. These costs are amortized using the straight-line method over the useful life.

Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaharuan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak.

The cost of maintaining an extension or renewal of legal title to land is recognized as an intangible asset and amortized over the life of the legal entitlement.

bb. Segmen Operasi

Grup menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmetasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal didalam Grup.

bb. Operating Segment

Group presented operating segments based on the financial information used by the chief operating decision maker in assessing the performance of segments and in the allocation of resources. The segments are based on the activities of each of the operating legal entities within the Group.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

An operating segment is a component of the entity:

- yang terlihat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

- *that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);*
- *whose operating results are regularly reviewed by chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assesses its performance; and*
- *for which separate financial information is available.*

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

cc. Provisi

Provisi diakui bila Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan besar kemungkinan Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban serta jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Jumlah diakui sebagai provisi merupakan taksiran terbaik yang diharuskan menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan memperhatikan unsur risiko dan ketidakpastian yang melekat pada kewajiban tersebut. Provisi diukur menggunakan estimasi arus kas untuk menyelesaikan kewajiban kini dengan jumlah tercatatnya sebesar nilai kini dari arus kas tersebut.

Bila beberapa atau keseluruhan dari manfaat ekonomis mengharuskan penyelesaian provisi diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian tagihan dapat diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

dd. Bagian Hibah dari Pinjaman Pemerintah

Manfaat atas pinjaman pemerintah yang memiliki tingkat bunga di bawah tingkat bunga pasar diperlakukan sebagai hibah pemerintah. Pinjaman tersebut diakui dan diukur berdasarkan nilai wajar pada tanggal neraca. Manfaat pinjaman dengan tingkat bunga di bawah tingkat bunga pasar diukur sebagai perbedaan antara nilai tercatat awal pinjaman dan jumlah yang diterima. Manfaat tersebut diakui sebagai pendapatan ditangguhkan dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama periode entitas mengakui beban atas biaya terkait yang dimaksudkan akan dikompensasikan dengan hibah tersebut.

cc. Provision

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Group will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, the receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

dd. The Grants Portion of Government Loans

Benefits on government loans that bear interest rates below market rates are treated as government grants. These loans are recognized and measured at fair value at balance sheet date. Benefits bearing interest rates below market interest rates are measured as the difference between the original carrying amount of the loan and the amount received. These benefits are recognized as deferred income and amortized on straight line method over the period in which the entity recognizes expenses for the related costs it is intended to compensate for under the grant.

4. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022

4. New and Revised Statements of Financial Accounting Standard (“PSAK”) and Interpretations of Financial Accounting Standard (“ISAK”) effective for the year beginning on or after January 1, 2022

Berikut amendemen dan penyesuaian atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual;
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak;
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- PSAK 69 (Penyesuaian Tahunan 2020): Agrikultur;
- PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020): Instrumen Keuangan; dan
- PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020): Sewa.

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

The following are amendment and improvements to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2022, with early adoption is permitted, are as follows:

- *Amendments PSAK 22: Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks;*
- *Amendments PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Onerous Contracts – Cost of Fulfilling the Contracts;*
- *Amendments PSAK 16: Property, Plant and Equipment regarding Proceeds before Intended Use;*
- *PSAK 69 (Annual Improvement 2020): Agriculture;*
- *PSAK 71 (Annual Improvement 2020): Financial Instruments; and*
- *PSAK 73 (Annual Improvement 2020): Leases.*

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current year or prior financial year.

5. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

5. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Estimates and Judgments

Pertimbangan

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Judgment

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimate and assumption that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

**5. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan
Pertimbangan Akuntansi yang Penting
(Lanjutan)**

**5. Source of Estimation Uncertainty and
Critical Accounting Estimates and
Judgments (Continued)**

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Cadangan kerugian penurunan nilai

Grup menilai penurunan nilai pada aset keuangan dengan biaya perolehan yang diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen harus mempertimbangkan informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan *roll rate* dan *discounted cash flow* untuk menilai kas dan setara kas, dana yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha dan piutang lain-lain. Nilai tercatat aset keuangan telah diungkapkan dalam Catatan 6, 7, 8 dan 9.

Pensiun dan Imbalan Pascakerja

Penentuan kewajiban dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun, dan tingkat kematian.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared.

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Allowance for impairment loss

The Group assesses its financial assets measured at amortized cost for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes a judgement as to whether there is reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions. The Group applies simplified approach using *roll rate* and *discounted cash flow* to measuring cash and equivalents, restricted fund, trade receivables and other receivable. The carrying amounts of financial assets are disclosed in Notes 6, 7, 8 and 9.

Pension and Post-Employment Benefits

The determination of the Group's cost for pension and employee benefits liabilities is depended on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turnover rate, disability rate, retirement age and mortality rate.

**5. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan
Pertimbangan Akuntansi yang Penting
(Lanjutan)**

**5. Source of Estimation Uncertainty and
Critical Accounting Estimates and
Judgments (Continued)**

Pensiun dan Imbalan Pascakerja (Lanjutan)

Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup diperlakukan sesuai dengan kebijakan yang dijelaskan pada Catatan 3.t. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto (Catatan 27).

**Pension and Post-Employment Benefits
(Continued)**

Actual results that differ from the Group's assumptions are treated in accordance with the policies as mentioned in Note 3.t. While the Group believes that the assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's assumption may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense (Note 27).

**Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Hak
Pengoperasian Aset Prasarana**

Biaya perolehan aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya, sedangkan hak pengoperasian aset prasarana perkeretaapian diamortisasi berdasarkan metode garis lurus. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 5 sampai dengan 40 tahun, sedangkan masa manfaat hak pengoperasian aset prasarana perkeretaapian sesuai dengan perjanjian pengelolaan aset prasarana. Umur masa manfaat ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan dan amortisasi masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat atas aset tetap dan hak pengelolaan aset pada tanggal-tanggal pelaporan masing-masing diungkapkan dalam Catatan 16 dan 18.

**Depreciation of Fixed Assets and
Amortization of Infrastructure Assets
Operating Rights**

The costs of fixed asset, except from land, are depreciated on the straight-line method over their estimated useful lives, while the railway infrastructure assets operating rights are amortized based on the straight-line method. Management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 5 to 40 years, while the useful life of the railway infrastructure assets accordance to the agreement of operating rights of assets. These are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its business. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation and amortization changes could be revised. The net carrying amounts of the Group's fixed assets and railways infrastructure assets operating rights at reporting dates are disclosed in Notes 16 and 18, respectively.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau unit penghasil kas melebihi nilai terpulihkannya, yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati, dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

Impairment of Non-Financial Assets

An impairment exists when the carrying value of an asset or a cash gain unit exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing the asset.

**5. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan
Pertimbangan Akuntansi yang Penting
(Lanjutan)**

Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Proyeksi arus kas tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum ada perikatannya atau investasi signifikan di masa depan yang akan meningkatkan kinerja dari unit penghasil kas yang diuji.

Nilai terpulihkan paling sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk model arus kas yang didiskontokan seperti halnya dengan arus kas masuk masa depan yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi.

Pajak Penghasilan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya pendapatan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas pendapatan dan beban pajak yang telah dicatat.

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atau kelebihan bayar atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Grup mengakui aset atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi bahwa nilai tambahan pajak penghasilan badan yang akan jatuh tempo lebih rendah dari kelebihan bayar pajak.

Aset Pajak Tangguhan

Aset Pajak Tangguhan diakui atas seluruh beda temporer yang boleh dikurangkan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen diharuskan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.

**Penentuan Nilai Wajar Liabilitas Program
Pemulihan Ekonomi Nasional ("PEN")**

Nilai wajar liabilitas PEN dihitung menggunakan metode *discounted cash flow* dengan suku bunga 5,07% per tahun selama 10 tahun masa pinjaman. *Projected cash flow* yang digunakan telah memperhitungkan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi indikator pembayaran berdasarkan perjanjian pinjaman.

**5. Source of Estimation Uncertainty and
Critical Accounting Estimates and
Judgments (Continued)**

The value in use calculation is based on a discounted cash flow model. The future cash flow projection does not include restructuring activities that the Group is not yet committed to or significant future investments that will enhance the asset's performance of the cash gain unit being tested.

The recoverable amount is most sensitive to the discount rate used for the expected future cash inflows and the growth rate used for extrapolation purposes.

Income Tax

Uncertainties over the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, that could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Significant judgment is undertaken to determine the provision or overpayment of corporate income tax. There are certain transactions and computations which the ultimate tax determination is uncertain in the ordinary course of business. The Group recognized the assets on corporate income tax based on an estimate that any additional corporate income tax that will be due still lower than the amount of tax overpayment.

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all of deductible temporary differences which is probable that the taxable profit will be available against thus the losses can be utilized. The significant estimation made by management are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based on the time of use and the level of future taxable profit and future tax planning strategies.

**Determination of the Fair Value of "Program
Pemulihan Ekonomi Nasional ("PEN")
Liability**

The fair value of PEN liabilities is calculated using the discounted cash flow method with an interest rate of 5.07% per annum for the 10 years of the loan period. The projected cash flow used has taken into account the Company's ability to meet the payment indicators based on the loan agreement.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

6. Kas dan Setara Kas

6. Cash and Cash Equivalents

	2022	2021	
Kas			Cash on Hand
Kas Kantor	10.139.476	7.855.065	Cash on Hand-Office
Kas Stasiun	2.863.194	4.275.466	Cash on Hand-Stations
Jumlah Kas	13.002.670	12.130.531	Total Cash on Hand
Bank			Banks
Pihak Berelasi (Catatan 41)	4.894.631.652	2.564.298.785	Related Parties (Note 41)
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Bank Central Asia Tbk	203.210.705	44.053.016	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	104.957.952	4.728.146	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Permata Tbk	32.884.382	64.357.501	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	32.194.776	15.403.653	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
PT Bank CIMB Niaga Tbk	10.444.565	3.718.977	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank HSBC Indonesia	3.228.504	309.955	PT Bank HSBC Indonesia
PT Bank DKI	1.723.322	141.535	PT Bank DKI
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	548.401	692.302	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	383.264	378.148	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Standard Chartered Bank	--	64.526	Standard Chartered Bank
Sub Jumlah	389.575.871	133.847.759	Sub Total
Jumlah Bank	5.284.207.523	2.698.146.544	Total Bank
Deposito Berjangka			Time Deposit
Pihak Berelasi (Catatan 41)	398.510.000	1.097.991.668	Related Parties (Note 41)
Jumlah	5.695.720.193	3.808.268.743	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	--	(64.811)	Allowance for Impairment Losses
Neto	5.695.720.193	3.808.203.932	Net

Berdasarkan mata uang asing:

By currencies:

	2022	2021	
Kas			Cash
Rupiah	13.002.670	12.130.531	Rupiah
Bank			Banks
Rupiah	4.007.355.256	1.567.044.043	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	1.258.865.187	1.129.473.059	United States Dollar
Euro	17.243.459	1.155.031	Euro
Yen Jepang	743.621	474.411	Japanese Yen
Deposito Berjangka			Time Deposit
Rupiah	241.200.000	1.097.991.668	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	157.310.000	--	United States Dollar
Jumlah	5.695.720.193	3.808.268.743	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	--	(64.811)	Allowance for Impairment Losses
Neto	5.695.720.193	3.808.203.932	Net

6. Kas dan Setara Kas (Lanjutan)

6. Cash and Cash Equivalents (Continued)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

The movement of the allowance for impairment losses is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo Awal	(64.811)	(36.176)	Beginning Balance
Pemulihan (Penambahan)	64.811	(28.635)	Recovery (Addition)
Saldo Akhir	--	(64.811)	Ending Balance

Kisaran suku bunga per tahun dan jangka waktu deposito berjangka adalah sebagai berikut:

Interest rates per annum and maturity period of time deposits are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Rupiah	2,50% - 5,00 %	2,20% - 7,25 %	Rupiah
Jangka Waktu	1-3 Bulan/ Months (ARO)	1-3 Bulan/ Months (ARO)	Maturity Period

7. Dana Dibatasi Penggunaannya

7. Restricted Funds

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pihak Berelasi (Catatan 41)	5.590.894.318	2.744.384.445	Related Parties (Note 41)
Pihak Ketiga			Third Party
PT Bank Central Asia Tbk	19.491.658	5.249.392	PT Bank Central Asia Tbk
Jumlah	5.610.385.976	2.749.633.837	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	--	(1.169.919)	Allowance for Impairment Losses
Neto	5.610.385.976	2.748.463.918	Net

Berdasarkan mata uang:

By currencies:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Rupiah	5.610.385.819	2.749.633.694	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	157	143	United States Dollar
Jumlah	5.610.385.976	2.749.633.837	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	--	(1.169.919)	Allowance for Impairment Losses
Neto	5.610.385.976	2.748.463.918	Net

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

The movement of the allowance for impairment losses is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo Awal	(1.169.919)	(25.207)	Beginning Balance
Pemulihan (Penambahan)	1.169.919	(1.144.712)	Recovery (Addition)
Saldo Akhir	--	(1.169.919)	Ending Balance

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

7. Dana Dibatasi Penggunaannya (Lanjutan)

7. Restricted Funds (Continued)

Rincian peruntukan dana dibatasi penggunaannya adalah sebagai berikut:

Details allocation of restricted funds are as follows:

No	Peruntukan Dana/ Allocation of Funds	2022	2021
1.	Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung/ <i>Jakarta Bandung High Speed Railway Project</i>	3.200.000.000	--
2.	Proyek LRT Jabodetabek/ <i>LRT Jabodetabek Project</i>	2.153.637.590	2.600.128.219
3.	Dana Floating Kartu Multi Trip (KMT)/ <i>Floating Money Trip Card (KMT)</i>	148.546.590	98.289.701
4.	Proyek KA Bandara Soekarno-Hatta/ <i>Soekarno-Hatta Airport Train Railway Project</i>	56.372.595	--
5.	Pembukaan L/C Impor Suku Cadang dan Peralatan Pemeliharaan Sistem Brake EMU 6000, EMU 8500/800, Pembelian Suku Cadang dan Jaminan Pinjaman Bank/ <i>Opening the L/C Import Spare Parts and Maintenance Equipment Brake Systes EMU 6000, EMU 8500/800 and the Purchase of Spare Parts</i>	50.937.864	50.937.864
6.	Pembelian Sarana KA Stasiun Soekarno-Hatta/ <i>Purchasing of Rolling Stock for Soekarno-Hatta Station</i>	458.871	5.237
7.	Pengadaan Sarana atas Penyelenggaraan Angkutan Jalur Trans Sumatera/8500/800 <i>Procurement of Facilities for the Implementation of Trans Sumatera Transportation/8500/800</i>	382.009	38.596
8.	Pemeliharaan Sarana KA Bandara Kualanamu, Medan/ <i>Maintenance Agreement of Airport Rolling Stock in Kualanamu, Medan</i>	38.674	222.465
9.	Proyek Commuter Jabodetabek/ <i>Commuter Jabodetabek Project</i>	11.783	11.755
Jumlah/Total		5.610.385.976	2.749.633.837
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / Allowance for Impairment Losses		--	(1.169.919)
Neto/Net		5.610.385.976	2.748.463.918

8. Piutang Usaha

8. Trade Receivables

	2022	2021	
Pihak Berelasi (Catatan 41)	963.280.644	711.351.610	Related Parties (Note 41)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(28.650.899)	(33.256.915)	Allowance for Impairment Losses
Pihak Berelasi - Neto	934.629.745	678.094.695	Related Parties - Net
Pihak Ketiga	709.101.183	669.070.351	Third Parties
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(237.392.861)	(272.066.573)	Allowance for Impairment Losses
Pihak Ketiga - Neto	471.708.322	397.003.778	Third Parties - Net
Neto	1.406.338.067	1.075.098.473	Net

Berdasarkan mata uang:

By currencies:

	2022	2021	
Rupiah	1.514.495.695	1.262.017.258	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	157.886.132	118.404.703	United States Dollar
Jumlah	1.672.381.827	1.380.421.961	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(266.043.760)	(305.323.488)	Allowance for Impairment Losses
Neto	1.406.338.067	1.075.098.473	Net

8. Piutang Usaha (Lanjutan)

8. Trade Receivables (Continued)

Berdasarkan umur:

By age:

	2022	2021	
0 - 30 Hari	1.190.788.301	834.132.042	0 - 30 Days
31 - 90 Hari	113.776.059	203.487.603	31 - 90 Days
91 - 360 Hari	103.240.557	99.884.863	91 - 360 Days
> 360 Hari	264.576.910	242.917.453	> 360 Days
Jumlah	1.672.381.827	1.380.421.961	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(266.043.760)	(305.323.488)	Allowance for Impairment Losses
Neto	1.406.338.067	1.075.098.473	Net

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

The movement of the allowance for impairment losses is as follows:

	2022	2021	
Saldo Awal	(305.323.488)	(238.894.688)	Beginning Balance
Pemulihan (Penambahan)	39.279.728	(66.428.800)	Recovery (Addition)
Saldo Akhir	(266.043.760)	(305.323.488)	Ending Balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover the possible losses on uncollectible accounts.

Tidak terdapat piutang usaha yang dijadikan jaminan atas pinjaman.

There are no trade receivables that pledged as collateral for the loan.

9. Piutang Lain-lain

9. Other Receivables

	2022	2021	
Piutang Lain-lain - Lancar:			Others Receivable - Current:
Pihak Ketiga	155.311.983	139.979.466	Third Parties
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(65.308.920)	(65.308.920)	Allowance for Impairment Losses
Pihak Ketiga - Neto	90.003.063	74.670.546	Third Parties - Net
Piutang Lain-lain - Tidak Lancar:			Other Receivables - Non Current:
Pihak Berelasi (Catatan 41)	109.925.523	1.040.701.195	Related Party (Note 41)
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(109.925.523)	(1.040.701.195)	Allowance for Impairment Losses
Pihak Berelasi - Neto	--	--	Related Parties - Net
Jumlah Piutang Lain-lain	90.003.063	74.670.546	Total Other Receivables

Piutang lain-lain tidak lancar per 31 Desember 2021 sebagian besar merupakan piutang bunga PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Berdasarkan Perjanjian Pengakuan Utang No. KL.705/XII/8/KA-2021 pada bertanggal 24 Desember 2021 antara Perusahaan dan PSBI (Para Pihak), Para Pihak menyepakati hal-hal berikut:

Other non-current receivables as of December 31, 2021 mostly represent interest receivables from PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Based on the Debt Recognition Agreement No. KL.705/XII/8/KA-2021 on December 24, 2021 between the Company and PSBI (the Parties), the Parties agreed on the following matters:

9. Piutang Lain-lain (Lanjutan)

1. Jumlah kewajiban bunga yang masih harus dibayar oleh PSBI kepada Perusahaan per tanggal 31 Desember 2021 adalah sejumlah Rp930.775.672;
2. Kewajiban pembayaran bunga ini tidak dikenakan bunga kembali;
3. PSBI harus membayar seluruh kewajiban pembayaran bunga secara tunai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2022.

Per 31 Desember 2022, Perusahaan telah menerima pelunasan pinjaman dari PSBI sebesar Rp930.775.672 (Catatan 41).

Berdasarkan umur:

	2022	2021
0 - 30 Hari	89.350.419	75.274.569
31 - 90 Hari	247.658	188.828
91 - 360 Hari	1.730.388	1.900.499
> 360 Hari	173.909.041	1.103.316.765
Jumlah	265.237.506	1.180.680.661
Dikurangi:		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(175.234.443)	(1.106.010.115)
Neto	90.003.063	74.670.546

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

	2022	2021
Saldo Awal	(1.106.010.115)	(175.236.773)
Reklasifikasi dari Akumulasi		
Perubahan Nilai Wajar	--	(930.775.672)
Pemulihan - Bersih	930.775.672	2.330
Saldo Akhir	(175.234.443)	(1.106.010.115)

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah cukup untuk menutupi kerugian penurunan nilai atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

Eksposur maksimum risiko kredit pada tanggal pelaporan adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori piutang yang disebutkan di atas. Grup tidak menguasai aset-aset sebagai jaminan piutang.

9. Other Receivables (Continued)

1. Total amount of interest that have to be paid by PSBI to the Company as of December 31, 2021 is Rp930,775,672;
2. The interest payment obligation is not subject to interest charged;
3. PSBI must pay all interest payments in cash no later than December 31, 2022.

As of December 31, 2022, the Company has received repayment of a loan from PSBI in the amount of Rp930,775,672 (Note 41).

By age:

0 - 30 Days
31 - 90 Days
91 - 360 Days
> 360 Days
Total
Less:
Allowance for Impairment Losses
Net

The movement of the allowance for impairment losses is as follows:

Beginning Balance
Reclassified from Accumulated
Changes of Fair value
Net Recovery
Ending Balance

Management believes that the allowance for impairment losses on receivables is adequate to cover possible losses on the uncollectible other receivables.

The maximum exposure to credit risk at the reporting date is the carrying amount of each class of receivables mentioned above. The Group does not recognize any asset as collateral for receivables.

10. Persediaan

10. Inventories

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Suku Cadang Sarana	1.065.426.895	902.493.791	<i>Rolling Stock Spare Parts</i>
Suku Cadang Prasarana	223.925.849	156.223.105	<i>Infrastructure Spare Parts</i>
Lain-lain	23.090.194	14.137.585	<i>Others</i>
Jumlah	1.312.442.938	1.072.854.481	Total
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(167.128.997)	(179.073.842)	<i>Allowance for Impairment Losses</i>
Neto	1.145.313.941	893.780.639	Net

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

The movement of the allowance for impairment losses is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo Awal	(179.073.842)	(149.862.625)	<i>Beginning Balance</i>
Pemulihan (Penambahan)	11.944.845	(29.211.217)	<i>Recovery (Addition)</i>
Saldo Akhir	(167.128.997)	(179.073.842)	Ending Balance

Suku cadang sarana merupakan suku cadang yang digunakan untuk perawatan rutin/berkala armada lokomotif, kereta (penumpang, pembangkit, diesel, dan listrik) dan gerbong yang dilakukan di Balai Yasa dan Dipo Perusahaan yang tersebar di Daerah Operasi dan Divisi Regional.

Rolling stock spare parts represent spare parts used for routine/scheduled maintenance of locomotives, trains (passenger, generator, diesel, and electric) and wagons which are undertaken in the Company's Balai Yasa and Depots located in various Operational Regions and Regional Divisions.

Suku cadang prasarana digunakan untuk perawatan atau perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada prasarana pokok yang meliputi jalan rel kereta api, jembatan, perlintasan, persinyalan, instalasi listrik dan instalasi komunikasi. Sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tanggal 25 April 2007 tentang Perkeretaapian, penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib merawat prasarana perkeretaapian agar tetap layak operasi.

Infrastructure spare parts are used to maintain or repair any damages occurred in the main infrastructures which comprise of railway-road, bridge, cross-bar-crossing, signal, electric installation and communication installation. According to Law No. 13 Year 1992 regarding Railways as replaced by Law No.23 Year 2007 dated April 25, 2007 regarding Railways, the operator of the railway infrastructure has obligation to maintain the operating feasible of railway infrastructures.

Jumlah persediaan yang telah digunakan dan diakui sebagai beban perawatan sarana dan prasarana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.554.174.318 dan Rp1.367.380.537.

Total of inventories which have been used and recognized as facility and infrastructure maintenance expenses for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp1,554,174,318 and Rp1,367,380,537, respectively.

Grup tidak mengasuransikan persediaan terhadap risiko kecelakaan, kebakaran dan jenis risiko kerugian lainnya.

The Group does not insure inventories against any risk of accidents, fire and other types of risk of losses.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai persediaan adalah cukup untuk menutupi kerugian penurunan nilai atas nilai persediaan usang.

Management believes that the allowance for impairment losses on inventories are adequate to cover possible losses on the obsolete inventories.

11. Pendapatan Masih akan Diterima

11. Accrued Income

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pihak Berelasi (Catatan 41)	884.228.974	250.856.413	Related Parties (Note 41)
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(164.662.291)	(164.662.291)	Allowance for Impairment Losses
Pihak Berelasi - Neto	<u>719.566.683</u>	<u>86.194.122</u>	Related Parties - Net
Pihak ketiga			Third parties
Jasa Angkutan Barang	137.680.851	122.555.436	Freight Transportation Services
Jasa Parkir	8.825.591	8.825.610	Parking Services
Konstruksi	3.595.759	2.907.488	Construction
Lainnya	71.424.186	19.775.184	Others
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.476.099)	(1.203.230)	Allowance for Impairment Losses
Pihak Ketiga - Neto	<u>220.050.288</u>	<u>152.860.488</u>	Third Parties - Net
Jumlah	<u>939.616.971</u>	<u>239.054.610</u>	Total

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

The movement of the allowance for impairment losses is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo Awal	(165.865.521)	(164.956.303)	Beginning Balance
Penambahan	(272.869)	(909.218)	Addition
Saldo Akhir	<u>(166.138.390)</u>	<u>(165.865.521)</u>	Ending Balance

Pendapatan masih akan diterima jasa angkutan barang merupakan tagihan atas angkutan barang yang sudah diantar namun belum ditagihkan yang meliputi angkutan batu bara, angkutan semen, angkutan peti kemas, angkutan parcel/hantaran, angkutan bahan bakar minyak, angkutan perkebunan, angkutan logam/besi baja, dan angkutan lainnya.

Accrued income of freight transportation service represents revenue generated from freight transportations which are already delivered but not billed yet, comprising of coal transportation, cement transportation, container transportation, parcel/delivery transportation, fuel transportation, plantation transportation, metal/steel transportation, and other transportations.

Pendapatan masih akan diterima lainnya merupakan pendapatan parkir, katering, jasa *outsourcing*, biaya pekerjaan, iklan, promosi dan konstruksi.

Other accrued income represents revenues generated from parking, catering, outsourcing service, service fee, promotion, advertisement and construction.

12. Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka

12. Advances and Prepaid Expenses

a. Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka Jangka Pendek

a. Short-Term Advances and Prepaid Expenses

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Biaya Dibayar di Muka	62.652.603	204.129.707	Prepaid Expenses
Uang Muka Pihak Ketiga	53.798.799	74.767.155	Third Parties Advances
Uang Muka Dinas	3.851.772	58.279	Operating Advances
Jumlah	<u>120.303.174</u>	<u>278.955.141</u>	Total

**12. Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka
(Lanjutan)**

**12. Advances and Prepaid Expenses
(Continued)**

Biaya dibayar di muka merupakan pembayaran di muka kepada sub kontraktor dan seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Grup untuk menyelesaikan proyek-proyek yang sedang dikerjakan, pembayaran jasa asuransi dan sewa.

Prepaid expenses represent advance payment to sub contractors and all costs incurred to complete Group's projects under construction, insurance premium and rent.

Uang muka pihak ketiga merupakan pembayaran di muka kepada pemasok dan pembelian barang.

Third parties advances represent the advance payments to suppliers and inventory purchases.

b. Uang Muka Jangka Panjang

b. Long-Term Advances

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Uang Muka Aset	20.640.157	163.579.815	Assets Advances
Uang Muka Setoran Modal	--	7.230.581.343	Paid in Capital Advances
Dikurangi:			Less:
Penurunan Nilai Wajar	--	(621.466.260)	Decrease in Fair Value
Jumlah	<u>20.640.157</u>	<u>6.772.694.898</u>	Total

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai wajar uang muka adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for decrease in fair value are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo Awal	621.466.260	--	Beginning Balance
Reklasifikasi dari			Reclassified from
Cadangan Penurunan Nilai	--	621.466.260	Allowance for impairment
Reklasifikasi ke Investasi			Reclassified to Investment
pada Entitas Ventura			in Joint Venture
Bersama (Catatan 15.a)	(621.466.260)	--	(Note 15.a)
Saldo Akhir	<u>--</u>	<u>621.466.260</u>	Ending Balance

Pada 31 Desember 2022, sebagian besar uang muka aset merupakan uang muka atas pembelian Kereta Diesel Bandara International Adi Soemarmo (BIAS).

As of December 31, 2022 most of the advances for assets represent advances for the purchase Diesel trainset Bandara International Adi Soemarmo (BIAS).

Uang muka setoran modal pada 31 Desember 2021 merupakan tambahan setoran modal Perusahaan pada PSBI yang terdiri dari:

Paid in capital advances as of December 31, 2021 represents the Company's additional capital in PSBI which consists of:

1. Restrukturisasi pokok pinjaman sebesar nilai wajar Rp2.155.464.293; dan
2. Setoran tunai dari PMN sebesar Rp4.300.000.000 dan tambahan modal untuk restrukturisasi sebesar Rp153.650.790.

1. Restructuring of principal loan amounting to its fair value of Rp2,155,464,293; and
2. Cash deposit from PMN of Rp4,300,000,000 and additional capital for restructuring of Rp153,650,790.

**12. Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka
(Lanjutan)**

**12. Advances and Prepaid Expenses
(Continued)**

Restrukturisasi pokok pinjaman sebesar nilai wajar Rp2.155.464.293 berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Pinjaman No. KL.705/XII/7/KA-2021 dan Perjanjian Uang Muka Setoran Modal No. KL.705/XII/9/KA-2021 masing-masing bertanggal 24 Desember 2021 antara Perusahaan dan PSBI (Para Pihak), menyatakan bahwa Para Pihak sepakat untuk melakukan perubahan atas perlakuan *Operating Expenditure* ("opex") sebesar Rp3.450.000 dan *Capital Expenditure* ("capex") sebesar Rp2.773.480.553 ("pokok pinjaman") menjadi pembayaran uang muka setoran modal kepada PSBI.

Restructuring of the loan principal amounted to a fair value Rp2,155,464,293 based on Loan Restructuring Agreement No. KL.705/XII/7/KA-2021 and Capital Deposit Advance Agreement No. KL.705/XII/9/KA-2021 dated December 24, 2021, respectively, between the Company and PSBI ("the Parties"), stated that the Parties agreed to changed the treatment of Operating Expenditure ("opex") of Rp3,450,000 and Capital Expenditure ("opex") of Rp2,773,480,553 ("loan principal") into advance payment for capital deposit to PSBI.

Setoran tunai dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp4.300.000.000 dan tambahan modal untuk restrukturisasi sebesar Rp153.650.790 berdasarkan Perjanjian Uang Muka Setoran Modal No. KL.705/XII/15/KA-2021 tanggal 31 Desember 2021. Tambahan modal ini belum mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga belum efektif menjadi modal disetor Perusahaan di PSBI pada 31 Desember 2021.

Cash deposit from of Government Capital (PMN) amounting to Rp4,300,000,000 and additional capital for restructuring amounting to Rp153,650,790 based on Paid-in Capital Advance Agreement No. KL.705/XII/15/KA-2021 on December 31, 2021 between the Company and PSBI (the Parties). This additional capital was not approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia so that it is not yet effective as the Company's paid-in capital in PSBI as of December 31, 2021.

Berdasarkan Surat dari Menteri BUMN No. S-1051/MBU/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 terkait Persetujuan Tambahan Penyertaan Modal Perusahaan pada PT PSBI, menyatakan bahwa menyetujui penambahan modal berupa konversi pokok pinjaman sebesar Rp2.776.930.553 dan tambahan modal berupa uang sebesar Rp4.516.219.522, sebesar Rp62.568.732 belum dilakukan penyetoran oleh Perusahaan. Penambahan uang muka setoran modal tersebut telah tertuang dalam akta notaris Mala Mukti, S.H., LLM No. 113 tanggal 31 Desember 2021 terkait Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PSBI.

Based on the letter from the Minister of SOEs No. S-1051/MBU/12/2021 dated December 30, 2021 regarding Approval for Additional Company Equity Participation in PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, stated that it approved the additional capital in the form of loan principle conversion amounting to Rp2,776,930,553 and additional capital in the form of cash amounting to Rp4,453,650,790, amounting to Rp62,568,732 has not been paid by the Company. The additional paid-in capital advance has been stated in the notarial deed of Mala Mukti, S.H., LLM No. 113 dated December 31, 2021 regarding the Shareholders' Decision Statement PSBI.

Per 31 Desember 2022, Uang Muka Setoran Modal ini telah disahkan menjadi Setoran Modal (Catatan 15.a).

As of December 31, 2022, Paid in capital advances has been legalized to become Capital Deposit (Note 15.a).

13. Perpajakan

13. Taxation

a. Pajak Dibayar di Muka

a. Prepaid Taxes

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Perusahaan			The Company
Pajak penghasilan			Income tax
Pasal 28a:			Article 28a
2022	98.709.717	--	2022
2021 (Catatan 53)	67.009.624	65.563.063	2021 (Note 53)
2020	--	236.879.766	2020
Pajak pertambahan nilai	103.540.737	114.791.811	Value added tax
Sub Jumlah	<u>269.260.078</u>	<u>417.234.640</u>	Sub Total
Entitas anak			Subsidiaries
Pajak penghasilan			Income tax
Pasal 28a:			Article 28a:
2021	9.873.157	9.762.961	2021 (Note 53)
2020	--	9.116.997	2020
Pajak pertambahan nilai	24.762.782	136.586.941	Value added tax
Sub Jumlah	<u>34.635.939</u>	<u>155.466.899</u>	Sub Total
Jumlah	<u>303.896.017</u>	<u>572.701.539</u>	Total

b. Utang Pajak

b. Taxes Payable

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Perusahaan			The Company
Pajak penghasilan			Income tax
Pasal 21	64.991.629	31.505.527	Article 21
Pasal 22	5.868.954	2.195.091	Article 22
Pasal 23	21.845.785	7.738.113	Article 23
Pasal 4 (2)	12.367.793	46.228.694	Article 4 (2)
Pajak pertambahan nilai	141.624.718	135.943.997	Value added tax
Sub Jumlah	<u>246.698.879</u>	<u>223.611.422</u>	Sub Total
Entitas anak			Subsidiaries
Pajak penghasilan			Income tax
Pasal 21	21.409.723	13.328.064	Article 21
Pasal 23	1.552.318	1.304.706	Article 23
Pasal 25	701.651	179.334	Article 25
Pasal 29	32.771.764	94.824.441	Article 29
Pasal 4 (2)	3.264.006	2.688.724	Article 4 (2)
Pajak pertambahan nilai	2.934.389	3.611.851	Value added tax
Sub Jumlah	<u>62.633.851</u>	<u>115.937.120</u>	Sub Total
Jumlah	<u>309.332.730</u>	<u>339.548.542</u>	Total

c. Perhitungan Taksiran Pajak Penghasilan Badan

c. Self-Assessment of Corporate Income Tax

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b, tarif pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2022 adalah sebesar 22% (dua puluh dua persen).

On October 29, 2021, The Government of the Republik of Indonesia established law No. 7 year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations in lieu of law No. 2 of 2020. In Accordance with the article 17 paragraph (1) point b, the corporate income tax rate for tax year 2022 establishment is 22% (twenty two percent).

13. Perpajakan (Lanjutan)

13. Taxation (Continued)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2.210.588.300	(546.980.526)	<i>Profit (Loss) Before Income Taxes According to Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Laba Entitas Anak- Bersih	361.975.997	444.621.878	<i>Subsidiaries Profit - Net</i>
Efek Eliminasi	(92.430.094)	(79.219.532)	<i>Elimination Effect</i>
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	1.941.042.397	(912.382.872)	<i>Profit (Loss) Before Tax</i>
Beda Waktu:			<i>Timing Differences:</i>
Penyusutan	(272.496.267)	(252.109.080)	<i>Depreciation</i>
Amortisasi	(43.069.098)	(45.759.539)	<i>Amortization</i>
Imbalan Pascakerja	391.642.151	665.081.742	<i>Post-Employment Benefit</i>
Beban Akrual dan Provisi	--	(168.872.873)	<i>Accrued Expense and Provision</i>
Penurunan Nilai Aset Tetap	72.404.085	(58.451.223)	<i>Impairment of Fixed Assets</i>
Penurunan Nilai Persediaan	(11.944.845)	29.211.217	<i>Impairment of Inventories</i>
Penyisihan Penurunan Nilai Aset Keuangan	(59.983.706)	3.425.169	<i>Allowance for Impairment Losses Financial Assets</i>
Sub Jumlah	76.552.320	172.525.413	<i>Sub Total</i>
Beda Tetap:			<i>Permanent Differences:</i>
Beban Tidak Diperkenankan	431.356.098	318.777.130	<i>Non - Deductible Expenses</i>
Pendapatan Bunga	(97.885.674)	(80.488.846)	<i>Interest Income</i>
Pendapatan Sewa	(763.469.835)	(554.792.092)	<i>Rent Revenue</i>
Pendapatan Dividen dari Entitas Anak	(86.558.605)	(45.547.731)	<i>Dividend Income from Subsidiaries</i>
Sub Jumlah	(516.558.016)	(362.051.539)	<i>Sub Total</i>
Taksiran Penghasilan (Rugi) Kena Pajak	1.501.036.701	(1.101.908.998)	<i>Estimated Taxable Income (Loss)</i>
Rugi Fiskal Tahun Sebelumnya:			<i>Fiscal Losses Prior Year:</i>
2020 (Catatan 13.g)	(1.470.926.629)	(1.609.859.715)	<i>2020 (Note 13.g)</i>
2021 (Catatan 53)	(990.200.403)	--	<i>2021 (Note 53)</i>
Akumulasi Rugi Fiskal	(960.090.331)	(2.711.768.713)	<i>Accumulation Fiscal Losses</i>
Taksiran Pajak Kini Perusahaan	--	--	<i>Estimated Current Tax of the Company</i>
Kredit Pajak Penghasilan:			<i>Income Tax Deduction:</i>
Pasal 22	(2.680.982)	(4.509.691)	<i>Article 22</i>
Pasal 23	(96.028.735)	(61.053.372)	<i>Article 23</i>
Jumlah Kredit Pajak	(98.709.717)	(65.563.063)	<i>Total Tax Credit</i>
Lebih Bayar Pajak - Perusahaan	(98.709.717)	(65.563.063)	<i>Tax Over Payment - the Company</i>

Taksiran Penghasilan (Rugi) Kena Pajak hasil rekonsiliasi diatas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

Estimated Taxable Income (Loss) above is the basis for filling out the Annual Tax Return of Corporate Income Tax.

13. Perpajakan (Lanjutan)

13. Taxation (Continued)

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

Reconciliation between tax expense and results of multiplication of accounting profit before tax with prevailing tax rate, are as follows:

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2.210.588.300	(546.980.526)	<i>Profit (Loss) Before Income Taxes According to Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Laba Entitas Anak- Bersih Efek Eliminasi	361.975.997	444.621.878	<i>Subsidiaries Profit - Net Elimination Effect</i>
	(92.430.094)	(79.219.532)	
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	1.941.042.397	(912.382.872)	Profit (Loss) Before Tax
Pajak yang Dihitung Sesuai Tarif yang Berlaku	427.029.327	(200.724.232)	<i>Tax Calculated at Applicable Tax Rate</i>
Koreksi Beda Tetap	(113.642.764)	(79.651.338)	<i>Permanent Difference Corrections</i>
Koreksi Rugi Fiskal	55.141.170	--	<i>Tax Loss Correction</i>
Penyesuaian Beban Pajak Kini	(1.446.561)	5.291.368	<i>Current Tax Expense Adjustment</i>
Penyesuaian Beban Pajak Tangguhan	(28.881.902)	--	<i>Deferred Tax Expense Adjustment</i>
Beban (Manfaat) Pajak Perusahaan	338.199.270	(275.084.202)	The Company's Tax Expense (Benefit)
Beban Pajak Kini Entitas Anak	186.399.810	153.299.319	<i>Subsidiary's Current Tax Expense</i>
Beban (Manfaat) Pajak Konsolidasian	524.599.080	(121.784.883)	Consolidated Tax Expense (Benefit)

d. Rincian Beban (Manfaat) Pajak

d. Details of Tax (Benefit) Expense

Perusahaan:			The Company:
Penyesuaian Pajak Periode Lalu	(1.446.561)	5.291.368	<i>Prior Period Tax Adjustment</i>
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	339.645.831	(280.375.570)	<i>Deferred Tax (Benefit) Expense</i>
Jumlah	338.199.270	(275.084.202)	Total
Entitas Anak:			Subsidiaries:
Beban Pajak Kini	129.815.754	143.642.469	<i>Current Tax Expense</i>
Penyesuaian Pajak Periode Lalu	1.212.318	219.194	<i>Prior Period Tax Adjustment</i>
Beban Pajak Tangguhan	55.371.738	9.437.656	<i>Deferred Tax Expense</i>
Jumlah	186.399.810	153.299.319	Total
Konsolidasian:			Consolidated:
Beban Pajak Kini	129.815.754	143.642.469	<i>Current Tax Expense</i>
Penyesuaian Pajak Periode Lalu	(234.243)	5.510.562	<i>Prior Period Tax Adjustment</i>
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	395.017.569	(270.937.914)	<i>Deferred Tax Expense (Benefit)</i>
Jumlah	524.599.080	(121.784.883)	Total

e. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

e. Deferred Tax

Deferred tax is estimated based on the effect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for the financial reporting with taxable bases of assets and liabilities. Details of deferred tax assets and liabilities are as follows:

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

13. Perpajakan (Lanjutan)

13. Taxation (Continued)

	2021*)	Dibebankan (Dikreditkan) ke Laba Rugi/ Charged (Credited) to Profit or Loss	Dibebankan (Dikreditkan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Charge (Credited) to Comprehensive Income	2022	
Perusahaan:					The Company:
Aset Tetap	(542.799.274)	(59.949.179)	--	(602.748.453)	Fixed Assets
Aset Takberwujud	(43.164.348)	(9.475.202)	--	(52.639.550)	Intangible Assets
Rugi Fiskal	596.589.117	(385.369.244)	--	211.219.873	Tax Loss
Liabilitas Imbalan Kerja	1.267.824.669	75.420.311	(168.267.041)	1.174.977.939	Employee Benefits Liabilities
Penurunan Nilai Aset Tetap dan Persediaan	120.039.089	13.301.033	--	133.340.122	Impairment of Fixed Assets and Inventories
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan	429.051.741	26.426.450	--	455.478.191	Allowance for Impairment Losses of Financial Assets
Sub Jumlah	<u>1.827.540.994</u>	<u>(339.645.831)</u>	<u>(168.267.041)</u>	<u>1.319.628.122</u>	Sub Total
Entitas anak:					Subsidiaries:
Aset Tetap	20.637.645	4.841.900	--	25.479.545	Fixed Assets
Rugi Fiskal	58.886.632	(58.886.632)	--	--	Tax Loss
Liabilitas Imbalan Kerja	6.603.129	(7.052.560)	2.760.266	2.310.835	Employee Benefits Liabilities
Penurunan Nilai Aset Tetap	2.901.225	(247.892)	--	2.653.333	Impairment of Fixed Assets
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	56.839.585	1.437.384	--	58.276.969	Allowance for Impairment Losses of Receivables
Beban Pemeliharaan	19.897.351	4.532.413	--	24.429.764	Maintenance Expenses
Pencadangan Bonus Cadangan Kerugian Nilai Kas dan Setara Kas	(1.237)	1.237	--	--	Bonus Provision Allowance for Impairment Losses of Cash and Cash Equivalents
Sub Jumlah	<u>165.761.918</u>	<u>(55.371.738)</u>	<u>2.760.266</u>	<u>113.150.446</u>	Sub Total
Jumlah	<u>1.993.302.912</u>	<u>(395.017.569)</u>	<u>(165.506.775)</u>	<u>1.432.778.568</u>	Total
	2020*)	Dibebankan (Dikreditkan) ke Laba Rugi/ Charged (Credited) to Profit or Loss	Dibebankan (Dikreditkan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Charge (Credited) to Comprehensive Income	2021*)	
Perusahaan:					The Company:
Aset Tetap	(487.335.276)	(55.463.998)	--	(542.799.274)	Fixed Assets
Rugi Fiskal	354.169.137	242.419.980	--	596.589.117	Tax Loss
Liabilitas Imbalan Kerja	1.087.476.549	146.317.983	34.030.137	1.267.824.669	Employee Benefits Liabilities
Beban Akrua	37.152.032	(37.152.032)	--	--	Accrued Expense
Aset Takberwujud	(33.097.249)	(10.067.099)	--	(43.164.348)	Intangible Assets
Penurunan Nilai Aset Tetap dan Persediaan	126.471.890	(6.432.801)	--	120.039.089	Impairment of Fixed Assets and Inventories
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	428.290.026	750.619	--	429.040.645	Allowance for Impairment Losses of Receivables
Cadangan Kerugian Nilai Kas dan Setara Kas	8.178	2.918	--	11.096	Allowance for Impairment Losses of Cash and Cash Equivalents
Sub Jumlah	<u>1.513.135.287</u>	<u>280.375.570</u>	<u>34.030.137</u>	<u>1.827.540.994</u>	Sub Total
Entitas anak:					Subsidiaries:
Aset Tetap	13.285.047	7.352.598	--	20.637.645	Fixed Assets
Rugi Fiskal	89.915.446	(31.028.814)	--	58.886.632	Tax Loss
Liabilitas Imbalan Kerja	6.092.422	192.384	318.323	6.603.129	Employee Benefits Liabilities
Penurunan Nilai Aset Tetap	49.184	2.852.041	--	2.901.225	Impairment of Fixed Assets
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	42.856.238	13.983.347	--	56.839.585	Allowance for Impairment Losses of Receivables
Beban Pemeliharaan	17.903.527	1.993.824	--	19.897.351	Maintenance Expenses
Pencadangan Bonus Cadangan Kerugian Nilai Kas dan Setara Kas	4.780.919	(4.782.156)	--	(1.237)	Bonus Provision Allowance for Impairment Losses of Cash and Cash Equivalents
Sub Jumlah	<u>174.881.251</u>	<u>(9.437.656)</u>	<u>318.323</u>	<u>165.761.918</u>	Sub Total
Jumlah	<u>1.688.016.538</u>	<u>270.937.914</u>	<u>34.348.460</u>	<u>1.993.302.912</u>	Total

*) Disajikan Kembali, Catatan 54

*) As Restated, Note 54

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

13. Perpajakan (Lanjutan)

13. Taxation (Continued)

f. Surat Ketetapan Pajak

f. Tax Assessment Letter

Tahun Pajak/ Tax Year	Objek Pajak/ Tax Object	Nomor Hasil Pemeriksaan/ Examination Result Number	Tanggal Terbit/ Issued Date	Total Tagihan Pajak/ Total Tax Collection Rp*)
Perusahaan/ The Company				
2021	Surat Tagihan Pajak pajak pertambahan nilai masa Juli/ Tax Collection Letter of value added tax period July	00381/107/21/093/22	19-Dec-22	164.147
2022	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Maret/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period March	00141/101/22/093/22	22-Aug-22	100.000
2020	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar pajak penghasilan badan/ Tax Overpayment Assessment Letter of corporate income tax	00017/406/20/093/22	20-Apr-22	(276.871.157.013)
2020	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar pajak pertambahan nilai masa Januari/ Tax Overpayment Assessment Letter of value added tax period January	00035/407/20/093/22	20-Apr-22	(1.484.979.111)
2020	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar pajak pertambahan nilai masa Februari/ Tax Overpayment Assessment Letter of value added tax period February	00036/407/20/093/22	20-Apr-22	(1.241.749.694)
2020	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar pajak pertambahan nilai masa Maret/ Tax Overpayment Assessment Letter of value added tax period March	00037/407/20/093/22	20-Apr-22	(4.419.027.111)
2020	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar pajak pertambahan nilai masa April/ Tax Overpayment Assessment Letter of value added tax period April	00038/407/20/093/22	20-Apr-22	(140.702.098)
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Desember/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period December	00013/287/20/093/22	20-Apr-22	1.775.925.442
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak penghasilan pasal 21 masa Januari-Desember 2020/ Tax Underpayment Assessment Letter of income tax article 21 period January-December 2020	00017/201/20/093/22	20-Apr-22	96.772.859
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Mei/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period May	00112/207/20/093/22	20-Apr-22	344.062.677
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Juni/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period June	00113/207/20/093/22	20-Apr-22	1.584.077.982
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Juli/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period July	00114/207/20/093/22	20-Apr-22	4.400.636.216
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Agustus/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period August	00115/207/20/093/22	20-Apr-22	4.041.802.315
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa September/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period September	00116/207/20/093/22	20-Apr-22	4.631.733.584
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Oktober/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period October	00117/207/20/093/22	20-Apr-22	6.131.763.213
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa November/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period November	00118/207/20/093/22	20-Apr-22	9.540.550.096
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Desember/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period December	00119/207/20/093/22	20-Apr-22	14.185.415.097
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 23 masa Februari/ Tax Collection Letter of income tax article 23 period February	00059/103/21/619/22	30-May-22	100.000
2019	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa September/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period September	00099/101/19/093/22	06-Oct-22	1.387.793
PT Reska Multi Usaha				
2020	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar pajak penghasilan badan/ Tax Overpayment Assessment Letter of corporate income tax	00034/406/20/093/22	09-Mar-22	(6.254.308.829)
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan badan/ Tax Collection Letter of corporate income tax	00005/106/20/093/22	09-Mar-22	23.629.349
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Januari/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period January	00059/207/20/093/22	09-Mar-22	1.718.054.607
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Februari/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period February	00051/207/20/093/22	09-Mar-22	1.053.420.360
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Maret/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period March	00052/207/20/093/22	09-Mar-22	4.891.465.784
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa April/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period April	00062/207/20/093/22	09-Mar-22	400.983.514
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Mei/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period May	00060/207/20/093/22	09-Mar-22	253.083.990
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Juni/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period June	00061/207/20/093/22	09-Mar-22	118.947.720
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Juli/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period July	00053/207/20/093/22	09-Mar-22	315.924.196
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Agustus/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period August	00054/207/20/093/22	09-Mar-22	540.007.704
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa September/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period September	00055/207/20/093/22	09-Mar-22	246.399.771

*) Nilai Penuh

*) Full Amount

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

13. Perpajakan (Lanjutan)

13. Taxation (Continued)

Tahun Pajak/ Tax Year	Objek Pajak/ Tax Object	Nomor Hasil Pemeriksaan/ Examination Result Number	Tanggal Terbit/ Issued Date	Total Tagihan Pajak/ Total Tax Collection Rp*)
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Oktober/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period October	00056/207/20/093/22	09-Mar-22	117.845.780
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa November/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period November	00057/207/20/093/22	09-Mar-22	615.494.936
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Desember/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period December	00058/207/20/093/22	09-Mar-22	4.036.166.906
2020	Surat Tagihan Pajak pajak pertambahan nilai masa Desember/ Tax Collection Letter of value added tax period December	00038/107/20/093/22	09-Mar-22	181.112.417
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak penghasilan pasal 23 masa Juni/ Tax Underpayment Assessment Letter of income tax article 23 period June	00003/203/20/093/22	09-Mar-22	3.714.219
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 23 masa Maret/ Tax Collection Letter of income tax article 23 period March	00023/103/20/093/22	09-Mar-22	10.362.744
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak penghasilan pasal 23 masa Desember/ Tax Underpayment Assessment Letter of income tax Article 23 period December	00004/203/20/093/22	09-Mar-22	55.161.857
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 23 masa April/ Tax Collection Letter of income tax article 23 period April	00024/103/20/093/22	09-Mar-22	470.143
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 23 masa Mei/ Tax Collection Letter of income tax article 23 period May	00025/103/20/093/22	09-Mar-22	386.736
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 23 masa Juni/ Tax Collection Letter of income tax article 23 period June	00026/103/20/093/22	09-Mar-22	1.780.320
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 23 masa Juli/ Tax Collection Letter of income tax article 23 period July	00027/103/20/093/22	09-Mar-22	761.919
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 23 masa Agustus/ Tax Collection Letter of income tax article 23 period August	00028/103/20/093/22	09-Mar-22	395.796
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak penghasilan pasal 21 tahun pajak 2020/ Tax Underpayment Assessment Letter of income tax article 21 tax period 2020	00009/201/20/093/22	09-Mar-22	2.722.746.396
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa April/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period April	00007/101/20/093/22	09-Mar-22	27.927.145
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Mei/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period May	00008/101/20/093/22	09-Mar-22	7.456.708
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Juni/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period June	00009/101/20/093/22	09-Mar-22	12.981.249
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Juli/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period July	00010/101/20/093/22	09-Mar-22	3.370.303
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Agustus/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period August	00011/101/20/093/22	09-Mar-22	5.853.189
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa September/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period September	00012/101/20/093/22	09-Mar-22	14.223.230
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 masa Desember/ Tax Underpayment Assessment Letter of income tax article 4 (2) period December	00014/240/20/093/22	09-Mar-22	1.603.594.932
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 4 ayat 2 masa Maret/ Tax Collection Letter of income tax article 4 (2) period March	00002/140/20/093/22	09-Mar-22	47.308.536
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 4 ayat 2 masa April/ Tax Collection Letter of income tax article 4 (2) period April	00003/140/20/093/22	09-Mar-22	4.018.062
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 4 ayat 2 masa Mei/ Tax Collection Letter of income tax article 4 (2) period May	00004/140/20/093/22	09-Mar-22	173.577
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 4 ayat 2 masa Juni/ Tax Collection Letter of income tax article 4 (2) period June	00005/140/20/093/22	09-Mar-22	1.533.982
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 4 ayat 2 masa Juli/ Tax Collection Letter of income tax article 4 (2) period July	00007/140/20/093/22	09-Mar-22	2.995.120
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 4 ayat 2 masa Agustus/ Tax Collection Letter of income tax article 4 (2) period August	00006/140/20/093/22	09-Mar-22	364.899
PT Railink				
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Maret/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period March	00133/101/21/093/22	13-Apr-22	62.680
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa April/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period April	00134/101/21/093/22	13-Apr-22	523.523
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Mei/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period May	00113/101/21/093/22	08-Apr-22	20.601.858
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Juni/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period June	00135/101/21/093/22	13-Apr-22	245.217
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Juli/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period July	00136/101/21/093/22	13-Apr-22	144.407

*) Nilai Penuh

*) Full Amount

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

13. Perpajakan (Lanjutan)

13. Taxation (Continued)

Tahun Pajak/ Tax Year	Objek Pajak/ Tax Object	Nomor Hasil Pemeriksaan/ Examination Result Number	Tanggal Terbit/ Issued Date	Total Tagihan Pajak/ Total Tax Collection Rp*)
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Agustus/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period August	00137/101/21/093/22	13-Apr-22	119.073
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa September/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period September	00138/101/21/093/22	13-Apr-22	94.245
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Januari/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period January	00094/101/20/093/22	09-Aug-22	2.356.067
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Maret/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period March	00095/101/20/093/22	09-Aug-22	1.463.182
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa April/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period April	00096/101/20/093/22	09-Aug-22	5.762.551
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Mei/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period May	00097/101/20/093/22	09-Aug-22	2.035.017
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Juni/ Tax Collection Letter of income tax article 21 Period June	00098/101/20/093/22	09-Aug-22	531.838
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Juli/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period July	00099/101/20/093/22	09-Aug-22	1.085.113
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Agustus/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period August	00100/101/20/093/22	09-Aug-22	579.167
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa September/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period September	00101/101/20/093/22	09-Aug-22	514.503
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Oktober/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period October	00102/101/20/093/22	09-Aug-22	483.559
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa November/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period November	00103/101/20/093/22	09-Aug-22	979.663
PT Kereta Commuter Indonesia				
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Desember/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period December	00154/101/21/093/21	18-Apr-22	82.497
PT KA Pariwisata				
2022	Surat Tagihan Pajak pajak pertambahan nilai masa Juni/ Tax Collection Letter of value added tax period June	00226/107/22/093/22	22-Aug-22	500.000
2022	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Juli/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period July	00191/101/22/093/22	06-Oct-22	2.400.898
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Februari/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period February	00139/101/21/093/22	13-Apr-22	277.062
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 23 masa Desember/ Tax Collection Letter of income tax article 23 period December	00123/103/21/093/22	07-Jun-22	470.456
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Desember/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period December	00210/101/21/093/22	07-Jun-22	100.000
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Desember/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period December	00209/101/21/093/22	07-Jun-22	2.157.263
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 23 masa Desember/ Tax Collection Letter of income tax article 23 period December	00122/103/21/093/22	07-Jun-22	39.655
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 26 Masa Oktober/ Tax Collection Letter of income tax article 26 period October	00017/104/21/093/22	19-Aug-22	621.321
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Oktober/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period October	00330/101/21/093/22	19-Aug-22	1.967.317
2021	Surat Tagihan Pajak pajak pertambahan nilai masa Desember/ Tax Collection Letter of value added tax period December	00236/107/21/093/22	19-Aug-22	16.147.436
2021	Surat Tagihan Pajak pajak pertambahan nilai masa Desember/ Tax Collection Letter of value added tax period December	00235/107/21/093/22	19-Aug-22	500.000
2021	Surat Tagihan Pajak pajak pertambahan nilai masa Agustus/ Tax Collection Letter of value added tax period August	00239/107/21/093/22	22-Aug-22	37.200
2021	Surat Tagihan Pajak pajak pertambahan nilai masa Oktober/ Tax Collection Letter of value added tax period October	00237/107/21/093/22	22-Aug-22	500.000
2021	Surat Tagihan Pajak pajak pertambahan nilai masa September/ Tax Collection Letter of value added tax period September	00337/107/21/093/22	26-Aug-22	1.663.723
2021	Surat Tagihan Pajak pajak pertambahan nilai masa Agustus/ Tax Collection Letter of value added tax period August	00238/107/21/093/22	22-Aug-22	500.000
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Agustus/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period August	00334/101/21/093/22	26-Aug-22	2.142.574
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Juni/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period June	00335/101/21/093/22	26-Aug-22	3.110.314
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Juli/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period July	00336/101/21/093/22	26-Aug-22	2.647.764
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa April/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period April	00343/101/21/093/22	26-Aug-22	4.114.432
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Maret/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period March	00338/101/21/093/22	26-Aug-22	3.240.599

*) Nilai Penuh

*) Full Amount

13. Perpajakan (Lanjutan)

13. Taxation (Continued)

Tahun Pajak/ Tax Year	Objek Pajak/ Tax Object	Nomor Hasil Pemeriksaan/ Examination Result Number	Tanggal Terbit/ Issued Date	Total Tagihan Pajak/ Total Tax Collection Rp*)
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Januari/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period January	00341/101/21/093/22	26-Aug-22	3.506.040
2021	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Februari/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period February	00342/101/21/093/22	26-Aug-22	3.282.648
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa April/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period April	00107/207/20/093/22	13-Apr-22	1.959.273
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa September/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period September	00108/207/20/093/22	13-Apr-22	793.114
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Desember/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period December	00109/207/20/093/22	13-Apr-22	1.939.636
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak penghasilan pasal 23 masa Desember/ Tax Underpayment Assessment Letter of income tax article 23 Period December 2020/ Tax Underpayment Assessment Letter of income tax article 21 Period December 2020	00011/203/20/093/22	13-Apr-22	58.425.458
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak penghasilan pasal 21 masa Desember 2020/ Tax Underpayment Assessment Letter of income tax article 21 Period December 2020	00015/201/20/093/22	13-Apr-22	132.044.464
2020	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar pajak penghasilan badan/ Tax Overpayment Assessment Letter of corporate income tax	00014/406/20/093/22	13-Apr-22	(1.540.174.699)
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Februari/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period February	00058/107/20/093/22	13-Apr-22	113.637
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Maret/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period March	00106/207/20/093/22	13-Apr-22	887.250
2020	Surat Tagihan Pajak pajak pertambahan nilai masa Desember/ Tax Collection Letter of value added tax period December	00059/107/20/093/22	13-Apr-22	136.364
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Mei/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period May	00035/101/20/093/22	13-Apr-22	1.986.835
2020	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Juli/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period July	00034/101/20/093/22	13-Apr-22	25.092
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 masa Desember/ Tax Underpayment Assessment Letter of income tax article 4 (2) period December	00019/240/20/093/22	18-Apr-22	178.634.878
2020	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pajak pertambahan nilai masa Februari/ Tax Underpayment Assessment Letter of value added tax period February	00110/207/20/093/22	18-Apr-22	1.632.728
2019	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Oktober/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period October	00094/101/19/093/22	06-Oct-22	1.993.634
2019	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Agustus/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period August	00103/101/19/093/22	06-Oct-22	2.013.774
2019	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Juli/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period July	00100/101/19/093/22	06-Oct-22	1.398.952
2019	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa April/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period April	00101/101/19/093/22	06-Oct-22	1.484.111
2019	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa November/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period November	00107/101/19/093/22	06-Oct-22	1.546.121
2019	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan 21 masa Februari/ Tax Collection Letter of income tax article 21 period February	00106/101/19/093/22	06-Oct-22	56.923.802
2017	Surat Tagihan Pajak pajak penghasilan badan/ Tax Collection Letter of corporate income tax	00021/106/17/093/22	29-Dec-22	1.000.000
Jumlah/Total				<u>(225.644.959.053)</u>

*) Nilai Penuh

*) Full Amount

g. Pemeriksaan Pajak

g. Tax Assessments

Pemeriksaan Pajak Tahun 2020

2020's Tax Assessment

- Pada tanggal 10 Agustus 2021, Perusahaan menerima surat dari Direktorat Jendral Pajak dengan No.PRIN00149/WPJ.19/KP.0404/RIK.SIS/2021 tentang Surat Perintah Pemeriksaan atas pajak tahun 2020 akibat rugi fiskal yang menyebabkan SPT PPh Badan lebih bayar sejumlah Rp236.879.766.

- On August 10, 2021, the Company received a letter from the Directorate of Tax General No. PRIN 00149/WPJ.19/KP.0404/RIK.SIS/2021 regarding the examination warrant for tax in 2020 due to fiscal loss which caused Over payment for Income Tax total of Rp236,879,766.

13. Perpajakan (Lanjutan)

13. Taxation (Continued)

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan tahun 2020 dengan No.00017/406/20/093/22 tanggal 20 April 2022 sebesar Rp276.871.157. Rugi Fiskal Perusahaan juga mengalami koreksi sebesar (Rp138.933.086), sehingga menjadi (Rp1.470.926.629).

Pada tanggal 18 Mei 2022 Perusahaan telah menerima restitusi pajak penghasilan badan tahun 2020 sebesar Rp239.559.258 setelah dikurangi kurang bayar PPN tahun pajak 2020 sebesar Rp37.215.127 dan PPh pasal 21 tahun pajak 2022 sebesar Rp96.772.

Perusahaan juga menerima pengembalian atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN tahun 2020 sebesar Rp5.801.478 berdasarkan:

- a. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Februari 2020 pada tanggal 13 Mei 2022 senilai Rp1.241.749;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN April 2020 pada tanggal 13 Mei 2022 senilai Rp140.702;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Maret 2020 pada tanggal 25 Mei 2022 senilai Rp4.419.027.
- Pada tanggal 25 Juni 2021, RMU menerima surat dari Direktorat Jendral Pajak dengan No.PEMB-00115/WPJ.19/KP.0404/RIK. SIS/2021 tentang Surat Perintah Pemeriksaan atas pajak tahun 2020 akibat rugi fiskal yang menyebabkan SPT PPh Badan lebih bayar sejumlah Rp7.558.756.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, RMU menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan tahun 2020 dengan No.00003/406/20/093/22 tanggal 9 Maret 2022 sebesar Rp6.254.308 setelah dikurangi dengan kurang bayar Pajak Penghasilan, PPN dan sanksi sebesar Rp19.041.677.

Based on 2020's Tax Assessment, the Company received a Tax Assessment Letter for Over Payment Income Tax for the year 2020 with the No. 00017/406/20/093/22 dated April 20, 2022 amounting to Rp276,871,157. Company's Tax Loss also have corrected amount (Rp138,933,086), to (Rp1,470,926,629).

On May 18, 2022, the Company has received restitution of corporate income tax for fiscal year 2020 amounted to Rp239,559,258 after deducted by under payment of VAT tax year 2020 amounted to Rp37,215,127 and tax article 21 tax year 2022 amounted to Rp96,772.

The Company also received a restitution for the Tax Assessment Letter for Over Payment of VAT fiscal year 2020 amount Rp5,801,478 based on:

- a. Tax Assessment Letter for Over payment of VAT period February 2020 on May 13, 2022 amounting to Rp1,241,749;
 - b. Tax Assessment Letter for Over payment of VAT period April 2020 on May 13, 2022 amounting to Rp140,702;
 - c. Tax Assessment Letter for Over payment of VAT period May 2020 on May 25, 2022 amounting to Rp4,419,027.
- On June 25, 2021, RMU received a letter from the Directorate of Tax General with the No. PEMB00115/WPJ.19/KP.0404/RIK.SIS/2021 regarding the examination warrant for tax in 2020 due to fiscal loss which caused Over payment for Income Tax total of Rp7,558,756.

Based on 2020's Tax Assessment, RMU received a Tax Assessment Letter for Over Payment Income Tax for the year 2020 with the No. 00003/406/20/093/22 dated March 9, 2022 amounting to Rp6,254,308 after deducted by under payment of Income Tax, VAT and a penalty of Rp19,041,677.

13. Perpajakan (Lanjutan)

13. Taxation (Continued)

Pada tanggal 27 April 2022, RMU menerima Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak dengan No.KEP00003/ANGSUR/WPJ.19/Kp.040/2022 sampai dengan KEP 000012/ANGSUR/WPJ.19/KP.0404/2022 tentang Persetujuan Pengangsuran Pembayaran kurang bayar Pajak Penghasilan, PPN dan sanksi selama 12 bulan dari 26 Mei 2022 hingga 26 April 2023 dengan jumlah angsuran per bulan sebesar Rp515.155.

Sampai dengan laporan ini selesai dibuat, RMU masih dalam tahap proses angsuran dan pengajuan penghapusan sanksi perpajakan.

- Pada tanggal 25 Juni 2021, KAWIS menerima surat dari Direktorat Jendral Pajak dengan No.PEMB-00175/WPJ.19/KP.0404/ RIK.SIS/2021 tentang Surat Perintah Pemeriksaan atas pajak tahun 2020 akibat rugi fiskal yang menyebabkan SPT PPh Badan lebih bayar sejumlah Rp1.540.175.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, KAWIS menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan No. 00014/406/20/093/22 tanggal 13 April 2022 sebesar Rp1.540.175. Pada tanggal 7 Juni 2022, KAWIS telah menerima restitusi pajak penghasilan badan tahun 2020 sebesar Rp1.140.994 setelah dikurangi kurang bayar Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 21 Masa Mei 2021.

Pemeriksaan Pajak Tahun 2021

- Pada tanggal 20 Juli 2022, Perusahaan menerima surat dari Direktorat Jenderal Pajak dengan No PRIN-00163/WPJ.19/ KP.0404/ RIK.SIS/2022 tentang Surat Perintah Pemeriksaan atas Tahun Pajak 2021 akibat rugi fiskal. Hasil pemeriksaan tanggal 23 Maret 2023 atas pajak lebih bayar PPh Badan 2021 sebesar Rp67.009.024 (Catatan 53).

On April 27, 2022, RMU received a letter from the Directorate of Tax General with the No. KEP 00003/ANGSUR/WPJ.19/Kp.0404/2022 until KEP 000012/ANGSUR/WPJ.19/KP.0404/2022 regarding Acceptance of Installment under payment of Income Tax, VAT and a penalty for 12 months from May 26,2022 until April 26, 2023 with installment amounted Rp515,155/month.

As of reporting date, RMU still in the process of installments and filing for the abolition of tax penalty.

- On June 25, 2021, KAWIS received a letter from the Directorate of Tax General with the No. PEMB-00175WPJ.19/KP.0404/RIK.SIS/2021 regarding the examination warrant for tax in 2020 due to fiscal loss which caused Over payment for Income Tax total of Rp1,540,175.

Based on 2020's Tax Assessment, KAWIS received Tax Assessment Letter for Over Payment of income Tax with the No. 00014/406/20/093/22 dated April 13, 2022 amounting Rp1,540,175. On June 7, 2022, KAWIS has received restitution of corporate income tax for fiscal year 2020 amounted to Rp1,140,994 after deducted by under payment of Tax Collection Letter of Income Tax Article 21 for the May 2021.

2021's Tax Assessment

- On July 20, 2022, the Company received a letter from the Directorate of Tax General No. PRIN 00163/WPJ.19/KP.0404/ RIK.SIS/2022 regarding the examination warrant for tax in 2021 due to fiscal loss. Tax Audit Result dated March 23, 2023 on the overpayment of Corporate Income Tax in 2021 amounting to Rp67.009.024 (Note 53).

13. Perpajakan (Lanjutan)

13. Taxation (Continued)

- Pada tanggal 21 Oktober 2022, RMU menerima surat dari Direktorat Jenderal Pajak dengan No. PRIN-00233/WPJ.19/KP.0404/RIK.SIS/ 2022 tentang Surat Perintah Pemeriksaan atas pajak tahun 2021 akibat rugi fiskal yang menyebabkan SPT PPh Badan lebih bayar sejumlah Rp9.873.157. Sampai dengan laporan ini selesai dibuat, proses pemeriksaan pajak masih berlangsung.
- Pada tahun 2022, KAPM menerima Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) dengan no KEP-00121/SKPPKP/ KPP.190403/ 2022 atas Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp131.151.683. KAPM telah menerima pembayaran SKPPKP ini pada tanggal 22 Desember 2022.

KAPM menyetujui berita acara kesepakatan pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dengan no BA-058/KPP.190409/KP.0409.2022 pada tanggal 1 Agustus 2022 yang menyimpulkan bahwa KAPM memiliki kurang bayar atas Pajak Penghasilan Badan tahun 2018 sebesar Rp231.871, Pajak Penghasilan pasal 21 sebesar Rp79.416, dan Pajak Penghasilan pasal 23 sebesar Rp1.803.610.

h. Pengampunan Pajak

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2016 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-18/PJ/2016 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan Dalam Rangka Pengampunan Pajak, KALOG telah melaksanakan pengampunan pajak ini.

Aset pengampunan pajak sebesar Rp486.081 dicatat sebagai tambahan modal disetor atas pengampunan pajak pada KALOG.

- On October 21, 2022, RMU received a letter from the Directorate of Tax General with the No. PRIN-00233/WPJ.19/KP.0404/RIK.SIS/2022 regarding the examination warrant for tax in 2021 due to fiscal loss which caused Over payment for Income Tax total of Rp9,873,157. Until the issuance of this report, examination for tax still in process.

- In 2022, KAPM received a Preliminary Refund of Tax Excess Decree (SKPPKP) with no KEP-00121/SKPPKP/KPP.190403/2022 for Value Added Tax amounting to Rp131,151,683. KAPM has received this SKPPKP payment on December 22, 2022.

KAPM approved the minutes of agreement on the implementation of requests for explanations of data and/or information with no BA-058/KPP.190409/KP.0409.2022 on August 1, 2022 which concluded that KAPM had an underpayment of 2018 Corporate Income Tax amounting to Rp231,871, Income Tax Article 21 amounting to Rp79,416, and Income Tax Article 23 amounting to Rp1,803,610.

h. Tax Amnesty

In accordance to the implementation of Regulation of the Minister of Finance No. 118/PMK.03/2016 on the Implementation of Law No. 11 of 2016 on Tax Amnesty, as amended by Regulation of the Minister of Finance No. 141/PMK.03/2016 and Directorate General of Tax Regulation No. PER-18/PJ/2016 on Redemption Payment of Excess Refund in the framework of Tax Amnesty, KALOG was participated this tax amnesty.

Assets of tax amnesty amounting to Rp486,081 was recorded as additional paid-in capital of tax amnesty in subsidiary KALOG.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

14. Aset Lancar Lainnya

Aset lancar lainnya pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp26.370.549 dan Rp15.752.718.

Saldo tersebut merupakan uang jaminan atas bank garansi, deposit keagenan, serta dana sehubungan dengan pemakaian jasa parkir yang menggunakan kartu multitrip.

14. Other Current Assets

Other current assets as December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp26,370,549 and Rp15,752,718, respectively.

This balance represents security deposit of bank guarantee, deposit for agent, and funds in connection with the use of parking services that use multitrip card.

15. Investasi

15. Investment

a. Investasi Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

a. Investment in Associates and Joint Ventures

	2022	2021	
Entitas Asosiasi			Associates
PT Moda Integrasi			PT Moda Integrasi
Transportasi Jabodetabek	17.307.401	21.561.289	Transportasi Jabodetabek
PT BPRS Baiturridha Pusaka	8.204.532	6.802.910	PT BPRS Baiturridha Pusaka
Ventura Bersama			Joint Ventures
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	6.208.789.974	--	PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia
KSO Bumi Kalog	59.698.827	59.430.042	JO Bumi Kalog
KSO B Kalog	16.175.849	15.458.451	JO B Kalog
KSO PT KAPM - PT Mega			JO PT KAPM - PT Mega
Dasa Semesta	5.185.454	5.183.767	Dasa Semesta
Jumlah	6.315.362.037	108.436.459	Total

		2022						
Nama Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama/ Name of Associates and Joint Venture	Aktivitas Utama/ Principal Activity	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Nilai Tercatat Penyeritaan Awal Tahun/ Carrying Value at Beginning of Year	Reklasifikasi/ Reclassification	Penambahan Tahun Berjalan/ Additions of Current Year	Bagian Laba (Rugi) Bersih/ Portion in Net Profit (Loss)	Pembayaran Dividen/ Dividen Payment	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Entitas Asosiasi/ Associates								
PT Moda Integrasi	Pengangkutan darat terintegrasi Jakarta-Bogor-Depok Tangerang-Bekasi ("Jabodetabek")	49,00%	21.561.288	--	4.900.000	(9.153.887)	--	17.307.401
PT BPRS Baiturridha Pusaka	Pembiayaan dan Jasa perbankan/ Financing and Banking services	20,00%	6.802.910	--	--	2.089.885	(688.263)	8.204.532
Ventura Bersama/ Joint Ventures								
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)	Pengangkutan darat, perdagangan, jasa industri, pembangunan/ Land transportation, trading, services, industry, development	51,37%	--	7.230.581.343	791.878.657	(261.428.094)	--	7.761.031.906
KSO Bumi Kalog	Pelayanan Logistik di kawasan Waru, Sungai Lagoa dan Kalimas/ Logistics services in Waru, Sungai Lagoa and Kalimas area	45,00%	59.430.042	--	--	268.785	--	59.698.827
KSO B Kalog	Pelayanan Logistik berbasis angkutan Kereta Api/ Logistics services with railway based	65,00%	15.458.451	--	--	717.398	--	16.175.849
KSO PT KAPM - PT Mega Dasa Semesta	Pembangunan, pemasaran dan pengelolaan perkantoran dan pertokoan/ Development, marketing, office management and shopping center	50,00%	5.183.768	--	--	1.686	--	5.185.454
Jumlah/ Total			108.436.459	7.230.581.343	796.778.657	(267.504.227)	(688.263)	7.867.603.969
Dikurangi/ Deducted Cadangan Penurunan Nilai Investasi pada PSBI/ Allowance for Impairment losses of Investment in PSBI			--	(621.466.260)	(930.775.672)	--	--	(1.552.241.932)
Jumlah/Total			108.436.459	--	--	--	--	6.315.362.037

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

15. Investasi (Lanjutan)

15. Investment (Continued)

		2021					
Nama Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama/Name of Associates and Joint Venture	Aktivitas Utama/ Principal Activity	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Nilai Tercatat Penyertaan Awal Tahun/ Carrying Value at Beginning of Year	Penambahan (Pengurangan) Penyertaan Periode Berjalan/ Additions (Deductions) of Investment in	Bagian Laba (Rugi) Bersih/ Portion in Net Profit (Loss)	Pembayaran Dividen/ Dividend Payment	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Entitas Asosiasi/ Associates							
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)	Pengangkutan darat, perdagangan, jasa, industri, pembangunan/ Land transportation, trading, services, industry, development	25,00%	--	--	--	--	--
PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek	Pengangkutan darat terintegrasi Jakarta-Bogor-Depok Tangerang-Bekasi ("Jabodetabek")	49,00%	32.521.164	--	(10.959.876)	--	21.561.288
PT BPRS Baiturridha Pusaka	Pembayaan dan Jasa perbankan/ Financing and Banking services	20,00%	7.166.975	--	1.278.427	(1.642.492)	6.802.910
Ventura Bersama/ Joint Ventures							
KSO Bumi Kalog	Pelayanan Logistik di kawasan Waru, Sungai Lagoa dan Kalimas/ Logistics services in Waru, Sungai Lagoa and Kalimas area	45,00%	59.199.475	--	230.567	--	59.430.042
KSO B Kalog	Pelayanan Logistik berbasis angkutan Kereta Api/ Logistics services with railway based	65,00%	15.279.174	--	179.277	--	15.458.451
KSO PT KAPM - PT PPBM (PT Pacific Prima Buana Mas)	Pembangunan, pengelolaan gedung parkir dan komplek pertokoan/ Development, building parking management and shopping center	50,00%	6.392.693	(6.392.693)	--	--	--
KSO PT KAPM - PT Mega Dasa Semesta	Pembangunan, pemasaran dan pengelolaan perkantoran dan pertokoan/ Development, marketing, office management and shopping center	50,00%	3.054.565	2.353.346	(224.143)	--	5.183.768
Jumlah/ Total			123.614.046	(4.039.347)	(9.495.748)	(1.642.492)	108.436.459

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai investasi cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat penurunan nilai investasi

Management believes that the allowance for impairment losses of investment is adequate to cover possible losses resulting from any decline in the investment value of the inventories

2022				
Perusahaan Asosiasi dan Ventura Bersama/ Associates and Joint Ventures	Total Aset/ Total Asset	Total Liabilitas/ Total Liabilities	Total Pendapatan/ Total Revenue	Lab a (Rugi) Neto/ Net Income (Loss)
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	21.462.201.000	8.961.610.000	--	(508.912.000)
PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek	81.877.958	46.556.732	6.243.054	(18.681.402)
PT BPRS Baiturridha Pusaka	196.876.568	166.000.710	36.164.464	16.305.545
KSO Bumi Kalog	105.627.375	15.255.112	57.487.302	597.300
KSO B Kalog	36.660.604	11.757.247	20.287.459	1.121.125
KSO PT KAPM - PT Mega Dasa Semesta	14.240.856	3.494.666	--	3.373
2021				
Perusahaan Asosiasi dan Ventura Bersama/ Associates and Joint Ventures	Total Aset/ Total Asset	Total Liabilitas/ Total Liabilities	Total Pendapatan/ Total Revenue	Lab a (Rugi) Neto/ Net Income (Loss)
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	21.539.853.000	12.109.162.000	--	(127.585.000)
PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek	59.417.249	15.414.621	3.222.525	(22.367.093)
PT BPRS Baiturridha Pusaka	134.300.451	108.046.702	21.644.790	8.453.083
KSO Bumi Kalog	122.139.271	32.354.308	53.599.476	512.370
KSO B Kalog	39.115.804	16.287.527	15.272.232	275.809
KSO PT KAPM - PT Mega Dasa Semesta	14.741.713	3.494.666	--	(448.285)

PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ)

MITJ didirikan oleh Perusahaan dan PT Mass Rapid Transit Jakarta ("MRTJ") berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 11 Februari 2020. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0008856.AH.01.01.2020 tahun 2020.

PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ)

MITJ was established by the Company and PT Mass Rapid Transit Jakarta ("MRTJ") based on the MITJ's Deed of Establishment No. 11 dated February 11, 2020, as acceptance of company data change by Republic of Indonesia's Minister of Law and Human Rights No. AHU-0008856. AH. 01.01. year 2020.

15. Investasi (Lanjutan)

Anggaran Dasar MITJ telah mengalami perubahan dengan Akta No 84 tanggal 31 Mei 2022 oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., mengenai Perubahan Anggaran Dasar. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No.AHU-0103947.AH.01.11 tanggal 6 Juni 2022.

Modal dasar MITJ pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp90.000.000 yang terbagi atas 90.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 90.000 saham atau sebesar Rp90.000.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- MRTJ memiliki 51% atau sebanyak 45.900 saham dengan nilai sebesar Rp45.900.000
- Perusahaan memiliki 49% atau sebanyak 44.100 saham dengan nilai sebesar Rp44.100.000

Modal dasar MITJ pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp80.000.000 yang terbagi atas 80.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 80.000 saham atau sebesar Rp80.000.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- MRTJ memiliki 51% atau sebanyak 40.800 saham dengan nilai sebesar Rp40.800.000
- Perusahaan memiliki 49% atau sebanyak 39.200 saham dengan nilai sebesar Rp39.200.000

PT BPRS Baiturridha Pusaka

Berdasarkan Risalah Sirkuler keputusan Pemegang Saham RMU tentang Persetujuan Pembelian Saham PT BPRS Baiturridha Pusaka No. KP.303/IV/8/ KA-2019 tanggal 11 April 2019, RMU membeli 34.563 saham PT BPRS Baiturridha Pusaka sebesar Rp4.458.627. Komposisi penyertaan pendanaan dan pembagian biaya serta keuntungan (*cost & profit sharing*) masing-masing adalah sebagai berikut:

- 80% untuk Yayasan Pusaka
- 20% untuk RMU

15. Investment (Continued)

MITJ's Articles of association has been amended most recently by Notarial Deed No. 84 dated May 31, 2022 of Notary Aulia Taufani, S.H., concerning the Changes in the Authorized Capital. The amendments were approved by the Minister of Law and Human Rights in his Decision Letter No. AHU-0103947.AH.01.11 dated June 6, 2022.

The authorized capital of MITJ as of December 31, 2022 amounted to Rp90,000,000, consists of 90,000 shares with par value of Rp1,000 per share. Total issued and fully paid capital amounted to 90,000 shares or equivalent to Rp90,000,000 with shares ownership compositions are as follows:

- *MRTJ owns 51% or 45,900 shares amounting to Rp45,900,000*
- *The Company owns 49% or 44,100 shares amounting to Rp44,100,000*

The authorized capital of MITJ as of December 31, 2021 amounted to Rp80,000,000, consists of 80,000 shares with par value of Rp1,000 per share. Total issued and fully paid capital amounted to 80,000 shares or equivalent to Rp80,000,000 with shares ownership compositions are as follows:

- *MRTJ owns 51% or 40,800 shares amounting to Rp40,800,000*
- *The Company owns 49% or 39,200 shares amounting to Rp39,200,000*

PT BPRS Baiturridha Pusaka

*Based on Circular Minutes of RMU Shareholders' decision regarding the Approval of the Purchase of PT BPRS Baiturridha Pusaka's Shares No. KP.303/IV/8/ KA-2019 dated April 11, 2019 RMU bought 34,563 shares of PT BPRS Baiturridha Pusaka amounted to Rp4,458,627. The composition of the participation of funding and sharing costs and benefits (*cost & profit sharing*) is as follows:*

- *80% for Yayasan Pusaka*
- *20% for RMU*

15. Investasi (Lanjutan)

15. Investment (Continued)

PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)

PSBI didirikan berdasarkan Akta No. 21 tanggal 2 Oktober 2015 dari Mala Mukti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-2460435.AH.01.01.11 Tahun 2015 tanggal 12 Oktober 2015 dan Daftar Perusahaan No. AHU-3564963.01.11 Tahun 2015 tanggal 12 Oktober 2015.

Anggaran Dasar PSBI telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta No. 67 tanggal 21 November 2022 oleh Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M di Jakarta. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan AHU-AH.01.03-0318397 tanggal 28 November 2022.

Para pemegang saham sepakat untuk mengubah anggaran dasar PSBI menjadi perusahaan patungan dan sepakat untuk mengkonversi uang muka setoran modal menjadi modal disetor, sehingga total uang muka setoran modal Perusahaan yang dikonversi menjadi setoran modal adalah sebesar Rp7.230.581.343 dan penyertaan melalui kas sebesar Rp791.878.657.

Modal dasar PSBI pada tanggal 31 Desember 2022 berjumlah Rp50.000.000.000 yang terbagi atas 50.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 15.620.041 saham atau sebesar Rp15.620.041.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 51,37% atau sebanyak 8.023.585 saham dengan nilai sebesar Rp8.023.585.000.
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk memiliki 39,12% atau sebanyak 6.110.596 saham dengan nilai sebesar Rp6.110.596.000.
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk memiliki 8,30% atau sebanyak 1.297.235 saham dengan nilai sebesar Rp1.297.235.000.
- PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) memiliki 1,21% atau sebanyak 188.625 saham dengan nilai sebesar Rp188.625.000.

PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia PSBI

PSBI was established based on Notarial Deed No. 21 dated October 2, 2015 of Mala Mukti, S.H., Notary in Jakarta, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-2460435.AH.01.01.11 Tahun 2015, dated October 12, 2015 and Company List No. AHU-3564963.01.11 Tahun 2015, dated October 12, 2015.

PSBI's Articles of association has been amended last most recently by Notarial Deed No. 67 dated November 21, 2022 of Notary Mala Mukti, S.H., LL.M in Jakarta. The amendments were approved by the Minister of Law and Human Rights in his Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0318397 dated November 28, 2022.

Shareholders agreed to change the PSBI Articles of association into a joint venture and agreed to convert the additional paid-in capital advance into paid-in capital, so that total the additional paid-in capital advance of the Company's which is converted into paid-in capital amounting to Rp7,230,581,343 and investment through cash amounting to Rp791,878,657.

The authorized capital of PSBI as of December 31, 2022 amounted to Rp50,000,000,000 consists of 50,000,000 shares with par value of Rp1,000 per share. Total issued and fully paid capital amounted to 15,620,041 shares or equivalent to Rp15,620,541,000 with shares ownership compositions are as follows:

- The Company owns 51,37% or 8,023,585 shares amounting to Rp8,023,585,000.
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk owns 39,12% or 6,110,596 shares amounting to Rp6,110,596,000.
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk owns 8,30% or 1,297,235 shares amounting to Rp1,297,235,000.
- PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) owns 1,21% or 118,625 shares amounting to Rp188,625,000.

15. Investasi (Lanjutan)

Modal dasar PSBI pada tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp18.000.000 yang terbagi atas 18.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 4.500 saham atau sebesar Rp4.500.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk memiliki 38% atau sebanyak 1.710 saham dengan nilai sebesar Rp1.710.000.
- Perusahaan memiliki 25% atau sebanyak 1.125 saham dengan nilai sebesar Rp1.125.000.
- PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) memiliki 25% atau sebanyak 1.125 saham dengan nilai sebesar Rp1.125.000.
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk memiliki 12% atau sebanyak 540 saham dengan nilai sebesar Rp540.000.

Perusahaan telah mengabsorb rugi pada tahun berjalan sebesar Rp261.428.094, kerugian kumulatif yang tidak diakui sampai tahun 2021 sebesar Rp446.009.691 dan penurunan nilai penyertaan pada PSBI sebesar Rp1.552.241.932.

Tidak terdapat informasi kuotasi harga publikasian atas nilai wajar investasi di PSBI.

KSO Bumi Kalog

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Operasi No. 01 tanggal 23 Mei 2013, dari Notaris Yoshsi S.H., M.Kn., KALOG mengadakan perjanjian kerja sama operasi dengan PT Bumi Wijaya Indorail dalam usaha pelayanan logistik di kawasan Stasiun Waru, Stasiun Sungai Lagoa dan Stasiun Kalimas. Komposisi penyertaan pendanaan dan pembagian biaya serta keuntungan (*cost & profit sharing*) masing-masing adalah sebagai berikut:

- 51% untuk KALOG
- 49% untuk PT Bumi Wijaya Indorail

15. Investment (Continued)

The authorized capital of PSBI as of December 31, 2021 amounted to Rp18,000,000, consists of 18,000 shares with par value of Rp1,000 per share. Total issued and fully paid capital amounted to 4,500 shares or equivalent to Rp4,500,000 with shares ownership compositions are as follows:

- *PT Wijaya Karya (Persero) Tbk owns 38% or 1,710 shares amounting to Rp1,710,000.*
- *The Company owns 25% or 1,125 shares amounting to Rp1,125,000.*
- *PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) owns 25% or 1,125 shares amounting to Rp1,125,000.*
- *PT Jasa Marga (Persero) Tbk owns 12% or 540 shares amounting to Rp540,000.*

The company has absorbed losses in the current year amounting to Rp261,428,094 added to the cumulative loss that was not recognized until 2021 of Rp446,009,691 and the impairment of investment in PSBI amounting to Rp1,552,241,932.

There is no information of quoted published price on the fair value investment in PSBI.

JO Bumi Kalog

*Based on Joint Operation Agreement No. 01, dated May 23, 2013 by Notary Yoshsi S.H., M.Kn., KALOG entered into a joint operation with PT Bumi Wijaya Indorail for a cooperation in logistic activities in Waru Station, Sungai Lagoa Station and Kalimas Station areas. The composition of the participation of funding and sharing costs and benefits (*cost & profit sharing*) is as follows:*

- *51% for KALOG*
- *49% for PT Bumi Wijaya Indorail*

15. Investasi (Lanjutan)

Kerja sama ini berlaku selama berlakunya perjanjian persewaan/pengelolaan kawasan Stasiun Waru, Stasiun Kalimas, Stasiun Lagoa dan stasiun-stasiun lainnya. Perjanjian kerja sama operasi telah mengalami dua kali perubahan dan yang terakhir dengan Akta Notaris No. 2 Yoshsi S.H., M.Kn., tanggal 5 Juni 2014 untuk menambah kawasan Stasiun Sungai Lagoa (SAO 1 dan SAO 2 menjadi SAO Terpadu) dan perubahan komposisi penyertaan pendanaan dan pembagian biaya serta keuntungan masing-masing sebagai berikut:

- 45% untuk KALOG
- 55% untuk PT Bumi Wijaya Indorail

KSO B Kalog

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Operasi No. 3 tanggal 10 Agustus 2012 antara KALOG dengan PT Bintang Laut Platinum dengan Addendum II No. 0079.PJ/ KALOG-BLP/2016, tanggal 28 April 2016 dalam kegiatan usaha pelayanan logistik berbasis angkutan kereta api, komposisi keuntungan (*cost & profit sharing*) masing-masing adalah sebagai berikut:

- 65% untuk KALOG
- 35% untuk PT Bintang Laut Platinum

Jangka waktu perjanjian adalah selama kerja sama antara KALOG dengan PT Bintang Laut Platinum berlaku.

KSO Pengelolaan Aset

KAPM menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Mega Dasa Semesta dalam membangun dan mengelola aset yang berada di Waru Sidoarjo.

Nota kesepahaman No. 022/DIR.KAPM/PER/OPTWR/XII/2013 dan 019/KS.MDS/XII.2013 tanggal 20 Desember 2013 antara KAPM dengan PT Mega Dasa Semesta tentang perjanjian kerja sama pembangunan, pemasaran dan pengelolaan kompleks perkantoran dan pertokoan di Jl. Brigjen Katamso, Waru, Sidoarjo dengan komposisi penyertaan modal dan pembagian keuntungan sebagai berikut:

- 50% untuk KAPM
- 50% untuk PT Mega Dasa Semesta

Manajemen berpendapat bahwa penurunan nilai cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul terhadap nilai investasi.

15. Investment (Continued)

The agreement is valid in accordance with the agreement of rental/management of Waru Station, Kalimas Station, Sungai Lagoa Station and other stations area. Joint operation agreement has been amended twice, and recently by Notarial Deed No. 2 dated June 5, 2014 of Yoshsi S.H., M.Kn., regarding to the expansion of Sungai Lagoa Station area (existing SAO 1 and SAO 2 become Integrated SAO) and changes in the composition of the participation of funding and sharing costs and benefits as follows:

- 45% for KALOG
- 55% for PT Bumi Wijaya Indorail

JO B Kalog

Based on Joint Operation Agreement No. 3 dated August 10, 2012 between KALOG and PT Bintang Laut Platinum with Addendum II No. 0079.PJ/KALOG-BLP/2016, dated on April 28, 2016, for the activities of railway-based logistic delivery services, the composition of profits (cost & profit sharing) is as follows:

- 65% for KALOG
- 35% for PT Bintang Laut Platinum

The cooperation is valid in accordance with the agreement between KALOG and PT Bintang Laut Platinum.

JO Asset Management

KAPM entered into the cooperation agreement with PT Mega Dasa Semesta to build and manage the assets in Waru Sidoarjo.

Memorandum of understanding No. 022/DIR.KAPM/PER/OPTWR/XII/2013 and 019/KS.MDS/XII/2013 dated December 20, 2013 between KAPM and PT Mega Dasa Semesta about joint operation for development, marketing and management office and shopping block at Jl. Brigjen Katamso, Waru, Sidoarjo with composition of fund deposits and profit sharing as follows:

- 50% for KAPM
- 50% for PT Mega Dasa Semesta

Management believes that the impairment is adequate to cover possible losses on the investment value.

15. Investasi (Lanjutan)

15. Investment (Continued)

b. Investasi Jangka Panjang

b. Long-term Investment

PT Fintek Karya Nusantara

PT Fintek Karya Nusantara

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo Awal Investasi	54.853.000	53.080.000	<i>Beginning Balance of Investment</i>
Perubahan Nilai Wajar	(30.677.000)	1.773.000	<i>Fair Value Changes</i>
Saldo Akhir Investasi	<u>24.176.000</u>	<u>54.853.000</u>	<i>Ending Balance of Investment</i>

Informasi tambahan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sehubungan dengan investasi pada PT Fintek Karya Nusantara adalah sebagai berikut:

Additional information as of December 31, 2022 and 2021 related to investment in PT Fintek Karya Nusantara are as follows:

<u>Keterangan</u>	<u>Jenis Usaha/ Type of Business</u>	<u>Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership 31 Desember 2022 dan 2021/ December 31, 2022 and 2021</u>
PT Fintek Karya Nusantara	Penyelenggara jasa sistem pembayaran/ <i>Payment system service providers</i>	1,84%

<u>Tahun/ Year</u>	<u>Total Aset/ Total Asset</u>	<u>Total Liabilitas/ Total Liabilities</u>	<u>Total Pendapatan/ Total Revenue</u>	<u>Laba (Rugi) Neto/ Net Income (Loss)</u>
2022	1.460.016.229	1.441.854.180	414.682.596	(369.045.035)
2021	1.989.612.941	1.682.388.641	89.841.945	(744.520.609)

Berdasarkan Risalah Sirkuler Keputusan Pemegang Saham No. PT KAI Persero KP.303/X/3/KA-2019 dan No. Yayasan Pusaka 09/RIS-KCI/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 menyatakan persetujuan penyertaan modal kepada PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) berupa penyeteroran saham sebesar 2,03% dari modal disetor dan ditempatkan PT Fintek Karya Nusantara atau ekuivalen dengan nilai setoran modal sebesar Rp37.000.000 yang terbagi atas 3.700 lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp10.000.

Based on Circular Minutes of Shareholder Decree No. PT KAI Persero KP.303/X/3/KA-2019 and No. Pusaka Foundation 09/RIS-KCI/X/2019 dated October 24, 2019 stated agreement for the capital investment to PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) in the form of a 2.03% share of paid-in capital and placed by PT Fintek Karya Nusantara or equivalent to a capital deposit of Rp37,000,000 which is divided into 3,700 shares, each with a par value of Rp10,000.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Fintek Karya Nusantara, terdapat kenaikan modal ditempatkan dan disetor pada 31 Desember 2020 sebesar Rp1.962.320.000 menjadi Rp2.016.300.000 pada 31 Desember 2021. Berdasarkan keputusan ini maka jumlah saham yang dimiliki oleh Perusahaan semula 1,89% menjadi 1,84%.

Based on the Circular Decision in Lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Fintek Karya Nusantara, there was an increase in capital placed and paid up on December 31, 2020 amounting to Rp1,962,320,000 to Rp2,016,300,000 on December 31, 2021. Based on this decision, the number of shares owned by the Company has changed from 1,89% to 1.84%.

15. Investasi (Lanjutan)

Berdasarkan valuasi kembali dari Laporan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Anas Karim Rivai dan Rekan dan Tobing Panuturi dan Rekan, pada 31 Desember 2022 dan 2021, nilai wajar investasi KCI di Finarya adalah masing-masing sebesar Rp24.176.000 dan Rp54.853.000.

15. Investment (Continued)

Based on the re-valuation of the Public Appraisal Service Office Report (KJPP), Anas Karim Rivai and Partners and Tobing Panuturi and Partners, as of December 31, 2022 and 2021, the fair value of KCI's investment in Finarya amounted to Rp24,176,000 and Rp54,853,000, respectively.

16. Aset Tetap

16. Fixed Assets

	2022					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Sarana:						Rolling Stock:
Lokomotif	8.762.204.836	578.661.640	--	103.044.280	9.443.910.756	Locomotive
Kereta	9.113.501.783	166.049.585	--	(1.184.055)	9.278.367.313	Trains
Gerbong	3.671.667.328	629.851.194	--	98.948.768	4.400.467.290	Wagons
Prasarana:						Infrastructures:
Tanah	122.526.652	--	--	13.104.177	135.630.829	Land
Bangunan	2.472.230.979	32.951.717	--	8.178.429	2.513.361.125	Buildings
Prasarana dan Instalasi	1.279.588.125	17.016.806	--	61.551.724	1.358.156.655	Infrastructures and Installations
Fasilitas:						Facilities:
Mesin dan Peralatan	1.983.575.299	373.285.448	--	49.456.615	2.406.317.362	Machinery and Equipments
Kendaraan	63.966.839	4.903.269	--	871.398	69.741.506	Vehicles
Inventaris	147.229.193	6.677.713	--	15.928.019	169.834.925	Supplies
Aset dalam Pembangunan	3.700.669.588	1.000.846.786	--	(778.240.504)	3.923.275.870	Assets Under Construction
Jumlah	31.317.160.622	2.810.244.158	--	(428.341.149)	33.699.063.631	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Sarana:						Rolling Stock:
Lokomotif	2.685.662.618	346.718.698	--	--	3.032.381.316	Locomotive
Kereta	2.623.502.982	317.260.235	--	(623.130)	2.940.140.087	Trains
Gerbong	1.096.795.669	134.659.098	--	--	1.231.454.767	Wagons
Prasarana:						Infrastructures:
Bangunan	466.379.667	102.627.586	--	(6.990.738)	562.016.515	Buildings
Prasarana dan Instalasi	491.901.899	86.591.185	--	--	578.493.084	Infrastructures and Installations
Fasilitas:						Facilities:
Mesin dan Peralatan	886.961.041	210.326.353	--	(78.023)	1.097.209.371	Machinery and Equipments
Kendaraan	46.498.178	4.801.888	--	--	51.300.066	Vehicles
Inventaris	110.138.072	19.919.759	--	--	130.057.831	Supplies
Jumlah	8.407.840.126	1.222.904.802	--	(7.691.891)	9.623.053.037	Total
Penurunan Nilai Aset Tetap						Fixed Assets Impairment
Sarana:						Rolling Stock:
Lokomotif	47.912.089	92.074.332	--	--	139.986.421	Locomotive
Gerbong	446.327	10.884.949	--	--	11.331.276	Wagons
Jumlah	48.358.416	102.959.281	--	--	151.317.697	Total
Nilai Tercatat	22.860.962.080				23.924.692.897	Carrying Amount

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

16. Aset Tetap (Lanjutan)

16. Fixed Assets (Continued)

	2021					
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Sarana:						<i>Rolling Stock:</i>
Lokomotif	7.607.779.321	1.154.425.515	--	--	8.762.204.836	<i>Locomotive</i>
Kereta	9.112.237.908	--	--	1.263.875	9.113.501.783	<i>Trains</i>
Gerbong	3.671.667.328	--	--	--	3.671.667.328	<i>Wagons</i>
Prasarana:						<i>Infrastructures:</i>
Tanah	123.764.518	--	--	(1.237.866)	122.526.652	<i>Land</i>
Bangunan	2.158.737.328	5.664.386	--	307.829.265	2.472.230.979	<i>Buildings</i>
Prasarana dan Instalasi	1.121.368.390	9.165.749	--	149.053.986	1.279.588.125	<i>Infrastructures and Installations</i>
Fasilitas:						<i>Facilities:</i>
Mesin dan Peralatan	1.479.051.988	208.615.187	--	295.908.124	1.983.575.299	<i>Machinery and Equipments</i>
Kendaraan	51.425.156	3.046.774	--	9.494.909	63.966.839	<i>Vehicles</i>
Inventaris	142.709.329	5.834.259	--	(1.314.395)	147.229.193	<i>Supplies</i>
Aset dalam Pembangunan	3.269.747.610	1.226.695.676	--	(795.773.698)	3.700.669.588	<i>Assets Under Construction</i>
Jumlah	28.738.488.876	2.613.447.546	--	(34.775.800)	31.317.160.622	<i>Total</i>
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Sarana:						<i>Rolling Stock:</i>
Lokomotif	2.395.763.089	289.899.529	--	--	2.685.662.618	<i>Locomotive</i>
Kereta	2.325.125.034	319.961.250	--	(21.583.302)	2.623.502.982	<i>Trains</i>
Gerbong	972.961.242	123.834.427	--	--	1.096.795.669	<i>Wagons</i>
Prasarana:						<i>Infrastructures:</i>
Bangunan	362.423.422	109.039.564	--	(5.083.319)	466.379.667	<i>Buildings</i>
Prasarana dan Instalasi	389.305.038	102.596.861	--	--	491.901.899	<i>Infrastructures and Installations</i>
Fasilitas:						<i>Facilities:</i>
Mesin dan Peralatan	720.078.000	169.367.495	--	(2.484.454)	886.961.041	<i>Machinery and Equipments</i>
Kendaraan	38.068.828	8.375.960	--	53.390	46.498.178	<i>Vehicles</i>
Inventaris	93.328.932	17.088.043	--	(278.903)	110.138.072	<i>Supplies</i>
Jumlah	7.297.053.585	1.140.163.129	--	(29.376.588)	8.407.840.126	<i>Total</i>
Penurunan Nilai Aset Tetap						Fixed Assets Impairment
Sarana:						<i>Rolling Stock:</i>
Lokomotif	--	47.912.089	--	--	47.912.089	<i>Locomotive</i>
Kereta	106.809.640	--	(106.809.640)	--	--	<i>Trains</i>
Gerbong	--	446.327	--	--	446.327	<i>Wagons</i>
Jumlah	106.809.640	48.358.416	(106.809.640)	--	48.358.416	<i>Total</i>
Nilai Tercatat	21.334.625.651				22.860.962.080	Carrying Amount

Penurunan nilai pada Aset Tetap dikarenakan beberapa aset tetap sarana mengalami kerusakan akibat adanya Kecelakaan Kereta Api di tahun 2022 dan 2021 serta beberapa sarana lainnya tidak dalam kondisi siap operasi sehingga nilai perolehannya harus diturunkan.

Pada 31 Desember 2022 dan 2021, Grup melakukan reklasifikasi aset sebagai berikut (Catatan 17, 18, 19 dan 21):

Impairment of Fixed Assets was due to several fixed assets of rolling stock being damaged due to a Train Accident in 2022 and 2021, several other rolling stock not in a ready to operate condition so that their acquisition value had to be impaired.

On December 31, 2022 and 2021, the Group has reclassified of assets are as follows (Notes 17, 18, 19 and 21):

16. Aset Tetap (Lanjutan)

16. Fixed Assets (Continued)

	2022			
	Saldo Sebelum Reklasifikasi/ Balance Before Reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Setelah Reklasifikasi/ Balance After Reclassification	
Biaya Perolehan:				Acquisition Cost:
Aset Tetap	31.317.160.622	(428.341.149)	30.888.819.473	Fixed Asset
Properti Investasi	146.832.414	40.127.888	186.960.302	Investment Properties
Hak Pengoperasian				Infrastructure Assets
Aset Prasarana	21.385.819.023	417.506.380	21.803.325.403	Operating Rights
Aset Lain-lain	30.555.196	(29.293.119)	1.262.077	Other Assets
Sub Jumlah	52.880.367.255	--	52.880.367.255	Sub Total
Akumulasi depresiasi:				Accumulated Depreciation:
Aset Tetap	8.407.840.126	(7.691.891)	8.400.148.235	Fixed Assets
Properti Investasi	50.452.796	6.990.738	57.443.534	Investment Properties
Aset Lain-lain		701.153	701.153	Other Assets
Sub Jumlah	8.458.292.922	--	8.458.292.922	Sub Total
Nilai Tercatat	44.422.074.333		44.422.074.333	Carrying Amount
	2021			
	Saldo Sebelum Reklasifikasi/ Balance Before Reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Setelah Reklasifikasi/ Balance After Reclassification	
Biaya Perolehan:				Acquisition Cost:
Aset Tetap	28.631.679.235	(34.775.800)	28.596.903.435	Fixed Asset
Properti Investasi	136.932.885	9.899.530	146.832.415	Investment Properties
Hak Pengoperasian				Infrastructure Assets
Aset Prasarana	18.516.015.626	(9.577.043)	18.506.438.583	Operating Rights
Aset Lain-lain	--	32.725.812	32.725.812	Other Assets
Aset Takberwujud	--	1.727.501	1.727.501	Intangible Assets
Sub Jumlah	47.284.627.746	--	47.284.627.746	Sub Total
Akumulasi depresiasi:				Accumulated Depreciation:
Aset Tetap	7.297.053.582	(29.376.588)	7.267.676.994	Fixed Assets
Properti Investasi	42.510.894	7.793.285	50.304.179	Investment Properties
Aset Lain-lain	--	21.583.303	21.583.303	Other Assets
Sub Jumlah	7.339.564.476	--	7.339.564.476	Sub Total
Nilai Tercatat	39.945.063.270		39.945.063.270	Carrying Amount

Aset tetap tersebut di atas merupakan aset tetap kepemilikan langsung Grup dan tidak terdapat aset tetap sewa pembiayaan.

Those fixed assets above represents the Group's direct acquisition fixed assets and none of leased assets.

Perusahaan memiliki aset tanah yang telah bersertifikat seluas 136.535.996 m². Bentuk sertifikat tersebut berupa Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dengan jangka waktu pemakaian berakhir antara tahun 2023 sampai dengan 2050. Manajemen berkeyakinan bahwa hak atas tanah tersebut dapat diperpanjang.

The Company has certified land assets of 136,535,996 sqm. The certificates consist of Right of use of Structure, Right of Use and Right of Management with the term of usage ended between 2023 up to 2050. Management believes the land rights are able to be extended.

Aset tetap dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman (Catatan 29).

Fixed assets are used as collateral for loans (Note 29).

16. Aset Tetap (Lanjutan)

Penyusutan sebesar Rp1.222.904.802 dan Rp1.140.163.129 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, dibebankan pada akun beban operasi langsung, tidak langsung dan beban umum dan administrasi.

Biaya perolehan bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.483.954.503 serta Rp1.414.970.201.

Perusahaan mengasuransikan aset sarana pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) untuk periode 3 tahun mulai 30 Oktober 2019 sampai dengan 30 Oktober 2022, dengan kondisi semua risiko seperti gempa bumi, terorisme dan sabotase dengan nilai pertanggungan sebagai berikut:

1. Polis semua risiko properti, pada saat operasi adalah 10% dari kerugian atau minimal USD40,000 (nilai penuh) setiap kerugian. Pada saat di Depo atau Balai Yasa adalah 10% dari kerugian, atau minimal USD400,000 (nilai penuh) setiap mengalami kerugian.
2. Polis gempa bumi, pada saat operasi adalah 10% dari kerugian atau minimal USD40,000 (nilai penuh) setiap kerugian. Pada saat di Depo atau Balai Yasa adalah 10% dari kerugian, atau minimal USD400,000 (nilai penuh) setiap mengalami kerugian.
3. Polis terorisme dan sabotase sebesar USD250,000 (nilai penuh) setiap mengalami kerugian.

Perusahaan mengasuransikan aset sarana pada PT Asuransi Wahana Tata untuk periode 3 tahun mulai 30 Oktober 2022 sampai dengan 30 Oktober 2025, dengan kondisi semua risiko seperti gempa bumi, terorisme dan sabotase dengan nilai pertanggungan sebagai berikut:

1. Polis semua risiko properti, pada saat operasi adalah 10% dari kerugian atau minimal USD35,000 (nilai penuh) setiap kerugian. Pada saat di Depo atau Balai Yasa adalah 10% dari kerugian, atau minimal USD350,000 (nilai penuh) setiap mengalami kerugian.

16. Fixed Assets (Continued)

Depreciation amounted Rp1,222,904,802 and Rp1,140,163,129 for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively, are charged as charged to direct and indirect operating expense accounts and general and administrative expense.

The acquisition costs of fixed assets which have been fully depreciated and are still in use as of December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp1,483,954,503 and Rp1,414,970,201, respectively.

The Company has insured rolling stock assets to PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) for 3 years started from October 30, 2019 until October 30, 2022 for all risks such as earthquake, terrorism and sabotage with the coverages are as follows:

1. All property risks insurance, while in operation is 10% of loss, at minimum USD40,000 (full amount) each loss. While in Depo or Workshop is 10% of loss, or at minimum USD400,000 (full amount) each loss.
2. Earthquake insurance, while in operation 10% of loss, minimum USD40,000 (full amount) each loss. While in Depot or Workshop 10% of loss, or at minimum USD400,000 (full amount) each loss.
3. Terrorism and sabotage insurance of USD250,000 (full amount) each loss.

The Company has insured rolling stock assets to PT Asuransi Wahana Tata for 3 years started from October 30, 2022 until October 30, 2025 for all risks such as earthquake, terrorism and sabotage with the coverages are as follows:

1. All property risks insurance, while in operation is 10% of loss, at minimum USD35,000 (full amount) each loss. While in Depo or Workshop is 10% of loss, or at minimum USD350,000 (full amount) each loss.

16. Aset Tetap (Lanjutan)

- Polis gempa bumi, pada saat operasi adalah 10% dari kerugian atau minimal USD35,000 (nilai penuh) setiap kerugian. Pada saat di Depo atau Balai Yasa adalah 10% dari kerugian, atau minimal USD350,000 (nilai penuh) setiap mengalami kerugian.
- Polis terorisme dan sabotase sebesar USD250,000 (nilai penuh) setiap mengalami kerugian.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungan.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 aset dalam pembangunan terdiri dari:

16. Fixed Assets (Continued)

- Earthquake insurance, while in operation 10% of loss, minimum USD35,000 (full amount) each loss. While in Depo or Workshop 10% of loss, or at minimum USD350,000 (full amount) each loss.
- Terrorism and sabotage insurance of USD250,000 (full amount) each loss.

Management believes that the insurance coverages are adequate to cover possible losses over the insured assets.

As of December 31, 2022 and 2021, assets under construction consist of:

	2022				
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount Rp	Nilai Kontrak/ Total Contracts Rp	Persentase Penyelesaian/ Percentage of Completion	Estimasi Penyelesaian/ Estimated Completion	
Sarana Prasarana	3.125.471.746	3.964.844.427	78,83%	2023	Rolling Stock Infrastructure
Proyek Jabodetabek	5.267.117	2.145.617.337	97,18%	2023	Jabodetabek Project
Proyek Prasarana Lainnya	761.924.537	1.155.194.684	65,96%	2023	Other Infrastructure Project
Fasilitas	30.612.470	30.623.800	99,96%	2023	Facilities
Jumlah	3.923.275.870	7.296.280.248			Total
	2021				
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount Rp	Nilai Kontrak/ Total Contracts Rp	Persentase Penyelesaian/ Percentage of Completion	Estimasi Penyelesaian/ Estimated Completion	
Sarana Prasarana	2.725.937.617	5.883.614.566	46,33%	2022	Rolling Stock Infrastructure
Proyek Jabodetabek	39.749.340	2.145.617.337	96,92%	2022	Jabodetabek Project
Proyek Prasarana Lainnya	816.970.695	2.427.777.281	72,47%	2022	Other Infrastructure Project
Fasilitas	118.011.936	353.778.563	54,17%	2022	Facilities
Jumlah	3.700.669.588	10.810.787.747			Total

Proyek Jabodetabek merupakan proyek pengembangan prasarana perkeretaapian sehubungan dengan pengembangan kereta komuter untuk wilayah Jabodetabek, sedangkan proyek prasarana lainnya merupakan proyek pengembangan prasarana perkeretaapian sehubungan dengan pengembangan bangunan dan aktivitas-aktivitas pekerjaan penunjang lainnya seperti pekerjaan conveyor, infrastruktur pekerjaan e-ticketing dan pengembangan emplasemen stasiun.

The Jabodetabek project is a railway infrastructure development project in connection with the development of commuter trains for the Jabodetabek area, while other infrastructure project is a railway infrastructure development project related to the development of buildings and other supporting work activities such as conveyor work, e-ticketing work infrastructure and station emplacement development.

17. Properti Investasi

17. Investment Properties

		2022					
		Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Biaya Perolehan							Acquisition Cost
Tanah		21.383.153	--	--	(13.104.177)	8.278.976	Land
Bangunan		125.449.261	--	--	53.232.065	178.681.326	Buildings
Jumlah		146.832.414	--	--	40.127.888	186.960.302	Total
Akumulasi Penyusutan							Depreciation accumulated:
Bangunan		50.452.796	3.431.213	--	6.990.738	60.874.747	Buildings
Jumlah		50.452.796	3.431.213	--	6.990.738	60.874.747	Total
Nilai Tercatat		96.379.618				126.085.555	Carrying Amount
		2021					
		Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Biaya Perolehan							Acquisition Cost
Tanah		20.145.287	--	--	1.237.866	21.383.153	Land
Bangunan		116.787.597	--	--	8.661.664	125.449.261	Buildings
Jumlah		136.932.884	--	--	9.899.530	146.832.414	Total
Akumulasi Penyusutan							Depreciation accumulated:
Bangunan		42.510.895	148.616	--	7.793.285	50.452.796	Buildings
Jumlah		42.510.895	148.616	--	7.793.285	50.452.796	Total
Nilai Tercatat		94.421.989				96.379.618	Carrying Amount

Dasar pengklasifikasian properti investasi atas tanah dan bangunan adalah luas tanah dan bangunan pada aset tetap yang disewakan kepada pihak ketiga.

Investment properties of land and buildings are classified based on the amount of land and buildings leased to third parties.

Pada 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan melakukan reklasifikasi atas aset tetap yang disewakan ke dalam aset properti investasi (Catatan 16).

As of December 31, 2022 and 2021, the Company reclassifies the rental fixed assets into investment properties (Note 16).

Penyusutan sebesar Rp3.431.213 dan Rp148.616 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, dibebankan pada akun beban usaha tidak langsung.

Depreciation amounted Rp3,431,213 and Rp148,616 for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively, are charged as indirect operating expenses in general and administrative expenses account.

Pendapatan atas optimalisasi aset masing-masing sebesar Rp630.197.305 dan Rp448.525.147 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Catatan 38).

Income generated from optimization of assets amounted Rp630,197,305 and Rp448,525,147 for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively (Note 38).

Beban atas optimalisasi aset masing-masing sebesar Rp648.309.642 dan Rp542.300.012 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Catatan 39).

Expenses generated from optimization of assets amounted to Rp648,309,642 and Rp542,300,012 for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively (Note 39).

17. Properti Investasi (Lanjutan)

Properti investasi Perusahaan terdiri atas aset yang berupa tanah dan bangunan. Bagian yang dipergunakan untuk kegiatan operasional dicatat sebagai Aset Tetap, sedangkan bagian yang disewakan kepada pihak berelasi dan pihak ketiga dicatat sebagai Properti investasi.

Nilai wajar properti investasi sebesar Rp1.357.998.427 dan Rp1.322.526.490 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

17. Investment Properties (Continued)

The Company's investment properties consist of assets in the form of land and buildings. The portion used for operational activities is recorded as Fixed Assets, while the portion that is leased to related parties and third parties is recorded as investment property.

Fair value of investment properties amounted to Rp1,357,998,427 and Rp1,322,526,490 as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

18. Hak Pengoperasian Aset Prasarana

18. Infrastructure Assets Operating Rights

	2022					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Hak Pengoperasian						Infrastructure Assets
Aset Prasarana -						Operating Rights -
Konsesi	2.414.560.954	--	--	--	2.414.560.954	Concession
Non-Konsesi	2.061.358.529	--	--	--	2.061.358.529	Non-Concession
Pekerjaan dalam						Construction in
Proses Konstruksi -						Progress -
Konsesi	16.366.186.678	2.610.567.346	--	64.934.767	19.041.688.791	Concession
Non-Konsesi	543.712.862	391.171.181	--	352.571.613	1.287.455.656	Non-Concession
Jumlah	21.385.819.023	3.001.738.527	--	417.506.380	24.805.063.930	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Hak Pengoperasian						Infrastructure Assets
Aset Prasarana -						Operating Rights -
Konsesi	303.224.232	81.330.733	--	--	384.554.965	Concession
Non-Konsesi	579.444.389	104.120.560	--	--	683.564.949	Non-Concession
Jumlah	882.668.621	185.451.293	--	--	1.068.119.914	Total
Nilai Tercatat	20.503.150.402				23.736.944.016	Carrying Amount
	2021					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Hak Pengoperasian						Infrastructure Assets
Aset Prasarana -						Operating Rights -
Konsesi	2.414.560.954	--	--	--	2.414.560.954	Concession
Non-Konsesi	1.955.580.768	--	--	105.777.761	2.061.358.529	Non-Concession
Pekerjaan dalam						Construction in
Proses Konstruksi -						Progress -
Konsesi	13.978.940.874	2.387.245.804	--	--	16.366.186.678	Concession
Non-Konsesi	166.933.029	492.134.637	--	(115.354.804)	543.712.862	Non-Concession
Jumlah	18.516.015.625	2.879.380.441	--	(9.577.043)	21.385.819.023	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Hak Pengoperasian						Infrastructure Assets
Aset Prasarana -						Operating Rights -
Konsesi	221.893.500	81.330.732	--	--	303.224.232	Concession
Non-Konsesi	478.056.590	101.387.799	--	--	579.444.389	Non-Concession
Jumlah	699.950.090	182.718.531	--	--	882.668.621	Total
Nilai Tercatat	17.816.065.535				20.503.150.402	Carrying Amount

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

**18. Hak Pengoperasian Aset Prasarana
(Lanjutan)**

**18. Infrastructure Assets Operating Rights
(Continued)**

Pada 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan melakukan reklasifikasi beberapa aset prasarana ke dalam hak pengoperasian aset Prasarana (Catatan 16).

As of December 31, 2022 and 2021, the Company reclassifies few infrastructures into infrastructure assets operating rights (Note 16).

Beban amortisasi yang dibebankan dalam laba rugi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp185.451.293 dan Rp182.718.531.

Amortization expenses charged to profit or loss for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounting to Rp185,451,293 and Rp182,718,531, respectively.

Perusahaan mempunyai 4 (empat) hak pengoperasian aset prasarana yaitu:

The Company has 4 (four) infrastructure assets operating rights, i.e:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Nilai Tercatat Hak Pengoperasian Aset Prasarana			Carrying Amount of Infrastructure Assets Operating Rights
Hak Pengoperasian Aset Prasarana - Konsesi			Infrastructure Assets Operating Rights - Service Concession
Kereta Api Bandara Soekarno Hatta	2.030.005.989	2.111.336.720	Airport Railway Soekarno Hatta
Proyek LRT Jabodebek	19.041.688.791	16.366.186.678	LRT Jabodebek Project
Hak Pengoperasian Aset Prasarana - Non-Konsesi			Infrastructure Assets Operating Rights - Non-Service Concession
Jalur Ganda Sumatra Selatan	2.297.563.031	2.009.030.363	Double Track South Sumatra
Proyek Reaktivasi Cibu-Garut	352.571.613	--	Proyek Reaktivasi Cibu-Garut
Jalur KA Araskabu-Bandar Udara Kualanamu	15.114.592	16.596.641	Araskabu-Bandar Udara Kualanamu's Track
Jumlah	<u>23.736.944.016</u>	<u>20.503.150.402</u>	Total

KA Bandara Soekarno-Hatta

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 tahun 2011, Pemerintah menugaskan Perusahaan untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana perkeretaapian Bandar Udara Soekarno-Hatta via Tangerang serta prasarana dan sarana perkeretaapian Jalur Lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek). Perusahaan memiliki hak konsesi atas penyelenggaraan prasarana perkeretaapian Bandar Udara Soekarno-Hatta selama 30 tahun terhitung sejak tanggal pengoperasian yaitu tanggal 14 Desember 2017.

Soekarno-Hatta Airport Train

Based on Presidential Regulation of Republic of Indonesia No. 83 in 2011, the Government assigned the Company to operate the rolling stock and railway infrastructure of Soekarno-Hatta Airport via Tangerang and also the rolling stock and railway infrastructure of Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) Circular Line. The Company has concession right to operate the railway infrastructure of Soekarno-Hatta Airport for 30 years since the date of operation date on December 14, 2017.

Pada tanggal 10 Juli 2014, Perusahaan selaku pemegang hak penyelenggara prasarana perkeretaapian umum Bandara Soekarno Hatta melalui kota Tangerang, telah menandatangani Perjanjian dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) dengan No. HK.201/A.263/DJKA/7/14 dan HK.222/VII/2/KA-2014 dengan masa penyelenggaraan konsesi selama 30 tahun, masa konsesi sebagaimana dimaksud akan ditinjau kembali oleh instansi yang berwenang setelah ditetapkan tarif dan telah diketahui biaya pengoperasian dan perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian bandara.

On July 10, 2014, the Company as the right holder of infrastructure operating for Soekarno-Hatta Airport railways via Tangerang, had signed an agreement with Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) referred to Agreement No. HK.201/A.263/DJKA/7/14 and HK.222/VII/2/KA-2014 with period of concession operating for 30 years, which will be reviewed by related institution after ticket fare and operating and maintenance cost of rolling stock and infrastructure have been determined.

**18. Hak Pengoperasian Aset Prasarana
(Lanjutan)**

**18. Infrastructure Assets Operating Rights
(Continued)**

Tarif tiket ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan pedoman perhitungan dan penetapan tarif angkutan orang dengan kereta api yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dan berlaku untuk penyelenggaraan KA Bandara.

Ticket fare is determined by the company according to guidance of calculation and determination of passenger transportation fare which is regulated by Minister of Transportation and applicable for Airport Railways project.

Kereta Api Ringan (LRT) Jabodebek

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 3 Mei 2017, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2017. Dalam Peraturan yang terakhir ini, Pemerintah menugaskan Perusahaan untuk melakukan pengadaan sarana, penyelenggaraan pengoperasian sarana dan prasarana, perawatan sarana dan prasarana, serta pengusahaan sarana dan prasarana termasuk pendanaan pembangunan prasarana kereta api ringan terintegrasi. Perusahaan memiliki hak konsesi atas penyelenggaraan sarana dan prasarana selama 50 tahun terhitung sejak tanggal pengoperasian.

Light Rail Transit (LRT) Jabodebek

Based on Presidential Regulation No. 98 of 2015 regarding Acceleration of Integrated Light Rail Transit Operation in Jakarta, Bogor, Depok, and Bekasi Areas that has been amended several times, most recently on May 3, 2017, by Presidential Regulation No. 49 of 2017. In this amendment, the Government assigned the Company to perform procurement, operation of facilities and infrastructure, maintenance of rolling stock facilities and infrastructure, and commercialization of facilities and infrastructure including to raise funding of the construction of infrastructure for the integrated light rail transit. The Company has concession right to operate the rolling stock and railway infrastructure for 50 years since the date of operation.

Pada tanggal 19 Desember 2017, Perusahaan selaku pemegang hak penyelenggara prasarana kereta api ringan atau *Light Rail Transit* (LRT), telah menandatangani perjanjian dengan DJKA untuk menyediakan jasa pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur Lintas Rel Terpadu Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) dengan Nomor HK.201/A.566/DJKA/12/17 dan KL.705/XII/10/KA-2017 dengan masa penyelenggaraan konsesi selama 50 tahun berlaku efektif sejak tanggal beroperasi yang dibuktikan dengan ditandatanganinya berita acara tanggal operasi.

On December 19, 2017, the Company as the right holder of light rail transit infrastructure management, had signed an agreement with DJKA to provide services of development, operating and maintenance of light rail transit infrastructure Jakarta- Bogor- Depok- Bekasi (Jabodebek) route referred to Agreement Number HK.201/A.566/DJKA/12/17 and KL.705/XII/10/KA-2017. The period of concession management is 50 years, effectively applicable since the date of operation supported by the signing of minutes of operation date.

Terdapat empat jenis yang wajib dibangun, dioperasikan dan dipelihara Perusahaan terkait dengan proyek LRT Jabodebek yaitu prasarana, fasilitas perawatan prasarana, sarana dan fasilitas perawatan sarana. Pembangunan prasarana dan Dipo oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk selaku kontraktor yang ditugaskan berdasarkan Perpres LRT.

Four components related to the project of LRT Jabodebek which were required to be developed, operated, and maintained by the Company are infrastructure, infrastructure maintenance facility, rolling stock, and rolling stock maintenance facility. Development of infrastructure and depot is conducted by PT Adhi Karya (Persero) Tbk as the assigned contractor according to Presidential Regulation regarding LRT.

**18. Hak Pengoperasian Aset Prasarana
(Lanjutan)**

**18. Infrastructure Assets Operating Rights
(Continued)**

Saat ini LRT belum beroperasi dan masih dalam proses konstruksi.

At present the LRT is not yet operation and still under construction.

Sumatera Selatan dan Kualanamu

Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No. HK.601/SK.29/DJKA/9/2012 Tahun 2012, bahwa Perusahaan diberi kewenangan untuk membangun prasarana perkeretaapian di wilayah Sumatra Selatan, dan sesuai Surat Pernyataan dari Direktur Utama Perusahaan No. 001/VII/11/KA-2012 tanggal 31 Juli 2012 bahwa setelah pembangunan, aset prasarana tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah sehingga menjadi Barang Milik Negara (BMN). Selain itu sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.123 Tahun 2013, bahwa Perusahaan diberi kewenangan untuk membangun prasarana perkeretaapian umum untuk jalur kereta api umum dari Stasiun Araskabu ke Bandar Udara Internasional Kualanamu Sumatra Utara dan sesuai Surat Pernyataan dari Direktur Utama Perusahaan No. HK.237/VII/5/KA-2013 tanggal 10 Juli 2013 bahwa setelah pembangunan tersebut selesai, aset prasarana akan diserahkan kepada Pemerintah.

South Sumatra and Kualanamu

According to Decree of Minister of Transportations No. HK.601/SK.29/DJKA/9/2012 Year 2012, the Company is authorized to build railway infrastructure in South Sumatra, and according to Statement of the Company's President Directors No. 001/VII/11/KA-2012 dated July 31, 2012 that after the construction, the infrastructure assets will be transferred or assigned to the Government as the State Property (BMN). In addition, according to Decree of Minister of Transportations No. KP.123 Year 2013, the Company is authorized to build railway infrastructure for public railway from Araskabu Station to Kualanamu International Airport in North Sumatra, and according to Statement of the Company's President Directors No. HK.237/VII/5/KA-2013 dated July 10, 2013 that after the construction, the infrastructure assets will be transferred or assigned.

Berdasarkan UU No. 23/2007 tentang Perkeretaapian, Perusahaan diberi kewenangan (hak) untuk mengoperasikan aset prasarana, maka atas pengeluaran untuk pembangunan prasarana perkeretaapian di wilayah Sumatra bagian utara dan selatan, telah dicatat oleh Perusahaan sebagai hak pengoperasian aset prasarana.

Based on Law No. 23/2007 regarding Railways, the Company is given authorization (right) to operate infrastructure assets, therefore the expenditure for the construction of railway infrastructure in north and south of Sumatra regions, have been recorded by the Company as infrastructure assets operating rights.

Hak pengoperasian aset prasarana di wilayah Sumatra bagian utara dan selatan diamortisasi selama 20 tahun setelah Berita Acara Serah Terima (BAST) diterima atau sesuai dengan kontrak yang berlaku. Masa umur hak pengoperasian ini ditentukan berdasarkan asumsi manajemen merujuk pada ketentuan perpajakan. Jalur Sumatra bagian utara dan selatan tersebut telah beroperasi masing-masing pada tanggal 23 Juli 2013 dan 28 Januari 2015.

Infrastructure assets operating rights in north and south of Sumatra regions are amortized within 20 years since the receipt of minutes of Hand Over (BAST) or in accordance with the prevailing contract. The period of the right to operate is determined based on management assumptions referred to tax provisions. The northern and southern Sumatra tracks were operate on July 23, 2013 and January 28, 2015, respectively.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

**18. Hak Pengoperasian Aset Prasarana
(Lanjutan)**

**18. Infrastructure Assets Operating Rights
(Continued)**

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, pekerjaan dalam proses konstruksi terdiri dari:

As of December 31, 2022 and 2021, construction in progress consists of:

	2022				
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount Rp	Nilai Kontrak/ Total Contracts Rp	Persentase Penyelesaian/ Percentage of Completion	Estimasi Penyelesaian/ Estimated Completion	
Hak Pengoperasian Aset Prasarana					Infrastructure Assets Operating Rights
Proyek LRT Jabodebek	19.041.688.791	28.245.111.967	88,07%	2023	LRT Jabodebek Project
Pembangunan Jalur Ganda - Sumatra Selatan	934.884.043	1.903.770.937	49,11%	2023	Double Track Construction South Sumatra
Reaktivasi Cibu-Garut	352.571.613	374.842.092	94,06%	2023	Reactivation Cibu Garut
Jumlah	20.329.144.447	30.523.724.996			Total
	2021				
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount Rp	Nilai Kontrak/ Total Contracts Rp	Persentase Penyelesaian/ Percentage of Completion	Estimasi Penyelesaian/ Estimated Completion	
Hak Pengoperasian Aset Prasarana					Infrastructure Assets Operating Rights
Proyek LRT Jabodebek	16.366.186.678	28.245.111.967	78,39%	2022	LRT Jabodebek Project
Pembangunan Jalur Ganda - Sumatra Selatan	543.712.862	767.468.027	70,85%	2022	Double Track Construction South Sumatra
Jumlah	16.909.899.540	29.012.579.994			Total

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, nilai beban pinjaman yang dikapitalisasi masing-masing sebesar Rp600.973.362 dan Rp452.299.477.

As of December 31, 2022 and 2021, capitalized interest expense amounted to Rp600,973,362 and Rp452,299,477, respectively.

19. Aset Takberwujud

19. Intangible Assets

	2022					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Sertifikat Tanah	331.136.238	442.243	--	70.571.378	402.149.859	Land Certificate
Piranti Lunak	251.878.751	5.621.446	--	6.830.000	264.330.197	Software
Aset dalam Penyelesaian	64.393.646	89.853.662	--	(77.401.378)	76.845.930	Construction in Progress
Jumlah	647.408.635	95.917.351	--	--	743.325.986	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated Depreciation
Sertifikat tanah	64.273.786	16.785.812	--	--	81.059.598	Land Certificate
Piranti lunak	216.361.572	23.143.914	--	--	239.505.486	Software
Jumlah	280.635.358	39.929.726	--	--	320.565.084	Total
Nilai Tercatat	366.773.277				422.760.902	Carrying Amount

19. Aset Takberwujud (Lanjutan)

19. Intangible Assets (Continued)

	2021					
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Sertifikat Tanah	283.305.495	30.394.635	--	17.436.108	331.136.238	Land Certificate
Piranti Lunak	249.798.413	557.338	--	1.523.000	251.878.751	Software
Aset dalam Penyelesaian	--	26.450.720	--	(17.231.607)	64.393.646	Construction in Progress
Jumlah	588.278.441	57.402.693	--	1.727.501	647.408.635	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated Depreciation
Sertifikat tanah	50.024.360	14.249.426	--	--	64.273.786	Land Certificate
Piranti lunak	190.776.147	25.585.425	--	--	216.361.572	Software
Jumlah	240.800.507	39.834.851	--	--	280.635.358	Total
Nilai Tercatat	347.477.934				366.773.277	Carrying Amount

Sertifikat tanah merupakan biaya atas pengelolaan peningkatan status hak atas tanah yang sebelumnya berbentuk *Grondkaart* ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan.

Land certificate represents the maintenance costs to improve the status of land rights that are previously in form of Grondkaart to be Building Use Rights Certificate.

Piranti lunak merupakan biaya atas pengembangan atau pembelian piranti lunak yang bersifat spesifik berdasarkan bisnis proses Grup.

Software represents the procurement or development costs for specific softwares according to the Group's business process.

Pada 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan melakukan reklasifikasi beberapa aset ke dalam aset takberwujud (Catatan 16).

As of December 31, 2022 and in 2021, the Company reclassifies few assets into intangible assets (Note 16).

Beban amortisasi yang dibebankan dalam laba untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp39.929.726 dan Rp39.834.851.

Amortization expenses charged to profit or loss for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounting to Rp39,929,726 and Rp39,834,851, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, aset dalam penyelesaian terdiri dari:

As of December 31, 2022 and 2021, the construction in progress consists of:

	2022				
	Nilai Tercatat/ <i>Carrying Amount</i> Rp	Nilai Kontrak/ <i>Total Contracts</i> Rp	Persentase Penyelesaian/ <i>Percentage of Completion</i>	Estimasi Penyelesaian/ <i>Estimated Completion</i>	
Aset Takberwujud					Intangible Assets
Piranti Lunak	40.256.307	100.609.307	40,01%	2023	Software
Sertifikat Tanah	36.589.623	44.017.945	83,12%	2023	Land Certificate
Jumlah	76.845.930	144.627.252			Total
	2021				
	Nilai Tercatat/ <i>Carrying Amount</i> Rp	Nilai Kontrak/ <i>Total Contracts</i> Rp	Persentase Penyelesaian/ <i>Percentage of Completion</i>	Estimasi Penyelesaian/ <i>Estimated Completion</i>	
Aset Takberwujud					Intangible Assets
Piranti Lunak	25.100.308	42.456.856	59,12%	2022	Software
Sertifikat Tanah	39.293.338	136.199.721	45,41%	2022	Land Certificate
Jumlah	64.393.646	178.656.577			Total

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

20. Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa

20. Right of Use Assets and Lease Liabilities

Rekonsiliasi kelompok-kelompok utama aset hak guna dan liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

The reconciliation of right-of-use assets and lease liabilities by major classifications was as follows:

		2022				
		1 Januari/ January 1, 2022	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	31 Desember/ December 31, 2022	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Prasarana:						Infrastructures:
Tanah	6.115.014	3.081.577	(2.997.825)	6.198.766		Land
Bangunan	17.700.543	1.086.500	--	18.787.043		Buildings
Instalasi Bergerak	25.183.819	9.864.366	--	35.048.185		Equipments
Fasilitas:						Facilities:
Kendaraan	14.408.147	1.350.591	(11.380.579)	4.378.159		Vehicles
Inventaris	63.467.867	--	--	63.467.867		Supplies
Jumlah	126.875.390	15.383.034	(14.378.404)	127.880.020		Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Prasarana:						Infrastructures:
Tanah	4.994.457	2.404.547	(2.997.825)	4.401.179		Land
Bangunan	12.093.889	4.157.013	--	16.250.902		Buildings
Instalasi Bergerak	18.078.398	11.675.221	--	29.753.619		Equipments
Fasilitas:						Facilities:
Kendaraan	11.463.429	4.135.350	(11.235.792)	4.362.987		Vehicles
Inventaris	12.825.863	7.169.396	--	19.995.259		Supplies
Jumlah	59.456.036	29.541.527	(14.233.617)	74.763.946		Total
Nilai Tercatat	67.419.354			53.116.074		Carrying Amount
		2021				
		1 Januari/ January 1, 2021	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	31 Desember/ December 31, 2021	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Prasarana:						Infrastructures:
Tanah	6.436.362	--	(321.348)	6.115.014		Land
Bangunan	14.951.797	2.774.233	(25.487)	17.700.543		Buildings
Instalasi Bergerak	30.221.540	--	(5.037.721)	25.183.819		Equipments
Fasilitas:						Facilities:
Kendaraan	15.162.981	446.744	(1.201.578)	14.408.147		Vehicles
Inventaris	63.467.867	--	--	63.467.867		Supplies
Jumlah	130.240.547	3.220.977	(6.586.134)	126.875.390		Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Prasarana:						Infrastructures:
Tanah	2.395.272	2.599.185	--	4.994.457		Land
Bangunan	5.741.665	6.377.711	(25.487)	12.093.889		Buildings
Instalasi Bergerak	12.813.688	10.302.431	(5.037.721)	18.078.398		Equipments
Fasilitas:						Facilities:
Kendaraan	6.081.685	6.355.892	(974.148)	11.463.429		Vehicles
Inventaris	5.984.732	6.841.131	--	12.825.863		Supplies
Jumlah	33.017.042	32.476.350	(6.037.356)	59.456.036		Total
Nilai Tercatat	97.223.505			67.419.354		Carrying Amount

**20. Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa
(Lanjutan)**

**20. Right of Use Assets and Lease Liabilities
(Continued)**

Beberapa transaksi sewa gudang dan kantor dan kendaraan mengandung opsi perpanjangan yang dapat diambil oleh Grup sebelum masa berakhirnya kontrak yang tidak dapat dibatalkan. Opsi perpanjangan yang dimiliki hanya dapat diambil oleh Grup. Grup mengevaluasi pada awal dimulainya masa sewa apakah besar kemungkinan akan diambilnya opsi perpanjangan. Grup mengevaluasi kembali penentuan ini apabila ada peristiwa signifikan atau ada perubahan keadaan signifikan di dalam kendali Grup.

Some leases of warehouses and offices and vehicles contain extension options exercisable by the Group before the end of the non-cancellable contract period. The extension options held are exercisable only by the Group. The Group assesses at lease commencement whether it is reasonably certain to exercise the extension options. The Group reassesses this assessment if there is a significant event or significant change in circumstances within the control of the Group.

Berikut ini ringkasan komponen liabilitas sewa berdasarkan jangka waktu:

The following summarizes the component of lease liabilities based on period:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Liabilitas Sewa			Lease liabilities
Jatuh tempo dalam satu tahun	20.566.599	36.612.729	Due within one year
Jatuh tempo lebih dari satu tahun	60.353.914	61.287.358	Due beyond one year
Jumlah	80.920.513	97.900.087	Total
Dikurangi bagian bunga	(19.757.613)	(15.754.652)	Less interest portion
Nilai kini Pembayaran Sewa	61.162.900	82.145.435	Present value of Lease Payments
Dikurangi: bagian jatuh tempo satu tahun	(16.563.637)	(29.372.889)	Less: Current portion
Bagian Jangka Panjang	44.599.263	52.772.546	Non-Current Portion

Berikut ini ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa:

The following summarizes the component of changes in the liabilities arising from leases:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo Awal	82.145.435	105.157.333	Beginning Balance
Arus Kas	(37.190.355)	(26.886.581)	Cash Flow
Perubahan Non Kas			Non-cash Movement
Penambahan	16.207.820	3.874.683	Additions
Saldo Akhir	61.162.900	82.145.435	Ending Balance

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Grup mencatat beban penyusutan atas aset hak guna masing-masing sebesar sebesar Rp29.541.527 dan Rp32.476.350, juga mencatat membebaskan bunga masing-masing sebesar Rp8.101.140 dan Rp5.313.503 (Catatan 43).

As of December 31, 2022 and 2021, the Group charge depreciation of right of use of asset amounted Rp29,541,527 and Rp32,476,350, also charge interest expense amounted Rp8,101,140 and Rp5,313,503, respectively (Notes 43).

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 terdapat pengecualian untuk pengakuan sewa jangka pendek dan sewa atas barang masing-masing sebesar Rp77.767.595 dan Rp28.629.159.

As of December 31, 2022 there are exceptions for the recognition of the short-term leases and leases amounted Rp77,767,595 and Rp28,629,159, respectively.

21. Aset Tidak Lancar Lainnya

21. Other Non-Current Assets

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Aset Non-Keuangan			Non-Financial Assets
Aset Diberhentikan Operasi	268.605.543	267.343.465	Assets Discontinued from Operations
Persediaan <i>Scrap</i>	31.443.812	31.443.812	Scrap Inventories
Aset Lain-lain	--	30.555.196	Other Assets
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(300.049.355)	(329.342.473)	Allowance for Impairment Losses
Aset Non-Keuangan - Neto	<u><u>--</u></u>	<u><u>--</u></u>	Non-Financial Assets - Net
Aset Keuangan			Financial Assets
Pihak Berelasi (Catatan 41)			Related Parties (Note 41)
Dana Pensiun Pegawai	76.394.632	88.598.426	Pension Funds
Dana Kesehatan Pegawai	53.402.087	49.994.432	Employee Healthy Fund
Pihak Ketiga			Third Parties
Aset Keuangan Lainnya	56.928.847	47.720.711	Other Financial Assets
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	--	(577.164)	Allowance for Impairment Losses
Aset Keuangan - Neto	<u><u>186.725.566</u></u>	<u><u>185.736.405</u></u>	Financial Assets - Net
Neto	<u><u>186.725.566</u></u>	<u><u>185.736.405</u></u>	Net

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

Change in allowance for impairment losses:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo Awal	(329.919.637)	(318.281.954)	Beginning Balance
(Penambahan) Pemulihan			(Additional) Recovery
Cadangan Aset Keuangan	577.164	(495.174)	Allowance of Financial Assets
(Penambahan) Penghapusan Cadangan			(Additional) Write-offs of
Aset Non Keuangan	29.293.118	(11.142.509)	Non-Financial Assets
Saldo Akhir	<u><u>(300.049.355)</u></u>	<u><u>(329.919.637)</u></u>	Ending Balance

Aset diberhentikan operasi merupakan aset tetap Sarana Grup yang tidak dapat dioperasikan lagi baik dari sisi teknis maupun ekonomi (Catatan 16). Nilai atas aset diberhentikan operasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah dicadangkan seluruhnya.

Assets discontinued form operations represent Group's assets which cannot be technically and economically utilized (Note 16). Amount of assets discontinued form operations as of December 31, 2022 and 2021 have been fully impaired.

Dana pensiun pegawai merupakan dana yang dibentuk untuk menampung dana pensiun karyawan. Jumlah dana yang dikumpulkan sebesar 17,25% dari penghasilan dasar pensiun karyawan dengan komposisi sebesar 4,75% dipotong dari penghasilan karyawan dan sebesar 12,5% dari kontribusi Perusahaan. Dana tersebut digunakan untuk pesangon pegawai Perusahaan yang diangkat sebelum tanggal 1 Agustus 2009 sebanyak 10.222 karyawan sebelum disetorkan ke pengelola program asuransi *saving plan* dengan pola pendanaan sistem *pooled fund*.

Pension funds represent funds raised to accommodate employees' pension funds. The amount collected is 17.25% of employee basic pension salary represented by 4.75% deducted from employee's salary and 12.5% of the Company's contribution. The funds are used for employee severance payment for those who were hired on the period started before August 1, 2009 amounted to 10,222 employees before it is deposited to insurance saving plan management by pooled fund systems.

21. Aset Tidak Lancar Lainnya (Lanjutan)

Aset lain-lain merupakan uang muka atas pembelian 10 *trainset* KRL dimana masing-masing *trainset* terdiri dari 4 sarana (total 40 sarana) yaitu nomor K311201 sampai dengan K311240 sehubungan dengan pembiayaan proyek Jabodetabek *Commuter Railways*. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-378/MK.06/2006 tanggal 4 September 2006, Kementerian Keuangan meneruskan pinjaman dari *Kreditanstalt fur Wiederaufbau* sejumlah Rp36.600.000 kepada Perusahaan. Pinjaman tersebut merupakan penerusan pinjaman atas Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri tanggal 19 Januari 2005 antara Republik Indonesia dengan *Kreditanstalt fur Wiederaufbau* dengan nilai pinjaman EUR51,000 untuk pembiayaan proyek Jabodetabek *Commuter Railways* (Catatan 28).

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. PL.108/1/3/DJKA/2022 tanggal 3 Oktober 2022 telah dilakukan serah terima aset antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku pelaksana proyek dengan Perusahaan selaku operator. Pada 31 Desember 2022, aset lain-lain senilai Rp30.555.196 tersebut telah direklasifikasi ke dalam aset tetap dan Perusahaan memulihkan seluruh cadangan kerugian yang telah dibentuk sebelumnya.

Aset Keuangan Lainnya merupakan uang jaminan pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp56.928.847 dan Rp47.720.711.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari estimasi nilai wajar aset tidak lancar lainnya.

21. Other Non-Current Assets (Continued)

Other assets represent advances of KRL rolling stocks related to purchase 10 KRL trainset, where each trainset consists of 4 facilities (a total of 40 facilities), namely numbers K311201 through K311240 related to financing of Jabodetabek Commuter Railways project. Based on the Ministry of Finance Letter No. S-378/MK.06/2006 dated September 4, 2006, the Ministry of Finance forwarded the loan from Kreditanstalt fur Wiederaufbau amounted of Rp36,600,000 to the Company. The loan is a two step loans of Foreign Loan Agreement dated January 19, 2005 between the Republic of Indonesia and Kreditanstalt fur Wiederaufbau amounting to EUR51,000 for financing the project of Jabodetabek Commuter Railways (Note 28).

Based on the Minutes of Handover of Work Results no PL.108/1/3/DJKA/2022 on October 3, 2022 have been hand over assets between Direktorat Jenderal Perkeretaapian as project implementer with the Company as operator. On December 31, 2022, other assets amounted to Rp30,555,196 has been reclassified into fixed assets and the Company recovers all allowance for impairment losses that have been previously formed.

Other Financial Assets represent security deposit as of December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp56,928,847 and Rp47,720,711, respectively

Management believes that the allowance for impairment is adequate to cover possible losses on fair value estimated of other non-current assets.

22. Utang Usaha

22. Trade Payables

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Utang Usaha			<i>Trade Payables</i>
Pihak Berelasi (Catatan 41)	880.714.681	473.426.130	<i>Related Parties (Note 41)</i>
Pihak Ketiga	1.578.171.487	1.192.602.860	<i>Third Parties</i>
Jumlah	<u>2.458.886.168</u>	<u>1.666.028.990</u>	Total

Berdasarkan mata uang:

By currencies:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Rupiah	2.361.525.615	1.566.240.261	<i>Rupiah</i>
Yen Jepang	86.831.596	28.401.914	<i>Japan Yen</i>
Euro	10.528.957	--	<i>Euro</i>
Dolar Amerika Serikat	--	71.386.815	<i>United States Dollar</i>
Jumlah	<u>2.458.886.168</u>	<u>1.666.028.990</u>	Total

Tidak ada jaminan yang diberikan atas utang usaha.

There is no collateral pledged on trade payables.

23. Beban Akrual

23. Accruals

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Biaya Operasi Langsung	672.586.876	685.255.908	<i>Direct Operating Expenses</i>
Biaya Umum dan Administrasi	579.407.094	453.801.794	<i>General and Administratives Expenses</i>
Biaya Operasi Tidak Langsung	320.967.956	292.664.942	<i>Indirect Operating Expenses</i>
Jumlah	<u>1.572.961.926</u>	<u>1.431.722.644</u>	Total

Biaya operasi langsung yang masih harus dibayar merupakan biaya pemeliharaan sarana di lintas dan balai yasa, biaya pendukung operasi dan biaya pendukung angkutan dan lainnya.

Accrued direct operating expenses represents the costs of maintenance of rolling stocks in railroad and workshop, costs of operation supports and costs of transportation supports and others.

Biaya umum dan administrasi yang masih harus dibayar merupakan provisi atas restrukturisasi Jiwabaya, biaya bunga pinjaman, listrik, air, dan telepon.

Accrued general and administratives expenses represent provision of Jiwabaya restructurization, interest expenses of loan, electricity, water, and telephone.

Biaya operasi tidak langsung yang masih harus dibayar merupakan biaya perawatan dan operasi prasarana, serta sebagian biaya penggunaan prasarana milik Pemerintah (TAC) (Catatan 41), biaya keselamatan dan kesehatan kerja dan lainnya.

Accrued indirect operating expenses represent the costs of infrastructure operation and maintenance, and Track Access Charge (TAC) (Note 41), costs for safety and healthy work environment and others.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

24. Pendapatan Diterima di Muka

24. Unearned Revenue

	2022	2021	
Jatuh Tempo dalam Satu Tahun			Current Maturities
Non Angkutan	653.712.500	448.374.220	Non-Transportation
Angkutan Penumpang	445.814.913	358.775.110	Passenger Transportation
Angkutan Barang	45.112.038	25.631.626	Freight Transportation
Jumlah	1.144.639.451	832.780.956	Total
Jangka Panjang Lebih dari Satu Tahun			Long Term Maturity
Non Angkutan	837.174.293	776.100.393	Non-Transportation

Pendapatan diterima di muka atas pendapatan non angkutan merupakan penerimaan sewa properti di dalam dan di luar stasiun.

Unearned revenue of non-transportation represents revenue generated from property lease inside and outside of station area.

Pendapatan diterima di muka angkutan penumpang merupakan pendapatan atas jasa angkutan penumpang pengguna kereta api yang realisasi kedatangan pada periode berikutnya.

Unearned revenue of passenger transportation represents revenue generated from passenger transport railway services of which the arrive is realized in the following period.

Pendapatan diterima di muka angkutan barang merupakan pendapatan atas jasa angkutan barang yang terdiri dari angkutan peti kemas, batu bara, parcel, barang curah dan barang jenis lain yang realisasi keberangkatannya pada periode berikutnya.

Unearned revenue of freight transportation represents revenue generated from freight transport railway services consist of freight of containers, coal, parcel, bulk cargo and other types of goods of which the departure is realized in the following period.

25. Pinjaman Bank Jangka Pendek

25. Short-Term Bank Loans

	2022	2021	
Pihak Berelasi (Catatan 41)	760.000.000	709.962.173	Related Parties (Note 41)
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Bank HSBC Indonesia	1.000.000.000	1.000.000.000	PT Bank HSBC Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	--	950.000.000	PT Bank Central Asia Tbk
Sub Jumlah	1.000.000.000	1.950.000.000	Sub Total
Jumlah	1.760.000.000	2.659.962.173	Total

Informasi lain mengenai Pinjaman Bank Jangka Pendek pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Other Information about Short-Term Bank Loans as of December 31, 2022 as follow:

Kreditur/ Creditor	Nama Fasilitas/ Facility Type	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit/ Maturity Date Of Credit Agreement	Suku Bunga Per Tahun/ Interest rate per annum	Agunan/ Collateral	Financial Covenant
Perusahaan/The Company					
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Berulang/ Revolving	13 April 2023/ April 13, 2023	4,05% - 5,40%	-	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Berulang/ Revolving	14 Juni 2023/ June 14, 2023	4,00% - 5,40%	-	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Berulang/ Revolving	8 Maret 2024/ March 8, 2024	4,00% - 5,50%	-	Cash Flow Operation positif Debt to Equity Ratio Max 300% Ebitda to Interest min 1.5 x Cash Flow Operation positif

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

25. Pinjaman Bank Jangka Pendek (Lanjutan)

25. Short-Term Bank Loans (Continued)

Kreditur/ Creditor	Nama Fasilitas/ Facility Type	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit/ Maturity Date Of Credit Agreement	Suku Bunga Per Tahun/ Interest rate per annum	Agunan/ Collateral	Financial Covenant
PT Bank HSBC Indonesia	Berulang/ Revolving	24 September 2023/ September 24, 2023	4,00% - 4,90%	-	-
PT Bank Central Asia Tbk	Berulang/ Revolving	1 Agustus 2023/ August 1, 2023	4,05% - 4,25%	-	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Reska Multi Usaha					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Berulang/ Revolving	8 September 2023/ September 8, 2023	7,75%	Fidusia Piutang/ Account receivable Fiduciary	Debt to Equity Ratio Max 200% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Berulang/ Revolving	16 Mei 2023/ May 16, 2023	8,00%	Fidusia Piutang/ Account receivable Fiduciary	Debt to Equity Ratio Max 300%
PT Bank Permata Tbk	Berulang/ Revolving	26 Mei 2023/ May 26, 2023	7,9% - 8,90%	Fidusia Piutang/ Account receivable Fiduciary	Debt to Equity Ratio Max 250% Current Ratio min 110% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT KA Properti Manajemen					
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Berulang/ Revolving	3 November 2023/ November 3, 2023	7,00%	Fidusia Piutang/ Account receivable Fiduciary	Debt to Equity Ratio Max 200% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x
PT Bank Permata Tbk	Berulang/ Revolving	20 April 2023/ April 20, 2023	7,10%	Fidusia Piutang/ Account receivable Fiduciary	Debt to Equity Ratio Max 300%
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT KA Logistik					
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Berulang/ Revolving	11 Juli 2022/ July 11, 2022	8,50%	Aset/ Assets	Debt to Equity Ratio Max 200% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x

Sampai dengan tanggal laporan, perjanjian pinjaman antara Perusahaan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, masih dalam proses perpanjangan.

As of the reporting date, the Company's loan agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, is still in the process of renewal.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup telah memenuhi syarat dan *financial covenant* pinjaman.

As of December 31, 2022, the Group has complied with the terms and financial covenant of the loans.

Mutasi atas saldo fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Movement of the balance of this facilities are as follow:

2022					
Kreditur/ Creditor	Saldo Awal/ Beginning Balance	Pencairan/ Drawdown	Pembayaran/ Payment	Saldo Akhir/ Ending Balance	Beban Bunga/ Interest Expense
Perusahaan/ The Company					
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	600.000.000	8.600.000.000	(8.700.000.000)	500.000.000	29.622.542
PT Bank Mandiri (Persero)	--	500.000.000	(500.000.000)	--	4.880.556
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	200.000.000	--	200.000.000	2.392.793
PT Bank HSBC Indonesia	1.000.000.000	3.350.000.000	(3.350.000.000)	1.000.000.000	38.612.667
PT Bank Central Asia Tbk	950.000.000	550.000.000	(1.500.000.000)	--	23.092.944
Subtotal	2.550.000.000	13.200.000.000	(14.050.000.000)	1.700.000.000	98.601.502

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

25. Pinjaman Bank Jangka Pendek (Lanjutan)

25. Short-Term Bank Loans (Continued)

2022					
Kreditur/ Creditor	Saldo Awal/ Beginning Balance	Pencairan/ Drawdown	Pembayaran/ Payment	Saldo Akhir/ Ending Balance	Beban Bunga/ Interest Expense
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Reska Multi Usaha					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	80.000.000	250.000.000	(270.000.000)	60.000.000	4.196.319
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	29.962.173	29.660.506	(59.622.679)	--	1.173.238
PT Bank Permata Tbk	--	204.900.000	(204.900.000)	--	2.162.953
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT KA Logistik					
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	1.949.849	(1.949.849)	--	--
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT KA Properti Manajemen					
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	--	15.000.000	(15.000.000)	--	46.667
PT Bank Permata Tbk	--	5.000.000	(5.000.000)	--	4.931
Subtotal	109.962.173	506.510.355	(556.472.528)	60.000.000	7.584.108
Total	2.659.962.173	13.706.510.355	(14.606.472.528)	1.760.000.000	106.185.610

26. Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

26. Other Current Liabilities

	2022	2021	
Titipan Pegawai	56.416.887	49.951.092	Employee Deposits
Uang Jaminan	5.538.030	2.275.634	Security Deposits
Lain-lain	36.583.373	42.084.218	Others
Jumlah	98.538.290	94.310.944	Total

Titipan pegawai merupakan kekurangan uang muka dinas yang belum dibayarkan kepada pegawai.

Employee deposits represent advances underpayment that have not been paid to employees.

Uang jaminan terdiri dari penerimaan uang jaminan yang berasal dari pelanggan atas jaminan pemasangan iklan di kereta dan jaminan tiket harian dari penumpang *commuter line*.

Security deposits consist of deposit received from customers for advertising in the train and daily ticket deposit from the commuter line passengers.

Utang lain-lain diantaranya merupakan utang atas penerimaan uang jaminan optimalisasi aset dari pelanggan sebagai jaminan atas aset yang disewa.

Others consist of deposit received from customers regarding optimization assets as warranty for rental assets.

27. Liabilitas Imbalan Kerja

27. Employee Benefits Liabilities

Grup mengakui liabilitas imbalan kerja untuk seluruh karyawan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003 dan Perjanjian Kerja Bersama.

The Group recognizes employee benefits liabilities to eligible employees based on the provisions of Labour Law No.13/2003 and Collective Labour Agreement.

27. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

Total liabilitas imbalan kerja yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan beban imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dihitung oleh aktuaris independen KKA Azwir Arifin dan Rekan.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko Investasi

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi; jika pengembalian aset program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program.

Saat ini program tersebut memiliki investasi yang relatif lebih banyak pada instrumen properti dibandingkan dengan instrumen lainnya.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai aset program dapat terpulihkan.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program tersebut.

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam menghitung beban dan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

	2022	2021	
Tingkat Diskonto	5,52% -7,44%	3,40-7,60%	Discount Rate
Tingkat Kenaikan Gaji per Tahun	7,00% - 9,00%	7,00% - 9,00%	Salary Increase Rate per Year
Usia Pensiun Normal	56 tahun/ years	56 tahun/ years	Normal Retirement Age
Tingkat Mortalitas	TMI IV/2019	TMI IV/2019	Mortality Rate
Tingkat Cacat per Tahun	1% - 10% dari Tingkat Kematian/	of Mortality Rate	Disability Rate per Year
Tingkat Pengunduran Diri:			Resignations Rate:
Umur Dibawah 20 - 29 Tahun	5,00% - 6,00%	5,00% - 6,00%	Age Under 20 - 29 Years Old
Umur Diatas 30 Tahun	Menurun secara linear hingga mencapai 0% saat usia pensiun normal/	Decrease linearly until it reaches 0% when the normal retirement age	Age Above 30 Years Old

27. Employee Benefits Liabilities (Continued)

The amounts of employee benefits liabilities presented in the consolidated statements of financial position and employee benefits expense recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the years ended on December 31, 2022 and 2021 were calculated by independent actuary KKA Azwir Arifin and Partners.

The defined benefit pension plan exposes the Group to actuarial risks such as investment risk, interest rate risk and salary risk.

Investment Risk

The present value of the defined benefit plan obligation is calculated using a discount rate determined by reference to high quality corporate bond yields; if the return on plan asset is below this rate, it will create a plan deficit.

Currently the plan relatively has a more investment in property instrument compared to other instrument.

Management has believe the recoverable amount of plan assets.

Interest Risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.

Salary Risk

The present value of the defined benefit obligation is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

The assumptions used to calculate employee benefits expenses and liabilities on December 31, 2022 and 2021 are as follows:

27. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

27. Employee Benefits Liabilities (Continued)

a) Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Liabilitas imbalan kerja karyawan yang jatuh tempo dalam satu tahun sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Program Pensiun Eks PNS	154.922.880	164.250.543
Tantiem dan Bonus	807.820.177	421.883.341
Jumlah	<u>962.743.057</u>	<u>586.133.884</u>

a) Short-Term Employee Benefits Liabilities

Employee benefits liabilities which are due within one year as follows:

Pension Plan Ex-PNS	164.250.543	<i>Pension Plan Ex-PNS</i>
Bonuses and Tantiem	421.883.341	<i>Bonuses and Tantiem</i>
Total	586.133.884	Total

b) Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021*)</u>
Program Pensiun Eks PNS	1.098.808.740	1.167.401.051
Program Pensiun Eks Perum & Persero	4.037.598.131	4.337.122.922
Imbalan Kerja Lain	60.745.103	76.900.516
Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja	<u>5.197.151.974</u>	<u>5.581.424.489</u>

b) Long-Term Employee Benefits Liabilities

Long-term employee benefit liabilities after deducting the portion due in one year are as follows:

Pension Plan Ex-PNS	1.167.401.051	<i>Pension Plan Ex-PNS</i>
Pension Plan Ex-Perum & Persero	4.337.122.922	<i>Pension Plan Ex-Perum & Persero</i>
Other Employment Benefits	76.900.516	<i>Other Employment Benefits</i>
Total Employee Benefit Liabilities	5.581.424.489	Total Employee Benefit Liabilities

Total liabilitas imbalan kerja yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian yang timbul dari program pensiun imbalan pasti, jaminan kesehatan pensiun, pesangon dan imbalan kerja jangka panjang lainnya sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021*)</u>
Program Pensiun Eks PNS	1.253.731.620	1.331.651.594
Program Pensiun Eks Perum & Persero	4.037.598.131	4.337.122.922
Tantiem dan Bonus	807.820.177	421.883.341
Imbalan Kerja Lain	60.745.103	76.900.516
Jumlah	<u>6.159.895.031</u>	<u>6.167.558.373</u>

The amounts of employee benefits liabilities recorded in the consolidated statement of financial position arising from defined benefit pension plan, retirement healthcare, severance pay, and other long-term employee benefits are as follows:

Pension Plan Ex-PNS	1.331.651.594	<i>Pension Plan Ex-PNS</i>
Pension Plan Ex-Perum & Persero	4.337.122.922	<i>Pension Plan Ex-Perum & Persero</i>
Bonuses and Tantiem	421.883.341	<i>Bonuses and Tantiem</i>
Other Employment Benefits	76.900.516	<i>Other Employment Benefits</i>
Total	6.167.558.373	Total

Program Pensiun Imbalan Pasti

Karyawan Eks Pegawai Negeri Sipil (Eks-PNS)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Penyesuaian Pensiun Eks-PNS Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. 64 tanggal 29 November 2007, Eks-PNS tersebut berhak memperoleh pensiun pokok yang besarnya disesuaikan sama dengan pensiun pokok yang diterima oleh penerima pensiun PNS.

Defined Benefits Pension Plans

The Ex-Civil Service Employee (Ex-PNS)

In accordance with Government Regulation regarding the Adjustment of retirement of Ex-PNS of Department of Transportation at PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. 64 dated November 29, 2007, The Ex-Civil Service Employee (PNS) of Department of Transportation who work is entitled to receive the principle amount of pension of the PNS.

*) Disajikan Kembali, Catatan 54

*) As Restated, Note 54

27. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

27. Employee Benefits Liabilities (Continued)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 105/PMK.02.2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks-PNS Departemen Perhubungan Perusahaan pada Pasal 3, sumber pendanaan pembayaran pensiun pegawai berasal dari: iuran pegawai, Perusahaan untuk kontribusi pendanaan bersama, *past service liability* yang dibayarkan oleh Perusahaan, hasil investasi dari akumulasi dana pensiun pegawai Perusahaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Based on the Regulation of Minister of Finance No. 105/PMK.02.2010 dated May 19, 2010 regarding Provision of Retirement Program Fund Adjustment for ex PNS Department of Transportation of the Company, in Article 3 stated that sources of financing for employee pension fund payment consists of employee contribution, the Company contribution, past service liability paid by the Company, results of investment and accumulation of employee pension funds of the Company, and Indonesian Government Budget (APBN).

Perusahaan diharuskan membayar *past service liability* sebesar Rp79.500.000 setiap tahun sampai dengan tahun 2024 kepada PT Taspen (Persero) yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pembayaran pensiun pegawai sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penyelenggaraan pembayaran pension karyawan Eks-PNS.

The Company is required to pay past service liability amounted to Rp79,500,000 for every year until 2024 to PT Taspen (Persero) whom is responsible for the payment of employee pension funds in accordance with the mechanism and law regulation for the implementation of ex PNS pension funds payment.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-927/MK.02/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihal Penetapan Pendanaan Bersama Pembayaran Manfaat Pensiun antara APBN dan Perusahaan menetapkan bahwa kontribusi pendanaan Perusahaan dan Pemerintah dalam Pendanaan Bersama masing-masing sebesar 22% dan 78%. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan tidak terdapat perubahan persentase Penetapan Pendanaan Bersama Pembayaran Manfaat Pensiun.

Based on Letter of the Minister of Finance No. S-927/MK.02/2012 dated December 26, 2012 concerning the Establishment of the Joint Funding Retirement Benefit Payments between the APBN and the Company states that the contribution is provided by joint funding the Company and Government of 22% and 78% respectively. The percentage has not change until the issuance of financial statement report.

Detail beban pensiun Eks-PNS yang diakui pada laba rugi konsolidasian sebagai berikut:

The details of benefit pension plan ex-PNS expense in the consolidated profit or loss are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Biaya Jasa Kini	4.282.372	6.040.360	Current Service Cost
Beban Bunga Bersih dari Liabilitas Manfaat Pasti	450.315.024	468.336.947	Net Interest on the Defined Benefit Obligation
Jumlah	454.597.396	474.377.307	Total
Bagian Pemerintah	(354.585.969)	(370.014.299)	Government Portion
Bagian Perusahaan	100.011.427	104.363.008	The Company Portion

27. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

27. Employee Benefits Liabilities (Continued)

Liabilitas sehubungan dengan program pensiun imbalan pasti sebagai berikut:

Liability in respect of the defined benefits pension plan are as follows:

	2022	2021	
Nilai Kini Kewajiban	6.808.303.387	7.259.204.386	<i>Present Value of Obligation</i>
Nilai Wajar Aset			<i>Fair Value of Pension Fund</i>
Program Dana Pensiun	(1.109.523.297)	(1.206.242.595)	<i>Plan Assets</i>
Jumlah Liabilitas Bersih	5.698.780.090	6.052.961.791	<i>Net Liability</i>
Bagian Pemerintah	(4.445.048.470)	(4.721.310.197)	<i>Government Portion</i>
Bagian Perusahaan	1.253.731.620	1.331.651.594	<i>The Company Portion</i>
Dikurangi Bagian Jangka Pendek	154.922.880	164.250.543	<i>Less of Short-Term Portion</i>
Bagian Jangka Panjang	1.098.808.740	1.167.401.051	<i>Long-Term Portion</i>

Mutasi liabilitas sebagai berikut:

Movements in liabilities are as follows:

	2022	2021	
Awal Tahun	6.052.961.791	6.101.373.953	<i>Beginning of the Year</i>
Beban Laba Rugi	454.597.396	474.377.308	<i>Profit Loss Expenses</i>
Pembayaran Manfaat	(839.796.321)	(885.935.395)	<i>Benefits Payments</i>
Penghasilan Komprehensif Lain	31.017.224	363.145.925	<i>Other Comprehensive Income</i>
Akhir Tahun	5.698.780.090	6.052.961.791	<i>End of Year</i>
Bagian Pemerintah	(4.445.048.470)	(4.721.310.197)	<i>The Government Portion</i>
Bagian Perusahaan	1.253.731.620	1.331.651.594	<i>The Company Portion</i>
Dikurangi Bagian Jangka Pendek	154.922.880	164.250.543	<i>Less of Short-Term Portion</i>
Bagian Jangka Panjang	1.098.808.740	1.167.401.051	<i>Long-Term Portion</i>

Mutasi nilai wajar aset program dana pensiun sebagai berikut:

The movements in the fair value of pension plan assets are as follows:

	2022	2021	
Nilai Wajar Aset Program			<i>Fair Value of Pension Plan</i>
Dana Pensiun Awal Tahun	1.206.242.595	1.206.997.184	<i>Assets at Beginning of the Year</i>
Pengembalian Aset			<i>Expected Return on</i>
Dana yang Diharapkan	91.071.316	94.507.880	<i>Plan Assets</i>
Imbal Hasil Aset Program			<i>Return on Plan Assets</i>
Non Bunga Neto	(187.790.614)	(95.262.469)	<i>Non Interest - Net</i>
Akhir Tahun	1.109.523.297	1.206.242.595	<i>End of Year</i>
Bagian Pemerintah	(865.428.172)	(940.869.224)	<i>The Government Portion</i>
Bagian Perusahaan	244.095.125	265.373.371	<i>The Company Portion</i>

Mutasi penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The movements of other comprehensive income are as follows:

	2022	2021	
Saldo Awal	572.452.750	209.306.825	<i>Beginning Balance</i>
Tahun Berjalan	31.017.222	363.145.925	<i>Current Year</i>
Saldo Akhir	603.469.972	572.452.750	<i>Ending Balance</i>
Bagian Pemerintah	(470.706.578)	(446.513.145)	<i>The Government Portion</i>
Bagian Perusahaan	132.763.394	125.939.605	<i>The Company Portion</i>

27. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

27. Employee Benefits Liabilities (Continued)

Komposisi penempatan investasi yang dilakukan atas aset program adalah sebagai berikut:

The composition of investment placement on plan asset are as follows:

	2022	2021	
	%	%	
Deposito	39,91	47,76	Time Deposits
Surat Utang Negara	38,21	30,82	Government Securities
Sukuk	21,88	21,42	Sukuk
Jumlah	100,00	100,00	Total

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

A quantitative sensitivity analysis for significant assumptions as of December 31, 2022 and 2021 as follows:

	2022	2021	
Analisa Sensitivitas			Sensitivity Analysis
Nilai Kini Kewajiban			Present Value of Defined
Imbalan Pasti			Benefit Obligation
Akhir Periode			End of Period
Tingkat Diskonto + 1%	1.804.026.574	1.486.902.562	Rate + 1%
Tingkat Diskonto - 1%	1.836.093.002	1.722.835.193	Rate - 1%
Tingkat Kenaikan Gaji + 1%	1.829.053.197	1.597.450.303	Salary Increase + 1%
Tingkat Kenaikan Gaji - 1%	1.810.697.372	1.596.604.710	Salary Increase - 1%

Program Pensiun Eks Perum dan Persero

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi karyawan Eks-Perum yang direkrut sebelum Agustus 2009. Manfaat pensiun dihitung berdasarkan TDPIP tahun 2012 dengan ketentuan perhitungan tanpa kenaikan Gaji Dasar Program yang dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Berdasarkan Perjanjian No. 161/HK/UM/2003 dan 099.SJ.U.0903 serta perjanjian No. 162/HK/UM/2003 dan No. 100.SJ.U.0903 tanggal 28 September 2003 tentang Pengelolaan program Anuitas Pensiun Bagi Pensiunan dan Pengelolaan Program Jaminan Hari Tua Bagi Pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero). Sedangkan untuk karyawan Persero yang direkrut setelah Agustus 2009 diberikan pesangon sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003.

Pension Plan of Ex-Perum and Persero

The Company organize defined benefit pension plan for employees of ex-Perum which hired before August 2009. The pension benefits are calculated based TDPIP in 2012 with the provisions of zero increment of Basic Salary Program managed by PT Asuransi Jiwasraya (Persero) based on Agreement No. 161/HK/UM/2003, and 099.SJ.U.0903 and 162/HK/UM/2003, and No. 100.SJ.U.0903 dated September 28, 2003 on the program management of the Annuity Pension Plan for Retirement and old Age Protection Program for Employees of PT Kereta Api Indonesia (Persero). Persero's employees hired after August 2009 is granted severance pay in accordance with the Employment No. 13 of 2003.

27. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

27. Employee Benefits Liabilities (Continued)

Rincian beban pensiun karyawan Eks-Perum dan Persero yang diakui pada laba rugi sebagai berikut:

The details of the benefit pension ex-Perum and Persero employees expenses in profit or loss are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Biaya Jasa Kini	279.369.254	283.962.898	Current Service Cost
Beban Bunga Bersih dari Liabilitas Manfaat Pasti	299.946.436	278.234.197	Net Interest on the Net Defined Benefit Liability
Biaya Jasa Lalu	581.699.330	--	Past Service Cost
Penyelesaian Program atas Aset	--	293.135.099	Program Settlement on Assets
Jumlah	<u>1.161.015.020</u>	<u>855.332.194</u>	Total

Liabilitas sehubungan dengan program pensiun imbalan pasti sebagai berikut:

Liability in respect of the defined benefits pension plan are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021*)</u>	
Nilai Kini Kewajiban	6.332.375.492	5.706.353.933	Present Value of Obligation
Nilai Wajar Aset Program Dana Pensiun	(2.294.777.361)	(1.369.231.011)	Fair Value of Pension Fund Plan Assets
Jumlah Liabilitas Bersih	<u>4.037.598.131</u>	<u>4.337.122.922</u>	Net Liability

Mutasi liabilitas sebagai berikut:

Movements in liabilities are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021*)</u>	
Awal Tahun	4.337.122.922	3.596.695.039	Beginning of the Year
Beban Laba Rugi	1.161.015.020	855.332.194	Profit Loss Expenses
Penghasilan Komprehensif Lain	(774.472.696)	74.631.048	Other Comprehensive Income
Iuran Dibayar Perusahaan	(686.067.115)	(189.535.359)	Contribution Paid by the Company
Akhir Tahun	4.037.598.131	4.337.122.922	End of Year
Dikurangi Bagian Jangka Pendek	<u>--</u>	<u>--</u>	Less of Short-Term Portion
Bagian Jangka Panjang	<u>4.037.598.131</u>	<u>4.337.122.922</u>	The Long-Term Portion

Mutasi nilai wajar aset program dana pensiun sebagai berikut:

The movements in the fair value of pension plan assets are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Nilai Wajar Aset Program Dana Pensiun			Fair Value of Pension Plan Assets at
Awal Tahun	1.369.231.011	1.622.783.355	Beginning of the Year
Iuran Dibayar Perusahaan	686.067.114	189.535.359	Contribution Paid by the Company
Manfaat Dibayar Pihak Ketiga	(378.799.695)	(279.889.205)	Benefit Paid by Third Party
Pendapatan Bunga	51.777.401	56.162.789	Interest Income
Penyelesaian Program	--	(293.135.099)	Program Settlement
Imbal Hasil Aset Program Non Bunga Neto	566.501.530	73.773.812	Return on Plan Assets Non Interest - Net
Akhir Tahun	<u>2.294.777.361</u>	<u>1.369.231.011</u>	End of Year

*) Disajikan Kembali, Catatan 54

*) As Restated, Note 54

27. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

27. Employee Benefits Liabilities (Continued)

Mutasi penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The movements of other comprehensive income are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021*)</u>	
Saldo Awal	1.945.277.658	1.870.646.610	Beginning Balance
Tahun Berjalan	(774.472.696)	74.631.048	Current Year
Saldo Akhir	<u>1.170.804.962</u>	<u>1.945.277.658</u>	Ending Balance

Komposisi penempatan investasi yang dilakukan atas aset program adalah sebagai berikut:

The composition of investment placement on plan asset program are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
	%	%	
Saham	83,07	20,52	Shares
Properti	7,30	51,74	Property
Obligasi	5,22	17,89	Bonds
Pasar Uang	4,39	3,93	Money Market
Lain - lain	0,02	5,92	Others
Jumlah	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	Total

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

A quantitative sensitivity analysis for significant assumptions as of December 31, 2022 and 2021 as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Analisa Sensitivitas			Sensitivity Analysis
Nilai Kini Kewajiban			Present Value of Defined
Imbalan Pasti			Benefit Obligation
Akhir Periode			End of Period
Tingkat Diskonto + 1%	5.426.003.218	5.074.067.790	Rate + 1%
Tingkat Diskonto - 1%	7.468.412.583	7.038.284.410	Rate - 1%
Tingkat Kenaikan Gaji + 1%	6.801.813.768	6.435.074.948	Salary Increase + 1%
Tingkat Kenaikan Gaji - 1%	5.910.921.140	5.510.950.595	Salary Increase - 1%

*) Disajikan Kembali, Catatan 54

*) As Restated, Note 54

Imbalan Kerja Lainnya

Perusahaan juga memberikan imbalan kerja lainnya berupa uang pesangon, penghargaan masa bakti, tunjangan masa persiapan pensiun dan tunjangan cuti besar kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Imbalan program ini tidak didanai dan ditentukan berdasarkan penghasilan dan masa kerja karyawan.

Other Employment Benefits

The Group also provides other defined employment benefit plans such as severance pay, long-service award, pension preparation year and long leave allowance for their eligible employees based on the Group's policies. These other post employment benefits are unfunded and computed based on the salaries and service years of the employees.

27. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

27. Employee Benefits Liabilities (Continued)

Detail beban imbalan kerja lainnya yang diakui pada laba rugi konsolidasian sebagai berikut:

The details of the other employment benefits expenses recognized to the consolidated statement of profit or loss are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Biaya Jasa Kini	(15.800.366)	16.066.176	Current Service Cost
Beban Bunga Bersih dari Liabilitas Manfaat Pasti	3.072.270	4.611.780	Net Interest on the Defined Benefit Liability
Biaya Jasa Lalu	(4.094.228)	38.303.985	Past Service Cost
Pengakuan Keuntungan Aktuari	--	(277.583)	Recognition on Actuarial Gain
Jumlah	<u>(16.822.324)</u>	<u>58.704.358</u>	Total

Liabilitas sehubungan dengan imbalan kerja lain sebagai berikut:

Liabilities in respect of other employment benefits are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Nilai Kini Kewajiban	101.117.886	121.095.552	Present Value of Obligation
Nilai Wajar Aset Program Dana Pensiun	(62.234.485)	(45.609.101)	Fair Value of Pension Fund Plan Assets
Surplus	<u>38.883.401</u>	<u>75.486.451</u>	Surplus
Pembatasan Aset	21.861.702	1.414.065	Restricted Assets
Jumlah Liabilitas Bersih	<u>60.745.103</u>	<u>76.900.516</u>	Net Liability

Mutasi liabilitas sebagai berikut:

Movements in liabilities are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Awal Tahun	76.900.516	35.787.410	Beginning of the Year
Beban Laba Rugi	(16.822.324)	58.704.358	Profit Loss Expenses
Pembayaran Manfaat	(3.883.812)	(3.528.907)	Benefits Payments
Penghasilan Komprehensif Lain	20.435.429	2.430.550	Other Comprehensive Income
Iuran Dibayar Perusahaan	(15.884.706)	(16.492.895)	Contribution Paid by the Company
Akhir Tahun	<u>60.745.103</u>	<u>76.900.516</u>	End of Year

Mutasi nilai wajar aset program liabilitas imbalan kerja lainnya sebagai berikut:

The movements in the fair value of other employment benefits plan assets are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Nilai Wajar Aset Program Dana Pensiun			Fair Value of Pension Plan Assets at
Awal Tahun	45.609.101	29.817.013	Beginning of the Year
Pengembalian Aset Dana yang Diharapkan	2.484.660	2.176.610	Expected Return on Plan Assets
Imbalan Hasil atas Aset Program yang tidak Termasuk dalam Bunga Neto	(1.338.719)	(2.333.755)	Return on Plan Assets Plan Assets, which are not Included in Net Interest
Iuran Dibayar Perusahaan	15.884.706	16.492.895	Contribution Paid by the Company
Iuran Dibayar Pihak Ketiga	(405.263)	(543.662)	Contribution Paid by Third Party
Akhir Tahun	<u>62.234.485</u>	<u>45.609.101</u>	End of Year

27. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

27. Employee Benefits Liabilities (Continued)

Mutasi penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The movements of other comprehensive income are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo Awal	3.603.010	1.172.460	Beginning Balance
Tahun Berjalan	20.435.429	2.430.550	Current Year
Saldo Akhir	<u>24.038.439</u>	<u>3.603.010</u>	Ending Balance

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

A quantitative sensitivity analysis for significant assumptions as of December 31, 2022 and 2021 as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Analisa Sensitivitas			Sensitivity Analysis
Nilai Kini Kewajiban			Present Value of Defined
Imbalan Pasti			Benefit Obligation
Akhir Periode			End of Period
Tingkat Diskonto + 1%	89.675.423	104.726.895	Rate + 1%
Tingkat Diskonto - 1%	111.500.045	138.004.535	Rate - 1%
Tingkat Kenaikan Gaji + 1%	111.059.962	137.406.419	Salary Increase + 1%
Tingkat Kenaikan Gaji - 1%	89.856.188	104.922.443	Salary Increase - 1%

28. Pinjaman Program PEN

28. PEN Program Loan

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pokok Pinjaman (Catatan 41)	3.500.000.000	3.500.000.000	Principal of Loan (Note 41)
Penyesuaian Nilai Wajar	(572.443.093)	(590.105.644)	Fair Value Adjustment
Nilai Wajar Pinjaman	2.927.556.907	2.909.894.356	Fair Value of Loan
Pendapatan Hibah Ditangguhkan	572.443.093	590.105.644	Deferred Grant Income
Jumlah	<u>3.500.000.000</u>	<u>3.500.000.000</u>	Total
Jumlah Bagian Pinjaman			Total Portion of
Program PEN yang Jatuh			PEN Program
Tempo dalam Satu Tahun	<u>437.500.000</u>	<u>--</u>	Maturing within One Year
Bagian Jangka Panjang	<u>3.062.500.000</u>	<u>3.500.000.000</u>	Long Term Loans Portion

Perusahaan menandatangani perjanjian pemberian dana investasi Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam bentuk pinjaman dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional dengan Akta No. 17 tanggal 30 November 2020 yang di hadapan Pratiwi Handayani, Notaris di Jakarta. Keputusan Menteri Keuangan No. 531/KMK.06/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Penugasan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai Pelaksana Investasi Untuk Melaksanakan Investasi Pemerintah dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional serta Peraturan Menteri Keuangan No.118/PMK.06/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Investasi Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN.

The Company entered into an agreement with PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) by Deed No. 17 dated November 30, 2020 by Notary in Jakarta regarding Providing Investment Fund of the Government of Republic Indonesia in the form of loan for the National Economic Recovery Program. Minister of Finance Decree No.531/KMK.06/2020 dated November 20, 2020 concerning the Assignment to the Limited Liability Company (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur as an Investment executor to Implement Government Investment in the order of the National Economic Recovery Program and Regulation of the Minister of Finance No.118/PMK.06/2020 dated September 2, 2020, concerning Investment in the order of the National Economic Recovery Program, hereinafter referred to as the PEN Program.

28. Pinjaman Program PEN (Lanjutan)

28. PEN Program Loan (Continued)

Syarat dan ketentuan dalam perjanjian sebagai berikut:

Terms and conditions of the agreement are as follows:

Pihak yang Berkontrak : - Pihak pertama: Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai Pelaksana Investasi yang merupakan kuasa untuk dan atas nama Kementerian Republik Indonesia yang merupakan pemberi investasi dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional.
- Pihak Kedua: Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Penerima Investasi

- *First party: President Director of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) as Investor Implementer who is the power for and on behalf of the Ministry of the Republic of Indonesia which is the investor for national economic recovery program.*
- *Second party: President Director of PT Kereta Api Indonesia (Persero) as Investment Recipient.*

Tujuan kredit : Untuk mendukung likuiditas dan solvabilitas Perusahaan, khususnya digunakan untuk pembiayaan kebutuhan operasional, diantaranya yaitu:
- Pembayaran kembali fasilitas kredit modal kerja yang telah ditarik oleh Perusahaan selama masa pandemi Covid-19.
- Pembiayaan kebutuhan modal kerja Perusahaan yang meliputi; bahan bakar, pegawai, perawatan sarana dan prasarana dan beban operasional Perusahaan.

To support the liquidity and solvency of the Company, it is used especially to operating expenditure, including:

- *Repayment of working capital credit facilities that were withdrawn by the Company during the Covid-19 pandemic.*
- *Financing the working capital needs of the Company, which includes; fuel, personnel, maintenance of facilities and infrastructure and operational expenses for the Company.*

Limit Kredit Rp3.500.000.000

Rp3,500,000,000

Credit Limit

Jatuh Tempo : 31 Oktober 2030

October 31, 2030

Due Date

Tingkat Bunga : - Periode pinjaman s.d 31 Desember 2027 sebesar Periode Repo rate dikurangi 100Bps per tahun;

- *Loan period up to December 31, 2027 is the Repo rate less 100Bps per annum;*

Interest Rate

- Periode pinjaman sejak 1 Januari 2028 hingga jatuh tempo sebesar Reference Rate setara SUN tenor 3 tahun dikurangi 100Bps per tahun.

- *Loan period starts January 1, 2028 until due date at the Reference Rate equivalent to the 3 years tenor SUN less 100Bps per annum.*

28. Pinjaman Program PEN (Lanjutan)

28. PEN Program Loan (Continued)

<p>Pembayaran Pinjaman :</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan wajib membayar angsuran pada setiap tanggal pembayaran angsuran kredit; - Pembayaran pinjaman dilakukan ke rekening pembayaran pada pukul 11.00 WIB setiap tanggal pembayaran angsuran dalam mata uang Rupiah; - Jika perusahaan tidak memenuhi <i>Key Achievement Indicator</i> keuangan pembayaran pokok, maka debitur tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran dalam jadwal; - Perusahaan setuju dan mengakui kreditur memiliki hak opsi untuk meminta seluruh atau sebagian pinjaman dibayarkan dengan konversi menjadi saham baru (opsi konversi). 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>The Company is required to pay installments on each credit installment payment date;</i> - <i>Loan payments are made to the payment account at 11.00 AM on each installment payment date in Rupiah;</i> - <i>If the company does not meet the Key Achievement Indicator for principal installment payments on schedule;</i> - <i>The Company agrees and acknowledges that the creditor has the option to request that all or part of the loan be paid by conversion to new shares (conversion option).</i> 	<p style="text-align: right;">: Loan Payment</p>
<p>Pernyataan dan Jaminan :</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan tunduk pada hukum yang berlaku dan setiap harta tidak mendapat kekebalan hukum; - Semua dokumen dan data keterangan yang diserahkan kepada kreditur harus lengkap, tepat, benar dan akurat; - Semua saham yang dikeluarkan oleh perusahaan telah disetor penuh oleh para pemegang sahamnya dan sedang tidak dijaminkan; - Perusahaan bertanggung jawab senantiasa menjaga dan memelihara usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>The Company is subject to the applicable law and every asset does not receive legal immunity;</i> - <i>All documents and information submitted to creditors must be complete, precise, correct, and accurate;</i> - <i>All shares issued by the company have been fully paid-up by the shareholders and are not being pledged as collateral;</i> - <i>The Company is responsible to keep and maintaining the business.</i> 	<p style="text-align: right;">: Representations and Warranties</p>
<p>Batasan Penggunaan Dana :</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Public Service Obligation (PSO);</i> - <i>Infrastructure Maintenance and Operation (IMO);</i> - Kereta perintis yang dijalankan oleh KAI. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Public Service Obligation (PSO);</i> - <i>Infrastructure Maintenance and Operation (IMO);</i> - <i>Train in Trailblazer Route run by KAI.</i> 	<p style="text-align: right;">: Limit of the use of Funds</p>

28. Pinjaman Program PEN (Lanjutan)

28. PEN Program Loan (Continued)

Ketentuan Bunga	: - Perusahaan wajib membayar bunga atas Pinjaman sebesar Suku Bunga pada setiap Tanggal Pembayaran Bunga; - Perusahaan tidak diwajibkan untuk membayar bunga atas Pinjaman pada Tanggal Pembayaran Bunga terkait, dalam hal, pada saat Tanggal Pembayaran Bunga tersebut Perusahaan tidak memenuhi Indikator Keuangan Pembayaran Bunga.	- <i>The Company is required to pay interest on the Loan at the Interest Rate on each Interest Payment Date;</i>	: <i>Interest Provision</i>
Opsi Konversi	: - Pembayaran Pinjaman Melalui Konversi Pinjaman Menjadi Saham; - Perusahaan setuju dan mengakui bahwa Pemberi Investasi memiliki hak opsi untuk meminta seluruh atau sebagian pinjaman dibayarkan dengan cara mengkonversi pinjaman tersebut menjadi saham-saham baru dalam permodalan Perusahaan ("Opsi Konversi") baik pada saat Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman, setelah terjadinya Kejadian Kelalaian, atau pada waktu lainnya sebagaimana ditentukan oleh Pemberi Investasi. Untuk menghindari keraguan, konversi hanya dapat dilakukan terhadap pokok pinjaman dan tidak terhadap bunga yang masih terhutang atas pinjaman; - Perusahaan juga dapat mengajukan usulan kepada Pemberi Investasi agar Pinjaman dikonversi menjadi Saham Hasil Konversi dengan ketentuan hak atau diskresi untuk melaksanakan Opsi Konversi tetap berada pada Pemberi Investasi;	- <i>Loan Payment through Conversion of Loans into Shares;</i> - <i>The Company agrees and acknowledges that the Investor has the option right to ask all or part of the loan to be paid by converting the loan into new shares in the Company's capital ("Conversion Option") both on the Loan Maturity Date, after the occurrence of Negligence, or at other times as determined by the Investor. For the avoidance of doubt, conversion can only be made to the principal of the loan and not to the interest still payable on the loan;</i> - <i>The Company may also submit a proposal to the Investor so that the Loan is converted into Convertible Shares provided that the right or discretion to exercise the Conversion Option remains with the Investor;</i>	: <i>Conversion Option</i>

28. Pinjaman Program PEN (Lanjutan)

28. PEN Program Loan (Continued)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Untuk pengajuan usulan pelaksanaan Opsi Konversi, Perusahaan wajib menyampaikan usulan pelaksanaan Opsi Konversi melalui surat tertulis dalam bentuk Usulan Pelaksanaan Opsi Konversi; - Usulan Pelaksanaan Opsi Konversi disampaikan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman kepada Pemberi Investasi disertai dengan alasan dan dokumen pendukung diusulkannya konversi atas Pinjaman. | <ul style="list-style-type: none"> - For the submission of a proposal for the implementation of the Conversion Option, the Company is obliged to submit a proposal for the implementation of the Conversion Option by means of a written letter in the form as Proposed Implementation of the Conversion Option; - The proposal to implement the Conversion Option is submitted not later than 2 (two) years before the Loan Maturity Date to the Investor, along with the reasons and supporting documents for the proposed conversion of the Loan. |
| <p>Denda :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak akan ada bunga atau denda atas keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman; - Pembayaran Pokok pinjaman dapat melalui konversi pinjaman "Opsi Konversi" menjadi Saham, hanya untuk pokok yang terhutang saja. Penyampaian untuk opsi konversi menjadi saham dapat disampaikan paling lambat 2 tahun sebelum jatuh tempo. | <p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - There will be no interest or penalty for late payment of loan installments; - Payment of loan principal can be done by converting the loan "Conversion Option" into shares, only for the principal outstanding. Submission of the conversion option to shares can be submitted no later than 2 years before maturity. |

Mutasi atas liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Movement of the liability are as follow:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo awal	3.500.000.000	3.500.000.000	<i>Beginning Balance</i>
Pencairan Tahun Berjalan	--	--	<i>Drawdown for Current Year</i>
Pembayaran Tahun Berjalan	--	--	<i>Payment for Current Year</i>
Saldo Akhir	<u>3.500.000.000</u>	<u>3.500.000.000</u>	<i>Ending Balance</i>
Pembayaran Bunga	<u>88.715.278</u>	<u>14.583.333</u>	<i>Interest Expense Payment</i>

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

29. Pinjaman Jangka Panjang

29. Long-Term Loans

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pihak Berelasi (Catatan 41)	11.855.551.877	10.779.296.195	Related Parties (Note 41)
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Bank Central Asia Tbk	3.187.005.145	2.939.959.037	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.020.370.749	1.606.521.251	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank KEB Hana Indonesia	465.046.975	369.787.500	PT Bank KEB Hana Indonesia
PT Bank DKI	465.046.975	369.787.500	PT Bank DKI
PT Bank Mega Tbk	465.046.975	369.787.500	PT Bank Mega Tbk
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	286.151.843	--	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
Export-Import Bank of United States	277.446.558	409.939.099	Export-Import Bank of United States
PT Bank Shinhan	232.523.488	184.893.750	PT Bank Shinhan
PT BPD Sumatera Utara	225.399.833	36.978.750	PT BPD Sumatera Utara
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd	--	369.787.500	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd
Sub Jumlah	7.624.038.541	6.657.441.887	Sub Total
Jumlah	19.479.590.418	17.436.738.082	Total
Bagian Pinjaman Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun			Current Portion of Long-Term Loans Maturing
Pihak Berelasi (Catatan 41)	805.012.927	609.910.535	Related Parties (Note 41)
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Bank Central Asia Tbk	217.450.982	166.803.390	PT Bank Central Asia Tbk
Export-Import Bank of United States	174.494.692	158.277.645	Export-Import Bank of United States
Jumlah Bagian Pinjaman Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	1.196.958.601	934.991.570	Total Current Portion of Long Term Loans
Bagian Jangka Panjang	18.282.631.817	16.501.746.512	Long Term Loans Portion
Berdasarkan mata uang:			Based on currencies:
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Berdasarkan Mata Uang:			By Currencies:
Rupiah	19.202.143.860	17.026.798.983	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	277.446.558	409.939.099	United States Dollar
Jumlah Pinjaman Jangka Panjang	19.479.590.418	17.436.738.082	Total Long Term Loans Portion
Bagian Pinjaman Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun			Current Portion of Long-Term Loans Maturing
Rupiah	1.022.463.909	776.713.925	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	174.494.692	158.277.645	United States Dollar
Jumlah Bagian Pinjaman Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	1.196.958.601	934.991.570	Total Current Portion of Long Term Loans
Rupiah	18.179.679.951	16.250.085.058	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	102.951.866	251.661.454	United States Dollar
Bagian Jangka Panjang	18.282.631.817	16.501.746.512	Long-Term Loans Portion

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

29. Pinjaman Jangka Panjang (Lanjutan)

29. Long-Term Loans (Continued)

Informasi lain mengenai Pinjaman Bank Jangka Panjang pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Other Information about Long-Term Bank Loans as of December 31, 2022 as follow:

Kreditur/ Creditor	Nama Fasilitas/ Facility Name	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit/ Maturity Date Of Credit Agreement	Suku Bunga Per Tahun/ Interest rate per annum	Agunan/ Collateral	Financial Covenant
Perusahaan/The Company					
Pinjaman Sindikasi Proyek Pengadaan 144 unit lokomotif, 1.200 unit gerbong (KKBW) dan 1.200 unit gerbong (PPCW) Syndicated Loan Project Procurement of 144 units of locomotives, 1,200 units of carriages (KKBW) and 1,200 units of carriages (PPCW)					
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	Tahap I : 25 Juli 2025/ July 25, 2025 Tahap II : 8 Agustus 2026/ August 8, 2026	6,05% - 11,12%	Asset sarana yang dibiayai / Funded facility assets	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	Tahap I : 25 Juli 2025/ July 25, 2025 Tahap II : 8 Agustus 2026/ August 8, 2026	6,05% - 11,12%	Asset sarana yang dibiayai / Funded facility assets	Cash Flow Operation positif Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif
Proyek Pengadaan 10 Set KRL Komuter Jabodetabek/ Procurement Project for 10 Sets of Jabodetabek Commuter KRL					
Kementerian Keuangan	Term Loan II Berulang/ Revolving	01 Desember 2047/ December 01, 2047	7,50% - 8,38%	-	-
Proyek Pengadaan 600 KKBW, 600 PPCW dan 1.213 KKBW/ Procurement Project of 600 KKBW, 600 PPCW and 1,213 KKBW					
PT Bank Central Asia Tbk	Term Loan II Berulang/ Revolving	Tahap I & II : 25 September 2026/ September 25, 2026 Tahap III : 4 Maret 2028/ March 4, 2028	6,00% - 10,26%	Asset sarana yang dibiayai / Funded facility assets	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x
Pinjaman Sindikasi Commuterline (Jabodetabek) Commuterline Syndicated Loan (Jabodetabek)					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	Tahap I : 10 Mei 2028/ May 10, 2028 Tahap II : 25 Juni 2029/ Juny 25, 2029	3,00% - 11,66%	Gadai Rekening dan Fidusia atas Tagihan / Pawn account and fiduciary on bills	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	Tahap I : 10 Mei 2028/ May 10, 2028 Tahap II : 25 Juni 2029/ Juny 25, 2029	3,00% - 11,66%	Gadai Rekening dan Fidusia atas Tagihan / Pawn account and fiduciary on bills	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	Tahap I : 10 Mei 2028/ May 10, 2028 Tahap II : 25 Juni 2029/ Juny 25, 2029	3,00% - 11,66%	Gadai Rekening dan Fidusia atas Tagihan / Pawn account and fiduciary on bills	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif
PT Bank Central Asia Tbk	Sindikasi/ Syndicated	Tahap I : 10 Mei 2028/ May 10, 2028 Tahap II : 25 Juni 2029/ Juny 25, 2029	3,00% - 11,66%	Gadai Rekening dan Fidusia atas Tagihan / Pawn account and fiduciary on bills	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif
Proyek Pengadaan 50 Lokomotif General Electric/ Procurement Project for 50 General Electric Locomotives					
Export-Import Bank of United States	Term Loan II Berulang/ Revolving	Tarikan I : 15 Maret 2024/ May 15, 2024 Tarikan II : 15 Juni 2024/ Juny 15, 2024 Tarikan II : 15 Maret 2025/ May 15, 2025	2,54%	Asset sarana yang dibiayai / Funded facility assets	-
Perjanjian Sindikasi Bandara Soekarno Hatta (Basoetta) Soekarno Hatta Airport (Basoetta) Syndication Agreement					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	31 Oktober 2030/ October 31, 2030	6,75% - 11,69%	Gadai Rekening dan Fidusia atas Tagihan / Pawn account and fiduciary on bills	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	31 Oktober 2030/ October 31, 2030	6,75% - 11,69%	Gadai Rekening dan Fidusia atas Tagihan / Pawn account and fiduciary on bills	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	31 Oktober 2030/ October 31, 2030	6,75% - 11,69%	Gadai Rekening dan Fidusia atas Tagihan / Pawn account and fiduciary on bills	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif
PT Bank Central Asia Tbk	Sindikasi/ Syndicated	31 Oktober 2030/ October 31, 2030	6,75% - 11,69%	Gadai Rekening dan Fidusia atas Tagihan / Pawn account and fiduciary on bills	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

29. Pinjaman Jangka Panjang (Lanjutan)

29. Long-Term Loans (Continued)

Kreditur/ Creditor	Nama Fasilitas/ Facility Name	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit/ Maturity Date Of Credit Agreement	Suku Bunga Per Tahun/ Interest rate per annum	Agunan/ Collateral	Financial Covenant
Perjanjian Pinjaman Sindikasi Proyek Light Rail Transit (LRT)/ Light Rail Transit (LRT) Project Syndicated Loan Agreement					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for arantina credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for arantina credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for arantina credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Bank Central Asia Tbk	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for arantina credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for arantina credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for arantina credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for arantina credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Bank Shinhan Indonesia	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for arantina credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Bank KEB Hana Indonesia	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for arantina credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Bank DKI	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for arantina credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for arantina credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Bank Mega Tbk	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for arantina credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT BPD Sumatera Utara	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for arantina credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

29. Pinjaman Jangka Panjang (Lanjutan)

29. Long-Term Loans (Continued)

Kreditur/ Creditor	Nama Fasilitas/ Facility Name	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit/ Maturity Date Of Credit Agreement	Suku Bunga Per Tahun/ Interest rate per annum	Agunan/ Collateral	Financial Covenant
Perusahaan/The Company					
Pinjaman Transaksi Khusus/ Special Transaction Loans					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	26 Desember 2026/ December 26, 2026	7,25% - 10,15%	Negative Pledge	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x
Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor	Sindikasi/ Syndicated	26 Desember 2026/ December 26, 2026	7,25% - 10,15%	Negative Pledge	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Sindikasi/ Syndicated	26 Desember 2026/ December 26, 2026	7,25% - 10,15%	Negative Pledge	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Kereta Commuter Indonesia					
Proyek Pengembangan Commuterline Jabodetabek/ Jabodetabek Commuterline Development Project					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	19 Januari 2031/ January 19, 2031	4,00% - 7,00%	-Fiduciary of movable assets - Fiduciary on bills - Fiduciary over bank accounts	Debt to Equity Ratio Max 300% Current Ratio min 100%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	19 Januari 2031/ January 19, 2031	4,00% - 7,00%	-Fiduciary of movable assets - Fiduciary on bills - Fiduciary over bank accounts	Debt to Equity Ratio Max 300% Current Ratio min 100%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	19 Januari 2031/ January 19, 2031	4,00% - 7,00%	-Fiduciary of movable assets - Fiduciary on bills - Fiduciary over bank accounts	Debt to Equity Ratio Max 300% Current Ratio min 100%
PT Bank Central Asia Tbk	Sindikasi/ Syndicated	19 Januari 2031/ January 19, 2031	4,00% - 7,00%	-Fiduciary of movable assets - Fiduciary on bills - Fiduciary over bank accounts	Debt to Equity Ratio Max 300% Current Ratio min 100%
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Kereta Commuter Indonesia					
Proyek Pengadaan 10 Unit Rangkaian Kereta/ Procurement Project for 10 Train Series Units					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	25 Desember 2027/ December 25, 2027	6,75%	Sarana KRL/ rolling stock KRL	Debt to Equity Ratio Max 300% Current Ratio min 100%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	25 Desember 2027/ December 25, 2027	6,75%	Sarana KRL/ rolling stock KRL	Debt to Equity Ratio Max 300% Current Ratio min 100%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	25 Desember 2027/ December 25, 2027	6,75%	Sarana KRL/ rolling stock KRL	Debt to Equity Ratio Max 300% Current Ratio min 100%
PT Bank Central Asia Tbk	Sindikasi/ Syndicated	25 Desember 2027/ December 25, 2027	6,75%	Sarana KRL/ rolling stock KRL	Debt to Equity Ratio Max 300% Current Ratio min 100%
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT KA Properti Manajemen					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Tidak Berulang / Non Revolving	9 Maret 2027 / March 9, 2027	7,51%	- Tagihan dan pendapatan dari proyek AFC yang akan diikat fidusia/ Bills and revenues from the AFC project that will pay the - Omzet kontrak yang akan diikat cession/ Contract turnover that will pay cession - Rekening penerimaan kontrak yang akan diikat dengan pengikatan gadai/ Account acceptance of the contract to be taken with the binding of the pledge	Debt to Equity Ratio Max 2.00 Debt Service Coverage Ratio min 1.25

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

29. Pinjaman Jangka Panjang (Lanjutan)

29. Long-Term Loans (Continued)

Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup telah memenuhi syarat dan *financial covenant* pinjaman.

As of December 31, 2022, the Group has complied with the terms and *financial covenant* of the loans.

Mutasi atas saldo fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Movement of the balance of this facilities are as follow:

	2022					
Kreditur/ Creditor	Saldo Awal/ Beginning Balance	Pencairan/ Drawdown	Pembayaran/ Payment	Non Kas/ Non-Cash	Saldo Akhir/ Ending Balance	Beban Bunga/ Interest Expense
Perusahaan/The Company						
Pinjaman Sindikasi Proyek Pengadaan 144 unit lokomotif, 1.200 unit gerbong (KKBW) dan 1.200 unit gerbong (PPCW)						
<i>Procurement of 144 units of locomotive, 1,200 units of the wagon (KKBW) and 1,200 units of wagon (PPCW)</i>						
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	727.577.481	--	(142.050.000)	--	585.527.481	42.173.103
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	727.577.481	--	(142.050.000)	--	585.527.481	42.173.103
Proyek Pengadaan 10 Set KRL Commuter Jabodetabek/						
<i>Procurement of 10 set KRL Jabodetabek Commuter Railways Project</i>						
Kementerian Keuangan	25.462.663	--	(1.018.507)	--	24.444.156	1.828.925
Proyek Pengadaan 600 KKBW, 600 PPCW dan 1.213 KKBW/						
<i>Procurement of 600 KKBW, 600 PPCW and 1,213 PPCW Project</i>						
PT Bank Central Asia Tbk	698.502.071	--	(100.432.685)	--	598.069.386	41.798.323
Pinjaman Sindikasi Commuterline (Jabodetabek)/						
<i>Syndicated Loan Agreement of Commuterline (Jabodetabek)</i>						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	133.070.254	--	(14.991.878)	--	118.078.376	9.059.480
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	133.070.254	--	(14.991.878)	--	118.078.376	9.059.480
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	132.386.023	--	(14.914.792)	--	117.471.231	9.012.897
PT Bank Central Asia Tbk	133.070.254	--	(14.991.878)	--	118.078.376	9.059.480
Proyek Pengadaan 50 Lokomotif General Electric/						
<i>Procurement of 50 General Electric Locomotives Piroject</i>						
Export-Import Bank of United States	409.939.099	--	(164.791.663)	32.299.122	277.446.558	8.498.874
Perjanjian Sindikasi Bandara Soekarno Hatta (Basoetta)/						
<i>Syndicated Loan Agreement os Soekarno Hatta Aripport (Basoetta)</i>						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	304.639.532	--	(26.111.960)	--	278.527.572	20.889.874
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	304.639.532	--	(26.111.960)	--	278.527.572	20.889.874
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	304.639.532	--	(26.111.960)	--	278.527.572	20.889.874
PT Bank Central Asia Tbk	304.639.532	--	(26.111.960)	--	278.527.572	20.889.874
Pinjaman Transaksi Khusus/						
<i>Spesial Transaction Loan (PTK)</i>						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	364.680.000	--	(47.160.000)	--	317.520.000	28.667.637
Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor	283.640.000	--	(36.684.000)	--	246.956.000	22.296.937
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	324.160.000	--	(41.913.000)	--	282.247.000	25.482.543
Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi/						
<i>Unamortized transaction cost</i>						
	(4.009.348)	--	--	768.225	(3.241.123)	--
Perjanjian Pinjaman Sindikasi Proyek Light Rail Transit (LRT)/						
<i>Light Rail Transit (LRT) Syndicated Loan Agreement</i>						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.008.151.563	464.783.498	--	52.528.375	2.525.463.436	--
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.606.521.250	371.826.798	--	42.022.700	2.020.370.748	--
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.606.521.250	371.826.798	--	42.022.700	2.020.370.748	--
PT Bank Central Asia Tbk	1.606.521.250	371.826.798	--	42.022.700	2.020.370.748	--
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.606.521.251	371.826.798	--	42.022.700	2.020.370.749	--
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1.204.890.938	278.870.100	--	31.517.024	1.515.278.062	--
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd	369.787.500	76.174.596	--	(445.962.096)	--	--
PT Bank Shinhan Indonesia	184.893.750	42.793.365	--	4.836.373	232.523.488	--
PT Bank KEB Hana Indonesia	369.787.500	85.586.730	--	9.672.745	465.046.975	--
PT Bank DKI	369.787.500	85.586.730	--	9.672.745	465.046.975	--
PT Bank Mega Tbk	369.787.500	85.586.730	--	9.672.745	465.046.975	--
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	--	5.425.339	--	280.726.504	286.151.843	--
PT BPD Sumatera Utara	36.978.750	12.545.471	--	175.875.612	225.399.833	--
Subtotal	16.647.834.362	2.624.659.751	(840.438.121)	329.698.174	18.761.754.166	332.670.279

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

29. Pinjaman Jangka Panjang (Lanjutan)

29. Long-Term Loans (Continued)

Kreditur/ Creditor	Saldo Awal/ Beginning Balance	Pencairan/ Drawdown	Pembayaran/ Payment	Non Kas/ Non-Cash	Saldo Akhir/ Ending Balance	Beban Bunga/ Interest Expense
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Kereta Commuter Indonesia						
Proyek Pengembangan Commuterline Jabodetabek/ Jabodetabek Commuterline Development Project						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	72.350.930	--	(14.860.617)	--	57.490.313	4.803.680
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	72.350.930	--	(14.860.617)	--	57.490.313	4.803.680
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	72.350.930	--	(14.860.617)	--	57.490.313	4.803.680
PT Bank Central Asia Tbk	72.350.930	--	(14.860.617)	--	57.490.313	4.803.680
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Kereta Commuter Indonesia						
Proyek Pengadaan 10 Unit Rangkaian Kereta/ Procurement of 10 trainset units						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	--	--	114.468.750	114.468.750	--
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	--	--	114.468.750	114.468.750	--
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	--	--	114.468.750	114.468.750	--
PT Bank Central Asia Tbk	--	--	--	114.468.750	114.468.750	--
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Railink						
Proyek Pengadaan 10 Unit Rangkaian Kereta/ Procurement of 10 trainset units						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	124.875.000	--	(10.406.250)	(114.468.750)	--	8.571.663
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	124.875.000	--	(10.406.250)	(114.468.750)	--	8.571.663
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	124.875.000	--	(10.406.250)	(114.468.750)	--	8.571.663
PT Bank Central Asia Tbk	124.875.000	--	(10.406.250)	(114.468.750)	--	8.571.663
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT KA Properti Manajemen						
Pengadaan Managed Service Automatic Fare Collection (AFC) LRT Jabodebek/ Procurement Managed Service Automatic Fare Collection (AFC) LRT Jabodebek						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	30.000.000	--	--	30.000.000	1.434.513
Subtotal	788.903.720	30.000.000	(101.067.468)	--	717.836.252	54.935.886
Total	17.436.738.082	2.654.659.751	(941.505.589)	329.698.174	19.479.590.418	387.606.165

30. Utang Obligasi

30. Bonds Payable

Rincian utang obligasi adalah sebagai berikut:

The details of bonds payable are as follows:

	2022	2021	
Obligasi I Kereta			Kereta Api
Api Indonesia:			Indonesia Bond I:
Seri A	--	1.000.000.000	Seri A
Seri B	1.000.000.000	1.000.000.000	Seri B
Sub Jumlah	1.000.000.000	2.000.000.000	Sub Total
Obligasi II Kereta			Kereta Api
Api Indonesia:			Indonesia Bond II:
Seri A	900.000.000	900.000.000	Seri A
Seri B	1.100.000.000	1.100.000.000	Seri B
Sub Jumlah	2.000.000.000	2.000.000.000	Sub Total
Obligasi Berkelanjutan I Kereta			Kereta Api Indonesia
Api Indonesia Tahun 2022:			Continuing Bond I Year 2022:
Seri A	634.000.000	--	Seri A
Seri B	866.000.000	--	Seri B
Sub Jumlah	1.500.000.000	--	Sub Total
Jumlah	4.500.000.000	4.000.000.000	Total
Biaya Penerbitan Obligasi yang belum Diamortisasi	(9.239.619)	(6.752.261)	Unamortized Bond Issuance Cost
Jumlah Utang Obligasi	4.490.760.381	3.993.247.739	Total Bonds Payable

30. Utang Obligasi (Lanjutan)

30. Bonds Payable (Continued)

Bagian Utang Obligasi yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun		Portion of Obligation Maturing within One Year
Obligasi I Kereta Api Indonesia: Seri A	-- 1.000.000.000	Kereta Api Indonesia Bond I: Seri A
Biaya Penerbitan Obligasi yang belum Diamortisasi	-- (552.834)	Unamortized Bond Issuance Cost
Jumlah Bagian Obligasi yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	-- 999.447.166	Total Portion of Obligation Maturing within One Year
Utang Obligasi Bagian Jangka Panjang	4.490.760.381 2.993.800.573	Long Term Bonds Payable Portion

Jumlah pembayaran kembali untuk utang obligasi menurut tahun jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The amounts of repayments of bond payable by years of maturity are as follow:

Tahun Jatuh Tempo/ Year of Maturity	Jumlah/ Total (Rp)
2024	1.900.000.000
2026	1.100.000.000
2026	634.000.000
2029	866.000.000
Total	4.500.000.000

a. Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017

Pada tanggal 13 November 2017, Perusahaan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi I Kereta Api Indonesia tahun 2017 dengan 2 (dua) seri yaitu:

- a. Seri A senilai Rp1.000.000.000 dengan suku bunga 7,75% per tahun, akan jatuh tempo tanggal 21 November 2022.
- b. Seri B senilai Rp1.000.000.000 dengan suku bunga 8,25% per tahun, akan jatuh tempo tanggal 21 November 2024.

Total dana yang diterima Perusahaan pada tanggal 21 November 2017, dari hasil penerbitan perdana Obligasi I tahun 2017 adalah sebesar Rp2.000.000.000. Sesuai perjanjian dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dan prospektus utang obligasi Perusahaan, sekitar 55% dari dana yang diperoleh akan digunakan untuk penyelesaian proyek KA Bandara Soekarno-Hatta (Basoetta) dan sekitar 45% akan digunakan untuk pembelian kereta.

a. Kereta Api Indonesia Bonds I year 2017

On November 13, 2017, the Company has received an effective statement from Chairman of the Financial Services Authority (OJK) for the issuance of Kereta Api Indonesia Bonds I year 2017 with 2 (two) series which are as follows:

- a. A Series amounting to Rp1,000,000,000 with a fixed interest rate of 7.75% per annum. The bonds payable will mature on November 21, 2022.
- b. B Series amounting to Rp1,000,000,000 with annual interest rate of 8.25%. The bonds payable will mature on November 21, 2024.

Total funds received by the Company on November 21, 2017, from the first issuance of Bonds I year 2017 was Rp2,000,000,000. Based on the agreement with PT Bank Mega Tbk as Trustee and the Company's prospectus for bonds payable, approximately 55% of funds received will be used for Soekarno-Hatta (Basoetta) Airport Train project and approximately 45% for purchasing trains.

30. Utang Obligasi (Lanjutan)

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi I Kereta Api Indonesia mendapatkan peringkat "AAA" untuk penerbitan obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Peringkat tersebut menunjukkan kemungkinan pembayaran tepat waktu atas jumlah pokok dan bunga.

Perusahaan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode utang obligasi sebagai berikut:

- a. Perbandingan Total Pinjaman terhadap Total Ekuitas tidak lebih dari 5:1;
- b. Perbandingan Profit sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Penyusutan dan Amortisasi terhadap Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1:1.

Pada tanggal 10 Desember 2020, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) I Kereta Api Indonesia Tahun 2017. Berdasarkan Akta Berita Acara RUPO No. 411/NOT/SK/PT KAI-RUPO I/XII/2020 yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H.,M.P.A Notaris di Jakarta, RUPO diadakan dengan kuorum kehadiran para pemegang obligasi dan/atau kuasa pemegang Obligasi yang sah, seluruhnya mewakili pokok Obligasi yang bernilai Rp1.530.000.000 atau sebanyak 1.530.000.000.000 suara yang merupakan 76,50% dari jumlah pokok obligasi yang masih belum dilunasi, yang telah diterbitkan oleh Perusahaan yaitu keseluruhannya berjumlah Rp2.000.000.000 dengan hasil sebagai berikut:

- a. Menyetujui untuk mengesampingkan kewajiban keuangan yaitu memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1:1 untuk periode laporan keuangan per 31 Desember 2020 dan 2021.

30. Bonds Payable (Continued)

The bonds were offered at 100% of the principal amount. Bond interest is paid quarterly.

Kereta Api Indonesia Bonds I is rated "AAA" for the issuance of bonds by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). The rating indicates the likelihood of timely payment of principal and interest.

The Company is also required to maintain certain financial ratios during the bonds payable period as follows:

- a. *Ratio of Total Debt to Total Equity is not more than 5:1;*
- b. *Ratio of Earning Before Income Tax and Depreciation and Amortization to Interest Expenses is not less than 1:1.*

On December 10, 2020, has been held the Trustee held a General Meeting of Bondholders (GMB) I Kereta Api Indonesia in 2017. Based on the Deed of Minutes of GMB No. 411/NOT/SK/PT KAI-RUPO I/XII/2020 of Dewantari Handayani, S.H.,M.P.A a Notary in Jakarta, the GMB is held with the quorum of the bondholders and/or its legitimate representatives, all of which represented the principal Bonds worth Rp1,530,000,000 or 1,530,000,000,000 votes which constitute 76.50% of the total outstanding principal Bond of a total of Rp2,000,000,000 issued by the Company with the results as follows:

- a. *Agreed to waiver of financial obligation to maintain the ratio between EBITDA and loan interest expenses is not less than 1: 1 for the financial reporting period as of December 31, 2020 and 2021.*

30. Utang Obligasi (Lanjutan)

30. Bonds Payable (Continued)

- b. Menyetujui memberikan kuasa kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan sesuai dengan hasil RUPO.

- b. *Authorised the Trustee to amend the provisions of the Trustee Agreement in accordance with the results of the GMB.*

Pada 12 April 2022, Obligasi I Kereta Api Indonesia mendapatkan peringkat "AA+" dari PEFINDO untuk periode 11 April 2022 hingga 1 April 2023.

On of April 12, 2022, Kereta Api Indonesia Bonds I is rated "AA+" by PEFINDO for the period April 11, 2022 until April 1, 2023.

Pada tanggal 18 November 2022, Perusahaan telah melunasi Obligasi I seri A Kereta Api Indonesia Tahun 2017 sebesar Rp1.000.000.000.

On November 18, 2022, the Company has paid off Kereta Api Indonesia 2017 Bond I series A year 2017 of Rp1,000,000,000.

b. Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019

Pada tanggal 6 Desember 2019, Perusahaan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi II Kereta Api Indonesia tahun 2019 dengan 2 (dua) seri yaitu:

b. Kereta Api Indonesia Bonds II year 2019

On December 6, 2019, the Company has received an effective statement from Chairman of the Financial Services Authority (OJK) for the issuance of Kereta Api Indonesia Bonds II year 2019 with 2 (two) series which are as follows:

- a. Seri A senilai Rp900.000.000 dengan suku bunga 7,75% per tahun, akan jatuh tempo tanggal 16 Desember 2024.
b. Seri B senilai Rp1.100.000.000 dengan suku bunga 8,20% per tahun, akan jatuh tempo tanggal 16 Desember 2026.

- a. *A Series amounting to Rp900,000,000 with a fixed interest rate of 7.75% per annum, will mature on December 16, 2024.*
b. *B Series amounting to Rp1,100,000,000 with annual interest rate of 8.20% per annum, will mature on December 16, 2026.*

Total dana yang diterima Perusahaan pada tanggal 13 Desember 2019, dari hasil penerbitan perdana Obligasi II tahun 2019 adalah sebesar Rp2.000.000.000. Sesuai perjanjian dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dan prospektus utang obligasi Perusahaan, sekitar Rp1.200.000.000 akan digunakan untuk *refinancing* fasilitas pada PT Bank HSBC Indonesia dan sisanya akan digunakan untuk pengadaan/perbaikan sarana.

Total funds received by the Company on December 13, 2019, from the first issuance of Bonds II year 2019 was Rp2,000,000,000. Based on the agreement with PT Bank Mega Tbk as Trustee and the Company's prospectus for bonds payable, around Rp1,200,000,000 that will be allocate for facility refinancing by PT Bank HSBC Indonesia and the rest will be used for procurement/maintenance.

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan.

The bonds were offered at 100% of the principal amount. Bond interest is paid quarterly.

Obligasi II Kereta Api Indonesia mendapatkan peringkat "AAA" untuk penerbitan obligasi dari PEFINDO. Peringkat tersebut menunjukkan kemungkinan pembayaran tepat waktu atas jumlah pokok dan bunga.

Kereta Api Indonesia Bonds II is rated "AAA" for the issuance of bonds by PEFINDO. The rating indicates the likelihood of timely payment of principal and interest.

Perusahaan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu selama periode utang obligasi sebagai berikut:

The Company is also required to maintain certain financial ratios during the bonds payable period as follows:

- a. Perbandingan Total Pinjaman terhadap Total Ekuitas tidak lebih dari 5:1.

- a. *Ratio of Total Debt to Total Equity is not more than 5:1.*

30. Utang Obligasi (Lanjutan)

30. Bonds Payable (Continued)

- b. Perbandingan Profit sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Penyusutan dan Amortisasi terhadap Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1:1.

- b. *Ratio of Earning Before Income Tax and Depreciation and Amortization to Interest Expenses is not less than 1:1.*

Pada tanggal 10 Desember 2020, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) II Kereta Api Indonesia Tahun 2019. Berdasarkan Akta Berita Acara RUPO No. 412/NOT/SK/PT KAI-RUPO I/XII/2020 yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H.,M.P.A Notaris di Jakarta, RUPO diadakan dengan kuorum kehadiran para pemegang obligasi dan/atau kuasa pemegang Obligasi yang sah, seluruhnya mewakili pokok Obligasi yang bernilai Rp1.506.800.000 atau sebanyak 1.506.800.000.000 suara yang merupakan 75,34% dari jumlah pokok obligasi yang masih belum dilunasi, yang telah diterbitkan oleh Perusahaan yaitu keseluruhannya berjumlah Rp2.000.000.000 dengan hasil sebagai berikut:

On December 10, 2020, has been held the Trustee held a General Meeting of Bondholders (GMB) II Kereta Api Indonesia in 2019. Based on the Deed of Minutes of GMB No. 412/NOT/SK/PT KAI-RUPO I/XII/2020 of Dewantari Handayani, S.H.,M.P.A a Notary in Jakarta, the GMB is held with the quorum of the bondholders and/or its legitimate representatives, all of which represented the principal Bonds worth Rp1,506,800,000 or 1,506,800,000,000 votes which constitute 75.34% of the total outstanding principal Bond of a total of Rp2,000,000,000 issued by the Company with the results as follows:

- a. Menyetujui untuk mengesampingkan kewajiban keuangan yaitu memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1:1 untuk periode laporan keuangan per 31 Desember 2020 dan 2021.
- b. Menyetujui memberikan kuasa kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan sesuai dengan hasil RUPO.

- a. *Agreed to waiver of financial obligation to maintain the ratio between EBITDA and Loan Interest Expenses is not less than 1: 1 for the financial reporting period as of December 31, 2020 and 2021.*

- b. *Authorised the Trustee to amend the provisions of the Trustee Agreement in accordance with the results of the GMB.*

Pada 12 April 2022, Obligasi II Perusahaan mendapatkan peringkat "AA+" dari PEFINDO untuk periode 11 April 2022 hingga 1 April 2023.

As of April 12, 2022, the Company Bonds II is rated "AA+" by PEFINDO for the period April 11, 2022 until April 1, 2023.

c. Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahun 2022

Pada tanggal 29 Juli 2022, Perusahaan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia tahun 2022 dengan 2 (dua) seri yaitu:

c. Kereta Api Indonesia Continuing Bonds I year 2022

On July 29, 2022, the Company has received an effective statement from Chairman of the Financial Services Authority (OJK) for the issuance of Kereta Api Indonesia Continuing Bonds I year 2022 with 2 (two) series which are as follows:

- a. Seri A senilai Rp634.000.000 dengan suku bunga 7,10% per tahun, akan jatuh tempo tanggal 5 Agustus 2027.

- a. *A Series amounting to Rp634,000,000 with a fixed interest rate of 7.10% per annum. The bonds payable will mature on August 5, 2027.*

30. Utang Obligasi (Lanjutan)

30. Bonds Payable (Continued)

- b. Seri B senilai Rp866.000.000 dengan suku bunga 8,00% per tahun, akan jatuh tempo tanggal 5 Agustus 2029.

- b. *B Series amounting to Rp866,000,000 with annual interest rate of 8.00% per annum. The bonds payable will mature on August 5, 2029.*

Total dana yang diterima Perusahaan pada tanggal 5 Agustus 2022, dari hasil penerbitan perdana Obligasi Berkelanjutan I tahun 2022 adalah sebesar Rp1.500.000.000. Sesuai perjanjian dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dan prospektus utang obligasi Perusahaan, sekitar Rp1.000.000.000 digunakan untuk pembayaran utang pokok Kereta Api Indonesia tahun 2017 Seri A sisanya akan digunakan untuk pengembangan angkutan perkeretaapian Sumatera Bagian Selatan yang berupa prasarana perkeretaapian.

Total funds received by the Company on date August 5, 2022, the proceeds from the initial issuance of the 2022 Shelf-Registered Bonds I amounted to Rp1,500,000,000. In accordance with the agreement with PT Bank Mega Tbk as the Trustee and the prospectus of the Company's bonds payable, approximately Rp1,000,000,000 will be used for payment of the 2017 Series A Indonesian Railroad principal, the remainder will be used for the development of railway transportation in Southern Sumatra, in the form of railway infrastructure.

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan.

The bonds were offered at 100% of the principal amount. Bond interest is paid quarterly.

Obligasi Berkelanjutan I Perusahaan mendapatkan peringkat "AA+" untuk penerbitan obligasi dari PEFINDO. Peringkat tersebut menunjukkan kemungkinan pembayaran tepat waktu atas jumlah pokok dan bunga.

The Company Continuing Bonds I is rated "AA+" for the issuance of bonds by PEFINDO. The rating indicates the likelihood of timely payment of principal and interest.

Grup juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu selama periode utang obligasi sebagai berikut:

The Group is also required to maintain certain financial ratios during the bonds payable period as follows:

- a. Perbandingan total pinjaman terhadap total ekuitas tidak lebih dari 5:1;
b. Perbandingan profit sebelum beban pajak penghasilan dan penyusutan dan amortisasi terhadap beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1:1.

- a. *Ratio of total debt to total equity is not more than 5:1;*
b. *Ratio of earning before income tax and depreciation and amortization to interest expenses is not less than 1:1.*

Pada 12 April 2022, Obligasi Berkelanjutan I Perusahaan mendapatkan peringkat "AA+" dari PEFINDO untuk periode 11 April 2022 hingga 1 April 2023.

As of April 12, 2022, the Company Continuing Bonds I is rated "AA+" by PEFINDO for the period April 11, 2022 until April 1, 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dan memiliki saldo utang obligasi sebesar Rp4.500.000.000.

As of December 31, 2022, the Company has met the financial ratio requirements and has outstanding balance on this bond amounting to Rp4,500,000,000.

31. Sukuk

31. Sukuk

	2022	2021	
Sukuk Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahun 2022:			<i>Kereta Api Indonesia Continuing Sukuk I Year 2022:</i>
Seri A	117.350.000	--	<i>Seri A</i>
Seri B	382.650.000	--	<i>Seri B</i>
Jumlah	500.000.000	--	<i>Total</i>
Biaya Penerbitan Sukuk yang belum Diamortisasi	(1.692.889)	--	<i>Unamortized Sukuk Issuance Cost</i>
Jumlah Sukuk	498.307.111	--	<i>Total Sukuk</i>

Jumlah pembayaran kembali untuk sukuk menurut tahun jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The amounts of repayments of sukuk by years of maturity are as follow:

Tahun Jatuh Tempo/ Year of Maturity	Jumlah/ Total (Rp)
2027	117.350.000
2029	382.650.000
Total	500.000.000

Pada tanggal 29 Juli 2022, Perusahaan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022 dengan 2 (dua) seri yaitu:

- a. Seri A senilai Rp117.350.000 dengan dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp8.331.850 per tahun. Sukuk akan jatuh tempo tanggal 5 Agustus 2027.
- b. Seri B senilai Rp382.650.000 dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp30.612.000 per tahun. Sukuk akan jatuh tempo tanggal 5 Agustus 2029.

Total dana yang diterima Perusahaan pada tanggal 5 Agustus 2022, dari hasil penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022 adalah sebesar Rp500.000.000. Sesuai perjanjian dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dan prospektus obligasi berkelanjutan I dan sukuk ijarah berkelanjutan I Kereta Api Indonesia, sekitar 78% akan digunakan untuk pengembangan angkutan perkeretaapian Sumatera Bagian Selatan yang berupa prasarana perkeretaapian dan sisanya akan digunakan untuk pengadaan sarana KA Bandara International Adi Soemarmo yang berupa sarana *trainset KRDE*.

On July 29, 2022, the Company has received an effective statement from Chairman of the Financial Services Authority (OJK) for the issuance of Kereta Api Indonesia Continuing Sukuk Ijarah I Phase I year 2022 with 2 (two) series which are as follows:

- a. *A Series amounting to Rp117,350,000 with Ijarah's installment benefit of Rp8,331,850 per annum. Sukuk will mature on August 5, 2027.*
- b. *B Series amounting to Rp382,650,000 with Ijarah's installment benefit of Rp30,612,000 per annum. Sukuk will mature on August 5, 2029.*

Total funds received by the Company on August 5, 2022, from the first issuance of Continuing Sukuk Ijarah I year 2022 was Rp500,000,000. Based on the agreement with PT Bank Mega Tbk as Trustee and prospectus for continuing bonds I and continuing sukuk ijarah I Kereta Api Indonesia, around 78% that will be allocate for developing railway transport in Southern Sumatera in form of railway infrastucture and the rest will be used for procurement of Adi Soemarmo International Airport Train facilities in form of KRDE trainset.

31. Sukuk (Lanjutan)

Sukuk ijarah ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Perusahaan mendapatkan peringkat "AA+" atas Sukuk dari PEFINDO. Peringkat tersebut menunjukkan kemungkinan pembayaran tepat waktu atas jumlah pokok dan cicilan imbalan ijarah.

Perusahaan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu selama periode sukuk ijarah sebagai berikut:

- a. Perbandingan total pinjaman terhadap total ekuitas tidak lebih dari 5:1;
- b. Perbandingan profit sebelum beban pajak penghasilan dan penyusutan dan amortisasi terhadap beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1:1.

Pada 12 April 2022, Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Perusahaan mendapatkan peringkat "AA+" dari PEFINDO untuk periode 11 April 2022 hingga 1 April 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dan memiliki saldo sukuk sebesar Rp500.000.000.

32. Liabilitas Jangka Panjang Lainnya

Kewajiban jangka panjang lainnya merupakan dana titipan dari iuran pensiun dana tambahan dari Pemerintah Republik Indonesia dan PT Taspen (Persero) sebagai pembayaran manfaat masa lalu para karyawan eks-Pegawai Negeri Sipil. Dana titipan ini termasuk titipan dana kesehatan pegawai akan dibayarkan sesuai perjanjian dengan pihak pengelola dana. Dana titipan disimpan dalam bentuk rekening bank dan deposito. Rincian liabilitas jangka panjang lainnya sebagai berikut:

31. Sukuk (Continued)

Sukuk ijarah were offered at 100% of the principal amount. Ijarah's installment benefit paid quarterly.

The Company Continuing Sukuk Ijarah I is rated "AA+" for the issuance of Sukuk by PEFINDO. The rating indicates the likelihood of timely payment of principal and ijarah benefit.

The Company is also required to maintain certain financial ratios during the Sukuk Ijarah period as follows:

- a. Ratio of total debt to total equity is not more than 5:1;*
- b. Ratio of earning before income tax and depreciation and amortization to interest expenses is not less than 1:1.*

As of April 12, 2022, the Company Continuing Sukuk Ijarah I is rated "AA+" by PEFINDO for the period April 11, 2022 until April 1, 2023.

As of December 31, 2022, the Company has met the financial ratio requirements and has outstanding balance on this sukuk amounting to Rp500,000,000.

32. Other Long-Term Liabilities

Other long-term liabilities represent deposit funds from pension contribution and additional funds from the Government of Republic of Indonesia and PT Taspen (Persero) for payment of past benefits of ex-Civil Servant employee. This funds include employee's healthy deposit which will be paid to the fund management party based on agreement. Deposit funds are kept in the form of bank accounts and time deposits. Details of other long-term liabilities are as follows:

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

32. Liabilitas Jangka Panjang Lainnya **32. Other Long-Term Liabilities (Continued)**

	2022	2021	
Titipan Dana Iuran Pensiun			Pension Fund Deposits
Saldo Awal	88.598.426	234.194.593	Beginning Balance
Penerimaan:			Receipts:
Penerimaan Dana Iuran Pensiun	434.190.756	487.540.207	Pension Fund Receipts
Pengembangan Dana	2.104.723	2.520.554	Fund Development
Sub Jumlah	436.295.479	490.060.761	Sub Total
Pembayaran			Payments
BPJS Ketenagakerjaan	163.884.982	167.320.678	BPJS Ketenagakerjaan
PT Taspen (Persero)	113.195.726	114.716.493	PT Taspen (Persero)
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	171.418.565	353.619.757	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
Sub Jumlah	448.499.273	635.656.928	Sub Total
Saldo Akhir	76.394.632	88.598.426	Ending Balance
Titipan Dana Kesehatan Pegawai	53.402.087	49.994.432	Employee Healthy Deposits
Jumlah	129.796.719	138.592.858	Total

Kisaran suku bunga per tahun dan jangka waktu deposito berjangka adalah sebagai berikut:

Interest rates per annum and maturity period of time deposits are as follows:

	2022	2021	
Rupiah	6,00% - 12,00%	6,00% - 12,00%	Rupiah
Jangka Waktu	1 Bulan/ Months (ARO)	1 Bulan/ Months (ARO)	Maturity Period

33. Modal Saham

33. Share Capital

Berdasarkan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara melalui Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. S-1041/MBU/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 dan Akta No. 278 tanggal 31 Desember 2021 dari Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H., dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-AH-01.03-0494898 tanggal 31 Desember 2021 tentang penambahan modal yang ditempatkan dan disetor Perusahaan semula sebesar Rp12.268.743.000 menjadi sebesar Rp19.168.743.000. Modal saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Based on Statement by Minister of State - Owned Enterprises in lieu of the Company General Meeting of Shareholders of PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. S-1041/MBU/12/2021 dated December 30, 2021 and Deed No. 278 dated December 31, 2021 by Nining Puspitaningtyas, S.H., and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU-AH-01.03-049488 dated December 31, 2021 regarding the additional of issued and paid-in capital of the Company from Rp12,268,743,000 to Rp19,168,743,000. The Company's share capital as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham/ Total Shares	Jumlah Nilai Saham/ Total Share Value	Persentase Kepemilikan Saham/ Percentage of Ownership	Shareholder
Pemerintah Republik Indonesia	19.168.743	19.168.743.000	100%	The Government of Republic of Indonesia

33. Modal Saham (Lanjutan)

33. Share Capital (Continued)

Mutasi saldo modal disetor sebagai berikut:

Movement on the balance of paid-in capital is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo Awal Tahun	19.168.743.000	12.268.743.000	<i>Beginning Balance</i>
Penambahan Modal Disetor	--	6.900.000.000	<i>Additional on Paid in Capital</i>
Jumlah	<u>19.168.743.000</u>	<u>19.168.743.000</u>	Total

Penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp6.900.000.000 tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2021 yang dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana kereta api ringan terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi dan setoran modal pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia.

The additional government's capital amounted to Rp6,900,000,000 is sourced from State's Budget Year 2021 which will be used for the development of integrated light rail transit's infrastructure and rolling stock in Jakarta, Bogor, Depok and Bekasi areas and capital injection to PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia.

34. Tambahan Penyertaan Modal Negara dan Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Entitas Anak

34. Addition Of Government's Capital Investment and Difference in transactions of changes in equity of subsidiaries

a. Tambahan Penyertaan Modal Negara

a. Addition Of Government's Capital Investment

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 62 tahun 2022 tanggal 31 Desember 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia, disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia telah melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp3.200.000.000 (Catatan 53).

Based on Government Regulation of Republic of Indonesia No. 62 Year 2022 dated December 31, 2022 regarding Additional of Republic Indonesia's Capital into Share Capital of (Persero) PT Kereta Api Indonesia, it was stated that the State of Republic Indonesia had added up its capital investment to the Company's amounting to Rp3,200,000,000 (Note 53).

Penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp3.200.000.000 tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2022 yang dipergunakan untuk penyelesaian proyek Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

The additional government capital placement amounting Rp3,200,000,000 came from State's Budget Years 2022 used for the completion of the fast train project between Jakarta and Bandung.

b. Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Entitas Anak

b. Difference in transactions of changes in equity of subsidiaries

Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak merupakan dampak transaksi peralihan KA Basoetta dari Railink ke KCI.

Difference in transactions of changes in equity of subsidiaries represent the effect of the Basoetta train transition transaction from Railink to KCI.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 10 antara PT Railink dengan PT Kereta Commuter Indonesia tanggal 30 Desember 2022, telah dilakukan jual beli bisnis Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta, harga jual beli yang disepakati adalah Rp329.800.000 dengan obyek jual beli:

Based on the Deed of Sale and Purchase No. 10 between PT Railink and PT Kereta Commuter Indonesia dated 30 December 2022, a sale and purchase of the Soekarno-Hatta Airport Railway business was carried out, the agreed sales price was Rp329,800,000 with the object of sales:

34. Tambahan Penyertaan Modal Negara dan Modal Disetor (Lanjutan)

34. Addition Of Government's Capital Investment and Paid-in Capital (Continued)

1. 10 unit *train set* Kereta Rel Listrik (*Electrical Multiple Unit*);
2. 2 unit *double crane hoist*;
3. 2 unit kendaraan bermotor;
4. Peralatan kantor yang berada di kantor Railink yang berlokasi di gedung Kereta Bandara, Jl. Tanjung Karang No.1, RT.011/RW.020, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
5. *Gateway* penjualan tiket dengan *e-ticketing system* yang berada di Stasiun Manggarai, Stasiun Sudirman BNI City, Stasiun Batu Ceper, Stasiun Duri, dan Stasiun Bandara Soekarno-Hatta; dan
6. Interior *City Railway Station* yang berada di Stasiun Sudirman BNI City.

1. 10 units of electric train sets (*Electrical Multiple Units*);
2. 2 units of double crane hoists;
3. 2 units of vehicles;
4. Office equipment located at the Railink office located at the Airport Train building, Jl. Tanjung Karang No.1, RT.011/RW.020, Kebon Melati Village, Tanah Abang District, Central Jakarta City, DKI Jakarta Province;
5. Ticket sales gateway with e-ticketing system which are located at Manggarai Station, Sudirman BNI City Station, Batu Ceper Station, Duri Station, and Soekarno-Hatta Airport Station; and
6. Interior of the City Railway Station located at the Station Sudirman BNI City.

Selain aset tetap, beberapa Perjanjian Material juga dialihkan seperti:

Besides fixed assets, certain Material Agreements are also transferred such as:

1. Perjanjian Induk No. RL/DIR/PKS/028/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Perkeretaapian Bandara Soekarno-Hatta antara Perusahaan, PT AP II dan Railink;
2. Perjanjian antara Perusahaan dan Railink tentang Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian di *City Railways Station* (CRS) dan Stasiun Perhentian KA Bandara Soekarno-Hatta No. RL/DIR/PKS/022/IV/ 2018 tanggal 18 April 2018;
3. Perjanjian Kredit Sindikasi No. 05 tanggal 20 April 2015 yang telah diperbaharui dengan Akta Adendum Perjanjian Kredit Sindikasi No. 16 tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris Julius Purnawan, S.H., M.Si, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Agen Fasilitas), PT Bank Central Asia Tbk (Agen Jaminan), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Peserta) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Peserta); dan
4. Perjanjian-perjanjian lain yang dimiliki oleh Perusahaan dan dibutuhkan oleh KCI untuk atau terkait operasional KA Bandara Soekarno-Hatta.

1. The Master Agreement No. RL/DIR/PKS/028/VII/2015 dated July 7, 2015 regarding the Cooperation of the Operational of Soekarno-Hatta Airport Railway between the Company, PT AP II and Railink;
2. The agreement between the Company and Railink regarding the Operational of Railway Infrastructure in City Railways Station (CRS) and the Stop Station of Soekarno-Hatta Airport Railway No. RL/DIR/PKS/022/IV/2018 dated April 18, 2018;
3. Deed of Syndicated Credit Agreement No. 05 dated April 20, 2015 which has been amended with Deed of Addendum for Syndicated Credit Agreement No. 16 dated October 20, 2015 made by Notary Julius Purnawan, S.H., M.Si, the Company obtained syndicated loan facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Facility Agent), PT Bank Central Asia Tbk (Fiducia Agent), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Member) and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Member); and
4. Other agreement owned by the Company and needed by KCI for or related to operational of Soekarno-Hatta Airport Railway.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

34. Tambahan Penyertaan Modal Negara dan Modal Disetor (Lanjutan)

34. Addition Of Government's Capital Investment and Paid-in Capital (Continued)

Persetujuan penambahan pengoperasian pada lintas pelayanan Manggarai-Bandara Udara Soekarno-Hatta oleh KCI sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian No. KA.005/1/4/DJKA/2022, pada tanggal 29 Juli 2022.

Approval of additional operations on the Manggarai-Soekarno-Hatta Airport service route by KCI in accordance with the Decree of the Ministry of Transportation through the Director General of Railways No. KA.005/1/4/DJKA/2022, on 29 July 2022.

35. Penggunaan Laba Bersih dan Saldo Laba Perusahaan

35. Distribution of the Company's Net Profit and Retained Earnings

Saldo laba Grup pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan sebagai berikut:

The Group retained earnings as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	2022	2021*)	
Ditentukan Penggunaannya (Cadangan Wajib dan Umum)	7.694.357.800	7.694.357.800	<i>Appropriated (Statutory and General Reserve)</i>
Belum Ditentukan Penggunaannya Penyesuaian Imbalan pada Periode Jasa	(189.072.579)	(1.971.113.056)	<i>Unappropriated Adjustment of Attribution of Benefits On Service Period</i>
Jumlah	7.679.086.294	5.897.045.817	Total

*) Disajikan Kembali, Catatan 54

**) As Restated, Note 54*

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2021 dan 2020, Grup membukukan kerugian yang diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp333.428.124 dan Rp1.691.730.010 sehingga belum terdapat keputusan penggunaan laba bersih.

Based on General Meeting of Shareholders 2021 and 2020, the Group booked loss attributed to owner of the parent entity amounted to Rp333,428,124 and 1,691,730,010 so that there is no decision for distribution net profit.

36. Selisih Likuidasi

36. Difference of Liquidation

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998, Perusahaan berubah status dari Perusahaan Umum menjadi Persero terhitung mulai tanggal 1 Juni 1999.

Based on Government Regulation No. 19 of 1998, the Company changed its status from a Public Company to a Limited Company starting June 1, 1999.

Berdasarkan Laporan Auditor Independen atas Laporan Posisi Keuangan Likuidasi Perusahaan Umum Kereta Api per 31 Mei 1999 yang diaudit oleh

Based on the Independent Auditors' Report on Perusahaan Umum Kereta Api Financial Position of Liquidation as of May 31, 1999 which was audited by Representative Office of

36. Selisih Likuidasi (Lanjutan)

BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat berdasarkan Laporan No. LAP-02.02.05-12720/PW.10.5/99 tertanggal 9 November 1999, tercatat modal dan cadangan berupa sisa likuidasi sebesar Rp2.208.251.318.

Berdasarkan laporan posisi keuangan pembukaan Perusahaan per 1 Juni 1999 yang diaudit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Laporan No. LAP-02.02.05-13026/PW.10.5/1999 tertanggal 18 November 1999, sisa likuidasi sebesar Rp2.208.251.318 diperhitungkan sebagai modal yang disetor sebesar Rp2.200.000.000, sisanya sebesar Rp8.251.318 menjadi cadangan modal.

Atas cadangan modal sebesar Rp8.251.318 telah dipindah bukukan sebagai berikut:

Saldo per 1 Juni 1999	8.251.318
Dipindahkan ke saldo laba	<u>(832.180)</u>
Saldo per 31 Desember 1999	7.419.138
Dipindahkan ke BPYBDS	<u>(187.293)</u>
Saldo per 31 Desember 2000	7.231.845
Dipindahkan ke BPYBDS	<u>(6.263.710)</u>
Jumlah	<u>968.135</u>

36. Difference of Liquidation (Continued)

BPKP of West Java Province, based on Report No. LAP-02.02.05-12720/PW.10.5/99 dated November 9, 1999, it was recorded that capital and its reserves in the form of remaining balance upon liquidation amounted to Rp2,208,251,318.

Based on the Company's opening balance report as of June 1, 1999 which was audited by Representative Office of BPKP of West Java Province, based on Report No. LAP-02.02.05-13026/PW.10.5/1999 dated November 18, 1999, the remaining of liquidation value amounted to Rp2,208,251,318 was taken into account as paid up capital of Rp2,200,000,000, where the remaining of Rp8,251,318 into capital reserves.

The capital reserves amounted to Rp8,251,318 has been transferred as follows:

	Balance as of June 1, 1999
	Balance as of December 31, 1999
	Transferred to Government Equity Participation
	Balance as of December 31, 2000
	Transferred to Government Equity Participation
	Total

37. Kepentingan Nonpengendali

37. Non-Controlling Interest

Kepentingan nonpengendali atas aset bersih:

Non-controlling interests in net assets:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
PT Angkasa Pura II (Persero)	84.717.926	142.071.011	PT Angkasa Pura II (Persero)
Yayasan Pusaka	<u>7.735.980</u>	<u>6.696.196</u>	Yayasan Pusaka
Jumlah	<u>92.453.906</u>	<u>148.767.207</u>	Total

Kepentingan nonpengendali atas laba (rugi) bersih:

Net income (loss) attributable to non-controlling interests:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Yayasan Pusaka	1.532.835	1.507.804	Yayasan Pusaka
PT Angkasa Pura II (Persero)	<u>(97.584.092)</u>	<u>(64.243.374)</u>	PT Angkasa Pura II (Persero)
Jumlah	<u>(96.051.257)</u>	<u>(62.735.570)</u>	Total

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

37. Kepentingan Nonpengendali (Lanjutan)

37. Non-Controlling Interest (Continued)

Kepentingan nonpengendali atas jumlah laba (rugi) komprehensif:

Total comprehensive income (loss) attributable to non-controlling interests:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Yayasan Pusaka	1.469.296	1.499.003	Yayasan Pusaka
PT Angkasa Pura II (Persero)	(97.554.053)	(64.262.962)	PT Angkasa Pura II (Persero)
Jumlah	<u>(96.084.757)</u>	<u>(62.763.959)</u>	Total

Kepentingan nonpengendali PT Angkasa Pura II (Persero) merupakan kepentingan nonpengendali atas penyertaan saham pada Railink dengan persentase kepemilikan sebesar 40,00% pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Non-controlling interest of PT Angkasa Pura II (Persero) is a non-controlling interest of investment in Railink with the ownership of 40.00% as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

Sedangkan untuk Yayasan Pusaka merupakan kepentingan nonpengendali atas penyertaan saham pada:

Meanwhile, Yayasan Pusaka is a non-controlling interest in this following ownership:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1) PT Reska Multi Usaha | 1) PT Reska Multi Usaha |
| 2) PT Kereta Commuter Indonesia | 2) PT Kereta Commuter Indonesia |
| 3) PT KA Pariwisata | 3) PT KA Pariwisata |
| 4) PT KA Logistik | 4) PT KA Logistik |
| 5) PT KA Properti Manajemen | 5) PT KA Properti Manajemen |

38. Pendapatan Angkutan dan Usaha Lainnya

38. Transportation and Other Operating Revenues

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Angkutan Penumpang			Passenger Transportation Services
Kelas Eksekutif (Kelas 1)	3.327.981.793	1.030.348.908	Executive Class (First Class)
Kelas Bisnis (Kelas 2)	190.215.545	42.608.741	Business Class (Second Class)
Kelas Ekonomi (Kelas 3)	3.446.297.950	1.290.328.583	Economy Class (Third Class)
Sub Jumlah	<u>6.964.495.288</u>	<u>2.363.286.232</u>	Sub Total
Angkutan Barang			Goods Transportation Services
Batu Bara	8.404.397.301	6.180.811.096	Coal
Peti Kemas	422.235.968	332.870.511	Container
BBM	372.226.102	309.700.019	Fuel
Semen	270.912.109	309.975.129	Cement
Parcel/ Hantaran	213.228.156	155.232.901	Parcel/ Delivery
Perkebunan	128.083.622	111.154.024	Plantation
Lainnya	21.949.007	57.085.957	Other
Sub Jumlah	<u>9.833.032.265</u>	<u>7.456.829.637</u>	Sub Total
Pendukung Angkutan KA			Transportation Support
Prapurna dan Bongkar-Muat Service on Train dan Restorasi KA	414.245.336	399.495.915	Dooring and Loading-Unloading Service and Restaurant on Train
Angkutan KA Lainnya	144.414.578	128.511.440	Others Railway Transportation
	154.951.124	144.135.837	
Sub Jumlah	<u>713.611.038</u>	<u>672.143.192</u>	Sub Total

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

**38. Pendapatan Angkutan dan Usaha Lainnya
(Lanjutan)**

**38. Transportation and Other Operating
Revenues (Continued)**

Non-Angkutan		Non-Transportation	
Pendapatan			<i>Assets Optimization</i>
Optimalisasi Aset (Catatan 17)	630.197.305	448.525.147	<i>Income (Note 17)</i>
Pekerjaan Pihak Ketiga	541.324.100	372.359.208	<i>Third Party Services</i>
Lainnya	404.166.635	313.315.996	<i>Others</i>
Sub Jumlah	1.575.688.040	1.134.200.351	Sub Total
Kompensasi Pemerintah		Government Compensation	
Pendapatan Pelayanan Publik (PSO)	3.242.766.866	3.290.978.357	<i>Public Service Obligation (PSO)</i>
Pemeliharaan			<i>Infrastructure Maintenance</i>
Infrastruktur (IMO)	461.331.527	454.545.455	<i>Operation (IMO)</i>
Angkutan Perintis	176.146.640	157.546.896	<i>Pioneer Transportation</i>
Sub Jumlah	3.880.245.033	3.903.070.708	Sub Total
Jumlah	22.967.071.664	15.529.530.120	Total

Pendapatan jasa angkutan penumpang merupakan pendapatan dari hasil penjualan tiket perjalanan kereta api jarak jauh dan jarak dekat.

Passenger transportation services revenue represents revenue generated from ticket sales of long and short distance trains.

Pendapatan jasa angkutan barang merupakan pendapatan atas jasa angkutan barang dengan menggunakan gerbong dan peti kemas.

Freight transportation services revenue represents revenue generated from freight transportation by carriages and containers.

Pendapatan pendukung angkutan merupakan pendapatan yang diperoleh selain jasa angkutan barang dan penumpang namun masih berhubungan dengan aktivitas pengangkutan, meliputi: suplesi, bagasi, angkutan KA lainnya serta pendapatan penunjang operasional, pendapatan jasa pengangkutan lanjutan (antara stasiun kereta api dengan gudang barang), jasa terminal peti kemas dan jasa pengawalan.

Revenue of transportation supports represents revenue generated from transportation activities beside of freight and passenger transportation services, such as: suplesi, baggage, operational supports, extended transportation service (connecting between railway station and warehouse), container terminal service and safeguard service.

Pendapatan optimalisasi aset merupakan pendapatan sewa menyewa properti di dalam dan di luar stasiun.

Assets optimization income represents income generated from property leases inside and outside of the station.

Pendapatan kompensasi Pemerintah merupakan pendapatan kompensasi yang diperoleh atas pelaksanaan penugasan dari Pemerintah untuk pelayanan umum, pemeliharaan infrastruktur, serta pengembangan jalur kereta perintis.

Government compensation income represents compensation income obtained for implementation of assignments from the Government for public services, infrastructures maintenance, and pioneer railways track development.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

39. Beban Angkutan dan Usaha Lainnya

39. Transportation and Other Operating Cost

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Beban Operasi Langsung			Direct Operating Expenses
BBM dan Listrik Aliran Atas	3.039.591.426	1.572.788.915	Fuel and Flux Over Electricity
Pegawai	2.668.857.831	2.279.158.613	Employees
Perawatan Sarana	2.358.031.804	2.070.988.622	Rolling Stock Maintenance
Pendukung Operasional dan Angkutan	976.944.133	823.546.916	Operational and Railway Support
Penyusutan Sarana	798.624.008	733.695.210	Rolling Stock Depreciation
Penyusutan Fasilitas Dipo dan Balai Yasa	119.015.433	81.816.292	Depot and Balai Yasa Facilities Depreciation
Asuransi	68.799.082	54.855.135	Insurance
Bongkar Muat	36.888.692	31.986.499	Loading-Unloading
Terminal Peti Kemas	19.007.906	8.423.789	Container Terminal
Sub Jumlah	<u>10.085.760.315</u>	<u>7.657.259.991</u>	Sub Total
Beban Operasi Tidak Langsung			Indirect Operating Expenses
Pegawai	2.103.473.439	1.842.440.917	Employee
Perawatan dan Operasi Prasarana	1.313.457.894	1.107.168.767	Infrastructure Operation and Maintenance
Beban Keamanan dan Kebersihan	704.827.257	701.830.935	Security and Cleaning Expense
Beban Optimalisasi Aset (Catatan 17)	648.309.642	542.300.012	Asset Optimization Expense (Note 17)
Beban Penggunaan Prasarana (TAC)	470.828.098	340.868.433	Track Access Charge (TAC)
Penyusutan Prasarana dan Amortisasi	434.188.506	447.519.493	Infrastructure Depreciation and Amortization
Beban Stasiun	104.459.793	91.458.228	Railway Station Expense
Perawatan Prasarana Pendukung Angkutan KA	64.988.731	31.213.970	Transportation Supporting Facility Maintenance
Sub Jumlah	<u>5.844.533.360</u>	<u>5.104.800.755</u>	Sub Total
Jumlah	<u>15.930.293.675</u>	<u>12.762.060.746</u>	Total

40. Beban Usaha

40. Operating Expenses

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pegawai	2.466.173.859	1.882.682.855	Employee
Kerumahtanggaan	252.746.617	104.768.528	Household
Pemasaran	177.515.152	48.653.540	Marketing
Pendidikan dan Pelatihan	142.533.291	51.717.214	Education and Training
Penyusutan Fasilitas	129.430.614	122.039.053	Facilities Depreciation
Penurunan nilai/ (Pemulihan) Aset Tetap	102.959.281	(58.451.223)	Fixed Aset Impairment (Recovery)
Administrasi	81.671.962	69.694.425	Administration
Pajak Bumi dan Bangunan	78.113.981	73.858.785	Land and Building Tax
Rapat/ Akomodasi	74.638.524	32.373.994	Meeting/ Accommodation
Konsultan, Penelitian dan Pengembangan	62.078.041	54.173.555	Consultant, Research and Development
Inventaris	50.002.559	28.151.818	Supplies
Perjalanan Dinas	44.116.746	14.096.328	Official Travel
Asuransi	32.068.195	31.115.342	Insurance
Listrik, Air dan Telepon (Pemulihan) Penurunan Nilai Aset Keuangan	22.669.682	19.172.067	Electricity, Water and Telephone (Recovery) Impairment Financial Assets
Jumlah	<u>3.664.532.070</u>	<u>2.543.050.490</u>	Total

41. Saldo dan Sifat Transaksi dengan Pihak Berelasi

Perusahaan merupakan bagian dari suatu kelompok usaha sebagaimana dijelaskan di bawah, dalam menjalankan operasinya berhubungan dan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi. Mengenai hubungan tersebut, tidak terdapat perbedaan syarat dan kondisi atas transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga.

Sifat hubungan dengan pihak-pihak yang berelasi sebagai berikut:

- a) Pemerintahan Republik Indonesia diwakili oleh Menteri BUMN merupakan pemegang saham Perusahaan dan BUMN lain memiliki hubungan afiliasi melalui penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia.
- b) Perusahaan menempatkan dan meminjam dana pada bank-bank yang dimiliki Pemerintah dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana yang berlaku untuk nasabah pihak ketiga.
- c) Perusahaan yang menandatangani perjanjian dalam rangka usaha, dengan BUMN-BUMN lain merupakan entitas anak BUMN serta badan-badan lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang.
- d) Memiliki anggota pengurus yang sama dengan entitas anak, yaitu Direksi Perusahaan yang juga merupakan Komisaris pada entitas anak.
- e) Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Grup.

41. Balance and Nature of Transaction with Related Parties

The Company is a part of a business group as described below in performing its operations and transactions with related parties. Regarding this relationship, there are no differences in terms and conditions of transactions made with third parties.

Nature of relationship with a related parties are as follows:

- a) *The Government of Republic of Indonesia represented by the Minister of State-Owned Enterprises is the Company's shareholder and other state affiliates through a capital investment of the Government of Republic of Indonesia.*
- b) *The Company places and borrows funds from banks owned by the Government with the terms and interest rates normally applicable to third parties.*
- c) *The Company entered into business agreement with other state-owned enterprises or its subsidiaries or other authorized government's agencies.*
- d) *Has the same management member in subsidiary, as the Company's Board of Directors who are also subsidiary's Commissioners.*
- e) *The Board of Commissioners and Directors are member of the key management of the Group.*

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

41. Saldo dan Sifat Transaksi dengan Pihak Berelasi (Lanjutan)

41. Balance and Nature of Transaction with Related Parties (Continued)

Berikut adalah transaksi dengan pihak berelasi yang material:

Below are the material transactions with related parties:

Pihak Berelasi/ Related Parties	Hubungan/ Nature of Relationship	Jenis Transaksi/ Nature of Transaction
Pemerintah Republik Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Hak Konsesi atas Prasarana Kereta Api, Pemberian Pinjaman Jangka Panjang PEN, dan Perpajakan/ <i>Taxation</i>
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penerimaan Dana atas Penyelenggaraan angkutan PSO, Perintis, dan Perawatan IMO, Pembayaran Bunga, dan Pembayaran TAC/ <i>Receipts compensation for Public Service Liabilities, Pioneer Compensation and IMO, Interest Payment and TAC Payment</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan Giro, Deposito Berjangka, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Fasilitas Kredit Modal Kerja, Fasilitas Kredit Sindikasi/ <i>Placement Current Account, Time Deposit, Restricted Funds, Syndicated Loans Facility, Finance cost, Finance income and Pension Fund</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan Giro, Deposito Berjangka, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Fasilitas Kredit Modal Kerja, Fasilitas Kredit Sindikasi, Persewaan Lahan/ <i>Placement Current Account, Time Deposit, Restricted Funds, Working Capital Credit Facility, Syndicated Loans Facility, Land lease, Property lease, Finance cost, Interest income, Lease income, Pension Fund and Employee Health Fund</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan Giro, Deposito Berjangka, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Fasilitas Kredit Modal Kerja, Fasilitas Kredit Sindikasi, Persewaan Lahan, Biaya Keuangan, Asuransi Pegawai, Pendapatan Bunga, Pendapatan Sewa dan Dana Pensiun/ <i>Placement Current Account, Time Deposit, Restricted Funds, Working Capital Credit Facility, Syndicated Loans Facility, Land lease, Finance cost, Employee Insurance, Interest income, Lease income and Pension Fund</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penempatan Giro, Deposito Berjangka, Hak Konsesi atas Prasarana Kereta Api, Pemberian Pinjaman Jangka Panjang PEN, dan Perpajakan/ <i>Taxation</i>
PT BPRS Baiturridha Pusaka	Entitas Asosiasi/ <i>Associate Entity</i>	Penempatan Giro dan Deposito Berjangka/ <i>Placement Current Account and Time Deposit</i>
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penerimaan dari Jasa Angkutan dan Jasa Pendukung/ <i>Receipts from Transportation Services and Supporting Services</i>
PT Pertamina (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembelian Bahan Bakar Minyak dan Jasa Pendukungnya, Penerimaan dari Jasa Angkutan dan Sewa Lahan/ <i>Purchase of fuel and lubricants for infrastructure operations at maintenance stations and railway facilities</i>
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penerimaan dari Jasa Angkutan dan Jasa Pendukung/ <i>Receipts from Transportation Services and Supporting Services</i>
PT Industri Kereta Api (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembelian Aset Sarana, Pembelian Suku Cadang, Jasa Perawatan Sarana, Penerimaan Jasa Teknis Sarana, dan Jasa Angkutan/ <i>Purchase of Rolling Stock Assets, Spare Parts, Rolling Stock Maintenance Services, Receipts Rolling Stock Technical Services, and Transportation Services</i>
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Persewaan Lahan/ <i>Land Lease</i>
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penerimaan dari Jasa Angkutan dan Jasa Pendukung/ <i>Receipts from Transportation Services and Supporting Services</i>
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penerimaan dari Jasa Angkutan dan Jasa Pendukung/ <i>Receipts from Transportation Services and Supporting Services</i>
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Persewaan Lahan/ <i>Land Lease</i>
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Persewaan Lahan, Pembayaran Listrik Operasional dan Listrik Aliran Atas/ <i>Land lease, Payment of Operation Electricity and Flux Over Electricity</i>
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penerimaan dari Jasa Angkutan dan Jasa Pendukung/ <i>Receipts from Transportation Services and Supporting Services</i>
PT Biofarma (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penerimaan dari Persewaan Lahan/ <i>Receipts from Land Lease</i>
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kontraktor dalam Pembangunan Proyek LRT Jabodebek/ <i>Contractor for construction of Jabodebek Light Rail Transit infrastructure</i>
PT Aviast Pariwisata Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembayaran Persewaan Lahan dan Utilitas Bandara/ <i>Payment of Land Lease and Airport Utility</i>
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembayaran Jasa Konsultasi/ <i>Payment of Consultation Service</i>
PT Barata Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembelian Suku Cadang Sarana/ <i>Purchase of Spare Parts of Rolling Stock</i>
PT LEN Industri (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembelian Suku Cadang Prasarana/ <i>Purchase of Infrastructure spare parts</i>
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembayaran Tiket Pesawat/ <i>Airline Ticket Payment</i>
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Fasilitas Kredit Sindikasi dan Biaya Keuangan/ <i>Syndicated Credit Facility and Finance Cost</i>
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Fasilitas Kredit Sindikasi dan Biaya Keuangan/ <i>Syndicated Credit Facility and Finance Cost</i>
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Fasilitas Pinjaman Subordinasi dan Biaya Keuangan/ <i>Subordination Loans Facility and Finance Cost</i>
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penerimaan dari Pekerjaan Ahli Daya/ <i>Receipts from Outsourcing Employee</i>
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Asuransi Pegawai/ <i>Employee Insurance</i>
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	Ventura Bersama/ Joint Venture	Piutang Lain-lain/ Other Receivables
PT Danareksa (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembayaran Jasa Percetakan/ <i>Payment for Printing Services</i>
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembayaran Jasa Telekomunikasi/ <i>Payment for Telecommunication Services</i>
Perum PPD	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ <i>Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Penerimaan Jasa Angkutan/ <i>Receipts from Transportation Services</i>

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

41. Saldo dan Sifat Transaksi dengan Pihak Berelasi (Lanjutan)

41. Balance and Nature of Transaction with Related Parties (Continued)

	2022	2021	
<u>Bank (Catatan 6)</u>			<u>Bank (Note 6)</u>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.805.804.641	944.263.891	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.552.301.430	1.189.370.586	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.468.404.783	423.875.728	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	66.976.823	6.579.455	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT BPRS Baiturridha Pusaka	1.143.975	209.125	PT BPRS Baiturridha Pusaka
Jumlah Bank (Rupiah)	4.894.631.652	2.564.298.785	Total Bank (IDR)
% Terhadap Jumlah Aset	6,83%	4,09%	% to Total Assets
<u>Deposito (Catatan 6)</u>			<u>Time Deposits (Note 6)</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	207.310.000	173.791.668	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	80.200.000	871.200.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	55.000.000	2.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	50.000.000	50.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT BPRS Baiturridha Pusaka	6.000.000	1.000.000	PT BPRS Baiturridha Pusaka
Jumlah Deposito	398.510.000	1.097.991.668	Total Time Deposits
% Terhadap Jumlah Aset	0,56%	1,75%	% to Total Assets
<u>Dana Dibatasi Penggunaannya (Catatan 7)</u>			<u>Restricted Fund (Note 7)</u>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.219.724.534	5.471.842	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.173.167.815	2.605.416.100	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	198.001.969	133.496.503	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah Dana Dibatasi Penggunaannya	5.590.894.318	2.744.384.445	Total Restricted Fund
% Terhadap Jumlah Aset	7,81%	4,37%	% to Total Assets
<u>Piutang Usaha (Catatan 8)</u>			<u>Trade Receivables (Note 8)</u>
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) - PT Bukit Asam (Persero) Tbk	832.018.463	585.010.996	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) - PT Bukit Asam (Persero) Tbk
PT Pertamina (Persero)	44.583.938	54.068.119	PT Pertamina (Persero)
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	27.574.218	28.021.611	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Industri Kereta Api (Persero)	16.011.636	8.787.234	PT Industri Kereta Api (Persero)
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	13.382.380	13.382.380	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	9.521.422	401.336	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	3.069.913	3.619.505	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.885.589	2.670.900	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Biofarma (Persero)	1.782.455	--	PT Biofarma (Persero)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.549.691	547.012	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Pupuk Indonesia (Persero)	1.541.046	32.922	PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	1.507.915	--	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	8.851.978	14.809.595	Others (Each Under Rp1 Billion)
Jumlah Piutang Usaha	963.280.644	711.351.610	Total Trade Receivables
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(28.650.899)	(33.256.915)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah - Bersih	934.629.745	678.094.695	Total - Net
% Terhadap Jumlah Aset	1,30%	1,08%	% to Total Assets

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

41. Saldo dan Sifat Transaksi dengan Pihak Berelasi (Lanjutan)

41. Balance and Nature of Transaction with Related Parties (Continued)

	2022	2021	
Piutang Lain-lain (Catatan 9)			Other Receivable (Note 9)
Tidak Lancar			Non-Current
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) -			PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)-
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	103.700.228	103.700.228	PT Bukit Asam (Persero) Tbk
PT Pertamina (Persero)	3.808.156	3.808.156	PT Pertamina (Persero)
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	1.917.139	1.917.139	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Perum PPD	500.000	500.000	Perum PPD
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	--	930.775.672	PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia
Jumlah Piutang Lain-lain	109.925.523	1.040.701.195	Total Other Receivables
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(109.925.523)	(1.040.701.195)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah Tidak Lancar	--	--	Subtotal Non-Current
Jumlah Bersih	--	--	Total Net
% Terhadap Jumlah Aset	0,00%	0,00%	% to Total Assets

Piutang lain-lain kepada pihak berelasi merupakan piutang yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan utama Grup.

Other receivables to related parties represent receivables that are not directly related to Group's operational activities.

Piutang pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia merupakan piutang atas bunga pinjaman yang diberikan Perusahaan.

Receivable to PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia are interest of shareholder's loan that given from the Company.

Atas piutang tersebut, Perusahaan telah menerima bukti potong PPh pasal 23 sebesar Rp138.896.858 dan pelunasan atas bunga pinjaman sebesar Rp791.878.814 sehingga pada 31 Desember 2022 tidak ada lagi piutang bunga dari PSBI.

Based on Receivable, The Company has received withholding evidence income tax article 23 amounting to Rp138,896,858 and interest payment amounted to Rp791,878,814 so as of December 31, 2022 there is no interest receivables from PSBI.

	2022	2021	
Pendapatan Masih Akan Diterima (Catatan 11)			Accrued Income (Note 11)
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) -			PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) -
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	719.566.683	--	PT Bukit Asam (Persero) Tbk
Kementerian Perhubungan RI - PSO	164.662.291	250.856.413	Ministry of Transportation RI - PSO
Sub Jumlah	884.228.974	250.856.413	Sub Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(164.662.291)	(164.662.291)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah-Bersih	719.566.683	86.194.122	Total-Net
% Terhadap Jumlah Aset	1,01%	0,14%	% to Total Assets

Pada tanggal 31 Desember 2022, pendapatan masih akan diterima dari PT Bukit Asam Tbk atas tarif angkutan batu bara relasi Tanjung Enim Baru-Tarahan dan Tanjung Enim Baru-Kertapati selama tahun 2022.

As of December 31, 2022, accrued income from PT Bukit Asam Tbk for coal transportation in the Tanjung Enim Baru-Tarahan and Tanjung Enim Baru-Kertapati relations during 2022.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

41. Saldo dan Sifat Transaksi dengan Pihak Berelasi (Lanjutan)

41. Balance and Nature of Transaction with Related Parties (Continued)

Pendapatan yang masih akan diterima dari pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2021 diantaranya adalah kompensasi kewajiban pelayanan publik (PSO) yang merupakan tagihan kepada Pemerintah atas kompensasi PSO berdasarkan Perjanjian No. HK/201/1/3/DJKA/2021 dan No. KL.701/II/2/KA-2021 tanggal 15 Februari 2021 dengan perubahan terakhir addendum No. HK.201/1/24/DJKA/2021 dan No. KL.701/XII/7/KA-2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Perusahaan.

Accrued income from related parties on December 31, 2021 include compensation for public service obligations (PSO), which is a claim to the Government for PSO compensation based on Agreement No. HK/201/1/3/DJKA/2021 and No. KL.701/II/2/KA-2021 dated 15 February 2021 with the last amendment to addendum No. HK.201/1/24/DJKA/2021 and No. KL.701/XII/7/KA-2021 dated December 16, 2021 concerning the implementation of the Public Service Obligation (PSO) in the Field of Rail Transportation for Economy Class Services for the 2021 Fiscal Year between the Directorate General of Railways and Companies.

Rincian aset keuangan dari pihak berelasi sebagai berikut:

The details of Financial Assets from related parties are as follows:

	2022	2021	
Aset Keuangan			Financial Assets
(Catatan 21)			(Note 21)
Dana Pensiun Pegawai			Pension Funds
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	53.367.617	47.750.168	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	13.708.174	30.961.901	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	9.318.841	9.886.357	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Sub Jumlah	76.394.632	88.598.426	Sub Total
Dana Kesehatan Pegawai			Employee Healthy Fund
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	53.402.087	49.994.432	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah	129.796.719	138.592.858	Total
% Terhadap Jumlah Aset	0,18%	0,22%	% to Total Assets
Utang Usaha (Catatan 22)			Trade Payables (Note 22)
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	432.514.749	--	Ministry of Transportation Republic of Indonesia
PT Pertamina (Persero)	138.011.384	115.931.605	PT Pertamina (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	106.089.280	58.825.468	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT LEN Industri (Persero)	55.985.708	47.833.009	PT LEN Industri (Persero)
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	53.128.122	16.935.832	PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)
PT Industri Kereta Api (Persero)	48.897.338	116.315.605	PT Industri Kereta Api (Persero)
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	15.603.669	--	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Barata Indonesia (Persero)	10.602.695	4.612.120	PT Barata Indonesia (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	9.178.664	42.300.086	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	4.781.184	2.480.849	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.004.765	--	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	2.917.123	68.191.556	Others (Each Under Rp1 Billion)
Jumlah Utang Usaha	880.714.681	473.426.130	Total Trade Payables
% Terhadap Jumlah Liabilitas	1,05%	1,20%	% to Total Liabilities

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

41. Saldo dan Sifat Transaksi dengan Pihak Berelasi (Lanjutan)

41. Balance and Nature of Transaction with Related Parties (Continued)

**Pinjaman Jangka Pendek
(Catatan 25)**

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	500.000.000	629.962.173
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	200.000.000	--
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	60.000.000	80.000.000
Jumlah Pinjaman Jangka Pendek	760.000.000	709.962.173
% Terhadap Jumlah Liabilitas	1,78%	1,80%

**Short-Term Loans
(Note 25)**

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total Short-Term Loans

**Pinjaman Jangka Panjang
(Catatan 29)**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.441.548.447	3.007.767.279
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.174.463.240	2.969.034.447
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.173.856.095	2.968.350.216
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1.797.525.062	1.529.050.938
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	246.956.000	283.640.000
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	24.444.156	25.462.663
Biaya Transaksi yang belum Diamortisasi	(3.241.123)	(4.009.348)
Jumlah Pinjaman Jangka Panjang	11.855.551.877	10.779.296.195
% Terhadap Jumlah Liabilitas	27,89%	27,56%

**Long-Term Loans
(Note 29)**

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Ministry of Finance Republic of Indonesia
Unamortized Cost of Transaction
Total Long-Term Loans

**Pinjaman Program PEN
(Catatan 28)**

Pemerintah Republik Indonesia	3.500.000.000	3.500.000.000
% Terhadap Jumlah Liabilitas	8,25%	8,95%

**PEN Program Loan
(Note 28)**

Government of the Republic of Indonesia
% to Total Liabilities

Rincian pendapatan dari pihak berelasi sebagai berikut:

The details of revenues from related parties are as follows:

	2022	2021
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) - PT Bukit Asam (Persero) Tbk	6.671.067.104	4.850.221.016
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	3.880.245.033	3.903.070.708
PT Pertamina (Persero)	372.226.102	309.700.019
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	95.786.983	136.878.337
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	79.527.257	34.236.162
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	53.262.744	47.884.873
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	33.732.089	6.803.611
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	27.255.523	17.556.096
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	23.491.554	4.613.773
PT Industri Kereta Api (Persero)	21.918.326	28.201.339
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	11.877.300	24.497.276
PT Biofarma (Persero)	8.087.537	--
PT Pupuk Indonesia (Persero)	6.873.776	--
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	3.505.563	--
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	6.976.423	13.176.186
Jumlah Pendapatan	11.295.833.314	9.376.839.396
% Terhadap Jumlah Pendapatan	48,89%	59,96%

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) - PT Bukit Asam (Persero) Tbk
Misnistry of Transportation Republic of Indonesia
PT Pertamina (Persero)
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Industri Kereta Api (Persero)
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
PT Biofarma (Persero)
PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Others (Each Under Rp1 Billion)
Total Revenues
% to Total Revenues

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

41. Saldo dan Sifat Transaksi dengan Pihak Berelasi (Lanjutan)

41. Balance and Nature of Transaction with Related Parties (Continued)

Rincian beban dari pihak berelasi sebagai berikut:

The details of expenses from related parties are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
PT Pertamina (Persero)	2.872.860.277	1.427.723.905	PT Pertamina (Persero)
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	470.828.098	340.868.433	Ministry of Transportation Republic of Indonesia
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	372.698.607	299.009.486	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	123.091.259	83.510.327	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	120.279.637	106.767.078	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	120.196.959	164.992.905	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	114.197.821	25.028.304	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	90.029.723	93.599.664	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Industri Kereta Api (Persero)	60.831.293	40.078.283	PT Industri Kereta Api (Persero)
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	46.349.527	1.214.361	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	44.084.270	810.349	PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	22.296.937	22.751.867	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PT LEN Industri (Persero)	9.344.217	2.816.547	PT LEN Industri (Persero)
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	4.321.147	1.306.473	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
PT Barata Indonesia (Persero)	3.537.234	--	PT Barata Indonesia (Persero)
PT Danareksa (Persero)	2.040.886	--	PT Danareksa (Persero)
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	1.512.705	1.791.383	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Lain-lain (Masing-masing dibawah Rp1 Milyar)	3.952.371	5.631.490	Others Under Rp1 Billion)
Jumlah Beban	<u>4.482.452.966</u>	<u>2.617.900.855</u>	Total Expenses
% Terhadap Beban	19,33%	14,08%	% to Cost of Revenues

Kompensasi manajemen kunci:

Key management compensation:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Direksi			Directors
Imbalan Kerja Jangka Pendek	70.758.141	41.366.431	Short-Term Benefits
Imbalan Pascakerja	4.973.657	3.673.756	Post-employment Benefits
Jumlah	<u>75.731.798</u>	<u>45.040.187</u>	Total
Dewan Komisaris			Board of Commissioners
Imbalan Kerja Jangka Pendek	28.614.604	17.689.460	Short-Term Benefits
Imbalan Pascakerja	2.369.877	1.543.337	Post-employment Benefits
Jumlah	<u>30.984.481</u>	<u>19.232.797</u>	Total

42. Penghasilan Keuangan

42. Finance Income

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Jasa Giro	106.536.898	87.372.974	Interest on Current Accounts
Penyesuaian Nilai Kini PEN	17.662.552	11.134.069	PEN Present Value Adjustment
Deposito Berjangka	15.315.494	9.937.291	Time Deposits
Jumlah	<u>139.514.944</u>	<u>108.444.334</u>	Total

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

43. Beban Keuangan

43. Finance Cost

	2022	2021	
Kredit Investasi	385.003.065	411.889.005	<i>Investment Loans</i>
Obligasi	361.122.500	319.950.000	<i>Bonds</i>
Kredit Modal Kerja	103.741.014	137.842.415	<i>Working Capital Loans</i>
PEN	88.715.278	14.583.333	<i>PEN</i>
Sukuk	16.226.604	--	<i>Sukuk</i>
Penyesuaian Nilai Kini PEN	17.662.552	11.134.069	<i>PEN Present Value Adjustment</i>
Liabilitas Sewa (Catatan 20)	8.101.140	5.313.503	<i>Lease Liability (Note 20)</i>
Jumlah	980.572.153	900.712.325	Total

44. Keuntungan (Kerugian) Lain-lain - Bersih

44. Other Gains (Losses) – Net

	2022	2021	
Keuntungan Lain-lain			Other Gains
Pemulihan Cadangan			<i>Recovery Allowance for</i>
Penurunan Nilai Piutang			<i>Impairment of Interest</i>
Bunga PSBI	930.775.672	--	<i>Receivable PSBI</i>
Pendapatan PSO atas			<i>PSO Income from</i>
Penggantian TAC	142.889.592	--	<i>TAC Reimbursement</i>
Pendapatan Klaim Asuransi	58.259.725	23.363.980	<i>Insurance Claims Income</i>
Pendapatan Denda	35.930.529	34.396.746	<i>Penalty Income</i>
Keuntungan Penjualan Limbah	32.328.015	2.207.598	<i>Gains on Sales of Waste</i>
Pendapatan Non-Operasi	22.526.899	33.935.942	<i>Non-Operating Income</i>
Sub Jumlah	1.222.710.432	93.904.266	Sub Total
Kerugian Lain-lain			Other Losses
Penurunan Nilai Wajar Investasi	(930.775.672)	--	<i>Impairment of Fair Value Investment</i>
Beban Denda	(164.796.227)	(25.849.964)	<i>Penalty Expense</i>
Beban Penggantian TAC	(142.889.592)	--	<i>TAC Reimbursement Expense</i>
Beban Pajak dan			<i>Tax Expenses and</i>
Administrasi Bank	(80.018.834)	(34.233.622)	<i>Bank Administration</i>
Beban Lainnya	--	(2.889.011)	<i>Other Expense</i>
Sub Jumlah	(1.318.480.325)	(62.972.597)	Sub Total
Jumlah	(95.769.893)	30.931.669	Total

45. Laba (Rugi) Per Saham Dasar

45. Basic Earning (Loss) Per Share

	2022	2021	
Laba (Rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.782.040.477	(362.460.073)	<i>Profit (Loss) attributed to the owner's of the parent entity</i>
Rata-rata tertimbang saham beredar	19.168.743	12.287.647	<i>Weighted average number of shares</i>
Laba (Rugi) per Saham Dasar	93	(29)	Basic Earning (Loss) per share

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi dilusi saham, sehingga laba per saham dasar sama dengan laba per saham dilusi.

The Company did not have potential dilutive ordinary shares, thus basic earnings per share are the same as the dilutive earnings per share.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

46. Segmen Operasi

46. Operating Segment

Informasi menurut segmen usaha adalah sebagai berikut:

Information by business segments as follows:

	2022						
	Jasa Angkutan/ Transportation	Jasa Non Angkutan/ Non transportation	Konstruksi/ Construction	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Eliminated	Konsolidasi/ Consolidated	
Pendapatan Usaha	21.391.383.626	1.575.688.038	2.610.567.346	25.577.639.010	--	25.577.639.010	Revenues
Antar Segmen	881.656.106	2.006.026.431	--	2.887.682.537	(2.887.682.537)	--	Inter Segment
Jumlah pendapatan	22.273.039.732	3.581.714.469	2.610.567.346	28.465.321.547	(2.887.682.537)	25.577.639.010	Total Revenues
Beban Operasi	(17.523.648.358)	(2.071.177.387)	(2.610.567.346)	(22.205.393.091)	--	(22.205.393.091)	Operating Expenses
Antar Segmen	(1.832.875.857)	(1.054.806.680)	--	(2.887.682.537)	2.887.682.537	--	Inter Segment
Jumlah Beban	(19.356.524.215)	(3.125.984.067)	(2.610.567.346)	(25.093.075.628)	2.887.682.537	(22.205.393.091)	Total Expenses
Hasil Segmen	2.916.515.517	455.730.402	--	3.372.245.919	--	3.372.245.919	Segment Result
Pendapatan (Beban) yang tidak dapat Dialokasikan							Revenues (Expenses) are not Allocated
Pendapatan Keuangan						139.514.944	Finance Incomes
Beban Keuangan						(980.572.153)	Finance Cost
Bagian Rugi Bersih Ventura						(267.504.227)	Joint Venture
Selisih Kurs						42.673.710	Foreign Exchanges
Lain-lain - Neto Manfaat (Beban)						(95.769.893)	Other - Net Tax Benefit
Pajak - Neto						(524.599.080)	(Expenses) - Net
Laba setelah Pajak Penghasilan						1.685.989.220	Income after Income Taxes
Kepentingan Nonpengendali						96.051.257	Non-Controlling Interest
Laba Diatribusikan Pemilik Induk						1.782.040.477	Income Attributable to Parent Entity
Laba Komprehensif Diatribusikan Pemilik Induk						2.362.914.534	Comprehensive Income Attributable to Parent Entity
Laporan Posisi Keuangan							Statement of Financial Position
Aset Segmen	46.416.809.741	905.134.224	26.875.623.658	74.197.567.623	(2.616.337.900)	71.581.229.723	Segmented Assets
Liabilitas Segmen	29.258.185.381	418.522.863	14.342.928.979	44.019.637.223	(1.518.591.805)	42.501.045.418	Segmented Liabilities
	2021*)						
	Jasa Angkutan/ Transportation	Jasa Non Angkutan/ Non transportation	Konstruksi/ Construction	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Eliminated	Konsolidasi/ Consolidated	
Pendapatan Usaha	14.395.329.768	1.134.200.352	2.387.245.804	17.916.775.924	--	17.916.775.924	Revenues
Antar Segmen	843.714.815	1.121.736.698	--	1.965.451.513	(1.965.451.513)	--	Inter Segment
Jumlah pendapatan	15.239.044.583	2.255.937.050	2.387.245.804	19.882.227.437	(1.965.451.513)	17.916.775.924	Total Revenues
Beban Operasi	(13.474.622.480)	(1.830.488.756)	(2.387.245.804)	(17.692.357.040)	--	(17.692.357.040)	Operating Expenses
Antar Segmen	(1.562.734.591)	(402.716.922)	--	(1.965.451.513)	1.965.451.513	--	Inter Segment
Jumlah Beban	(15.037.357.071)	(2.233.205.678)	(2.387.245.804)	(19.657.808.553)	1.965.451.513	(17.692.357.040)	Total Expenses
Hasil Segmen	201.687.512	22.731.372	--	224.418.884	--	224.418.884	Segment Result
Pendapatan (Beban) yang tidak dapat Dialokasikan							Revenues (Expenses) are not Allocated
Pendapatan Keuangan						108.444.334	Finance Incomes
Beban Keuangan						(900.712.325)	Finance Cost
Bagian Rugi Bersih Ventura						(9.495.748)	Joint Venture
Selisih Kurs						(567.340)	Foreign Exchanges
Lain-lain - Neto Manfaat (Beban)						30.931.669	Other - Net Tax Benefit
Pajak - Neto						121.784.883	(Expenses) - Net
Rugi setelah Pajak Penghasilan						(425.195.643)	Loss after Income Taxes
Kepentingan Nonpengendali						62.735.570	Non-Controlling Interest
Rugi Diatribusikan Pemilik Induk						(362.460.073)	Loss Attributable to Parent Entity
Rugi Komprehensif Diatribusikan Pemilik Induk						(485.036.924)	Comprehensive Loss Attributable to Parent Entity
Laporan Posisi Keuangan							Statement of Financial Position
Aset Segmen	40.023.647.395	908.690.000	23.777.203.269	64.709.540.664	(1.993.150.743)	62.716.389.921	Segmented Assets
Liabilitas Segmen	28.080.645.019	478.778.144	11.460.520.378	40.019.943.541	(901.206.412)	39.118.737.129	Segmented Liabilities

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

47. Aset dan Liabilitas dalam Mata Uang Asing

47. Assets and Liabilities in Foreign Currencies

Aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Assets and liabilities in foreign currencies as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	2022			2021			
	Mata Uang Asing (Nilai Penuh/ Foreign Currency (Full Amount)		Rp	Mata Uang Asing (Nilai Penuh/ Foreign Currency (Full Amount)		Rp	
Aset							Assets
Kas dan Setara Kas	USD	90.024.486	1.416.175.187	USD	79.155.671	1.129.473.059	Cash and Cash Equivalents
	EUR	1.031.762	17.243.459	EUR	71.622	1.155.031	
	JPY	6.325.102	743.621	JPY	3.829.298	474.411	
Dana Dibatasi Penggunaannya	USD	10	157	USD	10	143	Restricted Funds
Piutang Usaha	USD	10.036.624	157.886.132	USD	8.298.032	118.404.703	Trade Receivables
Jumlah Aset			1.592.048.556			1.249.507.347	Total Asset
Liabilitas							Liabilities
Utang usaha	EUR	630.000	10.528.957	EUR	--	--	Trade Payables
	JPY	738.573.364	86.831.596	JPY	229.251.432	28.401.914	
	USD	--	--	USD	5.002.927	71.386.815	
Utang Jangka Panjang Jatuh Tempo 1 Tahun	USD	11.092.409	174.494.692	USD	11.092.405	158.277.645	Current Maturities of Long-Term Loans
Utang Jangka Panjang Setelah Dikurangi Jatuh Tempo 1 Tahun	USD	6.544.521	102.951.866	USD	17.636.925	251.661.454	Long-Term Loans Net Of Maturities
Jumlah Liabilitas			374.807.111			509.727.828	Total Liabilities
Jumlah Bersih			1.217.241.445			739.779.519	Total Net

Kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan dan entitas anak adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan dan entitas anak beroperasi dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

The financial risk management policies of the Company and its subsidiaries are made to ensure that adequate financial resources are available for operation and development of their business, and managing their exposure to market risks (including foreign currency risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Company and its subsidiaries operate within defined policies which approved by the Board of Directors.

Dalam pengelolaan risiko, Perusahaan membentuk Divisi Manajemen Risiko yang bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan, kerangka kerja, pedoman penerapan manajemen risiko dan infrastruktur pengelolaan risiko, serta memastikan implementasi manajemen risiko tersebut di lingkungan Perusahaan. Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Direktur Logistik dan Pengembangan.

In managing those risks, the Company established a Risk Management Division which is responsible for the preparation of the policies, the relevant frameworks, implementation guideline and the necessary risk management infrastructure to ensure the implementation of risk management in the Company's environment. The Risk Management Division is responsible to the Director of Logistic and Development.

48. Kebijakan Manajemen Risiko

48. Risk Management Policies

a. Risiko Pasar

1. Risiko mata uang asing

Risiko mata uang adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur Grup terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang piutang usaha dari penjualan dalam mata uang asing dan utang usaha dari pembelian dalam mata uang asing.

Grup menanggung risiko nilai tukar mata uang asing atas transaksi dan saldo yang didenominasi dalam mata uang selain Rupiah. Mata uang yang menimbulkan risiko ini adalah terutama Dolar AS. Risiko nilai tukar mata uang asing dikelola sebaik mungkin dengan lindung nilai alami yaitu menyeimbangkan nilai kekayaan dan kewajiban masing-masing mata uang.

Untuk mengantisipasi dan mengurangi risiko fluktuasi kurs terhadap Dolar AS, Grup mengusahakan, untuk memastikan bahwa sebagian besar pembelian dan penjualan dilakukan dalam mata uang yang sama serta dilakukan pada saat yang hampir bersamaan dan mengimplementasikan kebijakan dimana hutang dalam mata uang asing yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha dilakukan dalam mata uang yang sama (lindung nilai alami). Manajemen juga memantau untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan semaksimal mungkin.

Grup memantau secara ketat fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing, sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Grup pada waktu yang tepat.

a. Market Risk

1. Foreign currency risk

Foreign currency risk is the risk where the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group exposure to exchange rate fluctuations results primarily from short-term loans, long-term loans, trade receivable from sales in foreign currencies and trade payables from purchases in foreign currencies.

The Group incurs foreign currency risk on the transactions dan balances that are denominated in currencies other than Indonesian Rupiah. The currency giving rise to this risk is US Dollar. Foreign currency risks are managed as far as possible by natural hedges of matching assets and liabilities in foreign currency.

In order to anticipate and mitigate the risk of exchange rate fluctuation against the US Dollar, the Group seeks, to ensure that significant portion of purchases and sales are carried out in the same currency as well as matching the timing of transactions and to implement a policy whereby debts in foreign currency used to finance business activities are made in the same currency (natural hedging). The management also ensures those policies are implemented to the maximum condition.

The Group closely monitors the foreign exchange rate fluctuation, so it can take useful actions to the Group in proper time.

48. Kebijakan Manajemen Risiko (Lanjutan)

48. Risk Management Policies (Continued)

Analisis Sensitivitas untuk Risiko Mata Uang Asing

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, jika mata uang asing melemah/menguat sebesar 5% terhadap Rupiah dengan asumsi semua variabel konstan, laba sebelum pajak dalam tahun berjalan akan menjadi lebih rendah/tinggi sebesar Rp98.342.783 (31 Desember 2021: Rp36.988.976) terutama disebabkan oleh penjabaran keuntungan/ kerugian translasi kas setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha dan utang bank jangka pendek.

2. Risiko Suku Bunga
Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Eksposur Grup terhadap risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang dan utang obligasinya. Fluktuasi suku bunga memengaruhi biaya atas pinjaman baru dan bunga atas saldo pinjaman Grup yang dikenakan suku bunga mengambang.

Kebijakan Grup terkait dengan risiko suku bunga adalah sebagai berikut:

- 1) Mengelola biaya bunga melalui kombinasi utang dengan suku bunga tetap dan variabel. Grup mengevaluasi rasio suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang dari utang pinjaman dan utang obligasi sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar keuangan. Berdasarkan penilaian manajemen, pembiayaan baru akan ditentukan berdasarkan suku bunga tetap atau mengambang.
- 2) Mengelola eksposur atas tingkat suku bunga yang berasal dari utang pinjaman dan utang obligasi dengan menandatangani kontrak *swap*, tingkat suku bunga tersebut ditujukan untuk lindung nilai atas suku bunga mengambang dalam pinjaman mata uang Dolar AS.

Sensitivity Analysis for Foreign Currency Risk

As of December 31, 2022 and 2021, if the foreign currency has weakened/strengthened by 5% against Rupiah with all other variables are constant, the profit before tax for the current year will lower/higher by Rp98,342,783 (December 31, 2021; Rp36,988,976), mainly as a result of foreign exchange gain/losses on translation of cash and cash equivalent, trade receivables, other receivables, trade payables and short-term bank loans.

2. Interest Rate Risk
Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in the market interest rates. The Group exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to its short-term loans, long-term loans and bonds payable. Interest rate fluctuations influence the cost of new loans and the interest on the outstanding floating rate loans of the Group.

The Group policies related to interest rate risk are as follows:

- 1) Managing interest cost through a mix of fixed and variable rate debts. The Group evaluates the fixed to floating rate ratio of its loans and bonds payable in line with movements of relevant interest rates in the financial markets. Based on management's assessment, new financing will be priced either on a fixed or floating rate basis.
- 2) Managing the interest rate exposure from loans and bonds payable by signing the interest rate swap contracts. The contract is aimed to hedge the floating interest in US Dollar currency.

48. Kebijakan Manajemen Risiko (Lanjutan)

48. Risk Management Policies (Continued)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing lebih dari 16,78% dan 14,48% dari utang berbunga/pinjaman berbunga Grup adalah utang dengan suku bunga tetap.

As of December 31, 2022 and 2021, more than 16.78% and 14.48% respectively, of the Group interest debts/ interest loans are loans with fixed rate.

Grup menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga, di mana semua variabel lainnya dianggap tetap, terhadap laba Grup untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 (melalui dampak atas suku bunga suku bunga JIBOR untuk pinjaman dalam Rupiah).

The Group demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in interest rates, with all other variables are constant, of the Group profit for the years ended December 31, 2022 and 2021 (through the impact on the floating rate borrowings which is based on JIBOR for Rupiah borrowings).

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga untuk non derivatif pada akhir tahun pelaporan. Untuk liabilitas tingkat bunga mengambang, analisis tersebut disusun dengan asumsi jumlah liabilitas terutang pada akhir tahun pelaporan itu terutang sepanjang tahun. Kenaikan atau penurunan sebesar 0,5% digunakan ketika melaporkan risiko suku bunga secara internal kepada manajemen kunci dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.

The sensitivity analysis below has been determined based on the exposure to interest rates for non-derivative instruments at the end of the reporting year. For floating rate liabilities, the analysis is prepared by assuming the amount of the liability outstanding for the whole year 0.5 % increase or decrease is used when report the interest rate risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonable possible changes in interest rates.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 jika tingkat suku bunga atas utang bank 0,5% lebih tinggi/lebih rendah dengan asumsi semua variabel konstan, maka:

As of December 31, 2022 and 2021, if interest rates on bank loans is 0.5% higher/lower with all other variables are constant, then :

- Pada 31 Desember 2022, laba setelah pajak pada periode berjalan akan menjadi lebih rendah/tinggi sebesar Rp44.895.553.
- Pada 31 Desember 2021, (rugi) setelah pajak pada periode berjalan akan menjadi lebih tinggi/rendah sebesar (Rp53.811.015).

- *As of December 31, 2022, profit after tax for the current period would be Rp44,895,553 lower/higher.*
- *As December 31, 2021, (loss) after tax for the current period would be (Rp53,811,015) higher/lower.*

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh rekanan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual.

b. Credit Risk

Credit risk is the risk that the Group will suffer loss that come from other parties that failed to fulfill the contractual responsibility

48. Kebijakan Manajemen Risiko (Lanjutan)

48. Risk Management Policies (Continued)

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah maksimum eksposur terhadap risiko kredit adalah Rp13.742.064.270 (31 Desember 2021: Rp7.945.491.479). Risiko kredit terutama berasal dari kas dan setara kas dan dana yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, pendapatan yang masih harus diterima dan piutang lain-lain.

As of December 31, 2022 the total of maximum exposure from credit risk was Rp13,742,064,270 (31 Desember 2021: Rp7,945,491,479). Credit risk arises from cash and cash equivalents and restricted cash, trade receivables, accrue revenue and other receivables.

Semua kas di bank dan deposito berjangka ditempatkan di bank yang memiliki kualitas kredit yang baik.

All the cash in banks and time deposits are placed in bank with good credit rating.

Pada tanggal 31 Desember 2022 piutang usaha Grup tidak terkonsentrasi pada pelanggan tertentu.

On December 31, 2022, Group's accounts receivable is not concentrated on certain customer.

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk terus mengendalikan dan mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat Grup memiliki kebijakan yang jelas dalam pemilihan pelanggan, perjanjian yang mengikat secara hukum untuk transaksi serta jasa lainnya yang telah dilakukan dan secara historis mempunyai tingkat yang rendah untuk piutang yang bermasalah.

Management is confident in its ability to continue to control and maintain the minimal exposure of credit risk, considering the Group has clear policies on the selection of customers, legally binding agreements in place for sales transactions and other services rendered and historically low levels of bad debts.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas (juga dikenal risiko pendanaan) adalah risiko di mana Grup akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Grup untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

c. Liquidity Risk

Liquidity risk (also known as funding risk) is a risk where the Group would be having a difficulty in obtaining funds to fulfill its commitments associated with financial instruments. Liquidity risk may rise from the incapability of the Group to sell assets immediately at prices close to its fair value.

Risiko likuiditas muncul dalam situasi Grup kesulitan memperoleh pendanaan. Kebijakan manajemen risiko likuiditas yang berhati-hati dilakukan dengan menjaga kecukupan kas dan setara kas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan memonitor perkiraan arus kas dan arus kas aktual serta menyesuaikan profil jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan.

Liquidity risk arises in situations where the Grup struggles to obtain their financing. Risk management policy on liquidity was conducted carefully to maintain sufficient cash and cash equivalents. The Group manages liquidity risk by monitoring cash flow forecasts and actual cash flows and adjusts the maturity profile of financial assets and liabilities.

48. Kebijakan Manajemen Risiko (Lanjutan)

48. Risk Management Policies (Continued)

Tabel berikut ini memberikan rincian tanggal jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati sebagai berikut:

The following table details the Company and its subsidiaries remaining contractual maturity for its financial liabilities with agreed repayment as follow:

	2022					
	Kurang dari 1 tahun/ <i>less than 1 year</i>	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun/ <i>over 1 year up to 3 years</i>	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun/ <i>over 3 year up to 5 years</i>	Lebih dari 5 tahun/ <i>over 5 years</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Liabilitas Keuangan						Financial Liabilities
Utang Usaha	2.458.886.168	--	--	--	2.458.886.168	Trade Payables
Beban Akrua	1.572.961.926	--	--	--	1.572.961.926	Accrued Expenses
Pinjaman Jangka Pendek	1.760.000.000	--	--	--	1.760.000.000	Short-Term Loans
Utang Obligasi	--	1.897.669.952	1.729.862.225	863.228.204	4.490.760.381	Bonds Payable
Sukuk	--	--	116.958.789	381.348.322	498.307.111	Sukuk
Pinjaman Program PEN	437.500.000	875.000.000	875.000.000	1.312.500.000	3.500.000.000	PEN Program Loan
Pinjaman Jangka Panjang	1.196.958.601	2.555.130.071	940.665.213	14.786.836.533	19.479.590.418	Long-Term Loans
Jumlah	7.426.306.695	5.327.800.023	3.662.486.227	17.343.913.059	33.760.506.004	Total
	2021					
	Kurang dari 1 tahun/ <i>less than 1 year</i>	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun/ <i>over 1 year up to 3 years</i>	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun/ <i>over 3 year up to 5 years</i>	Lebih dari 5 tahun/ <i>over 5 years</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Liabilitas Keuangan						Financial Liabilities
Utang Usaha	1.666.028.990	--	--	--	1.666.028.990	Trade Payables
Beban Akrua	1.431.722.644	--	--	--	1.431.722.644	Accrued Expenses
Pinjaman Jangka Pendek	2.659.962.173	--	--	--	2.659.962.173	Short-Term Loans
Utang Obligasi	999.447.166	998.743.558	897.743.420	1.097.313.595	3.993.247.739	Bonds Payable
Pinjaman Program PEN	--	--	--	3.500.000.000	3.500.000.000	PEN Program Loan
Pinjaman Jangka Panjang	934.991.570	2.442.738.587	1.674.827.151	12.384.180.774	17.436.738.082	Long-Term Loans
Jumlah	7.692.152.543	3.441.482.145	2.572.570.571	16.981.494.369	30.687.699.628	Total

d. Pengelolaan Modal

Dalam mengelola permodalannya, Grup senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, dan untuk memberikan imbal hasil yang memadai kepada pemegang saham dengan menentukan harga produk dan jasa yang sepadan dengan tingkat risiko.

Grup menetapkan sejumlah rasio modal sesuai proporsi terhadap risiko. Grup mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari. Konsisten dengan grup lain dalam industri, Grup memonitor modal dengan dasar rasio pinjaman terhadap modal yang disesuaikan.

d. Capital Management

In managing its equity, the Group always maintains its going concern as well as maximizes the benefits for shareholders and other stakeholders, and to provide adequate returns to shareholders by considering the price of products and services that are commensurate with the level of risk.

The Group set a number of capital ratios proportion to the risk. The Group manages its capital structure and makes adjustments by considering changes in economic conditions and risk characteristic of the underlying assets. Consistently with the other group in the industries, the Group monitors the ratio of adjusted debt to equity.

48. Kebijakan Manajemen Risiko (Lanjutan)

48. Risk Management Policies (Continued)

	2022	2021	
Pinjaman			Debt
Pinjaman Bank Jangka Pendek	1.760.000.000	2.659.962.173	Short-Term Bank Loans
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun			Current Maturities of Long-Term Liabilities
Pinjaman Jangka Panjang	1.196.958.601	934.991.570	Long Term Loans
Pinjaman Program PEN	437.500.000	--	PEN Program Loan
Utang Obligasi	--	999.447.166	Bonds Payable
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun			Long-Term Liabilities - Net of Current Maturities
Pinjaman Jangka Panjang	18.282.631.817	16.501.746.512	Long-Term Loans
Pinjaman Program PEN	3.062.500.000	3.500.000.000	PEN Program Loan
Utang Obligasi	4.490.760.381	2.993.800.573	Bonds Payable
Sukuk	498.307.111	--	Sukuk
Jumlah Liabilitas	29.728.657.910	27.589.947.994	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	29.080.184.305	23.597.652.792	Total Equity
Rasio Pinjaman terhadap Ekuitas	102,23%	116,92%	Total Debt to Equity

Grup secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

The Group actively and regularly examines and manages its capital structure to ensure optimum capital returns to shareholders, by consider the efficient usage of capital by operating cash flow and capital expenditures, and consideration of capital needs in the future.

49. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

49. Fair Value of Financial Instrument

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan, beserta nilai tercatatnya, adalah sebagai berikut:

The fair values of financial assets and liabilities, together with the carrying amounts, are as follows:

	2022		2021		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan:					Financial assets:
Kas dan setara kas	5.695.720.193	5.695.720.193	3.808.203.932	3.808.203.932	Cash and cash equivalents
Dana dibatasi penggunaannya	5.610.385.976	5.610.385.976	2.748.463.918	2.748.463.918	Restricted fund
Piutang usaha	1.406.338.067	1.406.338.067	1.075.098.473	1.075.098.473	Trade receivables
Piutang lain-lain	90.003.063	90.003.063	74.670.546	74.670.546	Other receivables
Pendapatan Masih Akan Diterima	939.616.971	939.616.971	239.054.610	239.054.610	Accrued Income
Investasi Jangka Panjang	24.176.000	24.176.000	54.853.000	54.853.000	Long Term Investment
Jumlah	13.766.240.270	13.766.240.270	8.000.344.479	8.000.344.479	Total
Liabilitas keuangan:					Financial liabilities:
Utang usaha	2.458.886.168	2.458.886.168	1.666.028.990	1.666.028.990	Trade payables
Beban Akrua	1.572.961.926	1.572.961.926	1.431.722.644	1.431.722.644	Accrued expenses
Pinjaman jangka pendek	1.760.000.000	1.760.000.000	2.659.962.173	2.659.962.173	Short-term borrowings
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun	1.196.958.601	1.193.556.480	934.991.570	942.214.814	Current maturities of long-term loans
Utang Obligasi yang jatuh tempo satu tahun	--	--	999.447.166	921.416.128	Current maturities of Bonds Payable
Pinjaman Program PEN yang jatuh tempo satu tahun	437.500.000	437.500.000	--	--	Current maturities of PEN Program Loan
Utang jangka panjang: Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	18.282.631.817	18.271.820.560	16.501.746.512	16.493.900.395	Long-term debt: Long-term loans net off current maturity
Pinjaman Program PEN	3.062.500.000	2.653.951.168	3.500.000.000	3.181.740.333	PEN Program Loan
Utang Obligasi	4.490.760.381	4.633.482.471	2.993.800.573	2.970.790.377	Bonds Payable
Sukuk	498.307.111	516.209.186	--	--	Sukuk
Jumlah	33.760.506.004	33.498.367.959	30.687.699.628	30.267.775.854	Total

49. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (Lanjutan)

**49. Fair Value of Financial Instrument
(Continued)**

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai wajarnya sebagai berikut:

As of Desember 31, 2022 and 2021 the carrying amounts of financial assets and liabilities approximate their fair value as follows:

1. Kas dan setara kas, investasi jangka pendek, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha dan piutang lain-lain. Aset keuangan tersebut merupakan aset keuangan jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, sehingga nilai tercatat aset keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.
2. Piutang Lain-Lain ke PSBI diukur pada nilai wajar menggunakan pengukuran level III.
3. Utang usaha, utang lain-lain, beban akrual dan pinjaman jangka pendek. Liabilitas keuangan tersebut merupakan liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.
4. Pinjaman bank jangka panjang, termasuk bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Liabilitas keuangan tersebut merupakan pinjaman yang memiliki suku bunga variabel dan tetap yang disesuaikan dengan pergerakan suku bunga pasar sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut telah mendekati nilai wajar.
5. Nilai wajar obligasi sebesar nilai kini dari arus kas di masa datang, yang didiskontokan dengan tingkat suku bunga pasar.
6. Nilai wajar investasi jangka panjang diukur pada nilai wajar menggunakan pengukuran level III.

1. *Cash and cash equivalents, short-term investments, restricted cash, trade receivables and other receivables. That financial assets are due within 12 months, thus the carrying values of the financial assets approximate their fair values.*
2. *Others receivable to PSBI are measured at fair value using level III measurements.*
3. *Trade payables, other liabilities, accrued expenses and short-term loan. Those financial liabilities are due within 12 months, thus the carrying values of the financial liabilities approximately represent their fair values.*
4. *Long-term bank loans, including their current maturities. Those financial liabilities are liabilities with floating and fixed interest rates which are adjusted with the movements of market interest rates, so that the carrying values of the financial liabilities approximate their fair values.*
5. *The fair values of the bond payable are estimated at the present value of future cash flows, discounted at market interest rate.*
6. *The fair values of the long term investment are measured at fair value using level III measurements.*

50. Perjanjian-perjanjian Penting

50. Significant Agreements

a. Perjanjian Penyerahan Jasa Angkutan Barang

Grup menandatangani perjanjian penyerahan jasa angkutan barang dengan beberapa perusahaan lain dengan ikhtisar sebagai berikut:

a. Freight Service Delivery Agreements

The Group has entered into an agreement for cargo delivery services with several other companies with a summary as follows:

50. Perjanjian-perjanjian Penting (Lanjutan)

50. Significant Agreements (Continued)

**1. PT Indonesia Asahan Aluminium
(Persero) – PT Bukit Asam (Persero)
Tbk**

a) Perjanjian angkutan jangka panjang pengangkutan batu bara Sumatra Selatan rute Tanjung Enim Baru-Tarahan dan Tanjung Enim Baru-Kertapati, diatur dalam perjanjian No. 049/PKP/EKS-0500/HK.03/2009 dan No. 337/HK/D6/2009 tanggal 12 Oktober 2009. Beberapa hal penting yang diatur adalah sebagai berikut:

- Perjanjian berlaku mulai 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2029.
- Para pihak menyusun target volume angkutan bulanan paling lambat 3 bulan sebelum tahun berjalan mengacu pada Rencana Angkutan Tahunan.
- Jumlah volume batu bara yang diangkut untuk relasi Tanjung Enim Baru-Tarahan sebanyak 20.000.000 ton/tahun. Sedangkan untuk relasi Tanjungenim-Kertapati sebanyak 2.700.000 ton/tahun.

b) Pengangkutan batu bara rute Tanjung Enim Baru-Tarahan dan Tanjung Enim Baru-Kertapati, diatur dalam Perjanjian No. 027/PJJ/EKS-0100/HK.03/2017 dan No. KL.701/VI/19/KA-2017 tertanggal 09 Juni 2017. hal penting yang diatur adalah sebagai berikut:

- Perjanjian berlaku mulai 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2021.
- Para pihak menyusun target volume angkutan bulanan paling lambat 3 bulan sebelum tahun berjalan mengacu pada Rencana Angkutan Tahunan.

**1. PT Indonesia Asahan Aluminium
(Persero) – PT Bukit Asam (Persero)
Tbk**

a) Long-term coal transportation agreement in South Sumatra Tanjung Enim Baru-Tarahan and Tanjung Enim Baru-Kertapati routes, as set in the agreement No. 049/PKP/EKS-0500/HK.03/2009 and No. 337/HK/D6/2009 dated October 12, 2009. Some important matters that were agreed are as follows:

- The agreement is started from January 1, 2010 until December 31, 2029.
- All parties prepare transportation volume target at least 3 months before current year according to the Annual Transportation Plan.
- Total volume of coal transported for Tanjung Enim Baru-Tarahan route is 20,000,000 tons/year. While for Tanjungenim-Kertapati route is 2,700,000 tons/year.

b) Coal transportation for Tanjung Enim Baru-Tarahan and Tanjung Enim Baru-Kertapati routes, as set in the Agreement No. 027/PJJ/EKS-0100/HK.03/2017 and No. KL.701/VI/19/KA-2017 dated June 9, 2017. Some important matters that were agreed are as follows:

- The Agreement is started from January 1, 2017 until December 31, 2021.
- Both parties prepare transportation volume target at least 3 months before next calendar year according to the Annual Transportation Plan.

50. Perjanjian-perjanjian Penting (Lanjutan)

50. Significant Agreements (Continued)

- Berdasarkan perjanjian No. KL.701/VI/19/KA-2017 tanggal 9 Juni 2017 untuk tahun 2021 tarif angkutan batu bara relasi Tanjung Enim baru-Tarahan sebesar Rp511 (Rupiah penuh)/ton km dan relasi Tanjung Enim baru-Kertapati sebesar Rp680 (Rupiah penuh)/ton km belum termasuk PPN, namun sudah termasuk beban investasi pengembangan sebesar Rp25 (Rupiah penuh)/ton/kilometer.
- c) Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan No. KL.707/X/25/KA-2022 tanggal 31 Oktober 2022 antara Perusahaan dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (Para Pihak) menyatakan bahwa Para Pihak sepakat pelaksanaan angkutan batu bara tetap dijalankan untuk periode 1 November 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- 2. PT Pertamina (Persero) – PT Pertamina Patra Niaga**
Perjanjian ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2021 dengan No. KTR-008/PNA000000/2021-S0, No. KTR-185/PNE000000/2021-S0 dan No. KL.705/XI/4/KA-2021 yang merupakan Perjanjian Novasi atas perjanjian No. SP-003/R00000/2020-S0 dan No. KL.701/IV/1/KA-2020 tanggal 1 April 2020 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- Perjanjian berlaku surut mulai 1 Oktober 2015 sampai dengan 1 April 2025. Terhitung sejak tanggal 1 September 2021, PT Pertamina melakukan pengalihan hak dan kewajiban kepada PT Pertamina Patra Niaga.

- Based on agreement No. KL.701/VI/19/KA-2017 dated June 9, 2017 applied for 2021 the freight rates coal for Tanjung Enim Baru-Tarahan relation amounting to Rp511 (full amount)/ton kilometers and Tanjung Enim Baru-Kertapati relation amounting to Rp680 (full amount)/ton kilometers, those tariffs excludes VAT, but includes the cost of investment for development amounted to Rp25 (full amount)/ton/kilometers.
- c) Based on the Minutes of Agreement No. KL.707/X/25/KA-2022 dated October 31, 2022 between the Company and PT Bukit Asam (Persero) Tbk (the Parties) stated that the Parties agreed that the implementation of coal transportation would continue for period November 1, 2022 until Desember 31, 2022.
- 2. PT Pertamina (Persero) – PT Pertamina Patra Niaga**
The agreement was signed on December 28, 2021 with agreement No. KTR-008/PNA000000/2021-S0, No. KTR-185/PNE000000/2021-S0 and No. KL.705/XI/4/KA-2021 which is Novation Agreement on No SP-003/R00000/2020-S0 and No. KL.701/IV/1/KA-2020 agreement dated April 1, 2020 with the terms and conditions as follows:
- The agreement is valid retrospectively from October 1, 2015 until April 1, 2025. Since September 1, 2021, PT Pertamina transfer rights and obligation to PT Pertamina Patra Niaga.

50. Perjanjian-perjanjian Penting (Lanjutan)

50. Significant Agreements (Continued)

- Jasa yang diperjanjikan adalah pengangkutan bahan bakar minyak (meliputi premium, minyak tanah, solar, minyak diesel dan minyak bakar) dan bahan bakar minyak khusus (meliputi avtur, avgas, super TT, premix dan bensin biru) dengan menggunakan gerbong ketel.
- Jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Khusus (BBK) yang diangkut ditetapkan dalam rencana tahunan yang dikemudian dijabarkan secara definitif dalam rencana bulanan dan disetujui oleh kedua belah pihak.
- Tarif keseluruhan ditetapkan sebesar Rp694.40 KL/KM untuk semua jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) dan bahan Bakar khusus (BBK) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Apabila terdapat klaim atas susut atau kerusakan mutu BBM/BBK yang diangkut akan diterbitkan, nota debet tagihan dan tagihan selanjutnya akan diperhitungkan serta dipotong dari tarif keseluruhan.

3. PT Bara Alam Utama

Perjanjian kerja sama tentang angkutan batu bara dari Sukacinta ke Kertapati No. HK.221/XII/19/KA-2012 dan No. 001/BAU-KAI/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012 dan diadendum IV dengan Perjanjian No. KL.701/XI/12/KA-2021 tanggal 17 November 2021.

Beberapa hal penting yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah:

- Perjanjian berlaku mulai 14 Desember 2012 sampai dengan 13 Desember 2032.
- Setiap penambahan pengangkutan sebesar 1 juta MT/tahun, penyewa harus menyerahkan uang Jaminan sebesar Rp125.000.000, jika sepakat untuk menambah target volume angkutan maka harus memberikan:

- *Services included transportation for fuels (such as premium, kerosene, diesel fuel, diesel oil and fuel oil) and special fuels (such as aviation fuel, avgas, Super TT, premix and petrol blue) by using a kettle train.*
- *The amount of transported fuel oils and special fuel oils is determined in a yearly plan which subsequently detailed a monthly definitive plan and approved by both parties.*
- *The tariff is determined at Rp694,40 KL/KM for all types of fuel oils and special fuel oils, excluding value-added tax (VAT).*
- *If there is a claim for loss or damage of the quality of fuel, the invoice will be issued, debit bill and further bill will be calculate and deducted all in tariff.*

3. PT Bara Alam Utama

The Agreement of Coal Transportation for Sukacinta – Kertapati relation No. HK.221/XII/19/KA-2012 and No. 001/BAU-KAI/XII/2012 dated December 14, 2012 and amendment IV with the Agreement No. KL.701/XI/12/KA-2021 dated November 17, 2021.

Some important matters that were agreed were as follow:

- *The agreement is started from December 14, 2012 untill December 13, 2032.*
- *Additions of transportation volume by 1 million MT/year, the customer should give security deposit/bond amounted to Rp125,000,000, if agreed to increase the volume target, the customer should give:*

50. Perjanjian-perjanjian Penting (Lanjutan)

50. Significant Agreements (Continued)

Target Volume Angkutan Tahunan (nilai penuh)/ Annual Transportation Target Volume (full amount)	Uang Jaminan/ Deposit Amount
500.000 – 1.500.000	Rp125.000.000
1.500.000 – 2.500.000	Rp125.000.000
2.500.000 – 3.500.000	Rp125.000.000
<ul style="list-style-type: none"> Tarif angkutan batu bara rute Sukacinta-Kertapati sebesar Rp660 (Rupiah penuh)/ ton km dan rute Sukacinta-Simpang sebesar Rp665 (Rupiah penuh)/ton km berdasarkan harga dasar BBM sebesar Rp4.814 (Rupiah penuh)/ liter. Pengembalian Uang Jaminan dilakukan selama 59 bulan sebesar Rp2.100.000 dan sisanya sebesar Rp1.100.000 dibayarkan pada bulan ke 60 atau senilai 20% dari tagihan biaya angkutan bulan berjalan apabila nilai tersebut melebihi Rp2.100.000. 	<ul style="list-style-type: none"> Coal transportation tariff for routes Sukacinta–Kertapati amounted to Rp660 (full amount)/ ton kilometer and for route Sukacinta - Simpang is Rp665 (full amount)/ton kilometer, based on fuel price at Rp4,814 (full amount)/ litre. The refund of security deposit should be made within 59 months totaling Rp2,100,000 and the remaining amounted of Rp1,100,000 be paid on the month of 60th or equivalent to the value of 20% of the transportation fee of the current month if the amount exceeds Rp2,100,000.
<p>4. PT Baramulti Sugih Sentosa Perjanjian kerja sama angkutan batu bara dari Sukacinta-Kertapati No. HK.221/IV/11/KA-2012 dan No. 075/LEG-BMSS/IV/2012 dan di Addendum VI dengan perjanjian No. KL.701/XI/1/KA-2021 tertanggal 5 November 2021.</p> <p>Beberapa hal penting yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perjanjian berlaku mulai 5 November 2021 sampai dengan 31 Desember 2037. PT Baramulti Sugih Sentosa harus menyerahkan Jaminan dalam bentuk bank garansi sebesar Rp38.333.968 untuk periode 1 November 2021–31 Desember 2022. 	<p>4. PT Baramulti Sugih Sentosa The agreement of coal transportation from Sukacinta-Kertapati No.HK.221/IV/11/KA-2012 and No.075/LEG-BMSS/IV/2012 and amendment VI with agreement KL.701/XI/1/KA-2021 and dated November 5, 2021.</p> <p>Some important matters that were agreed were as follow:</p> <ul style="list-style-type: none"> The agreement is started from November 5, 2021 untill December 31, 2037. PT Baramulti Sugih Sentosa must give bank guarantee amounted to Rp38,333,968 for period November 1, 2021–December 31,2022.

50. Perjanjian-perjanjian Penting (Lanjutan)

50. Significant Agreements (Continued)

- Berdasarkan Addendum VI No. KL.701/X/1/KA-2021 dan No. 098.B/BMSS-KAI/LEG/XI/2021 pertanggal 05 November 2021 tarif angkutan batu bara untuk relasi Sukacinta-Kertapati sebesar Rp667,50 (Rupiah penuh)/ton km, relasi Merapi-Kertapati sebesar Rp667,50 (Rupiah penuh)/ton km, relasi Sukacita-Simpang sebesar Rp672,50 (Rupiah penuh)/ton km dan relasi Merapi-Simpang sebesar Rp672,50 (Rupiah penuh)/ton km berdasarkan harga dasar BBM sebesar Rp5.941 (Rupiah penuh)/liter.

- Based on Amendment VI No. KL.701/X/1/KA-2021 and No. 098/BMSS-KAI/LEG/XI/2021 dated November 05, 2021 for relation Sukacinta-Kertapati amounted Rp667.50 (full amount)/ton kilometer, relation Merapi-Kertapati amounted Rp667.50 (full amount)/ton kilometer, relation Sukacinta-Simpang amounted Rp672.50 (full amount)/ton kilometer, and relation Merapi-Simpang amounted Rp672.50 (full amount)/ton kilometer based on fuel price at Rp5,941 (full amount)/litre.

5. PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Perjanjian kerja sama tentang angkutan *Crude Palm Oil* (CPO) ditandatangani pada tanggal 01 Februari 2022 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

5. PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

The agreement of *Crude Palm Oil* (CPO) transportation signed on February 1, 2022 with the terms and conditions as follows:

No/No	No Perjanjian / No Aggrement	Relasi / Relation	Tarif (Rp/Kg) / Fee (Rp/Kg)
1	KL.701/II/19/KA-2022	PKS Rambutan - PT INL Sei Mangkei	65,20
2	KL.701/II/20/KA-2022	PKS Aek Nabara Selatan - PT KPBN Unit Belawan	153,70
3	KL.701/II/21/KA-2022	PKS Rambutan - PT KPBN Unit Belawan	72,58
4	KL.701/II/22/KA-2022	PKS Sei Mangkei - PT KPBN Unit Belawan	110
5	KL.701/II/23/KA-2022	PKS Sei Silau - PT KPBN Unit Belawan	115
6	KL.701/II/24/KA-2022	PKS Sisumut - PT KPBN Unit Belawan	211,49

*) Nilai Penuh

*) Full Amount

Perjanjian berlaku mulai 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

The agreement is started from February 1, 2022 until December 31, 2022.

Sampai tanggal laporan, perjanjian ini masih dalam proses perpanjangan.

As of the date of reporting, this agreement is still in the process of renewal

6. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) - PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)

Perjanjian ditandatangani pada tanggal 1 Maret 2022 No.04.05/S.Perj/Pem/04/III/2022 dan No. KL.701/III/24/KA-2022 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

6. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) - PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)

The agreement was signed on March 1, 2022 No. 04.05/S.Perj/Pem/04/III/2022 and No. KL.701/III/24/KA-2022 with the terms and conditions as follows:

50. Perjanjian-perjanjian Penting (Lanjutan)

- Perjanjian berlaku mulai 1 Maret 2022 sampai 31 Desember 2022.
- Perjanjian kerja sama tentang Pengangkutan Produksi Minyak Sawit/ Crude Palm Oil (CPO) dengan menggunakan gerbong KKW ke Belawan dan Sei Mangkei.

Sampai tanggal laporan, perjanjian ini masih dalam proses perpanjangan.

7. PT Bintang Cemerlang Sentosa

Perjanjian kerja sama tentang angkutan Batu Bara dengan menggunakan gerbong datar dari Banjarsari ke Simpang ditandatangani pada tanggal 01 Agustus 2019 dengan No. KL.701/VIII/20/KA-2019 dan No. 047/DIR-BCS/VIII/2019 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Perjanjian berlaku sejak tanggal efektif pelaksanaan perjanjian dengan jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang.
- Tarif angkutan batu bara rute Banjarsari - Simpang sebesar Rp662 (Rupiah penuh)/ ton km berdasarkan harga dasar BBM sebesar Rp5.650 (Rupiah penuh)/ liter.
- PT Bintang Cemerlang Sentosa akan memberikan uang jaminan atas biaya angkutan berupa bank garansi sebesar Rp9.830.700.

50. Significant Agreements (Continued)

- *The agreement is started from March 1, 2022 until December 31, 2022.*
- *The agreement of Crude Palm Oil (CPO) transportation use wagon KKW to Belawan and Sei Mangkei.*

As of the date of reporting, this agreement is still in the process of renewal

7. PT Bintang Cemerlang Sentosa

The agreement of transport with coal use flat wagon from Banjarsari to Simpang was signed on August 01, 2019 with No. KL.701/VIII/20/KA-2019 and No. 047/DIR-BCS/VIII/2019 with the terms and conditions as follows:

- *The agreement is started from the effective date of the implement the agreement for a period of 10 years can be extended.*
- *Coal transportation tariff for routes Banjarsari - Simpang amounted to Rp662 (full amount)/ ton kilometer based on fuel price at Rp5,650 (full amount)/ litre.*
- *PT Bintang Cemerlang Sentosa will provide a security deposit for transportation cost in the form of a bank guarantee amounted to Rp9,830,700.*

50. Perjanjian-perjanjian Penting (Lanjutan)

50. Significant Agreements (Continued)

8. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk – PT Semen Padang

Perjanjian kerja sama tentang angkutan Barang dari Indarung ke Teluk Bayur ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2019 dengan No. KL.701/XII/30/KA-2019 dan No.0002149/PG.01/DP/50050629/200/12.2019 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Perjanjian berlaku mulai 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022.
- Semen Padang wajib memenuhi target minimal pengangkutan tahunan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	Target/Tahun
1	2020	119.000 Gerbong/ Wagons
2	2021	105.000 Gerbong/ Wagons
3	2022	Akan disepakati Para Pihak, dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian/ Will be agreed by the Parties, and set forth in the Addendum

- Tarif angkutan Barang rute dari Indarung-Teluk Bayur sebesar Rp520,150 (Rupiah penuh)/ Gerbong km berdasarkan harga dasar BBM sebesar Rp5.150 (Rupiah penuh)/ liter.

Sampai tanggal laporan, perjanjian ini masih dalam proses perpanjangan.

8. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk - PT Semen Padang

The agreement of Freight Transport from Indarung – Teluk Bayur was signed on December 31, 2019 with No. KL.701/XII/30/KA-2019 and No.0002149/PG.01/DP/50050629/200/12.2019 with the terms and conditions as follows:

- The agreement is started from January 1, 2020 until December 31, 2022.
- Semen Padang is required to meet the minimum annual transportation target, with the following details:

- Freight transportation tariff for routes Indarung-Teluk Bayur amounted to Rp520,150 (full amount)/ Wagon km based on fuel price at Rp5,150 (full amount)/ litre.

As of the date of reporting, this agreement is still in the process of renewal

b. Perjanjian Asuransi

1. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) - PT Asuransi Jasa Raharja Putera

Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Asuransi Jasa Raharja Putera tentang Pengadaan Asuransi Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Penumpang dan Awak Sarana Kereta Api untuk periode 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2023 dengan Perjanjian No. KL.702/III/9/KA-2021 tanggal 9 Maret 2021. Lingkup Jaminan Pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah penumpang KA, awak KA penumpang dan awak KA barang angkutan.

b. Insurance Agreement

1. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) - PT Asuransi Jasa Raharja Putera

The Company entered into an agreement with PT Asuransi Jasa Raharja Putera regarding to Procurement of Passengers and Officers Responsible Insurance for period January 1, 2021 until December 31, 2023 No. KL.702/III/9/KA-2021 dated March 9, 2021. Scope of Warranty Coverage as set in this agreement is train passengers, officers on duty, and goods.

50. Perjanjian-perjanjian Penting (Lanjutan)

50. Significant Agreements (Continued)

	<u>Rp</u>	
A. Penumpang KA		A. Train Passenger
1) Meninggal dunia	40.000	1) Death
2) Cacat tetap (maksimum)	30.000	2) Permanent disability (Maximum)
3) Biaya perawatan (maksimum)	30.000	3) Recovery costs (maximum)
4) Biaya pemakaman	2.500	4) Funeral cost
B. Awak sarana Perkeretaapian		B. Officer on Train
I. Untuk masinis dan asisten masinis		I. Machinist and machinist assistant
1) Meninggal dunia	85.000	1) Death
2) Cacat tetap (maksimum)	95.000	2) Permanent disability (maximum)
3) Biaya perawatan (maksimum)	35.000	3) Recovery costs (maximum)
4) Biaya pemakaman	5.000	4) Funeral cost
II. Kondektur, kondektur pembantu dan manajer KA		II. Conductor, conductor assistant and train manager
1) Meninggal dunia	75.000	1) Death
2) Cacat tetap (maksimum)	85.000	2) Permanent disability (maximum)
3) Biaya perawatan (maksimum)	35.000	3) Recovery costs (maximum)
4) Biaya pemakaman	5.000	4) Funeral cost
III. Teknisi KA, petugas restorasi, petugas keamanan, dan lainnya		III. Train technicians, train restaurant officers, security officers, and others
1) Meninggal dunia	65.000	1) Death
2) Cacat tetap (maksimum)	75.000	2) Permanent disability (maximum)
3) Biaya perawatan (maksimum)	35.000	3) Recovery costs (maximum)
4) Biaya pemakaman	5.000	4) Funeral cost
C. Biaya transportasi korban kereta api dari TKP		C. Transport fee for Train victims from the accident place
Per kejadian :	1.000	per accident

Kewajiban Perusahaan adalah membayar premi asuransi kepada PT Jasa Raharja Putera melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bandung.

The Company's obligation to pay insurance premium PT Jasa Raharja Putera through PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bandung Branch.

Jumlah iuran wajib yang harus dibayar Perusahaan kepada PT Jasa Raharja Putera untuk tahun 2021, 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.134.782.300, Rp2.280.407.613 dan Rp2.436.170.803 (nilai penuh).

Total mandatory contribution to be paid by the Company to PT Jasa Raharja Putera for year 2021, 2022 and 2023 amounted to Rp2,134,782,300, Rp2,280,407,613 and Rp2,436,170,803 (full amount), respectively.

50. Perjanjian-perjanjian Penting (Lanjutan)

50. Significant Agreements (Continued)

2. PT Asuransi Wahana Tata

Perusahaan telah menandatangani perpanjangan perjanjian dengan PT Asuransi Wahana Tata No. KL.702/II/18/KA-2020 dan 177/DIR/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Pengadaan Asuransi Angkutan Barang Periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022.

2. PT Asuransi Wahana Tata

The Company has entered into the addendum of agreement with PT Asuransi Wahana Tata No. KL.702/II/18/KA-2020 and 177/DIR/II/2020 on February 10, 2020 regarding Procurement of Insurance for Freight Transportation for Period January 1, 2020 until December 31, 2022.

	<u>Rp</u>	
1) Angkutan batu bara		1) Coal freight
Setiap Kejadian :	500.000	Per accident
Peti kemas per kejadian :	100.000	Container per accident
Jumlah ganti rugi periode :	6.500.000	Amount of the compensation for the period cover
pertanggungan		
2) Angkutan Non Peti kemas		2) Non - Container Goods
untuk setiap kejadian :	500.000	Per accident
Jumlah ganti rugi periode :	6.000.000	Amount of the compensation for the period cover
pertanggungan		
3) Angkutan Bahan Bakar Minyak dan CPO		3) Fuel and Crude Palm Oil Freight
Setiap kejadian :	350.000	Per Accident
Jumlah ganti rugi periode :	3.500.000	Amount of the compensation for the period cover
pertanggungan		
4) Angkutan Barang menggunakan kereta api dengan peti kemas dan multi komoditas:		4) Freight transportation by trains using containers and multi commodities:
Setiap kejadian :	450.000	Per accident
Peti kemas per kejadian :	100.000	Container per accident
Jumlah ganti rugi periode :	5.000.000	Amount of the compensation for the period cover
pertanggungan		

3. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) - PT Jasa Raharja (Persero)

Perusahaan telah menandatangani perjanjian dengan PT Jasa Raharja (Persero) tentang Asuransi Wajib Kecelakaan Penumpang Kereta Api untuk Periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 No. KL.702/II/18/KA-2022 tanggal 28 Januari 2022. Lingkup jaminan pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah penumpang sah kereta api.

Perhitungan manfaat asuransi dengan rincian sebagai berikut:

3. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) - PT Jasa Raharja (Persero)

The Company has entered into the agreement with PT Jasa Raharja (Persero) regarding to Statutory Insurance Accident for Train Passenger for period January 1, 2022 until December 31, 2026 No. KL.702/II/18/KA-2022 dated January 28, 2022. Scope of train passenger insurance coverage as set forth in this agreement is legal passenger train.

The insurance benefits calculations are follows:

50. Perjanjian-perjanjian Penting (Lanjutan)

50. Significant Agreements (Continued)

Penumpang KA	<u>Rp</u>	Passenger Train
Meninggal Dunia	50.000	Death
1) Cacat tetap (maksimum)	50.000	1) Permanent disability (maximum)
2) Biaya perawatan (maksimum)	20.000	2) Recovery costs (maximum)
3) Biaya P3K (maksimum)	1.000	3) First aid kit cost (maximum)
4) Biaya ambulans	500	4) Ambulance cost
5) Biaya pemakaman	4.000	5) Funeral cost

Kewajiban Perusahaan adalah membayar premi kepada PT Jasa Raharja (Persero) serta menyetorkan ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bandung.

The Company was obligated to pay premium to PT Jasa Raharja (Persero) and deposit it to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bandung Branch.

Jumlah iuran wajib yang harus dipungut oleh Perusahaan adalah sebesar Rp120 (Rupiah penuh) per penumpang untuk setiap kali perjalanan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026.

Total obligated of contributions that collected by Company from passenger in amount of Rp120 (full amount) for each Passenger in one trip, for period from January 1, 2022 until December 31, 2026.

4. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

Perusahaan melakukan Perjanjian dengan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia tentang Pengadaan Asuransi Kesehatan Dewan Komisaris Beserta Keluarga, Direksi beserta Keluarga dan Organ Pendukung Dewan Komisaris periode 1 Maret 2022 sampai dengan 28 Februari 2023 No. KL.702/V/5/KA-2022 tanggal 18 Mei 2022.

4. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

The Company signed an agreement with PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia regarding Procurement for Insurance of Healthcare for Board of Commissioners and Board of Directors and Family, and Board of Commissioners Support Organization for period from March 1, 2022 through February 28, 2023 No. KL.702/V/5/KA-2022 dated May 18, 2022.

Lingkup Jaminan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah Dewan Komisaris Beserta Keluarga, Direksi Beserta Keluarga dan Organ Pendukung Dewan Komisaris.

The Scope of Insurance Coverage as set in this agreement was Board of Commissioners and Family, Board of Directors and Family, and Board of Commissioners Support Organization.

Kewajiban Perusahaan adalah membayar premi kepada PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia serta menyetorkan ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ahmad Yani.

The Company was obliged to pay insurance premium to PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia and deposit them to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Ahmad Yani Branch.

Jumlah total biaya premi yang dibayarkan sebesar Rp1.536.000 termasuk biaya polis dan premi.

The insurance premium paid amounted to Rp1,536,000 including policy fee and premium.

50. Perjanjian-perjanjian Penting (Lanjutan)

50. Significant Agreements (Continued)

5. PT Asuransi Wahana Tata

Perusahaan melakukan Perjanjian dengan PT Asuransi Wahana Tata tentang Pengadaan Asuransi Aset Sarana PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. KL.702/XII/6/KA-2022 dan No. 692/DIR/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 dengan jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan 30 Oktober 2025. Lingkup Jaminan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah Aset Sarana Perusahaan dengan kondisi semua risiko properti, gempa bumi, dan terorisme dan sabotase. Premi yang telah disepakati sebesar Rp52.529.235 per periode.

Besaran klaim atas risiko sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Polis Semua Risiko Properti
 - a. Kerusakan Aset Sarana:
 - i. Pada saat operasi adalah 10% dari kerugian, atau minimal USD35,000 (nilai penuh) setiap mengalami kerugian.
 - ii. Pada saat Depo atau Balai Yasa adalah 10% dari kerugian, atau minimal USD350,000 (nilai penuh) setiap mengalami kerugian.
 - b. Gangguan Usaha
30 (tiga puluh) hari setiap kejadian
- 2) Polis Gempa Bumi
 - a. Kerusakan Aset Sarana
 - i. Pada saat operasi adalah 10% dari kerugian, atau minimal USD35,000 (nilai penuh) setiap mengalami kerugian
 - ii. Pada saat Depo atau Balai Yasa adalah 10% dari kerugian, atau minimal USD350,000 (nilai penuh) setiap mengalami kerugian.
 - b. Gangguan Usaha
30 (tiga puluh) hari setiap kejadian, termasuk gangguan usaha yang disebabkan gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran dan ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi dan atau letusan gunung berapi, dan tsunami.

5. PT Asuransi Wahana Tata

The Company signed an agreement with PT Asuransi Wahana Tata regarding Procurement for Insurance on Means of Transportation Assets of PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. KL.702/XII/6/KA-2022 and No. 692/DIR/XII/2022 dated December 5, 2022 with the term of the agreement was effective from October 30, 2022 through October 30, 2025. The Scope of Insurance Coverage as set forth in this agreement was means of Transportation Assets of The Company for property all risks, earthquake, terrorism and sabotage. Premiums agreed amounted to Rp52,529,235.

The amount of claims as follows:

- 1) Property All Risks Policy
 - a. Transportation Assets Damage:
 - i. When operating is 10% of loss, or USD35,000 (full amount) in minimum for each loss occurred.
 - ii. When in depot or Workshop is 10% of loss, or USD350,000 (full amount) in minimum for each loss occurred.
 - b. Business Interruption
30 (thirty) days per incident
- 2) Earthquake Policy
 - a. Transportation Assets Damage
 - i. When operating is 10% of loss, or USD35,000 (full amount) in minimum for each loss occurred.
 - ii. While in depot or Workshop is 10% of loss, or USD350,000 (full amount) in minimum for each loss occurred.
 - b. Business Interruption
30 (thirty) days per incident includes business interruption caused by earthquake, volcano eruption, fire and explosion which followed by earthquake and/or volcano eruption, and tsunami.

50. Perjanjian-perjanjian Penting (Lanjutan)

50. Significant Agreements (Continued)

- 3) Polis terorisme dan sabotase
- a. Kerusakan aset sarana sebesar USD250,000 (nilai penuh) setiap mengalami kerugian.
 - b. Gangguan usaha selama 30 hari setiap mengalami kerugian

Kewajiban Perusahaan adalah membayar premi kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) serta menyetorkan ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Wisma Tugu.

- 6. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) - PT Asuransi Jiwa IFG (Life)**
Perusahaan melakukan Perjanjian dengan PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) tentang Pengelolaan Program Asuransi JS Pendanaan Hari Tua Bagi Pegawai Perusahaan. Berdasarkan perjanjian No. KL.705/VI/10/KA-2021 dan No. 00056/SJ/T/HKM/0621 tanggal 2 Juni 2021 terhitung sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 30 April 2026, PT Asuransi Jiwasraya melakukan pengalihan polis asuransi kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

Premi asuransi untuk program JHT dikelola secara *Individual Account* dan *Pooledfund Account* ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dana awal pada saat awal mulai berlakunya asuransi sebesar Rp1.578.127.345.410 (nilai penuh)
- b. Dana lanjutan berupa premi berkala bulanan sebesar 17,25% dari gaji dasar asuransi tiap bulan berjalan yang terdiri dari:
 - luran tertanggung/peserta sebesar 4,75% dari gaji dasar asuransi tiap bulan berjalan; dan
 - luran Perusahaan sebesar 12,5% dari gaji dasar asuransi tiap bulan berjalan.

- 3) *Terrorism and sabotage policy*
- a. *Transportation Assets Damage of USD250,000 (full amount) for each loss occurred.*
 - b. *Business Interruption for 30 days of each loss occurrence.*

The Company is obliged to pay insurance premiums to PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) and deposit them to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – Jakarta Wisma Tugu Branch.

- 6. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) - PT Asuransi Jiwa IFG (Life)**
The Company signed an agreement with PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) regarding management of the JS Insurance program for old age funding for employee the Company. Based on Agreement No. KL.705/VI/10/KA-2021 and No. 00056/SJ/T/HKM/0621 dated June 2, 2021 as of May 1, 2021 through April 30, 2026, PT Asuransi Jiwasraya transferred the insurance policy to PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

Insurance premium for JHT program managed with Individual Account and Pooledfund Account set as follows:

- a. *The initial fund at the start of the insurance is Rp1,578,127,345,410 (full amount)*
- b. *Continuation funds in the form of monthly periodic premiums is 17,25% from insurance basic salary each current month consisting of:*
 - *The contribution of the insured/participant is 4.75% of the basic insurance salary each month; and*
 - *The Company contribution is 12.5% of the basic insurance salary each month.*

50. Perjanjian-perjanjian Penting (Lanjutan)

50. Significant Agreements (Continued)

Premi asuransi untuk program pascakerja dikelola secara *pooled fund account* ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dana awal pada saat awal mulai berlakunya asuransi sebesar Rp223.601.601.551 (nilai penuh); dan
- b. Dana lanjutan berupa premi berkala tahunan yang bersumber dari iuran perusahaan berdasarkan valuasi premi yang akan dilakukan setiap bulan Oktober, sebesar 5% dari gaji dasar asuransi tahun sebelumnya.

c. Perjanjian Pengadaan BBM

PT Pertamina (Persero) - PT Pertamina Patra Niaga

Perusahaan telah menandatangani Perjanjian dengan PT Pertamina Patra Niaga tentang Pengadaan BBM No. KL.702/III/1/KA-2022 dan No. KTR-014/PNC00000/2022-S0 tanggal 1 Maret 2022. Dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Perjanjian berlaku mulai 1 Maret 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.
- Penyaluran BBM dilaksanakan atas dasar hasil pengukuran Alat Ukur/flowmeter yang sudah ditera oleh Dinas Metrologi.
- Harga BBM bersubsidi mengacu kepada Peraturan Presiden No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Untuk harga BBM non subsidi PT Pertamina Patra Niaga memberikan potongan harga sebesar 5% (lima persen).
- Biaya Jasa *Handling/Vendor Held Stock* sebesar Rp438/liter yang dibebankan kepada Perusahaan.

Insurance premiums for post-employment programs managed by a pooled fund account are determined as follows:

- a. *The initial fund at the start of the insurance is Rp223,601,601,551 (full amount); and*
- b. *Continuation funds in the form of annual periodic premiums sourced from company contributions based on premium valuations which will be carried out every October, amounting to 5% of the previous year's basic insurance salary.*

c. Procurement of BBM Agreement

PT Pertamina (Persero) - PT Pertamina Patra Niaga

The Company has entered into agreement with PT Pertamina Patra Niaga regarding the Procurement of BBM No. KL.702/III/1/KA-2022 and No. KTR-014/PNC00000/2022-S0 on March 1, 2022 with the terms and conditions as follows:

- *The agreement is started from March 1, 2022 until December 31, 2023.*
- *The distribution of BBM implemented on the basis of the measurement results of /flowmeter that has been measured by the Metrology Service.*
- *The subsidized fuel price refers to Presidential Regulation No. 191/2014 concerning the Provision, Distribution and Selling Price of Retail Fuel Oil. For non-fuel prices subsidies PT Pertamina provides a discount of 5% (five percent).*
- *Handling/Vendor Held Stock Service Fee of Rp438/litre which is charged to the Company.*

51. Kontinjensi

51. Contingencies

- a. Pada tanggal 6 Desember 2022 dan 27 Desember 2022, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan telah menerbitkan tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas penggunaan *Track Access Charge* (TAC) kepada Grup dengan merujuk pada Peraturan Kementerian Keuangan nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan ("PMK 138/2021") dengan nilai tagihan untuk Grup sebagai berikut:

1. Surat Tagihan PNBP TAC tanggal 6 Desember 2022 atas Triwulan I dan II Tahun 2022 masing-masing sebesar Rp588.985.461 dan Rp649.147.603 sehingga total tagihan Semester I sebesar Rp1.238.133.064.
2. Surat Tagihan PNBP TAC tanggal 27 Desember 2022 atas Triwulan III dan IV Tahun 2022 masing-masing sebesar Rp590.696.273 dan Rp590.696.273 sehingga total tagihan semester II sebesar Rp1.181.392.546.

Tagihan tersebut ditujukan kepada Grup sebagai operator angkutan kereta yang terdiri dari Perusahaan, KCI dan Railink. Atas tagihan tersebut, KCI telah melakukan pembayaran sebagian tagihan TAC untuk triwulan I dan II sebesar Rp142.889.592 pada tanggal 14 Desember 2022. Sedangkan untuk selisih tagihan lainnya Grup mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Perusahaan mengajukan Permohonan Pembebasan PNBP TAC Tahun 2022 dengan surat Nomor KF.302/III/2/KA-2023 tanggal 21 Maret 2023 dengan pokok permohonan pembebasan pokok PNBP terutang senilai Rp2.155.033.651 dan pembebasan denda keterlambatan pembayaran TAC senilai Rp151.128.445.

- a. On December 6 2022 and December 27 2022, the Government through the Directorate General of Railways (DJKA) of the Ministry of Transportation has issued Non-Tax State Revenue (PNBP) bills for the use of *Track Access Charges* (TAC) to the Group by referring to Ministry of Finance Regulation number 138/PMK.02/2021 concerning Types and Tariffs for Non-Tax State Revenues that are Volatile and Urgent Needs Applicable to the Ministry of Transportation ("PMK 138/2021") with the bills amounted for the Group are as follows:

1. Bills of PNBP of TAC on December 6, 2022 for the 1st and 2nd quarter of 2022 amount of Rp588,985,461 and Rp649,147,603 respectively, so that the invoice total in 1st semester amount of Rp1,238,133,064.
2. Bills of PNBP of TAC on December 27, 2022 for the 3rd and 4th quarter of 2022 amount of Rp590,696,273 and Rp590,696,273 respectively, so that the invoice total in 2nd semester amount of Rp1,181,392,546.

The bills are directed to the Group as a train transport operator consisting of the Company, KCI and Railink. On that bill, KCI has made a partial payment of for the 1st and 2nd quarter amount of Rp142,889,592 on December 14, 2022. For other bills, the Group submitted the following request:

1. The Company applied for the bill relief of PNBP of TAC year 2022 by letter No.KF.302/III/2/KA-2023 dated March 21, 2023 with the bill relief amount of Rp2,155,033,651 and the exemption of the fines of Rp151,128,445.

51. Kontinjensi (Lanjutan)

51. Contingencies (Continued)

- Atas permohonan tersebut, Kementerian Perhubungan telah memberikan persetujuan melalui surat Nomor: KU.102/2/22/K2/DJKA/2023 tanggal 16 Mei 2023 tentang persetujuan keringanan pokok TAC terutang senilai Rp1.731.840.115 dan pembebasan denda senilai Rp151.128.445, sehingga nilai TAC terutang yang dibukukan pada 31 Desember 2022 oleh Perusahaan adalah Rp423.193.536.
2. KCI mengajukan Permohonan Pembebasan PNBPTAC Tahun 2022 dengan surat Nomor 57/CV.200/CU/KCI/IV/2023 tanggal 17 April 2023 dengan pokok permohonan Pembebasan pokok PNBPTAC Triwulan III dan IV senilai Rp112.359.598 dan denda keterlambatan pembayaran TAC senilai Rp6.741.576.

Atas permohonan tersebut, sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, masih terdapat sejumlah tagihan yang masih dalam proses revidan verifikasi dari Kementerian Perhubungan.

3. Railink mengajukan Permohonan Pembebasan PNBPTAC Tahun 2022 dengan surat Nomor RL/DIR/364/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 dengan pokok permohonan pembebasan pokok PNBPTAC terutang senilai Rp9.242.770 dan pembebasan denda keterlambatan pembayaran TAC senilai Rp663.009.

Atas permohonan tersebut, sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, masih terdapat sejumlah tagihan yang masih dalam proses revidan verifikasi dari Kementerian perhubungan namun demikian Railink telah membukukan keseluruhan nilai tersebut pada beban tahun berjalan.

On that request, The Ministry of Transportation has provided approval by letter No. KU.102/2/22/K2/DJKA/2023 dated May 16, 2023 concerning the approval of the bill relief amount of Rp1,731,840,115 and the exemption of fines amount of Rp151,128,445, so that the Company record the payable of TAC on December 31, 2022 amount of Rp423,193,536.

2. *KCI applied for the bill relief of PNBPTAC year 2022 by letter No.57/CV.200/CU/KCI/IV/2023 dated April 17, 2023 with the bill relief of PNBPTAC 3rd and 4th quarter amount of Rp112,359,598 and the exemption of the fines amount of Rp6,741,576.*

On that request, until the issuance date of the consolidated financial statement, there are some number of bills that are in the process of review and verification from the Ministry of Transportation.

3. *Railink applied for the bill relief of PNBPTAC year 2022 by letter No RL/DIR/364/III/2023 dated March 21,2023 with the bill relief of PNBPTAC 3rd and 4th quarter amount of Rp9,242,770 and the exemption of the fines amount of Rp663,009.*

On that request, until the issuance date of the consolidated financial statement, there are some number of bills that are in the process of review and verification from the Ministry of Transportation, however the Railink has recorded the total as expense on the current year.

51. Kontinjensi (Lanjutan)

51. Contingencies (Continued)

Dalam hal belum adanya kepastian terhadap nilai TAC terutang pada KCI, KCI membukukan beban TAC per 31 Desember 2022 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan BPK ("BA BPK") tanggal 27 April 2023 atas PSO Grup untuk tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp38.391.792. Selain itu, atas tagihan TAC Triwulan I dan II sebesar Rp142.889.592 yang telah dibayarkan oleh KCI, dalam BA BPK tersebut diperhitungkan sebagai penambah PSO dengan nilai yang sama, dan jumlah tersebut merupakan bagian jumlah yang akan ditagihkan atas kekurangan Pemerintah dalam pembayaran PSO ke KCI.

In the event that there is no certainty regarding the outstanding TAC at KCI, KCI recorded TAC expense as of December 31, 2022 based on the Minutes of Audit of the BPK ("BA BPK") dated April 27, 2023 concerning Group's PSO for the year 2022 amount of Rp38,391,792. In addition, for the 1st and 2nd quarter TAC invoices amounting to Rp142,889,592 which have been paid by the KCI, refer to the BA BPK that is calculated as an addition to PSO with the same value, and this amount is part of the amount that will be billed for the Government's underpayment related PSO payments to the KCI.

Sedangkan atas tagihan triwulan III dan IV sebesar Rp112.359.598, KCI berkeyakinan hal tersebut tidak akan menjadi beban KCI mengacu hasil perhitungan nilai TAC tahun anggaran 2022 sesuai dengan BA BPK. Dalam hal tidak adanya keringanan yang nantinya diterima, KCI akan melakukan upaya kompensasi pengembalian melalui mekanisme pertanggungjawaban PSO tahun anggaran selanjutnya, karena beban TAC merupakan salah satu komponen BIOP pembentuk tarif yang diperhitungkan dalam PSO sesuai dengan PM 17/2018.

Meanwhile on the 3rd and 4th bills amount of Rp112,359,598, KCI believes that will not be KCI's expense referring to the results of the calculation of the TAC for the year 2022 in accordance with the BA BPK. In case of there is no relief that will be received later, KCI will attempt to compensate through a PSO responsibility mechanism on the next year since the TAC is one of the operating expense components that calculated in PSO corresponds to PM 17/2018.

- b. Perusahaan merupakan tergugat 1 dalam gugatan yang diajukan oleh PT Pentasena Bina Wisesa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) perwakilan Bandung yang terdaftar atas perkara No. 33/2018/BANI Bandung. Inti dari gugatan tersebut adalah Surat Keputusan kerja sama yang dikeluarkan oleh Perusahaan kepada PT Pentasena Bina Wisesa, dimana PT Pentasena Bina Wisesa tidak menerima surat keputusan kerja sama dimaksud kemudian tetap berdasarkan klausul kontrak.

- b. The Company constitute as the 1st defendant in the act against the law lawsuit as submitted by PT Pentasena Bina Wisesa through Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Bandung Representative submitted as the case No. 33/2018/BANI Bandung. The Essence of lawsuit is letter of cooperation termination which are issued by the company to PT Pentasena Bina Wisesa, which is not received by PT Pentasena Bina Wisesa, then remain based on the contract clause.*

51. Kontinjensi (Lanjutan)

51. Contingencies (Continued)

Pada tanggal 23 Mei 2019, BANI Bandung telah mengeluarkan putusan atas perkara No. 33/2018/BANI Bandung yang pada intinya menyatakan akta perjanjian kerja sama antara Perusahaan dan PT Pentasena Bina Wisesa adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta mengakibatkan Perusahaan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp152.225.328.

On May 23, 2019, BANI Bandung had been issued case verdict No. 33/2018/BANI Bandung which substantially stated the deed of cooperation agreement of PT Company with PT Pentasena Bina Wisesa was legitimate and had binding legal force that result the company must paid the compensation for Rp152,225,328.

Atas putusan tersebut Perusahaan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Juli 2019 dengan Register Perkara No. 256/Pdt.G/2019/PN.Bdg. Pada tanggal 10 Oktober 2019 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan putusan yang menyatakan menolak permohonan banding Perusahaan.

Based on the decision of the BANI Bandung, the Company submitted an application for canceling the arbitration award to the Head of the Bandung District Court on July 12, 2019 with Case Register No. 256/Pdt.G/2019/PN.Bdg. On October 10, 2019 the Panel of Judges of Bandung District Court, which rejected the request to cancel the arbitration award submitted by the Company.

Pada tanggal 18 Maret 2020, Perusahaan melakukan gugatan perlawanan atas upaya Eksekusi atas putusan BANI Bandung Nomor 33/2018/BANI Bandung tanggal 23 Mei 2019 dengan Register 127/Pdt.Bth/2020/Pn.Bdg tentang Pertokoan di Emplasemen Kampung Bandan yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi Jasin, S.H tanggal 18 Maret 2004.

On March 18, 2020 the Company filed a counterclaim against the attempt to execute the decision of the BANI Bandung Nomor 33/2018/BANI Bandung on May 23, 2019 with Case Register 127/Pdt.Bth/2020/Pn.Bdg Regarding Shops in the emplacement of Kampung Bandan made in front of Notary Surjadi Jasin, S.H on March 18, 2004.

Pada tanggal 25 Maret 2021 diputuskan menolak perlawanan pelawan seluruh nya atas Emplasemen Kampung Bandan seluas 22.430m.

On March 25, 2021 was decided to reject the resistance of all opponents regarding emplacement of Kampung Bandan area of 22,430m.

Pada tanggal 3 Juni 2021, Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan nomor pengajuan W11.U1/3239/HT.02.02/VI/2021.

On June 3, 2021, the Company submitted an appeal to the Jawa Barat High Court with filing number W11.U1/3239/HT.02.02/VI/2021.

Pada 14 Agustus 2021, Perusahaan menerima hasil Putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 127/Pdt.Bth/e-court/2020/PN.Bdg Tanggal 25 Maret 2021.

On August 14, 2021, the Company received the results of the Appeal Decision by the Jawa Barat High Court which upheld the previous decision of the Bandung District Court number 127/Pdt.Bth/e-court/2020/PN.Bdg on 25 Maret 2021.

Sampai dengan laporan ini diterbitkan, perkara ini masih dalam proses pengajuan kasasi.

Until the issuance of this report, this case is still in the process of filing a cassation.

51. Kontinjensi (Lanjutan)

51. Contingencies (Continued)

- c. Perusahaan merupakan tergugat 1 dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Nani Sumarni, dkk melalui Pengadilan Negeri Bandung yang terdaftar dalam perkara No. 65/Pdt.G/e-court/2020/PN.Bdg tertanggal 7 Februari 2020. Inti dari gugatan tersebut adalah Perusahaan digugat terkait sengketa kepemilikan tanah terletak di Jl. Garuda Kec. Andir, Kel. Garuda, Kota Bandung. Penggugat mengklaim bahwa Perusahaan merugikan penggugat dan menuntut pembayaran ganti rugi sebesar Rp4.660.315.785.

Hasil Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 65/Pdt.G/2020/PN.Bdg tanggal 9 Februari 2021 menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik tanah tersebut. Berdasarkan hasil putusan tersebut, Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan nomor register 273/Pdt/2021/PT.Bdg.

Pada 13 Juli 2021, Perusahaan menerima hasil Putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung sebelumnya.

Perusahaan mengajukan kasasi dengan nomor 1741K/PDT/2022 ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 29 Juni 2022, Perusahaan menerima hasil Putusan Tingkat Kasasi bahwa menolak permohonan kasasi dari Perusahaan dan Pekerja. Sampai dengan laporan ini diterbitkan, perkara ini masih dalam proses Peninjauan Kembali.

- c. *The Company is a first Defendant in the act against the law lawsuit as submitted by Nani Sumarni et al. through Bandung province high court submitted as the case No. 65/Pdt.G/e-court/2020/PN.Bdg on February 7, 2020. The point of lawsuit is the Company get sued about ownership dispute related land on Jalan Garuda, district Andir, Bandung City. The plaintiff claimed the Company for harm and sued compensation of Rp4,660,315,785.*

Results of the Bandung District Court Decision No. 65/Pdt.G/2020/PN.Bdg date February 9, 2021 stated that the plaintiff is the owner of the land. Based on the decision, the Company filed an appeal to the Bandung High Court with registration number 273/Pdt/2021/PT.Bdg.

On July 13, 2021, the Company received the results of the Appeal Decision by the Bandung High Court which upheld the previous decision of the Bandung District Court.

The Company submitted a cassation No.1741K/PDT/2022 to the Supreme Court. On the June 29, 2022 The Company received the results of the Cassation Decision which rejected the cassation request submitted by the Company and Workers. Until the issuance of this report, this case is still in the process of Judicial Review.

51. Kontinjensi (Lanjutan)

51. Contingencies (Continued)

- d. Perusahaan merupakan tergugat 1 dalam gugatan yang diajukan oleh Tengku Hamdy Osman Delikhan melalui Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dalam perkara 48/Pdt.G/2021/PN.Mdn pada tanggal 5 Februari 2021. Inti dari gugatan tersebut adalah Tengku Hamdy Osman Delikhan menggugat KAI karena tahun 1868 terjadi perjanjian konsesi antara Sultan Deli dan DSM selama 90 tahun yang seharusnya berakhir tahun 2002 dan aset tersebut dikembalikan ke Tengku Hamdy Osman Delikhan. Penggugat mengklaim bahwa perusahaan merugikan penggugat dan menuntut pembayaran ganti rugi sebesar Rp707.340.000

Pada tanggal 23 November 2021, Pengadilan Negeri Medan telah mengeluarkan putusan atas perkara No. 48/Pdt.G/2021/PN.Mdn yang pada menyatakan menolak tuntutan penggugat.

Pada tanggal 14 Desember 2021, Tengku Hamdy Osman Delikhan al haj gelar Tengku Raja Muda Deli mengajukan banding. Sampai dengan laporan ini diterbitkan, perkara ini masih dalam proses.

- e. Perusahaan merupakan tergugat 1 dalam gugatan yang diajukan oleh PT Saribumi Eramaju Jaya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) perwakilan Bandung yang terdaftar atas perkara No. 42/2022/BANI Bandung pada tanggal 5 September 2022. Inti dari gugatan tersebut adalah surat pemutusan perjanjian yang dikeluarkan oleh Perusahaan kepada PT Saribumi Eramaju Jaya tentang pemanfaatan tanah di Emplasemen Stasiun Jakarta Kota.

Penggugat mengklaim bahwa Perusahaan merugikan penggugat dan menuntut pembayaran ganti rugi sebesar Rp394.442.104. Sampai dengan laporan ini diterbitkan, perkara ini masih dalam proses.

- d. The company constitute as the 1st defendant in the act against the law lawsuit as submitted by Tengku Hamdy Osman Delikhan through Medan District Court submitted as the case 48/Pdt.G/2021/PN.Mdn on February 5, 2021. The point of lawsuit is the Company get sued about in 1868 There was a concession agreement between Sultan Deli and DSM for 90 years which should have ended in 2002 and the assets were returned to Tengku Hamdy Osman Delikhan. The plaintiff claimed the Company for harm and sued compensation of Rp707,340,000.

On November 23, 2021, Medan District Court had been issued case verdict No. 48/Pdt.G/2021/PN.Mdn which substantially stated rejected the plaintiff's claim.

On December 14, 2021, Tengku Hamdy Osman Delikhan al haj with the title Tengku Raja Muda Deli filed an appeal. Until the issuance of this report, this case is still in the process.

- e. The Company constitute as the 1st defendant in the act against the law lawsuit as submitted by PT Saribumi Eramaju Jaya through Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Bandung Representative submitted as the case No. 42/2022/BANI Bandung on September 5, 2022. The Essence of lawsuit is letter of agreement termination which are issued by the company to PT Saribumi Eramaju Jaya regarding the use of land in the Jakarta Kota Station Emplacement.

Plaintiff claimed the loss caused by the company and sue the compensation of Rp394,442,104. Until the issuance of this report, this case is still in the process.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2022 and 2021
(In Thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

52. Informasi Tambahan Terkait Arus Kas

52. Additional Information Related to Cash Flows

Tabel dibawah ini menunjukkan transaksi investasi yang tidak menggunakan kas:

The Table below represents non-cash investment transactions:

	<u>2022</u>	<u>2021 *)</u>	
Penambahan Aset melalui			Addition of Assets through
Utang Usaha:			Trade Payables:
Aset Tetap	211.276.760	125.434.851	Fixed Assets
Aset Takberwujud	16.195.823	--	Intangible Assets
Hak Pengoperasian			Infrastructure Assets
Aset Prasarana	54.746.697	--	Operating Rights
Hibah:			Grant:
Aset Tetap	256.775	--	Fixed Assets
Pinjaman Bank:			Bank Loans:
Aset Tetap	58.055.044	118.864.233	Fixed Assets
Hak Pengoperasian			Infrastructure Assets
Aset Prasarana	238.575.780	452.299.477	Operating Rights
Penambahan Investasi Pada			Addition of Investment in
Ventura Bersama melalui			Joint Venture through
Reklasifikasi dari Uang Muka			Reclassification of Paid in
Setoran Modal	7.230.581.343	--	Capital Advance
Penerimaan Bunga Pinjaman			Receipt of Loan Interest
dari Ventura Bersama melalui			from Joint Venture through
Piutang Lain-lain PSBI	138.896.858	--	Other Receivables of PSBI
Jumlah	<u>7.809.688.222</u>	<u>696.598.560</u>	Total

*) Utang usaha tahun 2021 terkait perolehan aset tetap dibayarkan seluruhnya di tahun 2022.

*) Trade payables in 2021 related acquisition of fixed assets is fully paid in 2022.

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, sebagai berikut:

The table below represents a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended December 31, 2022 and 2021, as follows:

	<u>2022</u>					
	<u>Saldo Awal/ Beginning Balance</u>	<u>Arus Kas/ Cash Flow</u>		<u>Non Kas/ Non- cash</u>	<u>Saldo Akhir/ Ending Balance</u>	
		<u>Penerimaan/ Receipt</u>	<u>Pembayaran/ Payment</u>			
Pinjaman Jangka Pendek	2.659.962.173	13.706.510.355	(14.606.472.528)	--	1.760.000.000	Short-Term Loan
Pinjaman Jangka Panjang	17.436.738.082	2.654.659.751	(941.505.589)	329.698.174	19.479.590.418	Long-Term Loan
Utang Obligasi Jangka Pendek	999.447.166	--	(1.000.000.000)	552.834	--	Short-Term Bonds Payable
Utang Obligasi Jangka Panjang	2.993.800.573	1.500.000.000	(5.041.083)	2.000.891	4.490.760.381	Long-Term Bonds Payable
Sukuk	--	500.000.000	(1.785.917)	93.028	498.307.111	Sukuk
Liabilitas Sewa	82.145.435	--	(37.190.355)	16.207.820	61.162.900	Lease Liabilities
Pinjaman Program PEN	3.500.000.000	--	--	--	3.500.000.000	PEN Program Loan
	<u>2021</u>					
	<u>Saldo Awal/ Beginning Balance</u>	<u>Arus Kas/ Cash Flow</u>		<u>Non Kas/ Non- cash</u>	<u>Saldo Akhir/ Ending Balance</u>	
		<u>Penerimaan/ Receipt</u>	<u>Pembayaran/ Payment</u>			
Pinjaman Jangka Pendek	3.415.206.865	6.902.258.306	(7.657.502.999)	--	2.659.962.173	Short-Term Loan
Pinjaman Jangka Panjang	14.432.655.049	2.806.736.985	(381.327.501)	578.673.549	17.436.738.082	Long-Term Loan
Utang Obligasi Jangka Pendek	--	--	--	999.447.166	999.447.166	Short-Term Bonds Payable
Utang Obligasi Jangka Panjang	3.990.924.392	--	--	(997.123.819)	2.993.800.573	Long-Term Bonds Payable
Liabilitas Sewa	105.157.333	--	(26.886.581)	3.874.683	82.145.435	Lease Liabilities
Pinjaman Program PEN	3.500.000.000	--	--	--	3.500.000.000	PEN Program Loan

53. Kejadian Penting Setelah Periode Pelaporan

53. Events After Financial Reporting Period

- Berdasarkan Akta Perusahaan No. 122 tanggal 11 Januari 2023 dibuat oleh Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H. Notaris di Bandung dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0008225, penyertaan modal negara tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.200.000.000 telah disahkan menjadi setoran modal sehingga jumlah saham ditempatkan dan disetor Perusahaan menjadi 22.368.743 saham atau setara dengan Rp22.368.743.000 (Catatan 34.a)
- Pada tanggal 08 Februari 2023, Perusahaan dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk menandatangani berita acara kesepakatan No.KL.707/II/9/KA-2023 tentang penetapan tarif angkutan batu bara relasi Tanjung Enim Baru- Tarahan dan relasi Tanjung Enim Baru-Kertapati untuk periode tahun 2023 sampai 2027.
- Pada tanggal 15 Februari 2023, Direktur Pengelolaan Sarana Perusahaan Sdr. Eko Purwanto telah berakhir sesuai ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-7/MBU/09/2022.
- Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Line No (15) 43 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 08 Maret 2023 untuk memperpanjang jangka waktu pinjaman sampai dengan tanggal 24 Februari 2024.
- Pada tanggal 10 Maret 2023, Perusahaan memberikan penyertaan modal kepada PT PSBI sebesar Rp2.030.804.000 yang bersumber dari PMN TA 2022 dengan skema Uang Muka Setoran Modal (UMSM) dalam rangka pendanaan tahap pertama *cost overrun* proyek KCJB.
- Based on the Company Deed No. 122 dated January 11, 2023 made by Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H. Notary in Bandung and has been approved from the Ministry of Law and Human Rights with Decree No. AHU-AH.01.03-0008225, Additional of Republic Indonesia's Capital dated December 31, 2022 amounting to IDR 3,200,000,000 has been approved as a capital investment so the number of shares issued and paid by the Company becomes 22,368,743 shares or equivalent to Rp22,368,743,000 (Note 34.a)
- On February 8, 2023, the Company and PT Bukit Asam (Persero) Tbk signed the minutes of agreement No.KL.707/II/9/KA-2023 regarding the determination of coal transport rates for the Tanjung Enim Baru-Tarahan and Tanjung Enim Baru-Kertapati for the period 2023 to 2027.
- As of February 15 2023, Director of Facilities Management of the Company Mr. Eko Purwanto has ended in accordance with the provisions of Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-11/MBU/07/2021 concerning Requirements, Procedures for Appointment and Termination of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises as amended with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-7/MBU/09/2022.
- The company has signed an Amendment to the Working Capital Credit Agreement Line No (15) 43 with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk on March 8, 2023 to extend the term of the loan until February 24, 2024.
- As of March 10, 2023, the Company provided capital participation to PT PSBI amounting to Rp2,030,804,000 sourced from the Government's capital (PMN) in 2022 with the Capital Advances (UMSM) scheme in the context the first phase of funding of the KCJB project cost overrun.

**53. Kejadian Penting Setelah Periode Pelaporan
(Lanjutan)**

**53. Events After Financial Reporting Period
(Continued)**

- Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak No. S-00163/RIKSIS/KPP.1904/2023 tanggal 21 Maret 2023 dan surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar No. 00022/406/21/093/23 tanggal 17 April 2023 atas hasil pemeriksaan pajak badan tahun 2021 sebagai berikut:
 1. Akumulasi rugi fiskal tahun 2021 adalah sebesar Rp960.090.331; (Catatan 13.c);
 2. Lebih bayar PPh Badan tahun 2021 sebesar Rp67.009.624.
- Pada 12 April 2023, Obligasi I seri B, Obligasi II seri A dan B serta Obligasi Berkelanjutan I Perusahaan mendapatkan peringkat "AAA" dari PEFINDO untuk periode 11 April 2023 hingga 1 April 2024.
- Pada 12 April 2023, Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Perusahaan mendapatkan peringkat "AAA" dari PEFINDO untuk periode 11 April 2023 hingga 1 April 2024.
- Perusahaan telah mengangkat Sdr. Raden Agus Dwinanto Budiadji ditugaskan sebagai *Plt. Executive Vice President of Corporate Secretary* menggantikan Sdr. Emanuel Kurniawan Kriswijayanto selaku Pejabat Yang Melaksanakan Tugas (PYMT) *Executive Vice President of Corporate Secretary*, efektif sejak 18 April 2023 sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor: SK.U/KH.608/IV/1/SAP/KA-2023 tanggal 18 April 2023.
- Anggaran Dasar Railink telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah menurut Keputusan Para Pemegang Saham yang telah disahkan dengan Akta Notaris Ariani Lakhsmitjati Rachim, S.H., No. 5 tanggal 27 Januari 2023 mengenai Perubahan Modal Dasar dan Modal Disetor kepada Railink. Akta perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dengan Surat Keputusan No. AHU-0006548.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023.
- The Company received Notification of Tax Audit Results No. S-00163/RIKSIS/KPP.1904/2023 dated 21 March 2023 and Tax Overpayment Assessment Letter No. 00022/406/21/093/23 dated 17 April 2023 on the results of the 2021 corporate tax audit as follows:
 1. Accumulated fiscal losses in 2021 amounting to Rp960,090,331; (Note 13.c);
 2. The Overpayment of Corporate Income Tax 2021 amounting to is Rp67,009,624.
- As of April 12, 2022, the Company Bond I series B, Bond II series A and B and Continuing Bonds I is rated "AAA" by PEFINDO for the period April 11, 2023 until April 1, 2024.
- As of April 12, 2022, Continuing Sukuk Ijarah I the Company is rated "AAA" by PEFINDO for the period April 11, 2023 until April 1, 2024.
- The Company has appointed Raden Agus Dwinanto Budiadji to be assigned as *Plt. Executive Vice President of Corporate Secretary* replacing Emanuel Kurniawan Kriswijayanto as Officer in Charge (PYMT) *Executive Vice President of Corporate Secretary*, effective from April 18, 2023 as in Decree Number: SK.U/KH.608/IV/1/SAP/KA-2023 dated April 18, 2023.
- Railink's Article of Association has been amended several times, most recently by Agreement of Stockholders legalized by the Notarial Deed of Ariani Lakhsmitjati Rachim, S.H., No. 5 dated January 27, 2023 concerning the Changes in the authorized and paid in capital. These amendments have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. Decision Letter of Amended's articles No. AHU-0006548.AH.01.02.Tahun 2023 dated January 31, 2023.

55. Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amendemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2022.

Amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi;
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tanggungan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal; dan
- Revisi PSAK 107: Akuntansi Ijarah.

Standar baru yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: Kontrak Asuransi.
Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 – Informasi Komparatif.

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Grup masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amendemen standar dan interpretasi standar tersebut.

56. Tanggung Jawab Manajemen dan Persetujuan atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2023.

55. New Accounting Standard and Interpretation Standard has been Issued not Yet Effective

DSAK-IAI has issued several new standards, amendments and improvement to standards, and interpretations of the standards but not yet effective for the period beginning on January 1, 2022.

Amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2023, with early adoption is permitted, are as follows:

- Amendments PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Disclosure of Accounting Policies;
- Amendments PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Classification of Liabilities as a Current or Non Current;
- Amendments PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors regarding Definition of Accounting Estimates;
- Amendments PSAK 46: Income Tax regarding Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction; and
- Revised PSAK 107: Accounting for Ijara.

New standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

- PSAK 74: Insurance Contract.
Amendments PSAK 74: Insurance Contract regarding Initial Application of PSAK 74 and PSAK 71 – Comparative Information.

Until the date of the financial statements is authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.

56. Management's Responsibility and Approval of the Consolidated Financial Statements

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements were the responsibilities of the management and were approved by the Directors for issuance on May 29, 2023.



PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

JL. Perintis Kemerdekaan No. 1
Bandung 40117
PO Box 1163 Bandung 40000
Telp : 022-4230031,4230039
Teleks : 28263, 28358
Fax : 022-4203342 Toka 10039

Website : www.kai.id
Email : kontak_pelanggan@kereta-api.co.id



BADAN PENGAWASAH KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Laporan Hasil Asesmen Penerapan Faktor ESG pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2022



NOMOR : PE.05.03/LHP-112/D402/1/2023

TANGGAL : 12 JULI 2023



DEPUTI AKUNTAN NEGARA
KECEPATAN, KETEPATAN, KUALITAS

2023



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA**

Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur – 13120
Telepon: (021) 8584867 Faksimile: (021) 85906404
e-mail: dan@bpkp.go.id

Nomor : PE.05.03/SP-915/D4/02/2023 24 Juli 2023
Lampiran : Satu Laporan
Hal : Laporan Hasil Asesmen Penerapan
Faktor *Environment, Social, and
Governance* pada PT Kereta Api
Indonesia (Persero) Tahun 2022

Yth. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tbk
di Bandung

Dengan ini kami sampaikan Laporan Nomor: PE.05.03/LHP-105/D402/1/2023 tanggal
11 Juli 2023 hal tersebut di atas, dengan pokok-pokok hasil asesmen sebagai berikut:

1. Asesmen Penerapan Faktor *Environment, Social, and Governance* (ESG) dimaksudkan untuk memberi keyakinan terbatas kepada manajemen PT Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap kualitas penerapan faktor ESG di PT Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Standar asesmen merujuk pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern BPKP dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang diterbitkan AAIPi Tahun 2021, sedangkan metode asesmen merujuk pada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Asesmen Penerapan Faktor *Environment, Social, and Governance* pada BUMN.
3. Hasil asesmen Penerapan Faktor ESG pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2022 menunjukkan total capaian sebesar **67,42%** atau mendapat predikat "**Cukup Baik**", dengan rincian sebagai berikut:

No	Faktor-Faktor ESG	Bobot	Nilai	Capaian (%)
1.	Faktor Lingkungan (E)	20,00	9,92	49,60%
2.	Faktor Sosial (S)	35,00	31,02	88,03%
3.	Faktor Tata Kelola (G)	20,00	11,20	56,00%
4.	Faktor Finansial (D)	25,00	15,28	61,12%
	Nilai Agregat ESG	100,00	67,42	67,42%

Laporan ini terbatas hanya ditujukan bagi Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, namun tidak membatasi Direksi untuk mengambil keputusan lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Uraian hasil asesmen dan saran secara lengkap kami sajikan dalam laporan terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Kepala BPKP,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Sally Salamah

Tembusan Yth.:

1. Kepala BPKP;
2. Wakil Menteri BUMN II;
3. Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Layanan Pengaduan/*Hotline*:

Apabila Pegawai BPKP menerima/meminta gratifikasi dan suap, dapat dilaporkan melalui mekanisme penyampaian pengaduan pada wbs.bpkp.go.id atau menghubungi 085210991239.





**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA KONEKTIVITAS,
PARIWISATA, KAWASAN INDUSTRI DAN PERUMAHAN**

Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta, 13120
Telepon (021) 8584867 Faksimili (021) 85906404

Nomor : PE.05.03/LHP-112/D402/1/2023 12 Juli 2023
Lampiran : Satu Lampiran
Hal : Laporan Hasil Asesmen Penerapan Faktor
ESG pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Tahun 2022

Laporan Hasil Asesmen Penerapan Faktor ESG pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2022, disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : RINGKASAN HASIL ASESMEN

BAB II : URAIAN HASIL ASESMEN

BAB I RINGKASAN HASIL ASESMEN

A. Simpulan

Asesmen faktor ESG pada PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) Tahun 2022 mencakup empat faktor ESG, meliputi faktor lingkungan, faktor sosial, faktor tata kelola, dan faktor finansial. Analisis materialitas atas isu-isu strategis menunjukkan bahwa faktorisasi pelaporan ESG pada PT KAI (Persero) berdasarkan analisis manajemen berfokus pada faktor Sosial. Kami menyimpulkan bahwa kualitas penerapan faktor PT KAI (Persero) Tahun 2022 adalah "**Cukup Baik**". Hal tersebut tercermin dari perolehan nilai agregat faktor ESG sebesar 67,42 dari 100. Nilai agregat tersebut merupakan capaian penerapan faktor ESG dengan rekapitulasi sebagai berikut:

No	Faktor-Faktor ESG	Bobot	Nilai	Capaian (%)
A.	Faktor Lingkungan (E)	20,00	9,92	49,60%
B.	Faktor Sosial (S)	35,00	31,02	88,03%
C.	Faktor Tata Kelola (G)	20,00	11,20	56,00%
D.	Faktor Finansial (D)	25,00	15,28	61,12%
	Nilai Agregat ESG	100,00	67.42	67,42%

Hal-hal yang memerlukan penanganan segera oleh manajemen PT KAI (Persero) untuk meningkatkan kualitas penerapan faktor ESG dengan kualitas baik sebagai berikut:

1. Faktor *Environment*

- a. Belum melakukan identifikasi risiko, kesempatan dan mitigasi risiko perubahan iklim.
- b. Belum melakukan kajian dampak operasi pada keanekaragaman hayati.
- c. Belum menetapkan *baseline*, perhitungan total emisi yang diverifikasi pihak independen, beban emisi untuk seluruh segmen bisnis, target, dan evaluasi perhitungan reduksi emisi.
- d. Belum mengungkapkan metode pemrosesan dan analisis dampak ekonomis penggunaan air dan menetapkan standar minimum kualitas dan menghitung total efluen (air limbah) secara periodik.

- e. Belum mengungkapkan dampak negatif pencemaran udara yang dihasilkan.
- f. Belum memiliki kebijakan khusus penggunaan energi baru terbarukan.
- g. Belum melakukan penerapan program peningkatan kualitas kinerja di rantai pasokan, indikator keberhasilan, dan *monitoring* program.
- h. Belum menghitung efisiensi energi, total emisi tidak langsung di seluruh rantai nilai, mengungkapkan jumlah reduksi dan rencana kerja sama reduksi emisi GRK.

2. Faktor Social

- a. Belum melaporkan program remunerasi untuk karyawan *outsourc*e, belum mengungkapkan respon perusahaan adanya praktik tidak baik/tidak sesuai ketentuan ketenagakerjaan dan belum ada kebijakan seleksi pegawai yang mengedepankan kesetaraan kesempatan dan gender.
- b. Belum membuat strategi pemenuhan hak masyarakat adat/setempat yang terdampak proses operasi dan melaporkan ada/tidaknya insiden pelanggaran.

3. Faktor Governance

- a. Belum memiliki kebijakan/pedoman/prosedur yang mengintegrasikan penerapan faktor-faktor ESG termasuk didalamnya kebijakan mengenai penetapan topik material.
- b. Belum menetapkan target pencapaian faktor ESG kedalam RJPP perusahaan, dan pencapaian kinerja ESG dalam Indikator KPI Direksi.
- c. Belum menunjuk pihak independen untuk melakukan asurans terkait faktor ESG.

B. Saran

Terhadap kondisi penerapan faktor ESG di atas, kami menyarankan kepada Direksi PT KAI (Persero) agar:

1. Mengimplementasikan rencana mitigasi dan adaptasi proses bisnis terkait risiko lingkungan pada level korporat yang memuat jadwal pelaksanaan mitigasi risiko dan mengidentifikasi risiko dan kesempatan yang diakibatkan oleh perubahan iklim.

2. Melakukan kajian dan mitigasi atas dampak proyek dan aktivitas terhadap keanekaragaman hayati.
3. Menetapkan *baseline*, target, dan evaluasi perhitungan reduksi emisi yang di verifikasi pihak independen.
4. Mengungkapkan metode dan pemrosesan penghematan/optimalisasi dan analisis dampak ekonomis penggunaan air.
5. Mengungkapkan dampak negatif atas operasi perusahaan yang menghasilkan pencemaran udara terhadap lingkungan atau masyarakat sekitar.
6. Menetapkan kebijakan khusus penggunaan energi baru terbarukan, kebijakan/program, indikator keberhasilan, dan monitoring penerapan program untuk meningkatkan kualitas kinerja di rantai pasokan.
7. Menghitung efisiensi energi, total emisi tidak langsung di seluruh rantai nilai, mengungkapkan jumlah reduksi dan rencana kerja sama reduksi emisi GRK.
8. Melaporkan program remunerasi karyawan *outsourse*, mengungkapkan adanya praktik tidak baik/tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan dan menetapkan kebijakan seleksi pegawai yang mengedepankan kesetaraan kesempatan dan gender.
9. Mengidentifikasi dan membuat strategi untuk memenuhi hak masyarakat adat atau setempat yang terdampak proses operasi dan belum melaporkan ada/tidaknya insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat.
10. Menetapkan kebijakan ESG perusahaan yang didalamnya minimal mengatur penentuan topik material pengungkapan informasi keberlanjutan dan identifikasi serta analisis kebutuhan atau harapan dari para pemangku kepentingan.
11. Menetapkan *Road Map*/perencanaan penerapan ESG yang berisi minimal target pencapaian faktor ESG ke dalam tujuan strategi jangka panjang yang realistis dan terukur dan menghubungkan rencana strategis dan pengukuran kinerja manajemen ke dalam topik-topik ESG.
12. Menetapkan pencapaian target kinerja yang terkait dengan topik ESG belum seluruhnya termasuk ke dalam indikator kinerja (KPI) Direksi dan RKAP.

13. Menunjuk pihak independen untuk melakukan asurans/penjaminan terhadap informasi yg terkait dengan faktor ESG.
14. Memperkirakan dan menghitung serta mengungkapkan dampak ekonomi tidak langsung atas investasi infrastruktur yang signifikan maupun dukungan layanan kepada stakeholders dan ukuran dampak harus dapat dikuantifikasi.

Demikian kami sampaikan. Laporan ini terbatas hanya ditujukan bagi Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, namun tidak membatasi Direksi untuk mengambil keputusan lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Atas kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Direktur,

Anyanto Wibowo

Pegawai BPKP dalam melaksanakan tugas tidak menerima/meminta gratifikasi dan suap. Apabila Pegawai BPKP menerima/meminta gratifikasi dan suap, dapat dilaporkan melalui mekanisme penyampaian pengaduan pada wbs.bkp.go.id. atau menghubungi 085210991239

BAB II

URAIAN HASIL ASESMEN

A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023.
3. Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Nomor PE.05/S-537/D4/02/2023 tanggal 4 Mei 2023 tentang Asesmen Penerapan Faktor ESG pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2022.
4. Surat Tugas Direktur Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan Perumahan Nomor PE.05.02/ST-77/D402/1/2023 tanggal 3 Mei 2023 tentang Asesmen Penerapan Faktor ESG pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2022.

B. Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup

1. Tujuan

Tujuan asesmen untuk memberi keyakinan terbatas kepada manajemen PT Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap kualitas penerapan faktor ESG di PT Kereta Api Indonesia (Persero). Penerapan faktor ESG yang berkualitas akan meningkatkan akuntabilitas korporasi sebagai bentuk dukungan korporasi terhadap agenda pembangunan berkelanjutan.

2. Sasaran

Sasaran asesmen adalah keberadaan infrastruktur kebijakan, implementasi program, dan dampaknya dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang melekat pada aktivitas bisnis operasi pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup asesmen meliputi pemantauan profil ESG dan pengukuran dampak ekonomis atas penerapan faktor-faktor ESG di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2022.

C. Standar dan Metodologi

Standar pengawasan yang digunakan adalah Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern BPKP dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang diterbitkan AAIPi Tahun 2021. Sedangkan metodologi yang digunakan dalam penugasan sebagai berikut:

1. Perolehan data dan informasi yang relevan melalui:
 - a. Reviu dokumen, yaitu mengkaji secara mendalam terhadap dokumen yang relevan untuk memperoleh informasi atas kondisi perusahaan;
 - b. Wawancara, yaitu mengeksplorasi informasi yang diperoleh dari reviu dokumen, dan/atau observasi serta untuk memperoleh informasi yang tidak diperoleh melalui reviu dokumen maupun observasi.
2. Analisis dan pengujian data dan informasi yang diperoleh dengan pedoman, prosedur dan kebijakan, serta peraturan terkait.
3. Melakukan diskusi dengan manajemen (FGD) untuk mengeksplorasi informasi secara interaktif atas kegiatan yang direviu dan pendalaman yang diperlukan.
4. Pemaparan simpulan sementara dalam rangka konfirmasi akhir hasil asesmen dan melakukan perbaikan/penyesuaian yang diperlukan.

D. Batasan Tanggung Jawab

Tanggung jawab tim terbatas pada pelaksanaan kegiatan asesmen sesuai metodologi dan pemberian simpulan dan saran hasil penugasan.

Tanggung jawab manajemen PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah kelengkapan dan kebenaran informasi terkait laporan keberlanjutan, laporan tahunan, dan data lainnya yang relevan.

E. Masa Pelaksanaan

Kegiatan asesmen penerapan faktor ESG dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kerja mulai tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 2 Juni 2023.

F. Hasil Asesmen

1. Profil Perusahaan

PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan berdiri tanggal 28 September 1945. Pada saat ini, PT KAI terdiri dari 9 daerah operasi, 4 divisi regional, 8 balai yasa dan 1 sub divisi regional yang mengelola total aset

sebesar Rp62,77 T dan total pegawai sebanyak 26.897 orang dengan bidang usaha utama adalah jasa angkutan barang, penumpang dan jasa non angkutan.

VISI :

Menjadi Solusi Ekosistem Transportasi Terbaik untuk Indonesia.”

MISI:

- Untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
- Untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi.
- Untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memprakarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur-infrastruktur penting terkait transportasi.

Kegiatan utama Perseroan saat ini bergerak dalam bidang usaha pengangkutan penumpang dan/atau barang dengan kereta api, usaha pendidikan dan pelatihan di bidang perkeretaapian, serta usaha penyewaan sarana/ prasarana/fasilitas yang meliputi sewa kios/gudang/ruang stasiun dan terminal peti kemas. Seluruh Kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar telah dijalankan oleh Perseroan. Seluruh kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar sudah dijalankan oleh Perseroan.

Skala Perseroan Tahun 2019 sd 2021 disajikan dalam tabel di bawah ini

Uraian Description	Satuan Unit	2021	2020	2019
Jumlah pegawai Number of employees	Pegawai Employee	26.897	27.665	28.316
Pendapatan Income	Dalam Jutaan Rupiah In million rupiah	15.529.530	14.413.374	26.251.715
Total Aset Total Assets	Dalam Jutaan Rupiah In million rupiah	62.768.827	53.207.069	44.905.547
Total Liabilitas Total Liability	Dalam Jutaan Rupiah In million rupiah	39.357.086	36.167.090	25.099.923
Total Ekuitas Total Equity	Dalam Jutaan Rupiah In million rupiah	23.441.740	17.039.980	19.805.624
Total Kapitalisasi (Liabilitas, Hak Minoritas, dan Ekuitas) Total Capitalization (Liabilities, Minority Rights, and Equity)	Dalam Jutaan Rupiah In million rupiah	62.768.827	53.207.069	44.905.547
Total Kepemilikan Saham Total Share Ownership	Persentase Percentage	Pemerintah Republik Indonesia (100%) Government of the Republic of Indonesia (100%)	Pemerintah Republik Indonesia (100%) Government of the Republic of Indonesia (100%)	Pemerintah Republik Indonesia (100%) Government of the Republic of Indonesia (100%)
Jumlah Produk dan Jasa Number of Products and Services	Produk dan Jasa Products and Services	<ul style="list-style-type: none"> • Angkutan Penumpang • Angkutan Barang • Pendukung Angkutan Kereta Api • Non Angkutan • Passenger transportation • Cargo • Rail Transport Support • Non-Transport 	<ul style="list-style-type: none"> • Angkutan Penumpang • Angkutan Barang • Pendukung Angkutan Kereta Api • Non Angkutan • Passenger transportation • Cargo • Rail Transport Support • Non-Transport 	<ul style="list-style-type: none"> • Angkutan Penumpang • Angkutan Barang • Pendukung Angkutan Kereta Api • Non Angkutan • Passenger transportation • Cargo • Rail Transport Support • Non-Transport

2. Gambaran Umum Kebijakan Keberlanjutan

PT KAI (Persero) memiliki kebijakan internal yang telah mempertimbangkan penerapan faktor-faktor ESG di perusahaan dalam bentuk pedoman, prosedur, namun belum terintegrasi untuk ketiga faktor ESG.

Pedoman terkait faktor Lingkungan, yang dimiliki PT KAI (Persero) yaitu:

- Peraturan Direksi No. PER.U/KL.104/X/2/KA-2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Izin Lingkungan,
- Instruksi No. 2/KM.203/KA-2017 tentang Pengelolaan Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL),
- Kebijakan Health, Safety, Security and Environment (HSSE) Nomor KS.102/XII/1/KA-2022,
- Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: KEP.U/KS.101./IV/1/KA-2017 tentang Pengelolaan Limbah Di Daerah Operasi, Divisi Regional, Balai Yasa, Gudang Persediaan dan Anak Perusahaan.

Untuk Pedoman terkait faktor Sosial yaitu Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: PER.S/KS.102/IV/26fKA-2020 Tentang Prosedur Induksi Keselamatan dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian dan Peraturan Direksi No. PER.U/KP.502/XII/1/KA-2022 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pedoman terkait faktor *Governance* PT KAI memiliki Peraturan Direksi Nomor PER.KL/KL.104/VIII//1/KA-2022 tentang Pedoman Tata Kelola Data (Data Governance).

Dalam menentukan topik material atas informasi keberlanjutan, prosedur yang dilakukan oleh PT KAI (Persero) yaitu tahap awal PT KAI (Persero) melakukan Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti oleh para penanggung jawab penyusunan laporan keberlanjutan pada tiap-tiap divisi, untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dan metode pendekatan keterlibatan pemangku kepentingan. Selanjutnya, kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal (hasil identifikasi) dilakukan penyebaran kuesioner, dan diajukan beberapa topik (yang telah diidentifikasi berdasarkan survei dan FGD) untuk dipilih. Topik-topik material hasil kuesioner digambarkan pada matrik dan dipilih 5 (lima) topik (sesuai hasil rating kuesioner tertinggi) sebagai

topik material PT KAI (Persero), diantaranya Anti-korupsi, Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Keselamatan dan Kesehatan Pelanggan.

PT KAI (Persero) belum menetapkan target pencapaian faktor ESG dalam rencana strategis jangka panjang (RJPP), belum menetapkan kriteria untuk pengukuran kinerja (indikator kinerja utama) manajemen ke dalam topik-topik ESG, dan belum menetapkan pencapaian target kinerja yang terkait dengan topik ESG ke dalam indikator kinerja (KPI) Direksi serta belum menetapkan rencana aksi pencapaian target kinerja ESG ke dalam RKAP atau rencana kerja tahunan.

3. Hasil Asesmen Faktor ESG

Asesmen faktor ESG pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dilaksanakan berdasarkan pada metode dan prosedur penilaian yang diatur dalam Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Asesmen Penerapan Faktor *Environment, Social, and Governance* pada BUMN. Aspek yang dinilai terangkum dalam 13 isu strategis dan 110 indikator penilaian. Penerapan faktor ESG yang dinilai meliputi faktor lingkungan, faktor sosial, faktor tata kelola, dan faktor finansial. Hasil asesmen penerapan faktor ESG pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2022 menunjukkan nilai agregat faktor ESG sebesar **67,42** dengan predikat "**Cukup Baik**". Nilai agregat tersebut merupakan capaian penerapan faktor ESG pada aspek-aspek berikut:

No	Faktor-Faktor ESG	Bobot	Nilai	Capaian (%)
A.	Faktor Lingkungan (E)	20,00	9,92	49,60%
B.	Faktor Sosial (S)	35,00	31,02	88,03%
C.	Faktor Tata Kelola (G)	20,00	11,20	56,00%
D.	Faktor Finansial (D)	25,00	15,28	61,12%
	Nilai Agregat ESG	100,00	67.42	67,42%

a. Kepatuhan Perusahaan terhadap Peraturan yang Berlaku

Sampai saat ini PT KAI (Persero) belum pernah mendapat surat teguran dari pihak ketiga terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan/UU ESG. Kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku dalam kerangka aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, sebagai berikut:

1) Aspek Lingkungan

Komitmen PT KAI (Persero) terhadap kelestarian lingkungan merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan dan turunannya, yaitu:

- a) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, diratifikasi oleh PT KAI dengan menetapkan Peraturan Direksi No. PER.U/KL.104/X/2/KA-2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Izin Lingkungan Peraturan Menteri LH No.13 Tahun 2010 Tentang UKL-UPL dan SPPL.
- b) Peraturan Menteri LH No.16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, diratifikasi dengan menetapkan Peraturan Direksi No. PER.U/KL.104/X/2/KA-2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan dan Instruksi Direksi No. 6/PR.904/KA-2011 tentang Pembuatan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) atau Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 101 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diratifikasi dengan menetapkan Keputusan Direksi No KEP.U/KS.101/IV/1/KA-2017 tentang Pengelolaan Limbah di Daerah Operasi, Divisi Regional, Balai Yasa, Gudang Persediaan dan Anak Perusahaan.
- d) Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Instruksi No. 2/KM.203/KA-2017 tentang Pengelolaan Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), diratifikasi dengan menetapkan Keputusan Direksi No. KEP.U/PL/402/VII/2/KA-2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penghapusan dan Penjualan Barang Limbah di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
- e) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.

2) Aspek Tata Kelola

Dalam aspek tata kelola, PT KAI (Persero) telah menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN. Dan sudah meratifikasi Peraturan Menteri BUMN Nomor 2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Kegiatan Korporasi Signifikan dengan menetapkan Peraturan Direksi Nomor PER.KL/KL.104/VIII//1/KA-2022 tentang Pedoman Tata Kelola Data (Data Governance).

Namun demikian, Annual Report (AR) dan Sustainability Report (SR) perusahaan tahun 2022 terlambat diterbitkan dikarenakan Laporan Keuangan perusahaan masih dalam proses pemeriksaan atau audit oleh KAP RSM.

b. Analisis Materialitas atas Isu-Isu Strategis

Dalam penentuan isu strategis faktor ESG, PT KAI (Persero) belum mempunyai kebijakan terkait kriteria dan pemetaan peluang bisnis yang secara signifikan mempengaruhi kondisi perusahaan dalam kerangka faktor-faktor ESG dan menjadi dasar untuk penentuan isu strategis. PT KAI juga belum memiliki kebijakan terkait penentuan topik material pengungkapan informasi keberlanjutan, kebijakan untuk mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan perseroan dan belum menganalisis kebutuhan atau harapan dari para pemangku kepentingan tersebut.

Penetapan isu strategis yang akan menjadi topik material ESG, dilakukan PT KAI (Persero) melalui Focus Discussion Group (FGD) oleh unit penyusun laporan SR yang selanjutnya juga dilakukan Identifikasi pemangku kepentingan. Selanjutnya dilakukan penyebaran kuesioner kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal yang sudah diidentifikasi, dengan materi kuesioner berisi beberapa pilihan isu strategis yang nanti akan ditetapkan sebagai topik material. Hasil kuesioner digambarkan pada matrik dan dipilih isu strategis dengan rating tertinggi selanjutnya ditetapkan 5 (lima) topik sebagai topik material KAI, diantaranya Anti-korupsi, Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan,

Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Keselamatan dan Kesehatan Pelanggan. PT Kereta Api Indonesia (Persero) seperti yang telah diungkapkan dalam *sustainability reportnya* menetapkan faktor sosial sebagai area yang paling berdampak dari kegiatan perusahaan dan sebagai dasar *scorecard* yang digunakan dalam penilaian penerapan ESG. Beberapa hal yang belum dilakukan oleh PT KAI (Persero) dalam menetapkan isu strategis ESG yang menjadi topik material pengungkapan informasi keberlanjutan yaitu:

- 1) Belum menggunakan lembaga independen untuk melakukan penilaian dan pengukuran risiko (ESG Risk Rating).
- 2) Hasil penilaian risiko faktor lingkungan dan sosial yang sudah disusun, tidak dipertimbangkan dalam analisis materialitas topik keberlanjutan.
- 3) PT KAI (Persero) belum menunjuk pihak independen untuk melakukan asurans atau penjaminan terhadap informasi yang terkait dengan faktor-faktor ESG.

c. Penilaian atas Faktor Lingkungan

- 1) Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan atas aktivitas bisnis perusahaan yang terkait dengan lingkungan dan transparansi pengungkapannya kepada pemangku kepentingan berdasarkan enam isu strategis yang ditetapkan (E1-E6), diketahui beberapa hal yang sudah dilakukan oleh PT KAI (Persero) sebagai berikut:

Terkait dengan Perubahan Iklim dan Keanekaragaman Hayati

- a) Mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan mitigasi atas risiko lingkungan antara lain dengan menetapkan penanggung jawab tindak lanjut pengendalian risiko lingkungan.
- b) Melakukan pelestarian atau konservasi atas keanekaragaman hayati dalam proses operasi antara lain dengan penanaman pohon di wilayah stasiun dan kantor Daop / Divre.
- c) Menyatakan komitmen atau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait lingkungan atau keanekaragaman hayati yang dilakukan dengan memastikan

pemenuhan seluruh persyaratan lingkungan mencakup Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

d) mengungkapkan dampak pada keanekaragaman hayati atau sektor lingkungan yang terkait.

Terkait dengan Pengurangan Emisi

a) Menggunakan standar pelaporan yang relevan sebagai dasar perhitungan atau target pengurangan emisi karbon.

b) Menghitung emisi GRK (Scope 1) dilakukan dengan mengalikan data konsumsi energi dengan faktor emisi. Standar yang digunakan baku mutu emisi gas buang lokomotif balai teknologi termodinamika motor dan propulsi – brin 08 des 2021. Genset: Salvadoran standard, Permen LHK no. 11 tahun 2021 baku mutu emisi gas buang lokomotif: standar emisi pabrikan.

c) Menghitung emisi GRK yang dihasilkan dari penggunaan listrik KAI dihitung dengan average grid emission factor yang dikeluarkan Kementerian ESDM merujuk RUPTL PLN 2015-2024 yaitu sebesar 0,934 kgCO₂/kWh (2017).

d) Intensitas emisi GRK scope 3 (perjalanan dinas) dihitung dengan kalkulator karbon ICAO (International Civil Aviation Organization/ Asosiasi Penerbangan Sipil Internasional).

e) Memiliki upaya atau inisiasi operasi baru untuk mereduksi emisi gas rumah kaca dari operasi *business as usual* dengan menggunakan energi terbarukan di Stasiun Batang yaitu penggunaan Energi Tenaga Surya atau Matahari untuk memenuhi kebutuhan listrik di stasiun. mengganti penggunaan bahan bakar solar dengan bahan bakar jenis Biosolar (B30) yang merupakan energi terbarukan yang terbuat dari 30% kelapa sawit dan 70% solar. KAI jg melakukan uji statis dan uji dinamis konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar LNG dengan menggunakan sistem DDF, pemeliharaan kendaraan operasional dan pengujian emisi gas buang secara berkala dan secara berkala mengganti kendaraan operasional dengan usia kendaraan yang lebih

muda, yang emisi gas buangnya lebih ramah lingkungan dan hemat bahan bakar.

Terkait dengan Efisiensi Sumber Daya Air

- a) menjelaskan informasi terkait jumlah air yang digunakan atau air yang diambil untuk operasi baik dari PDAM maupun dari air tanah.
- b) menjelaskan jenis dan bentuk limbah/sampah yang dihasilkan serta metode pengelolaannya sesuai dengan Keputusan Direksi KAI Nomor: KEP.U/ KS.101/IV/1/ KA-2017 tanggal 4 April 2017 tentang Pengelolaan Limbah di Daerah Operasi, Divisi Regional, Balai Yasa, Gudang Persediaan, dan Anak Perusahaan, pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasi perusahaan merupakan bagian dari kegiatan usaha. Perseroan berupaya mengelola limbah secara baik dan benar, terpelihara, terkontrol dan teruji untuk meminimalisasi dampak lingkungan.

Terkait Pengelolaan Limbah dan Polutan

- a) Membuat dan mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebanyak 38 unit.
- b) mengukur limbah yang dihasilkan dari aktivitas operasional, produksi, dan jasa yang dilakukan
- c) Keputusan Direksi KAI Nomor: KEP.U/ KS.101/IV/1/ KA-2017 tanggal 4 April 2017 tentang Pengelolaan Limbah di Daerah Operasi, Divisi Regional, Balai Yasa, Gudang Persediaan, dan Anak Perusahaan, pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasi perusahaan merupakan bagian dari kegiatan usaha. Perseroan berupaya mengelola limbah secara baik dan benar, terpelihara, terkontrol dan teruji untuk meminimalisasi dampak lingkungan. Kebijakan telah mengidentifikasi limbah hasil operasi dan dampaknya.
- d) mengungkapkan zat-zat prioritas dalam efluen yang patut diperhatikan pembuangannya, yang berasal dari limbah cair maupun limbah padat.

- e) memiliki daftar polutan yang dihasilkan atau digunakan selama proses produksi atau operasi (Report of analysis dari Adhikari Lab tahun 2022).
- f) mencegah dan mengontrol polusi yang dihasilkan dalam proses produksi/operasi perusahaan antara lain dengan pemantauan tiap 6 bulan oleh konsultan (Report of analysis dari Adhikari Lab tahun 2022).

Terkait Perbaikan Proses Bisnis dan *Supply Chain*

- a) menerapkan program ramah lingkungan dengan menggunakan material yang ramah lingkungan umum berbasis listrik, termasuk pengoperasian KRL Jabodetabek, pengoperasian KRL Yogyakarta, pembangunan LRT Jabodebek, serta pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung. Upaya lain yang dilakukan KAI dalam mengurangi emisi yang dihasilkan, ditunjukkan dengan pemakaian bahan bakar B30, penggunaan panel surya di stasiun Batang, uji statis dan uji dinamis konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar LNG dengan menggunakan sistem DDF.
- b) mengungkapkan total konsumsi energi dalam organisasi baik yang berasal dari sumber daya tak terbarukan dan energi terbarukan. Pada tahun 2021, intensitas pemakaian energi per penumpang yaitu sebesar 0,044 gigajoule/penumpang meningkat sebesar 33% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 0,033 gigajoule/penumpang. Sedangkan intensitas pemakaian energi per ton yaitu sebesar 0,135 gigajoule/ton menurun 1,5% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 0,137 gigajoule/ton.
- c) menghitung dan mengungkapkan total konsumsi energi dari sumber terbarukan yaitu penggunaan BBM Biosolar (B30) dalam gigajoule, listrik, disertai dengan intensitas pemakaian energi
- d) menghitung total emisi GRK yang dihasilkan secara langsung (Cakupan 1) dan tidak langsung (Cakupan 2).

2) Berdasarkan hasil asesmen diketahui bahwa PT KAI (Persero) pada tahun 2022 menghasilkan emisi karbon seluruhnya sebesar 8.492,41 ton CO₂e (total emisi *Scope 1*, *Scope 2*, dan *Scope 3* yang dihitung BUMN). Apabila dibandingkan kondisi tahun 2021, Perseroan belum berhasil mereduksi emisi GRK. Selain itu, perseroan juga belum menetapkan tahun *baseline*. Perhitungan GRK (*scope 1*) dilakukan dengan mengalikan data konsumsi energi yang berasal dari BBM-Diesel dengan faktor emisi. Untuk GRK (*scope 2*) didapat dari perkalian antara konsumsi listrik (dalam kWh per tahun) dengan *average grid emission factor* yang dikeluarkan Kementerian ESDM merujuk RUPTL PLN 2015-2024, yaitu sebesar 0,934 kgCO₂/kWh (2017). Sedangkan untuk intensitas emisi GRK (*scope 3*) perjalanan dinas dihitung dengan kalkulator karbon ICAO (*International Civil Aviation Organization/Asosiasi Penerbangan Sipil Internasional*). Komitmen perseroan untuk menurunkan emisi GRK sebagai bentuk tanggung jawab korporasi terhadap lingkungan dan dukungan pencapaian SDGs 13 terkait perubahan iklim dengan cara melakukan adaptasi perubahan iklim serta ikut berkontribusi menurunkan emisi karbon, menggunakan energi secara lebih efisien dan mendukung penerapan energi baru terbarukan, telah dituangkan dalam Kebijakan Nomor KS.102/XII/1/KA-2022. Upaya ini dilakukan untuk mendukung target nasional reduksi emisi (NZE) pada tahun 2030 sebesar 915 juta ton CO₂e atau 31,89% (ENDC 2022) reduksi dengan asumsi Business as Usual (BAU). Kendala perseroan dalam mereduksi GRK disebabkan perusahaan bertahap mengoptimalkan kembali operasional perjalanan kereta api pasca pandemi Covid-19.

3) Transisi Penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

Dalam rangka mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, perseroan telah menginisiasi kegiatan operasi menggunakan EBT, seperti pembangunan dan pengembangan sistem transportasi KAI yang rendah emisi (*low carbon emission*) dan ramah lingkungan, yaitu pengembangan moda transportasi umum berbasis listrik, termasuk pengoperasian KRL Jabodetabek, pengoperasian KRL Yogyakarta, pembangunan LRT Jabodebek, serta pembangunan Kereta Cepat

Jakarta Bandung. Upaya lain yang dilakukan KAI dalam mengurangi emisi yang dihasilkan, ditunjukkan dengan pemakaian bahan bakar B30 serta penggunaan panel surya. Dalam periode pengawasan, perseroan telah mengkonsumsi energi sebesar 7.641.614.700 *Gigajoules* dari penggunaan 261.343.226 Liter penggunaan BBM (B30). Perseroan telah mengganti penggunaan bahan bakar solar dengan bahan bakar biosolar (B30), yang merupakan energi baru terbarukan yang terbuat dari 30% kelapa sawit dan 70% solar. Tingkat bauran EBT atas transisi EBT di perseroan tersebut telah selaras dengan kebijakan nasional terkait pencapaian bauran EBT paling sedikit 23% pada tahun 2025 sebagaimana diatur dalam PP Nomor 79 Tahun 2014. Selain pencapaian tingkat bauran EBT dari penggunaan BBM, inisiasi transisi energi di perseroan juga telah mampu menghasilkan efisiensi konsumsi energi sebesar 60,01 MWh listrik yang dihasilkan dari panel surya atau setara dengan 2.1603,6 *Gigajoule*.

- 4) Titik kritis aspek faktor lingkungan yang memerlukan perbaikan/ peningkatan, yaitu:
 - a) Belum mengimplementasikan rencana mitigasi dan adaptasi proses bisnis terkait risiko lingkungan pada level korporat yang memuat jadwal pelaksanaan mitigasi risiko.
 - b) Belum mengidentifikasi risiko strategis dan kesempatan yang diakibatkan oleh perubahan iklim yang berpotensi menghasilkan perubahan substantif dalam operasi, pendapatan, atau pengeluaran.
 - c) Belum menetapkan Baseline sebagai tahun dasar penghitungan reduksi emisi GRK (dalam juta ton CO₂eq).
 - d) Penghitungan total emisi Cakupan 1, Cakupan 2, dan/atau Cakupan 3 belum dilakukan verifikasi oleh pihak independen.
 - e) Jumlah beban emisi yang dihasilkan belum berdasarkan segmen bisnis non angkutan (KAI property).
 - f) Perusahaan telah menghitung dan mengungkapkan realisasi emisi GRK, namun belum menetapkan target pengurangan reduksi emisi GRK mulai dari tahun dasar sampai pada tahun yang ditetapkan,

meskipun demikian Roadmap target Reduksi Emisi GRK untuk tahun 2023 sedang dalam proses pembuatan.

- g) Belum dilakukannya evaluasi penurunan emisi GRK melalui mekanisme pencapaian target penurunan emisi GRK sebagai salah satu KPI manajemen.
- h) Belum mengungkapkan target dan realisasi reduksi emisi kumulatif berikut jumlah volume reduksi yang telah dihasilkan.
- i) Belum berupaya melakukan penghematan atau optimalisasi penggunaan air (misal: daur ulang air limbah/buangan yang digunakan kembali, pengecekan instalasi air secara berkala).
- j) Belum memiliki rencana aksi untuk meminimalkan pengaruh kegiatan operasi pada daerah rawan sumber daya air (daerah kering).
- k) Belum menetapkan standar minimum untuk kualitas pembuangan limbah air (efluen) yang dihasilkan.
- l) Belum mengidentifikasi dampak ekonomis terkait penggunaan air sebagai akibat dari operasi bisnis (misal perbandingan biaya penggunaan air dari tahun sebelumnya).
- m) Belum melakukan pemantauan terhadap kualitas buangan limbah.
- n) Belum mengungkapkan dampak negatif atas operasi perusahaan yang menghasilkan pencemaran udara terhadap lingkungan atau masyarakat sekitar.
- o) Belum melakukan inisiasi kebijakan dalam penggunaan energi baru terbarukan.
- p) Belum adanya Indikator keberhasilan penerapan program peningkatan kualitas kinerja di rantai pasokan.
- q) Belum melakukan monitoring terhadap penerapan program peningkatan kualitas kinerja di rantai pasokan secara berkala.
- r) Belum menentukan jumlah efisiensi energi yang dihasilkan atas penggunaan energi dari sumber terbarukan.
- s) Belum menentukan total emisi tidak langsung lainnya yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan di seluruh rantai nilai (Cakupan 3).

t) Belum mengungkapkan jumlah reduksi emisi GRK dalam laporan keberlanjutan atau media lainnya.

u) Belum mengungkapkan adanya rencana kerja sama atau kegiatan reduksi emisi GRK dengan melibatkan pihak ketiga, organisasi nirlaba, pemerintah asing, peneliti, atau masyarakat lokal lainnya.

Sebagai bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas korporasi terhadap agenda pembangunan berkelanjutan pada faktor lingkungan, kami sarankan kepada Direksi PT KAI (Persero) agar:

a) mengimplementasikan rencana mitigasi dan adaptasi proses bisnis terkait risiko lingkungan pada level korporat yang memuat jadwal pelaksanaan mitigasi risiko.

b) mengidentifikasi risiko dan kesempatan yang diakibatkan oleh perubahan iklim yang berpotensi menghasilkan perubahan substantif dalam operasi, pendapatan, atau pengeluaran.

c) menetapkan baseline sebagai tahun dasar penghitungan reduksi emisi GRK (dalam juta ton CO₂eq).

d) Penghitungan total emisi Cakupan 1, Cakupan 2, dan/atau Cakupan 3 dilakukan verifikasi oleh pihak independen.

e) menghitung jumlah beban emisi yang dihasilkan berdasarkan seluruh segmen bisnis dan sumber emisi.

f) menetapkan target pengurangan reduksi emisi GRK mulai dari tahun dasar sampai pada tahun yang ditetapkan.

g) evaluasi penurunan emisi GRK melalui mekanisme pencapaian target penurunan emisi GRK sebagai salah satu KPI manajemen.

h) mengungkapkan target dan realisasi reduksi emisi kumulatif berikut jumlah volume reduksi yang telah dihasilkan dalam sustainability report.

i) berupaya melakukan penghematan atau optimalisasi penggunaan air (misal: daur ulang air limbah/buangan yang digunakan kembali, pengecekan instalasi air secara berkala).

j) membuat rencana aksi untuk meminimalkan pengaruh kegiatan operasi pada daerah rawan sumber daya air (daerah kering).

- k) menetapkan standar minimum untuk kualitas pembuangan limbah air (efluen) yang dihasilkan.
- l) mengidentifikasi dampak ekonomis terkait penggunaan air sebagai akibat dari operasi bisnis (misal analisis perbandingan biaya penggunaan air dari tahun sebelumnya).
- m) melakukan pemantauan terhadap kualitas buangan limbah.
- n) mengungkapkan dampak negatif atas operasi perusahaan yang menghasilkan pencemaran udara terhadap lingkungan atau masyarakat sekitar.
- o) inisiasi kebijakan dalam penggunaan energi baru terbarukan.
- p) menetapkan Indikator keberhasilan penerapan program peningkatan kualitas kinerja di rantai pasokan.
- q) melakukan monitoring terhadap penerapan program peningkatan kualitas kinerja di rantai pasokan secara berkala.
- r) menentukan jumlah efisiensi energi yang dihasilkan atas penggunaan energi dari sumber terbarukan.
- s) menentukan total emisi tidak langsung lainnya yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan di seluruh rantai nilai (Cakupan 3).
- t) mengungkapkan jumlah reduksi emisi GRK dalam laporan keberlanjutan atau media lainnya.
- u) mengungkapkan adanya rencana kerja sama atau kegiatan reduksi emisi GRK dengan melibatkan pihak ketiga, organisasi nirlaba, pemerintah asing, peneliti, atau masyarakat lokal lainnya.

d. Penilaian atas Faktor Sosial

- 1) Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan atas aktivitas bisnis perusahaan yang terkait dengan sosial dan transparansi pengungkapannya kepada pemangku kepentingan berdasarkan tiga isu strategis yang ditetapkan (S1-S3), diketahui beberapa hal yang telah dilakukan oleh PT KAI (Persero) yaitu:

Terkait Investasi pada Tenaga

- a) memperhatikan atau menggunakan standar atau ketentuan regulasi untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan keamanan pegawai, masyarakat, dan konsumen.
- b) mempersiapkan dan merespons keadaan darurat dan pencegahan kecelakaan besar di seluruh lingkungan kerja.
- c) menerapkan pengelolaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan yang melibatkan kontraktor, pemasok maupun pihak ketiga lainnya.
- d) Pegawai dilibatkan dalam penerapan maupun pengelolaan K3.
- e) menyusun protokol komunikasi internal maupun komunikasi eksternal dengan pemangku kepentingan lain seperti kontraktor, pemasok, pengunjung, tamu dan masyarakat terkait program K3.
- f) memasukkan keberhasilan pelaksanaan keamanan dan keselamatan kerja sebagai bagian pemenuhan Indikator Kinerja Kunci (KPI) manajemen.
- g) memiliki strategi/program untuk mempertahankan karyawan-karyawan baik karyawan tetap maupun karyawan purna waktu maupun karyawan paruh waktu meliputi antara lain program remunerasi yang baik.
- h) memiliki kebijakan atau ketentuan yang mengatur kepastian kesejahteraan karyawan setelah berakhirnya masa kerja (usia pensiun) baik yang bersifat mandatory ataupun ketentuan internal perusahaan.
- i) membuat program cuti melahirkan baik bagi karyawan laki-laki maupun perempuan dan menjamin hak-hak nya tetap terpenuhi termasuk hak menempati posisi yang sama saat kembali bekerja.
- j) membuat kebijakan yang memberikan hak berkumpul dan berserikat bagi karyawannya termasuk program pertemuan dengan serikat pekerja dan menuangkan kesepakatan hak dan kewajiban tersebut dalam perjanjian kerja.

- k) Pelaporan tentang kebijakan tentang pemberian hak berkumpul dan berserikat bagi pekerja, keberadaan wadah serikat pekerja, program pertemuan dengan serikat pekerja, atau dispute antara perusahaan dan serikat pekerja.
- l) membentuk komunitas pegawai sebagai wadah inklusif pekerja perempuan untuk meningkatkan kemampuan dan menyiapkan kader pemimpin di masa mendatang.
- m) memberikan kesempatan kerja pada pegawai disabilitas.
- n) dalam proses perekrutan pekerja, perusahaan memberikan kesempatan setara bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat setempat.
- o) terdapat hasil audit atau evaluasi atas implementasi standar K3 yang diterapkan perusahaan baik oleh pihak internal atau independen.
- p) terdapat hasil audit atau evaluasi atas kesehatan pegawai perusahaan berdasarkan pedoman praktis atau regulasi yang diterbitkan pemerintah.
- q) adanya daftar kontraktor, pemasok, atau pihak ketiga lainnya yang diklasifikasikan berdasarkan kontraktor yang mengelola pekerjaan dengan risiko tinggi, risiko menengah, dan risiko rendah.
- r) adanya perwakilan pekerja di kepanitiaan atas pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja atau perwakilan di serikat pekerja untuk menyampaikan aspirasi pasal-pasal terkait K3 di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
- s) adanya safety induction terkait K3 kepada pihak internal maupun eksternal. Induction juga termasuk safety action atas rencana peningkatan aspek keselamatan pemangku kepentingan oleh manajemen.

Hubungan kepada Konsumen

- a) menerapkan kebijakan untuk menjaga kerahasiaan data dan/atau keamanan serta keselamatan produk bagi konsumen atau pengguna akhir.

- b) mengidentifikasi jumlah insiden karyawan dan kontraktor terkait keselamatan kerja serta menentukan langkah-langkah pencegahan terjadinya insiden fatalitas kerja.
- c) mengevaluasi dampak negatif atas produk/jasa yang diberikan dan melakukan langkah mitigasi penanggulangan atas potensi dampak negatif tersebut.
- d) melakukan pengukuran standar layanan penyediaan produk/jasa melalui pemenuhan standar pelayanan minimal yang ditetapkan internal manajemen atau badan regulator/pemerintah.
- e) mencatat dan melaporkan seluruh pertanyaan dan keluhan konsumen atas penggunaan produk/jasa.
- f) melaporkan tindak lanjut atas pertanyaan dan keluhan yang diberikan konsumen atas penggunaan produk/jasa.
- g) melaporkan insiden terkait kerahasiaan, keamanan atau keselamatan atas penggunaan produk barang/jasa oleh konsumen.
- h) mengungkapkan hasil pemetaan terhadap kepuasan konsumen.
- i) menetapkan kriteria indeks kepuasan (baik, kurang baik, sangat baik) dan melaporkan kendala yang dihadapi konsumen.

Hubungan kepada Masyarakat

- a) melaporkan kerentanan dan risiko terhadap masyarakat lokal dari potensi dampak negatif operasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - b) melaporkan dampak negatif operasi terhadap masyarakat setempat meliputi penggunaan zat-zat berbahaya yang berdampak pada lingkungan dan kesehatan manusia.
 - c) melaporkan realisasi program TJSL sebagai dukungan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB).
- 2) Informasi Terkait Nilai Realisasi Program TJSL dalam Rangka Dukungan Korporasi Terhadap Pencapaian TPB

Laporan Manajemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT KAI periode sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, ditetapkan Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) RKA Tahun 2022 berdasarkan program TJSL prioritas dan Creating Shared Value (CSV) sebagai berikut:

- 1) Tujuan 1 (Kebutuhan Dasar Korban Bencana),
- 2) Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Kesejahteraan Penduduk),
- 3) Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas),
- 4) Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi),
- 5) Tujuan 11 (Kota dan Pemukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan). dan
- 6) Tujuan 15 (Ekosistem Darat)

Penyaluran Program TJSL PT Kereta Api Indonesia (Persero) sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp17.883.198.463,- atau 91,49% dari RKA Program TJSL tahun 2022 sebesar Rp19.545.981.930,-.

Tren realisasi TJSL lima tahunan sebesar Rp23.452.058.316,00 menghasilkan dampak ekonomis tidak langsung bagi sosial lingkungan, namun belum dilakukan penghitungan secara kuantitatif. Program sosial lingkungan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Perbandingan rata-rata nilai ekonomi ditahan dengan rata-rata nilai ekonomi yang didistribusikan setelah diperhitungkan biaya operasi adalah 3,5% (nilai indikator ekonomi). Hal tersebut menunjukkan bahwa program-program ESG yang diterapkan oleh perseroan telah signifikan memberikan dampak ekonomi terhadap pembangunan berkelanjutan.

- 3) Titik kritis tata kelola faktor sosial yang memerlukan perbaikan/peningkatan, yaitu:
 - a) Program remunerasi karyawan tetap telah dilaporkan, namun laporan belum termasuk karyawan outsource. Pelaporan remunerasi antara lain meliputi: asuransi jiwa; perawatan kesehatan; tanggungan disabilitas dan difabel; cuti melahirkan; persiapan masa pensiun; dan kepemilikan saham.

- b) Belum mengungkapkan respon perusahaan adanya praktik tidak baik/tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan pada karyawan internal ataupun vendor.
- c) Belum mengimplementasikan kebijakan seleksi pegawai yang mengedepankan kesetaraan kesempatan dan gender.
- d) Belum mengidentifikasi dan membuat strategi untuk memenuhi hak masyarakat adat atau setempat yang terdampak proses operasi (antara lain meliputi hak untuk mempertahankan adat-istiadat dan institusi mereka, hak untuk menentukan nasib mereka sendiri, hak atas otonomi dan pemerintahan mereka sendiri, hak untuk menempati dan menggunakan tanah mereka)
- e) Belum melaporkan insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat (termasuk rencana mediasi yang sedang dilaksanakan; rencana mediasi yang telah diterapkan; insiden yang tidak lagi menjadi subjek tindakan)

Sebagai bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas korporasi terhadap agenda pembangunan berkelanjutan pada faktor sosial, kami sarankan kepada Direksi PT KAI (Persero) agar:

1. Melaporkan program remunerasi untuk karyawan *outsourc*e antara lain meliputi: asuransi jiwa; perawatan kesehatan; tanggungan disabilitas dan difabel; cuti melahirkan; persiapan masa pensiun; dan kepemilikan saham
2. Mengungkapkan respon perusahaan adanya praktik tidak baik/tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan pada karyawan internal ataupun vendor.
3. Mengimplementasikan kebijakan seleksi pegawai yang mengedepankan kesetaraan kesempatan dan gender.
4. Mengidentifikasi dan membuat strategi untuk memenuhi hak masyarakat adat atau setempat yang terdampak proses operasi (antara lain meliputi hak untuk mempertahankan adat-istiadat dan institusi mereka, hak untuk menentukan nasib mereka sendiri, hak atas otonomi dan pemerintahan

mereka sendiri, hak untuk menempati dan menggunakan tanah mereka).

5. Melaporkan insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat (termasuk rencana mediasi yang sedang dilaksanakan; rencana mediasi yang telah diterapkan; insiden yang tidak lagi menjadi subjek tindakan).

e. Penilaian atas Faktor Tata Kelola

- 1) Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan atas aktivitas bisnis perusahaan yang terkait dengan perumusan kebijakan tata kelola dan implementasinya serta transparansi pengungkapannya kepada pemangku kepentingan atas tiga isu strategis yang ditetapkan (G1-G3), diketahui beberapa hal yang sudah dilakukan oleh PT KAI (Persero) sebagai berikut:

Penetapan Kebijakan dan Isu Etika

Memiliki memiliki pedoman/prosedur yang telah mempertimbangkan penerapan faktor-faktor ESG di perusahaan.

Organ Pendukung

- a) memiliki divisi khusus yang bertanggung jawab dalam menjalankan penerapan keuangan berkelanjutan yaitu Divisi *Vice President Corporate Social Responsibility (USS)* dengan tugas pokok dan tanggung jawab mengelola Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Community Relations, baik internal maupun eksternal perusahaan di seluruh aktivitas Perseroan.
- b) telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berisikan Koordinator UPG yakni *Executive Vice President Corporate Secretary*; dan Pengelola UPG yakni *Unit Quality Assurance and Good Corporate Governance*.

Peran Board dan Posisi Eksternal

- a) Penanggung jawab penyusunan laporan keberlanjutan pada tiap-tiap divisi sudah melakukan identifikasi pemangku kepentingan dan

metode pendekatan keterlibatan pemangku kepentingan, melalui Focus Discussion Group (FGD).

- b) sudah menentukan tingkat/topik materialitas faktor ESG.
 - c) memiliki kebijakan pencegahan dan pengendalian anti fraud dan mekanisme penanganan pengaduan terkait dugaan anti fraud atau pelanggaran etika melalui saluran pengelolaan *Whistle Blowing System* (WBS).
 - d) terdapat pembahasan topik ESG dalam rapat-rapat Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
- 2) Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan atas perumusan kebijakan tata kelola dan implementasinya serta transparansi pengungkapannya kepada pemangku kepentingan atas tiga isu strategis yang ditetapkan (G1-G3), masih ditemukan beberapa titik kritis yang memerlukan perbaikan atau peningkatan di PT KAI yaitu:
- a) Belum memiliki pedoman/prosedur yang mempertimbangkan penerapan faktor-faktor ESG yang terintegrasi untuk ketiga faktor ESG.
 - b) Belum memiliki kebijakan penentuan topik material pengungkapan informasi keberlanjutan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
 - c) Belum melakukan analisis kebutuhan/harapan para pemangku kepentingan tersebut sehingga survey yang dilakukan dengan instrumen pertanyaan yang tidak mengadopsi kebutuhan/harapan dari pemangku kepentingan.
 - d) Belum menetapkan target pencapaian faktor ESG ke dalam tujuan strategi jangka panjang yang realistis dan terukur (RJPP) dan belum menghubungkan rencana strategis dan pengukuran kinerja manajemen ke dalam topik-topik ESG.
 - e) Pencapaian target kinerja yang terkait dengan topik ESG belum seluruhnya termasuk ke dalam indikator kinerja (KPI) Direksi.
 - f) Belum menunjuk pihak independen untuk melakukan asurans/penjaminan terhadap informasi yg terkait dengan faktor ESG.

Sebagai bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas korporasi terhadap agenda pembangunan berkelanjutan pada faktor sosial, kami sarankan kepada Direksi PT KAI (Persero) agar:

1. Menetapkan kebijakan ESG perusahaan yang didalamnya minimal mengatur penentuan topik material pengungkapan informasi keberlanjutan dan identifikasi serta analisis kebutuhan atau harapan dari para pemangku kepentingan.
2. Menetapkan Road Map/ perencanaan penerapan ESG yang berisi minimal target pencapaian faktor ESG ke dalam tujuan strategi jangka panjang yang realistis dan terukur dan menghubungkan rencana strategis dan pengukuran kinerja manajemen ke dalam topik-topik ESG
3. Menetapkan pencapaian target kinerja yang terkait dengan topik ESG belum seluruhnya termasuk ke dalam indikator kinerja (KPI) Direksi dan RKAP.
4. PT KAI (Persero) menunjuk pihak independen untuk melakukan asurans/penjaminan terhadap informasi yang terkait dengan faktor ESG.

f. Pengukuran Dampak Ekonomis

Indikator kinerja finansial atas penerapan ESG pada BUMN dinilai berdasarkan dampak ekonomis perseroan terhadap kepentingan para pihak terkait, baik dampak ekonomi secara langsung maupun tidak langsung. Dampak ekonomi langsung perseroan dihitung berdasarkan nilai ekonomi ditahan sebagai berikut:

Tren nilai ekonomi lima tahunan sebesar Rp599.819.175.806 menunjukkan bahwa PT KAI (Persero) telah berhasil mendukung agenda pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan profitabilitas korporasi. Nilai ekonomi dalam aspek sosial dan lingkungan antara lain didistribusikan dalam bentuk program TJSL perseroan, sebagai berikut:

No	BUMN	2021 - Unaudited	2021	2020	2019	2018
1	Nilai Ekonomi yang dihasilkan					
a.	Pendapatan Angkutan Penumpang	6.964.025.371.000	2.363.286.232.000	2.864.336.074.000	9.644.402.985.000	8.324.540.621.000
b.	Pendapatan Angkutan Barang	9.314.749.201.000	7.456.829.687.000	6.301.587.852.000	6.868.633.888.000	6.317.462.328.000
c.	Pendapatan Pendukung Angkutan KA	791.580.846.000	672.143.192.000	661.790.923.000	940.436.373.000	823.500.413.000
d.	Pendapatan Non Angkutan	1.610.848.082.000	1.134.200.352.000	1.163.317.309.000	1.795.718.369.000	1.096.177.133.000
e.	Kompensasi Pemerintah	3.879.180.413.000	3.903.070.707.000	3.432.301.613.000	3.271.013.258.000	3.390.843.818.000
	Total Nilai Ekonomi yang dihasilkan	22.542.044.115.000	15.529.530.100.000	14.413.373.973.000	22.518.277.775.000	19.993.524.361.000
2	Nilai Ekonomi yang didistribusikan dalam bentuk:					
a.	Biaya Operasional	1.797.470.494.000	1.506.305.583.000	931.794.965.000	612.897.047.000	1.207.131.402.000
b.	Pembayaran Terhadap Pemerintah					
i.	Penggunaan Prasarana	221.025.373.000	414.889.721.000	339.633.923.000	953.436.900.000	1.288.840.952.000
ii.	Pembayaran Pajak	327.896.045.000	177.840.538.000	567.631.756.000	611.891.893.000	533.023.990.000
c.	Pembayaran Terhadap Pegawai	6.196.522.879.000	4.802.626.189.000	7.034.339.184.000	7.219.832.433.000	6.400.472.453.000
d.	Pembayaran kepada Pemilik modal				866.305.283.000	1.71.821.761.000
e.	Pembayaran kepada Masyarakat					
f.	Pembayaran kepada Pemasok	10.227.377.340.000	7.995.549.194.000	6.323.038.182.000	9.534.827.801.000	7.200.526.232.000
	Total Nilai Ekonomi yang didistribusikan	18.770.230.751.000	15.905.111.236.000	15.420.447.965.000	19.327.490.971.000	16.821.815.790.000
3	Pendapatan dan (Beban) Lain-lain	- 1.812.661.587.000	- 771.399.410.000	- 1.213.220.708.000	- 640.538.994.000	- 1.189.522.595.000
4	Merkuri (Beban) Pajak Penghasilan	- 442.518.984.000	- 121.794.803.000	- 464.037.029.000	- 575.400.273.000	- 413.603.333.000
5	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.537.615.118.000	425.195.643.000	- 1.736.237.692.000	1.979.047.518.000	1.531.582.989.000
6	Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Didistribusikan kepada Kepentingan Nonpengendal	- 91.544.480	- 62.735.570	- 44.507.882.000	- 47.395.984.000	- 10.638.037.000
7	Nilai Ekonomi yang ditahan - Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Didistribusikan kepada Induk	1.537.704.657.480	425.132.907.430	- 1.691.730.010.000	2.026.013.518.000	1.555.210.620.000

1) Berdasarkan hasil asesmen atas nilai ekonomi yang ditahan perusahaan atas penerapan faktor-faktor ESG, diketahui beberapa hal yang sudah dilakukan oleh PT KAI (Persero) yaitu:

- a) Memperkirakan nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dalam Sustainability Report, dimana tahun 2021 Pendapatan Penumpang sebesar Rp2.363.286.232.000,00 dan pendapatan barang sebesar Rp7.327.830.146,00.
- b) Mengungkapkan nilai ekonomi yang didistribusikan kepada para pemangku kepentingan, antara lain kepada pegawai (biaya operasional, gaji dan tunjangan karyawan, serta dana pensiun), penyedia modal (deviden), pemerintah (pajak dan retribusi), dan investasi kepada masyarakat (CSR atau TJSL) dalam Annual Report tahun 2021.
- c) Memiliki program inovasi terkait penerapan faktor ESG, yaitu penggunaan PLTS, bisnis digital meminimalisir penggunaan kertas, kemasan plastik ke ramah lingkungan.

2) Titik kritis faktor finansial yang memerlukan perbaikan/peningkatan yaitu:

- a) belum memiliki nilai ekonomi yang ditahan (nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dikurangi nilai ekonomi yang didistribusikan) secara lengkap dan andal serta bernilai positif.

- b) belum mengungkapkan dampak finansial yang diderita akibat perubahan iklim (apabila ada dalam ukuran rupiah).
- c) Jumlah nilai ekonomi yang dihasilkan oleh perusahaan belum seluruhnya dapat ditelusuri dengan nilai pendapatan dan biaya yang dilaporkan dalam laporan keuangan (audited)
- d) belum mengungkapkan dampak ekonomi tidak langsung atas investasi infrastruktur yang signifikan maupun dukungan layanan kepada stakeholders dan ukuran dampak harus dapat dikuantifikasi.
- e) belum mengungkapkan informasi ukuran dampak ekonomi yang dapat dikuantifikasi seperti jumlah investasi yang dikeluarkan, dimensi infrastruktur yang diinvestasikan, jumlah masyarakat yang terdampak, dsb.
- f) Nilai SROI belum meliputi seluruh kegiatan investasi sosial yang dikeluarkan.

Sebagai bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas korporasi terhadap agenda pembangunan berkelanjutan pada faktor sosial, kami sarankan kepada Direksi PT KAI (Persero) agar:

- 1) menghitung dan mengungkapkan nilai ekonomi yang ditahan secara lengkap, andal dan bernilai positif.
- 2) mengungkapkan dampak finansial akibat perubahan iklim.
- 3) menelusuri jumlah nilai ekonomi yang dihasilkan dengan nilai pendapatan dan biaya dalam laporan keuangan (audited).
- 4) menghitung dan mengungkapkan dampak ekonomi tidak langsung atas investasi infrastruktur yang signifikan.
- 5) mengungkapkan ukuran dampak ekonomi seperti jumlah, dimensi investasi serta jumlah masyarakat yang terdampak, dsb.
- 6) menghitung Nilai SROI yang meliputi seluruh kegiatan investasi sosial.



PERWAKILAN BPKP
PROVINSI JAWA BARAT



LAPORAN HASIL ASSESSMENT
PENERAPAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
TAHUN 2022

NOMOR. PE.05.02/LHP-90/PW10/4.1/2023
TANGGAL. 24 MARET 2023

Certified Company
ISO 9001:2015
No. 16 00 L 13192
Assessment Good Corporate Governance BUMN



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

**LAPORAN HASIL ASSESSMENT
PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PADA
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
TAHUN 2022**

**NOMOR : PE.05.02/LHP-90/PW10/4.1/2023
TANGGAL : 24 Maret 2023**

**LAPORAN HASIL ASSESSMENT
PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) TAHUN 2022**



Daftar Isi	Halaman
Ringkasan Eksekutif	1
BAB I – SIMPULAN DAN REKOMENDASI	3
A. Simpulan	3
1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan	4
2. Pemegang Saham dan RUPS	4
3. Dewan Komisaris	5
4. Direksi	7
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9
6. Aspek Lainnya	9
B. Rekomendasi	9
BAB II – URAIAN HASIL ASSESSMENT	
A. Data Umum	
1. Dasar Penugasan	15
2. Tujuan <i>Assessment</i>	16
3. Ruang Lingkup dan Periode <i>Assessment</i>	16
4. Metodologi <i>Assessment</i>	17
5. Batasan Tanggung jawab	19
6. Data Umum Perusahaan	20
a. Profil Perusahaan	20
b. Visi dan Misi Perusahaan	22
c. Kegiatan Pokok Perusahaan	23
d. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi	26
e. Data Keuangan	29
B. Uraian Hasil <i>Assessment</i>	31
1. Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan	31
2. Aspek Pemegang Saham dan RUPS	40
3. Aspek Dewan Komisaris	58
4. Aspek Direksi	94
5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi	156
6. Aspek Lainnya	158
Lampiran-Lampiran	
Lampiran I Ringkasan Hasil Penilaian atas Penerapan GCG	
Lampiran II Daftar Capaian Penerapan GCG per Indikator	
Lampiran III Daftar Usulan Rekomendasi Hasil <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun 2022	
Lampiran IV Data Keuangan Tahun 2019-2022	



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Raya Cibeureum, Nomor 50, Bandung
Telepon: (022) 6015108, Faksimile: (022) 6032096
E-mail: jabar@bpkp.go.id, Website: <https://www.bpkp.go.id>

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengembangan dan penerapan *Good Corporate Governance* merupakan wujud komitmen perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitasnya dalam jangka panjang yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan berupa peningkatan kinerja (*performance*) dan penciptaan citra perusahaan yang baik (*good corporate image*).

Assessment terhadap penerapan GCG pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) penerapan GCG, sehingga area-area yang memerlukan perbaikan/penyempurnaan dapat diidentifikasi.

Guna menghindarkan kerancuan dalam penggunaan laporan dan pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan perlu disampaikan bahwa *assessment* penerapan GCG ini, tidak ditujukan untuk memperbandingkan capaian penerapan praktik-praktik GCG antar Organ Perusahaan, yaitu antara Direksi dengan Dewan Komisaris maupun antara keduanya dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Pemegang Saham. Masing-masing organ perusahaan tersebut diukur dengan kriteria tersendiri sesuai dengan struktur dan proses terbaik atau ideal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan *assessment* yang kami lakukan atas penerapan praktik-praktik GCG, dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencapai predikat kategori **“Sangat Baik”**, dengan skor **92,424**.

Capaian skor untuk masing-masing aspek *governance* terinci sebagai berikut :

No	Aspek Governance	Bobot	Skor	Capaian (%)	Predikat
I	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan	7	6,905	98,641	Sangat Baik
II	Pemegang Saham dan RUPS	9	8,315	92,387	Sangat Baik
III	Dewan Komisaris	35	31,683	90,525	Sangat Baik
IV	Direksi	35	31,719	90,627	Sangat Baik
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9	8,802	97,796	Sangat Baik
VI	Aspek Lainnya	5	5,000		
	TOTAL	100	92,424		Sangat Baik

Rekomendasi terhadap area-area yang perlu penyempurnaan kami sampaikan secara lebih rinci dalam bagian lampiran laporan ini.

Rekomendasi perbaikan atas kelemahan dalam penerapan GCG tidak akan berarti apapun apabila tidak segera dibuat rencana aksi perbaikan/penyempurnaannya. Tindak lanjut atas rencana aksi yang didasari dengan komitmen semua pihak yang terkait akan meningkatkan penerapan praktik GCG yang mengacu pada *best practices*, yang terus berkembang.

Bandung, 24 Maret 2023
Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Samono

Certified Company
ISO 9001:2015
No. 16 00 L 13192
Assessment Good Corporate Governance BUMN





BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Kami telah melakukan *assessment* penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) tahun 2022 yang mencakup enam aspek *governance* yaitu: Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan, Pemegang Saham dan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Pengungkapan Informasi dan Transparansi, dan Aspek Lainnya.

Berdasarkan *assessment* terhadap penerapan GCG pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk periode tahun 2022 yang dilakukan selama 25 (dua puluh lima) hari kerja dalam periode tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023, dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencapai skor 92,424. Capaian skor tersebut berada dalam kategori predikat “**Sangat Baik**”.

capaian skor tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Aspek <i>Governance</i>	Bobot	Skor	Capaian (%)	Predikat
I	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan	7	6,5	98,641	Sangat Baik
II	Pemegang Saham dan RUPS	9	8,315	92,387	Sangat Baik
III	Dewan Komisaris	35	31,683	90,525	Sangat Baik
IV	Direksi	35	31,719	90,627	Sangat Baik
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9	8,802	97,796	Sangat Baik
VI	Aspek Lainnya	5	5,000		
	TOTAL	100	92,424		Sangat Baik

Tabel di atas menggambarkan hasil perbandingan antara kondisi penerapan GCG pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan praktik terbaik (*best practices*) penerapan GCG.

Hal-hal yang memerlukan penanganan segera oleh Organ perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan

Perusahaan menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku, namun belum memasukkan materi substansi Pedoman Perilaku (CoC) dalam silabus program orientasi karyawan baru.

2. Pemegang Saham/RUPS

- a. Pemegang Saham/RUPS telah menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris di BUMN namun belum mengatur batasan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris menjadi Komisaris pada perusahaan swasta atau perusahaan lain/badan lain/BUMD dan BLU.
- b. Pemegang Saham/RUPS memberikan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), namun Pengesahan RKAP belum tepat waktu yaitu seharusnya dilaksanakan paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan.
- c. Pemegang Saham/RUPS telah memberikan persetujuan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS, namun pendokumentasian pembahasan pengambilan keputusan belum memadai dan masih terdapat pemberian persetujuan yang belum tepat waktu.
- d. Pemegang Saham/RUPS telah menetapkan Pedoman Penyusunan Kontrak Manajemen Direksi Kolegal dan Individu dan telah menetapkan Kontrak Manajemen berupa KPI Direksi Kolegal dan Individu namun belum memberikan penilaian atas capaian kinerja Direksi secara individu yang dituangkan dalam risalah RUPS.

- e. Pemegang Saham/RUPS telah memberikan persetujuan Laporan pelaksanaan Dewan Komisaris dalam RUPS Laporan Tahunan Perusahaan, namun persetujuan Laporan Tugas Dewan Komisaris termasuk KPI belum berdasarkan telaahan capaian kinerja Dewan Komisaris terkait pedoman penyusunan KPI dan laporan Dewan Komisaris belum terstandarisasi.

3. Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris telah melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris, namun pelaksanaan pelatihan belum sepenuhnya sesuai dengan KPI Dewan Komisaris dan belum seluruhnya dibuatkan laporan kegiatan pelatihan.
- b. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS, namun pemberian otorisasi atau rekomendasi belum seluruhnya sesuai dengan *Board Manual* atau masih terdapat pemberian rekomendasi yang melebihi 14 hari sejak usulan atau dokumen secara lengkap diterima oleh Dewan Komisaris.
- c. Dewan Komisaris telah menyusun rencana kerja setiap tahun yang memuat sasaran/ target yang ingin dicapai dan melaporkan secara tertulis kepada RUPS, namun penyampaian RKA Program Kerja dan Rencana Anggaran Direksi belum tepat waktu. Rancangan RKA Dewan Komisaris seharusnya diserahkan sebelum tanggal 1 Oktober namun di sampaikan pada tanggal 26 November tahun berjalan.
- d. Dewan Komisaris telah memberikan tanggapan atas rancangan RKAP namun belum menyajikan keselarasan/ketidakeselarasan RKAP dengan RJPP dalam tanggapan RKAP kepada Pemegang Saham.
- e. Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern perusahaan, namun belum melaksanakan telaah atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas dan telaah atas *internal control report*.

- f. Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan, namun belum memberikan penasehatan pelaksanaan sistem teknologi informasi yang dihasilkan dari telaah atas ITMP 2020-2024 dan pelaksanaannya.
- g. Dewan Komisaris mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS namun dalam usulan auditor eksternal kepada RUPS belum mencantumkan batasan besarnya honorarium untuk auditor eksternal tersebut.
- h. Dewan Komisaris telah melakukan penilaian Kinerja Direksi berdasarkan capaian kontrak manajemen Direksi secara Kolegial, namun belum melakukan penilaian kinerja Direksi Individu berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individual.
- i. Dewan Komisaris sudah melaksanakan pemantauan atas penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan rencana tindak lanjut atas *area of improvement* (AOI) hasil *assessment* GCG melalui Komite Audit, namun belum semua AOI yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti.
- j. Komite Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dari Dewan Komisaris namun :
 - 1) Program kerja Komite belum memuat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan.
 - 2) Belum mendokumentasikan hasil pertemuan dalam Risalah Rapat sesuai dengan format Risalah Rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Nomor PER.U/KC.202/X/1/KA-2020 tentang Tata Tertib Rapat Direksi, minimal memuat hasil-hasil analisis, telaahan dan evaluasi serta menyampaikan kepada Sekretaris Dewan kom untuk disimpan sebagai arsip perusahaan.
 - 3) Laporan Triwulanan dan Tahunan belum memuat perbandingan antara realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta penugasan lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris dengan menyertakan rangkuman

hasil pelaksanaan kegiatan dan rekomendasinya sehingga dapat diyakini bahwa rekomendasi diberikan pada setiap pelaksanaan penugasan.

4. Direksi

- a. Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan perusahaan (*corporate action*) sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu, namun standar waktu pengambilan keputusan belum memuat ketentuan/batasan waktu pengkomunikasian keputusan Direksi kepada level di bawah Direksi.
- b. Direksi memiliki Rencana Jangka Panjang (RJPP) yang disahkan oleh RUPS, namun belum menetapkan prosedur penyusunan RJPP.
- c. Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam perusahaan, namun masih ada pejabat definitif pada Jabatan Kosong yang dirangkap oleh pejabat lain (PYMT).
- d. Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan, penghematan/efisiensi perusahaan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya, namun Kebijakan Prosedur Pengelolaan Investasi belum memuat mekanisme Investasi pada Joint Venture dan mekanisme merespon usulan peluang bisnis dari manajemen di bawah Direksi.
- e. Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi perusahaan, namun Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa belum memuat secara tegas hak-hak dan kewajiban pemasok dan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Direksi menindaklanjuti arahan, dan/atau keputusan Dewan Komisaris, namun belum menetapkan batasan waktu pelaksanaan tindak lanjut arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris sehingga tindak lanjut yang dilaksanakan bukan tindak lanjut yang terlambat untuk dilaksanakan.
- g. Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan Komisaris, namun belum menyusun dan menyampaikan kepada RUPS

tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi.

- h. Direksi menerapkan sistem teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, namun belum menyusun dan menyampaikan Laporan pelaksanaan kinerja teknologi Informasi termasuk pelaksanaan *Information Technology Master Plan (ITMP)* dan *Information Technology Detail Plan (ITDP)* kepada Dewan Komisaris.
- i. Direksi telah melakukan hubungan tambah bagi perusahaan dan *stakeholders*, namun belum melaksanakan survey kepuasan pemasok/vendor secara berkala, masih terjadi *mismatch* dalam penggunaan dan penyediaan dana dari penerbitan hutang jangka panjang untuk pembayaran bunga dan pokok hutang jangka panjang yang jatuh tempo, serta belum konsisten meningkat dalam pencapaian KPI Korporat.
- j. Direksi menyelenggarakan fungsi kesekretariatan perusahaan, namun Sekretaris Perusahaan :
 - 1) Belum menyelenggarakan, mempersiapkan materi program pengenalan Direksi minimal memuat pengenalan prinsip-prinsip GCG, gambaran umum BUMN, kewenangan yang didelegasikan, tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris, serta mendokumentasikan program pengenalan perusahaan bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diangkat yang berasal dari luar perusahaan.
 - 2) Belum menyusun laporan pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan secara berkala dan menyusun laporan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Direksi menyelenggarakan pengawasan intern, namun Satuan Pengawas Intern :
 - 1) Belum melaksanakan *Control Self Assessment* secara berkala atas efektivitas struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan pada akhir tahun buku perusahaan.
 - 2) Belum melaksanakan program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal, yang mencakup seluruh aspek dari aktivitas fungsi

pengawasan intern baik dilakukan internal secara mandiri maupun Reviu yang dilakukan oleh asesor independen sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi

Perusahaan menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi perusahaan, namun Pedoman Pelayanan Informasi Publik Perusahaan belum menyesuaikan dengan Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik untuk mengamankan informasi perusahaan yang penting.

6. Aspek Lainnya

Sepanjang informasi yang kami peroleh, tidak ditemukan adanya praktik perusahaan yang menyimpang dari prinsip GCG selama tahun 2022, sehingga tidak ada pengurangan nilai skor.

Selain hal-hal di atas, kami melakukan analisis terbatas terkait tingkat kesehatan perusahaan, capaian KPI perusahaan, kualitas pengelolaan aset dan investasi, kualitas *governance* kinerja, kualitas pergantian organ Direksi dan Dewan Komisaris, dan investasi pada PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek.

B. REKOMENDASI

Terhadap kelemahan pelaksanaan GCG sebagaimana diuraikan dalam butir A di atas dan dalam upaya memperbaiki kinerja pencapaian praktik-praktik terbaik penerapan GCG, kami merekomendasikan beberapa hal yang perlu menjadi prioritas organ perusahaan dalam tindaklanjutnya, sebagai berikut:

1. Pemegang Saham/RUPS

- a. Menetapkan batasan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris di perusahaan swasta atau perusahaan/badan lain/BUMD/BLU.

- b. Melakukan *update* atas KEP-101/M-BUMN/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN dengan kondisi terkini dan *best practice* dalam pengelolaan perusahaan.
- c. Mendokumentasikan pembahasan usulan aksi korporasi Direksi dan memberikan persetujuan usulan aksi korporasi Direksi secara tepat waktu yaitu paling lambat 30 hari untuk KSO/BOT dan maksimal 7 hari untuk pelepasan aset setelah dokumen usulan dan penjelasan diterima secara lengkap.
- d. Menetapkan target KPI Direksi secara Individu dan melakukan penilaian pencapaian KPI Direksi yang hasilnya dituangkan dalam risalah RUPS.
- e. Menetapkan Pedoman penyusunan KPI Dewan Komisaris dan Pedoman penyusunan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris sesuai dengan Pedoman yang telah ditetapkan.
- f. Mendokumentasikan pembahasan dan meningkatkan upaya-upaya menindaklanjuti *area of improvement* yang dihasilkan dari *assessment* tahun sebelumnya yang belum terdokumentasikan.

2. Dewan Komisaris

- a. Konsisten dalam melaksanakan pelatihan/peningkatan kompetensi setiap anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan dalam Laporan Pelatihan Dewan Komisaris sesuai dengan RKA Dewan Komisaris yang telah disetujui RUPS.
- b. Konsisten dalam memberikan persetujuan terhadap usulan tindakan Direksi dalam jangka waktu berkisar 7 hari dan sampai dengan 14 hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi.
- c. Penyampaian RKA Dewan Komisaris ke Direksi dilakukan tepat waktu sebelum penyampaian Rancangan RKAP kepada Pemegang Saham tanggal 1 Oktober tahun berjalan.

- d. Konsisten dalam menyajikan keselarasan/ketidaksielarasan RKAP dengan RJPP dalam tanggapan RKAP kepada Pemegang Saham.
- e. Mendorong manajemen agar melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas, dan menyusun *Internal Control Report*.
- f. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasehat terhadap kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi yang dihasilkan dari telaah Komite Komisaris atas ITMP 2020-2024 dan pelaksanaannya.
- g. Konsisten dalam mencantumkan batasan besaran honorarium atau besaran prosentase kenaikan dibanding tahun sebelumnya untuk eksternal auditor dalam pengusulan auditor eksternal kepada RUPS.
- h. Melakukan penilaian kinerja Direksi individu berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individual dan melaporkannya kepada Pemegang Saham.
- i. Mengintruksikan Komite Dewan Komisaris untuk :
 - 1) Melengkapi program kerja Komite dengan memastikan bahwa telah ada prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan.
 - 2) Mendokumentasikan hasil pertemuan dalam Risalah Rapat sesuai dengan format Risalah Rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Nomor PER.U/KC.202/X/1/KA-2020 tentang Tata Tertib Rapat Direksi, minimal memuat hasil-hasil analisis, telaahan dan evaluasi serta menyampaikan kepada Sekretaris Dekom untuk disimpan sebagai arsip perusahaan.
 - 3) Melengkapi Laporan Triwulanan dan Tahunan dengan memuat perbandingan antara realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta penugasan lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris dengan menyertakan rangkuman hasil pelaksanaan kegiatan dan rekomendasinya sehingga dapat diyakini bahwa rekomendasi diberikan pada setiap pelaksanaan penugasan.

3. Direksi

a. Penyempurnaan terkait Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan :

Direksi menginstruksikan MC dan USQ agar memasukkan materi substansi Pedoman Perilaku (CoC) dalam silabus program orientasi karyawan baru.

b. Penyempurnaan terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, sebagai berikut :

1) Melakukan *update* Keputusan Direksi Nomor KEP.U/OT/104/IX/1/KA-2015 tentang Standar waktu pengambilan keputusan oleh Direksi dalam pembuatan-pembuatan Direksi yang membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris atau tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan Persetujuan dari RUPS dengan menambahkan ketentuan/batasan waktu pengkomunikasian keputusan Direksi kepada level dibawah Direksi.

2) Menetapkan prosedur penyusunan RJPP.

3) Melakukan *update* Keputusan Direksi Nomor Kep.U/KU.401/XI/28/KA-2013 tanggal 29 November 2013 tentang Kebijakan Prosedur Pengelolaan Investasi serta Pengeluaran yang Dikapitalisasi (Bersifat Modal) di Lingkungan PT KAI (Persero) dan menetapkan Mekanisme dalam Direksi untuk merespon usulan peluang bisnis dari manajemen dibawah Direksi.

4) Melakukan *update* Peraturan Direksi Nomor PER.U/KM.101/VIII/1/KA-2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sehingga Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa memuat secara tegas hak-hak dan kewajiban pemasok dan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Menetapkan batasan waktu pelaksanaan tindak lanjut arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris sehingga tindak lanjut yang akan dilaksanakan tidak terlambat.

c. Penyempurnaan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik terkait dengan Pengelolaan Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Management*) sebagai

berikut :

- 1) Segera menetapkan pejabat definitif pada Jabatan Kosong yang masih dirangkap oleh pejabat lain (PYMT).
- 2) Menyusun dan menyampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi.
- 3) Menyampaikan Laporan pelaksanaan kinerja teknologi Informasi termasuk pelaksanaan *Information Technology Master Plan* (ITMP) dan *Information Technology Detail Plan* (ITDP) Kepada Direksi dan Dekom.
- 4) Menginstruksikan Unit Logistik untuk melaksanakan survei kepuasan pemasok/vendor secara berkala.
- 5) Melaksanakan manajemen kas dan keuangan yang baik sehingga tidak terjadi *mismatch* dalam penggunaan dan penyediaan dana dari penerbitan hutang jangka panjang untuk pembayaran bunga dan pokok hutang jangka panjang yang jatuh tempo.
- 6) Menjaga konsistensi pencapaian KPI Korporat
- 7) Menginstruksikan Sekretaris Perusahaan agar :
 - a) Menyelenggarakan, mempersiapkan materi program pengenalan direksi minimal memuat pengenalan prinsip-prinsip GCG, gambaran umum BUMN, kewenangan yang didelegasikan, tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris, serta mendokumentasikan program pengenalan perusahaan bagi Dewan Komisaris dan Direksi baru yang berasal dari luar perusahaan.
 - b) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan secara berkala.
 - c) Menyusun laporan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Menginstruksikan SPI agar :
 - a) Melaksanakan *Control Self Assessment* secara berkala atas efektivitas Struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan pada akhir tahun buku perusahaan.

- b) Melaksanakan program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal, yang mencakup seluruh aspek dari aktivitas fungsi pengawasan intern baik dilakukan oleh Internal maupun Penilaian Oleh Eksternal yang dilakukan lima tahun sekali.

- d. Penyempurnaan terkait dengan Pengungkapan Informasi dan Transparansi :
Melakukan revisi Peraturan Direksi Nomor PER.U/KL.104/VI/1/KA-2018 tanggal 05 Juni 2018 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik menyesuaikan dengan Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Uraian selengkapnya hasil *assessment* berikut rekomendasinya disajikan dalam Bab II.



BAB II URAIAN HASIL *ASSESSMENT*

A. DATA UMUM

1. DASAR PENUGASAN

Dasar penugasan *assessment* penerapan GCG pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023.
- c. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
- d. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
- e. Surat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KC.202/XII/5/KA-2022 tanggal 27 Desember 2022 Hal Permohonan *Assessment Good Corporate Governance (GCG)* PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2022.
- f. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor PE.05.01/ST-62/PW10/4.1/2023 tanggal 20 Januari 2023.

2. TUJUAN *ASSESSMENT*

Tujuan *Assessment* GCG adalah untuk :

- a. Mengukur kualitas penerapan GCG perusahaan melalui penilaian tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapannya;
- b. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG perusahaan, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria GCG dan penerapan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- c. Memonitor konsistensi penerapan GCG pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan memberikan masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan *corporate governance* perusahaan.

3. RUANG LINGKUP DAN PERIODE *ASSESSMENT*

a. Ruang Lingkup *Assessment* GCG

Ruang lingkup pelaksanaan *assessment* atas penerapan GCG pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) meliputi semua aspek yang mendukung pelaksanaan GCG yang terbagi dalam enam aspek pengujian, yaitu:

- 1) Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan
- 2) Pemegang Saham dan RUPS
- 3) Dewan Komisaris
- 4) Direksi
- 5) Pengungkapan Informasi dan Transparansi
- 6) Aspek Lainnya

b. Periode *Assessment* GCG

Periode penerapan GCG yang dinilai adalah tahun 2022 (1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022) serta periode sebelum maupun sesudahnya sepanjang memiliki kaitan sebagai dasar pengambilan kesimpulan atau penilaian.

4. METODOLOGI ASSESSMENT

Metodologi yang digunakan dalam *assessment* penerapan GCG pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah:

a. PENGUMPULAN DATA

1) Reviu Dokumen

Reviu dokumen dilakukan terhadap dokumen PT Kereta Api Indonesia (Persero) terkait struktur dan proses *governance* perusahaan, antara lain: Anggaran Dasar, *Code of Corporate Governance*, *Code of Conduct*, *Board Manual*, Kebijakan Perusahaan, Kebijakan Manajemen, Risalah RUPS, Risalah Rapat Komisaris dan Direksi, Laporan Manajemen Triwulanan, Laporan Keuangan Tahunan, *Annual Report*, Dokumen SPI, dan Dokumen terkait lainnya.

2) Kuesioner

Penyebaran kuesioner dilakukan untuk memperoleh gambaran persepsi responden atas implementasi peraturan/sistem/kebijakan/SOP sebagai bentuk penerapan GCG. Rancangan kuesioner disusun oleh Tim BPKP (*assessor*), sedangkan pemilihan responden dilakukan oleh pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan kriteria yang diberikan oleh Tim BPKP (*assessor*).

Pendistribusian dan pengisian kuesioner adalah sebagai berikut:

No	Responden	Jumlah Kuesioner	Kembali	Respon Rate
1	Komisaris	9	8	89,00%
2	Direksi	9	9	100,00%
3	Komite Audit	2	3	150,00%
4	Manajemen Kunci	139	107	77,00%
5	Karyawan	223	546	245%
	Jumlah	382	673	176%

3) Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai pendalaman lebih lanjut terhadap informasi yang tidak dapat diperoleh melalui reviu dokumen atau

kuesioner. Pelaksanaan wawancara dilakukan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan beberapa manajer kunci/senior (EVP/VP) PT Kereta Api Indonesia (Persero).

4) Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati implementasi dari peraturan/sistem/kebijakan/SOP yang digunakan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

b. ANALISIS/PENGOLAHAN DATA

1) Tabulasi Data

Hasil reviu dokumen, kuesioner, wawancara, dan observasi dianalisis untuk mendapatkan capaian penerapan GCG per parameter, per indikator, dan per aspek pengujian serta skor hasil *assessment*.

2) Presentasi Hasil Sementara

Hasil reviu dokumen, kuesioner, wawancara, dan observasi dirangkum dan disimpulkan untuk mendapatkan tingkat pemenuhan setiap indikator dan faktor-faktor yang diuji kesesuaiannya dalam penilaian praktik penerapan GCG.

Hasil sementara penilaian praktik penerapan GCG dipaparkan kepada Tim *Counterpart* perusahaan untuk mendapatkan konfirmasi.

Selanjutnya, hasil sementara tersebut dipaparkan di hadapan Direksi dan Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Manajer Kunci.

Tingkatan capaian aktual atas penerapan GCG dikategorikan ke dalam lima kelompok predikat, yaitu **Sangat Baik**, **Baik**, **Cukup Baik**, **Kurang Baik** dan **Tidak Baik** dengan penjelasan sebagai berikut:

Tingkat	Rentang Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG	Predikat
1	Nilai di atas 85	Sangat Baik
2	$75 < \text{Skor} \leq 85$	Baik
3	$60 < \text{Skor} \leq 75$	Cukup Baik

Tingkat	Rentang Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG	Predikat
4	$50 < \text{Skor} \leq 60$	Kurang Baik
5	$\text{Skor} \leq 50$	Tidak Baik

Penetapan klasifikasi kualitas penerapan GCG tersebut harus memperhatikan batasan sebagai berikut:

- (a) Klasifikasi “Sangat Baik” diberikan jika pencapaian nilai akhir aspek penerapan GCG seluruhnya di atas nilai 75 atau minimal “Baik”. Jika nilai akhir penilaian GCG mencapai di atas 85, namun masih terdapat pencapaian nilai akhir aspek penilaian GCG sama dengan atau di bawah nilai 75, maka maksimal klasifikasi yang diberikan adalah “Baik”.
- (b) Klasifikasi “Baik” diberikan jika pencapaian nilai akhir aspek penerapan GCG selanjutnya di atas nilai 60 atau minimal “Cukup Baik”. Jika nilai akhir penilaian GCG mencapai di atas nilai 75, namun masih terdapat pencapaian nilai akhir aspek penilaian GCG sama atau di bawah nilai 60, maka maksimal klasifikasi yang diberikan adalah “Cukup Baik”.

c. PELAPORAN

Tahap akhir dari kegiatan *assessment* implementasi GCG adalah penyusunan laporan hasil *assessment* penerapan GCG di PT Kereta Api Indonesia (Persero).

5. BATASAN TANGGUNG JAWAB

Kebenaran atas data terkait penerapan GCG adalah tanggung jawab perusahaan, sedangkan tanggung jawab Tim BPKP adalah pada simpulan hasil *assessment* berdasarkan metodologi penilaian yang telah ditetapkan, dengan batasan sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan penilaian atas kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi di luar perusahaan, kecuali dalam kaitan untuk melihat dampaknya terhadap penerapan GCG pada perusahaan.
- b. Tidak melakukan penilaian atas beban kerja (*work load*) masing-masing organ perusahaan yang diperlukan untuk memastikan keseimbangan alokasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
- c. Penilaian dilakukan sebatas data yang diperoleh Tim BPKP selama proses *assessment*, sedangkan rekomendasi didasarkan pada hasil analisis terhadap hal-hal yang perlu ditingkatkan.
- d. Tidak melakukan penilaian terhadap dampak penerapan GCG pada kinerja perusahaan.
- e. Penilaian dilakukan sebatas aspek *governance*, oleh karenanya *assessment* tidak mencakup identifikasi atas kemungkinan adanya *fraud* (kecurangan) yang terkait pada aspek keuangan.

6. DATA UMUM PERUSAHAAN

a. Profil Perusahaan

PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) mulanya merupakan bagian dari gabungan Perusahaan Asing Milik Belanda yang bergerak di sektor perkeretaapian, didirikan dan beroperasi secara komersial pada tahun 1864 di wilayah Jawa dan Sumatera. Pada tahun 1963 secara resmi didirikan/dibentuk Perusahaan Negara yang bergerak di sektor perkeretaapian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1963, dari 12 Perusahaan Asing Kereta Api Milik Belanda yang dinasionalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. (Peraturan Pemerintah No. 40 dan No. 41 Tahun 1959).

Perusahaan beberapa kali mengalami perubahan bentuk usaha hingga pada tanggal 1 Juni 1999 melalui Akta Notaris No. 2 dari Notaris Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang disempurnakan dengan Akta Notaris No. 14 tanggal 13 September 1999 dari notaris yang sama, akta-akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-17171 HT.01.01.TH.99 tanggal 1 Oktober 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 Tambahan No. 240/2000 tanggal 14 Januari 2000.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang dicatat dalam Akta No. 278 tanggal 31 Desember 2021 dari Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Bandung tentang peningkatan modal dasar perusahaan. Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-01.03-0494898 tanggal 31 Desember 2021, dengan modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp19.168.743.000.000,00 dari modal dasar Rp40.000.000.000.000,00.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkantor pusat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung, dan mempunyai 6 (enam) anak perusahaan dan 3 (tiga) entitas asosiasi yaitu:

No	Anak Perusahaan	Bidang Usaha	Kepemilikan Saham	Kedudukan
1	PT Reska Multi Usaha (RMU)	Restoran Kereta Api	99,74%	Jakarta
2	PT Railink (Railink)	Transportasi Kereta Api Bandara	60,00%	Jakarta
3	PT Kereta Commuter Indonesia (KCI)	Transportasi Kereta Commuter	99,78%	Jakarta
4	PT KA Logistik (KALOG)	Distribusi Logistik Berbasis Kereta Api	99,30%	Jakarta
5	PT KA Properti Manajemen (KAPM)	Pengelolaan Aset Properti Perkeretaapian	99,63%	Jakarta
6	PT KA Pariwisata (KAWIS)	Pariwisata Kereta Api	99,90%	Jakarta

No	Entitas Asosiasi	Aktivitas Utama	Kepemilikan Saham	Kedudukan
1	PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	Pengangkutan darat, perdagangan, jasa, industri, pembangunan	51%	Jakarta
2	PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek	Pengangkutan darat terintegrasi Jakarta-Bogor-Depok Tangerang-Bekasi	49,%	Jakarta
3	PT BPRS Baiturridha Pusaka	Pembiayaan dan Jasa Perbankan	20%	Jakarta

b. Visi dan Misi Perusahaan

Rumusan visi dan misi PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut:

Visi Perusahaan

Menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia

Sejalan dengan visi tersebut, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah merumuskan misi perusahaan sebagai berikut:

Misi Perusahaan

- 1) Untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
- 2) Untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi.
- 3) Untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memprakarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur-infrastruktur penting terkait transportasi.

C. Kegiatan Pokok Perusahaan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan perusahaan adalah melakukan usaha di bidang transportasi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang meliputi pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan prasarana perkeretaapian;
- b. Penyelenggaraan sarana perkeretaapian yang meliputi pengadaan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan sarana perkeretaapian;
- c. Perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya;
- d. Perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap) ;
- e. Aktivitas konsultasi transportasi;
- f. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya;
- g. Kegiatan penunjang pendidikan;
- h. Penanganan kargo (bongkar muat barang) ;
- i. Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat;
- j. Angkutan multimoda;
- k. Aktivitas agen perjalanan lainnya;
- l. Pendidikan lainnya swasta;
- m. Pendidikan kesehatan swasta;
- n. Pendidikan dan pelatihan di bidang perkeretaapian;
- o. Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
- p. Usaha jasa pertambangan;

- q. Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa;
- r. Kerjasama peningkatan akses stasiun KA yang bersinggungan dengan pihak lain untuk dikembangkan dengan konsep terhubung dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dan mendukung peningkatan pelayanan penumpang.

Selain kegiatan utama tersebut di atas, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:

- 1) Pergudangan dan penyimpanan;
- 2) Aktivitas *Cold storage*;
- 3) Aktivitas *bounded warehousing* atau wilayah kawasan berikut;
- 4) Pergudangan dan penyimpanan lainnya;
- 5) Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut;
- 6) Aktivitas pelayanan kepelabuhan sungai dan danau;
- 7) Angkutan melalui saluran pipa;
- 8) Konstruksi sentral telekomunikasi;
- 9) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah lainnya;
- 10) Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri;
- 11) Aktivitas pengolahan data;
- 12) Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial;
- 13) Konstruksi Gedung Hunian;
- 14) Konstruksi Gedung Perkantoran;
- 15) Konstruksi Gedung Perbelanjaan;
- 16) Konstruksi Gedung Penginapan;
- 17) Instalasi Mekanikal;
- 18) Instalasi konstruksi lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain;
- 19) Periklanan;
- 20) Aktivitas Klinik Swasta;
- 21) Aktivitas Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi;

- 22) Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik;
- 23) Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan;
- 24) Konstruksi gedung kesehatan;
- 25) Penyiapan lahan;
- 26) Museum yang dikelola swasta;
- 27) Aktivitas biro perjalanan swasta;
- 28) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada perusahaan lain dalam rangka mengembangkan proses bisnis perseroan.

Kegiatan utama Perusahaan saat ini adalah bergerak dalam bidang usaha pengangkutan penumpang dan/atau barang dengan kereta api, usaha pendidikan dan pelatihan di bidang perkeretaapian, serta usaha penyewaan sarana/prasarana/fasilitas yang meliputi sewa kios/gudang/ruang stasiun dan terminal petikemas.

Dalam menjalankan kegiatan operasinya, Perusahaan memiliki Daerah Operasi, Divisi Regional, Balai Yasa dan Divisi khusus sebagai berikut:

- a) Daerah Operasi (Daop), terdiri dari :
 - a) Daop 1, berkedudukan di Jakarta
 - b) Daop 2, berkedudukan di Bandung
 - c) Daop 3, berkedudukan di Cirebon
 - d) Daop 4, berkedudukan di Semarang
 - e) Daop 5, berkedudukan di Purwokerto
 - f) Daop 6, Berkedudukan di Yogyakarta
 - g) Daop 7, berkedudukan di Madiun
 - h) Daop 8, berkedudukan di Surabaya
 - i) Daop 9, berkedudukan di Jember
- b) Divisi Regional (Divre)
 - a) Divre I, berkedudukan di Medan
 - b) Divre II, berkedudukan di Padang
 - c) Divre III, berkedudukan di Palembang

- d) Divre IV, berkedudukan di Tanjung Karang
- c) Balai Yasa
 - a) Balai Yasa Manggarai, berkedudukan di Jakarta
 - b) Balai Yasa Tegal, berkedudukan di Tegal
 - c) Balai Yasa Yogyakarta, berkedudukan di Yogyakarta
 - d) Balai Yasa Gubeng, berkedudukan di Surabaya
 - e) Balai Yasa Lahat, berkedudukan di Lahat
 - f) Balai Yasa Pulobrayan, berkedudukan di Medan
- d) Divisi Bertujuan Khusus, *Light Rail Transit* Jabodebek, berkedudukan di Jakarta.

d. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-64/MBU/03/2021 tanggal 03 Maret 2021, Nomor SK-417/MBU/12/2021 tanggal 29 Desember 2021, Nomor SK-173/MBU/8/2022 tanggal 15 Agustus 2022, Nomor SK-174/MBU/8/2021 tanggal 15 Agustus 2022, dan SK-207/MBU/09/2022 tanggal 20 September 2022, susunan anggota Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut:

1	Komisaris Utama merangkap Komisaris	:	Said Aqil Siradj
2	Komisaris Independen	:	Riza Primadi
3	Komisaris Independen	:	Rochadi
4	Komisaris	:	Diah Natalisa
5	Komisaris	:	Chairul Anwar
6	Komisaris Independen	:	Endang Tirtana
7	Komisaris Independen	:	Johan Bakti Porsea Sirait
8	Komisaris	:	Sri Paduka Mangkoenagoro X
9	Komisaris	:	Mohamad Risal Wasal

10	Komisaris	:	Cris Kuntadi *)
11	Komisaris	:	Fredy Haris **)

*) berakhir masa jabatannya dan diberhentikan sesuai dengan SK-174/MBU/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022.

***) berakhir masa jabatannya dan diberhentikan sesuai dengan SK-173/MBU/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022.

Dalam rangka penyelenggaraan GCG dan sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-01/M-MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Renumerasi.

Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 08/CH/DEKOM/XI/2022 tanggal 23 November 2022 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit, dengan susunan:

Ketua (Komisaris Independen)	:	Riza Primadi
Anggota (Komisaris Independen)	:	Rochadi
Anggota (Komisaris Independen)	:	Johan Sirait
Anggota	:	Ernesto
Anggota	:	Amalia Setyanti Lestari

Komite Pemantau Manajemen Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 06/CH/DEKOM/IX/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Pengangkatan Anggota KPMR, dengan susunan:

Ketua (Komisaris)	:	Chairul Anwar
Anggota (Komisaris Independen)	:	Endang Tirtana
Anggota (Komisaris Independen)	:	Johan Sirait
Anggota	:	Miranti Gani
Anggota	:	Handy Purnama

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 03/CH/DEKOM/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan susunan:

Ketua (Komisaris Utama merangkap Independen)	:	Said Aqil Siroj
Anggota (Komisaris)	:	Diah Natalisa
Anggota (Komisaris)	:	Sri Paduka Mangkoenagoro X
Anggota	:	Corina D. Riantoputra

Direksi

Berdasarkan pernyataan keputusan pemegang Saham PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Akta Notaris Nining Puspta Nomor Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-226/MBU/07/2020 tanggal 14 Juli 2020, SK-28/MBU/01/2021 tanggal 25 Januari 2021 SK-48/MBU/02/2021 tanggal 16 Februari 2021, SK-89/MBU/03/2022 tanggal 31 Maret 2022, dan SK-240/MBU/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero), susunan anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1	Direktur Utama	:	Didiek Hartantyo	SK-28/MBU/01/2021 tanggal 25 Januari 2021
2	Direktur Niaga	:	Hadis Surya Palapa	SK-89/MBU/03/2022 tanggal 31 Maret 2022
3	Direktur Operasi	:	Awan Hermawan Purwadinata	SK-89/MBU/03/2022 tanggal 31 Maret 2022
4	Direktur Pengelolaan Prasarana	:	Heru Kuswanto	SK-89/MBU/03/2022 tanggal 31 Maret 2022
5	Direktur Pengelolaan Sarana (*)	:	Eko Purwanto	SK-48/MBU/02/2021 tanggal 16 Februari 2021
6	Direktur Keselamatan & Keamanan	:	Sandry Pasambuna	SK-240/MBU/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022
7	Direktur SDM & Umum	:	Suparno	SK-89/MBU/03/2022 tanggal 31 Maret 2022
8	Direktur Perencanaan Strategis & Pengembangan KAI	:	John Robertho	SK-240/MBU/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022

9	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	:	Salursa Wijaya	SK-226/MBU/07/2020 tanggal 14 Juli 2020
---	--	---	----------------	---

*) Pada tanggal 15 Februari 2023 Eko Purwanto dilantik sebagai Direktur Utama PT INKA. Pengukuhan pemberhentian akan dilakukan sekaligus dengan pengangkatan Direktur Pengelolaan Sarana. Pelaksana Tugas Direktur Pengelola Sarana dilaksanakan oleh Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha sesuai Surat Dewan Komisaris Nomor 06/CH/RAH/KOM/II/2023 tanggal 21 Februari 2023.

e. Data Keuangan

Kondisi keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara umum mengalami kenaikan aktiva yang terlihat dari Total Aktiva sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 meningkat.

Demikian juga, pada tahun 2022 perusahaan telah memperoleh laba berbeda dengan Tahun 2021 dan 2020 yang membukukan kerugian karena menurunnya angkutan penumpang akibat kebijakan penanganan Pandemi Covid-19.

Rincian lebih lanjut dari kondisi keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada lampiran IV.

B. URAIAN HASIL ASSESSMENT

Kami telah melakukan *assessment* penerapan GCG pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2022 yang mencakup enam aspek pengujian. Penerapan perangkat GCG adalah tanggung jawab manajemen perusahaan, sedangkan tanggung jawab kami terletak pada hasil penilaian atas penerapan tersebut.

Assessment terhadap penerapan GCG pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dilaksanakan berdasarkan metode dan prosedur *assessment* sesuai Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara.

Aspek yang dinilai terangkum dalam 43 indikator dan 153 parameter. Adapun aspek penerapan GCG yang dinilai mencakup : (a) Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan, (b) Pemegang Saham dan RUPS, (c) Dewan Komisaris, (d) Direksi, (e) Pengungkapan Informasi dan Transparansi dan (f) Aspek Lainnya.

Dari hasil *assessment*, penerapan GCG pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencapai skor **92,424** dengan predikat **Sangat Baik**.

Capaian skor tersebut merupakan gabungan dari capaian skor aktual 6 (enam) aspek *governance* yang dinilai, yaitu :

No	Aspek <i>Governance</i>	Bobot	Skor	Capaian (%)	Predikat
I	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan	7	6,905	98,641	Sangat Baik
II	Pemegang Saham dan RUPS	9	8,315	92,387	Sangat Baik
III	Dewan Komisaris	35	31,683	90,525	Sangat Baik
IV	Direksi	35	31,719	90,627	Sangat Baik
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9	8,802	97,796	Sangat Baik
VI	Aspek Lainnya	5	5,000		
	TOTAL	100	92,424		Sangat Baik

Rincian skor per aspek dan indikator masing-masing disajikan pada Lampiran I dan Lampiran II.

Dibandingkan dengan praktik terbaik penerapan GCG, kondisi penerapan GCG pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) belum mencapai *best practices* penerapan GCG sehingga memerlukan upaya-upaya perbaikan.

Dari enam aspek pengujian terhadap penerapan GCG PT Kereta Api Indonesia (Persero), persentase capaian tertinggi ada pada aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan sebesar 98,64% dan capaian terendah pada aspek Dewan Komisaris sebesar **90,52%**.

Uraian atas hasil *assessment* penerapan GCG pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut:

1. Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan

Aspek *governance* terkait dengan Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan dinilai berdasarkan 6 (enam) indikator, yaitu:

- a. Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GCG Code*) dan pedoman perilaku (*code of conduct*);
- b. Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten;
- c. Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- d. Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- e. Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (*whistle blowing system*).

Penilaian penerapan atas keenam indikator dengan 15 parameter yang diuji kesesuaian penerapannya tersebut menghasilkan skor **6,905** dari skor maksimum **7** atau **98,64%** atau masuk dalam kategori **Sangat Baik**.

Tingkat pemenuhan masing-masing indikator secara keseluruhan telah mencapai tingkat pemenuhan yang baik dengan uraian sebagai berikut:

a. Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct).

- 1) Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah menetapkan Peraturan Direksi Nomor PER.U/KC.202/XII/1/KA-2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pedoman tersebut merupakan pemutakhiran dari Keputusan Direksi Nomor KEP.U/OT.104/X/4/KA-2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) PT Kereta Api Indonesia (Persero).

- 2) Perusahaan memiliki Pedoman Perilaku yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah menetapkan Peraturan Direksi Nomor PER.U/KC.202/II/1/KA-2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).

Pedoman Perilaku tersebut merupakan Pemutakhiran dari Pedoman Perilaku Nomor PER.U/KC.202/I/1/KA-2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

b. Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten.

- 1) Direksi menunjuk seorang anggota Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah menunjuk Direktur Utama sebagai Penanggung Jawab penerapan dan pemantauan GCG yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor KEP.U/OT.104/X/2/KA-2013 tanggal 2 Oktober 2013 dan telah melaporkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan RUPS dalam Laporan Tahunan.

2) Perusahaan menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku.

Dalam melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Code of Corporate Governance*) dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan pedoman tersebut dengan adanya hal-hal sebagai berikut:

- a) Kebijakan dan panduan tambahan yang melengkapi Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Code of Corporate Governance*) dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), diantaranya berupa: Panduan tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi/*Board Manual*, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Benturan Kepentingan, Pedoman *Whistle Blowing System* (WBS), Peraturan Disiplin Pegawai, Perjanjian Kerja Bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Serikat Pekerja (PKB), dan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai.
- b) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite Komisaris, serta seluruh pegawai menandatangani Pernyataan Kepatuhan terhadap pedoman Perilaku.
- c) Perusahaan telah melaksanakan sosialisasi terkait penerapan GCG yaitu sosialisasi *Board Manual*, *Code of Conduct* dan kebijakan serta panduan tambahan tentang praktik penerapan GCG Perusahaan di-*upload* melalui milis dan broadcast serta disosialisasikan melalui media intranet perusahaan (*E-office*) yang dapat diakses oleh pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero).
- d) Perusahaan juga telah berupaya meningkatkan pemahaman terkait

penerapan GCG kepada seluruh pegawai melalui kewajiban menjawab dengan benar kuis/pertanyaan seputar GCG dan AKHLAK setiap kali akan mengakses *E-office* PT KAI (Persero).

Namun belum memasukkan materi substansi Pedoman Perilaku (CoC) dalam silabus program orientasi karyawan baru.

Kami rekomendasikan kepada Direksi agar menginstruksikan MC dan USQ agar memasukkan materi substansi Pedoman Perilaku (CoC) dalam silabus program orientasi karyawan baru.

c. Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

1) Perusahaan melakukan *assessment* terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan review/reviu secara berkala.

Pengukuran terhadap penerapan tata kelola perusahaan telah dilaksanakan secara berkala sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan GCG pada BUMN, yaitu:

- a) *assessment* atas penerapan GCG tahun 2012 oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dengan nilai 70,16;
- b) *self assessment* penerapan GCG tahun 2013 dengan nilai 83,90;
- c) *assessment* GCG tahun 2014 oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dengan nilai 84,03;
- d) *self assessment* tahun 2015 dengan nilai 84,98;
- e) *assessment* GCG tahun 2016 oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dengan nilai 89,011;
- f) *self assessment* tahun 2017 dengan nilai 89,377;
- g) *assessment* GCG tahun 2018 oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dengan nilai 90,025;
- h) *self assessment* tahun 2019 dengan nilai 90,215;

- i) *assessment* GCG tahun 2020 oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dengan nilai 90,461;
 - j) *self assessment* tahun 2021 dengan nilai 91,679;
 - k) *assessment* GCG tahun 2022 oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dengan nilai 92,424.
- 2) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik menjadi salah satu unsur *Key Performance Indicator* (KPI) yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen.

Sejak tahun 2021 Pelaksanaan tata Kelola Perusahaan yang Baik tidak menjadi KPI Direksi yang dimuat dalam Kontrak Manajemen Direksi, namun dimuat dalam KPI Sekretaris Perusahaan (US) untuk implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan target implementasi GCG sebesar 91 dan KPI Division Head of Risk Management (KR) dengan target penerapan Manajemen Risiko level 3.

d. Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

- 1) Perusahaan memiliki Kebijakan tentang Pelaporan Harta Kekayaan penyelenggara negara bagi Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah menetapkan Peraturan Direksi Nomor PER.U/KP.402/XII/1/KA-2022 tanggal 05 Desember 2022 tentang Perubahan atas Nomor PER.U/Kp.402/IV/1/KA-2020 tanggal 21 April 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

- 2) Penyelenggara Negara/Wajib Lapor memahami kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara
Selama tahun 2022 *Vice President Quality Assurance and Good Corporate Governance* PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai koordinator Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara telah

melakukan kegiatan sosialisasi terkait penyampaian dan pengisian LHKPN pada tanggal 14 Januari, 18 Januari, 14 Februari dan 16 November 2022. Sosialisasi juga dilakukan melalui media lainnya seperti *Milis Broadcast*, tabloid Kontak (komik Uus dan Qiqi) yang terbit setiap bulan dan menyediakan *hotline* pendampingan teknis yang sifatnya *by request*.

- 3) Perusahaan melaksanakan kebijakan/SOP tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara.

Pemenuhan Penyampaian LHKPN di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) per 31 Desember 2021 dengan batas akhir 31 Maret 2022 untuk Wajib Lapori Periodik sebanyak 1.106 dengan tingkat kepatuhan 100%. Sementara Perkembangan penyampaian untuk Wajib Lapori Khusus LHKPN per 04 Januari 2023 untuk penyampaian per 31 Desember 2022 sebanyak 66 dengan tingkat kepatuhan 71,74% dari 92 Wajib Lapori Khusus. Perkembangan tersebut sudah dilaporkan oleh VP QA dan GCG secara berkala kepada Direktur Utama. Laporan berkala tentang perkembangan pemenuhan kewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK tersaji dalam aplikasi *E-LHKPN*.

e. Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

- 1) Perusahaan memiliki ketentuan/kebijakan tentang Pengendalian gratifikasi.

Kebijakan mengenai gratifikasi ditetapkan dengan Keputusan Direksi Nomor PER.U/KC.202/XI/1/KA-2020 tanggal 12 November 2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi, yang merupakan pembaharuan dari Keputusan Direksi Nomor Nomor KEP.U/KC.202/IX/I/KA-2016 tanggal 27 September 2016. Kebijakan ini telah memuat mengenai komitmen Dewan Komisaris dan Direksi, ketentuan-ketentuan tentang gratifikasi, fungsi yang ditugaskan mengelola gratifikasi, mekanisme pelaporan

gratifikasi, pemantauan atas pelaksanaan dan sanksi atas penyimpangan ketentuan gratifikasi.

2) Perusahaan melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan/ketentuan pengendalian gratifikasi

Perusahaan telah melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan pengendalian gratifikasi. Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) pada tahun 2022 telah mengikuti kegiatan rutin KPK yaitu Webinar Gratifikasi Talk (G-Talk):

- “Manajemen Risiko dan Identifikasi Titik Rawan Penerimaan Gratifikasi” yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2022;
- “Peran Media Sosial dalam Pencegahan Praktik Gratifikasi melalui Penguatan Partisipasi Publik” yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2022.
- “FAG Forum Anti Gratifikasi Tahun 2022” yang dilaksanakan secara *offline* di Padalarang, Jawa Barat pada 24-25 November 2022.

Selain itu untuk meningkatkan pemahaman kepada insan KAI juga dilakukan sosialisasi ke Daop, Divre, Balai Yasa dan Unit di Kantor Pusat juga melalui milis Broadcast dan Bimtek Aplikasi Pelaporan Gratifikasi Online (GOL) serta penyebaran Kebijakan Direksi terkait gratifikasi dan aturan KPK melalui *E-office* yang dapat diakses oleh seluruh pegawai.

3) Perusahaan mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.

Mekanisme pengelolaan dan pelaporan gratifikasi di PT Kereta Api Indonesia (Persero) dilakukan secara *online*. Perusahaan mengimplementasikan pengendalian gratifikasi dengan meluncurkan menu *e-Gratifikasi* pada portal kepegawaian *E-office* pada pertengahan Tahun 2016. Unit *Quality Assurance and Good Corporate Governance* sebagai Unit Pengendali Gratifikasi telah melakukan analisis dan pemrosesan terhadap setiap laporan gratifikasi di lingkungan Perusahaan

Perkembangan tersebut sudah dilaporkan oleh VP QA dan GCG dan EVP *Corporate Secretary* secara berkala kepada Direktur Utama.

f. Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (*whistle blowing system*).

1) Perusahaan memiliki kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (*whistle blowing system*).

Perusahaan telah mempunyai kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (*whistle blowing system*) dan telah diperbaharui terakhir dengan terbitnya Keputusan Direksi Nomor PER.U/KL.104/XI/1/KA-2020 tanggal 12 November 2020 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblowing System*. Pedoman tersebut mengatur tentang kategori pelanggaran yang dapat dilaporkan, tugas dan wewenang penyelenggara *Whistle Blowing System*, mekanisme pelaporan dan penanganan *Whistle Blowing System*, serta tindak lanjutnya. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang perlindungan kerahasiaan sebagai hak pelapor serta kewajibannya beserta penghargaan dan sanksi.

2) Perusahaan melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemahaman atas kebijakan pelaporan atas dugaan penyimpangan (*whistle blowing system*). Unit pengelola *whistle blowing system* pada tahun 2022 telah berkoordinasi dengan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi KPK melalui kegiatan:

- Monitoring dan Evaluasi *Whistle Blowing System* TPK Terintegrasi pada tanggal 29 Juli 2022;
- Mengikuti pelatihan *Whistle Blowing System* dengan tema “Peluit Integritas: Pembelajaran interaktif untuk pengelolaan *whistle blowing system* pengaduan korupsi tahun 2022” batch III. Pelatihan ini

dilaksanakan secara daring pada tanggal 10 s.d. 14 Oktober 2022, diikuti oleh 3 (tiga) peserta dari USQ yang merupakan pengelola WBS;

- Monitoring dan Evaluasi *Whistle Blowing System* TPK Terintegrasi (semester II) pada tanggal 21 November 2022 (Lampiran 3). Berdasarkan hasil kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke-2.

Perusahaan melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemahaman terkait kebijakan pelaporan atas dugaan penyimpangan berupa sosialisasi WBS kepada pegawai perusahaan, mengupload kebijakan/mechanisme WBS dalam *E-office*, *website* perusahaan, *milis broadcast* dan *Annual Report/Laporan Tahunan* serta menyebarkan *Flyer* mengenai penerapan WBS di perusahaan, termasuk penyediaan sarana/media WBS berupa Lisan, Surat dengan alamat pengiriman unit pengelola WBS, Unit Quality Assurance and Good Corporate Governance Kantor Pusat KAI, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung, Surat elektronik dengan alamat kai-bersih@kai.id, dan aplikasi WBS.

- 3) Perusahaan melaksanakan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan (*whistle blowing system*).

Unit Penyelenggara Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistle Blowing System* menyelenggarakan dan mengelola jalur komunikasi bagi pelapor untuk melaporkan indikasi awal, melakukan klarifikasi awal dan melakukan investigasi atas pelaporan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan dan Anak Perusahaan. Unit ini telah melaporkan kegiatan penyelenggaraan WBS dalam Laporan Kinerja Unit QA dan GCG secara triwulanan kepada Direktur Utama PT KAI (Persero), dan telah dimuat dalam laporan tahunan PT KAI (Persero) tahun 2021.

Unit penyelenggaraan WBS telah melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan WBS dalam Laporan Implementasi TPK KAI Tahun 2022, selanjutnya telah dilakukan monitoring dan evaluasi pembangunan WBS TPK Terintegrasi oleh KPK pada PT KAI (Persero) yang dimuat dalam

Laporan Monitoring dan Evaluasi pembangunan WBS TPK Terintegrasi dan Rencana aksi lanjutan tahun 2023 yang dikeluarkan oleh KPK.

2. Aspek Pemegang Saham dan RUPS

Aspek *governance* yang terkait dengan Pemegang Saham dan RUPS dinilai berdasarkan 6 (enam) indikator, yaitu:

- a. RUPS melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- b. RUPS melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris;
- c. RUPS memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;
- d. RUPS memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;
- e. RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
- f. Pemegang Saham melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Assessment yang dilakukan terhadap penerapan keenam indikator dengan 25 parameter yang diuji kesesuaiannya tersebut menghasilkan skor **8,315** dari skor maksimum **9** atau **92,387%** atau masuk dalam kategori **Sangat Baik**.

Tingkat pemenuhan untuk masing-masing indikator dapat diuraikan sebagai berikut:

a. RUPS melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi.

- 1) Pemegang Saham/RUPS menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi.

Pemegang Saham telah menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata

Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN. Dalam peraturan tersebut telah dimuat mekanisme penjarangan dan penilaian/pengujian atas kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) bagi anggota Direksi.

- 2) Pemegang Saham/RUPS melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Direksi.

Penilaian terhadap calon anggota Direksi oleh Pemegang Saham dimulai dari Permintaan Data kepada BUMN untuk menyampaikan Usulan Bakal Calon Direksi. Usulan Bakal Calon Direksi dimaksud telah memenuhi ketentuan dan kriteria sesuai hasil *assessment* yang dilakukan terhadap pegawai oleh Lembaga yang dipersyaratkan Kementerian BUMN serta telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Data Usulan Bakal Calon Direksi tersebut akan dimuat dalam Database *Talent Pool* bakal calon Direksi (*Integrated Talent Management System/ITMS*).

Selanjutnya Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham membentuk Tim untuk melakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan. Tim Kementerian BUMN menyampaikan surat undangan kepada bakal calon Direksi untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK). Selanjutnya Deputi SDMTI menyampaikan Hasil UKK beserta pengusulan calon Direksi Kepada Menteri BUMN untuk ditetapkan.

- 3) Pemegang Saham/RUPS menetapkan pengangkatan anggota dan komposisi Direksi.

Penetapan anggota Direksi dan pembidangan tugas Direksi ditetapkan dengan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT KAI (Persero), pada Tahun 2022 Pengangkatan Direksi pada PT KAI (Persero) yaitu:

- a) Direktur Niaga

Hadis Surya Palapa Sesuai Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor SK-89/MBU/03/2022 tanggal 31 Maret 2022.

b) Direktur Operasi

Awan Hermawan Purwadinata sesuai Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor SK-89/MBU/03/2022 tanggal 31 Maret 2022, mengalihkan Penugasan Awan Hermawan Purwadinata semula Direktur Pengelolaan Sarana menjadi Direktur Operasi.

c) Direktur Pengelolaan Prasarana

Heru Kuswanto diangkat sesuai Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor SK-89/MBU/03/2022 tanggal 31 Maret 2022, mengalihkan penugasan Heru Kuswanto semula Direktur Operasi menjadi Direktur Pengelolaan Prasarana.

d) Direktur Keselamatan & Keamanan

Sandry Pasambuna sesuai Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor SK-240/MBU/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022, mengalihkan penugasan Sandry Pasambuna semula Direktur perencanaan Strategis dan Pengembangan menjadi Direktur Keselamatan & Keamanan.

e) Direktur SDM dan Umum

Suparno sesuai Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor SK-89/MBU/03/2022 tanggal 31 Maret 2022.

f) Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan.

John Robertho sesuai Surat Keputusan menteri BUMN selaku RUPS Nomor SK-240/MBU/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022, mengalihkan penugasan John Robetho semula Direktur Keselamatan dan Keamanan menjadi Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan.

4) Pemegang Saham/RUPS menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Direksi.

Pengaturan mengenai perangkapan jabatan bagi anggota Direksi ditetapkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER - 11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN pasal 15 ayat (7) dan pasal 17 ayat (5).

- 5) Pemegang Saham/RUPS memberhentikan anggota Direksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pemberhentian anggota Direksi PT KAI (Persero) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan melaksanakan pemanggilan kepada Direksi yang akan diberhentikan, untuk disampaikan pemberitahuan atas pemberhentian yang bersangkutan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui Zoom Meeting atau pertemuan fisik. Sesuai dengan surat kuasa Menteri BUMN, pemanggilan dilakukan oleh pejabat eselon 2, dalam hal ini Asisten Deputi Bidang Teknis Kementerian BUMN, bersama dengan Asisten Deputi Manajemen SDM BUMN. Proses tersebut akan menghasilkan Berita Acara Pemberitahuan dan dinyatakan dalam Berita Acara sebelum ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri BUMN tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi.

Pemberhentian Direksi selama Tahun 2022 sesuai Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor SK-89/MBU/03/2022 tanggal 31 Maret 2022, memberhentikan sebagai berikut:

- a) Jeffri N. Korompis dari Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan.
- b) Agung Yunanto dari Direktur SDM dan Umum.
- c) Dadan Rudiansyah dari Direktur Niaga.

Menurut penjelasan Kementerian BUMN, pemberhentian Direksi PT KAI (Persero) selama tahun 2022 tidak ada kaitannya dengan penurunan kinerja, *fraud*, *Good Corporate Governance* atau lainnya namun hanya terkait pergantian susunan atau penyegaran Direksi PT KAI (Persero).

- 6) Pemegang Saham/RUPS memberikan respon terhadap lowongan jabatan dan/atau pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris.

Selama Tahun 2022 tidak ada pemberhentian sementara Direksi oleh Dewan Komisaris.

b. RUPS melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris.

- 1) Pemegang Saham/RUPS menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris.

Pemegang Saham telah menetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Perubahan atas peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara yang mengatur mengenai Persyaratan calon anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, Tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. alasan dan tata cara pemberhentian, dan berakhirnya jabatan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

- 2) Pemegang Saham/RUPS melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris.

Pada tahun 2022 terdapat pergantian Dewan Komisaris sebagai berikut:

a) Komisaris Independen

Johan Bakti Porsea Sirait, sesuai Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor SK-173/MBU/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT KAI (Persero), menggantikan Sdr. Cris Kuntadi.

b) Komisaris

- (1) Sri Paduka Mangkoenagoro X, sesuai Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor SK-174/MBU/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Anggota Dewan Komisaris PT KAI (Persero), menggantikan Sdr. Freddy Haris.

(2) Mohammad Risal Wasal, sesuai Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor SK-207/MBU/09/2022 tanggal 20 September 2022 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT KAI (Persero).

3) Pemegang Saham/RUPS menetapkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan komposisinya.

Jumlah Dewan Komisaris PT KAI (Persero) sebanyak sembilan orang tidak melebihi jumlah Direksi sebanyak sembilan orang. RUPS telah menetapkan secara *eksplisit* anggota Dewan Komisaris Independen sebanyak 5 orang atau Dewan Komisaris yang berasal dari kalangan di luar BUMN dan Pemerintah, yaitu Said Aqil Siradj sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, Riza Primadi, Rochadi, Endang Tirtana dan Johan Sirait.

4) Pemegang Saham/RUPS menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris.

Pemegang Saham telah menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris sesuai Surat Edaran Menteri BUMN Nomor S-375/MBU/2011, SE-01/MBU/2004 tanggal 9 Februari 2004, dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Perubahan atas PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, dan Surat Edaran Nomor S-375/MBU/2011 yang menyebutkan bahwa anggota Dewan Komisaris BUMN hanya diperkenankan menjadi anggota Dewan Komisaris pada satu BUMN, namun belum mengatur batasan jumlah maksimum jabatan Dewan

Komisaris menjadi Komisaris/Pengawas pada perusahaan swasta, BUMD dan BLU.

- 5) Pemegang Saham/RUPS memberhentikan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemegang Saham/RUPS memberhentikan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan melaksanakan pemanggilan kepada yang akan diberhentikan dan dinyatakan dalam Berita Acara sebelum ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri BUMN. Pada Tahun 2022 terdapat pemberhentian Dewan Komisaris sesuai dengan masa jabatannya. Pemberhentian Dewan Komisaris dikukuhkan oleh Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS sebagai berikut:

- a) SK-174/MBU/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022

Memberhentikan dengan hormat Sdr. Freddy Harris sebagai Komisaris PT KAI (Persero) yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN SK-232/MBU/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.

- b) SK-173/MBU/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022

Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Cris Kuntadi sebagai anggota Komisaris PT KAI (Persero) yang diangkat berdasarkan keputusan menteri BUMN Nomor SK-137/MBU/7/2017 tanggal 21 Juli 2017 sejak tanggal 21 Juli 2022 dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.

Kami merekomendasikan kepada Pemegang Saham PT Kereta Api Indonesia (Persero) agar menetapkan batasan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris di perusahaan swasta atau perusahaan/badan lain/BUMD/BLU.

c. RUPS memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

1) Pemegang Saham/RUPS memberikan pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP.

Pemegang Saham/RUPS telah menetapkan Pedoman Penyusunan RJPP, yaitu Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-102/M-BUMN/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang BUMN.

Perusahaan telah menyusun RJPP Tahun 2020-2024 dan telah disampaikan ke Pemegang Saham tanggal 31 Oktober 2019 dan telah diberikan Pengesahan oleh Pemegang Saham bersamaan dengan pengesahan RKAP 2021 pada tanggal 29 Januari 2021 yang dituangkan dalam Risalah RUPS Tahunan Nomor KG.105/I/3/KA-2021. Pengesahan diberikan setelah diterimanya tanggapan RJPP dari Dewan Komisaris sesuai Surat 07/CF/KOM/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 dan Surat Dirut Nomor KP.102/I/3/KA-2021 tanggal 8 Januari 2021 hal penyampaian Paparan Penyesuaian RJPP sebagai pelengkap RKAP 2021.

2) Pemegang Saham/RUPS memberikan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Pedoman Penyusunan RKAP PT KAI (Persero) didasarkan pada Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Surat Nomor S-683/MBU/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023.

Pemegang Saham telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan RKAP yang didahului oleh pemaparan mengenai RKAP PT KAI (Persero) oleh Direksi, penyampaian tanggapan oleh Dewan Komisaris, selanjutnya Pemegang Saham memberikan pengesahan terhadap Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 yang dinyatakan dalam Risalah RUPS tentang Pengesahan RKAP Tahun 2022 Nomor NR/3/KG.105/I/KA/2022 Tanggal 27 Januari 2022. Namun demikian Pengesahan RKAP belum tepat waktu yaitu seharusnya dilaksanakan paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan.

3) Pemegang Saham/RUPS memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS. Pemegang Saham telah memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS diantaranya Surat Menteri BUMN:

- 1) Nomor S-491/MBU/08/2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Persetujuan Rencana Setoran Modal PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia.
- 2) Nomor S-271/MBU/04/2022 tanggal 27 April 2022 tentang Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas Rencana Setoran Modal kepada PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek.
- 3) Nomor S-835/MBU/12/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Persetujuan RUPS atas Rencana Setoran Modal kepada PT Railink melalui mekanisme Konversi SHL.
- 4) Nomor S-344/MBU/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 Perihal tentang Persetujuan Rencana Penerbitan Obligasi dan/atau Sukuk Berkelanjutan PT KAI (Persero).
- 5) Nomor S-837/MBU/12/2022 tanggal 22 Des 2022 tentang Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Kereta Api Indonesia (Persero) sehubungan dengan Pelaksanaan Transaksi Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta.
- 6) SR-514/MBU/08/2022 tanggal 23/8/2022 tentang Persetujuan Pengangkatan Anggota Dekom Anak Perusahaan PT KAI (Persero).

Namun demikian pendokumentasian pembahasan pengambilan keputusan RUPS (fisik maupun bukan fisik) yang didahului dengan pemaparan oleh Direksi atau permintaan penjelasan atas hal-hal yang diagendakan untuk diputuskan oleh RUPS/Pemilik Modal belum memadai. Hal ini disebabkan masih terdapat pemberian persetujuan aksi korporasi yang belum tepat waktu yaitu paling lambat 30 hari untuk KSO/BOT dan maksimal 7 hari untuk pelepasan aset setelah dokumen usulan dan penjelasan diterima secara lengkap.

Kami merekomendasikan kepada Pemegang Saham PT Kereta Api Indonesia (Persero) agar:

- Melakukan *update* atas KEP-101/M-BUMN/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN dengan kondisi terkini dan *best practice* dalam pengelolaan perusahaan.
- Mendokumentasikan pembahasan usulan aksi korporasi Direksi dan memberikan persetujuan usulan aksi korporasi Direksi secara tepat waktu yaitu paling lambat 30 hari untuk KSO/BOT dan maksimal 7 hari untuk pelepasan aset setelah dokumen usulan dan penjelasan diterima secara lengkap.

d. RUPS memberikan persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

- 1) RUPS memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan Komisaris.
 - a) RUPS/Pemegang Saham telah menetapkan pedoman penilaian kinerja Direksi secara kolegal berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Badan Pembina BUMN Nomor KEP-211/M-PBUMN/1999 tanggal 24 September 1999 tentang Pedoman Pembuatan Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan; Surat

Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN; dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-11/MBU/11/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN yang mengatur KPI Direksi secara individual.

Kontrak Manajemen antara Pemegang Saham PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Direksi dan Dewan Komisaris telah ditandatangani pada tanggal 27 Januari 2022. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Kontrak Manajemen antara Direksi dan Dewan Komisaris Nomor KP.302/II/21/KA-2022 tanggal 11 Februari 2022 yang memuat target-target KPI perusahaan Tahun 2022 (secara kolegal) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Risalah Rapat RUPS RKAP PT Kereta Api Indonesia (Persero) tahun 2022 Nomor NR/3/KG.105/I/KA/2022 tanggal 27 Januari 2022. Namun Kontrak Manajemen yang memuat KPI Direksi Individual dibuat terpisah dan ditandatangani bersama antara Dewan Komisaris dengan masing-masing Direksi pada tanggal 7 April 2022 sehingga belum mendapat penetapan dari RUPS.

Dewan Komisaris dalam laporan tugas pengawasannya menilai bahwa Direksi (secara kolegal) di tahun 2021 mampu beradaptasi dengan baik menyikapi pandemi yang terjadi sejak 2020, terkait upaya menekan kerugian pada penyelenggaraan operasional, adaptasi atas kebijakan pemerintah terkait protokol kesehatan dan pengendalian Covid-19, kebijakan investasi yang selektif, serta mampu untuk menjalankan amanah proyek-proyek penugasan yang cukup krusial di tahun 2021. Penilaian tersebut termuat dalam Risalah RUPS tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Nomor KG 113/V/23/KA-2022 tanggal 17 Mei 2022 dan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 20 Mei 2022.

Berita Acara memuat Keputusan RUPS yang menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan. Hal ini dimuat dalam laporan Nomor 00048/2.1030/AU.1/06/0501-1//1/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan perseroan.

Namun tidak dijumpai penilaian kinerja individual Direksi dalam Risalah RUPS maupun Keputusan Menteri.

- b) Penilaian kinerja Dewan Komisaris berpedoman Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-9/MBU/09/2021 tentang Evaluasi Kinerja Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Kontrak Manajemen antara Pemegang Saham PT KAI (Persero) dengan Direksi dan Dewan Komisaris telah ditandatangani pada tanggal 27 Januari 2022 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rapat Umum Pemegang Saham PT Kereta Api Indonesia (Persero) tahun 2022 Nomor NR/3/KG.105/I/KA/2022 tanggal 27 Januari 2022 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris. Penilaian kinerja kolegal Dewan Komisaris dimuat dalam Risalah RUPS tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Nomor KG 113/V/23/KA-2022 tanggal 17 Mei 2022 dan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 20 Mei 2022. Berita Acara memuat Keputusan RUPS yang menyetujui laporan

Tahunan Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan. Hal ini dimuat dalam laporan Nomor 00048/2.1030/AU.1/06/0501-1//1/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan perseroan.

2) RUPS menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Pemegang Saham telah menetapkan pedoman gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas serta tantiem/insentif kinerja Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dengan PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Pemegang Saham telah menetapkan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Kereta Api (Persero) sesuai Surat Menteri BUMN Nomor SR-47/Wk2.MBU.E/08/2022, 31 Agustus 2022 hal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2022.

3) Pemegang Saham/RUPS menetapkan auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan perusahaan.

Penunjukan auditor eksternal pada PT KAI (Persero) dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Laporan Keuangan Tahunan BUMN diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS/Menteri dari calon-calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar PT KAI (Persero) pasal 15.

Sesuai Risalah RUPS Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 Nomor KG.113/V/23/KA-2020 tanggal 17 Mei 2022, Pemegang Saham PT KAI (Persero) memutuskan Penetapan KAP untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Pelaksanaan PKBL Tahun Buku 2022, yaitu:

- a) Menetapkan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan LK PKBL Tahun Buku 2022 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan untuk tahun Buku 2022.
 - b) Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
- 4) Pemegang Saham/RUPS memberikan persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Pemegang Saham telah memiliki Pedoman Penyusunan Laporan Tahunan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, dan Surat Edaran Menteri

BUMN Nomor SE-9/MBU/09/2021 tentang Evaluasi Kinerja Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Namun demikian belum menetapkan pedoman penyusunan KPI Dewan Komisaris dan pedoman penyusunan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Pemegang Saham melakukan telaah dan persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan sebagai berikut:

- Telaah dilakukan sebelum pelaksanaan RUPS dengan mendasari laporan hasil audit KAP dan memperhatikan tanggapan Dewan Komisaris.
- Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 sesuai RUPS laporan Pertanggungjawaban Keuangan PT KAI Tahun Buku 2021 dalam Risalah RUPS tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Nomor KG 113/V/23/KA-2022 tanggal 17 Mei 2022 dan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 20 Mei 2022.

Dalam Risalah RUPS tersebut termasuk persetujuan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan dalam tahun buku tersebut, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan perseroan. Namun demikian persetujuan laporan tugas Dewan Komisaris termasuk KPI, belum berdasarkan telaahan capaian kinerja Dewan Komisaris karena pedoman penyusunan KPI dan laporan Dewan Komisaris belum terstandarisasi.

- 5) Pemegang Saham/RUPS menetapkan penggunaan laba bersih. Kebijakan Pemegang Saham atas penetapan penggunaan laba bersih tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 26. Berdasarkan

Risalah RUPS tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Nomor KG 113/V/23/KA-2022 tanggal 17 Mei 2022 memutuskan tidak ada penetapan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian perseroan Tahun Buku 2021 karena perusahaan mengalami kerugian di tahun 2021.

- 6) Pengesahan terhadap Laporan Tahunan dan persetujuan terhadap Laporan Keuangan dilaksanakan tepat waktu.

Pengesahan dan persetujuan laporan dilaksanakan tepat waktu pada tanggal 17 Mei 2022 sesuai RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 Nomor KG 113/V/23/KA-2022 tanggal 17 Mei 2022.

Atas permasalahan tersebut, kami merekomendasikan kepada Pemegang Saham/RUPS agar:

- 1) Menetapkan KPI Direksi secara Individu dan melakukan penilaian pencapaian KPI Direksi yang hasilnya dituangkan dalam risalah RUPS.
- 2) Menetapkan Pedoman penyusunan KPI Dewan Komisaris dan Pedoman penyusunan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris sesuai dengan Pedoman yang telah ditetapkan.

e. RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.

- 1) RUPS mengambil keputusan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan sehingga menghasilkan keputusan yang sah.

PT KAI (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang 100% sahamnya dimiliki oleh Negara, oleh karena itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, maka Menteri Negara BUMN bertindak selaku Pemegang Saham atau RUPS pada perusahaan perseroan (Persero).

- 2) RUPS mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil.
Dalam RUPS, Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata acara RUPS serta melakukan pembahasan atas pemaparan Direksi dan tanggapan Dewan Komisaris atas hasil kegiatan usaha perusahaan.

f. Pemegang Saham melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

- 1) Pemegang Saham memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
Arahan Pemegang Saham terkait dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik disampaikan pada saat RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan RUPS Pengesahan RKAP antara lain mengingatkan agar Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan berpedoman pada target RKAP dan KPI 2022 yang telah disahkan dengan tetap melaksanakan prinsip GCG serta melengkapi pengajuan persetujuan RUPS atas rencana aksi korporasi Direktur dengan tanggapan Dewan Komisaris, Pakta Integritas Direksi, kajian teknis, kajian hukum, kajian ekonomi dan kajian risiko.
Pemegang Saham telah melakukan upaya-upaya untuk menindaklanjuti *area of improvement* yang dihasilkan dari *assessment* tahun sebelumnya berupa *update* atas Peraturan Menteri BUMN yaitu Per-11/MBU/07/2021 tentang persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi BUMN dan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-9/MBU/09/2021 tentang Evaluasi Kinerja Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, namun belum semua *area of improvement* dari hasil *assessment* sebelumnya selesai ditindaklanjuti.
- 2) Pemegang Saham tidak mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.

Pemegang Saham tidak mencampuri kegiatan operasional perusahaan terlihat dari tidak adanya instruksi secara tertulis/surat/keputusan dari Pemegang Saham yang bersifat transaksional/operasional yang tidak berdasarkan usulan dari Direksi.

- 3) Pemegang Saham merespon terhadap informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian perusahaan yang signifikan.

Pemegang Saham telah menetapkan kebijakan/sistem penerimaan laporan gejala penurunan kinerja dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris setiap triwulan berupa laporan pencapaian kinerja triwulanan. Laporan pencapaian Kinerja Triwulanan dievaluasi dan selanjutnya diterbitkan tanggapan melalui surat tanggapan/arahan Pemegang Saham atau jika diperlukan dapat dilakukan rapat oleh Pemegang Saham.

Kami rekomendasikan kepada Pemegang Saham agar mendokumentasikan pembahasan dan meningkatkan upaya-upaya menindaklanjuti *area of improvement* yang dihasilkan dari *assessment* tahun sebelumnya yang belum terdokumentasikan.

3. Aspek Dewan Komisaris

Aspek *governance* yang terkait dengan Dewan Komisaris dinilai berdasarkan 12 (dua belas) indikator, yaitu:

- a. Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan;
- b. Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas dan menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris;
- c. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi;
- d. Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan;

- e. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan;
- f. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan;
- g. Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi;
- h. Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya;
- i. Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
- j. Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri rapat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- k. Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris; dan
- l. Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif.

Assessment yang dilakukan terhadap penerapan ke-12 indikator dengan 43 parameter yang diuji kesesuaiannya tersebut menghasilkan skor **31,683** dari skor maksimum **35** atau **90,525%** atau masuk dalam kategori **Sangat Baik**.

Tingkat pemenuhan masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.

- 1) Dewan Komisaris yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh perusahaan.

Kebijakan untuk diadakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat, tertuang dalam SK Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT KAI (Persero) Nomor 04/CH/KOM/III/2017 dan Nomor Kep.U/KO.101/III/15/KA-2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang

Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT KAI (Persero).

Pada Tahun 2022 terdapat pengangkatan 3 orang Komisaris baru, dan telah dilaksanakan program pengenalan bagi 2 anggota Komisaris baru namun program pengenalan yang diberikan belum menyajikan materi sebagaimana yang diatur dalam *Board Manual*.

- 2) Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai kebutuhan.

Dewan Komisaris telah menetapkan kebijakan program pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi dalam *Board Manual*.

Program Kerja dan Rencana Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2022 menganggarkan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris berupa seminar, diklat, *benchmark*, pelatihan/sertifikasi dalam dan luar negeri untuk 5 kali kegiatan yaitu pelatihan senilai Rp4.003.000.000,00.

Realisasi pelaksanaan program pelatihan Dewan Komisaris sebanyak 4 kali dari target 5 kali dalam RKA Dewan Komisaris berupa: Pelatihan '*Audit Committees in a New Era of Governance*' yang diadakan oleh Kampus Harvard Business School (HBS) tanggal 16-18 November 2022, ACT Workshop BOD BOC Retreat '*Let's Grow Together*' Peningkatan Kompetensi tanggal 25-26 November 2022, Onboarding Commissioner Program Angkatan 4 Tahun 2022 tanggal 17 Maret s.d. 21 April 2022 dan *Onboarding Commissioner* Program Angkatan 6 Tahun 2022 tanggal 2 November s.d. 21 Desember 2022.

Namun demikian belum semua pelatihan tersebut dibuatkan laporan kegiatan dan realisasi pelatihan belum sesuai dengan RKA Dewan Komisaris.

Kami merekomendasikan kepada Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) agar:

- Menginstruksikan Sekretaris Perusahaan menyelenggarakan, mempersiapkan materi program pengenalan Direksi dan Komisaris minimal memuat pengenalan prinsip-prinsip GCG, gambaran umum BUMN, kewenangan yang didelegasikan, tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris, serta mendokumentasikan program pengenalan perusahaan Dewan Komisaris dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan yang memuat materi yang disampaikan, kunjungan yang dilaksanakan dan dilengkapi daftar kehadiran serta foto kegiatan.
- Konsisten dalam melaksanakan pelatihan/peningkatan kompetensi setiap anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan dalam Laporan Pelatihan Dewan Komisaris sesuai dengan RKA Dewan Komisaris yang telah disetujui oleh RUPS.

b. Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas dan menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

- 1) Dewan Komisaris memiliki kebijakan dan melaksanakan pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris.

Kebijakan yang mengatur tentang kewajiban Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas tertuang dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* PT KAI (Persero).

Dewan Komisaris telah menetapkan Pembagian Tugas, yang ditetapkan dalam ketetapan Dewan Komisaris Nomor 05/CH/DEKOM/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT KAI (Persero). Pembagian Tugas Dewan Komisaris telah mencakup seluruh bidang tugas Direksi.

Penetapan penugasan anggota Dewan Komisaris sebagai Ketua Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris:

- a) Nomor 08/CH/DEKOM/XI/2022 tanggal 23 November 2022 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit.

- b) Nomor 09/CH/DEKOM/XI/2022 tanggal 23 November 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPMR PT KAI (Persero).
 - c) Nomor 03/CH/DEKOM/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
- 2) Dewan Komisaris menetapkan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris.

Mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris termasuk standar (jangka) waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan dan tingkat kesegeraan untuk mengkomunikasikan keputusan Dewan Komisaris kepada Direksi, telah diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan *Board Manual*.

Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan telah mengikuti mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar PT KAI (Persero) pasal 16 dan *Board Manual* halaman 36 yang secara formal terdiri dari (1) pengambilan keputusan melalui rapat Dewan Komisaris; (2) pengambilan keputusan diluar rapat (melalui *sirkuler* dan lain-lain). Namun demikian tingkat kesegeraan pengambilan keputusan atas usulan tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris belum sepenuhnya sesuai dengan standar waktu yang diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 11 dan *Board Manual* halaman 36 yaitu 14 (empat belas) hari sejak permohonan Direksi diterima Dewan Komisaris secara lengkap. Hal ini terlihat dari 14 (empat belas) usulan tindakan Direksi yang perlu mendapat otorisasi/rekomendasi/tanggapan Dewan Komisaris, hanya 5 (lima) pemberian rekomendasi yang dilakukan tepat waktu sementara sisanya sebanyak 9 (sembilan) usulan masih diatas standar waktu yang ditetapkan.

- 3) Dewan Komisaris menyusun rencana kerja setiap tahun yang memuat sasaran/ target yang ingin dicapai dan melaporkan secara tertulis kepada RUPS.

Rencana Kerja Anggaran dan KPI Dewan Komisaris disusun berdasarkan pada Anggaran Dasar dan *Board Manual* bahwa salah satu kewajiban Dewan Komisaris adalah menyusun Program Kerja Tahunan dan menjadi bagian dalam RKAP Perusahaan. Dewan Komisaris telah menyusun Program Kerja dan Rencana Anggaran Dewan Komisaris terdiri dari Program Pengawasan dan Penasehatan Dewan Komisaris, Anggaran Dewan Komisaris dan *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) memuat sasaran/ target yang ingin dicapai (indikator kinerja utama dan target-targetnya yang mencerminkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat). Namun penyampaian RKA Program Kerja dan Rencana Anggaran Direksi belum tepat waktu. Seharusnya rancangan RKA Dewan Komisaris diserahkan sebelum tanggal 1 Oktober namun baru disampaikan pada tanggal 26 November 2021.

RKA Perusahaan telah ditetapkan Pemegang Saham dalam Risalah RUPS Nomor NR/3/KG.105/I/KA/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2022 dan termasuk di dalamnya RKA Dewan Komisaris.

- 4) Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi perusahaan sesuai kewenangannya.

Kebijakan tentang informasi yang harus disediakan oleh Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 18 dan 19 juga dalam *Board Manual* halaman 70 yang menyatakan kewajiban Direksi memberikan penjelasan tentang segala hal yang diminta Dewan Komisaris dan membuat laporan yang memuat informasi yang disampaikan secara berkala dan jika diminta oleh Dewan Komisaris.

Dalam praktiknya jika informasi tambahan diperlukan, Dewan Komisaris meminta informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Direksi atau meminta informasi tersebut dalam Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi.

Kami merekomendasikan kepada Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) agar:

- Konsisten dalam memberikan persetujuan terhadap usulan tindakan Direksi dalam jangka waktu berkisar 7 hari sampai dengan 14 hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi.
- Penyampaian RKA Dewan Komisaris ke Direksi dilakukan tepat waktu sebelum penyampaian Rancangan RKAP kepada Pemegang Saham tanggal 1 Oktober tahun berjalan.

c. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.

1) Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi.

Mekanisme pemberian persetujuan terhadap RJPP telah diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 15 dan *Board Manual* halaman 15.

Pada Tahun 2022 tidak terdapat rolling RJPP Perusahaan. Terkait Penasehatan Dewan Komisaris pada RJPP Perusahaan yaitu RJPP 2020-2024 adalah:

- Telaah RJPP 2020-2024 dalam Rapat BOD BOC tanggal 23 Oktober 2019.
- Tanggapan atas usulan RJPP tersebut kepada Direksi tanggal 31 Oktober 2019.
- Tanggapan tertulis mengenai rancangan RJPP kepada RUPS dengan surat nomor 07/CF/KOM/I/2021 tanggal 18 Januari 2021.

RJPP Tahun 2020-2024 telah disahkan oleh Pemegang Saham bersamaan dengan pengesahan RKAP 2021 pada tanggal 29 Januari 2021 yang dituangkan dalam Risalah RUPS Tahunan Nomor KG.105/I/3/KA-2021 tanggal 29 Januari 2021.

- 2) Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.

Kebijakan pemberian persetujuan/tanggapan/pendapat Dewan Komisaris terhadap rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi tertuang dalam Anggaran Dasar Pasal 15 dan *Board Manual* halaman 74.

Dalam implementasinya Dewan Komisaris telah melakukan telaah/pembahasan atas usulan RKAP Tahun 2023 dalam Rapat BOD BOC tanggal 26 Oktober 2022 dan 30 November 2022.

Dewan Komisaris menyampaikan hasil telaahan usulan RKAP kepada Pemegang Saham melalui surat Nomor 01/CF/KOM/I/2022 tanggal 05 Januari 2022 perihal Tanggapan dan Saran Dewan Komisaris atas Usulan RKAP Tahun 2022. Tanggapan tersebut telah mencakup aspek penting dalam operasional dan target-target kinerja, namun belum menyajikan keselarasan/ketidaksiharasan RKAP dengan RJP. Selain itu dokumentasi proses telaahan organ pendukung Dewan Komisaris sampai dengan proses Pembahasan tindak lanjut arahan Dewan Komisaris atas rancangan RKAP oleh Direksi sebelum disajikan dalam Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP yang disampaikan ke RUPS belum memadai.

Kami merekomendasikan kepada Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) agar:

- Konsisten dalam menyajikan keselarasan/ketidaksiharasan RKAP dengan RJPP dalam tanggapan RKAP kepada Pemegang Saham.
- Konsisten dalam mendokumentasikan proses telaahan organ pendukung Dewan Komisaris sampai dengan proses pembahasan tindak lanjut arahan

Dewan Komisaris atas rancangan RKAP dari Direksi sebelum disajikan dalam Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP yang disampaikan ke RUPS.

d. Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.

- 1) Dewan Komisaris memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan secara tepat waktu dan relevan.

Kebijakan/kriteria Dewan Komisaris mengenai informasi lingkungan bisnis dan permasalahannya yang diperkirakan berdampak pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris diatur dalam *Board Manual* halaman 32. Pengaturan lebih lanjut mengenai lingkup lingkungan bisnis dan permasalahannya yang diperkirakan berdampak pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan dan mekanisme yang dilakukan Dewan Komisaris diatur dalam Draft *Board Manual* Bab I point D dan F.

Dalam memperbaharui pengetahuan tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan, diperoleh dari laporan manajemen (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) dan laporan evaluasi kinerja (bulanan) serta hasil kajian Direksi dan manajemen terkait hal yang dimintakan persetujuan/solusi permasalahan (dilampirkan dalam surat permintaan persetujuan), termasuk analisis dari Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta dukungan fasilitas teknologi dan sistem informasi perusahaan dapat digunakan oleh komisaris untuk mengakses perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.

Pada tahun 2022, Dewan Komisaris melakukan telaah mengenai isu-isu terkini tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam rapat-rapat Dewan Komisaris baik rapat internal maupun rapat gabungan. Beberapa isu yang dibahas, yaitu terkait setoran modal kepada PT MITJ, perubahan model bisnis Railink, rencana

penerbitan obligasi, pengalihan Kereta Api Basoetta, pembangunan Kereta Api di Sulawesi Selatan, rencana setoran modal PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, dan Progres Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Atas kondisi tersebut Dewan Komisaris telah memberikan saran/arahan strategi bisnis PT Kereta Api Indonesia (Persero) terkait isu-isu perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan tersebut dengan melibatkan peran Komite Komisaris. Arahkan dan saran yang diberikan tertuang dalam Risalah Rapat dan Surat Tanggapan Dewan Komisaris.

- 2) Dewan Komisaris dalam batas kewenangannya merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari *stakeholders* (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris ataupun penyampaian oleh Direksi.

Mekanisme bagi Dewan Komisaris untuk merespon/menindaklanjuti saran, permasalahan atau keluhan dari stakeholder diatur dalam *Board Manual* halaman 27 namun mekanisme lebih detailnya telah dirincikan dalam Draft *Board Manual* Bab I point F.2.

Dewan Komisaris dalam batas kewenangannya, telah merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari *Stakeholders* (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris ataupun yang disampaikan oleh Direksi dalam pembahasan dalam Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat BoD BoC. Pada tahun 2022 beberapa pembahasan dilakukan mengenai hubungan manajemen dengan Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA), kenaikan upah pokok pegawai, penutupan perlintasan KAI, keberadaan mushola didalam kereta dan pencegahan kasus pelecehan seksual di dalam kereta api. Proses pembahasan atas saran, permasalahan atau keluhan *stakeholder* yang dilakukan oleh Dewan Komisaris telah menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.

- 3) Dewan Komisaris memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern perusahaan.

Kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya diatur dalam *Board Manual* dan Komite *Audit Charter*.

Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris telah memuat rencana reviu kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern namun belum mengakomodasi rencana pelaksanaannya. Dewan Komisaris telah melakukan telaahan dan memberikan nasihat melalui rapat internal dan Rapat BoD BoC, dan pembahasan Komite Audit dengan Satuan Pengawas Intern (UI) yang berisi pembahasan laporan triwulanan perusahaan yang memuat efektivitas pengendalian pada tingkat aktivitas. Namun telaah atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas dan telaah atas *internal control report* belum dilaksanakan karena perusahaan belum melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas dan belum membuat *internal control report*.

- 4) Dewan Komisaris memberikan arahan tentang manajemen risiko perusahaan.

Kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko perusahaan dan pelaksanaannya diatur dalam *Board Manual* dan Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko.

Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2022 telah memuat rencana mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko.

Dalam praktiknya, Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang manajemen risiko dalam Rapat BoC BoD diantaranya mengenai rencana *focus group discussion* dalam rangka meningkatkan kepedulian (*awareness*) terhadap ERM, menaikkan Tingkat Kematangan Manajemen Risiko (*Risk Maturity Index*), melaksanakan sosialisasi ERM secara *offline* ke seluruh Daop, Divre dan anak perusahaan terkait ERM, peningkatan

kualitas SDM dibidang Manajemen Risiko. Selain itu dalam memberikan persetujuan atas usulan tindakan Direksi, Dewan Komisaris mempertimbangkan hasil kajian risiko atas usulan tindakan Direksi tersebut melalui telaahan Komite Pemantau Manajemen Risiko.

Terkait penyusunan RKAP 2023 berbasis risiko, Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Manajemen Risiko telah memberikan penasihatn agar mengikutsertakan Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) dalam pembahasan dan pengambilan persetujuan sebelum RKAP ditetapkan.

- 5) Dewan Komisaris memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan.

Kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan diatur dalam *Board Manual*.

Rencana pembahasan terkait arahan tentang sistem teknologi informasi tertuang dalam Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2022. Dewan Komisaris memberikan arahan terkait implementasi sistem teknologi informasi dalam Rapat Dewan Komisaris dan BoC BoD diantaranya *Milestones transformasi digital PT KAI*, prioritas strategi untuk transformation digital KAI, KPI dari proyek transformasi digital, sinkronisasi regulasi PT KAI dengan peraturan eksisting yang belum mengarah pada digitalisasi dan kredibilitas/pengalaman McKinsey sebagai konsultan bukan hanya sekedar mengelola tetapi juga kemampuan untuk mengembangkan proses transformasi digital. Namun belum memberikan penasihatn pelaksanaan sistem teknologi informasi yang dihasilkan dari telaah atas ITMP 2020-2024 dan pelaksanaannya termasuk digitalisasi sarana, *big data, customer relationship management (CRM)* dan *railway management system*.

- 6) Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir.

Kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya manusia telah diatur dalam *Board Manual* dan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

Rencana pembahasan terkait arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir tertuang dalam Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2022. Dalam implementasinya Dewan Komisaris dibantu Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan telaah dan memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dalam rapat BoD BoC meliputi *Human Capital Transformation, Work Load Analyst, Cluster Talent Committee* BUMN sektor logistik, *talent pool* kalangan milenial dan perempuan, peningkatan kualitas BOD-1, rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi dan perubahan struktur organisasi.

- 7) Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK).

Kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia telah diatur dalam *Board Manual* dan Komite *Audit Charter*.

Rencana pembahasan terkait arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK) tertuang dalam Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2022.

Dalam implementasinya Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum dalam rapat internal Dewan Komisaris dengan Komite Audit, rapat BoD BoC, serta dimuat dalam

tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulanan diantaranya arahan mengenai pencatatan *double* pada Aset KAI, potensi perbedaan pencatatan/pembukuan 1.485 unit ATDO yang disetujui dihapusbukukan dengan realisasi hasil penjualannya, besaran kewajiban utang piutang agar dilakukan dengan benar, pencadangan biaya atas *Cost Overrun* (COR) pada proyek-proyek KAI dan aksi korporasi agar dilakukan selaras dengan kebijakan akuntansi, peraturan perpajakan, POJK dan peraturan lainnya serta Direksi agar mengkaji eksposur kinerja keuangan untuk 5-10 tahun ke depan sebagai dampak dari pengalihan pengelolaan KA Basoetta. Dengan demikian diharapkan agar Laporan Keuangan menjadi lebih mencerminkan aset produktif yang akan lebih dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan.

- 8) Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.

Kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa beserta pelaksanaannya diatur dalam *Board Manual*.

Rencana pembahasan terkait arahan tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya tertuang dalam Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2022. Dalam implementasinya Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaannya dalam rapat internal Dewan Komisaris dengan Komite Audit dan rapat BoC BoD diantaranya:

- Melakukan reviu terhadap mekanisme sistem pengadaan barang dan jasa yang selama ini berjalan, dan melakukan penyempurnaan dengan menyusun SOP Pengadaan Barang dan Jasa yang lebih komprehensif, simple dan fleksibel, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi dapat menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/*owner estimate* yang wajar sebelum menawarkan barang/jasa kepada rekanan. Untuk

beberapa proyek besar yang memiliki nilai HPS sangat tinggi, perlu terlebih dahulu direviu tingkat kewajarannya oleh SPI.

- Menyusun perencanaan investasi yang memperhitungkan kecukupan waktu perencanaan, proses pengadaan dan pelaksanaan konstruksi berdasarkan kajian dan mitigasi risiko yang memadai mengingat rendahnya penyerapan investasi di tahun 2022.
- Melakukan evaluasi terhadap kesiapan dan kelengkapan dokumen program investasi untuk meminimalkan revisi spesifikasi teknis/DED, perubahan lokasi, lelang berulang dan kelengkapan dokumen pertanahan/perijinan untuk menjamin pelaksanaan pengadaan secara efektif dan efisien.

9) Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut diatur dalam *Board Manual*.

Rencana pembahasan terkait arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut dimuat dalam Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2022.

Dewan Komisaris telah memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut dalam rapat internal Dewan Komisaris dengan Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko, serta rapat BoC BoD diantaranya:

- Mendukung upaya Direksi dalam melakukan penguatan terhadap aspek *safety* dan *security* dengan peningkatan beban prasarana perkeretaapian sebesar 41% (skenario base) dan 58% (skenario optimis) untuk menghilangkan *backlog*, peningkatan kecepatan lintas, peningkatan performa dan kualitas sarana dan prasarana serta inovasi

berkelanjutan dengan penerapan proses digitalisasi dalam perawatan dalam mendukung efisiensi biaya.

- Pelaksanaan dan pengawasan SOP yang ketat pada SDM yang menjalankan kereta sehingga meminimalkan kecelakaan dan kelebihan muatan.
- Mengedukasi masyarakat bahwa KAI adalah milik bersama guna mengurangi tingkat kriminalitas pada operasionalitas kereta.
- Meningkatkan cara mencegah timbulnya kejadian pelecehan seksual seperti memperbaiki dan memantau kembali CCTV, menyediakan gerbong khusus wanita pada perjalanan jarak jauh atau memberikan pilihan tempat duduk sesuai dengan jenis kelamin kepada penumpang.
- Perlu koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah terkait penutupan lintasan sebidang daerah yang rawan terjadi kecelakaan untuk keselamatan.
- Perlu dilakukan langkah-langkah persiapan yang matang oleh perusahaan serta mitigasi risiko cuaca ekstrim di saat Nataru pada semua titik rawan dalam rangka memberikan pelayanan dan keselamatan kepada penumpang.

Kami merekomendasikan kepada Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) agar:

- a) Mendorong manajemen agar melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas, dan menyusun *Internal Control Report*.
- b) Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi yang dihasilkan dari telaah atas ITMP 2020-2024 dan pelaksanaannya yang dilakukan Komite Komisaris.

e. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.

- 1) Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.

Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga seperti yang diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual*.

Pemantauan Kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundangan telah masuk dalam program kerja Dewan Komisaris Tahun 2022. Arahan/nasehat Dewan Komisaris kepada Direksi mengenai kepatuhan perusahaan dalam menjalankan perundang-undangan dan Anggaran Dasar serta seluruh perjanjian dan komitmen dengan pihak ketiga disampaikan dalam surat-surat persetujuan Dekom atas usulan tindakan Direksi dan dalam Risalah Rapat BoC dan BoD melalui telaahan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Telaahan atas kepatuhan Direksi terhadap Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dilakukan terhadap permasalahan hukum terkait aset di Medan, setoran modal ke PT MITJ, tagihan PNBP *Track Access Charge* (TAC), Penghapusbukuan ATDO, isu strategis proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), permasalahan aset KAI yang masuk ke litigasi dan nonlitigasi dan pemutusan kerjasama secara sepihak. Dewan Komisaris juga memandang pentingnya dilakukan koordinasi secara intensif dengan penegak hukum agar perusahaan terhindar dari permasalahan hukum di masa yang akan datang. Tidak terdapat permasalahan ataupun pelanggaran hukum oleh Direksi di tahun 2022.

- 2) Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP.

Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP seperti yang diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* sesuai rencana yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris tahun 2022. Evaluasi pencapaian Perusahaan yang mencakup kesesuaian pelaksanaan program kerja (inisiatif perusahaan) dan anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP dilakukan dalam rapat intern berkala BOC maupun rapat berkala BOC-BOD terutama membahas realisasi RKAP bulanan tahun berjalan serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris.

Laporan Manajemen yang disusun oleh Direksi secara triwulan/semester/tahunan telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris. Hasil evaluasi Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan RKAP disampaikan kepada Pemegang Saham/RUPS melalui Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tiap triwulan/tahunan.

- 3) Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS.

Kebijakan Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS serta pelaksanaan kebijakan tersebut diatur dalam *Board Manual*. Dalam proses pemberian otorisasi atau rekomendasi, Dewan Komisaris bersama dengan Komite Komisaris membahas dan memastikan bahwa tindakan-tindakan strategis yang membutuhkan persetujuan atau rekomendasi Dewan Komisaris telah didukung dengan dokumen dan analisis risiko yang memadai serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pemberian otorisasi atau rekomendasi belum seluruhnya sesuai dengan *Board Manual*. Masih terdapat pemberian rekomendasi yang melebihi 14 hari sejak usulan atau dokumen secara lengkap diterima oleh Dewan Komisaris diantaranya persetujuan Setoran Modal PT MITJ, persetujuan pengurus anak perusahaan, rencana setoran modal PT Railink,

penetapan struktur organisasi BOD-1, rencana penghapusan/penjualan ATDO dan rencana pengalihan bisnis KA Bandara Soetta.

4) Dewan Komisaris mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS.

Kebijakan dan prosedur Dewan Komisaris mengenai proses penunjukan calon auditor eksternal dan/atau penunjukan kembali auditor eksternal dan penyampaian usulan calon auditor eksternal kepada RUPS telah dimuat dalam *Board Manual* dan Piagam Komite Audit, sesuai rencana yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2022.

Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal dengan kronologis sebagai berikut:

- Komite Audit melakukan evaluasi atas kinerja KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (*member of the RSM network*) yang telah melakukan Audit Laporan Keuangan PT KAI (Persero) selama 4 tahun berturut-turut dimana telah memiliki pemahaman yang cukup atas kegiatan operasional KAI yang bergerak dibidang perkeretaapian dan tetap dapat menjaga independensinya, serta masih dalam batas yang diperbolehkan oleh regulasi yaitu masih di bawah 6 tahun.
- Usulan auditor eksternal disampaikan Dewan Komisaris kepada RUPS sesuai surat Nomor 26/CG/KOM/IV/2022 tanggal 4 April 2022 perihal Usulan Penetapan KAP untuk Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022.
- Sesuai dengan Risalah RUPS tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Nomor KG 113/V/23/KA-2022 tanggal 20 Mei 2022, pada agenda kelima bahwa RUPS menetapkan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Member of The RSM Network) sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dan melimpahkan

kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

Namun demikian dalam usulan auditor eksternal oleh Dewan Komisaris kepada RUPS belum mencantumkan batasan besarnya honorarium untuk auditor eksternal tersebut dan belum mencantumkan ketentuan dan standar yang berlaku dalam mengevaluasi kinerja Auditor Eksternal tersebut.

- 5) Dewan Komisaris memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara efektif serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris.

Kebijakan Dewan Komisaris tentang pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris tertuang dalam *Board Manual*. Mekanisme merespon saran, harapan, permasalahan, keluhan dan/atau laporan dugaan pelanggaran/pengaduan dalam *Board Manual* dan Peraturan Direksi Nomor Per.U/KL.104/XI/I/KA-2020 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*).

Dewan Komisaris dibantu Komite Audit telah melakukan penilaian efektivitas pelaksanaan auditor eksternal dan auditor internal, antara lain:

- a) Monitoring Pelaksanaan Audit KAP Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (*Member of The RSM Network*). Komite Audit berpandangan bahwa kinerja RSM di tahun 2021 jauh lebih baik dari kinerjanya di tahun 2020, mencakup *Deliverables* laporan secara tepat waktu termasuk laporan baru dari tambahan *scope* audit di tahun 2021. Saran perbaikan khususnya pada kualitas PSA 62 termasuk diantaranya yang terkait dengan PBJ dan *Management Letter* yang diharapkan dapat lebih tajam dan lebih

memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat memberikan nilai tambah bagi Persero. Namun demikian penilaian mengenai kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan publik belum dilakukan.

- b) Evaluasi Kinerja Satuan Pengawas Intern s.d. Agustus 2022 yaitu Kinerja Eksternal s.d. akhir Triwulan III 2022 telah selesai 84%, capaian ini lebih baik dari Triwulan III 2021 (83%). Atas Temuan dan Rekomendasi dari KAP telah selesai 100% dan capaian ini juga telah divalidasi oleh KAP RSM demikian juga dengan Rekomendasi terkait arahan Pemegang Saham yang juga telah selesai 100%. Saran perbaikan agar Unit Internal Audit menerapkan *Risk Based Audit* sehingga pelaksanaan audit internal dapat lebih efisien dan efektif serta tepat sasaran dalam menentukan prioritas objek audit yang *high risk* untuk menghindari temuan berulang dan mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Selain itu Internal Audit dapat menambahkan terkait dengan PBJ pada objek audit tahun 2022 dengan fokus mereviu pengadaan dengan nilai dan risiko yang signifikan terhadap perusahaan. Namun belum melakukan penilaian mengenai kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit internal.
 - c) Pada Tahun 2022 tidak terdapat pengaduan yang berkaitan dengan PT KAI (Persero) yang masuk ke Dewan Komisaris.
- 6) Dewan Komisaris melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala penurunan kinerja perusahaan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi.

Kebijakan dan prosedur tentang pelaporan gejala menurunnya kinerja perusahaan tertuang dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual*.

Pada tahun 2022, Dewan Komisaris mengapresiasi upaya yang telah dilakukan jajaran Direksi atas peningkatan capaian kinerja perusahaan,

tidak ditemui gejala menurunnya kinerja perusahaan, namun sedikit yang perlu menjadi perhatian Direksi adalah rendahnya penyerapan anggaran investasi khususnya penundaan investasi proyek Sumbagsel.

Dewan Komisaris secara rutin melaporkan mengenai kinerja perusahaan setiap triwulan dan tahunan kepada Menteri BUMN sebagai Pemegang Saham.

Kami merekomendasikan kepada Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) agar:

- a) Konsisten memberikan persetujuan atas transaksi/tindakan Direksi secara tepat waktu yaitu paling lambat 14 hari sejak usulan atau dokumen secara lengkap diterima Dewan Komisaris.
- b) Mencantumkan batasan besaran honorarium atau besaran prosentase kenaikan dibanding tahun sebelumnya untuk eksternal auditor dalam pengusulan auditor eksternal kepada RUPS.

f. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya sesuai amanah Anggaran Dasar dan *Board Manual*, begitu juga pengawasan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan merupakan salah satu Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2022.

Dewan Komisaris melakukan pembahasan terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya dalam Rapat BoD BoC dan memberikan arahan diantaranya:

- Direksi agar menyusun strategi *komprehensif* atas pengalihan KA Basoetta sehingga berdampak positif secara kelembagaan antara Railink dan KCI serta hubungan tata kerja antara Railink dan KCI setelah dilakukan pengalihan.

- Direksi memberikan masukan dan upaya yang tepat kepada Manajemen untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dalam rangka penguatan peran anak perusahaan.
- Perlu upaya perbaikan pengelolaan anak perusahaan dan entitas yang dimiliki oleh Perusahaan, termasuk penyempurnaan pedoman/peraturan internal terhadap pengelolaan anak dan entitas tersebut, agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan.
- Terkait rencana pelepasan saham PT KCI upaya integrasi transportasi, Direksi agar mempedomani dan menindaklanjuti pendapat hukum (LO) sesuai surat Jamdatun Kejaksaan Agung yang telah disampaikan kepada Direksi, serta melaporkan tindak lanjutnya kepada Dewan Komisaris dikesempatan pertama.
- Terkait dengan rencana MOSS yang akan dilakukan Railink, namun beririsan dengan bisnis Balai Yasa karena terhambat oleh peraturan internal yang tidak membolehkan Balai Yasa menjalankan bisnis di luar KAI, maka perlu dipertimbangkan untuk merubah peraturan tersebut sehingga Balai Yasa bisa melakukan ekspansi bisnis lain dan *proceed* dana sebesar Rp90 Milyar dapat dialokasikan ke hal lain yang lebih bermanfaat.
- Dewan Komisaris mengusulkan untuk menjadikan Balai Yasa sebagai anak perusahaan KAI yang akan menjadi entitas bisnis baru yang tidak beririsan dengan bisnis pada Direktorat Prasarana. Direksi diminta untuk merencanakan dengan serius usulan dimaksud dan melaporkan progresnya kepada Dewan Komisaris.
- Direksi agar mengkaji kembali terkait dengan rencana bisnis MOSS (*Maintenance, Operation, Sparepart and Services*) yang akan dijalankan oleh Railink, juga mempertimbangkan usulan untuk menjadikan Balai Yasa atau Direktorat Sarana saja yang menjalankan bisnis MOSS tersebut.

Pada tahun 2022, Dewan Komisaris telah memberikan penetapan tertulis terhadap proses pengangkatan calon Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan pada proses pemilihan Direksi dan Dewan

Komisaris PT KCI, PT KALOG, PT KAPM, PT RMU, PT Kawista, dan PT Railink. Namun penetapan tertulis terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan tersebut belum sesuai ketentuan yaitu paling lambat 15 hari kalender terhitung sejak sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap nama calon Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan.

Kami merekomendasikan kepada Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) agar dalam proses pemberian pendapat tertulis mengenai proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan terdokumentasi dalam bentuk surat permintaan penjelasan/kelengkapan tambahan, sehingga terpantau prosesnya tidak melebihi jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak diterima secara lengkap dari Direksi

g. Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.

1) Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan.

Kebijakan dan kriteria seleksi bagi calon Direksi dan pengusulan calon tersebut kepada Pemegang Saham ditetapkan dalam *Board Manual*. Dewan Komisaris memberikan tanggapan atas bakal calon Direksi yang diusulkan Direksi untuk selanjutnya diusulkan kepada Pemegang Saham yaitu Surat Dekom kepada Menteri BUMN Nomor 13/CH/KOM/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 perihal *Talent Pool* PT KAI (Persero).

Dewan Komisaris PT KAI (Persero) menyampaikan bahwa PT KAI (Persero) melalui *Talent Committee* telah melakukan asesmen dan penilaian berdasarkan kinerja dan kapasitas dan telah menyerahkan 9 talenta pada jabatan Direksi (BoD) dan 12 talenta pada jabatan 1 tingkat di bawah Direksi (BoD-1) kepada Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) yang telah

menindaklanjuti dengan *Talent Classification Meeting* untuk mendapatkan *top talent* BUMN dari total 21 talenta tersebut. Dari hasil *Talent Classification Meeting* tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan rekomendasi usulan atas talenta-talenta yang berpotensi dalam mengisi posisi susunan Direksi eksisting di PT Kereta Api Indonesia (Persero) ke depan, berdasarkan pengalaman, prestasi, kompetensi, talenta dan riwayat pekerjaan, sesuai arahan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham (RUPS).

- 2) Dewan Komisaris menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham.

Kebijakan Dewan Komisaris mengenai penilaian kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham diatur dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual*. Dewan Komisaris menilai Direksi atas Kontrak Manajemen tahunan sebagai kinerja Direksi secara kolegal dan Kontrak Manajemen yang memuat KPI Direksi secara Individual.

Dewan Komisaris telah melakukan penilaian kinerja Direksi secara kolegal dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham. Namun penilaian kinerja Direksi individu berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing Direksi belum dilakukan.

- 3) Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi.

Kebijakan mengenai pengusulan remunerasi Direksi diatur dalam *Board Manual*. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris diusulkan kepada Menteri BUMN dengan surat Nomor 27/CG/KOM/IV/2022 tanggal 4 April 2022 perihal Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris atas Kinerja Tahun Buku 2021. Pengusulan dilakukan setelah mendapat telaah dari Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Renumerasi dalam Risalah

Rapat Intern Dewan Komisaris Nomor 07/CG/RIS/KOM/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 dengan menyampaikan hasil telaahan dalam agenda ke-3 pembahasan usulan remunerasi tahun Buku 2021.

Pengusulan tantiem/insentif kinerja telah mempertimbangkan hasil penilaian kinerja tahun 2021 atas capaian KPI sebesar 96,39 dan pencapaian tingkat kesehatan perusahaan sebesar 72,1 (A) atau naik 5,1%.

Kami merekomendasikan kepada Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) agar melakukan penilaian kinerja Direksi individu berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individual dan melaporkannya kepada Pemegang Saham.

h. Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.

Dewan Komisaris memiliki kebijakan benturan kepentingan dan melaksanakan secara konsisten kebijakan tersebut.

Kebijakan Dewan Komisaris mengenai (potensi) benturan kepentingan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris diatur dalam *Board Manual*. Dewan Komisaris telah menandatangani Pakta Integritas pada awal pengangkatan, diantaranya berisi pernyataan akan beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan penasihatn kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan kemajuan Perseroan dan tidak akan memiliki benturan kepentingan dan/atau terlibat dalam transaksi yang memiliki benturan kepentingan dengan PT KAI (Persero) dan diperbaharui setiap tahunnya. Penyampaian Tanggapan atas Usulan Tindakan Direksi yang disampaikan Ke RUPS/Pemegang untuk mendapatkan Persetujuan melampirkan Pakta Integritas Dewan Komisaris secara kolegiat. Dewan Komisaris telah melaporkan kepada perusahaan (Sekretaris Perusahaan) mengenai kepemilikan saham dirinya dan keluarganya pada perusahaan lain dalam Daftar Khusus.

i. Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

1) Dewan Komisaris memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Kebijakan Dewan Komisaris untuk memantau penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik diatur dalam *Board Manual*, dan Rencana Kerja Pengawasan terhadap implementasi GCG telah dimuat dalam Rencana Kerja Dewan Komisaris tahun 2022.

Dewan Komisaris sudah melaksanakan pemantauan atas penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan rencana tindak lanjut atas *area of improvement* (AOI) hasil *assessment* GCG melalui Komite Audit, namun belum semua AOI yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti.

2) Dewan Komisaris melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris

Kebijakan mengenai pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris diatur dalam *Board Manual*. Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris beserta target-targetnya atau KPI Dewan Komisaris dimuat dalam Program Kerja Tahunan Dewan Komisaris dan menjadi bagian dari RKAP 2022 yang telah disahkan oleh RUPS.

Pencapaian KPI Dewan Komisaris dan kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam tahun 2021 dimuat dalam surat Nomor 24/CG/KOM/IV/2022 tanggal 4 April 2022 perihal Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT KAI (Persero) Tahun Buku 2021. Laporan Dewan Komisaris tersebut memuat mengenai surat-menyurat, Rapat Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Rapat Internal Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris – Direksi, dan kegiatan Dewan Komisaris di luar kegiatan rutin, serta keberhasilan *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris.

Kami merekomendasikan kepada Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) agar konsisten mengikutsertakan peran Komite Komisaris dalam melakukan telaah terhadap laporan hasil *assessment*/revisi atas Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, GCG Code dan kebijakan/ketentuan teknis lainnya, serta memantau tindak lanjut *area of improvement* (AOI) hasil *assessment* GCG yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris dan mendokumentasikannya.

j. Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri rapat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1) Dewan Komisaris memiliki pedoman/tata tertib Rapat Dewan Komisaris yang memadai.

Dewan Komisaris telah menetapkan Tata Tertib Rapat Dewan Komisaris Nomor 01/CH/DEKOM/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 yang memuat mengenai etika rapat, tata penyusunan risalah rapat, pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya serta pembahasan/telaah atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait dengan usulan Direksi.

2) Rapat Dewan Komisaris diadakan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar.

Kebijakan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Pasal 16 dan *Board Manual* menyatakan Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2022 merencanakan penyelenggaraan rapat internal dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* yaitu masing-masing 12 kali.

Dalam Tahun 2022, Dewan Komisaris melaksanakan rapat internal sebanyak 23 kali dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 21 kali, dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

No	DEWAN KOMISARIS	R A P A T				Keterangan Masa Jabatan
		INTERNAL		GABUNGAN		
		Jumlah Rapat	Jumlah kehadiran	Jumlah Rapat	Jumlah kehadiran	
1	Said Aqil Siroj	23	19	21	18	Tahun 2022
2	Riza Primadi	23	22	21	18	Tahun 2022
3	Rochadi	23	21	21	18	Tahun 2022
4	Diah Natalisa	23	21	21	18	Tahun 2022
5	Endang Tirtana	23	22	21	18	Tahun 2022
6	Chairul Anwar	23	21	21	18	Tahun 2022
7	Johan Sirait	6	5	8	7	Sejak 24/08/22
8	Sri Paduka Mangkoenegoro	6	6	8	7	Sejak 24/08/22
9	M. Risal Wasal	4	4	7	6	Sejak 12/10/22
10	Cris Kuntadi	17	14	13	12	Sd 15/8/22
11	Fredy Haris	17	14	13	12	Sd 15/8/22
	Jumlah		90,53%		87,40%	

Tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat Internal BOC 90,53% sedangkan dalam rapat Gabungan BOC BOD 87,40%. Anggota Komisaris yang tidak dapat hadir telah memberikan Surat Kuasa kepada anggota Komisaris lainnya. Risalah rapat gabungan dan internal mencantumkan data ketidakhadiran namun belum mencantumkan penjelasan atas ketidakhadiran anggota Komisaris dalam rapat tersebut.

3) Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.

Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas tindak lanjut hasil rapat sebelumnya dan dituangkan dalam risalah rapat intern Dewan Komisaris, namun tidak dituangkan secara eksplisit dalam risalah rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu masih terdapat rekomendasi hasil rapat gabungan sebelumnya yang belum ditindaklanjuti oleh Direksi.

Kami merekomendasikan kepada Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) agar menginstruksikan Sekretaris Dewan Komisaris:

- Mencantumkan penjelasan atas ketidakhadiran Dewan Komisaris dalam Risalah Rapat.

- Mendokumentasikan evaluasi atas tindak lanjut hasil rapat sebelumnya dan dituangkan pada bagian khusus dalam Risalah rapat sesuai dengan format Risalah Rapat dalam Peraturan Direksi Nomor PER.U/KC.202/X/1/KA-2020 tentang Tata Tertib Rapat Direksi, sehingga dapat dipantau proses tindak lanjut rekomendasi yang diberikan Dekom kepada Direksi.
- Menginstruksikan Sekretaris Dewan Komisaris untuk membuat Buku/Daftar agenda tindak lanjut rekomendasi kepada Direksi dan Anggota Komite Dewan Komisaris, serta memantau tindak lanjutnya termasuk batasan waktunya.

k. Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris.

- 1) Sekretariat Dewan Komisaris memiliki uraian tugas yang jelas.

Sekretariat Dewan Komisaris memiliki uraian tugas yang jelas dan telah ditetapkan dan disahkan oleh Komisaris Utama selain dalam *Board Manual*, juga diuraikan dalam Keputusan Dewan Komisaris PT KAI (Persero) Nomor 140/CH/DEKOM/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris Periode Tahun 2020-2023.

- 2) Sekretariat Dewan Komisaris melakukan administrasi dan penyimpanan dokumen.

Sekretaris Dewan Komisaris telah mempunyai fasilitas penyimpanan dokumen Komisaris yang disediakan oleh Perusahaan dan telah mengadministrasikan surat keluar, surat masuk dan dokumen lainnya.

- 3) Sekretaris Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.

Sekretaris Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya dengan baik. Telah terdapat undangan kepada peserta rapat juga telah menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan Komite-Komite di lingkungan Dewan Komisaris.

Pendokumentasian hasil rapat sudah dituangkan dalam Risalah Rapat, namun belum mencantumkan hasil keputusan rapat Dewan Komisaris dan evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya. Selain itu belum terlihat adanya validasi Dewan Komisaris dalam Risalah Rapat.

- 4) Sekretaris Dewan Komisaris menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan Komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris telah menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola perusahaan antara lain laporan triwulanan, semesteran dan tahunan. Sekretaris Dewan Komisaris telah menjalankan mekanisme monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris serta hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan/rekomendasi sehubungan dengan kegiatan pengelolaan perusahaan oleh Direksi. Namun proses monitoring belum terdokumentasi dalam bentuk daftar monitoring.

Kami merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk menginstruksikan Sekretaris Dewan Komisaris agar :

- Mencantumkan dalam Risalah Rapat gabungan pembahasan terkait hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya dan kesimpulan/hasil keputusan rapat Dewan Komisaris.

- Segera menyampaikan risalah rapat, sehingga dapat dilakukan validasi risalah rapat oleh Dewan Komisaris sesuai tata tertib yang ditetapkan (selambat lambatnya 7 hari setelah rapat selesai).
- Membuat daftar monitoring tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi dan kepada Komite Dewan Komisaris termasuk batasan waktunya.

I. Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif.

- 1) Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah memiliki Komite yang bekerja secara kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi, dan telah menetapkan pengangkatannya dengan:

- Keputusan Dewan Komisaris PT KAI (Persero) Nomor 02/CH/DEKOM/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 dan terbaru Nomor 08/CH/DEKOM/XI/2022 tanggal 23 November 2022 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit.
- Keputusan Dewan Komisaris PT KAI (Persero) Nomor 06/CH/DEKOM/IX/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR).
- Keputusan Dewan Komisaris PT KAI (Persero) Nomor 44/CH/DEKOM/IV/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Periode 2020-2023 dan terbaru Nomor 03/CH/DEKOM/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR).

Setiap Komite diketuai oleh anggota Dewan Komisaris sementara Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai langsung oleh Komisaris Utama. Pengangkatan Ketua dan anggota Komite Dewan Komisaris telah dilaporkan kepada Pemegang Saham.

- 2) Komposisi keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi Komite dan independensi dari masing-masing Komite Dewan Komisaris.

Komposisi keanggotaan Komite telah mendukung pelaksanaan fungsi Komite dan independensi dari masing-masing Komite Dewan Komisaris, yaitu anggota komite memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja di bidang tugas komite serta tidak mempunyai kaitan kepemilikan dan kegiatan usaha perusahaan.

- 3) Komite Dewan Komisaris memiliki piagam/*charter* dan program kerja Tahunan.

- a) Komite Audit telah memiliki Charter yang ditetapkan Dewan Komisaris Nomor 01/KA/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017. Namun Piagam Komite Audit belum diperbaharui sejalan dengan terbitnya Per-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Perubahan atas Per-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan pengawas BUMN dan pembaharuan tugas dan tanggungjawab Komite Audit sehubungan dengan telah terbentuknya Komite Dekom Lainnya. Komite Audit telah menyusun Program Kerja Tahunan yang terdiri dari program kerja umum, Pengawasan terhadap pelaporan keuangan, Pengawasan terhadap Auditing Process yang berhubungan dengan SPI, Pengawasan terhadap auditing process yang berhubungan dengan auditor, pengawasan terhadap pengendalian intern, pengawasan terhadap implementasi GCG, dan Penugasan bersifat khusus dari Dewan Komisaris, namun dalam Program Kerja Komite Audit belum mencakup prosedur review yang memuaskan terhadap

segala informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan dan *self assessment* kinerja Komite Dewan Komisaris.

- b) Komite Pemantau Manajemen Risiko telah memiliki piagam KPMR yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 27/KPMR/XI/2021 tanggal 08 November 2021 yang merupakan pembaharuan dari Piagam KPMR Nomor 82A/KPMR/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019, namun demikian Piagam KPMR belum diperbaharui sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko BUMN.

Komite Pemantau Manajemen Risiko telah menyusun Program Kerja KPMR yang meliputi Umum (penyusunan Program kerja dan seminar), Evaluasi, Analisa & Monitoring atas RJPP, RKAP 2022, usulan RKAP 2023 dan laporan manajemen triwulanan dan tahunan dari aspek manajemen risiko. Selain itu juga membantu Pengawasan terhadap Mitigasi Risiko, Pengawasan Implementasi GCG, dan Penugasan Khusus dari Dekom.

- c) Komite Nominasi dan Remunerasi telah memiliki piagam KNR yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 05/CH/DEKOM/III/2021 tanggal 10 Maret 2021.

Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyusun Program Kerja KNR yang meliputi Evaluasi, Analisa & Monitoring atas RJPP, RKAP 2022, usulan RKAP 2023 dan laporan manajemen triwulanan dan tahunan dari aspek SDM. Selain itu juga membantu mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan pengembangan SDM dan mengevaluasi kinerja kepatuhan, remunerasi dan insentif Direksi serta melaksanakan Penugasan Khusus dari Dewan Komisaris.

- 4) Komite Dewan Komisaris melaksanakan pertemuan rutin sesuai dengan program kerja tahunan serta melakukan kegiatan lain yang ditugaskan Dewan Komisaris.

Dalam Program kerja Komite Audit maupun Komite PMR dan Komite NR telah memuat rencana jumlah pertemuan berkala internal Komite. Anggota Komite Audit, Anggota Komite PMR dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi turut hadir dalam rapat internal Dewan Komisaris dengan mempersiapkan materi hasil kajian masing-masing Komite untuk dibahas dalam rapat internal.

Selain rapat dengan Dewan Komisaris, Komite Komisaris juga melakukan rapat dengan manajemen terkait penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris, dan hasil rapat telah dituangkan dalam Risalah rapat, walaupun belum semua terdokumentasikan dan belum diserahkan ke Sekretaris Dewan Komisaris untuk diarsipkan. Namun Risalah rapat yang dibuat belum memuat hasil-hasil analisis, telaahan dan evaluasi dan belum sesuai dengan format risalah rapat dalam Kebijakan Tata Tertib Rapat Dewan Komisaris dan Komite.

- 5) Komite Dewan Komisaris melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit, Komite PMR dan Komite NR melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris dalam Nota Dinas yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan telah memuat rekomendasi dari setiap kegiatan yang dilakukan.

Komite Audit telah membuat Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan yang memuat informasi tentang kegiatan, rapat dan telaahan yang telah dilakukan namun belum menjelaskan mengenai substansi hasil kegiatan dan rekomendasi yang diberikan di triwulan yang bersangkutan dan belum memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerjanya.

Komite PMR dan NR telah membuat Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan yang memuat informasi tentang kegiatan, rapat dan telaahan yang telah dilakukan namun belum menjelaskan mengenai substansi hasil kegiatan dan rekomendasi yang diberikan di triwulan yang bersangkutan dan belum memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerjanya.

Kami merekomendasikan kepada Dewan Komisaris agar mengarahkan Komite Audit, Komite PMR dan Komite NR untuk:

- Komite Audit melengkapi program kerja Komite Audit yang mencakup memastikan bahwa telah ada prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan.
- Komite Audit memperbaharui Charter Komite Audit sejalan dengan terbitnya Per-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Perubahan atas Per-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan pembaharuan tugas dan tanggungjawab Komite Audit sehubungan dengan telah terbentuknya Komite Dekom Lainnya.
- KPMR memperbaharui Charter KPMR sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko BUMN.
- Komite Audit, Komite PMR dan Komite NR mendokumentasikan hasil pertemuan dalam Risalah Rapat sesuai dengan format Risalah Rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Nomor PER.U/KC.202/X/1/KA-2020 tentang Tata Tertib Rapat Direksi, minimal memuat memuat hasil-hasil analisis, telaahan dan evaluasi serta menyampaikan kepada Sekretaris Dekom untuk disimpan sebagai arsip perusahaan.
- Komite Audit, Komite PMR dan Komite NR melengkapi Laporan Triwulanan dan Tahunan dengan memuat perbandingan antara realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta penugasan lain yang ditugaskan oleh

Dewan Komisaris dengan menyertakan rangkuman hasil pelaksanaan kegiatan dan rekomendasinya sehingga dapat diyakini bahwa rekomendasi diberikan pada setiap pelaksanaan penugasan.

4. Aspek Direksi

Aspek *governance* yang terkait dengan Direksi dinilai berdasarkan 13 (tiga belas) indikator, yaitu:

- a. Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan;
- b. Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas;
- c. Direksi menyusun perencanaan perusahaan;
- d. Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan;
- e. Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan;
- f. Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar;
- g. Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan *stakeholders*;
- h. Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi;
- i. Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu;
- j. Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- k. Direksi menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif;
- l. Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif; dan

- m. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

Penilaian penerapan atas 13 indikator dengan 52 parameter menghasilkan skor **31,719** dari skor maksimum **35** atau **90,627%** atau masuk dalam kategori **Sangat Baik**.

Seluruh Indikator dinilai sudah baik (>75%), tingkat pemenuhan masing-masing indikator terlihat dalam pelaksanaan praktik sebagai berikut:

a. Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.

- 1) Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh Perusahaan.

Kebijakan program pengenalan bagi Direksi baru dan pelatihan bagi anggota Direksi diatur dalam *Board Manual* butir Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas.

Board Manual tersebut menetapkan bahwa program pengenalan meliputi:

- Pelaksanaan Prinsip-prinsip GCG oleh BUMN.
- Gambaran mengenai BUMN berkaitan dengan tujuan, sifat, dan ruang lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah strategis lainnya.
- Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal, audit eksternal, sistem pengendalian internal dan Komite Audit.
- Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

Program pengenalan Direksi baru berupa kunjungan ke Daop dan Divre namun belum dilengkapi dengan pemberian materi program pengenalan, berita acara kegiatan pengenalan dan daftar hadir kegiatan, sehingga

belum sepenuhnya sesuai dengan program pengenalan sebagaimana diatur dalam *Board Manual*.

- 2) Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan.

Sesuai dengan Kebijakan pengembangan kapabilitas Direksi yang dimuat dalam *Board Manual*, Perusahaan telah mengalokasikan biaya pengembangan kompetensi Direksi dalam RKAP Pelatihan untuk Direksi.

Selama tahun 2022 sesuai dengan Laporan pelatihan Direksi telah dilaksanakan peningkatan kapabilitas Direksi berupa *Workshop* Teknik Menyusun Rencana Strategik tanggal 14-15 Februari 2022, *Workshop Transformasi Digital* tanggal 17 Juni 2022, *Onboarding Directorship Program* tanggal 28 Juli s.d. 8 September 2022, Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko tanggal 9 September 2022, Pelatihan Sertifikasi Tutorial QRGD tanggal 9 September 2022, dan *BoD BoC Retreat "Let's Grow Together"* tanggal 25-26 November 2022.

Kami rekomendasikan kepada Direksi agar menginstruksikan Sekretaris Perusahaan menyelenggarakan, mempersiapkan materi program pengenalan Direksi minimal memuat pengenalan prinsip-prinsip GCG, gambaran umum BUMN, kewenangan yang didelegasikan, tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris, serta mendokumentasikan program pengenalan perusahaan bagi Direksi yang baru diangkat yang berasal dari luar perusahaan

b. Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.

- 1) Direksi menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Struktur Organisasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) di bawah *Board of Director* terdiri dari :

- a) Direktorat
- b) Daerah Operasi

- c) Divisi Khusus LRT Jabodebek
- d) Divisi Regional
- e) Kantor Pusat
- f) Balai Yasa.

Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi ditetapkan dengan Peraturan Direksi Nomor PER.U./KO.104/VIII//12/KA-2019 tanggal 22 Agustus 2019 tentang Tugas dan Wewenang Anggota Direksi sebagaimana telah diubah dengan Nomor PER.U/KO.104/XI/KA-2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi nomor U./KO.104/VIII//12/KA-2019 tentang Tugas dan Wewenang Anggota Direksi. Rincian Tugas, fungsi, susunan organisasi sampai junior manager diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Laksana Direktorat masing-masing, yaitu Keputusan Direksi:

- a) PER.U/KO.104/II/1/KA-2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Organisasi dan Tata Laksana Direktorat Niaga (D1).
- b) PER.U/KO.104/VII/2/KA-2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor PER.u/KO.104/VIII/2/KA-2019 tentang Organisasi dan Tata laksana Direktorat Operasi (D2).
- c) PER.U/KO.104/II/2/KA-2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Organisasi dan Tata laksana Direktorat Pengelolaan Prasarana (D3).
- d) PER.U/KO.104/I/1/KA-2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Organisasi dan Tata laksana Direktorat Pengelolaan Sarana (D4).
- e) PER.U/KO.104/II/3/KA-2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Organisasi dan Tata Laksana Direktorat Keselamatan dan Keamanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi Nomor PER.U/KO.104/I/1/KA-2022 tentang Perubahan atas Perdir Nomor KEP.U/KO.104/II/3/KA-2020 tentang Organisasi dan Tata Laksana Direktorat Keselamatan dan Keamanan (D5).
- f) PER.U/KO.104/XII/1/KA-2020 tanggal 24 November 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor

- KEP.U/KO.104/I/1/KA-2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana Direktorat SDM dan Umum (D6).
- g) PER.U/KO.104/X/1/KA-2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Organisasi dan Tata Laksana Direktorat Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha (D7).
- h) PER.U/KO.104/I/3/KA-2022 tentang Organisasi dan Tata Laksana Direktorat Keuangan dan MR sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi Nomor PER.U/KO.104/II/2/KA-2022 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor PER.U/KO.104/I/3/KA-2022 tentang Organisasi dan Tata Laksana Direktorat Keuangan dan MR (D8).
- i) KEP.U/KO.104/V/4/KA-2016 tentang Organisasi dan Tata Laksana Unit Internal Audit/Satuan Pengawas Intern.
- j) KEP.U/KO.104/IV/1/KA-2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana Pusat Hukum.
- k) PER.U/KO.104/II/2/KA-2019 tanggal 13 Februari 2019 Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor PER.U/KO.104/I/3/KA-2018 tentang Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Perusahaan.

Keputusan Direksi tentang Organisasi dan Tata Laksana tersebut di atas telah memuat uraian tugas pokok dan tanggung jawab setiap jabatan dalam struktur organisasi. Deskripsi dan spesifikasi jabatan untuk setiap tingkat jabatan dinyatakan dalam *Job Profile* setiap jabatan yang memuat *Job Description*, Kompetensi dan *Job Spesification*.

Sesuai Anggaran Dasar, sebelum Penetapan Perubahan Struktur Organisasi, Direksi telah melaksanakan permintaan persetujuan kepada Dewan Komisaris dengan surat Nomor KO.105/X/1/KA-2022 tanggal 11 Oktober 2022 perihal Permohonan Persetujuan Penetapan dan Perubahan Struktur Organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan telah mendapat persetujuan Dekom dengan surat Nomor 82/CG/KOM/X/2022

tanggal 26 Oktober 2022. Perubahan Struktur Organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko yaitu penambahan Divisi Manajemen Risiko.

- 2) Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan *standard* operasional baku (SOP) untuk proses bisnis inti (*core business*) perusahaan.

Panduan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) diatur dalam:

- a) PER.U/KD.100/I/KA-2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direksi Nomor KEP.U/KD.100/IX/1/KA-2016 tentang Pedoman Tata Naskah.

Naskah dinas terdiri dari Naskah Dinas Arahkan, Naskah Dinas Penugasan, Naskah Dinas Korespondensi, Naskah Dinas Khusus, dan Naskah Dinas Elektronik. Ketentuan naskah dinas arahan dalam bentuk Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, dan Maklumat penetapan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi tersendiri.

- b) KEP.U/KD.100/IV/1/KA-2017 tanggal 10 April 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Perusahaan.

Pengaturan mengenai teknik dan prosedur penyusunan produk hukum. Produk hukum perusahaan adalah naskah dinas arahan.

- c) Per.U/KO.106/III/1/KA-2018 tanggal 2 Maret tentang Sistem Manajemen Mutu.

- d) Per.U/KL/104/I/2/KA-2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis.

Panduan dalam melaksanakan kegiatan perusahaan dinyatakan dalam Dokumen Proses Bisnis yang memuat profil, pemetaan dan perbaikan proses bisnis masing-masing direktorat sebagai referensi bagi pengembangan organisasi diantaranya untuk pengembangan proses bisnis, prosedur serta optimalisasi dalam internalisasi budaya

perusahaan berbasis kinerja dan standarisasi proses jabatan dalam organisasi.

Dalam menjalankan proses bisnisnya, Perusahaan telah menyusun standar operasional prosedur berupa *Reglamen*, Peraturan Dinas (PD), Peraturan Perusahaan, Pedoman, Surat Edaran dan instruksi kerja yang diperbaharui apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan teknologi informasi, permintaan dari unit, rekomendasi hasil audit SPI, hasil audit mutu dan audit eksternal untuk meningkatkan pelayanan serta tertib administrasi. Peninjauan dan pembaharuan Peraturan Direksi tersebut dilakukan oleh unit legal.

Untuk memastikan bahwa seluruh prosedur telah dilaksanakan secara konsisten, manajemen mengevaluasi kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu dan melaksanakan audit internal dan eksternal penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9000:2015. Hasil audit internal dan eksternal selama Tahun 2022 tidak ditemukan ketidaksesuaian mayor hanya masih terdapat SOP yang belum dijalankan dengan baik berupa ketidaksesuaian minor dan *Opportunities for Improvement* (OFI).

- 3) Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan perusahaan (*corporate action*) sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu.

Mekanisme pengambilan keputusan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* yang mengatur pengambilan keputusan melalui rapat Direksi dan pengambilan keputusan di luar rapat, serta dalam Keputusan Direksi Nomor KEP.U/OT.104/IX/1/KAI-2015 tentang standar waktu pengambilan keputusan oleh Direksi dalam pelaksanaan perbuatan-perbuatan Direksi yang membutuhkan tanggapan tertulis atau persetujuan Pemegang Saham.

Direksi menetapkan pengambilan keputusan atas tindakan perusahaan segera setelah dokumen pendukung dan informasi lainnya lengkap dan mengkomunikasikan kepada tingkatan organisasi di bawah Direksi yang terkait. Keputusan Direksi yang diambil dalam rapat dikomunikasikan kepada pejabat satu level dibawah Direksi dalam rapat *Executive Comitee* sedangkan keputusan direksi yang diputuskan melalui produk hukum tersendiri disampaikan kepada seluruh pejabat melalui mekanisme komunikasi internal PT KAI (Persero) yaitu *broadcast messages* dan *e-office*. Namun demikian Keputusan Direksi Nomor KEP.U/OT.104/IX/1/KAI-2015 belum memuat standar waktu penyampaian atau pengkomunikasian keputusan Direksi kepada level di bawah Direksi.

Kami merekomendasikan kepada Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) agar melakukan *update* Kepdir PT KAI Nomor KEP.U/OT/104/IX/1/KA-2015 tentang standar waktu pengambilan keputusan oleh Direksi dalam pembuatan-perbuatan Direksi yang membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris atau tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris PT KAI dan Persetujuan dari RUPS dengan menambahkan ketentuan/batasan waktu pengkomunikasian Keputusan Direksi kepada level di bawah Direksi.

c. Direksi menyusun Perencanaan Perusahaan.

1) Direksi memiliki Rencana Jangka Panjang (RJPP) yang disahkan oleh RUPS. Perusahaan telah menyusun RJPP Tahun 2020-2024 dan telah diberikan pengesahan oleh Pemegang Saham bersamaan dengan pengesahan RKAP 2021 pada tanggal 29 Januari 2021 yang dituangkan dalam Risalah RUPS Tahunan Nomor KG.105/I/3/KA-2021.

Penyusunan RJPP Perusahaan didasarkan pada Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-102/M.BUMN/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang BUMN meskipun belum menetapkan pedoman penyusunan RJPP.

Pada tahun 2022 telah dilakukan sosialisasi dan *workshop* penajaman pemahaman RJPP tanggal 20 Oktober 2022; RJPP serta Prioritas Inisiatif Strategi Tahun 2022; dan *Overview Alignment* KPI dengan RJPP tanggal 3-4 November 2022.

- 2) Direksi memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan oleh RUPS/Menteri.

Penyusunan RKAP Perusahaan berpedoman pada PER.U/KF.101/II/I/KA-2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 dan S-683/MBU/10/2022 perihal Aspirasi Pemegang Saham untuk Penyusunan RKAP tahun 2023. Dalam menyusun RKAP Tahun 2023, Direksi diminta untuk:

- a) Menggunakan Masterplan dan atau RJPP 2020-2024 sebagai dasar dan rujukan;
- b) Menyusun rencana kerja secara lengkap dan komprehensif;
- c) Menggunakan rencana kegiatan sebagai dasar dalam menyusun rencana anggaran.

Perusahaan telah menyusun Rancangan RKAP berdasarkan usulan dari daerah dan prognosa tahun berjalan dengan mempertimbangkan aspirasi Pemegang Saham. Kemudian Direksi melakukan *reviu* atas rancangan RKAP yang disusun tim dan dilakukan pembahasan dalam Rapat Direksi bersama tim penyusun RKAP sebelum meminta tanggapan kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris membahas dengan Komite Komisaris dan Direksi sebelum mengajukan permohonan persetujuan kepada Pemegang Saham. Setelah RKAP ditetapkan dan disahkan oleh Pemegang Saham, VP Budgeting (KCA) menyusun *breakdown* RKAP perusahaan ke masing-masing bagian/unit menjadi buku RKAP/RKAD untuk disebar ke daerah/bagian/unit selanjutnya disosialisasikan kepada karyawan untuk dipedomani dalam pelaksanaan operasional perusahaan.

Penyampaian RKAP 2023 kepada Komisaris untuk mendapatkan masukan yaitu paling lambat tanggal 15 September tahun berjalan belum terpenuhi, karena tembusan usulan RKAP disampaikan kepada Dewan Komisaris tanggal 31 Oktober 2022.

- 3) Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam perusahaan.

Perusahaan telah mempunyai sistem dan prosedur promosi, demosi, dan mutasi, diantaranya surat Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KH.104/IX/3/KA-2016 tanggal 28 September 2016 tentang Sistem Pengembangan Karir, Nomor KEP.U-KH.306/IX/1/KA-2016 tanggal 28 September 2018 tentang Mutasi Jabatan, dan Nomor KEP.U/KO.104/IX/5/KA-2016 tanggal 28 September 2018 tentang *Job Grade, Job Class* dan *Job Classification*. Peraturan-peraturan tersebut telah *diupload* dalam jaringan intranet pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero) Raileo yang bisa diunduh oleh seluruh pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Penempatan karyawan pada setiap level jabatan dilakukan melalui aplikasi E-Rencana Mutasi dalam *E-Office*. Dalam aplikasi e-Rencana Mutasi terdapat *data base* seluruh karyawan yang memuat latar belakang pendidikan dan keterampilan pendukung lainnya, serta dapat menyajikan 10 (sepuluh) nama terbaik yang sudah memenuhi kriteria dan kemampuan atas jabatan yang kosong, namun demikian masih ada pejabat definitif pada Jabatan Kosong yang masih dirangkap oleh pejabat lain (PYMT).

Sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor Kep.U/KH.104/IX/4/KA-2016 tanggal 28 September 2016 perihal Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengembangan Karier, penjarangan kandidat pejabat dilakukan berdasarkan hasil *assessment* kompetensi untuk mengukur *soft competency*, hasil keikutsertaan pekerja dalam pelatihan, hasil evaluasi

data/informasi masa kerja, mutasi jabatan dua tahun terakhir, *job grade/class*, penghargaan dan hukuman disiplin. Untuk jabatan satu level di bawah Direksi pelaksanaan *assessment* dilaksanakan oleh Lembaga Independen.

Perusahaan memiliki rencana suksesi untuk setiap level dalam organisasi terlihat dari adanya *dababase* tentang orang yang memiliki skill dan kompetensi serta pengalaman yang cukup untuk melakukan pekerjaan yang tersedia berupa *leadership development Program*. Proses *assessment* untuk suksesi pejabat satu level di bawah Direksi dilaksanakan oleh *Talent Committee*, selanjutnya *Talent Committee* menyampaikan Daftar Talenta BUMN PT KAI kepada Komite Nominasi dan Remunerasi PT KAI (Persero).

Direksi membahas rencana seleksi dan promosi satu level di bawah Direksi dalam rapat Direksi sebelum disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan arahan dan masukan. Selanjutnya Dewan Komisaris menyampaikan Usulan Talenta PT KAI (Persero) kepada Pemegang Saham.

- 4) Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan, penghematan/efisiensi perusahaan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya.

Mekanisme untuk merespon usulan peluang bisnis ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor Kep.U/KU.401/XI/28/KA-2013 tanggal 29 November 2013 tentang Kebijakan Prosedur Pengelolaan Investasi serta Pengeluaran yang Dikapitalisasi (Bersifat Modal) di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Petunjuk Teknis Pengusulan Investasi di lingkungan PT KAI (Persero), namun demikian kebijakan tersebut belum memuat mekanisme Investasi pada *Joint Venture* dan mekanisme merespon usulan peluang bisnis dari manajemen dibawah Direksi.

Perusahaan menyusun *Feasibility Study* atas rencana investasi dan dilakukan *assessment* risiko atas rencana investasi dan tindakan direksi yang perlu tanggapan Dewan Komisaris dan Persetujuan Pemegang Saham

oleh Unit Manajemen Risiko (KR) yang mengidentifikasi peluang bisnis, risiko-risiko dan mitigasinya serta terdapat lembar persetujuan Direksi atas *assessment* risiko. Atas rencana tersebut yang disetujui, Direksi menyampaikan usulan investasi dan peluang bisnis tersebut kepada Dewan Komisaris disertai dengan studi kelayakan atau hasil *assessment* untuk mendapat masukan. Namun demikian realisasi peluang bisnis belum mampu memberikan manfaat bagi perusahaan yaitu:

- Penugasan pemerintah yang diberikan kepada PT KAI (Persero) yaitu Proyek LRT Jabodetabek dan Proyek KCJB belum dapat memberikan manfaat karena masih dalam proses pembangunan dan belum dapat dioperasikan.
- Investasi kepada PT MITJ belum memberikan manfaat kepada PT KAI (Persero).
- Realisasi progres investasi tahun 2022 sebesar Rp6.676 miliar atau 36,99% dari anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp18.102 miliar, diantaranya dikarenakan keterlambatan proses administrasi, Perubahan pembuatan kajian (FS/PraFS), keterlambatan karena belum lolos uji, kelengkapan dokumen administrasi, gagal lelang, dan pergeseran *timeline* investasi.

5) Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya secara tepat waktu dan relevan.

Mekanisme untuk merespon isu-isu terkini dari eksternal ditetapkan dalam Peraturan Direksi Nomor PER.U/KO.106/III/1/KA-2018 tanggal 2 Maret 2018 tentang Sistem Manajemen Mutu pada lampiran 1 dan lampiran 3 yang menyatakan bahwa isu-isu internal dan eksternal yang berkembang di Perusahaan diidentifikasi dan dikelola oleh Unit Risk Management.

Pada Tahun 2022 Direksi melaksanakan pembahasan mengenai isu-isu terkini mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang

berdampak besar pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan dalam Rapat Direksi dan Rapat *Executive Committee* diantaranya sebagai berikut:

- a) Rapat BOD 15 Februari 2022 : Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Terkait *Infrastructure Maintenance and Operation (IMO)* serta *Track Access Charge (TAC)* di Bidang Prasarana Perkeretaapian.
- b) Rapat BOD 1 Maret 2022 *Update* Progress Proyek KCJB dan Konektivitas Padalarang, *update* Progress Proyek LRT Jabodebek.
- c) Rapat BOD 8 Maret 2022 dan 10 Mei 2022 : *Update* Progress IMO TAC.
- d) Rapat BOD 30 Agustus 2022 : *Update Masterschedule* dan dampak kemunduran proyek LRT Jabodebek.

Jika perubahan lingkungan bisnis berdampak besar pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan, Direksi menyampaikan hasil pembahasan atas isu-isu tersebut kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan arahan.

Kami merekomendasikan kepada Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) agar:

- Menetapkan pedoman penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
- Menyampaikan Rancangan RKAP kepada Dewan Komisaris sebelum penyampaian kepada Pemegang Saham paling lambat tanggal 15 September tahun berjalan.
- Segera menetapkan pejabat definitif pada Jabatan yang dirangkap (PYMT).
- Melakukan *update* SK Direksi Nomor Kep.U/KU.401/XI/28/KA-2013 tanggal 29 November 2013 tentang Kebijakan Prosedur Pengelolaan Investasi serta Pengeluaran yang Dikapitalisasi (Bersifat Modal) di Lingkungan PT KAI (Persero) dan menetapkan mekanisme bagi Direksi dalam merespon usulan peluang bisnis dari manajemen dibawah Direksi.

d. Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.

- 1) Direksi melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil keputusan yang diperlukan melalui analisis yang memadai dan tepat waktu.

Setiap pelaksanaan program/kegiatan yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris, telah melalui mekanisme yang sesuai dengan anggaran dasar perusahaan atau sesuai dengan wewenang yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Program/kegiatan yang membutuhkan investasi dalam jumlah signifikan diputuskan melalui analisis yang memadai dengan didukung kajian mendalam serta analisis risiko terhadap program/kegiatan tersebut dan tindakan pengendalian untuk mencegah terjadinya risiko tersebut, diantaranya rencana Penerbitan Obligasi, tambahan penyertaan modal PT MITJ, penyertaan modal anak perusahaan konversi SHL PT Railink, Pengalihan Bisnis KA Bandara Soekarno Hatta dan Investasi Pengembangan Proyek Sumatera Bagian Selatan.

- 2) Direksi memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara obyektif dan transparan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pekerja guna memberikan kontribusi yang maksimal bagi perusahaan, Direksi melakukan penyesuaian sistem penilaian kinerja dengan ditetapkannya Peraturan Direksi Nomor PER.U/KH.104/X/1/KA-2021 tanggal 8 Oktober 2021 dan *Standard Operational Procedur* Nomor MC/KL.104/IV/1/KA-2022 tanggal 4 April 2022 yang merupakan pembaharuan SOP Nomor PER.M/KH.104/IX/1/KA-2018 tanggal 19 September 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Sistem Manajemen Penilaian Kinerja pekerja yang telah di-*upload* dalam *E-Office* yang dapat diakses oleh pegawai PT Kereta Api Indonesia

(Persero). Namun pembaharuan SOP tahun 2022 belum disosialisasikan secara langsung ke Daop/Divre.

Sistem pengukuran kinerja telah didukung dengan aplikasi komputer yaitu aplikasi “Prestasiku” dan telah dipahami oleh seluruh pegawai terlihat dari tidak ada kendala yang dihadapi oleh pegawai dalam penilaian berkala kinerja individu dengan prosentase tingkat pengisian 100%. Hasil aplikasi menjadi *variable* penilaian *talent pool* dan pemberian tunjangan kinerja pegawai.

- 3) Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara berjenjang di tingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di organisasi.

Direksi menetapkan Sasaran Kinerja Perusahaan berdasarkan Kontrak Manajemen dan RKAP, Direksi mengalokasikan sasaran Kinerja Perusahaan kepada masing-masing Direktorat dan Daop/Divre dan menetapkan bobot setiap sasaran kinerja Direktorat dan Daop/Divre. Selanjutnya Direksi menjabarkan Sasaran Kinerja Direktorat menjadi sasaran kinerja unit di bawahnya. Pemimpin unit menetapkan sasaran kinerja unit-unit kerja di bawah tanggung jawabnya selanjutnya Sasaran Kinerja Unit dan unit kerja di bawahnya secara otomatis menjadi sasaran individu para CDD/EVP/VP/GM dan SM/Manager unit-unit kerja di bawahnya. Selanjutnya Sasaran Kinerja Unit tersebut merupakan target *Key Performance Indicators* (KPI) masing-masing unit.

Kontrak kinerja berupa penandatanganan target kinerja (KPI) yang ditandatangani oleh setiap pemegang jabatan serta atasannya dan Direktur Utama dilaksanakan sebatas tingkat Divre dan Daop, sedangkan unit di kantor pusat sebatas pengisian KPI pada aplikasi Prestasiku.

- 4) Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi dan tingkat perusahaan.

Tiap unit di Kantor Pusat dan Daop/Divre secara berkala menyampaikan data kegiatan unitnya sebagai bahan penyusunan Laporan Manajemen Triwulanan.

Sesuai prosedur Penilaian Kinerja Pekerja, penilaian kinerja KPI dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali. Meskipun analisis dan evaluasi perkembangan kinerja jabatan (target KPI) baru sampai level VP dan belum ada tindak lanjut hasil analisis/evaluasi perkembangan kinerja jabatan/unit-unit di bawah Direksi. Namun demikian pembahasan pencapaian kinerja keuangan serta evaluasi perkembangan kinerja operasional unit-unit di bawahnya dilaksanakan dalam rapat *executive committee* dan rapat Direksi, serta analisis evaluasi pencapaian anggaran bulanan pada saat penyusunan laporan keuangan bulanan.

- 5) Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP.211/M.PBUMN/1999 tanggal 24 September 1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan BUMN, Perusahaan telah menyusun dan menyampaikan kepada Pemegang Saham dengan tembusan Dewan Komisaris mengenai pencapaian kinerja perusahaan berdasarkan bidang usaha, teknologi, penelitian dan pengembangan, logistik, manajemen organisasi dan tata laksana, Sumber Daya Manusia, Satuan Pengawas Intern (SPI), Keuangan dan Akuntansi, Manajemen Risiko, Laporan Keuangan, Pajak, Kemitraan Bina Lingkungan, kerja sama dan anak perusahaan, serta Tindak lanjut Temuan Auditor dan arahan Pemegang Saham dalam Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan. Penyampaian Laporan Manajemen Tahunan tepat waktu namun belum semua Laporan Manajemen Triwulan memenuhi waktu yang ditetapkan.

Pencapaian target kinerja Direksi kolegal yang dimuat dalam laporan manajemen tahun 2022 (*Unaudited*) adalah realisasi pendapatan sebesar

Rp22,561 Trilyun atau 110% dari Target RKAP, Beban Usaha Rp18,770 Trilyun atau 98,30% dari target RKAP dan Laba/rugi sebesar Rp1,629 Trilyun atau 1.512,3% dari target rugi di RKAP dan pencapaian KPI sebesar 95,74 (*Unaudited*).

Pencapaian KPI Direksi Individu tahun 2021 telah diaudit sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang disepakati dari KAP Amir Abadi Yusuf, Aryanti, Mawar & Rekan Nomor R/058.AAT/dns/2022 tanggal 18 Februari 2022.

- 6) Direksi menyusun dan menyampaikan kepada RUPS tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi.

Direksi belum menyusun dan menyampaikan kepada RUPS tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi, meskipun demikian Dewan Komisaris telah menyampaikan Surat Nomor 27/CG/KOM/IV/2022 tanggal 4 April 2022 perihal Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris atas Kinerja Tahun Buku 2021 kepada Pemegang Saham.

- 7) Direksi menerapkan sistem teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Perusahaan telah membuat Kebijakan Perusahaan di bidang Teknologi Informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Nomor KEP.U/OT.003/IX/4/KA-2011 tanggal 28 September 2011.

Perusahaan menyusun IT *Master Plan* Tahun 2020 - 2024 sebagai acuan dalam pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi di perusahaan. Dalam ITMP 2020-2024 (Versi 1,0 tanggal 20 Januari 2022) terdapat rencana pengembangan SDM dan jenjang karir dan kebutuhan SDM IT berdasarkan domainnya.

Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor PER.U/KO.104/II/2/KA-2022, implementasi penerapan TI di Perusahaan yang dikelola oleh CDD of *Information System* (KI) dibawah Direktorat Keuangan dan MR.

Sebagai penerapan implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2015, atas penerapan teknologi informasi dilakukan audit dan *assessment maturity level* (tingkat kematangan) tata kelola IT berdasarkan COBIT 4.1, COBIT 5 dan COBIT 2019 dengan hasil IT *maturity level* tahun 2022 mencapai 3,42. Pelaksanaan sistem Informasi disampaikan kepada Dewan Komisaris berupa paparan oleh Unit Sistem Informasi (KI) pada Bulan Juli dan September tahun 2022.

Namun demikian Direksi belum menyusun dan menyampaikan Laporan pelaksanaan kinerja teknologi Informasi termasuk pelaksanaan *Information Technology Master Plan* (ITMP) dan *Information Technology Detail Plan* (ITDP) kepada Dewan Komisaris.

- 8) Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan. Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan, terlihat dari adanya:
- a) Maklumat Direksi Nomor 6/LL.006/KA-2015 tanggal 7 Desember 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api telah diperbaharui dengan Peraturan Direksi Nomor PER.U/KL.104/VI/I/KA-2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Pedoman Pelayanan Penumpang di Atas Kereta Api, dan terakhir diperbaharui dengan Peraturan Direksi Nomor PER.U/KL.104/V/2/KA-2022 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor PER.U/KL.104/VI/1/KA-2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Pedoman Pelayanan Penumpang di atas Kereta Api.
 - b) SOP lainnya terkait Layanan Pelanggan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:
 - PER.U/KL.104/VIII/1/KA-2018 tentang PD 12 jilid 2 mengenai Awak Sarana Perkeretaapian; (sepanjang mengenai pedoman pelayanan penumpang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).

- KEP.U/HK.215/IX/3/KA-2011 tentang Peraturan Dinas 19 (PD 19) Jilid I mengenai Urusan Perjalanan Kereta Api dan Urusan Langsir.
 - KEP.U/LL.I03/XI/2/KA-2015 tentang Syarat dan Tarif Angkutan Kereta Api Penumpang.
 - KEP.U/KL.104/IV/KA-2017 tentang Peraturan Dinas 23 Mengenai Gangguan Operasional Kereta Api.
 - KEP.U/KL.104/IV/2/KA-2017 tentang Peraturan Dinas 26 Mengenai Keselamatan.
 - PER.U/KL.104/VIII/3/KA-2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan *Lost And Found* di Dalam Kereta Api dan Lingkungan Stasiun.
 - Surat Edaran Direksi Nomor SE.U/KS.102/III/1/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Novel Corona Virus* di Stasiun dan Kereta Api.
 - PER.U/KT.204/XII/I/KA-2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang SOP Tanggap Darurat Gangguan Operasional Kereta Api.
 - PER.U/KI.103/I/1/KA-2021 tentang Standar Stasiun.
 - SOP.CF/KL.104/IX/1/KA-2021 tanggal 7 September 2021 tentang SOP Bongkar Muat Angkutan Semen dengan Menggunakan Gerbong Datar.
- c) Perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 terakhir dengan ditetapkannya Peraturan Direksi Nomor PER.U/KO.106/III/1/KA-2018 tanggal 02 Maret 2018 tentang Sistem Manajemen Mutu, dan telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 dari Tuvnord Indonesia untuk 13 unit Daop/Divre, 2 unit Balai Yasa Prasarana, 6 unit Balai Yasa Sarana, dan 3 unit di lingkungan Kantor pusat KAI yaitu Pusdiklat KAI, *Contact center* dan unit Dokumen (USD).

Dalam rangka konsistensi implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 telah dilakukan kegiatan audit Resertifikasi SMM ISO 9001:2015 dan Audit Mutu Internal DAOP DIVRE Tahun 2022.

Perusahaan menindaklanjuti ketidaksesuaian mutu dalam proses produksi sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor Kep.U/KB.207/XII/1/KA-2016 tentang Pedoman Pemberian *Service Recovery* Angkutan Penumpang Kereta Api, dalam bentuk *Service Recovery* terhadap produk yang tidak sesuai, dalam hal ini yakni kelambatan perjalanan Kereta Api. Namun berdasarkan observasi tanggal 20-22 Februari 2023 tidak dijumpai papan informasi di stasiun yang menginformasikan mengenai kompensasi jika mutu tidak dipenuhi sehingga tidak tersosialisasikan kepada konsumen.

- 9) Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi perusahaan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut.

Pedoman/Petunjuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) terakhir ditetapkan dengan Peraturan Direksi Nomor Nomor PER.U/KM.101/VIII/1/KA-2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, namun belum memuat secara eksplisit hak-hak dan kewajiban pemasok dan perusahaan.

Pedoman pengadaan dapat diakses pemasok/calon pemasok melalui *website* kai.id di menu *E-Procurement Management* setelah melakukan registrasi. Sementara e-katalog masih dalam proses pengembangan.

Setiap tahapan proses pengadaan barang/jasa dilakukan secara transparan dengan mengumumkan di <https://eproc.kereta-api.co.id>, dimana diinformasikan barang/jasa yang akan diadakan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Namun demikian masih terdapat sanggahan dari calon mitra dan masih terdapat hal yang masih memerlukan perhatian yaitu masih adanya temuan SPI (*auditor internal*) terkait pengadaan barang dan jasa.

- 10) Direksi mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak, dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian perusahaan.

a) Pendidikan dan Pelatihan.

Dalam rangka membangun SDM yang profesional, berdaya guna dan produktif serta untuk pencapaian kinerja perusahaan yang optimal, Direksi telah menetapkan Keputusan Direksi Nomor Kep.U/KP.110/XII/3/KA-2012 tanggal 20 Desember 2012 tentang Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM Melalui Program Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan PT KAI (Persero).

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ir. H. Djuanda merupakan satuan organisasi Kantor Pusat yang mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab merencanakan program, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan dan hasil pendidikan dan pelatihan telah mengeluarkan Keputusan *Corporate Deputy Director of Training and Education* Ir. H. Djuanda No. 1/MT/I/2022 tentang Kalender Akademik Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022.

Berdasarkan Laporan kepuasan pasca pelatihan Tahun 2022, evaluasi Kepuasan Siswa dengan score 3,41 (sangat memuaskan) dari total nilai sebesar 4, dengan standar target Kepuasan 3,30.

b) Program Pengembangan SDM

Program pengembangan SDM Non-Diklat melalui Seminar, lokakarya, *workshop*, konferensi, studi banding, penugasan khusus/tugas belajar. dan *Mentoring & Coaching*.

c) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Perusahaan telah berkomitmen untuk mengutamakan keselamatan dalam menyelenggarakan dan mengelola operasionalnya serta berkeinginan kuat untuk mewujudkan keselamatan melalui kegiatan pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan dengan adanya *Safety Policy*, instruksi Direksi terkait keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Regulasi terkait K3 dalam peraturan/instruksi/keputusan Direksi sebagai berikut:

- (1) Perdir tentang Prosedur Bejana Tekanan dan Tangki Timbun;
- (2) Perdir tentang Prosedur Bekerja di Ketinggian;
- (3) Perdir tentang Prosedur Bekerja di Ruang Terbatas;
- (4) Perdir tentang prosedur Bekerja Kelistrikan;
- (5) Perdir tentang Prosedur Izin Kerja;
- (6) Perdir tentang Prosedur *Lifting* dan *Rigging*;
- (7) Perdir tentang Prosedur *Lock Out, Tag Out, dan Try Out*;
- (8) Perdir tentang Prosedur Manajemen Kelelahan dan Ergonomik;
- (9) Perdir tentang Prosedur Pekerjaan Panas;
- (10) Perdir tentang Prosedur Pemeliharaan dan Penggunaan P3K;
- (11) Instruksi Direksi tentang Pertolongan Pertama Kecelakaan;
- (12) Perdir tentang Prosedur Pengelolaan Material dan Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya;
- (13) Perdir tentang Prosedur Pengelolaan Tanda, Demarkasi, dan Rambu;
- (14) Perdir tentang Prosedur Pengendalian Alat Pelindung Diri;
- (15) Kepdir tentang Alat Pelindung Diri di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- (16) Perdir tentang Prosedur Induksi Keselamatan;
- (17) Perdir tentang Prosedur Pembentukan Tim Penanganan Keadaan Darurat;
- (18) Perdir tentang Prosedur Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan Kerja;
- (19) Instruksi Direksi Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan APAR 2012;
- (20) Perdir tentang IBPR SMKP dan Nota Dinas Perubahannya.

Program K3 pada tahun 2022 terdiri dari 8 program dengan tujuan meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja berupa *Refreshing* Kupt yang melaksanakan *Safety Talk* ; Sertifikasi Diklat Eksternal K3; *Fire*

Risk Assessment Kantor Pusat; Pengukuran Budaya Keselamatan PT KAI; dan Simulasi Tanggap Darurat Kantor Pusat.

Perusahaan melaksanakan evaluasi program Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan terbitnya Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KO.101/XI/3/KA-2016 tentang Pembentukan Komite Keselamatan di Daop/Divre/Subdivre/Balai Yasa dan Anak Perusahaan di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero), serta dalam Aplikasi *safety railway information*.

d) Sistem Penilaian Kinerja bagi Karyawan.

Perusahaan telah mengembangkan sistem Penilaian Kinerja yang merupakan Penilaian target *Key Performance Indicators* (KPI) masing-masing unit dan kompetensi individu. Sesuai Peraturan Direksi Nomor PER.U/KH.104/X/1/KA-2021 tanggal 8 Oktober 2021 tentang Sistem Manajemen Penilaian Kinerja dan SOP Nomor OP.MC/KL.104/IV/1/KA-2022 tanggal 4 April 2022 tentang Sistem Manajemen Penilaian Kinerja. Perencanaan kinerja individu setiap karyawan diproses melalui aplikasi PRESTASIKU (prestasiku.kai.id) yang diinput oleh pegawai yang bersangkutan. Hasil dari input kinerja individu di atas berupa dokumen Kesepakatan Kinerja yang ditandatangani secara elektronik, yang dapat dilihat langsung oleh pegawai yang bersangkutan dan atasan langsung. Setiap atasan di Kantor Pusat maupun Daerah menjabarkan sasaran kinerja dalam bentuk KPI kepada bawahannya sampai setingkat *level Junior Supervisor*. Untuk level pelaksana, indikator kinerja ditetapkan oleh unit Pengembangan SDM Kantor Pusat.

Dalam aplikasi PRESTASIKU, penilaian kinerja karyawan dilakukan setiap semester dengan diinput langsung oleh karyawan yang bersangkutan. Atasan harus memberikan penilaian terkait AKHLAK (perilaku) atas setiap bawahannya dalam aplikasi PRESTASIKU sehingga hasil penilaian

tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam pengembangan karyawan dan komponen *talent pool*.

- e) Perusahaan telah memberikan kesempatan yang memadai untuk menduduki posisi tertentu yang sesuai dengan kompetensi.

Direksi sudah menetapkan pola karier dalam PER.U/KO.104/II/8/KA-2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Job Grade, Job Class dan Job Classification; Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KH. 104/IX/3/KA-2016 tanggal 28 September 2016 tentang Sistem Pengembangan Karier dan PER.U/KH.306/III/1/KA-2019 tentang Mutasi Jabatan. Dalam kebijakan tersebut dinyatakan bahwa salah satu dasar pertimbangan pengembangan karir seorang pegawai adalah hasil keikutsertaan pekerja dalam suatu pelatihan (*hard competency*), kompetensi yang diukur melalui asesmen Kompetensi Online (*soft competency*), dan penilaian kinerja (KPI).

- f) Penerapan Remunerasi dan Kesejahteraan.

Kebijakan terkait penggajian telah diatur dalam Peraturan Direksi Nomor PER.U/KH.401/VIII/2/KA-2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direksi PER.U/KH.401/IX/1/KA-2018 tanggal 4 September 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor PER.U/KH.401/IV/4/KA-2018 tentang Penghasilan Pekerja. Selain Remunerasi di atas, Perusahaan mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja, program jaminan pensiun dan program pasca kerja. Kebijakan-kebijakan tersebut disosialisasikan secara transparan melalui Portal railreo/*e-office* PT Kereta Api Indonesia yang diakses oleh setiap pekerja, *Broadcast Milist*; dan sosialisasi tatap muka ke seluruh daerah operasi/divisi regional.

- g) Penerapan *Reward* dan *Punishment*.

Kebijakan penghargaan (*reward*) dan *punishment* diatur dalam Keputusan Direksi Nomor PER.U/KH.403/VII/1/KA-2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan, dan KEP.U/KH.310/II/1/KA-2017

tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi No. KEP.U/KP.408/III/1/KA-2016 tentang Peraturan Disiplin Perusahaan dan Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja.

Sebagian besar karyawan telah memperoleh sosialisasi atas kebijakan *reward* dan *punishment* melalui *E-Office* (sistem online internal) sehingga pekerja dapat memahami secara keseluruhan *play role* dari *reward and punishment*.

h) Keterbukaan Informasi mengenai perencanaan perusahaan ke depan yang berpengaruh pada pekerja.

Keterbukaan informasi kepada seluruh pegawai telah diterapkan Perusahaan dengan mengimplementasikan intranet berupa *e-Office* yang memuat semua peraturan, keputusan dan instruksi Direksi yang dapat diunduh oleh seluruh pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero) serta mendaftarkan Perjanjian Kerja Sama antar Perusahaan dengan pengurus Serikat Pekerja PT KAI (Persero) sesuai Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor KEP.126/PHIJSK-PK/PKB/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020.

11) Direksi menerapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (*subsidiary governance*) dan/atau perusahaan patungan.

Direksi telah menetapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan berupa:

a) Keputusan Direksi Nomor KEP.U/OT.003/IX/1.KA-2014 tanggal 9 September 2014 tentang Perubahan dan Tambahan (P&T) atas Keputusan Direksi Nomor Kep.U/OT.003/XI/4/KA-2012 tanggal 30 November 2012 tentang Tata Kelola Anak Perusahaan (*Subsidiary Governance*) di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero),

b) Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KP.208/XII/1/KA-2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan,

c) Keputusan Direksi Nomor KEP.U/OT.104/X/5/KA-2013 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Anak Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Pada RUPS masing-masing anak perusahaan telah disepakati bahwa seluruh produk hukum yang dikeluarkan PT KAI (Persero) yang mengatur anak perusahaan secara umum dan/atau secara khusus sepanjang merupakan kewenangan RUPS sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, maka secara otomatis berlaku bagi perseroan.

Kami merekomendasikan kepada Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) agar:

- Menyusun dan menyampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi.
- Menginstruksikan Unit Sistem Informasi (KI) menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kinerja Teknologi Informasi termasuk pelaksanaan *Information Technology Master Plan* (ITMP) dan *Information Technology Detail Plan* (ITDP) kepada Dewan Komisaris.
- Melakukan *update* atas Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.U/KM.101/VIII/1/KA-2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sehingga Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa memuat secara tegas hak-hak dan kewajiban pemasok dan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.

1) Direksi menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (SAK).

Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan diatur dalam Peraturan Dinas Nomor PD 2

Jilid 1 yang telah dimutakhirkan ke dalam PD 2 Jilid 1 yang diberlakukan efektif mulai 1 Oktober 2012 dan mempunyai *accounting guidance* yang merupakan kumpulan petunjuk pelaksanaan akuntansi PT Kereta Api Indonesia (Persero). Selain itu, sesuai dengan perkembangan bisnis perusahaan dan terkait restrukturisasi perusahaan, penggajian dan optimalisasi aset telah dilakukan penyesuaian peraturan-peraturan keuangan diantaranya penerbitan Surat Edaran Keuangan (SE Keuangan) yang menjelaskan prosedur akuntansi dan pencatatan suatu transaksi, selanjutnya guna penyajian Laporan Keuangan yang wajar dan akuntabel Direksi menetapkan Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 dengan Nota Dinas Internal Managing Director of Finance and Risk Management No. 5/KL.104/XII/KA/2022 yang disahkan tanggal 27 Desember 2022.

Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (*Member of the RSM Network*) Nomor 00048/2.1030/AU.1/06/0501-1/1/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 menyatakan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT KAI (Persero) dan entitas anaknya per tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

- 2) Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kebijakan dan pedoman untuk pelaksanaan manajemen risiko mengacu pada Keputusan Direksi Nomor KEP.U/OT.203/I/1/KA-2012 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) tanggal 12 Januari 2012 yang disingkat PP Mariska, dengan lingkup asesmen risiko hanya untuk kegiatan investasi. Pada awal

Tahun 2021 Perusahaan telah menetapkan PER.U/KL.104/I/1/KA-2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Terpadu (*Enterprise Risk Management*) sebagai bentuk Komitmen Perusahaan dan Pedoman penerapan Manajemen Risiko terpadu pada seluruh kegiatan usaha Perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.U/KO.104/I/3/KA-2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Organisasi dan Tata Laksana Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko, pelaksanaan program manajemen risiko dilakukan oleh *Division of Risk Management* berada di bawah Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko. Divisi Manajemen Risiko melakukan pengelolaan Risiko Perusahaan, sosialisasi *kick off* pengisian RCSA 2022 dan Bimbingan Teknis Pengisian *Risk Control Self Assessment* (RCSA) Tahun 2022 menggunakan Aplikasi SMARTKA juga melakukan kegiatan Sosialisasi *Risk Based Budgeting* (RBB). Selain itu Divisi Manajemen Risiko bersama Komite Pemantau Manajemen Risiko juga melakukan kegiatan assemen/kajian risiko berdasarkan permintaan dari user terutama atas tindakan-tindakan Direksi yang perlu mendapat tanggapan atau persetujuan Dewan Komisaris dan persetujuan Pemegang Saham.

Rencana kerja penerapan manajemen risiko tertuang dalam dokumen Program Strategis Direktorat Keuangan & Manajemen Risiko dalam Program Strategis *Executive Vice President of Risk Management* Tahun 2022 dan menyampaikan Laporan Kegiatan Divisi Manajemen Risiko triwulanan dan Laporan Proses Tindaklanjut Mitigasi Risiko *Entity* dan Project di SMARTKA Tahunan.

Direksi melaksanakan pemantauan terhadap program manajemen risiko berupa monitoring tindak lanjut mitigasi risiko berdasarkan Laporan Kegiatan Triwulanan Tahun 2022 Divisi Manajemen Risiko, Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko disampaikan secara triwulanan kepada

Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Dewan Komisaris PT KAI (Persero). Implementasi Manajemen Risiko disampaikan kepada Pemegang Saham (Menteri BUMN) melalui Laporan Manajemen PT Kereta Api (Persero) Triwulanan yang ditandatangani bersama (lembar pengesahan) Dewan Komisaris dan Direksi.

- 3) Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi dan mengamankan investasi dan aset perusahaan.

Rancangan Sistem Pengendalian Intern diatur pada Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KC.202/I/1/KA-2017 tentang Pedoman Penerapan Sistem Pengendalian Intern (*Internal Control System*), yang memuat komponen sistem pengendalian intern yang terdiri dari lingkungan, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta monitoring.

Direksi telah memberikan sertifikasi terhadap laporan keuangan tahunan bahwa Laporan Keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan Keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material dan bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam perusahaan.

Perusahaan melalui SPI telah melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern tingkat operasional namun belum melaksanakan *Control Self Assessment* secara berkala atas efektivitas Struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan pada akhir tahun buku perusahaan.

- 4) Direksi menindaklanjuti hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK).

Satuan Pengawas Intern (SPI) PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah memantau secara berkala dan melaporkan tindak lanjut hasil pemeriksaan

SPI, audit eksternal (KAP dan BPK) setiap triwulanan yang dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Kami merekomendasikan kepada Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) agar menginstruksikan SPI melaksanakan *Control Self Assessment* secara berkala atas efektivitas struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan pada akhir tahun buku perusahaan

f. Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.

- 1) Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.

Fungsi yang mengendalikan dan memastikan kebijakan, keputusan perusahaan dan seluruh kegiatan perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memantau dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga ada pada Pusat Hukum yang dipimpin oleh *Executive Vice President* Legal (UL). UL diantaranya mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, naskah dinas perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi, perikatan antar lembaga, dan kebijakan tata kelola anak perusahaan.
- 2) Penyiapan koordinasi pengkajian, penyiapan evaluasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan/atau naskah dinas perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi.
- 3) Penyiapan koordinasi penyusunan kajian hukum terhadap masalah hukum (*legal issue*) yang dihadapi perusahaan/atau pekerja perusahaan.
- 4) Penyiapan pemberian pendampingan hukum terhadap perikatan bisnis di bidang komersial angkutan penumpang dan angkutan barang,

lembaga keuangan, pengadaan barang dan jasa, dan pengembangan usaha.

- 5) Penyiapan pemberian bantuan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa dan/atau perkara yang dihadapi perusahaan dan/atau pekerja-pekerjaan.

Pusat Hukum memiliki mekanisme untuk menjaga kepatuhan, diantaranya Nomor KEP.U/KD.100/IV/1/KA-2017 tanggal 10 April 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Perusahaan; Nomor PER.U/KD.100/IV/1/KA-2018 tentang Permintaan Jasa Hukum Intern dan Nomor PER.V/KM.101/IX/1/KA-2017 Tanggal 13 September 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Hukum (*extern*).

Pusat Hukum melakukan penelaahan hukum terkait kesesuaian tindakan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan, telaahan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengaruhnya pada perusahaan. Apabila ada peraturan intern yang perlu penyesuaian dengan adanya perubahan peraturan, maka unit yang bersangkutan yang harus berinisiatif melakukan revisi terhadap peraturan internal unit yang bersangkutan. Draft revisi peraturan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Pusat Hukum untuk dilakukan kajian, pembahasan, persetujuan dan penetapan untuk memastikan peraturan perusahaan yang diajukan sesuai dengan aturan baru yang berlaku.

- 2) Perusahaan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.

Perusahaan telah melaksanakan kajian hukum atas rencana tindakan dan permasalahan yang terkait dengan kesesuaian hukum atau ketentuan yang berlaku, rewiu atas *draft* perjanjian pengadaan dan kerja sama dengan pihak ketiga dan melaksanakan upaya penyelesaian kasus litigasi dan non litigasi yang dilaksanakan oleh Pusat Hukum.

Pada tahun 2022 telah dilakukan asesmen risiko sebanyak 50 (lima puluh) paket dengan rincian 20 (dua puluh) paket investasi RKAP 2022, 3 (tiga) paket usulan investasi RKAP 2023 dan 27 (dua puluh tujuh) paket Non RKAP 2022. Selain itu terdapat Laporan Penyelesaian Kasus Litigasi dan Nonlitigasi yang terdiri dari Perkara Perdata Aset Penanganan Pusat (52 kasus), Perkara Perdata Non-Aset Penanganan Pusat (3 kasus), Perkara Pidana Aset Penanganan Pusat (15 kasus), Perkara Pidana Non-Aset Penanganan Pusat (7 kasus), dan Perkara Non-Litigasi Aset Penanganan Pusat (21 kasus), serta perkara lainnya, dengan berbagai posisi perkara (menang, kalah, selesai, proses, kabul).

Berdasarkan Laporan Auditor Independen tahun buku 2021 tidak ditemukan adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang signifikan. Namun demikian masih ada sengketa/permasalahan yang terkait dengan transaksi bisnis dengan pihak lain yang belum selesai yaitu pemutusan perjanjian pemanfaatan aset seluas 32.430m² di Kampung Bandan Jakarta Utara dengan Nomor Perkara: 127/Pdt.Bth/2020/PN.Bdg 318/PDT/2021/PT.Bdg dengan posisi Perkara sampai saat ini dalam proses Kasasi.

g. Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan *stakeholders*.

- 1) Pelaksanaan hubungan dengan pelanggan.
 - a) kebijakan mengenai hak-hak konsumen/pelanggan, kebijakan keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen/pelanggan diatur dalam Peraturan Direksi Nomor PER.U/KL.104/V/2/KA-2022 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor PER.U/KL.104/VI/1/KA-2019 tentang Pedoman Pelayanan Penumpang di Atas Kereta Api. Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KB.207/XII/1/KA-2016 tentang Pedoman Pemberian *Service Recovery* Angkutan Penumpang Kereta Api dan Nomor KS/102/VII/1/KA-2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan PT KAI (Persero).

- b) Perusahaan telah mempunyai Prosedur penanganan keluhan pelanggan berupa Standar Operation Prosedur Pelayanan melalui *Customer Relation*, *Standar Operation Prosedur* Pelayanan Surat Elektronik, dan Standar Operation Prosedur Pelayanan Media Sosial KAI121.

Perusahaan mengefektifkan Kontak Pelanggan berupa *Contact Center 121*; *Facebook KAI121*; *Twitter @KAI121*, *Email cs@kai.id* serta adanya *Customer Service on Train* dan *Customer Service on Station*.

Selain adanya prosedur penanganan keluhan pelanggan dan kontak pelanggan, Perusahaan juga telah menggunakan aplikasi penanganan keluhan pelanggan secara terintegrasi berupa aplikasi *salesforce* untuk menghimpun keluhan pelanggan dari *Customer Service on Station*; *Customer Service on Train*; *CC 121*; *Social Media*; dan Disposisi lain.

- c) Program pengkomunikasian informasi produk/layanan kepada pelanggan telah dilaksanakan dengan *marketing communication* berupa *Below The Line* yaitu promosi yang dilakukan di tingkat retail/konsumen dengan salah satu tujuannya adalah merangkul konsumen supaya *aware* dengan produk perusahaan, contohnya : program bonus/hadiah, event, pembinaan konsumen dan lainnya, serta *Above The Line* yaitu marketing/promosi yang biasanya dilakukan oleh manajemen pusat dengan menggunakan media lini sebagai upaya membentuk *brand image* yang diinginkan, contohnya iklan di Televisi dengan berbagai versi.
- d) Keluhan Pelanggan atas penumpang dan barang di tahun 2022 menurun sebanyak 83 keluhan dari tahun sebelumnya sebanyak 15.818 keluhan. Penanganan keluhan ditahun 2022 dinyatakan telah ditangani, walaupun dalam kolom keterangan disebut *Close*, namun kalimat bentuk tindak lanjut beberapa menggunakan kata akan. Contoh akan disesuaikan, akan disampaikan, akan dievaluasi, akan

dikoordinasikan, akan dilakukan. Menunjukkan belum ada tindak lanjut nyata atas suatu keluhan.

- e) Perusahaan telah melaksanakan *survei* kepuasan pelanggan secara berkala setiap semester. *Survei* Kepuasan pelanggan tahun 2022 dilaksanakan pihak eksternal yaitu Swatama Research. *Survei* ditujukan kepada responden stasiun maupun responden kereta api melalui wawancara langsung dan telepon. Berdasarkan laporan *survei* kepuasan pelanggan tersebut bahwa nilai kepuasan penumpang secara keseluruhan cukup baik dengan nilai skor 4,39 (skala 1-5).

Unit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan *Survei* Kepuasan Pelanggan (CP) meneruskan hasil *survei* kepuasan pelanggan ke masing-masing unit kerja untuk diketahui dan dilakukan tindak lanjut di masing-masing unit. Masing-masing Unit Kerja melakukan pembahasan atas hasil *survei* kepuasan pelanggan termasuk tindak lanjut yang harus dilaksanakan dan Penanggung jawab tindak lanjutnya seperti yang dimuat dalam Rapat Tinjauan Manajemen unit, namun demikian pelaksanaan tindak lanjut *survei* kepuasan pelanggan tersebut belum dilakukan monitoring oleh Penanggung Jawab *Survei* Kepuasan Pelanggan untuk mengetahui sejauh mana tindak lanjut hasil *survei* ditindaklanjuti. Tidak ditemukan penyampaian laporan/progres pelaksanaan Tindak Lanjut hasil *Survei* kepada Direksi.

- 2) Pelaksanaan hubungan dengan pemasok.

Perusahaan berupaya mengembangkan kemitraan dengan pemasok untuk memperoleh barang dan jasa yang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini terlihat dari diumumkannya rencana pengadaan dalam media masa dan *website* <http://eproc.kereta-api.co.id>, *updating* terhadap petunjuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta tidak terdapat

keterlambatan pembayaran kepada pemasok yang telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak.

Secara berkala perusahaan telah melakukan *assessment* pemasok berdasarkan pencapaian QCDS (*quality, cost, deliver and service*) dengan hasil validasi vendor per Januari 2023 adalah 106 Vendor status aktif, 83 vendor sudah validasi dan 128 vendor belum validasi. Namun demikian masih terdapat hal yang memerlukan perhatian, yaitu belum dilengkapi dengan rekomendasi hasil *assessment pemasok*. Selain itu Perusahaan belum secara berkala melaksanakan survei kepuasan pemasok. Survei kepuasan pemasok terakhir dilaksanakan tanggal 22-26 Januari 2021 terhadap 10 responden dengan nilai skor rata-rata 4,475 yang artinya pemasok/mitra kerja sangat setuju dan puas terhadap pelayanan PT KAI (Pesero).

3) Pelaksanaan hubungan dengan Kreditur.

Pelaksanaan hubungan dengan Kreditur diatur *dalam Code of Corporate Governance* yaitu:

- a) menetapkan kebijakan mengenai perlindungan hak dan kepentingan Kreditur antara lain:
 - (a) Pemenuhan kewajiban kepada kreditur;
 - (b) Pengungkapan informasi secara transparan, akurat dan tepat waktu;
 - (c) *Covenant* yaitu jaminan Perusahaan untuk: melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk melindungi kepentingan kreditur.
- b) menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan penggunaan pinjaman jangka panjang sesuai dengan peruntukan dan pelunasan; dan
- c) menetapkan kebijakan Perusahaan sebagai penjamin.

Perusahaan telah memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada kreditur sesuai dengan perjanjian. Kreditur perusahaan telah dibayar tepat waktu/sesuai perjanjian dan tidak ada keterlambatan/penundaan. Hal ini ditunjukkan dengan tidak ada

complaint/surat teguran dari Kreditur selama tahun 2022. Namun demikian terdapat *mismatch* dalam penggunaan dan penyediaan dana di mana pendapatan dari penerbitan obligasi di tahun 2022, sebagian digunakan untuk pembayaran hutang pokok obligasi I seri A tahun 2017 yang jatuh tempo pada tahun 2022.

4) Pelaksanaan kewajiban kepada Negara.

Terkait dengan pelaksanaan kewajiban kepada Negara, PT KAI (Persero) telah melaksanakan pembayaran pajak kepada Negara berupa PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, PPN PKP (keluaran), PPN PKP (masukan), Kompensasi PPN, PPh pasal 25, dan PBB. SPT Masa Bulanan dan Tahunan dilaporkan secara tepat waktu, dimana SPT Masa Bulanan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 setelah masa pajak berakhir, SPT Tahunan Pribadi dilaporkan tanggal 31 Maret, serta SPT Tahunan Badan dilaporkan tanggal 30 April.

Namun demikian masih terdapat keterlambatan dalam penyampaian SPT Tahunan pada DAOP 3 Cirebon dan keterlambatan membayar kewajiban perpajakan pada DAOP 5 Purwokerto dan LRT.

5) Pelaksanaan hubungan dengan karyawan perusahaan.

Sejalan dengan hubungan industrial yaitu terwujudnya produktivitas kerja yang tinggi dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat, terwujudnya kedisiplinan, sikap dan etos kerja yang menjamin kesejahteraan, keselamatan kerja pekerja serta kepastian jalannya perusahaan. Perusahaan telah menyusun dan menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan yang diwakili oleh Direksi dengan Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) Tahun 2022-2024 tanggal 5 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor KEP.4/HI.00.01/00.0000.22069007/B/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022.

Perusahaan memiliki kebijakan yang mendorong partisipasi karyawan seperti Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KO.101/III/10/KA-2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Penyelenggaraan *Innovation and Improvement Award* dimana salah satu tujuan kebijakan ini adalah memacu dan memacu timbulnya karya-karya bermutu yang bermanfaat bagi PT KAI (Persero). Selain itu kegiatan lainnya seperti Forum LKS Bipartit (membahas kebijakan perusahaan antara manajemen dengan karyawan), Pembinaan jasmani dan rohani, Kegiatan donor darah di pusat dan seluruh daerah operasi secara berkala, Peringatan hari besar keagamaan, Peringatan hari Nasional, dan Perayaan Ulang Tahun PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan menyediakan sarana berupa media *E-office*, *helpdesk* SDM, Aplikasi SRI (*Safety Railway Information*), Portal raileo dan dialog dengan mengedepankan kepentingan bersama.

Perusahaan telah melaksanakan pengukuran kepuasan pegawai di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang dilaksanakan oleh *Productivity & Quality Management Consultant* dengan menggunakan skala 1-5 dengan hasil:

- a) Employee Satisfaction Index (ESI) adalah 4.17
 - b) Employee Engagement index (EEI) adalah 4.32
 - c) Tingkat Kepuasan Layanan SDM adalah 3.89
 - d) Employee Commitment Index (ECI) adalah 4.23
- 6) Terdapat prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan *stakeholders*.

Pelaksanaan Penanganan keluhan *stakeholders* khususnya untuk Mitra, Pegawai, Pemerintah, Masyarakat, Kreditur dan lainnya dengan menggunakan media *Website*, *Help Desk Procurement*, Kontak Procurement, *Help desc* SDM, *Help Desc* IT, penyampaian keluhan melalui surat-menyurat, melalui contact center, portal LAPOR, *Task Foce*, dan Portal Lapor.

Dalam Bagan Alur Penanganan Keluhan disebutkan bahwa pihak terkait: Melakukan identifikasi sumber masalah; Melakukan tindakan penyelesaian; Koordinasi dengan unit pusat terkait; Meminta Keputusan atasan disertai justifikasinya; Masalah selesai.

Dalam implementasinya Pengurus Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) melaksanakan forum bipartit untuk membahas mengenai keluhan-keluhan pekerja yang tidak dapat segera diselesaikan oleh atasannya.

- 7) Upaya untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham secara konsisten dan berkelanjutan.

PT KAI (Persero) telah berupaya untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham meskipun belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan Pemegang Saham. Hal ini terlihat dari adanya konsistensi pertumbuhan modal bersih Perusahaan (ekuitas) selama 3 (tiga) tahun terakhir, dan tercapainya laba ditahun 2022 setelah mengalami kerugian sebelumnya selama 2 tahun berturut turut akibat penurunan pendapatan penumpang dampak pandemi Covid-19. Meskipun pencapaian KPI pada Tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan perusahaan belum dapat melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham akibat kerugian di tahun 2020 dan tahun 2021, namun Tingkat Kesehatan perusahaan mengalami *trend* peningkatan selama tiga tahun terakhir.

Pertumbuhan Ekuitas, Laba rugi, EPS dan KPI tiga tahun sebagai berikut:

- Ekuitas tahun 2020 Rp18.230.277.673.000,00; Ekuitas tahun 2021 Rp23.411.740.322.506,00; Ekuitas tahun 2022 Rp29.492.744.344.000,00 (*unaudited*).
- Rugi tahun 2020 (Rp1.389.838.942.000,00); Rugi tahun 2021 (Rp417.482.942.000,00); Laba tahun 2022 Rp1.537.633.133.000,00.
- *Earning per Share* pada tahun 2020 sebesar (Rp110,-), Tahun 2021 sebesar (Rp30,-) dan Tahun 2022 sebesar Rp85,- (*unaudited*).
- Pencapaian Skor *Key Performance Indicators* belum konsisten naik

yaitu pencapaian KPI Tahun 2020 sebesar 98,5 ;Tahun 2021 sebesar 96,39 dan Tahun 2022 sebesar 96,84 (*unaudited*).

- 8) Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung keberlanjutan operasi perusahaan.

Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagaimana diamanatkan Undang-undang tentang Perseroan, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah membentuk unit yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem CSR perusahaan yaitu Unit *Corporate Social Responsibility* (USS) di bawah *Corporate Secretary*. Selanjutnya untuk keseragaman pengertian, cara kerja dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan pelaksanaan aktivitas di tingkat pusat ataupun daerah telah ditetapkan Peraturan Direksi Nomor Per.U/KP.502/VI/1-2022 tanggal 16 Juni 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Direksi Nomor PER.U/KP.502/X/1/KA-2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Dalam mendukung dan memperkuat pengembangan masyarakat melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan program lainnya sesuai perundang-undangan, Rencana Kerja Anggaran PKBL telah menganggarkan sebesar Rp19.545.981.930,00 dan telah mendapatkan pengesahan dari Pemegang Saham No. RIS-53/DSI.MBU.B/12/2021 tanggal 23 Desember 2021. Pelaksanaan atas RKAP yang telah disahkan Pemegang Saham tersebut, Direksi telah menyampaikan Laporan PKBL Tahun Buku 2022 melalui Portal Kementerian BUMN dengan realisasi Penyaluran kemitraan sebesar Rp8.097.044.451,00 atau 86,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp 9.350.000.000,00, dan Program Penyaluran Bina Lingkungan sebesar Rp9.792.154.012,00 atau 96,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.195.981.930,00.

Perusahaan telah berupaya mengantisipasi dampak negatif terhadap masyarakat yang ditimbulkan oleh produk, pelayanan dan proses operasional dari perusahaan, hal ini terlihat dari:

- a) Adanya SOP yang memuat kewajiban perusahaan untuk memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas perusahaan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, diantaranya Peraturan Direksi PT KAI (Persero) Nomor PER.S/KS.102/v/29/KA-2020 tentang Prosedur Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan Kerja dalam Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian, Keputusan Direksi PT KAI (Persero) Nomor KEP.U/KS.101/XII/2/KA-2016 tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Balai Yasa Sarana, Balai Yasa Prasarana, Dipo Sarana, Dipo Prasarana dan Stasiun Nomor KEP.U/KS.101/IV/I/KA-2017 tentang Pengelolaan Limbah di Daerah Operasi, Divisi Regional Balai Yasa Gudang Persediaan dan Anak Perusahaan; Nomor KEP.U/LL.507/VI/I/KA-2012 tentang Alat Perlindungan Diri di Lingkungan Kerja PT KAI (Persero); Nomor 7/LL.507/KA-2012 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan di Lingkungan PT KAI (Persero); Nomor KEP.U/KS.103/XII/I/KA-2016 tentang Penyelenggaraan Pesawat Angkat dan Angkut; Nomor PER.U/KL.104/X/2/KA-2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
- b) Perusahaan mempunyai Aplikasi SRI (*Safety Railway Information*) yaitu sistem informasi yang mengelola data *safety* di PT KAI (Persero) melalui media pelaporan potensi bahaya dari seluruh daerah untuk selanjutnya dilakukan pemantauan dan pencegahan, serta media sosialisasi mengenai Informasi Keselamatan dari Direktorat Keselamatan dan Keamanan kepada seluruh pegawai.

Kami merekomendasikan kepada Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) agar:

- a) Menyampaikan laporan/progres pelaksanaan Tindak Lanjut hasil Survei Pelanggan kepada Direksi.
- b) Melengkapi hasil penilaian/*assessment* pemasok dengan rekomendasi hasil *assessment* pemasok.
- c) Melaksanakan survei tingkat kepuasan pemasok secara berkala.
- d) Melaksanakan manajemen kas dan keuangan yang baik sehingga tidak terjadi *mismatch* dalam penggunaan dan penyediaan dana dari penerbitan hutang jangka panjang untuk pembayaran bunga dan pokok hutang jangka panjang yang jatuh tempo.
- e) Menjaga konsistensi pencapaian KPI Korporat dan Dividen.

h. Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan Manajemen di bawah Direksi.

- 1) Direksi menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan.

Pengaturan terkait benturan kepentingan di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi Nomor Kep.U/OT.104//3/KA-2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang telah mendapatkan pengesahan dari Dewan Komisaris dan Peraturan Direksi Nomor PER.U/KC.202/II/1/KA-2022 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).

Direksi telah menandatangani pakta integritas tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan lain, atau golongan dengan kepentingan perusahaan pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun.

2) Direksi menerapkan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan.

Dalam upaya menerapkan untuk mencegah benturan kepentingan, Direksi telah menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap pedoman perilaku yang diperbaharui setiap tahun dan Direksi telah menyampaikan laporan kepemilikan saham pada perusahaan dan perusahaan lainnya, serta menyampaikan pakta integritas pada setiap keputusan yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham.

Selama Tahun 2022 tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi sehubungan dengan transaksi kesempatan perusahaan yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*) maupun yang dibantu oleh orang dalam (*insider information*)

i. Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu.

1) Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.

Direksi telah melaporkan informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris melalui laporan manajemen triwulanan dan laporan tahunan. Penyampaian Laporan Manajemen triwulanan dan tahunan telah memenuhi target waktu yaitu 1 bulan setelah berakhirnya triwulan atau sebelum batas waktu penyampaian kepada pemegang saham meskipun konsep laporan masih terlambat dari target waktu yang ditetapkan dalam *Board Manual*. Muatan dalam laporan manajemen triwulanan dan laporan tahunan yaitu berupa capaian kinerja RKAP dan permasalahan yang dihadapi dan telah mengacu pada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-

211/M-PBUMN/1999 tanggal 24 September 1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan BUMN.

- 2) Direksi memberikan perlakuan yang sama (*fairness*) dalam memberikan informasi kepada Pemegang Saham dan anggota Dewan Komisaris
Direksi telah memberikan perlakuan yang sama (*fairness*) dalam memberikan informasi kepada Pemegang Saham dan anggota Dewan Komisaris, ditandai dengan penyampaian laporan manajemen dan laporan tahunan dengan isi yang sama dan tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan terjadi praktik-praktik informasi yang ditutupi atau dimanipulasi.

j. Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- 1) Direksi memiliki pedoman/tata tertib Rapat Direksi, minimal mengatur etika rapat dan penyusunan risalah rapat, evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta pembahasan atas arahan/usulan dan/atau keputusan Dewan Komisaris.

Tata tertib rapat Direksi ditetapkan dengan Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor Per.U/KC.202/X/1/KA-2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Tata Tertib Rapat Direksi yang memuat etika rapat dan dokumentasi pelaksanaan rapat direksi yang memuat tata penyusunan risalah rapat, evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya dan pembahasan/telaah atas arahan/usulan dan/atau tindak lanjut pelaksanaan Dewan Komisaris terkait dengan usulan Direksi.

- 2) Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi sesuai kebutuhan, paling sedikit sekali dalam setiap bulan.

Pengaturan Rapat Direksi dimuat dalam *Board Manual*, penyelenggaraan Rapat Direksi tertuang dalam RKA pada program kerja Sekretaris Perusahaan. Berdasarkan RKA rapat berkala dilaksanakan minimal 1 kali

dalam satu bulan. Namun rencana rapat belum tertuang dalam bentuk jadwal terutama untuk rapat-rapat yang rutin dilaksanakan.

Di tahun 2022, Direksi melaksanakan rapat internal sebanyak 36 kali dan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris sebanyak 20 kali, dan telah sesuai rencana rapat sekurang-kurangnya 1 kali setiap bulan. Anggota Direksi menghadiri setiap rapat Direksi maupun rapat Direksi dan Komisaris, jika tidak dapat hadir Direksi yang bersangkutan memberikan surat kuasa kepada Anggota Direksi lainnya. Tingkat kehadiran Direksi dalam rapat sangat aktif dengan rincian kehadiran rapat Direksi sebagai berikut:

No	DIREKTUR	R A P A T				Keterangan Masa Jabatan
		INTERNAL		GABUNGAN		
		Jumlah Rapat	Jumlah kehadiran	Jumlah Rapat	Jumlah kehadiran	
1	Didiek Hartantyo	36	36	19	18	
2	Hadis Surya Palapa	26	26	16	16	Mulai April 2022
3	Awan Hermawan P.	36	36	19	19	
4	Heru Kuswanto	36	36	19	19	
5	Eko Purwanto	36	36	19	19	
6	Sandry N. Pasambuna	26	26	16	16	Mulai April 2022
7	Suparno	26	26	17	17	Mulai April 2022
8	John Robertho	36	36	19	19	
9	Salursa Wijaya	36	36	20	20	
10	Dadan Rudiansyah	10	9	4	3	Sd 31/3/2022
11	Agung Yunanto	10	10	4	4	Sd 31/3/2022
12	Jeffrie N Korompis	10	10	4	4	Sd 31/3/2022
	Jumlah		98,70		99,06%	

Tingkat kehadiran Direksi dalam rapat Internal BOD 98,70% sedangkan dalam rapat Gabungan BOC BOD 99,06%.

- 1) Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.

Direksi telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya dan melakukan pembahasan tindak lanjut terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya yang belum selesai,

namun tidak terdokumentasikan dalam risalah rapat atau belum termuat dalam bagian evaluasi/pemantauan progress pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya beserta tindak lanjutnya sebagaimana format risalah rapat, tetapi dimuat dalam paparan sebagai bahan rapat.

- 3) Direksi menindaklanjuti arahan, dan/atau keputusan Dewan Komisaris. Terdapat tindak lanjut atas arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris namun belum semua arahan ditindaklanjuti. Tindak Lanjut atas Arahan Dewan Komisaris dalam 21 Risalah Rapat Gabungan yang merekomendasikan 134 hal yang harus ditindaklanjuti Direksi. Progres tindak lanjutnya adalah 45 Rekomendasi (33,58%) sudah tuntas ditindaklanjuti, sementara 89 rekomendasi (66,42%) masih dalam proses tindak lanjut. Tindak Lanjut atas Arahan Dekom melalui 21 surat terdapat 81 rekomendasi. Progres tindak lanjut adalah 21 Rekomendasi (25,93%) sudah tuntas ditindaklanjuti, sementara 60 Rekomendasi (74,07%) masih dalam proses tindak lanjut.

Kami merekomendasikan kepada Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) agar menginstruksikan Sekretaris Perusahaan:

- Menyusun rencana Rapat Direksi dan agenda yang dibahas.
- Konsisten mencantumkan dalam Risalah rapat atau Materi risalah rapat, pembahasan terkait hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya dan Tindak lanjut keputusan rapat sebelumnya yang belum selesai.
- Menetapkan batasan waktu pelaksanaan tindak lanjut arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris agar tindak lanjut yang dilakukan bermanfaat, relevan dan tepat waktu.

k. Direksi menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.

- 1) Perusahaan memiliki Piagam Pengawasan Intern yang ditetapkan oleh Direksi.

Perusahaan telah mempunyai Piagam Pengawasan (*Internal Audit Charter*) yang ditetapkan oleh Direksi dan disahkan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor KEPDIR SK.U/KG.210/II/1/KA-2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Penetapan Piagam Internal Audit yang merupakan penyempurnaan dari Piagam *SPI Charter* Nomor KEP.U/KG.210/I/1/KA-2017 tanggal 24 Januari 2017.

Piagam Pengawasan Intern telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah mengacu pada Definisi Internal Audit, Kode Etik, dan International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing yang diterbitkan oleh Internal Audit and Assurance Standard Board (IAASB) The Institute of Internal Auditors (IIA). Muatan Piagam Pengawasan Intern tersebut meliputi penjelasan posisi fungsi Audit internal, ruang lingkup, kewenangan audit internal untuk mendapatkan akses terhadap semua catatan, personil dan aset perusahaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

2) SPI/Fungsi Audit Internal dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya.

SPI/Fungsi Audit Internal sudah dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya yaitu:

- a) Posisi SPI di dalam struktur organisasi berada langsung di bawah Direktur Utama, diangkat oleh Direktur Utama dengan SK Pengangkatan EVP SPI Nomor SK.U/KH.608/VII/33/SAP/KA-2018 tanggal 12 Juli 2018.
- b) Pimpinan Fungsi Audit Internal mempunyai akses langsung melapor hasil kerjanya kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit.
Kepala SPI (UI) mempunyai akses langsung kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit terkait pelaksanaan tugas sesuai yang tercantum dalam Piagam SPI dan Piagam Komite Audit, serta melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit melalui Laporan Kinerja Triwulanan.
- c) Personil yang ditugaskan di SPI.

SPI telah memiliki rencana kebutuhan SDM yang dimuat dalam Program Kerja Tahunan (PKT) tahun 2022 dengan nilai kecukupan tenaga auditor yang dihasilkan dari analisis beban kerja hanya mencapai 76,40%.

- d) Kualitas tenaga auditor yang ditugaskan di SPI sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas SPI.

Pimpinan fungsi audit internal (UI) telah memiliki keahlian yang diakui dalam profesi internal auditor dengan mendapatkan sertifikasi Chartered Accountant (IAI) tahun 2014. Begitu juga auditor internalnya dengan komposisi 30 dari 63 atau 47,62% pegawai telah memiliki keahlian yang diakui dalam profesi auditor internal yaitu *Certified Accountant (CA)*, CIAE, QIA, CFE dan CPIA. SPI telah mempunyai pengembangan profesi secara berkelanjutan bagi staf auditor internal, baik untuk mempertahankan sertifikasi profesinya maupun mengikutsertakan staf auditor internal dalam pendidikan yang mendukung usaha-usaha memperoleh sertifikasi profesi yang dimuat dalam Program Kerja Tahunan (PKT). Selain itu telah dilakukan penambahan wawasan dan peningkatan kinerja pegawai melalui *sharing session* atau forum audit dan studi banding.

- e) SPI memiliki pedoman audit, mekanisme kerja dan supervisi di dalam organisasi SPI, dan penilaian program jaminan dan peningkatan kualitas. Kebijakan dan prosedur SPI sebagai pedoman bagi pelaksanaan fungsi pengawasan intern terdapat SOP yang ditandatangani oleh Kepala SPI, dan pedoman dalam bentuk KepDir/PerDir yang ditandatangani oleh Direktur Utama, sebagai berikut:

- (1) Pedoman Kendali Mutu, Nomor SOP.UI/KL.104/IX/1/KA-2020.
- (2) Pedoman Penerapan Sistem Pengendalian Intern, KepDir No. KEP.U/KC.202/I/1/KA-2017.
- (3) Pedoman Pengelolaan Satuan Pengawasan Intern, KepDir No. KEP.U/PS.106/V/3/KA-2014.

- (4) Pedoman Audit Operasional, SOP.UI/KL.104/X/2/KA-2020.
- (5) Pedoman Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Internal dan Pemeriksaan Eksternal Serta Arahan Pemegang Saham, PerDir No. PER.U/KC.201/IV/1/KA-2019 dan SOP.UI/KL.104/II/1/KA-2021
- (6) Pedoman Audit Investigasi KepDir No. KEP.U/PS.106/V/4/KA-2014.
- (7) Pedoman Reviu Laporan Keuangan SOP No. SOP.UI/KL.104/V/1/KA-2021.
- (8) Pedoman Consulting PerDir No. PER.u/KL.104/VIII/3/KA-2017.

Namun demikian beberapa pengaturan perlu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perusahaan diantaranya Petunjuk dan Mekanisme Pengarsipan Kertas Kerja Audit SPI PT KAI (Persero) dan Pedoman Pengelolaan Satuan Pengawasan Intern, selain itu perlu disusun Pedoman Evaluasi Manajemen Risiko dan Pedoman Evaluasi SPI.

Kepala SPI telah melaksanakan program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi audit internal dalam bentuk *konsinyering* dan *reviu meeting* untuk membahas hasil penugasan pengawasan yang telah dilaksanakan, yang juga diikuti oleh Kepala SPI. Kepala SPI melakukan *reviu* atas hasil pengawasan secara langsung dalam *reviu meeting*. Selain itu, Kepala SPI melakukan *reviu* pada saat penyusunan draft laporan hasil pengawasan secara langsung dalam draft laporan hasil pengawasan. Namun belum dilaksanakan penilaian/*reviu* (*assessment*) internal secara berkala atas program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal secara keseluruhan.

- 3) SPI melaksanakan pengawasan intern untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan.
 - a) SPI merencanakan program kerja tahunan (PKT) SPI Tahun 2022 menyesuaikan dengan konsep bisnis perusahaan dan disusun berdasarkan data temuan-temuan tahun sebelumnya dan prioritas dari

Program dan Kegiatan dalam RJPP dan RKAP tahun berjalan dengan mempertimbangkan risiko yang melekat pada unit atau kegiatan (*risk based audit*). SPI telah menyampaikan PKT kepada Dekom c.q. Komite Audit untuk mendapatkan pertimbangan dan saran-saran sebelum disetujui oleh Direktur Utama.

- b) Capaian kinerja atas target PKPT dan pemenuhannya tertuang dalam Laporan Kinerja Internal Audit (UI) dengan realisasi 43 Penugasan Audit Operasional dari 41 Penugasan yang direncanakan atau capaian 105% dari PKT Tahun 2022.
- c) SPI telah melaporkan pelaksanaan tugasnya setiap triwulan berupa Laporan Kinerja Internal Audit Triwulan dan Tahunan kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit. SPI melaksanakan program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal, yang mencakup seluruh aspek dari aktivitas fungsi pengawasan intern baik dilakukan oleh Internal maupun Penilaian Oleh Eksternal yang dilakukan lima tahun sekali.
- d) SPI telah memberikan kontribusi terhadap perbaikan/peningkatan proses Tata Kelola (*governance*), Manajemen risiko dan pengendalian intern antara lain dimuat dalam Laporan Hasil Audit dan pelaksanaan tugasnya, dan perlu untuk ditingkatkan.
- e) Pemantauan tindak lanjut atas hasil audit internal dan eksternal Tahun 2022 dilakukan melalui telpon, email, surat menyurat (RDS) dan kunjungan. Hasil Monitoring tersebut dilaporkan kepada Dirut c.q. KCC dan Dewan Komisaris c.q. Komite Audit dengan Nota Dinas Kepala SPI Nomor KC.302/I/3/KA-2023 tanggal 29 Januari 2023, perihal Penyampaian Kinerja Internal Audit Tahun 2022

Selain itu dalam Laporan Triwulanan Unit SPI diungkapkan pula Realisasi monitoring Tindak Lanjut Temuan per triwulan bersangkutan.

Kami merekomendasikan kepada Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) agar menginstruksikan SPI melaksanakan program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal, yang mencakup seluruh aspek dari aktivitas

fungsi pengawasan intern baik dilakukan oleh Internal maupun Penilaian Oleh Eksternal yang dilakukan lima tahun sekali.

I. Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif.

1) Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya.

Sekretaris Perusahaan telah memiliki kualifikasi yang memadai yaitu memenuhi kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh perusahaan, mempunyai pengalaman profesional dan kompetensi yang dimiliki mencakup manajemen keuangan dan komunikasi perusahaan, namun belum mencakup hukum dan pasar modal. Meskipun demikian VP di bawahnya mempunyai kompetensi di bidang hukum dan pasar modal.

Posisi Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor PER.U/KO.104/II/2/KA-2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor PER.U/KO.104/1/3/KA-2018 tentang Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Perusahaan," Sekretariat *Perusahaan dipimpin oleh seorang Executive Vice President Corporate Secretary (US) yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama". Corporate Secretary* diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Keputusan Direksi tersebut di atas, Sekretaris Perusahaan (US) mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab diantaranya:

- a) mengkoordinasikan penyelenggaraan fungsi pengelolaan informasi dan dokumen Perusahaan, *Corporate Social Responsibility, Corporate Public Information and Communication, Corporate Culture, Corporate Office, Board of Directors Administration and Protocol.*
- b) Memastikan kepatuhan atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) melalui penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistle Blowing System-WBS*).

- c) Memfasilitasi hubungan antara Perusahaan dengan Investor, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya".

2) Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya, Sekretaris Perusahaan (US) dibantu oleh 5 (lima) *Vice President* yaitu:

- a) *VP Corporate Document Management (USD)*,
- b) *VP Public Relation (USP)*,
- c) *VP Quality Assurance & GCG (USQ)*,
- d) *VP Corporate Culture and General Facilities (USC)*,
- e) *VP Corporate Social Responsibility (USS)*,

Dengan dibantu lima VP tersebut, US Perusahaan telah menjalankan fungsinya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:

- a) Sekretaris Perusahaan memberikan informasi yang materiil dan relevan kepada *stakeholders*, yaitu :
 - Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Tahunan (*annual report*) Perusahaan, sedangkan koordinasi penyusunan Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan dilaksanakan oleh *EVP Finance Consolidation (KCF)* sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab KC. Laporan manajemen triwulanan disampaikan ke Dewan Komisaris sebelum disampaikan ke Pemegang Saham, namun penyampaian konsep laporan manajemen belum tepat waktu sebagaimana diatur dalam *Board Manual*.
 - Memutakhirkan materi informasi yang disajikan dalam *website* eksternal serta bertanggung jawab atas pengisian dan pengelolaan serta monitoring informasi sosial media perusahaan.
 - Mengkoordinasikan penyiapan dan penyediaan bahan-bahan untuk "*Press Release*" atas setiap pernyataan dalam tingkatan Direksi serta pelayanan pemberian informasi atas informasi yang dibutuhkan mengenai data atau *performance* dari Perusahaan dengan batas-

batas yang ditetapkan dalam Protokol Informasi yang ditetapkan perusahaan dan penyampaian laporan-laporan lainnya kepada *stakeholders* lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

- b) Sekretaris Perusahaan telah menjalankan tugas sebagai pejabat penghubung yaitu mengorganisasikan dan mengkoordinasikan rapat Direksi, rapat Direksi dan Dewan Komisaris, RUPS dan kegiatan lainnya dengan *stakeholders* seperti *press conference* dan dengar pendapat dengan anggota Dewan. Selain itu, Sekretaris Perusahaan telah menyusun jadwal dan tahapan kegiatan menjelang RUPS dan Rapat Direksi.
- c) Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsi pelaksanaan dan pendokumentasian RUPS dan Rapat Direksi.
Sekretaris Perusahaan telah menjalankan fungsi pendokumentasian RUPS, pendokumentasian daftar aset (*ground kaart*, sertifikat tanah dan akte jual beli), kontrak-kontrak Kerja Sama Operasi dan risalah rapat Direksi, risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang diadministrasikan di USD. Namun risalah rapat Direksi pada umumnya belum memuat alasan ketidakhadiran Direksi, hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya, dinamika rapat dan pencantuman pendapat berbeda/*dissenting comment* (bila ada).
- d) Sekretaris Perusahaan telah mengatur penyelenggaraan program pengenalan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat. Namun program pengenalan yang dilakukan pada tahun 2022 berupa kunjungan lapangan ke Daop dan Divre, belum dilaksanakan pengenalan perusahaan dalam bentuk pembekalan mengenai materi dokumen penting perusahaan, proses bisnis, prinsip, tugas dan kewenangan serta pengenalan GCG perusahaan
- e) Sekretaris Perusahaan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama.

Sekretaris Perusahaan belum menyusun laporan yang berkaitan dengan tugasnya dalam Laporan Kinerja *Corporate Secretary* Tahun 2022 namun tiap unit di bawah Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan laporan kinerja unitnya dan telah dirangkum dalam laporan manajemen triwulanan dan tahunan. Sedangkan Laporan Telaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang baru termasuk kesesuaiannya terhadap peraturan yang ada di Perusahaan merupakan tanggung jawab Pusat Hukum yang berada langsung di bawah Direktur Utama.

3) Direksi mengevaluasi kualitas fungsi Sekretaris Perusahaan.

Evaluasi atas pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan berupa evaluasi atas pelaksanaan kegiatan EVP *Corporate Secretary* (US) dalam bentuk prosentase capaian KPI.

Kami merekomendasikan kepada Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan dan mendokumentasikannya serta menginstruksikan kepada Sekretaris Perusahaan untuk:

- Menyampaikan konsep Laporan Manajemen Perusahaan secara tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- Menyempurnakan Risalah Rapat Direksi dengan memuat hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya, pencantuman jalannya rapat (dinamika rapat), pencantuman pendapat berbeda/*dissenting comment* (bila ada).
- Menyelenggarakan, mempersiapkan materi program pengenalan Direksi dan Dewan Komisaris baru, minimal memuat pengenalan prinsip-prinsip GCG, gambaran umum BUMN, kewenangan yang didelegasikan, tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta mendokumentasikan program pengenalan perusahaan bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat yang berasal dari luar perusahaan.
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan secara berkala.

- Menyusun laporan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

m. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

- 1) Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Prosedur pemanggilan RUPS dinyatakan dalam Undangan RUPS yang disampaikan kepada Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham yang memuat tanggal, waktu, tempat dan informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS termasuk usul yang direncanakan Direksi untuk diajukan dalam RUPS. Sebelum penyelenggaraan RUPS tersebut terlebih dahulu dilaksanakan rapat teknis dengan Pemegang Saham yang membahas secara teknis materi yang akan dibahas dan disahkan dalam RUPS Laporan Tahunan, RKAP dan RJPP serta penjelasan mengenai hal-hal lain berkaitan dengan agenda RUPS yang akan dilaksanakan.

Dalam Tahun 2022 telah dilaksanakan dua kali RUPS, yaitu:

- a) RUPS Persetujuan RKAP dan RKA TJSI tahun 2022, KPI Direksi dan Kontrak Manajemen yang dilaksanakan tanggal 27 Januari 2022.
- b) RUPS Pertanggungjawaban Keuangan, Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 dilaksanakan tanggal 20 Mei 2022.

RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2022 dilaksanakan tidak tepat waktu yang seharusnya diberikan pengesahan sebelum tahun anggaran berjalan. Begitu juga RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2021 tidak tepat waktu karena dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2021, namun masih dalam batasan yang diatur Kementerian BUMN dalam KEP-101/MBU/2002 yaitu 30 (tiga puluh) hari setelah tahun RKAP berjalan. RJPP Tahun 2020-2024

diberikan pengesahan pada saat RUPS RKAP Tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021.

RUPS Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 dilaksanakan tepat waktu yaitu paling lambat 6 bulan setelah tahun berjalan. RUPS juga telah menyetujui bahwa penetapan gaji/honorarium/tantiem Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan tersendiri melalui Surat Keputusan Pemegang Saham. Keputusan persetujuan usulan gaji Direksi, honorarium Komisaris dan usulan remunerasi Direksi dan Dekom tahun 2022 ditetapkan Pemegang Saham dengan Surat Menteri BUMN Nomor SR-47/WK2. MBU.E/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022.

- 2) Direksi menyediakan akses serta penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan RUPS telah sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dahulu dilaksanakan Rapat Teknis dan Rapat Pra RUPS dengan Pemegang Saham yang membahas secara teknis materi yang akan dibahas dan disahkan dalam RUPS Laporan Tahunan dan RKAP, serta penjelasan mengenai hal-hal lain berkaitan dengan agenda RUPS yang akan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan RUPS Pengesahan RKAP dan RKA PKBL Tahun 2022 Direksi menyampaikan paparan mengenai rancangan RKAP beserta dasar analisis dan asumsi penyusunannya dilengkapi dengan tanggapan Dewan Komisaris beserta persetujuan dari RUPS. Keputusan RUPS mengesahkan RKAP Tahun 2022, RKA TJSL dan menetapkan KPI Direksi & Dewan Komisaris secara kolegial serta penetapan indikator aspek Operasional untuk pengukuran tingkat kesehatan Perusahaan tahun 2022.

Dalam pelaksanaan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2021, Direksi memaparkan mengenai laporan tahunan dan pelaksanaan PKBL tahun buku 2021. Dewan Komisaris mengemukakan Laporan pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2021.

Keputusan RUPS menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan laporan Keuangan & Laporan TJSI Tahun Buku 2021 dan Laporan Penggunaan Tambahan Dana PMN TA 2021 serta menetapkan penunjukan KAP. Keputusan lainnya bahwa tidak ada penetapan penggunaan laba bersih konsolidasi Tahun Buku 2021 dan untuk penetapan insentif kinerja th 2021 dan penghasilan Direksi dan Dekom akan ditetapkan tersendiri oleh Pemegang Saham.

5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi

Aspek *governance* yang terkait dengan Pengungkapan Informasi dan Transparansi dinilai berdasarkan empat indikator, yaitu:

- a. Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada *stakeholders*;
- b. Perusahaan menyediakan bagi *stakeholder* akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala;
- c. Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Perusahaan memperoleh penghargaan atau *award* dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.

Penilaian penerapan atas keempat indikator dengan 16 parameter menghasilkan skor **8,802** dari skor maksimum **9** atau **97,796%** atau masuk dalam kategori **Sangat Baik**.

Tingkat pemenuhan yang baik untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

a. Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada *stakeholders*.

1) Perusahaan menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi perusahaan untuk mengamankan informasi perusahaan yang penting.

Kebijakan pengendalian informasi perusahaan ditetapkan dengan Keputusan Direksi Nomor PER.U/KL.104/VI/1/KA-2018 tanggal 05 Juni 2018 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik. Pedoman tersebut mengatur mengenai informasi apa saja yang dikategorikan informasi publik dan informasi yang dikecualikan, pihak yang dapat memberikan dan/atau menyampaikan informasi publik, serta prosedur pengungkapan informasi perusahaan kepada *stakeholders*, Namun keputusan Direksi tersebut perlu diperbaharui sejalan dengan terbitnya Peraturan Komisi Informasi RI No. 1 Tahun 2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Untuk mengelola dan menjaga tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan pengendalian informasi telah ditetapkan *Vice President Public Relation (USP)* sesuai tugas pokok dan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan informasi publik yang mencakup penyediaan dan/atau pelayanan informasi terhadap pengguna informasi publik. Selain itu, Direksi telah menetapkan Pejabat yang berwenang mengadakan wawancara dan menjawab pertanyaan dari wartawan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KG.203/XI/1/KA-2016 tentang Pemberian Informasi Publik melalui media massa, sebagai berikut:

- a) *Board of Directors*;
- b) Para *Executive Vice President (EVP) Corporate Secretary/Vice President (VP) Public Relation*, Ka. Daerah Operasi (Daop), Ka. Divisi Regional (Divre), Sub. Divre;
- c) *VP Public Relations*, atas seijin Director;
- d) Para manajer Humasda, atas seijin EVP/VP Daop, Divre, Sub. Divre.

Perusahaan telah mempunyai *website* khusus keterbukaan informasi public <http://www.kereta-api.co.id> & <http://kip.kereta-api.co.id>. Aplikasi tersebut menyajikan prosedur perolehan layanan informasi publik, statistik permohonan data, dan database pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi publik.

- 2) Tingkat kepatuhan perusahaan yang memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi perusahaan.

Perusahaan telah mengendalikan informasi perusahaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Hal itu terlihat dari telah dipenuhinya permintaan informasi publik selama tahun 2022 yang dapat dilihat oleh seluruh *stakeholders* melalui laman <http://kip.kereta-api.co.id/laporan-layanan>, tidak ada keterlambatan penyampaian laporan/informasi dan diperolehnya gelar bagi PPID KAI sebagai Badan Publik Informatif untuk kategori BUMN.

Kami merekomendasikan kepada Direksi agar memperbaharui Keputusan Direksi Nomor PER.U/KL.104/VI/1/KA-2018 tanggal 05 Juni 2018 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik disesuaikan ketentuan dalam Peraturan Komisi Informasi RI No 1 Tahun 2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

b. Perusahaan menyediakan bagi *stakeholder* akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.

- 1) Terdapat media untuk penyediaan Informasi Publik agar dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Media Penyediaan Informasi Publik dapat di-*upload* dalam *corporate website* <http://KAI.id>, Portal BUMN dan Jejaring Sosial. Unit yang ditunjuk untuk mengelola website ditetapkan dalam keputusan Direksi Nomor Per.U/KK.301/III/1/KA-2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Pengelolaan Media Komunikasi dan Informasi.

- 2) *Website* perusahaan mempublikasikan kebijakan dan informasi penting perusahaan.

Perusahaan mempublikasikan kebijakan-kebijakan perusahaan dalam *website* perusahaan, diantaranya Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, *Board Manual*, Pedoman Perilaku, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, laporan tahunan (*annual report*), Penyampaian LHKPN.

Informasi penting selain laporan tahunan dan laporan keuangan yang dipublikasikan dalam *website* perusahaan, diantaranya profil dan manajemen sumber daya, profil perusahaan, penghargaan, informasi media, galeri, layanan produk, kegiatan CSR.

- 3) Perusahaan menyediakan media lain untuk mengkomunikasikan kebijakan informasi penting perusahaan.

Media lain dalam pengkomunikasian kebijakan informasi penting Perusahaan berupa Majalah Kontak yang terbit setiap bulan. Selain itu, terdapat acara berupa *Gathering Railfans* dengan Direktur Utama KAI di Semarang-Tegal tanggal 9-10 Juni 2022, *gathering* mitra angkutan, yaitu *Gathering* dengan mitra angkutan batubara swasta pada bulan Maret 2022, *gathering* dengan mitra angkutan CPO pada bulan September 2022, dan *gathering* dengan mitra angkutan Petikemas, semen dan retail pada bulan September 2022.

- 4) Informasi yang disediakan dalam *website* Perusahaan dan *bumn.go.id* dimutakhirkan secara berkala.

Informasi dalam *website* Perusahaan dan *bumn.go.id* dimutakhirkan secara berkala oleh pejabat penanggung jawab situs web korporat, Portal Kementerian BUMN, penanggung jawab media sosial, penanggung jawab *e-office* sesuai keputusan Direksi Nomor PER.U/KK.301/III/1/KA-2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Pengelolaan Media Komunikasi dan Informasi.

- 5) Tingkat kemudahan akses terhadap kebijakan dan informasi penting perusahaan yang disediakan dalam website perusahaan.

Website perusahaan dapat dengan mudah diakses dan diunduh oleh pengguna dan selama tahun 2023 tidak terdapat permintaan/permohonan untuk memperoleh Informasi Publik yang tidak dipenuhi oleh perusahaan. Perusahaan juga tidak memperoleh teguran/tuntutan atas ketidakpatuhan dalam menyampaikan informasi publik.

c. Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 1) Laporan Tahunan memenuhi ketentuan umum penyajian Laporan Tahunan yaitu disajikan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dicetak pada kertas berwarna terang, mencantumkan identitas perusahaan, dan dimuat di *website* Perusahaan dan dapat diunduh.
- 2) Laporan Tahunan memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan penting, menyajikan informasi keuangan berupa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) Tahun Buku, yaitu Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021. Serta telah memuat informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dan obligasi yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2017.
- 3) Laporan Tahunan memuat Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi, serta ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris dan semua anggota Direksi.
- 4) Laporan Tahunan memuat profil Perusahaan secara lengkap seperti nama dan alamat Perusahaan, riwayat singkat Perusahaan, bidang usaha, struktur organisasi dalam bentuk bagan, visi, misi Perusahaan, nama jabatan dan riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi, jumlah karyawan, daftar anak Perusahaan, akuntan publik perseroan, penghargaan dan sertifikat yang diterima, nama dan alamat anak Perusahaan dan Kantor

Daop/Divre/Balai Pelatihan. Namun belum memuat Pelatihan Karyawan yang akan dilakukan tahun 2022.

- 5) Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan, meliputi:
- Tinjauan operasi per segmen usaha dalam uraian Analisis dan Pembahasan Manajemen
 - Uraian tentang analisis kinerja keuangan dan membandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar hutang dan tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan.
 - Bahasan tentang struktur modal (*capital structure*), kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure policies*), dan tingkat likuiditas perusahaan (*liquidity*).
 - Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal.
 - Bahasan komponen-komponen substansial dari pendapatan dan beban lainnya, untuk dapat mengetahui hasil usaha perusahaan.
 - Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih perusahaan serta laba operasi perusahaan selama 2 (dua) tahun.
 - informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan,
 - Uraian tentang prospek usaha perusahaan sehubungan dengan industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional.
 - Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, antara lain meliputi pangsa pasar.
 - Pernyataan mengenai kebijakan dividen
 - Uraian tentang jumlah dan tanggal dividen.
 - Informasi material, antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, restrukturisasi hutang/modal, transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan sifat transaksi dengan pihak afiliasi.

- Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.
 - Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.
- 6) Laporan Tahunan memuat pengungkapan praktik tata kelola perusahaan yang baik yaitu mengenai Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern, Satuan Pengawas Intern, manajemen risiko, tanggung jawab sosial perusahaan, peristiwa penting yang dihadapi perusahaan, akses informasi dan data perusahaan, dan etika perusahaan. Namun dalam Laporan Tahunan belum memuat uraian biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen, dan sertifikasi atas pengelolaan lingkungan.
- 7) Laporan Tahunan memuat bagian tersendiri mengenai Laporan Keuangan, yaitu surat pernyataan Direksi mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, opini akuntan terhadap Laporan Keuangan perusahaan, serta deskripsi auditor independen dan Laporan Keuangan lengkap yang disajikan dalam 2 tahun terakhir.
- d. Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya**
- 1) Perusahaan mengikuti *Annual Report Award* (ARA).
Pada tahun 2022 tidak dilaksanakan ARA, sehingga perusahaan tidak mengikuti ARA. (NA)
- 2) Penghargaan atau Award Lainnya.
Pada tahun 2022, Perusahaan berpartisipasi dan memperoleh penghargaan dalam CSR (*Sustainability Reporting Award*) dan sejenisnya, yaitu:
- a) *TOP Leader on CSR Commitment 2021*;

- b) TOP CSR Awards 2021 # Star 4;
- c) Penghargaan kategori khusus “Pengelolaan sampah organik menggunakan sistem *Black Soldier Flies* (BSF)”;
- d) *Gold Champion in Corporate Social Responsibility Program BUMN / BUMD Non Tbk* tanggal 30 Juni 2022, dari BISRA 2022.

Selain itu, perusahaan juga mendapatkan penghargaan di bidang Publikasi dan Keterbukaan Informasi, yaitu:

- 1) *The Best Public Relations in Corporate Management on Providing Marvelous Safe and Convenient Services Category Transportation*, Penyelenggara dari Wartaekonomi.co.id;
- 2) Gold kategori *Communications-Media Relations Management* dengan tema “Kehumasan Yang Adaptif di Masa Nataru”, Penyelenggara dari Kementerian BUMN;
- 3) *Corporate Branding PR Awards 2021 category Transportation*, Penyelenggara dari Iconomics;
- 4) *Silver Winner* untuk Kategori Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Terbaik Sub Kategori PPID Pembantu, Penyelenggara dari Kementerian BUMN;
- 5) *Bronze Winner* untuk Kategori Pelayanan Informasi Publik Terinovatif Sub Kategori Website, dari Humas Indonesia;
- 6) *Bronze Winner* untuk Kategori Pelayanan Informasi Publik Terinovatif Sub Kategori Laporan Pelayanan Informasi Publik, dari Humas Indonesia;
- 7) Peringkat 1 Badan Publik Informatif Kategori BUMN, dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

6. Aspek Lainnya

Aspek Lainnya dinilai berdasarkan dua indikator, yaitu:

- a. Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau *benchmark* bagi perusahaan-perusahaan lainnya di Indonesia dan perusahaan Luar Negeri.

- b. Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011, Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.

Penilaian penerapan atas 2 indikator, 2 parameter dan 7 faktor uji kesesuaian (FUK) menghasilkan skor maksimal 5 atau 100%. Tingkat pemenuhan masing-masing indikator dengan capaiannya, terlihat dalam pelaksanaan praktik sebagai berikut:

- a. Perusahaan memiliki bidang/area yang menjadi *best practices* di Industrinya atau menjadi tujuan *benchmark* bagi perusahaan lain (baik bagi BUMN maupun perusahaan swasta). Bidang/area tersebut dapat terdiri dari produk, proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi, dan strategi.
 - 1) Terdapat bidang/area di perusahaan, antara lain produk, proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi, atau strategi menjadi *best practices* atau tujuan *benchmark* bagi perusahaan lain.
 - a) PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah berupaya dan kerja keras dari jajaran Direksi dan manajemen dalam mengelola Perusahaan, sehingga menjadi contoh atau *benchmark* bagi perusahaan lainnya, yaitu:
 - (1) Benchmark kelas dunia, asia, regional, yaitu:
 - Kunjungan dari Etihad Rail (jaringan kereta api nasional Uni Emirat Arab) yaitu Executive Director of Rail Relations Etihad Rail Mohamed Al Marzooqi dan *Acting Director of International Relations* Saqqaf Alattas untuk belajar dan mencari ilmu terkait perkembangan KAI;
 - Kunjungan kerja dari Persatuan Pegawai Kereta Api Tanah Melayu Berhad (KTMB) yaitu Ketua *Safety & OSH* Raja Nahar dalam rangka menjalin hubungan baik diantara kedua

perusahaan di bidang transportasi kereta api dan *upgrade knowledge* terkait perkeretaapian.

(2) *Benchmark* dari perusahaan BUMN yaitu :

- PT Pusri *benchmark* terkait pengelolaan dan pemanfaatan aset pada tanggal 23 Mei 2022;
- PT Pelindo *benchmark* terkait pengelolaan arsip, *benchmark* pada tanggal 6 Juni 2022;
- PT Waskita Karya Tbk. *benchmark* terkait pengelolaan arsip, pada tanggal 28 Juni 2022;
- PT Pos Indonesia *benchmark* terkait PSO/mekanisme subsidi operasional dan pembiayaan KAI pada tanggal 27 Juni 2022;
- PT RNI *benchmark* terkait pengelolaan PR dan *stakeholder management* pada tanggal 11 Agustus 2022;
- PT Jasa Raharja *benchmark* terkait pengelolaan dan pemanfaatan aset ke Daop 1 pada tanggal 20 September 2022;
- Peruri *benchmark* terkait Kolaborasi Digitalisasi pada tanggal 10 November 2022.

(3) *Benchmark* kelompok BUMN yaitu :

- PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) *benchmark* terkait GCG pada tanggal 14-15 November 2022;
- PT ASDP *benchmark* terkait pengelolaan ticketing pada tanggal 3 Juni 2022;
- PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) *benchmark* terkait pemasangan keping roda, KCI mempelajarinya ke Balai Yasa YK pada tanggal 9 Juli 2022;
- PT Transportasi Jakarta *benchmark* terkait sistem manajemen risiko pada tanggal 23 September 2022;

- KCIC *benchmark* terkait pengelolaan aset (*System and Management of Non Railways Assets (Land n Building)*) pada tanggal 9 September 2022;
 - PT MRT Jakarta *benchmark* terkait pengelolaan arsip pada tanggal 3 November 2022;
 - LRT Jakarta *benchmark* terkait PSO dan pengelolaan SDM pada tanggal 2 Desember 2022;
 - Transjakarta *benchmark* terkait kolaborasi TJSL pada tanggal 16 November 2022;
 - MRT *benchmark* terkait pengembangan SDM Pengoperasian Sarana pada tanggal 25 November 2022.
- b) Pengakuan dari Lembaga Independen atau Lembaga Pemeringkat Nasional, The Indonesian Institute Corporate Governance, PT KAI (Persero) memperoleh skor Corporate Governance Perception Index (GCPI) sebesar 82,87 atau Terpercaya.
- c) Ada undangan bagi Dekom/Direksi/manajemen atas nama perusahaan untuk menjadi pembicara dalam seminar, workshop dan sebagainya menyampaikan *best practices/sharing* tentang praktik dan proses pengelolaan perusahaan.

Dewan Komisaris/Direksi/Manajemen atas nama perusahaan menjadi Narasumber dalam media Cetak, TV, media online untuk menyampaikan *best practices/sharing* tentang pengelolaan perusahaan sebagai berikut :

- (1) Direktur Niaga menjadi narasumber dalam Acara Ngobrol Pagi Seputar BUMN tanggal 12 Desember 2022.
- (2) Direktur Utama Didiek Hartantyo menjadi narasumber dalam Program *Executive Lecture Series* Universitas Sebelas Maret tanggal 15 Desember 2022.
- (3) Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis KAI Jeffrie N. Korompis menjadi narasumber FGD *Environmental Baseline Studies*

- Pengelolaan Sekitar Stasiun Kawasan Kota Tua, Jakarta secara virtual melalui aplikasi zoom pada Rabu tanggal 16 Maret 2022.
- (4) Direktur Niaga menjadi narasumber dalam webinar Pengembangan Potensi Ekonomi dan Pariwisata Melalui Reaktivasi Jalur KA Cibatu-Garut yang diselenggarakan secara virtual melalui zoom dan Live Youtube tanggal 29 Maret 2022.
- 2) Perusahaan memperoleh pencapaian kinerja perusahaan terbaik di sektor usaha BUMN atau di industrinya dalam tahun 2022 terlihat dari berbagai macam penghargaan yang diterima oleh PT KAI (Persero), diantaranya sebagai berikut:
- a) Predikat Platinum dalam katagori *The Best Business Contributions*, tanggal 25 November 2022, dari *Asian Pasific Contact Center Awards* (CCAPAC);
 - b) Didiek Hartantyo sebagai *The Best Chief Executive Officer Of The Year* (Transportation Industries), tanggal 30 November 2022, dari Human Capital & Performance;
 - c) Emas, tanggal 30 November 2022, dari Badan Standarisasi Nasional (BSN);
 - d) Platinum kategori *Business Contribution*, tanggal 25 November 2022, dari *The Best Contact Center Indonesia 2022*;
 - e) Dari Kementerian Perhubungan, sebagai berikut:
 - Pemenang Penghargaan Kategori Pelayanan Prima Madya tanggal 26 Oktober 2022;
 - Pemenang Penghargaan Kategori Pelayanan Prima Utama, tanggal 26 Oktober 2022;
 - Pemenang Penghargaan Kategori Pelayanan Prima Pratama, tanggal 26 Oktober 2022;
 - Pencapaian Optimal Dalam Penyelenggaraan Angkutan Mudik Lebaran 2022, tanggal 27 Juni 2022;
 - f) Dari Indonesia *Safety Excellence*, sebagai berikut:
 - Pemenang Bintang 5 *The Best Innovation Award* (LRT) tanggal 20 Oktober 2022;

- Pemenang Bintang 5 *The Best Leadership on Safety Culture* (LRT) tanggal 20 Oktober 2022;
 - Pemenang Bintang 5 untuk *The Best Safety in Digital* (LRT) tanggal 20 Oktober 2022;
 - g) Divre I Sumatera Utara Terima Penghargaan tanggal 2 Oktober 2022, dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI);
 - h) KAI sebagai BUMN Peraih AKHLAK Award 2022 Kluster Jasa Logistik tanggal 5 Juli 2022, dari Kementerian BUMN;
 - i) *Indonesia Council for Small Business* (ICSB) Presidential Award tanggal 20 Mei 2022, dari *Indonesia Council for Small Business* (ICSB);
 - j) *The Most Promising Company In Strategic Marketing* kategori Silver Perusahaan BUMN tanggal 18 Mei 2022, dari MarkPlus Inc;
 - k) *BEST CEO In Rail Transportation Category* tanggal 20 April 2022, dari The Iconomics;
 - l) *Gold Winner* kategori BUMN *Mobile Application* untuk KAI Access tanggal 26 Maret 2022, dari Marketeers.
 - m) The Best CEO 2022 untuk kategori perusahaan yang memiliki lebih dari 1000 pegawai dalam ajang 18th Indonesia Best CEO Forum Commanding Growth Strategy Amidst Global Crisis Challenge; dari ASEAN Indonesia 2023.
- b. Tidak terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Tidak terdapat pengurangan nilai karena sepanjang informasi yang kami peroleh tidak ditemukan adanya praktik perusahaan yang menyimpang dari prinsip-prinsip GCG pada Tahun 2022.



**Berita Acara Exit Meeting
Assessment Penerapan GCG dan
Evaluasi Maturitas Penerapan Sistem Manajemen Risiko
Tahun 2022 PT KAI (Persero)**

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Auditorium Jakarta *Railway Center*, Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I Samono : Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat
- II Said Agil Siroj : Komisaris Utama PT KAI (Persero)
- III Didiek Hartantyo : Direktur Utama PT KAI (Persero)
- IV Desty Arlaini : Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN

Telah melakukan *exit meeting* mengenai hasil:

1. *Assessment* Penerapan GCG Tahun 2022.
2. Evaluasi Maturitas Penerapan Sistem Manajemen Risiko Tahun 2022.

Dari hasil *assessment* dan Evaluasi disimpulkan bahwa:

1. Kondisi penerapan GCG Pada PT KAI (Persero) Tahun 2022 mencapai skor 92,424 dengan predikat Sangat Baik.
2. Capaian tingkat maturitas penerapan sistem manajemen risiko pada PT KAI (Persero) berada pada Level 3 (*Defined*) dengan skor 3,0909.

Rincian hasil *assessment* dan evaluasi terlampir, selanjutnya akan dituangkan dalam Laporan Hasil *Assessment* dan Laporan Evaluasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk kepentingan dinas.

PT KAI (Persero)
Direktur Utama,

Didiek Hartantyo

Asdep Bidang Jasa Logistik
Kementerian BUMN

Desty Arlaini

PT KAI (Persero)
Komisaris Utama,

Said Agil Siroj

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat
Kepala,

Samono

**RINGKASAN HASIL PENILAIAN PER ASPEK
 HASIL PENILAIAN ATAS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
 PADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) TAHUN 2022**

Aspek Pengujian		Bobot	Capaian Tahun 2022		
			Skor	% Capaian	Predikat
I.	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan	7,000	6,905	98,641	Sangat Baik
II.	Pemegang Saham Dan Rups /Pemilik Modal	9,000	8,315	92,387	Sangat Baik
III.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	35,000	31,683	90,525	Sangat Baik
IV.	Direksi	35,000	31,719	90,627	Sangat Baik
V.	Pengungkapan Informasi Dan Transparansi	9,000	8,802	97,796	Sangat Baik
VI.	Aspek Lainnya	5,000	5,000	100,000	
Skor Keseluruhan		100,000	92,424		Sangat Baik



RINGKASAN HASIL PENILAIAN PER INDIKATOR
HASIL PENILAIAN ATAS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
TAHUN 2022

Penjelasan Kriteria		Jumlah Parameter	Bobot Indikator	Capaian Tahun 2022	
				Skor	Capaian %
I. KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN					
1.	Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>GCG Code</i>) dan pedoman perilaku (<i>code of conduct</i>).	2	1,218	1,218	100,000
2.	Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten.	2	1,217	1,122	92,184
3.	Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	2	0,608	0,608	100,000
4.	Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).	3	1,370	1,370	100,000
5.	Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.	3	1,370	1,370	100,000
6.	Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (<i>whistle blowing system</i>).	3	1,217	1,217	100,000
Jumlah I		15	7,000	6,905	98,641
II. PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL					
7.	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi.	6	2,423	2,423	100,000
8.	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	5	1,731	1,558	90,006
9.	RUPS/Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	3	1,385	1,140	82,286
10.	RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	6	2,077	1,868	89,929
11.	RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.	2	0,519	0,519	100,000
12.	Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.	3	0,865	0,807	93,333
Jumlah II		25	9,000	8,315	92,387
III. DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS					
13.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.	2	1,348	1,0110	75,000
14.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan.	4	2,127	1,9462	91,501
15.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.	2	2,904	2,4036	82,769
16.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	9	9,593	8,8229	91,972
17.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	6	6,479	6,1812	95,403
18.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.	2	1,504	1,2079	80,311
19.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tawaran/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.	3	2,437	2,3160	95,035

Penjelasan Kriteria		Jumlah Parameter	Bobot Indikator	Capaian Tahun 2022	
				Skor	Capaian %
20.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.	1	0,571	0,5710	100,000
21.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.	2	1,659	1,4516	87,500
22.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	3	1,348	1,0953	81,250
23.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	4	2,593	2,5131	96,918
24.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif.	5	2,437	2,1638	88,791
Jumlah III		43	35,000	31,684	90,525
IV. DIREKSI					
25.	Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.	2	1,089	0,972	89,279
26.	Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.	3	1,867	1,750	93,748
27.	Direksi menyusun perencanaan perusahaan.	5	4,044	3,546	87,690
28.	Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.	11	8,089	7,476	92,427
29.	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	4	3,266	3,033	92,854
30.	Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.	2	0,778	0,700	90,006
31.	Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan <i>stakeholders</i> .	8	6,689	5,834	87,211
32.	Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.	2	1,089	1,089	100,000
33.	Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham tepat waktu.	2	1,089	1,027	94,288
34.	Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	5	1,556	1,362	87,503
35.	Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.	3	1,711	1,454	85,006
36.	Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.	3	1,711	1,454	84,991
37.	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.	2	2,022	2,022	100,000
Jumlah IV		52	35,000	31,720	90,627
V. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI					
38.	Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada stakeholder.	2	0,435	0,363	83,333
39.	Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.	5	2,320	2,320	100,000
40.	Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	7	3,341	3,215	96,233
41.	Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya	2	2,904	2,904	100,000
Jumlah V		16	9,000	8,802	97,796

Penjelasan Kriteria			Jumlah Parameter	Bobot Indikator	Capaian Tahun 2022	
					Skor	Capaian %
VI. ASPEK LAINNYA						
42.	Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau <i>benchmark</i> bagi perusahaan perusahaan lainnya di Indonesia;	1	5,000	5,000	100,000	
43.	Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) pada Badan Usaha Milik Negara, Pedoman Umum <i>Good Corporate Governance</i> Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.	1	(5,000)	0,000	0,000	
Jumlah VI			2	-	5,000	0,000
TOTAL SKOR				100,000	92,424	92,424

**Daftar Usulan Rekomendasi Hasil Asesmen Penerapan GCG Tahun 2022
 PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**

Nomor		Aoi/Saran	Organ Perusahaan yang Menindaklanjuti		
No	Par		RUPS	DEKOM	DIREKSI
I		KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK			
1	4	Memasukkan materi substansi Pedoman Perilaku (CoC) dalam silabus program orientasi karyawan.			MC & USQ
II		PEMEGANG SAHAM DAN RUPS			
2	25	Menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di perusahaan swasta atau perusahaan/badan lain misal BUMD/BLU.	√		
3	28	Melakukan update atas KEP- 101/M-BUMN/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN dengan Kondisi terkini dan Best practice dalam pengelolaan perusahaan.	√		
4	29	Mendokumentasikan Pembahasan usulan aksi korporasi Direksi dan memberikan Persetujuan usulan aksi korporasi Direksi secara tepat waktu yaitu paling lambat 30 hari untuk KSO/BOT dan maksimal 7 hari untuk pelepasan asset setelah dokumen usulan dan penjelasan diterima secara lengkap	√		
5	30	Menetapkan KPI Direksi secara Individu dan melakukan penilaian pencapaian KPI Direksi Individu yang hasilnya dituangkan dalam risalah RUPS.	√		
6	33	Menetapkan Pedoman penyusunan KPI Dewan Komisaris dan Pedoman penyusunan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris sesuai dengan Pedoman yang telah ditetapkan.	√		
7	38	Mendokumentasikan pembahasan dan upaya-upaya menindaklanjuti <i>area of improvement</i> yang dihasilkan dari assessment tahun sebelumnya.	√		
III		DEWAN KOMISARIS			
8	41	Meminta Sekretaris Perusahaan menyelenggarakan, mempersiapkan materi program pengenalan direksi minimal memuat pengenalan prinsip-prinsip GCG, gambaran umum BUMN, kewenangan yang didelegasikan, tugas dan tanggung jawab direksi dan komisaris, serta mendokumentasikan program pengenalan perusahaan Dewan Komisaris dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan yang memuat materi yang disampaikan, kunjungan yang dilaksanakan dilengkapi daftar kehadiran dan foto kegiatan.		√	

Nomor		Aoi/Saran	Organ Perusahaan yang Menindaklanjuti		
No	Par		RUPS	DEKOM	DIREKSI
9	42	Konsisten dalam melaksanakan pelatihan/peningkatan kompetensi setiap anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan dalam Laporan Pelatihan Dewan Komisaris sesuai dengan RKA Dewan Komisaris yang telah disetujui oleh RUPS		√	
10	44 & 60	Konsisten dalam memberikan persetujuan terhadap usulan Tindakan & Direksi dalam jangka waktu berkisar 7 hari dan sampai dengan 14 hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi		√	
11	45	Penyampaian RKA Dewan Komisaris ke Direksi dilakukan tepat waktu sebelum penyampaian Rancangan RKAP kepada Pemegang Saham tanggal 1 Oktober tahun berjalan.		√	
12	48	Konsisten dalam menyajikan keselarasan/ketidaksiharasan RKAP dengan RJPP dalam tanggapan RKAP kepada Pemegang Saham.		√	
13	48	Konsisten dalam mendokumentasikan proses telaahan organ pendukung Dewan Komisaris sampai dengan proses Pembahasan tindak lanjut arahan Dewan Komisaris atas rancangan RKAP oleh Direksi sebelum disajikan dalam Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP yang disampaikan ke RUPS		√	
14	51	Mendorong manajemen agar melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas, dan menyusun <i>Internal Control Report</i> .		√	
15	53	Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasehat terhadap kebijakan dan pelaksanaan Sistem teknologi informasi yang dihasilkan dari telaah Komite Komisaris atas ITMP 2020-2024 dan pelaksanaannya.		√	
16	61	Konsisten dalam mencantumkan batasan besaran honorarium atau besaran prosentase kenaikan dibanding tahun sebelumnya untuk eksternal auditor dalam Pengusulan auditor eksternal kepada RUPS.		√	
17	65	Dalam proses pemberian pendapat tertulis mengenai proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan terdokumentasi dalam bentuk surat permintaan penjelasan/kelengkapan tambahan, sehingga terpantau prosesnya tidak melebihi jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak diterima secara lengkap dari Direksi.		√	
18	67	Melakukan penilaian kinerja Direksi individu berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individual dan melaporkannya kepada Pemegang Saham		√	

Nomor		Aoi/Saran	Organ Perusahaan yang Menindaklanjuti		
No	Par		RUPS	DEKOM	DIREKSI
19	70	Konsisten mengikutsertakan peran Komite Komisaris dalam melakukan telaah terhadap laporan hasil assessment/reviu atas Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, GCG Code dan kebijakan/ketentuan teknis lainnya, serta memantau tindak lanjut <i>area of improvement</i> (AOI) hasil assessment GCG yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris dan mendokumentasikannya		√	
20	73	Memerintahkan Sekretaris Dewan Komisaris agar mencantumkan alasan ketidakhadiran dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris baik rapat internal maupun rapat BOC BOD		√	
21	74	Sekretaris Dewan Komisaris agar menuangkan pembahasan atas tindak lanjut hasil rapat sebelumnya pada bagian khusus sesuai dengan format Risalah Rapat dalam Peraturan Direksi Nomor PER.U/KC.202/X/1/KA-2020 tentang Tata Tertib Rapat Direksi, sehingga dapat dipantau proses tindak lanjut rekomendasi yang diberikan Dekom kepada Direksi.		√	
22	74	Sekretaris Dewan Komisaris untuk membuat Buku/Daftar agenda tindak lanjut rekomendasi kepada Direksi dan Anggota Komite Dewan Komisaris, serta memantau tindak lanjutnya termasuk batasan waktunya.		√	
23	74	Sekretaris Dewan Komisaris agar segera menyampaikan risalah rapat, sehingga dapat dilakukan validasi risalah rapat oleh Dewan Komisaris sesuai tata tertib yang ditetapkan (selambat lambatnya 7 hari setelah rapat selesai).		√	
24	74	Sekretaris Dewan Komisaris agar membuat daftar monitoring tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi dan kepada Komite Dewan Komisaris termasuk batasan waktunya.		√	
25	81	Komite Audit melengkapi program kerja Komite Audit yang mencakup memastikan bahwa telah ada prosedur <i>review</i> yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan		√	
26	81	Komite Audit memperbaharui Charter Komite Audit sejalan dengan terbitnya Per-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Perubahan atas Per-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan pembaharuan tugas dan tanggungjawab Komite Audit sehubungan dengan telah terbentuknya Komite Dekom Lainnya		√	
27	81	KPMR memperbaharui Charter KPMR sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko BUMN		√	

Nomor		Aoi/Saran	Organ Perusahaan yang Menindaklanjuti		
No	Par		RUPS	DEKOM	DIREKSI
28	82	Komite Audit, Komite PMR dan Komite NR mendokumentasikan hasil pertemuan dalam Risalah Rapat sesuai dengan format Risalah Rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Nomor PER.U/KC.202/X/1/KA-2020 tentang Tata Tertib Rapat Direksi, minimal memuat memuat hasil-hasil analisis, telaahan dan evaluasi serta menyampaikan kepada Sekretaris Dekom untuk disimpan sebagai arsip perusahaan.		√	
29	83	Komite Audit, Komite PMR dan Komite NR melengkapi Laporan Triwulanan dan Tahunan dengan memuat perbandingan antara realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta penugasan lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris dengan menyertakan rangkuman hasil pelaksanaan kegiatan dan rekomendasinya sehingga dapat diyakini bahwa rekomendasi diberikan pada setiap pelaksanaan penugasan.		√	
	II	DIREKSI			
29	88	Melakukan update Kepdir PT KAI Nomor KEP.U/OT/104/IX/1/KA-2015 tentang Standar waktu pengambilan keputusan oleh direksi dalam pembuatan-pembuatan direksi yang membutuhkan persetujuan tertulis dari Dekom atau tanggapan tertulis dari Dekom PT KAI dan Persetujuan dari RUPS dengan menambahkan ketentuan/batasan waktu pengkomunikasikan keputusan direksi kepada level dibawah direksi.			√
30	89	Menetapkan pedoman penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).			√
31	90	Menyampaikan Rancangan RKAP kepada Dewan Komisaris sebelum penyampaian kepada Pemegang Saham paling lambat tanggal 15 September tahun berjalan			√
32	91	Segera menetapkan pejabat definitif pada Jabatan yang dirangkap (PYMT)			√
33	92	Melakukan update SK Direksi Nomor Kep.U/KU.401/XI/28/KA-2013 tanggal 29 November 2013 tentang Kebijakan Prosedur Pengelolaan Investasi serta pengeluaran yang dikapitalisasi (bersifat modal) di lingkungan PT KAI (Persero) dan menetapkan Mekanisme dalam Direksi untuk merespon usulan peluang bisnis dari manajemen dibawah Direksi.			√
34	99	Menyusun dan menyampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi.			√

Nomor		Aoi/Saran	Organ Perusahaan yang Menindaklanjuti		
No	Par		RUPS	DEKOM	DIREKSI
35	100	Menginstruksikan unit Sistem Informasi (KI) menyampaikan Laporan pelaksanaan kinerja teknologi Informasi termasuk pelaksanaan <i>Information Technology Master Plan (ITMP)</i> dan <i>Information Technology Detail Plan (ITDP)</i> Kepada Dewan Komisaris			√
36	102	Melakukan update atas Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.U/KM.101/VIII/1/KA-2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sehingga Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa memuat secara tegas hak-hak dan kewajiban pemasok dan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.			√
37	107	Menginstruksikan SPI melaksanakan Control Self Assessment secara berkala atas efektivitas Struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan pada akhir tahun buku perusahaan			UI
38	111	Menyampaikan Laporan laporan/progress pelaksanaan Tindak Lanjut hasil Survei Pelanggan kepada Direksi			√
39	112	Melengkapi hasil penilaian/ <i>assessment</i> pemasok dengan rekomendasi hasil <i>assessment</i> pemasok			KL
40	112	Menginstruksikan Unit Logistik untuk melaksanakan survey kepuasan pemasok/vendor secara berkala			KL
41	113	Melaksanakan manajemen kas dan keuangan yang baik sehingga Tidak terjadi mismatch dalam penggunaan dan penyediaan dana dari penerbitan hutang jangka panjang untuk pembayaran bunga dan pokok hutang jangka panjang yang jatuh tempo.			KC
42	117	Menjaga konsistensi pencapaian KPI Korporat dan Dividen			KC
		Menginstruksikan Sekretaris Perusahaan agar :			
43	124	Menyusun rencana Rapat Direksi dan agenda yang dibahas.			US
44	124	Konsisten mencantumkan dalam Risalah rapat atau Materi risalah rapat pembahasan terkait hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya dan Tindak lanjut keputusan rapat sebelumnya yang belum selesai.			US
45	127	Menetapkan batasan waktu pelaksanaan tindak lanjut arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris agar tindak lanjut yang dilakukan bermanfaat, relevan dan tepat waktu			US

Nomor		Aoi/Saran	Organ Perusahaan yang Menindaklanjuti		
No	Par		RUPS	DEKOM	DIREKSI
46	84 132	Menyelenggarakan, mempersiapkan materi program pengenalan direksi minimal memuat pengenalan prinsip-prinsip GCG, gambaran umum BUMN, kewenangan yang didelegasikan, tugas dan tanggung jawab direksi dan komisaris, serta mendokumentasikan program pengenalan perusahaan bagi Dewan Komisaris dan Direksi baru yang berasal dari luar perusahaan.			US
47	132	Menyusun laporan pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan secara berkala.			US
48	132	Menyusun laporan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku			US
49	131	Menyampaikan konsep Laporan Manajemen Perusahaan secara tepat waktu kepada Dewan Komisaris			US
50	131	Menyempurnakan Risalah Rapat Direksi dengan memuat hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya, pencantuman jalannya rapat (dinamika rapat), pencantuman pendapat berbeda/ <i>dissenting comment</i> (bila ada).			US
51	129	SPI melaksanakan program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal, yang mencakup seluruh aspek dari aktivitas fungsi pengawasan intern baik dilakukan oleh Internal Maupun Penilaian Oleh Eksternal yang dilakukan lima tahun sekali.			UI
52	133	Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan dan mendokumentasikannya.			v
	V	PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI			
54	136	Melakukan revisi Peraturan Direksi Nomor PER.U/KL.104/VI/1/KA-2018 tanggal 05 Juni 2018 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik menyesuaikan dengan Peraturan Komisi Informasi RI No. 1 Tahun 2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang standar layanan Informasi Publik.			US

PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Data Keuangan Tahun 2022 (unaudited) - 2020

1) Perkembangan Posisi Keuangan

No	Uraian	Tahun		
		2022 UnAudited (Rp)	2021 Audited (Rp)	2020 Audited (Rp)
1	Aset Lancar	15.409.097.087	9.706.681.516	9.164.500.411
2	Aset Tidak Lancar	57.065.526.699	53.062.145.256	44.042.568.591
	Investasi Jangka Panjang			
	Aset Tetap	24.873.932.390	22.860.962.080	21.334.625.651
3	Aset lain-lain			
	JUMLAH ASET	72.474.623.786	62.768.826.772	53.207.069.002
1	Kewajiban Lancar	9.952.463.776	9.574.299.758	9.281.616.345
2	Kewajiban Tidak lancar	33.029.415.666	29.782.786.689	26.885.473.155
3	Ekuitas			
	Kep. Non Pengendali/Hak Minoritas	56.953.853	148.767.207	191.969.460
	Ekuitas	29.435.790.491	23.262.973.118	16.848.010.042
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	72.474.623.786	62.768.826.772	53.207.069.002

2) Perkembangan Usaha

No	Uraian	Tahun		
		2022 UnAudited (Rp)	2021 Audited (Rp)	2020 Audited (Rp)
1	Hasil Penjualan	25.171.611.461	17.916.775.924	18.074.850.763
2	Beban Pokok Penjualan	-18.475.001.495	-15.149.306.550	- 16.910.622.755
3	Laba/rugi kerjasama Operasional			
4	Laba Kotor Usaha	6.696.609.966	2.767.469.374	1.164.228.008
5	Beban Usaha	-2.905.796.582	- 2.543.050.490	- 2.171.302.020
6	Laba Usaha	3.790.813.384	224.418.884	(1.007.074.012)
7	Pendapatan/Biaya Lain	- 1.810.661.587	- 771.399.410	- 1.213.220.709
8	Laba sebelum pajak	1.980.151.797	- 546.980.526	- 2.220.294.721
9	Beban Pajak Penghasilan	169.490.210	121.784.883	484.057.029
10	Laba Setelah Pajak	1.537.633.113	- 425.195.643	- 1.736.237.692
11	Laba/rugi Pemilik Entitas Induk	1.629.177.573	- 362.460.073	- 1.691.730.010
12	Laba/rugi Kepentingan Non Pengendali	-91.544.460	- 62.735.570	- 44.507.682
13	Laba/rugi Bersih	1.537.633.113	- 425.195.643	- 1.736.237.692

2) Perkembangan Rasio Keuangan

No	Uraian	Tahun		
		2022 UnAudited (Rp)	2021 Audited (Rp)	2020 Audited (Rp)
1	Current Ratio/Rasio Lancar	154,83	101,38	99
2	Turn Over Hutang Usaha	3	2	2
3	Turn Over Total Aktiva/Perputran Total Aset	288	350	294
4	Deb Ratio/RUTA	0,46	0,47	0,51
5	Total Debt To Equity Ratio/RUTE	1,12	1,28	1,60
6	Total Long Term Debt To Equity			
7	Gross Profit Margin	0	0	0
8	Operating Margin Ratio	15,06	1,25	(5,57)
9	Net Profit Margin/EBITDA Margin/Margin Keuntungan Bersih	0,15	0,01	(0,06)
10	Return On Aset	0,05	0,00	(0,02)
11	Return On Equity	0,86	0,77	1,07



**PERWAKILAN BPKP
PROVINSI JAWA BARAT**



PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

**Laporan Evaluasi Kinerja
Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022**



Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor : R/233.AAT/dsn/2023

Laporan Akuntan Independen atas Laporan Evaluasi Kinerja

Kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Kami telah melakukan suatu perikatan asurans keyakinan terbatas atas Laporan Evaluasi Kinerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan entitas anak (selanjutnya disebut "Perusahaan") untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Kami juga telah melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebagaimana dalam laporan kami tanggal 29 Mei 2023, kami menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

Tanggung Jawab Manajemen

Manajemen bertanggung jawab dalam penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-100/MBU/2002 (selanjutnya disebut "KEP-100/MBU/2002") tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN.

Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja menuntut Manajemen untuk menginterpretasikan kriteria, menentukan relevansi informasi yang harus dimasukkan, serta membuat estimasi dan asumsi yang berdampak terhadap informasi yang dilaporkan. Laporan Evaluasi Kinerja mencakup informasi tentang peristiwa yang telah terjadi atau yang diharapkan akan terjadi, tren operasi, komitmen serta pencapaian tingkat kesehatan pada tahun tersebut. Hasil pencapaian tingkat kesehatan kemudian dinilai berdasarkan KEP-100/MBU/2002.

Tanggung Jawab Akuntan

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan kesimpulan berdasarkan prosedur yang dilakukan sehubungan dengan perikatan asurans keyakinan terbatas yang disebutkan di atas.

Kami melaksanakan perikatan asurans keyakinan terbatas atas Laporan Evaluasi Kinerja yang dibuat oleh Manajemen berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 "Perikatan Asurans Selain Audit dan Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan IAPI. Standar ini mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan perikatan asurans untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa hal-hal yang menjadi perhatian kami menyebabkan kami yakin penyajian Laporan Evaluasi Kinerja oleh Manajemen tidak mencakup, dalam semua hal yang material, unsur yang diwajibkan menurut ketentuan dalam KEP-100/MBU/2002. Dalam perikatan asurans terbatas, bukti-bukti yang diperoleh melalui prosedur yang dilakukan adalah lebih terbatas daripada perikatan asurans keyakinan memadai. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan akuntan.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

Prosedur yang dipilih dalam perikatan asuransi keyakinan terbatas atas Laporan Evaluasi Kinerja ini terutama terdiri dari penerapan prosedur analitik dan permintaan keterangan kepada orang yang bertanggung jawab untuk masalah-masalah keuangan, akuntansi dan operasional, yang mencakup antara lain (a) mengecek kesesuaian unsur yang dimasukkan dalam Laporan Evaluasi Kinerja berdasarkan ketentuan dalam KEP-100/MBU/2002, (b) mengecek keakuratan jumlah historis dalam laporan keuangan, (c) mengajukan pertanyaan mengenai informasi dan uraian yang dinyatakan dalam Laporan Evaluasi Kinerja, dan (d) merekalkulasi perhitungan-perhitungan yang dibuat dalam Laporan Evaluasi Kinerja tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan prosedur yang dilakukan dan bukti-bukti yang diperoleh, tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan kami yakin bahwa penyajian Laporan Evaluasi Kinerja oleh Manajemen tidak mencakup, dalam semua hal yang material, unsur yang diwajibkan menurut ketentuan dalam KEP-100/MBU/2002; jumlah keuangan historis yang dimasukkan di dalamnya tidak diperoleh secara akurat, dalam semua hal yang material, dari laporan keuangan Perusahaan; informasi, penentuan, estimasi, serta asumsi yang mendasari yang digunakan oleh Perusahaan tidak memberikan dasar yang memadai bagi pengungkapan yang terdapat di dalamnya; dan perhitungan-perhitungan telah dilakukan dengan akurat.

Penggunaan Laporan

Laporan ini dimaksudkan hanya untuk informasi dan digunakan oleh, dan tidak dimaksudkan untuk, dan seharusnya tidak digunakan oleh pihak selain Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Dedy Sukrisnadi

Nomor Izin Akuntan Publik: AP. 0645

Jakarta, 5 Juni 2023

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

DAFTAR ISI

Halaman

PENDAHULUAN

I. Ruang Lingkup Evaluasi Kinerja	1
II. Lingkup dan Sumber Data Evaluasi Kinerja	2

EVALUASI KINERJA CAPAIAN RKAP

I. Realisasi Pendapatan Usaha	3
II. Realisasi Beban Pokok Pendapatan	5
III. Realisasi Beban Usaha	6
IV. Realisasi Pendapatan (Beban) Lain-lain	6
V. Realisasi Laba Rugi	7
VI. Realisasi Posisi Keuangan Aset	9
VII. Realisasi Posisi Keuangan Liabilitas dan Ekuitas	9

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

I. Acuan Pengukuran	11
II. Hasil Pengukuran	17
a. Aspek Keuangan	17
b. Aspek Operasional	20
c. Aspek Administrasi	23
d. Skor Tingkat Kesehatan	25

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK LAPORAN EVALUASI KINERJA

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PENDAHULUAN

I. Ruang Lingkup Evaluasi Kinerja

Penilaian Kinerja Capaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

Pengukuran kinerja capaian RKAP didasarkan atas realisasi kinerja tahun berjalan dengan program yang telah ditentukan dalam RKAP. Capaian tersebut meliputi:

1. Capaian Target Pendapatan Usaha;
2. Capaian Target Beban Pokok Pendapatan;
3. Capaian Target Beban Usaha;
4. Capaian Target Laba Bersih Perusahaan; dan
5. Capaian Target Posisi Keuangan.

Pengukuran kinerja capaian RKAP juga membandingkan realisasi tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu untuk mengukur tingkat pertumbuhan kinerja tahun berjalan.

Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan

Di dalam melakukan penilaian atas tingkat kesehatan Perusahaan, PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("Perusahaan") digolongkan ke dalam kelompok Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Infrastruktur. Sesuai Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian atas kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian:

No	Uraian	Bobot
1.	Aspek Keuangan	50
2.	Aspek Operasional	35
3.	Aspek Administrasi	15
	Jumlah Bobot	100

Formulasi dan cara pengukuran indikator penilaian Aspek Keuangan telah ditentukan di dalam Keputusan Menteri BUMN tersebut yang uraiannya dijelaskan dalam acuan pengukuran tingkat kesehatan BUMN.

Indikator penilaian Aspek Operasional tidak ditentukan dalam Keputusan Menteri BUMN, namun ditentukan oleh manajemen Perusahaan melalui Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. KEP.U/OT.104/I/7/KA-2014 tentang Standar Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan. Indikator yang digunakan dalam penilaian adalah:

No	Indikator	Bobot
1.	Tingkat Keselamatan	10
2.	Tingkat Pelayanan: <ul style="list-style-type: none">• Keterlambatan KA Penumpang Datang• Keterlambatan KA Barang Datang• Keluhan Penumpang	4 4 3
3.	Efektivitas Pemeliharaan: <ul style="list-style-type: none">• Pemeliharaan Sarana• Pemeliharaan Prasarana	4 4
4.	Produktivitas Pemeliharaan: <ul style="list-style-type: none">• Produktivitas SDM dari Satuan Angkutan• Produktivitas SDM dari Pendapatan	3 3
	Jumlah Bobot	35

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN EVALUASI KINERJA (Lanjutan)**

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Indikator penilaian Aspek Administrasi ditentukan di dalam Keputusan Menteri BUMN dengan indikator yang dinilai beserta bobotnya sebagai berikut:

No	Indikator	Skor	Skor Maksimal
1.	Laporan Perhitungan Tahunan, jangka waktu Laporan Audit diterima: <ul style="list-style-type: none"> Sampai dengan bulan ke-4 sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup Sampai dengan bulan ke-5 sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup Lebih dari bulan ke-5 sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup 	3 2 0	3
2.	Rancangan RKAP, jangka waktu surat diterima sampai dengan: <ul style="list-style-type: none"> 2 bulan atau lebih cepat Kurang dari 2 bulan 	3 0	3
3.	Laporan Periodik, jumlah keterlambatan dalam satu tahun: <ul style="list-style-type: none"> $x \leq 0$ hari $0 < x \leq 30$ hari $0 < x \leq 60$ hari $X > 60$ hari 	3 2 1 0	3
4.	Kinerja Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK): <ul style="list-style-type: none"> a. Efektivitas penyaluran dana, persentase penyerapan: <ul style="list-style-type: none"> > 90% 85% - 90% 80% - 85% < 80% b. Tingkat Kolektibilitas, persentase pengembalian: <ul style="list-style-type: none"> > 70% 40% - 70% 10% - 40% < 10% 	3 2 1 0 3 2 1 0	3 3
	Jumlah Skor		15

II. Lingkup dan Sumber Data Evaluasi Kinerja

Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan dilaksanakan berdasarkan lingkup data berikut:

- Tingkat Kesehatan Perusahaan:
 - Aspek keuangan menggunakan laporan keuangan konsolidasian;
 - Aspek operasional menggunakan data kinerja konsolidasian, kecuali untuk kinerja capaian tingkat pelayanan KA Penumpang datang dan KA Barang datang menggunakan data kinerja induk; dan
 - Aspek administrasi menggunakan data kinerja induk.
- Tingkat Capaian Target RKAP menggunakan laporan keuangan konsolidasian.

Sumber data utama yang dipakai untuk melaksanakan Evaluasi Kinerja adalah:

- Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perusahan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
- Laporan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun buku 2022 yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); dan
- Laporan Manajemen PT Kereta Api Indonesia (Persero) tahun 2022.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN EVALUASI KINERJA (Lanjutan)**

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Data dan informasi yang disajikan manajemen Perusahaan merupakan tanggung jawab manajemen Perusahaan, sedangkan tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja Perusahaan tersebut.

EVALUASI KINERJA CAPAIAN RKAP

Usulan RKAP tahun 2022 telah disampaikan pada tanggal 30 Oktober 2021 dan telah mendapat pengesahan di dalam RUPS pada tanggal 27 Januari 2022.

I. Realisasi Pendapatan Usaha

a. Pendapatan Angkutan dan Usaha Lainnya

Pendapatan Angkutan dan Usaha Lainnya	Anggaran	Realisasi		Rasio	
	2022 Rp	2022 Rp	2021 Rp	Capaian *) %	Kenaikan/ (Penurunan) %
Angkutan Penumpang	4.887.199	6.964.496	2.363.286	142,50	194,70
Angkutan Barang	8.716.753	9.833.032	7.456.830	112,81	31,87
Kompensasi Pemerintah	4.132.146	3.880.245	3.903.071	93,90	(0,58)
Non Angkutan KA	1.902.073	1.575.688	1.134.200	82,84	38,93
Pendukung Angkutan KA	874.096	713.611	672.143	81,64	6,17
Jumlah	20.512.267	22.967.072	15.529.530	111,97	47,89

*) % dari RKAP

Realisasi Pendapatan Angkutan dan Usaha Lainnya mencapai target yang telah ditentukan dalam RKAP sebesar 111,97%. Komponen pendapatan usaha yang mencapai target RKAP adalah pendapatan angkutan penumpang dan pendapatan angkutan barang, sedangkan pendapatan usaha yang terealisasi di bawah target RKAP adalah pendapatan kompensasi pemerintah, pendapatan non angkutan KA, dan pendapatan pendukung angkutan KA.

Realisasi pendapatan usaha tahun 2022 menunjukkan peningkatan dibanding dengan tahun 2021 sebesar 47,89%. Komponen pendapatan usaha yang realisasinya meningkat dibanding dengan tahun 2021 adalah pendapatan angkutan penumpang, angkutan barang, non angkutan KA, dan pendukung angkutan KA, sedangkan komponen pendapatan usaha yang realisasinya menurun dibanding tahun 2021 adalah pendapatan kompensasi pemerintah.

Proporsi komponen pendapatan usaha dibandingkan total pendapatan usaha sebagai berikut:

Proporsi Pendapatan Usaha	Anggaran	Realisasi	
	2022 %	2021 %	2020 %
Angkutan Penumpang	23,83	30,32	15,22
Angkutan Barang	42,50	42,81	48,02
Kompensasi Pemerintah	20,14	16,90	25,13
Non Angkutan KA	9,27	6,86	7,30
Pendukung Angkutan KA	4,26	3,11	4,33
Jumlah	100,00	100,00	100,00

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN EVALUASI KINERJA (Lanjutan)**

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Realisasi Pendapatan Angkutan dan Usaha Lainnya dari masing-masing segmen ditunjukkan dalam tabel-tabel berikut:

i. Pendapatan Angkutan Penumpang

Pendapatan Angkutan Penumpang	Anggaran	Realisasi		Rasio	
	2022 Rp	2022 Rp	2021 Rp	Capaian %	Kenaikan/ (Penurunan) %
Angkutan Penumpang					
Kelas Eksekutif	1.743.903	3.327.982	1.030.349	190,84	223,00
Kelas Bisnis	118.117	190.216	42.609	161,04	346,42
Kelas Ekonomi	3.025.179	3.446.298	1.290.328	113,92	167,09
Jumlah	4.887.199	6.964.496	2.363.286	142,50	194,70

Realisasi Pendapatan Angkutan Penumpang tahun 2022 sebesar 142,50% dari target RKAP, realisasinya meningkat dari tahun 2021 sebesar 194,70%. Kontribusi terbesar realisasi Pendapatan Angkutan Penumpang tahun 2022 berasal dari Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi.

ii. Pendapatan Angkutan Barang

Pendapatan Angkutan Barang	Anggaran	Realisasi		Rasio	
	2022 Rp	2022 Rp	2021 Rp	Capaian %	Kenaikan/ (Penurunan) %
Batu Bara	7.351.327	8.404.397	6.180.811	114,32	35,98
Peti Kemas	423.297	422.236	332.871	99,75	26,85
BBM	296.440	372.226	309.700	125,57	20,19
Semen	277.614	270.912	309.975	97,59	(12,60)
Lainnya	368.075	363.261	323.473	98,69	12,30
Jumlah	8.716.753	9.833.032	7.456.830	112,81	31,87

Realisasi Pendapatan Angkutan Barang tahun 2022 sebesar 112,81% dari target RKAP, realisasinya meningkat dari tahun 2021 sebesar 31,87%. Kontribusi terbesar Pendapatan Angkutan Barang tahun 2022 berasal dari Angkutan Batu Bara.

iii. Pendapatan Kompensasi Pemerintah

Pendapatan Kompensasi Pemerintah	Anggaran	Realisasi		Rasio	
	2022 Rp	2022 Rp	2021 Rp	Capaian %	Kenaikan/ (Penurunan) %
PSO	3.508.415	3.242.767	3.290.978	92,43	(1,46)
IMO	454.545	461.331	454.545	101,49	1,49
Perintis	169.186	176.147	157.548	104,11	11,81
Jumlah	4.132.146	3.880.245	3.903.071	93,90	(0,58)

Realisasi Pendapatan Kompensasi Pemerintah tahun 2022 sebesar 93,90% dari target RKAP, realisasinya menurun dari tahun 2021 sebesar (0,58%). Kontribusi terbesar Pendapatan Kompensasi Pemerintah tahun 2022 berasal dari Kompensasi PSO.

iv. Pendapatan Non Angkutan KA

Non Angkutan KA	Anggaran	Realisasi		Rasio	
	2022 Rp	2022 Rp	2021 Rp	Capaian %	Kenaikan %
Non Angkutan KA	1.902.073	1.575.688	1.134.200	82,84	38,93

Realisasi Pendapatan Non Angkutan KA tahun 2022 sebesar 82,84% dari target RKAP, realisasinya mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 38,93%.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN EVALUASI KINERJA (Lanjutan)**

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

v. Pendapatan Pendukung Angkutan KA

Pendukung Angkutan KA	Anggaran	Realisasi		Rasio	
	2022 Rp	2022 Rp	2021 Rp	Capaian %	Kenaikan %
Pendukung Angkutan KA	874.096	713.611	672.143	81,64	6,17

Realisasi Pendapatan Pendukung Angkutan KA tahun 2022 sebesar 81,64% dari target RKAP, realisasinya meningkat dari tahun 2021 sebesar 6,17%.

b. Pendapatan Konstruksi

Pendapatan Konstruksi	Anggaran	Realisasi		Rasio	
	2022 Rp	2022 Rp	2021 Rp	Capaian %	Kenaikan %
Pendapatan Konstruksi	4.880.067	2.610.567	2.387.246	53,49	9,35

Realisasi Pendapatan Konstruksi tahun 2022 sebesar 53,49% dari target RKAP, realisasinya mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 9,35%.

II. Realisasi Beban Pokok Pendapatan

a. Beban Angkutan dan Usaha Lainnya

Beban Angkutan dan Usaha Lainnya	Anggaran	Realisasi		Rasio	
	2022 Rp	2022 Rp	2021 Rp	Capaian %	Kenaikan/ (Penurunan) %
Beban Operasi Langsung (BOL)					
Bahan Bakar dan Listrik Aliran Atas	1.899.174	3.039.591	1.572.789	160,05	93,26
Pegawai	2.375.572	2.668.858	2.279.159	112,35	17,10
Perawatan Sarana Perkeretaapian	2.836.622	2.358.032	2.070.989	83,13	13,86
Pendukung Operasional dan Angkutan	1.195.051	976.944	823.547	81,75	18,63
Penyusutan Sarana dan Fasilitas	936.566	917.639	815.512	97,98	12,52
Asuransi	81.907	68.799	54.855	84,00	25,42
Bongkar Muat dan Terminal Peti Kemas	59.462	55.897	40.410	94,00	38,32
Sub Jumlah BOL	9.384.354	10.085.760	7.657.261	107,47	31,71
Beban Operasi Tidak Langsung (BOTL)					
Pegawai	1.936.018	2.103.473	1.842.441	108,65	14,17
Perawatan dan Operasi Prasarana	1.463.814	1.313.458	1.107.169	89,73	18,63
Keamanan dan Kebersihan	758.597	704.827	701.831	92,91	0,43
Optimalisasi Aset	676.801	648.310	542.300	95,79	19,55
Penggunaan Prasarana (TAC)	880.000	470.828	340.868	53,50	38,13
Penyusutan Prasarana dan Amortisasi	400.542	434.189	447.519	108,40	(2,98)
Stasiun	89.017	104.460	91.458	117,35	14,22
Perawatan Prasarana Pendukung Angkutan KA	43.504	64.989	31.214	149,39	108,20
Sub Jumlah BOTL	6.248.293	5.844.534	5.104.800	93,54	14,49
Jumlah Beban Angkutan dan Usaha Lainnya	15.632.647	15.930.294	12.762.061	101,90	24,83

Realisasi Beban Angkutan dan Usaha Lainnya tahun 2022 sebesar 101,90% dari target RKAP, realisasinya mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 24,83%. Kontribusi terbesar Beban Angkutan dan Usaha lainnya tahun 2022 berasal dari Bahan Bakar dan Listrik Aliran Atas.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN EVALUASI KINERJA (Lanjutan)**

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

b. Beban Konstruksi

Beban Konstruksi	Anggaran	Realisasi		Rasio	
	2022 Rp	2022 Rp	2021 Rp	Capaian %	Kenaikan %
Konstruksi	4.880.067	2.610.567	2.387.246	53,49	9,35

Realisasi Beban Konstruksi tahun 2022 sebesar 53,49% dari target RKAP, realisasinya mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 9,35%.

III. Realisasi Beban Usaha

Beban Usaha	Anggaran	Realisasi		Rasio	
	2022 Rp	2022 Rp	2021 Rp	Capaian %	Kenaikan/ (Penurunan) %
Beban Usaha					
Pegawai	2.118.166	2.466.174	1.882.683	116,43	30,99
Pemasaran dan Administrasi	333.293	336.883	169.814	101,08	98,38
Kerumahaan dan Pelayanan					
Kesehatan Umum	272.122	257.891	94.971	94,77	171,55
Pendidikan dan Pelatihan	140.250	142.533	51.717	101,63	175,60
Penyusutan Fasilitas dan Amortisasi	252.737	129.431	122.039	51,21	6,06
Pajak Bumi dan Bangunan	86.136	78.114	73.859	90,69	5,76
Rapat/Akomodasi	57.986	74.639	32.374	128,72	130,55
Konsultan, Penelitian & Pengembangan	90.612	62.078	54.173	68,51	14,59
Inventaris	39.146	50.003	28.152	127,73	77,62
Perjalanan Dinas	44.278	44.117	14.096	99,64	212,98
Listrik, Air, dan Telepon	23.127	22.669	19.172	98,02	18,24
Jumlah	3.457.853	3.664.532	2.543.050	105,98	44,10

Realisasi Beban Usaha tahun 2022 sebesar 105,98% dari target RKAP, realisasinya meningkat dari tahun 2021 sebesar 44,10%. Kontribusi terbesar Beban Usaha tahun 2022 berasal dari Beban Pegawai.

IV. Realisasi Pendapatan (Beban) Lain-lain

Pendapatan (Beban) Lain-lain	Anggaran	Realisasi		Rasio	
	2022 Rp	2022 Rp	2021 Rp	Capaian %	Kenaikan/ (Penurunan) %
Pendapatan Lain-lain					
Pendapatan Bunga	129.676	139.515	108.444	107,59	28,65
Lain-lain	2.114	281.435	90.389	13.312,91	211,36
Sub Jumlah	131.790	420.950	198.833	319,41	111,71
Beban Lain-lain					
Beban Keuangan	(1.344.573)	(980.572)	(900.712)	72,93	8,87
Lain-lain	(30.260)	(602.036)	(69.520)	1.989,54	765,99
Sub Jumlah	(1.374.833)	(1.582.608)	(970.232)	115,11	63,12
Jumlah - Bersih	(1.243.043)	(1.161.658)	(771.399)	93,45	50,59

Realisasi Pendapatan (Beban) Lain-lain tahun 2022 sebesar 93,45% dari target RKAP, realisasinya mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 50,59%.

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN EVALUASI KINERJA (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

V. Realisasi Laba Rugi

a. Laba Rugi Komprehensif

Laba Rugi	Anggaran	Realisasi		Rasio	
	2022 Rp	2022 Rp	2021 Rp	Capaian %	Kenaikan/ (Penurunan) %
Pendapatan	25.392.334	25.577.639	17.916.776	100,73	42,76
Beban Pokok Pendapatan	20.512.714	18.540.861	15.149.307	90,39	22,39
Laba Bruto	4.879.620	7.036.778	2.767.469	144,21	154,27
Beban Usaha	3.457.853	3.664.532	2.543.050	105,98	44,10
Laba Usaha	1.421.767	3.372.246	224.419	237,19	1.402,66
Beban Lain-lain - Bersih	(1.243.043)	(1.161.658)	(771.399)	93,45	50,59
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	178.724	2.210.588	(546.980)	1.236,87	504,14
Manfaat (Beban) Pajak					
Pajak Kini	(136.786)	(129.581)	(149.154)	94,73	(13,12)
Pajak Tanggahan	61.801	(395.018)	270.938	(639,18)	(245,80)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	103.739	1.685.989	(425.196)	1.625,22	496,52
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	--	580.841	(122.605)	--	(573,75)
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	103.739	2.266.830	(547.801)	2.185,13	513,81
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada: Kepentingan Nonpengendali	(4)	(96.051)	(62.736)	2.401.275,00	(53,10)
Pemilik Entitas Induk	103.743	1.782.040	(362.460)	1.717,74	591,65

Berdasarkan RKAP, Perusahaan telah menetapkan target capaian Laba (Rugi) untuk Laba Bruto, Laba Usaha, Laba (Rugi) Sebelum Pajak, Laba (Rugi) Tahun Berjalan, Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan dan Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk. Realisasi capaian target berdasarkan RKAP adalah:

- Laba Bruto untuk tahun 2022 di atas target RKAP sebesar 144,21%;
- Laba Usaha untuk tahun 2022 di atas target RKAP sebesar 237,19%;
- Laba Sebelum Pajak untuk tahun 2022 di atas target RKAP sebesar 1.236,87%;
- Laba Tahun Berjalan untuk tahun 2022 di atas target RKAP sebesar 1.625,22%;
- Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun 2022 di atas target RKAP sebesar 2.185,13%; dan
- Laba Tahun berjalan yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun 2022 diatas RKAP sebesar 1.717,74%.

Realisasi capaian Laba (Rugi) Tahun Berjalan dibanding tahun 2021 adalah:

- Laba Bruto untuk tahun 2022 meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 154,27%;
- Laba Usaha untuk tahun 2022 meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 1.402,66%;
- Laba Sebelum Pajak Penghasilan untuk tahun 2022 meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 504,14%;
- Laba Tahun Berjalan untuk tahun 2022 meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 496,52%;
- Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun 2022 meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 513,81%; dan
- Laba Tahun berjalan yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun 2022 meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 591,65%.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN EVALUASI KINERJA (Lanjutan)**

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

b. Margin Laba

Margin Laba (Rugi)	Anggaran	Realisasi		Rasio	
	2022 %	2022 %	2021 %	Capaian %	Kenaikan/ (Penurunan) %
Pendapatan	100,00	100,00	100,00	100,00	--
Beban Pokok Pendapatan	80,78	72,49	84,55	89,73	(14,27)
Laba Bruto	19,22	27,51	15,45	143,16	78,11
Beban Usaha	13,62	14,33	14,19	105,21	0,94
Laba Usaha	5,60	13,18	1,25	235,47	952,59
Beban Lain-lain - Bersih	4,90	4,54	4,31	92,78	5,49
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	0,70	8,64	(3,05)	1.227,91	383,10
Manfaat (Beban) Pajak					
Pajak Kini	(0,54)	(0,51)	(0,83)	94,05	39,14
Pajak Tangguhan	0,24	(1,54)	1,51	(634,55)	(202,13)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	0,41	6,59	(2,37)	1.613,45	377,76
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	0,00	0,02	(0,01)	100,00	431,86
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	0,00	0,09	(0,03)	2.169,30	389,86
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	0,41	6,97	(2,02)	1.705,30	444,39

Realisasi capaian Margin Laba (Rugi) Tahun Berjalan dibanding target RKAP adalah:

- Margin Laba Bruto untuk tahun 2022 di atas target RKAP sebesar 143,16%;
- Margin Laba Usaha untuk tahun 2022 di atas target RKAP sebesar 235,47%;
- Margin Laba Sebelum Pajak Penghasilan untuk tahun 2022 di atas target RKAP sebesar 1.227,91%;
- Margin Laba Tahun Berjalan untuk tahun 2022 di atas target RKAP sebesar 1.613,45%;
- Margin Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun 2022 di atas target RKAP sebesar 2.169,30%; dan
- Margin Laba Tahun berjalan yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun 2022 di atas RKAP sebesar 1.705,30%.

Realisasi capaian margin laba (rugi) tahun berjalan dibanding tahun 2021 adalah:

- Margin Laba Bruto untuk tahun 2022 meningkat sebesar 78,11% dibanding tahun 2021;
- Margin Laba Usaha untuk tahun 2022 meningkat sebesar 952,59% dibanding tahun 2021;
- Margin Laba Sebelum Pajak Penghasilan untuk tahun 2022 dibanding tahun 2021 meningkat sebesar 383,10%;
- Margin Laba Tahun Berjalan untuk tahun 2022 dibanding tahun 2021 meningkat sebesar 377,76%;
- Margin Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun 2022 dibanding tahun 2021 meningkat sebesar 389,86%; dan
- Margin Laba Tahun berjalan yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun 2022 meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 444,39%.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN EVALUASI KINERJA (Lanjutan)**

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

VI. Realisasi Posisi Keuangan Aset

Terkait adanya siaran pers DSAK-IAI "Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa" pada bulan April 2022, Perusahaan dan Entitas Anak telah menyajikan kembali Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 1 Januari 2021/31 Desember 2020. Untuk tujuan Laporan Evaluasi Kinerja, Laporan Posisi Keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibawah ini menggunakan saldo sebelum dilakukan penyajian kembali atau sama dengan yang telah dilaporkan kepada Kementerian BUMN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset	Anggaran	Realisasi		Rasio	
	2022 Rp	2022 Rp	2021 Rp	Capaian %	Kenaikan/ (Penurunan) %
Aset Lancar					
Kas dan Setara Kas	3.082.464	5.695.720	3.808.204	184,78	49,56
Dana Dibatasi Penggunaannya	163.381	5.610.386	2.748.464	3.433,93	104,13
Piutang	1.083.841	1.496.341	1.149.769	138,06	30,14
Persediaan	937.226	1.145.314	893.781	122,20	28,14
Aset Lancar Lainnya	1.301.055	1.390.187	1.106.464	106,85	25,64
Jumlah Aset Lancar	6.567.967	15.337.948	9.706.682	233,53	58,01
Aset Tidak Lancar					
Aset Tetap	26.238.952	23.924.693	22.860.962	91,18	4,65
Hak Pengoperasian Aset Prasarana	27.954.718	23.736.944	20.503.150	84,91	15,77
Aset Takberwujud	541.271	422.761	366.773	78,11	15,27
Aset Tidak Lancar Lainnya	14.055.646	8.158.884	9.331.260	58,05	(12,56)
Jumlah Aset Tidak Lancar	68.790.587	56.243.282	53.062.145	81,76	6,00
Jumlah Aset	75.358.554	71.581.230	62.768.827	94,99	14,04

Realisasi jumlah Aset tahun 2022 di bawah target RKAP sebesar 94,99% dan meningkat dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 14,04%. Realisasi Aset Lancar tahun 2022 di atas target RKAP sebesar 233,53% dan meningkat dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 58,01%. Realisasi Aset Tidak Lancar tahun 2022 di bawah target RKAP sebesar 81,76%, namun meningkat dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 6,00%.

Proporsi Aset	Anggaran	Realisasi	
	2022 %	2022 %	2021 %
Aset Lancar	8,72	21,43	15,46
Aset Tidak Lancar	91,28	78,57	84,54
Jumlah	100,00	100,00	100,00

VII. Realisasi Posisi Keuangan Liabilitas dan Ekuitas

Liabilitas dan Ekuitas	Anggaran	Realisasi		Rasio	
	2022 Rp	2022 Rp	2021 Rp	Capaian %	Kenaikan/ (Penurunan) %
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang Usaha	1.232.655	2.035.693	1.666.029	165,15	22,19
Utang Pajak	303.808	309.333	339.549	101,82	(8,90)
Pinjaman Jangka Pendek	3.703.304	1.760.000	2.659.962	47,53	(33,83)
Pinjaman Jangka Panjang, Obligasi, dan PEN Jatuh Tempo Satu Tahun	1.662.262	1.634.459	1.934.439	98,33	(15,51)
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	3.179.249	4.218.640	2.974.321	132,69	41,84
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	10.081.278	9.958.125	9.574.300	98,78	4,01

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN EVALUASI KINERJA (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Liabilitas dan Ekuitas	Anggaran	Realisasi		Rasio	
	2022 Rp	2022 Rp	2021 Rp	Capaian %	Kenaikan/ (Penurunan) %
Liabilitas Jangka Panjang					
Liabilitas Imbalan Kerja					
Jangka Panjang	5.402.743	5.197.152	5.819.774	96,19	(10,70)
Pinjaman Jangka Panjang					
Setelah Dikurangi Bagian					
Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	21.760.808	18.282.632	16.501.747	84,02	10,79
Utang Obligasi dan Sukuk	6.000.000	4.989.067	2.993.801	83,15	66,65
Pinjaman Dana PEN	3.500.000	3.062.500	3.500.000	87,50	(12,50)
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	1.065.715	1.011.569	967.465	94,92	4,56
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	37.729.266	32.542.920	29.782.787	86,25	9,27
Jumlah Liabilitas	47.810.544	42.501.045	39.357.087	88,89	7,99
Ekuitas					
Modal Saham	23.282.215	22.345.160	19.168.743	95,98	16,57
Saldo Laba	5.429.698	7.679.086	5.723.245	141,43	34,17
Komponen Ekuitas Lainnya	(1.504.586)	(1.036.515)	(1.629.015)	68,89	(36,37)
Jumlah Ekuitas yang dapat					
 Diatribusikan kepada					
 Pemilik Entitas Induk	27.207.327	28.987.731	23.262.973	106,54	24,61
Kepentingan Nonpengendali	340.683	92.454	148.767	27,14	(37,85)
Jumlah Ekuitas	27.548.010	29.080.185	23.411.740	105,56	24,21
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	75.358.554	71.581.230	62.768.827	94,99	14,04

Realisasi jumlah Liabilitas dan Ekuitas tahun 2022 di bawah target RKAP sebesar 94,99%, dan meningkat dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 14,04%.

Realisasi Liabilitas tahun 2022 di bawah target RKAP sebesar 88,89%, namun meningkat dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 7,99%. Realisasi Liabilitas Jangka Pendek tahun 2022 di bawah target RKAP sebesar 98,78% dan meningkat dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 4,01%. Realisasi Liabilitas Jangka Panjang tahun 2022 dibawah target RKAP sebesar 86,25%, namun realisasi tahun 2022 terhadap realisasi tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 9,27%

Realisasi Ekuitas tahun 2022 di atas target RKAP sebesar 105,56%, dan meningkat dibanding realisasi tahun 2021 sebesar 24,21%.

Proporsi Liabilitas dan Ekuitas	Anggaran	Realisasi	
	2022 %	2022 %	2021 %
Liabilitas			
Jangka Pendek	13,38	13,91	15,25
Jangka Panjang	50,07	45,46	47,45
Jumlah Liabilitas	63,44	59,37	62,70
Ekuitas	36,56	40,63	37,30
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	100,00	100,00	100,00

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN EVALUASI KINERJA (Lanjutan)**

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

I. Acuan Pengukuran

Tingkat Kesehatan Perusahaan dihitung atas dasar Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002. Berdasarkan keputusan menteri BUMN tersebut, tingkat kesehatan Perusahaan diukur dalam tiga aspek yang memiliki bobot yang berbeda untuk sektor industri tertentu.

Perusahaan dalam perhitungan ini dikategorikan dalam BUMN Infrastruktur, di mana ketiga aspek yang dihitung memiliki bobot sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|----|
| 1. Aspek Keuangan | 50 |
| 2. Aspek Operasional | 35 |
| 3. Aspek Administrasi | 15 |

1. Aspek Keuangan

Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja Aspek Keuangan diatur di dalam Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002. Indikator kinerja Aspek Keuangan dan bobotnya untuk BUMN Infrastruktur adalah:

No	Indikator	Bobot
1.	Imbalan kepada Pemegang Saham (ROE)	15
2.	Imbalan Investasi (ROI)	10
3.	Rasio Kas	3
4.	Rasio Lancar	4
5.	<i>Collection Period</i>	4
6.	Perputaran Persediaan	4
7.	Perputaran Total Aset	4
8.	Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset	6
	Jumlah Bobot	50

Indikator kinerja Aspek Keuangan diuraikan sebagai berikut:

Indikator dan Formula	Range Indikator	Skor Infrastruktur
1. Imbalan Kepada Pemegang Saham (ROE) $\frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$	$15 < \text{ROE}$ $13 < \text{ROE} \leq 15$ $11 < \text{ROE} \leq 13$	15 13,5 12
	i. Laba setelah Pajak = Laba setelah Pajak dikurangi dengan laba hasil penjualan dari: <ul style="list-style-type: none"> • Aktiva Tetap; • Aktiva Non Produktif; • Aktiva Lain-lain; dan • Saham Penyertaan Langsung ii. Modal Sendiri = Ekuitas - Aktiva Tetap Dalam Penyelesaian (ATDP) - Laba Tahun Berjalan	$9 < \text{ROE} \leq 11$ $7,9 < \text{ROE} \leq 9$ $6,6 < \text{ROE} \leq 7,9$ $5,3 < \text{ROE} \leq 6,6$ $4 < \text{ROE} \leq 5,3$ $2,5 < \text{ROE} \leq 4$ $1 < \text{ROE} \leq 2,5$ $0 < \text{ROE} \leq 1$ $\text{ROE} \leq 0$

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN EVALUASI KINERJA (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Indikator dan Formula	Range Indikator	Skor Infrastruktur
<p>2. Imbalan Investasi (ROI)</p> $\frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$ <p>i. EBIT = Laba Sebelum Pajak Penghasilan - (Penjualan Aktiva Tetap + Penjualan Aktiva Non Produktif + Aktiva Lain-lain + Saham Penyertaan Langsung) - (Pendapatan Bunga + Beban Bunga Pinjaman)</p> <p>ii. Penyusutan = Penyusutan + Amortisasi</p> <p>iii. <i>Capital Employed</i> = Total Aset – ATDP</p>	<p>18 < ROI 15 < ROI ≤ 18 13 < ROI ≤ 15 12 < ROI ≤ 13 10,5 < ROI ≤ 12 9 < ROI ≤ 10,5 7 < ROI ≤ 9 5 < ROI ≤ 7 3 < ROI ≤ 5 1 < ROI ≤ 3 0 < ROI ≤ 1 ROI ≤ 0</p>	<p>10 9 8 7 6 5 4 3,5 3 2,5 2 0</p>
<p>3. Rasio Kas</p> $\frac{\text{Kas \& Setara Kas}}{\text{Liabilitas Lancar}} \times 100\%$	<p>35 ≤ X 25 ≤ X < 35 15 ≤ X < 25 10 ≤ X < 15 5 ≤ X < 10 0 ≤ X < 5</p>	<p>3 2,5 2 1,5 1 0</p>
<p>4. Rasio Lancar</p> $\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Liabilitas Lancar}} \times 100\%$	<p>125 ≤ X 110 ≤ X < 125 100 ≤ X < 110 95 ≤ X < 100 90 ≤ X < 95 X < 90</p>	<p>4 2,5 2 1,5 1 0</p>
<p>5. Collection Period</p> $\frac{\text{Piutang Usaha}}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 365$ <p>i. Piutang Usaha = Piutang Usaha - Penyisihan Piutang Ragu-Ragu</p>	<p>Tahun Berjalan (Hari) CP ≤ 60 60 < CP ≤ 90 90 < CP ≤ 120 120 < CP ≤ 150 150 < CP ≤ 180 180 < CP ≤ 210 210 < CP ≤ 240 240 < CP ≤ 270 270 < CP ≤ 300 300 < CP</p>	<p>4 3,5 3 2,5 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0</p>

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN EVALUASI KINERJA (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Indikator dan Formula	Range Indikator	Skor Infrastruktur
	Perbaikan (Hari) $35 < CPp$ $30 < CPp \leq 35$ $25 < CPp \leq 30$ $20 < CPp \leq 25$ $15 < CPp \leq 20$ $10 < CPp \leq 15$ $6 < CPp \leq 10$ $3 < CPp \leq 6$ $1 < CPp \leq 3$ $0 < CPp \leq 1$	4 3,5 3 2,5 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0
<p>6. Perputaran Persediaan</p> $\frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365$	<p>Tahun Berjalan (Hari)</p> $PP \leq 60$ $60 < PP \leq 90$ $90 < PP \leq 120$ $120 < PP \leq 150$ $150 < PP \leq 180$ $180 < PP \leq 210$ $210 < PP \leq 240$ $240 < PP \leq 270$ $270 < PP \leq 300$ $300 < PP$	4 3,5 3 2,5 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0
<p>7. Perputaran Total Aset (TATO)</p> $\frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Capital Employed}} \times 100\%$ <p>i. Total Pendapatan = Pendapatan Usaha + Pendapatan Non Usaha</p> <p>ii. <i>Capital Employed</i> = Total Aset – ATDP</p>	<p>Perbaikan (Hari)</p> $35 < PPp$ $30 < PPp \leq 35$ $25 < PPp \leq 30$ $20 < PPp \leq 25$ $15 < PPp \leq 20$ $10 < PPp \leq 15$ $6 < PPp \leq 10$ $3 < PPp \leq 6$ $1 < PPp \leq 3$ $0 < PPp \leq 1$	4 3,5 3 2,5 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0
	$120 < TATO$ $105 < TATO \leq 120$ $90 < TATO \leq 105$ $75 < TATO \leq 90$ $60 < TATO \leq 75$ $40 < TATO \leq 60$ $20 < TATO \leq 40$ $TATO \leq 20$	4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN EVALUASI KINERJA (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Indikator dan Formula	Range Indikator	Skor Infrastruktur
	Perbaikan (Hari) $20 < \text{TATOp}$ $15 < \text{TATOp} \leq 20$ $10 < \text{TATOp} \leq 15$ $5 < \text{TATOp} \leq 10$ $0 < \text{TATOp} \leq 5$ $\text{TATOp} \leq 0$	4 3,5 3 2,5 2 1,5
<p>8. Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset</p> $\frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$ <p>i. Total Modal Sendiri = Jumlah Ekuitas - Dana yang Belum Ditetapkan Statusnya</p>	$X < 0$ $0 \leq X < 10$ $10 \leq X < 20$ $20 \leq X < 30$ $30 \leq X < 40$ $40 \leq X < 50$ $50 \leq X < 60$ $60 \leq X < 70$ $70 \leq X < 80$ $80 \leq X < 90$ $90 \leq X < 100$	0 2 3 4 6 5,5 5 4,5 4,25 4 3,5

2. Aspek Operasional

Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja Aspek Operasional didasarkan atas indikator kinerja operasional di dalam Keputusan Direksi tentang Tingkat Kesehatan Perusahaan seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Penilaian terhadap masing-masing indikator dilakukan secara kualitatif dengan kategori penilaian dan penetapan skornya ditentukan dalam surat keputusan sebagai berikut:

- Baik Sekali (BS): sekurang-kurangnya mencapai standar normal atau di atas normal, skor = 100% x bobot indikator yang bersangkutan.
- Baik (B): mendekati standar normal atau sedikit di bawah standar normal namun telah menunjukkan perbaikan, skor = 80% x bobot indikator yang bersangkutan.
- Cukup (C): masih jauh dari standar normal namun mengalami perbaikan, skor = 50% x bobot indikator yang bersangkutan.
- Kurang (K): tidak tumbuh dan cukup jauh dari standar normal, skor = 20% x bobot indikator yang bersangkutan.

Indikator Kinerja Aspek Operasional diuraikan sebagai berikut:

Indikator dan Formula	Range Indikator	Skor Infrastruktur
<p>1. Tingkat Keselamatan</p> $\frac{\text{Km KA / PLH (kecelakaan KA)}}{\text{Standar Normal}} \times 100\%$	$90 \leq X$ $80 \leq X < 90$ $50 \leq X < 80$ $X < 50$	10 8 5 2

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN EVALUASI KINERJA (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Indikator dan Formula	Range Indikator	Skor Infrastruktur
<p>2.a. Tingkat Pelayanan: KA Penumpang Datang</p> $\frac{\text{Keterlambatan KA Penumpang Datang}}{\text{Standar Normal}} \times 100\%$	$X \leq 110$ $110 < X \leq 120$ $120 < X \leq 150$ $150 < X$	<p>4 3,2 2 0,8</p>
<p>2.b. Tingkat Pelayanan: KA Barang Datang</p> $\frac{\text{Keterlambatan KA Barang Datang}}{\text{Standar Normal}} \times 100\%$	$X \leq 110$ $110 < X \leq 120$ $120 < X \leq 150$ $150 < X$	<p>4 3,2 2 0,8</p>
<p>2.c. Tingkat Pelayanan: Keluhan Penumpang</p> $\frac{\text{Volume Penumpang/Keluhan}}{\text{Standar Normal}} \times 100\%$	$90 \leq X$ $80 \leq X < 90$ $50 \leq X < 80$ $X < 50$	<p>3 2,4 1,5 0,6</p>
<p>3.a. Efektivitas Pemeliharaan: Sarana</p> $\frac{\text{Km Lok / Frek Lok Mogok}}{\text{Standar Normal}} \times 100\%$	$100 \leq X$ $90 \leq X < 100$ $80 \leq X < 90$ $X < 80$	<p>4 3,2 2 0,8</p>
<p>3.b. Efektivitas Pemeliharaan: Prasarana</p> $\frac{\text{Km Rel Baik / Panjang Rel}}{\text{Standar Normal}} \times 100\%$	$100 \leq X$ $90 \leq X < 100$ $80 \leq X < 90$ $X < 80$	<p>4 3,2 2 0,8</p>
<p>4.a. Produktivitas SDM dari Satuan Angkatan</p> $\frac{\text{Km (Penumpang + Barang)}}{\text{Jumlah SDM}} \times 100\%$	$100 \leq X$ $90 \leq X < 100$ $80 \leq X < 90$ $X < 80$	<p>3 2,4 1,5 0,6</p>
<p>4.b. Produktivitas SDM dari Satuan Pendapatan</p> $\frac{\text{Pendapatan / Jumlah SDM}}{\text{Standar Normal}} \times 100\%$	$100 \leq X$ $90 \leq X < 100$ $80 \leq X < 90$ $X < 80$	<p>3 2,4 1,5 0,6</p>

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN EVALUASI KINERJA (Lanjutan)**

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. Aspek Administrasi

Indikator kinerja Aspek Administrasi diuraikan sebagai berikut:

Indikator dan Formula	Range Indikator	Skor Infrastruktur
<p>1. Penyampaian Laporan Audit</p> <p>Perhitungan Tahunan (4 bulan) setelah berakhir tahun yang bersangkutan (sesuai tanggal agenda diterima)</p>	<p>$X \leq$ bulan ke-4</p> <p>bulan ke-4 < $X \leq$ ke-5</p> <p>bulan ke-5 < X</p>	<p>3</p> <p>2</p> <p>0</p>
<p>2. Penyampaian RKAP</p> <p>(2 bulan) sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan (sesuai tanggal agenda diterima)</p>	<p>2 bulan \leq X</p> <p>$X <$ 2 bulan</p>	<p>3</p> <p>0</p>
<p>3. Penyampaian Laporan Periodik</p> <p>Jumlah Total Keterlambatan Penyampaian Laporan Periodik setelah berakhirnya periode batas penyampaian laporan (1 bulan) untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Periodik Triwulan I • Laporan Periodik Triwulan II • Laporan Periodik Triwulan III • Laporan Periodik Triwulan IV 	<p>$X \leq$ 0 hari</p> <p>$0 < X \leq$ 30 hari</p> <p>$30 < X \leq$ 60 hari</p> <p>60 hari < X</p>	<p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>0</p>
<p>4. Pengukuran Kinerja PUMK</p> <p>a. Efektivitas Penyaluran Dana Pinjaman Kemitraan</p> <p>$\frac{\text{Dana yang Disalurkan}}{\text{Dana yang Tersedia}} \times 100\%$</p>	<p>$90 < X$</p> <p>$85 < X \leq 90$</p> <p>$80 < X \leq 85$</p> <p>$X \leq 80$</p>	<p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>0</p>
<p>b. Kolektibilitas Penyaluran Dana Pinjaman Kemitraan</p> <p>$\frac{\text{Kolektibilitas Pinjaman}}{\text{Pinjaman yang Disalurkan}} \times 100\%$</p>	<p>$70 < X$</p> <p>$40 < X \leq 70$</p> <p>$10 < X \leq 40$</p> <p>$X \leq 10$</p>	<p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>0</p>

Kualifikasi dan Kategori

Sesuai aturan yang ada di dalam Keputusan Menteri No. KEP-100/MBU/2002 di atas, Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN digolongkan ke dalam tiga kategori dengan kualifikasi untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

1. Sehat, yang terdiri dari:
 - AAA apabila Total Skor (TS) lebih besar dari 95;
 - AA apabila $80 < TS \leq 95$; dan
 - A apabila $65 < TS \leq 80$.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN EVALUASI KINERJA (Lanjutan)**

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Kurang Sehat, yang terdiri dari:
 - BBB apabila $50 < TS \leq 65$;
 - BB apabila $40 < TS \leq 50$; dan
 - B apabila $30 < TS \leq 40$.
3. Tidak Sehat, yang terdiri dari:
 - CCC apabila $20 < TS \leq 30$;
 - CC apabila $10 < TS \leq 20$; dan
 - C apabila $TS \leq 10$.

II. Hasil Pengukuran

a. Aspek Keuangan

Pengukuran kinerja Aspek Keuangan dilakukan sesuai definisi yang telah ditentukan dalam Keputusan Menteri No. KEP-100/MBU/2002 dengan sebagai berikut:

1. Imbalan kepada Pemegang Saham (ROE)

	2022	2021
Laba Setelah Pajak	1.782.040	(362.460)
Modal Sendiri	14.946.065	11.688.157
Nilai Kinerja Keuangan	11,92%	-3,10%
Skor Kinerja Keuangan	12,00	1,00

2. Imbalan Investasi (ROI)

	2022	2021
EBIT + Penyusutan	4.532.904	1.630.358
Capital Employed	59.321.604	50.831.550
Nilai Kinerja Keuangan	7,64%	3,21%
Skor Kinerja Keuangan	4,00	3,00

3. Rasio Kas

	2022	2021
Kas & Setara Kas	5.695.720	3.808.204
Liabilitas Lancar	9.958.124	9.574.300
Nilai Kinerja Keuangan	57,20%	39,78%
Skor Kinerja Keuangan	3,00	3,00

4. Rasio Lancar

	2022	2021
Aset Lancar	15.337.948	9.706.682
Liabilitas Lancar	9.958.124	9.574.300
Nilai Kinerja Keuangan	154,02%	101,38%
Skor Kinerja Keuangan	4,00	2,00

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN EVALUASI KINERJA (Lanjutan)**

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

5. Collection Period

	2022	2021
Piutang Usaha	1.406.338	1.075.098
Pendapatan Usaha	22.967.072	15.529.530
Nilai Kinerja Keuangan (Hari)	22,35	25,27
Skor Kinerja Keuangan	4,00	4,00
Perbaikan		
CP Tahun Lalu (Hari)	25,27	11,39
CP Tahun Berjalan (Hari)	22,35	25,27
Nilai Perbaikan	2,92	(13,88)
Skor Perbaikan	0,40	0,40
Skor Kinerja Akhir	4,00	4,00

6. Perputaran Persediaan

	2022	2021
Persediaan	1.145.314	893.781
Pendapatan Usaha	22.967.072	15.529.530
Nilai Kinerja Keuangan (Hari)	18,20	21,01
Skor Kinerja Keuangan	4,00	4,00
Perbaikan		
PP Tahun Lalu (Hari)	21,01	23,10
PP Tahun Berjalan (Hari)	18,20	21,01
Nilai Perbaikan	2,81	2,09
Skor Perbaikan	0,40	0,40
Skor Kinerja Akhir	4,00	4,00

7. Perputaran Total Aset (TATO)

	2022	2021
Total Pendapatan	23.388.022	15.728.363
Capital Employed	59.321.604	50.831.550
Nilai Kinerja Keuangan	39,43%	30,94%
Skor Kinerja Keuangan	1,00	1,00
Perbaikan		
TATO Tahun Lalu	30,94%	42,14%
TATO Tahun Berjalan	39,43%	30,94%
Nilai Perbaikan	8,48%	-11,20%
Skor Perbaikan	2,50	1,50
Skor Kinerja Akhir	2,50	1,50

8. Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset

	2022	2021
Total Modal Sendiri	28.987.730	23.262.973
Total Aset	71.581.230	62.768.827
Nilai Kinerja Keuangan	40,50%	37,06%
Skor Kinerja Keuangan	5,50	6,00

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN EVALUASI KINERJA (Lanjutan)**

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Ringkasan Tingkat Kesehatan BUMN dari Aspek Keuangan:

No	Aspek Keuangan	Skor Maks	2022		2021	
			Nilai	Skor	Nilai	Skor
1.	Imbalan kepada Pemegang Saham (ROE)	15	11,92%	12,00	-3,10%	1,00
2.	Imbalan Investasi (ROI)	10	7,64%	4,00	3,21%	3,00
3.	Rasio Kas	3	57,20%	3,00	39,78%	3,00
4.	Rasio Lancar	4	154,02%	4,00	101,38%	2,00
5.	<i>Collection Period</i> (Hari)	4	22,35	4,00	25,27	4,00
6.	Perputaran Persediaan (Hari)	4	18,20	4,00	21,01	4,00
7.	Perputaran Total Aset (TATO)	4	39,43%	2,50	30,94%	1,50
8.	Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset	6	40,50%	5,50	37,06%	6,00
	Jumlah	50		39,00		24,50

1. Imbalan kepada Pemegang Saham (ROE)

ROE mengukur efisiensi sebuah Perusahaan dalam menggunakan modal milik pemegang saham (Modal Sendiri) dalam menghasilkan keuntungan dan pengembangan perusahaan. Semakin tinggi ROE semakin baik. Dalam kriteria Keputusan Menteri BUMN, ROE merupakan rasio aspek keuangan terpenting dengan bobot tertinggi. Skor tertinggi diperuntukkan untuk kinerja dengan ROE adalah 15. Kinerja ROE pada tahun 2022 sebesar 11,92% dengan skor 12 meningkat dibanding kinerja tahun 2021 sebesar minus 3,10% dengan skor 1.

2. Imbalan investasi (ROI)

ROI mengukur seberapa baik Perusahaan menggunakan dana yang diinvestasikan dalam memperoleh keuntungan. Berbeda dengan ROE yang hanya memperhitungkan dana ekuitas saja, ROI juga memperhitungkan dana dari utang. Semakin tinggi ROI semakin baik dan menunjukkan efisiensi manajemen Perusahaan dalam mengelola dananya. Berbeda dengan TATO, ROI sudah memperhitungkan beban yang ditanggung Perusahaan. Dalam kriteria Keputusan Menteri BUMN, ROI merupakan rasio terpenting setelah ROE. Skor tertinggi diperuntukkan untuk kinerja dengan ROI adalah 10. Kinerja ROI pada tahun 2022 sebesar 7,64%, dengan skor 4 meningkat dibanding kinerja tahun 2021 sebesar 3,21% dengan skor 3.

3. Rasio Kas

Rasio Kas mengukur kemampuan Perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya secara cepat, semakin tinggi semakin baik. Skor tertinggi diperuntukkan untuk kinerja dengan Rasio Kas adalah 3. Kinerja Rasio Kas pada tahun 2022 sebesar 57,20% dengan skor 3 meningkat dibanding kinerja tahun 2021 sebesar 39,78% juga dengan skor 3.

4. Rasio Lancar

Rasio Lancar mengukur sumber daya Perusahaan dalam membayar utang-utangnya dalam waktu 12 bulan ke depan. Semakin tinggi Rasio Lancar semakin terjamin pembayaran utang Perusahaan. Skor tertinggi diperuntukkan untuk kinerja dengan Rasio Lancar adalah 4. Kinerja Rasio Lancar pada tahun 2022 sebesar 154,02% dengan skor 4 mengalami kenaikan dibanding kinerja tahun 2021 sebesar 101,38% dengan skor 2.

5. *Collection Period*

Collection Period mengukur waktu yang dibutuhkan Perusahaan untuk menerima pembayaran atas tagihan dari suatu usaha. Semakin rendah *Collection Period* semakin baik. Skor tertinggi diperuntukkan untuk kinerja dengan *Collection Period* dengan skor 4. Kinerja *Collection Period* pada tahun 2022 sebesar 22,35 hari dengan skor 4 sedangkan kinerja tahun 2021 sebesar 25,27 hari juga dengan skor 4.

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN EVALUASI KINERJA (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

6. Perputaran Persediaan

Perputaran Persediaan mengukur berapa lama persediaan terjual atau digunakan. Semakin rendah Perputaran Persediaan semakin baik. Skor tertinggi diperuntukkan untuk kinerja dengan Perputaran Persediaan adalah 4. Perusahaan mencatat kinerja perputaran persediaan pada tahun 2022 sebesar 18,20 hari dengan skor 4 sedangkan kinerja tahun 2021 sebesar 21,01 hari dengan skor 4.

7. Perputaran Total Aset (TATO)

TATO mengukur efisiensi Perusahaan dalam memanfaatkan asetnya. Semakin tinggi TATO semakin efisien Perusahaan memanfaatkan asetnya. Skor tertinggi diperuntukkan untuk kinerja dengan TATO adalah 4. Kinerja TATO pada tahun 2022 sebesar 38,97%, dengan skor 2,5 meningkat dibanding kinerja tahun 2021 sebesar 30,94% dengan skor 1,5.

8. Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset mengukur proporsi Total Modal Sendiri yang digunakan dalam mendanai operasional Perusahaan. Untuk tujuan yang sama Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset dapat disamakan dengan *Debt to Equity Ratio*. Rasio Total Modal Sendiri yang baik tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Untuk itu dalam Keputusan Menteri BUMN, dari skala Rasio Modal Sendiri 0% hingga 100%, nilai skor tertinggi diberikan untuk nilai rasio antara 30-40%. Kinerja Rasio Modal Sendiri pada tahun 2022 sebesar 40,50% dengan skor 5,5 menurun dibanding kinerja tahun 2021 sebesar 37,06% dengan skor 6.

b. Aspek Operasional

Indikator yang digunakan di dalam pengukuran kinerja Aspek Operasional didasarkan atas indikator kinerja operasional di dalam Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. KEP.U/OT.104/I/7/KA-2014 tentang Standar Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan sebagai berikut:

1. Capaian Tingkat Keselamatan

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Realisasi Km KA (Km)	62.544.782	56.761.944
Realisasi PLH (Peristiwa)	10	18
Standar Km KA (Km)	910.000	910.000
Nilai Kinerja	687,31%	346,53%
Skor Kinerja	10,00	10,00

2. Capaian Tingkat Pelayanan

a. KA Penumpang Datang

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Keterlambatan KA Penumpang (Menit)*	(0,08)	0,91
Standar Normal Keterlambatan (Menit)	38,00	38,00
Nilai Kinerja	-0,22%	2,39%
Skor Kinerja	4,00	4,00

*)KA Penumpang yang dioperasikan oleh Perusahaan

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN EVALUASI KINERJA (Lanjutan)**

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

b. KA Barang Datang

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Keterlambatan KA Barang (Menit)	(70,53)	(44,82)
Standard Normal Keterlambatan (Menit)	97,00	97,00
Nilai Kinerja	-72,71%	-46,21%
Skor Kinerja	4,00	4,00

c. Keluhan Penumpang

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Realisasi Penumpang (Orang)	284.448.804	154.537.582
Realisasi Keluhan	3	10
Standard Penumpang	2.140.045	2.140.045
Nilai Kinerja	4430,57%	722,12%
Skor Kinerja	3,00	3,00

3. Capaian Tingkat Efektivitas Pemeliharaan

a. Sarana

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Realisasi Km Lokomotif (Km)	214.038.663	197.602.950
Realisasi Frekuensi Lokomotif Mogok (Kali)	158	168
Standard Km Lokomotif (Km)	67.848	67.848
Nilai Kinerja	1996,63%	1733,59%
Skor Kinerja	4,00	4,00

b. Prasarana

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Realisasi Km Rel Baik (Km)	5.470	5.220
Realisasi Panjang Rel (Km)	5.855	5.812
Standar Km Rel Baik	63,56%	63,56%
Nilai Kinerja	146,97%	141,31%
Skor Kinerja	4,00	4,00

4. Capaian Tingkat Produktivitas SDM

a. Satuan Angkutan

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Realisasi Km Penumpang dan Barang (Km)	36.611.032	24.085.716
Realisasi SDM	33.406	40.570
Standar Km Penumpang dan Barang (Km)	840	840
Nilai Kinerja	130,42%	70,65%
Skor Kinerja	3,00	0,60

b. Satuan Pendapatan

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Realisasi Pendapatan	22.967.072	15.529.530
Realisasi SDM	33.406	40.570
Standar Pendapatan	187	187
Nilai Kinerja	367,69%	204,72%
Skor Kinerja	3,00	3,00

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN EVALUASI KINERJA (Lanjutan)**

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Ringkasan Tingkat Kesehatan BUMN dari Aspek Operasional:

No	Aspek Operasional	Skor Maks	2022		2021	
			Nilai	Skor	Nilai	Skor
1.	Tingkat Keselamatan	10	687,31%	10,00	346,53%	10,00
2.	Tingkat Pelayanan					
	a. KA Penumpang Datang	4	-0,22%	4,00	2,39%	4,00
	b. KA Barang Datang	4	-72,71%	4,00	-46,21%	4,00
	c. Keluhan Penumpang	3	4430,57%	3,00	722,12%	3,00
3.	Efektivitas Pemeliharaan					
	a. Pemeliharaan Sarana	4	1996,63%	4,00	1733,59%	4,00
	b. Pemeliharaan Prasarana	4	146,97%	4,00	141,31%	4,00
4.	Produktivitas SDM					
	a. Produktivitas SDM dari Satuan Angkutan	3	130,42%	3,00	70,65%	0,60
	b. Produktivitas SDM dari Satuan Pendapatan	3	367,69%	3,00	204,72%	3,00
	Jumlah	35		35,00		32,60

1. Capaian Tingkat Keselamatan

Kinerja Tingkat Keselamatan mengukur realisasi Km KA per peristiwa dibagi dengan standar target tingkat keselamatan. Semakin besar nilainya menunjukkan kinerja yang semakin baik. Skor tertinggi diperuntukkan untuk kinerja dengan tingkat keselamatan sama atau lebih dari 90%. Kinerja pada tahun 2022 sebesar 687,31% meningkat dibanding kinerja tahun 2021 sebesar 346,53%.

2. Capaian Tingkat Pelayanan

a. KA Penumpang Datang

Kinerja Tingkat Pelayanan KA Penumpang Datang mengukur realisasi keterlambatan KA Penumpang Datang dalam menit dibanding dengan standar normalnya hanya atas Induk Perusahaan. Semakin kecil nilainya menunjukkan kinerja yang semakin baik. Skor tertinggi diperuntukkan untuk kinerja dengan tingkat pelayanan KA Penumpang Datang sama atau lebih rendah dari 110%. Kinerja pada tahun 2022 sebesar (0,22%), meningkat dibanding kinerja tahun 2021 sebesar 2,39%.

b. KA Barang Datang

Kinerja Tingkat Pelayanan KA Barang Datang mengukur realisasi keterlambatan KA Barang Datang dalam menit dibanding dengan standar normalnya hanya atas Induk Perusahaan. Semakin kecil nilainya menunjukkan kinerja yang semakin baik. Skor tertinggi diperuntukkan untuk kinerja dengan tingkat pelayanan KA Barang Datang sama atau lebih rendah dari 110%. Kinerja pada tahun 2022 sebesar (72,71%), meningkat dibanding kinerja tahun 2021 sebesar (46,21%).

c. Keluhan Penumpang

Kinerja Tingkat Pelayanan Keluhan Penumpang mengukur realisasi jumlah penumpang per keluhan dibanding dengan standar target jumlah penumpang per keluhan. Semakin tinggi nilainya menunjukkan kinerja yang semakin baik. Skor tertinggi diperuntukkan untuk kinerja dengan tingkat pelayanan keluhan penumpang sama atau lebih tinggi dari 90%. Kinerja pada tahun 2022 sebesar 4430,57%, meningkat dibanding kinerja tahun 2021 sebesar 722,12%.

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK LAPORAN EVALUASI KINERJA (Lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. Capaian Tingkat Efektivitas Pemeliharaan

a. Sarana

Kinerja efektivitas Pemeliharaan Sarana mengukur realisasi Km Lokomotif dibagi frekuensi Lokomotif mogok, dibanding dengan standar target Km Lokomotif per Lokomotif Mogok. Semakin tinggi nilainya menunjukkan kinerja yang semakin baik. Skor tertinggi diperuntukkan untuk kinerja dengan tingkat efektivitas pemeliharaan sarana sama atau lebih tinggi dari 100%. Kinerja pada tahun 2022 sebesar 1996,63%, meningkat dibanding kinerja tahun 2021 sebesar 1733,59%.

b. Efektivitas Pemeliharaan Prasarana

Kinerja efektivitas Pemeliharaan Prasarana mengukur realisasi Km Rel Baik dibagi realisasi Panjang Rel, dibanding dengan standar target Km Rel Baik per Panjang Rel. Semakin tinggi nilainya menunjukkan kinerja yang semakin baik. Skor tertinggi diperuntukkan untuk kinerja dengan tingkat efektivitas pemeliharaan prasarana sama atau lebih tinggi dari 100%. Kinerja pada tahun 2022 sebesar 146,97%, meningkat dibanding kinerja tahun 2021 sebesar 141,31%.

4. Capaian Tingkat Produktivitas SDM

a. Satuan Angkutan

Kinerja Produktivitas SDM Satuan Angkutan mengukur realisasi Km (penumpang dan barang) dibagi realisasi jumlah SDM, dibanding dengan standar target Km (penumpang dan barang) per SDM. Semakin tinggi nilainya menunjukkan kinerja yang semakin baik. Skor tertinggi diperuntukkan untuk kinerja dengan tingkat produktivitas SDM dari satuan angkutan sama atau lebih tinggi dari 100%. Kinerja pada tahun 2022 sebesar 130,42%, meningkat dibanding kinerja tahun 2021 sebesar 70,65%.

b. Satuan Pendapatan

Kinerja Produktivitas SDM Satuan Pendapatan mengukur realisasi Pendapatan dibagi realisasi jumlah SDM, dibanding dengan standar target Pendapatan per SDM. Semakin tinggi nilainya menunjukkan kinerja yang semakin baik. Skor tertinggi diperuntukkan untuk kinerja dengan tingkat produktivitas SDM dari satuan pendapatan sama atau lebih tinggi dari 100%. Kinerja pada tahun 2022 sebesar 367,69%, meningkat dibanding kinerja tahun 2021 sebesar 204,72%.

c. Aspek Administrasi

Pengukuran kinerja Aspek Administrasi dihitung sesuai formula dan bobot yang ditentukan di dalam Keputusan Menteri BUMN tersebut di atas. Sebagai dasar pengukuran dan perhitungan adalah Tanda Terima Pengiriman Dokumen dan Laporan Auditor Independen atas Penyampaian Laporan Perhitungan Tahunan (Audit) kepada Pemegang Saham, Penyampaian RKAP, Penyampaian Laporan Periodik, dan Pengukuran Kinerja PUMK tahun 2022.

1. Penyampaian Laporan Perhitungan Tahunan (Audit) kepada Pemegang Saham

Standar waktu penyampaian perhitungan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik harus sudah diterima oleh Pemegang Saham paling lambat akhir bulan keempat sejak tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan. Pengukuran kinerja ini diukur sesuai dengan tanggal penerimaan Laporan Perhitungan Tahunan (Audit) kepada Kementerian BUMN sebagai berikut:

Aspek Administrasi	2022			2021		
	Tanggal	Indikator	Skor	Tanggal	Indikator	Skor
Penyampaian Laporan Perhitungan Tahunan (Audit) kepada Pemegang Saham	29-Mei-23	≤ bulan 5	2,00	22-Mar-22	< Bulan ke-4	3,00

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN EVALUASI KINERJA (Lanjutan)**

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Penyampaian RKAP

Sesuai ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998, pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1998, RUPS dalam pengesahan rancangan RKAP tahunan harus sudah diterima 60 hari sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan.

Aspek Administrasi	2022			2021		
	Tanggal	Indikator	Skor	Tanggal	Indikator	Skor
Penyampaian RKAP kepada Pemegang Saham	30-Okt-21	≥ 2 Bulan	3,00	30-Okt-20	> 2 Bulan	3,00

3. Penyampaian Laporan Periodik

Laporan periodik Triwulanan harus sudah diterima oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan. Kinerja administrasi diukur dari keterlambatan penyampaian laporan periodik setelah berakhirnya masa penyampaian laporan periodik untuk periode yang bersangkutan.

Laporan Periodik yang dimaksud adalah:

- Laporan Triwulan I yang berakhir pada tanggal 31 Maret;
- Laporan Triwulan II yang berakhir pada tanggal 30 Juni;
- Laporan Triwulan III yang berakhir pada tanggal 30 September; dan
- Laporan Triwulan IV yang berakhir pada tanggal 31 Desember.

Aspek Administrasi	2022			2021		
	Tanggal	Indikator	Skor	Tanggal	Indikator	Skor
Triwulan I	28-Apr-22	30-Apr-22	3,00	28-Apr-21	30-Apr-21	3,00
Triwulan II	29-Jul-22	31-Jul-22	3,00	31-Jul-21	31-Jul-21	3,00
Triwulan III	28-Okt-22	31-Okt-22	3,00	27-Okt-21	31-Okt-21	3,00
Triwulan IV	26-Jan-23	31-Jan-23	3,00	28-Jan-22	31-Jan-22	3,00
Rata-Rata Skor Kinerja			3,00			3,00

4. Pengukuran kinerja PUMK

Pengukuran kinerja PUMK didasarkan atas Laporan Auditor Independen atas Laporan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil tahun 2022 dan 2021. Pengukuran kinerja PUMK dibagi dalam dua indikator, yaitu:

a. Efektivitas Penyaluran Dana Pinjaman Kemitraan

	2022	2021
Dana yang Disalurkan	7.066.650	7.070.575
Dana yang Tersedia	7.216.128	7.530.807
Nilai Kinerja Keuangan	97,93%	93,89%
Skor Kinerja Keuangan	3,00	3,00

b. Kolektibilitas Penyaluran Dana Pinjaman Kemitraan

	2022	2021
Kolektibilitas Pinjaman	16.989.274	17.492.050
Pinjaman yang Disalurkan	20.995.029	22.419.025
Nilai Kinerja Keuangan	80,92%	78,02%
Skor Kinerja Keuangan	3,00	3,00

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN EVALUASI KINERJA (Lanjutan)**

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Ringkasan Tingkat Kesehatan BUMN dari Aspek Administrasi:

No	Aspek Administrasi	Skor Maks	2022		2021	
			Indikator	Skor	Indikator	Skor
1.	Penyampaian Laporan Perhitungan Tahunan (Audit) kepada Pemegang Saham	3	≤ bulan 5	2,00	< Bulan ke-4	3,00
2.	Penyampaian RKAP kepada Pemegang Saham	3	≥ 2 Bulan	3,00	> 2 Bulan	3,00
3.	Penyampaian Laporan Periodik	3	Keterlambatan ≤ 0 Hari	3,00	Keterlambatan ≤ 0 Hari	3,00
4.	Laporan PUMK					
	a. Efektifitas Penyaluran Dana Pinjaman Kemitraan	3	97,93%	3,00	93,89%	3,00
	b. Kolektibilitas Penyaluran Dana Pinjaman Kemitraan	3	80,92%	3,00	78,02%	3,00
	Jumlah	15		14,00		15,00

d. Skor Tingkat kesehatan

Ringkasan atas total skor dari pengukuran ketiga aspek kinerja di atas adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Skor	2022	2021
1.	Aspek Keuangan	50	39,00	24,50
2.	Aspek Operasi	35	35,00	32,60
3.	Aspek Administrasi	15	14,00	15,00
	Jumlah	100	88,00	72,10
	Kualifikasi		AA	A
	Kategori		Sehat	Sehat

Hasil perhitungan atas Tingkat Kesehatan BUMN Perusahaan tahun 2022 sebesar 88,00 berada pada kategori Sehat dengan Kualifikasi AA, mengalami peningkatan dari total skor sebesar 72,10 pada tahun 2021.



PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

JL. Perintis Kemerdekaan No. 1
Bandung 40117
PO Box 1163 Bandung 40000
Telp : 022-4230031,4230039
Teleks : 28263, 28358
Fax : 022-4203342 Toka 10039

Website : www.kai.id
Email : kontak_pelanggan@kereta-api.co.id